PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

TA. 2025



KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 279 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan otonomi daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunan ekonomi, dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik; menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis; mengurangi ketimpangan antar daerah; mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.

Kesungguhan Pemerintah Pusat untuk melakukan desentralisasi fiskal tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah, yang bertujuan untuk: memperkuat desentralisasi fiskal; mewujudkan kesejahteraan masyarakat; mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif; memperkuat sinergi fiskal nasional; meningkatkan kualitas belanja di daerah dan pemerataan layanan.

Kewenangan atas pengelolaan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat menuntut Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan atau berkewajiban untuk: mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 191 ayat 2 yang menegaskan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Olehnya itu Pemerintah Kabupaten Majene sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan menyusun laporan keuangan daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan pemerintah daerah ini disusun sebagai instrumen utama untuk menggambarkan kondisi keuangan daerah secara wajar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di mana kebijakan penyusunan laporan keuangan diarahkan pada penerapan prinsip *good governance*, melalui penyajian informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan dapat dipercaya. Setiap perangkat daerah didorong untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan konsistensi dalam pencatatan serta pelaporan keuangan, menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Dengan keterpaduan tersebut, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan kualitas belanja daerah yang pada akhirnya mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang sesungguhnya.

LKPD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan yang meliputi : (a) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja; (b) Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Arus Kas; (e) Laporan Operasional; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Majene dalam menyusun LKPD Tahun Anggaran 2025 ini telah menyajikan laporan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dengan memuat semua data material dan informasi yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Seluruh transaksi yang material telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Dengan mengedepankan aspek keandalan dalam penyajian laporan, transaksi-transaksi dilaksanakan telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai dengan mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan terhadap pos-pos anggaran baik pada akun pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran telah dijelaskan secara memadai.

Dalam rangka mewujudkan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kami atas Pemerintah Daerah Kabupaten Majene menyadari bahwa laporan keuangan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan serta pemangku kepentingan lainnya menjadi perhatian penting. Akhir kata, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Majene mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta, berkontribusi dalam proses penyusunan laporan keuangan ini. Semoga Laporan Keuangan Daerah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan serta peningkatan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Majene di masa yang akan datang.

BUPATI MAJENE

Dr. H. A. ACHMAD SYUKRI, SE., M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Ringkasan

RINGKASAN

Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Majene menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan ini disusun berdasarkan konsolidasian antara Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan menggunakan sistem aplikasi daring dan terintegrasi yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). Berikut kami paparkan ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025.

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2025 dengan realisasinya dan menyajikan ikhtisar informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan daerah selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 tercatat senilai Rp881.015.994.509,59 atau mencapai 97,21 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp906.226.956.217,00. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp101.790.979.525,59 Pendapatan Transfer senilai Rp779.225.014.984,00. Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan Rp19.759.884.672,48 atau senilai 2,19 persen jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yang tercatat senilai Rp900.775.879.182,07.

Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp863.664.601.041,78 atau menurun 4,49 persen dari realisasi tahun sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2024 yang tercatat senilai Rp904.311.515.312,78. Realisasi Belanja dan Transfer tersebut terdiri dari realisasi Belanja senilai Rp760.927.584.227,78 dan Transfer senilai Rp102.737.016.814,00. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja dan Transfer, maka terdapat Surplus anggaran senilai Rp17.351.393.467,81, untuk realisasi penerimaan pembiayaan senilai Rp4.835.526.092,69 dan pengeluaran pembiayaan senilai Rp500.000.000,00 maka nilai SiLPA senilai Rp21.686.919.560,50. Ringkasan Laporan Realisasi APBD TA 2025 dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan	906.226.956.217,00	881.015.994.509,59	97,21	900.775.879.182,07
Belanja	801.053.657.952,69	760.927.584.227,78	94,99	800.547.156.947,78
Transfer	109.508.794.961,00	102.737.016.814,00	93,81	103.764.358.365,00
Surplus/(Defisit)	(4.335.496.696,69)	17.351.393.467,81	(400,21)	(3.535.636.130,71)
Pembiayaan Neto	4.335.496.696,69	4.335.526.092,69	100,00	8.371.132.827,40
SiLPA/SiKPA	**0,00**	**21.686.919.560,50**	**0,00**	**4.835.496.696,69**

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir per 31 Desember 2025 direalisasikan senilai Rp21.686.919.560,50. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp16.851.422.863,81 atau 348,49 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2024 dimana Saldo Anggaran Lebih Akhir tercatat senilai Rp4.835.496.696,69. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2025 dapat dilihat dengan rincian mutasi sebagaimana dalam laporan berikut ini.

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	**4.835.496.696,69**	**8.475.746.848,64**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	4.835.526.092,69	8.371.132.827,40
Sub Total	(29.396,00)	**104.614.021,24**
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SIKPA)	21.686.919.560,50	4.835.496.696,69
Sub Total	21.686.890.164,50	**4.940.110.717,93**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	29.396,00	(104.614.021,24)
Lain–Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**21.686.919.560,50**	**4.835.496.696,69**

3. Neraca

Jumlah Aset per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.615.327.299.951,19 yang terdiri dari Aset Lancar senilai Rp51.150.313.248,78, Investasi Jangka Panjang senilai Rp67.455.648.023,10, Aset Tetap senilai Rp1.475.883.616.947,45 , Aset Lainnya senilai Rp10.021.848.510,86 dan Properti Investasi senilai Rp10.815.873.221,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp50.294.367.073,00 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek senilai Rp50.294.367.073,00 dan Kewajiban Jangka Panjang senilai Rp0,00. Dengan demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.565.032.932.878,19. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

Posisi Neraca	31-Des-2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)
Aset Lancar	51.150.313.248,78	44.471.142.447,85
Investasi Jangka Panjang	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67
Aset Tetap	1.475.883.616.947,45	1.547.906.920.646,29
Aset Lainnya	10.021.848.510,86	10.595.796.785,87
Properti Investasi	10.815.873.221,00	**0,00**
Jumlah Aset	**1.615.327.299.951,19**	**1.671.758.852.161,68**
Kewajiban Jangka Pendek	50.294.367.073,00	69.521.069.677,33
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	**50.294.367.073,00**	**69.521.069.677,33**
Ekuitas	1.565.032.932.878,19	1.602.237.782.484,35
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**1.615.327.299.951,19**	**1.671.758.852.161,68**

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Majene untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah, Pendapatan-LO adalah senilai Rp847.706.615.831,17, Beban senilai Rp880.695.215.211,42, sehingga Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp32.988.599.380,25) setelah itu terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional senilai (Rp2.306.566.437,57) dan Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa senilai (Rp2.499.579.085,00) sehingga nilai Surplus/(Defisit)-LO adalah senilai (Rp37.794.744.902,82).

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
Pendapatan-LO	847.706.615.831,17	850.414.371.243,55
Beban	880.695.215.211,42	882.299.940.615,95
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(32.988.599.380,25)	(31.885.569.372,40)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(2.306.566.437,57)	3.792.996.469,07
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	(2.499.579.085,00)	(518.665.643,00)
Surplus/(Defisit)-LO	**(37.794.744.902,82)**	**(28.611.238.546,33)**

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan Saldo Akhir kas selama satu Tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas arus kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2025.

Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas Kabupaten Majene periode 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	55.134.672.208,81	65.687.381.462,47
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(38.283.278.741,00)	(69.223.017.593,18)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	26.843.710,00	(95.321.122,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas	**16.878.237.177,81**	**(3.630.957.252,71)**

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi Ekuitas dan Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 berasal dari Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya sepanjang periode Tahun 2025. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 adalah senilai Rp1.565.032.932.878,19.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
EKUITAS AWAL	**1.602.237.782.484,35**	**1.628.208.973.061,58**
SURPLUS/DEFISIT-LO	(37.794.744.902,82)	(28.611.238.546,33)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	74.096.666,85
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	589.895.296,66	2.565.951.302,25
EKUITAS AKHIR	**1.565.032.932.878,19**	**1.602.237.782.484,35**

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan

BUPATI MAJENE

Dr. H. A. ACHMAD SYUKRI, SE., M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Majene, 25 Mei 2026
BUPATI MAJENE

Dr. H. A. ACHMAD SYUKRI, SE., M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Daftar Isi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GRAFIK xv
DAFTAR LAMPIRAN xvii
I. LAPORAN REALISASI APBD 1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 5
III. NERACA 6
IV. LAPORAN OPERASIONAL 9
V. LAPORAN ARUS KAS 12
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 15
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 16
BAB I PENDAHULUAN 16
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 16
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 18
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 19
BAB II GAMBARAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL 21
2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 21
2.2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene 36
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 44
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 61
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 61
3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian 90
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 95
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 95
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 95
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 96
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai SAP 119
4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu 121
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 126
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 126
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 176
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca 180
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional 239
5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas 261
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 268
BAB VI KEWAJIBAN KONTIJENSI 273
BAB VII PENUTUP 274
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 23
Tabel 2.2 Perkembangan dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Majene Tahun 2015 – 2025..... 23
Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Majene (Miliar Rupiah) Tahun 2020–2024 24
Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Majene (Miliar Rupiah) Tahun 2020–2024 25
Tabel 2.5 Tingkat Inflasi Umum Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2024 27
Tabel 2.6 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Majene 28
Tabel 2.7 Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 32
Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Se-Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 36
Tabel 2.9 Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022-2026 39
Tabel 2.10 Realisasi Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 - 2026 42
Tabel 2.11 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 - 2026 44
Tabel 2.12 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2025..... 45
Tabel 2.13 Perbandingan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tahun 2025 49
Tabel 2.14 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tahun 2025 50
Tabel 2.15 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2025 51
Tabel 3.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Kelompok Pendapatan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025..... 66
Tabel 3.2 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025..... 68
Tabel 3.3 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Dana Perimbangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025..... 69
Tabel 3.4 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 71
Tabel 3.5 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025..... 72
Tabel 3.6 Rekapitulasi Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 72

Tabel 3.7 Rekapitulasi Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Majene Tahun 2025 ... 74
Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 ... 74
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 ... 75
Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 ... 75
Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Transfer Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 ... 76
Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 ... 77
Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 ... 77
Tabel 3.14 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 ... 79
Tabel 3.15 Realisasi Mandatory Spending Bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023-2025 ... 81
Tabel 3.16 Realisasi Mandatory Spending Bidang Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023-2025 ... 82
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2023-2025 ... 83
Tabel 3.18 Realisasi Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023-2025 84
Tabel 3.19 Alokasi Anggaran Bidang Pengawasan Kabupaten Majene Tahun 2023-2025.. 87
Tabel 3.20 Alokasi Anggaran Mengantisipasi Dampak Inflasi Kabupaten Majene Tahun 2023-2025 ... 89
Tabel 4.1 Masa Manfaat Aset Tetap ... 105
Tabel 4.2 Batas Kapitalisasi Aset Tetap ... 107
Tabel 4.3 Masa Manfaat Amortisasi Aset Tak Berwujud ... 110
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan - LRA TA 2024 dan 2025 ... 127
Tabel 5.2 Pendapatan – LRA ... 128
Tabel 5.3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah ... 129
Tabel 5.4 Kriteria Rasio Efektivitas Daerah ... 131
Tabel 5.5 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan ... 132
Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah ... 133
Tabel 5.7 Pendapatan Pajak Daerah ... 134
Tabel 5.8 Pendapatan Retribusi Daerah ... 136

Tabel 5.9 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 139
Tabel 5.10 Pendapatan Transfer 141
Tabel 5.11 Dana Bagi Hasil (DBH) 143
Tabel 5.12 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2025 144
Tabel 5.13 Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik TA 2025 145
Tabel 5.14 Pendapatan Bagi Hasil 147
Tabel 5.15 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA 148
Tabel 5.16 Rincian Belanja Menurut Jenis 149
Tabel 5.17 Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Organisasi 151
Tabel 5.18 Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Fungsi 153
Tabel 5.19 Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Wajib 155
Tabel 5.20 Belanja Operasi 156
Tabel 5.21 Belanja Pegawai 157
Tabel 5.22 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 157
Tabel 5.23 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 158
Tabel 5.24 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 158
Tabel 5.25 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 159
Tabel 5.26 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 160
Tabel 5.27 Belanja Barang dan Jasa 161
Tabel 5.28 Belanja Hibah Tahun 2025 163
Tabel 5.29 Daftar Realisasi Belanja Hibah Berdasarkan SKPD 163
Tabel 5.30 Belanja Modal 166
Tabel 5.31 Belanja Modal Tanah 166
Tabel 5.32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 167
Tabel 5.33 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 168
Tabel 5.34 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 168
Tabel 5.35 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 169
Tabel 5.36 Belanja Tak Terduga 170
Tabel 5.37 Belanja Transfer 172
Tabel 5.38 Perhitungan Pembiayaan Neto 173
Tabel 5.39 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 174
Tabel 5.40 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 176
Tabel 5.41 Laporan Perubahan Saldo Anggaran 177

Tabel 5.42 Rincian Koreksi Saldo Kas atas Kesalahan Pembukuan di Tahun Sebelumnya. 179
Tabel 5.43 Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2025 dan 2024 180
Tabel 5.44 Selisih Kas di Kas Daerah..... 186
Tabel 5.45 Saldo Kas di Kas Daerah di Rekening Giro Kasda..... 187
Tabel 5.46 Daftar Saldo Rekening..... 188
Tabel 5.47 Kas di Bendahara BLUD 189
Tabel 5.48 Daftar Rincian Kas Lainnya atas Pajak Belum Setor..... 190
Tabel 5.49 Daftar Rincian Jasa Giro pada Rekening PPTK dan Sekolah..... 191
Tabel 5.50 Daftar Saldo Kas BOK Puskesmas Per 31 Desember 2025..... 192
Tabel 5.51 Piutang Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024..... 194
Tabel 5.52 Daftar Piutang Pajak Daerah..... 195
Tabel 5.53 Daftar Piutang Retribusi Daerah 195
Tabel 5.54 Daftar Piutang Transfer Antar Daerah 196
Tabel 5.55 Daftar Piutang Lainnya 197
Tabel 5.56 Daftar Penyisihan Piutang..... 198
Tabel 5.57 Daftar Rincian Persediaan..... 198
Tabel 5.58 Rincian Persediaan per SKPD Tahun 2025 199
Tabel 5.59 Daftar Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 200
Tabel 5.60 Daftar Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2025 200
Tabel 5.61 Rincian Kepemilikan Modal Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2025..... 201
Tabel 5.62 Mutasi Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Tahun 2025..... 202
Tabel 5.63 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025..... 204
Tabel 5.64 Tabel Penambahan dan Pengurangan Aset tetap TA 2025 205
Tabel 5.65 Tabel Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Tanah..... 206
Tabel 5.66 Daftar Objek Lokasi Pembangunan Gerai KDMP..... 207
Tabel 5.67 Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 209
Tabel 5.68 Tabel Mutasi Tambah/Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin 209
Tabel 5.69 Mutasi Masuk Peralatan Akibat Mutasi antar SKPD..... 210
Tabel 5.70 Mutasi Keluar Peralatan Mesin Akibat Mutasi antar SKPD..... 212
Tabel 5.71 Rincian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 214
Tabel 5.72 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Gedung dan Bangunan 215
Tabel 5.73 Mutasi Masuk atas Pengakuan Hutang Belanja Gedung dan Bangunan 216
Tabel 5.74 Mutasi Masuk Gedung dan Bangunan Akibat Mutasi antar SKPD..... 216

Tabel 5.75 Mutasi Keluar Gedung dan Bangunan Akibat Mutasi antar SKPD 217
Tabel 5.76 Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 218
Tabel 5.77 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 219
Tabel 5.78 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 221
Tabel 5.79 Mutasi Tambah/Mutasi Kurang atas Aset Tetap Lainnya..... 222
Tabel 5.80 Tabel Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan..... 222
Tabel 5.81 Rincian Jenis Barang Konstruksi Dalam Pengerjaan..... 223
Tabel 5.82 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap..... 224
Tabel 5.83 Rincian Tagihan Jangka Panjang Tahun 2025..... 226
Tabel 5.84 Mutasi Tambah/Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud..... 227
Tabel 5.85 Aset Tak Berwujud dan Amortisasi..... 228
Tabel 5.86 Rincian Jenis Barang Aset Tak Berwujud 228
Tabel 5.87 Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 229
Tabel 5.88 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain..... 230
Tabel 5.89 Rincian Properti Investasi 231
Tabel 5.90 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025..... 232
Tabel 5.91 Tren Rasio Solvabilitas – Debt to Equity Kabupaten Majene 2021-2025 233
Tabel 5.92 Tren Rasio Solvabilitas – Debt to Assets Kabupaten Majene 2021-2025 234
Tabel 5.93 Daftar Utang PFK per 31 Desember 2025..... 234
Tabel 5.94 Rincian utang perhitungan pihak ketiga..... 235
Tabel 5.95 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 236
Tabel 5.96 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Perjanjian Sewa Lahan 236
Tabel 5.97 Rincian Utang Perjenis Belanja Tahun 2020 s.d. 2025..... 237
Tabel 5.98 Utang Belanja Menurut Jenisnya s.d. 31 Desember 2025..... 237
Tabel 5.99 Saldo Ekuitas 2025..... 239
Tabel 5.100 Rincian Pendapatan LO 242
Tabel 5.101 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO..... 243
Tabel 5.102 Rincian Pendapatan Transfer – LO..... 245
Tabel 5.103 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO 246
Tabel 5.104 Rincian Beban Laporan Operasional 247
Tabel 5.105 Beban Pegawai..... 247
Tabel 5.106 Beban Barang..... 249

Tabel 5.107 Transaksi Memengaruhi Saldo Beban Persediaan di Tahun 2025 250
Tabel 5.108 Rincian Beban Jasa Per SKPD 251
Tabel 5.109 Beban Jasa Per Jenis 252
Tabel 5.110 Rincian Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2025 252
Tabel 5.111 Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025 253
Tabel 5.112 Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025 per SKPD 253
Tabel 5.113 Beban Barang dan Jasa BLUD 255
Tabel 5.114 Beban Hibah – LO Tahun 2025 256
Tabel 5.115 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2025 257
Tabel 5.116 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 257
Tabel 5.117 Beban Transfer - LO 258
Tabel 5.118 Rincian atas Peristiwa Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO 258
Tabel 5.119 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa 259
Tabel 5.120 Posisi Arus Kas Bersih Berdasarkan Aktivitas 261
Tabel 5.121 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 263
Tabel 5.122 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 265
Tabel 5.123 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 266
Tabel 5.124 Saldo Akhir Kas 267
Tabel 5.125 Rincian Saldo Akhir Kas 268
Tabel 5.126 Surplus/Defisit LO per SKPD 269
Tabel 5.127 Koreksi yang Langsung Menambah Ekuitas 270
Tabel 5.128 Koreksi yang Langsung Mengurangi Ekuitas 270

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Regional Provinsi Sulawesi Barat, dan Kabupaten Majene Tahun 2018-2024 22
Grafik 2.2 Tingkat Inflasi Regional Tahun 2015-2024..... 27
Grafik 2.3 Grafik Penduduk Miskin Kabupaten Majene Periode 2020-2024..... 29
Grafik 2.4 Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Majene, Provinsi dan Nasional Periode 2020-2024 30
Grafik 2.5 Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majene, Provinsi dan Nasional Periode 2020-2024 31
Grafik 2.6 Perkembangan TPT Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 33
Grafik 2.7 Posisi Relatif TPT Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 33
Grafik 2.8 Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 34
Grafik 2.9 Perbandingan Indeks Gini antara Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024..... 35
Grafik 3.1 Capaian Target dan Realisasi Pendapatan 67
Grafik 3.2 Komposisi Capaian Realisasi Tiap Komponen Pendapatan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 67
Grafik 3.3 Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 68
Grafik 3.4 Persentase Capaian Target Pendapatan Transfer Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 70
Grafik 5.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025..... 127
Grafik 5.2 Tren Rasio Kemandirian Kabupaten Majene Tahun 2021-2025 130
Grafik 5.3 Tren Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025 131
Grafik 5.4 Tren Rasio Efisiensi Kabupaten Majene Tahun 2021-2025..... 132
Grafik 5.5 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Majene TA 2025 133
Grafik 5.6 Komposisi Pendapatan Transfer..... 142
Grafik 5.7 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021-2025..... 148
Grafik 5.8 Perkembangan Belanja dan Transfer Tahun 2021-2025 150
Grafik 5.9 Komposisi Belanja Daerah Menurut Fungsi Tahun 2025 153
Grafik 5.10 Komposisi Belanja Menurut Jenis TA 2025..... 154

Grafik 5.11 Perbandingan Belanja Modal Tahun 2021-2025 165
Grafik 5.12 Komposisi Belanja Modal per Jenis TA 2025 165
Grafik 5.13 Tren Perkembangan Belanja Tak terduga Kabupaten Majene Tahun 2021-2025 170
Grafik 5.14 Tren Perkembangan SiLPA Kabupaten Majene 2020-2025 175
Grafik 5.15 Tren Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kabupaten Majene Tahun 2021-2025 179
Grafik 5.16 Perkembangan Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Tahun 2021-2025 181
Grafik 5.17 Komposisi Aset Kabupaten Majene Tahun 2025 181
Grafik 5.18 Perkembangan Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025 183
Grafik 5.19 Perkembangan Rasio Cepat (Quick Ratio) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025 184
Grafik 5.20 Perkembangan Rasio Kas (Cash Ratio) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025 185
Grafik 5.21 Komposisi Piutang TA 2025 193
Grafik 5.22 Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025 203
Grafik 5.23 Komposisi Aset Tetap berdasarkan Jenisnya 205
Grafik 5.24 Grafik Perkembangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin 208
Grafik 5.25 Aset Tetap Gedung dan Bangunan 215
Grafik 5.26 Komposisi Kewajiban Jangka Pendek 2025 232
Grafik 5.27 Perkembangan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya 2021-2025 238
Grafik 5.28 Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2023-2025 240
Grafik 5.29 Kegiatan Operasional 2023-2025 241
Grafik 5.30 Komposisi Pendapatan – LO TA 2025 242
Grafik 5.31 Komponen Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Majene TA 2025 243
Grafik 5.32 Perbandingan Beban Operasi TA 2025 246
Grafik 5.33 Tren Perkembangan Surplus/Defisit-LO Kabupaten Majene 2021-2025 260
Grafik 5.34 Komposisi Arus Kas Bersih Tahun 2021 s.d. 2025 261
Grafik 5.35 Tren Perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Kabupaten Majene 2021-2025 262
Grafik 5. 36 Tren Perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Kabupaten Majene 2021-2025 264
Grafik 5. 37 Tren Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene 2021-2025 271

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Lampiran 2 Daftar Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Lampiran 3 Daftar Piutang dan Penyisihannya Per 31 Desember 2025

Lampiran 4 Daftar Sisa Persediaan Per 31 Desember 2025

Lampiran 5 Daftar Dana Bergulir Per 31 Desember 2025

Lampiran 6 Daftar Utang PFK Per 31 Desember 2025

Lampiran 7 Rekapitulasi Utang Perjenis Belanja Masing-Masing SKPD

Lampiran 8 Daftar Jenis Utang, Tahun, dan SKPD Per 31 Desember 2025

Lampiran 9 Saldo Utang Belanja Per SKPD Per 31 Desember 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No. Urut	Uraian	Ref	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Realisasi 2024
1	**PENDAPATAN - LRA**	**5.1.1.**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	**5.1.1.1.**				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1.	24.265.113.570,00	16.467.904.514,25	67,86	11.783.885.632,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	5.1.1.1.2.	82.889.435.754,00	75.411.226.265,00	90,97	75.254.820.161,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	5.1.1.1.3.	3.534.611.072,00	3.534.611.072,00	100,00	3.327.191.183,00
6	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	5.1.1.1.4.	6.269.065.647,00	6.377.237.674,34	101,72	2.102.364.233,07
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LRA**	**5.1.1.1.**	**116.958.226.043,00**	**101.790.979.525,59**	**87,03**	**92.468.261.209,07**
8	**PENDAPATAN TRANSFER – LRA**	**5.1.1.2.**				
9	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LRA**	**5.1.1.2.1.**				
10	**DANA PERIMBANGAN – LRA**		715.688.574.000,00	712.396.005.533,00	99,53	727.959.737.110,00
11	Dana Bagi Hasil – LRA	5.1.1.2.1.1	5.826.710.000,00	5.634.568.300,00	96,70	6.639.074.000,00
12	Dana Alokasi Umum – LRA	5.1.1.2.1.2	535.243.742.000,00	544.376.636.960,00	101,70	548.935.022.195,00
13	Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA	5.1.1.2.1.3	24.453.962.000,00	24.111.344.842,00	98,59	41.802.623.094,00
14	Dana Alokasi Khusus Nonfisik – LRA	5.1.1.2.1.3	150.164.160.000,00	138.273.455.431,00	92,08	130.583.017.821,00
15	**Jumlah Dana Perimbangan – LRA**		**715.688.574.000,00**	**712.396.005.533,00**	**99,53**	**727.959.737.110,00**
16	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA – LRA**		52.655.853.000,00	47.727.678.768,00	90,64	55.820.851.000,00
17	Dana Insentif Daerah – LRA	5.1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Desa – LRA	5.1.1.2.1.5	52.655.853.000,00	47.727.678.768,00	90,64	55.820.851.000,00

No. Urut	Uraian	Ref	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Realisasi 2024
19	**Jumlah Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA**		**52.655.853.000,00**	**47.727.678.768,00**	**90,64**	**55.820.851.000,00**
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**5.1.1.2.1.**	**768.344.427.000,00**	**760.123.684.301,00**	**98,93**	**783.780.588.110,00**
21	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH – LRA**					
22	Pendapatan Bagi Hasil – LRA	5.1.1.2.2.1	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	91,28	24.527.029.863,00
23	Bantuan Keuangan – LRA	5.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Jumlah Transfer Antar Daerah – LRA**	**5.1.1.2.2.**	**20.924.303.174,00**	**19.101.330.683,00**	**91,28**	**24.527.029.863,00**
25	**Jumlah Pendapatan Transfer – LRA**	**5.1.1.2.**	**789.268.730.174,00**	**779.225.014.984,00**	**98,72**	**808.307.617.973,00**
26	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA**					
27	Pendapatan Hibah – LRA	5.1.1.3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA**	**5.1.1.3.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**JUMLAH PENDAPATAN – LRA**	**5.1.1.**	**906.226.956.217,00**	**881.015.994.509,59**	**97,21**	**900.775.879.182,07**
30	**BELANJA**					
31	**BELANJA OPERASI**					
32	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	467.875.356.954,00	451.753.620.104,00	96,55	424.459.751.438,00
33	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	276.845.340.309,69	259.163.085.597,78	93,61	267.189.138.109,60
34	Belanja Hibah	5.1.2.1.3.	10.156.348.000,00	9.648.530.900,00	95,00	38.275.918.405,00
35	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4.	63.360.000,00	59.040.000,00	93,18	63.360.000,00
36	**Jumlah Belanja Operasi**	**5.1.2.1.**	**754.940.405.263,69**	**720.624.276.601,78**	**95,45**	**729.988.167.952,60**
37	**BELANJA MODAL**					
38	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1.	861.471.700,00	732.371.100,00	85,01	1.053.059.242,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	8.383.182.681,00	5.004.809.348,00	59,70	11.393.369.748,00
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	24.642.236.887,00	23.797.538.257,00	96,57	33.605.479.353,00

No. Urut	Uraian	Ref	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Realisasi 2024
41	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4.	8.963.076.421,00	7.906.104.836,00	88,20	23.121.034.250,18
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	323.285.000,00	322.905.000,00	99,88	56.000.000,00
43	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6.	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
44	**Jumlah Belanja Modal**	**5.1.2.2.**	**43.213.252.689,00**	**37.803.728.541,00**	**87,48**	**69.228.942.593,18**
45	**BELANJA TAK TERDUGA**					
46	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	86,19	1.330.046.402,00
47	**Jumlah Belanja Tak Terduga**	**5.1.2.3.**	**2.900.000.000,00**	**2.499.579.085,00**	**86,19**	**1.330.046.402,00**
48	**JUMLAH BELANJA**		**801.053.657.952,69**	**760.927.584.227,78**	**94,99**	**800.547.156.947,78**
49	**TRANSFER**					
50	**TRANSFER BAGI HASIL**					
51	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.	2.048.029.357,00	679.215.030,00	33,16	0,00
52	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.	648.674.900,00	173.885.312,00	26,80	0,00
53	**Jumlah Transfer Bagi Hasil**		**2.696.704.257,00**	**853.100.342,00**	**31,63**	**0,00**
54	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**					
55	Bantuan Keuangan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
56	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.	106.712.090.704,00	101.783.916.472,00	95,38	103.764.358.365,00
57	**Jumlah Transfer Bantuan Keuangan**		**106.812.090.704,00**	**101.883.916.472,00**	**95,38**	**103.764.358.365,00**
58	**JUMLAH TRANSFER**	**5.1.2.4.**	**109.508.794.961,00**	**102.737.016.814,00**	**93,81**	**103.764.358.365,00**
59	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER**	**5.1.2.**	**910.562.452.913,69**	**863.664.601.041,78**	**94,84**	**904.311.515.312,78**
60	**SURPLUS / (DEFISIT)**		**(4.335.496.696,69)**	**17.351.393.467,81**	**(400,21)**	**(3.535.636.130,71)**

No. Urut	Uraian	Ref	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Realisasi 2024
61	**PEMBIAYAAN**	**5.1.3.**				
62	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.3.1.**				
63	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.	4.835.496.696,69	4.835.526.092,69	100,00	8.371.132.827,40
64	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**		**4.835.496.696,69**	**4.835.526.092,69**	**100,00**	**8.371.132.827,40**
66	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.3.2.**				
67	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**		**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
70	**PEMBIAYAAN NETO**	**5.1.3.3.**	**4.335.496.696,69**	**4.335.526.092,69**	**100,00**	**8.371.132.827,40**
71	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)**	**5.1.3.4.**	**0,00**	**21.686.919.560,50**	**0,00**	**4.835.496.696,69**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI MAJENE

Dr. H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M .

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	4.835.496.696,69	8.475.746.848,64
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2.	4.835.526.092,69	8.371.132.827,40
3	**Sub Total**		**(29.396,00)**	**104.614.021,24**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)	5.2.3.	21.686.919.560,50	4.835.496.696,69
5	**Sub Total**		**21.686.890.164,50**	**4.940.110.717,93**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4.	29.396,00	(104.614.021,24)
7	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	**5.2.5.**	**21.686.919.560,50**	**4.835.496.696,69**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI MAJENE

Dr. H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	**5.3.1.1.**		
Kas dan Setara Kas	**5.3.1.1.1.**	**21.727.604.509,50**	**4.849.337.935,69**
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1.	15.999.375.461,40	51.385.522,63
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2.	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3.	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4.	4.276.865.432,10	4.769.301.860,10
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.5.	374.521.000,00	0,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6.	40.710.043,00	28.650.552,96
Setara Kas	5.3.1.1.1.7.	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.8.	1.036.132.573,00	0,00
Piutang	**5.3.1.1.2.**	**4.374.161.694,40**	**7.408.588.830,94**
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1.	7.557.256.778,40	7.071.388.398,40
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.6.	(6.439.654.637,17)	(6.002.111.838,80)
Piutang Pajak Daerah Neto		**1.117.602.141,23**	**1.069.276.559,60**
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2.	1.134.548.117,00	1.184.109.860,00
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.6.	(612.423.416,78)	(458.508.815,50)
Piutang Retribusi Daerah Neto		**522.124.700,22**	**725.601.044,50**
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.3.	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.6.	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Neto		**0,00**	**0,00**
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.3.1.1.2.4.	2.370.353.184,00	5.641.920.831,00
Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.3.1.1.2.6.	(11.851.765,91)	(28.209.604,16)
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Netto		**2.358.501.418,09**	**5.613.711.226,84**
Piutang Pendapatan Lainnya	5.3.1.1.2.5.		580.153.629,44
Penyisihan Pendapatan lainnya	5.3.1.1.2.5.		(580.153.629,44)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.1.2.5.	56.999.299,04	56.999.299,04
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.1.2.5.	(56.999.299,04)	(56.999.299,04)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.2.5.	887.976.878,00	523.154.330,40
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.2.5.	(512.043.443,14)	(523.154.330,40)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	5.3.1.1.2.5.	375.933.434,86	0,00
Beban Dibayar Dimuka	**5.3.1.1.3.**	**104.545.912,40**	**104.545.912,40**
Persediaan	**5.3.1.1.4.**	**24.944.001.132,48**	**32.108.669.768,82**
JUMLAH ASET LANCAR	**5.3.1.1.**	**51.150.313.248,78**	**44.471.142.447,85**

Uraian	Ref	2025	2024
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Non Permanen - Dana Bergulir	5.3.1.2.1.	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.2.	(2.958.167.671,00)	(2.958.167.671,00)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		**0,00**	**0,00**
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.3.	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		67.455.648.023,10	68.784.992.281,67
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.1.2.**	**67.455.648.023,10**	**68.784.992.281,67**
ASET TETAP			
Tanah	5.3.1.3.1.	443.305.977.555,00	454.372.482.897,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2.	373.116.163.248,03	368.063.935.365,38
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3.	805.789.842.264,28	757.337.493.107,65
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4.	1.081.642.931.941,40	1.073.448.390.089,92
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5.	13.438.459.764,08	13.110.297.264,08
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6.	1.241.180.088,15	16.220.083.821,60
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7.	(1.242.650.937.913,49)	(1.134.645.761.899,34)
JUMLAH ASET TETAP	**5.3.1.3.**	**1.475.883.616.947,45**	**1.547.906.920.646,29**
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1.	334.283.791,00	334.283.791,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2.	5.502.518.065,00	8.725.895.231,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.2.	(3.084.883.983,00)	(5.254.689.810,00)
Aset Tak Berwujud Netto	5.3.1.4.2.	2.417.634.082,00	3.471.205.421,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3.	61.531.351.073,79	62.428.242.355,45
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.1.4.3.	(54.261.420.435,93)	(55.667.176.781,58)
Aset Lain-Lain Netto	5.3.1.4.3.	7.269.930.637,86	6.761.065.573,87
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.4.4.	0,00	29.242.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	**5.3.1.4.**	**10.021.848.510,86**	**10.595.796.785,87**
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi Tanah	5.3.1.5.1.	10.815.873.221,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**5.3.1.5.**	**10.815.873.221,00**	**0,00**
JUMLAH ASET	**5.3.1.**	**1.615.327.299.951,19**	**1.671.758.852.161,68**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1.	40.545.392,00	13.841.239,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2.	82.500.000,00	3.583.333,33
Utang Belanja	5.3.2.1.3.	50.171.321.681,00	69.503.645.105,00

Uraian	Ref	2025	2024
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4.	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.2.1.**	**50.294.367.073,00**	**69.521.069.677,33**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN	**5.3.2**	**50.294.367.073,00**	**69.521.069.677,33**
EKUITAS			
EKUITAS	**5.3.3.**	**1.565.032.932.878,19**	**1.602.237.782.484,35**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.615.327.299.951,19**	**1.671.758.852.161,68**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI MAJENE

Dr. H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Laporan Operasional (LO)

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

No. Urut	Uraian	Ref	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (penurunan)	Rasio (%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	**PENDAPATAN - LO**					
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**					
3	Pendapatan Pajak Daerah – LO	5.4.1.1.1.	16.953.772.894,25	12.164.320.098,00	4.789.452.796,25	39,37
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.1.	75.282.747.855,33	75.608.092.284,00	(325.344.428,67)	(0,43)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.1.	3.534.611.072,00	3.327.191.183,00	207.419.889,00	6,23
6	Lain-lain PAD yang Sah - LO	5.4.1.1.1	6.356.853.301,59	1.882.647.719,55	4.474.205.582,04	237,65
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LO**	**5.4.1.1.1.**	**102.127.985.123,17**	**92.982.251.284,55**	**9.145.733.838,62**	**9,84**
8	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**					
9	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN – LO**					
10	Dana Bagi Hasil – LO	5.4.1.1.2.	5.605.326.300,00	6.036.371.000,00	(431.044.700,00)	(7,14)
11	Dana Alokasi Umum – LO	5.4.1.1.2.	544.376.636.960,00	548.935.022.195,00	(4.558.385.235,00)	(0,83)
12	Dana Alokasi Khusus Fisik – LO	5.4.1.1.2.	24.111.344.842,00	41.802.623.094,00	(17.691.278.252,00)	(42,32)
13	Dana Alokasi Khusus Nonfisik – LO	5.4.1.1.2.	138.273.455.431,00	130.583.017.821,00	7.690.437.610,00	5,89
14	**Jumlah Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO**	**5.4.1.1.2**	**712.366.763.533,00**	**727.357.034.110,00**	**(14.990.270.577,00)**	**(2,06)**
15	Dana Insentif Daerah – LO		0,00	0,00	-	-
16	Dana Desa – LO		0,00	0,00	-	-
17	**Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO**		**0,00**	**0,00**	-	-
18	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH – LO**					
19	Pendapatan Bagi Hasil – LO	5.4.1.1.2.	15.829.763.036,00	28.841.548.575,00	(13.011.785.539,00)	(45,11)
20	Bantuan Keuangan – LO		0,00	0,00	-	-
21	**Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO**	**5.4.1.1.2.**	**15.829.763.036,00**	**28.841.548.575,00**	**(13.011.785.539,00)**	**(45,11)**

No. Urut	Uraian	Ref	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (penurunan)	Rasio (%)
22	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER – LO**	**5.4.1.1.2.**	**728.196.526.569,00**	**756.198.582.685,00**	**(28.002.056.116,00)**	**(3,70)**
23	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**					
24	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.1.3.	17.382.104.139,00	1.233.537.274,00	16.148.566.865,00	1.309,13
25	Lain-Lain Pendapatan Sesuai UU – LO		0,00	0,00		
26	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO**	**5.4.1.1.3.**	**17.382.104.139,00**	**1.233.537.274,00**	**16.148.566.865,00**	**1.309,13**
27	**JUMLAH PENDAPATAN – LO**	**5.4.1.1.**	**847.706.615.831,17**	**850.414.371.243,55**	**(2.707.755.412,38)**	**(0,32)**
28	**BEBAN**					
29	Beban Pegawai	5.4.1.2.1.	452.057.328.693,00	430.946.033.222,00	21.111.295.471,00	4,90
30	Beban Barang	5.4.1.2.2.	65.515.253.582,63	47.358.414.587,79	18.156.838.994,84	38,34
31	Beban Jasa	5.4.1.2.3.	64.428.117.169,00	67.412.320.035,00	(2.984.202.866,00)	(4,43)
32	Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.4.	16.280.052.167,78	11.198.663.296,00	5.081.388.871,78	45,37
33	Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.5.	15.494.004.886,00	21.974.998.320,00	(6.480.993.434,00)	(29,49)
34	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	5.4.1.2.6.	159.500.000,00	128.450.000,00	31.050.000,00	24,17
35	Beban Barang dan Jasa BOS	5.4.1.2.7.	24.247.376.270,00	25.397.107.624,00	(1.149.731.354,00)	(4,53)
36	Beban Barang dan Jasa BLUD	5.4.1.2.8.	68.327.845.830,71	74.780.614.810,57	(6.452.768.979,86)	(8,63)
37	Beban Hibah	5.4.1.2.9.	11.109.367.000,00	38.293.146.305,00	(27.183.779.305,00)	(70,99)
38	Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.10.	59.040.000,00	63.360.000,00	(4.320.000,00)	(6,82)
39	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.1.2.11.	114.358.997.167,50	108.864.386.901,29	5.494.610.266,21	5,05
40	Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.12.	606.386.783,80	704.124.143,32	(97.737.359,52)	(13,88)
41	Beban Transfer	5.4.1.2.13.	48.051.945.661,00	55.178.321.370,98	(7.126.375.709,98)	(12,92)
42	**JUMLAH BEBAN**	**5.4.1.2**	**880.695.215.211,42**	**882.299.940.615,95**	**(1.604.725.404,53)**	**(0,18)**
43	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**	**5.4.1.**	**(32.988.599.380,25)**	**(31.885.569.372,40)**	**(1.103.030.007,85)**	**3,46**
44	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO**					
	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	8.432.466.165,00	(8.432.466.165,00)	(100,00)
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		0,00	2.251.355.225,00	(2.251.355.225,00)	(100,00)

No. Urut	Uraian	Ref	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (penurunan)	Rasio (%)
	Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO		0,00	6.181.110.940,00	(6.181.110.940,00)	(100,00)
	Surplus Non Operasional Lainnya		1,00	-	1,00	(100,00)
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		**1,00**	**8.432.466.165,00**	**(8.432.466.164,00)**	**(100,00)**
	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO					
45	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		477.222.180,00	4.075.154.045,00	(3.597.931.865,00)	(88,29)
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		1.829.344.258,57	564.315.650,93	1.265.028.607,64	224,17
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		**2.306.566.438,57**	**4.639.469.695,93**	**(2.332.903.257,36)**	**(50,28)**
46	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**5.4.2.1.**	**(2.306.566.437,57)**	**3.792.996.469,07**	**(6.099.562.906,64)**	**(160,81)**
47	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**	**5.4.2.2.**	**(35.295.165.817,82)**	**(28.092.572.903,33)**	**(7.202.592.914,49)**	**25,64**
48	**POS LUAR BIASA**					
49	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	-	-
50	Beban Luar Biasa	5.4.3.1.	2.499.579.085,00	518.665.643,00	1.980.913.442,00	381,92
51	**POS LUAR BIASA**	**5.4.3.**	**(2.499.579.085,00)**	**(518.665.643,00)**	**(1.980.913.442,00)**	**381,92**
52	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**5.4.4.**	**(37.794.744.902,82)**	**(28.611.238.546,33)**	**(9.183.506.356,49)**	**32,10**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI MAJENE

Dr. H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Laporan Arus Kas (LAK)

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	Saldo 2025	Saldo 2024
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**			
2	**Arus Masuk Kas**			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.	16.467.968.514,25	11.783.885.632,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.	75.411.226.265,00	75.254.820.161,00
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.	3.534.611.072,00	3.327.191.183,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.	6.356.723.874,34	2.096.439.233,07
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.	3.519.130.300,00	6.639.074.000,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.	1.607.363.000,00	0,00
9	Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya	5.5.1	508.075.000,00	0,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.	544.376.636.960,00	548.935.022.195,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.	162.384.800.273,00	172.385.640.915,00
12	Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1.	0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Desa	5.5.1.	47.727.678.768,00	55.820.851.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.	19.101.330.683,00	24.527.029.863,00
15	Penerimaan Hibah	5.5.1.	0,00	0,00
16	**Jumlah Arus Masuk Kas**	**5.5.1.**	**880.995.544.709,59**	**900.769.954.182,07**
17	**Arus Keluar Kas**			
18	Pembayaran Pegawai	5.5.1.	451.753.620.104,00	424.459.751.438,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.	259.163.085.597,78	267.189.138.109,60
20	Pembayaran Hibah	5.5.1.	9.648.530.900,00	38.275.918.405,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.	59.040.000,00	63.360.000,00
22	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.	2.499.579.085,00	1.330.046.402,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	5.5.1.	679.215.030,00	0,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.	173.885.312,00	0,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan Umum	5.5.1.	100.000.000,00	0,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.5.1.	0,00	0,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	5.5.1.	101.783.916.472,00	103.764.358.365,00
28	**Jumlah Arus Keluar Kas**	**5.5.1.**	**825.860.872.500,78**	**835.082.572.719,60**
29	***Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi***	***5.5.1.***	***55.134.672.208,81***	***65.687.381.462,47***
30	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**			
31	**Arus Masuk Kas**			
32	Penjualan Atas Tanah	5.5.2.	0,00	0,00
33	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.	0,00	0,00

No.	Uraian	Ref	Saldo 2025	Saldo 2024
34	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.	0,00	0,00
35	Penjualan atas Jalan, irigasi dan Jaringan	5.5.2.	0,00	0,00
36	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.	0,00	0,00
37	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.	20.449.800,00	5.925.000,00
38	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	5.5.2.	0,00	0,00
39	**Jumlah Arus Masuk Kas**	**5.5.2.**	**20.449.800,00**	**5.925.000,00**
40	**Arus Keluar Kas**			
41	Perolehan Tanah	5.5.2.	732.371.100,00	1.053.059.242,00
42	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.	5.004.809.348,00	11.393.369.748,00
43	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.	23.797.538.257,00	33.605.479.353,00
44	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.	7.906.104.836,00	23.121.034.250,18
45	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.	322.905.000,00	56.000.000,00
46	Perolehan Aset Lainnya		40.000.000,00	0,00
47	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.	500.000.000,00	0,00
48	**Jumlah Arus Keluar Kas**	**5.5.2.**	**38.303.728.541,00**	**69.228.942.593,18**
49	***Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi***	***5.5.2 .***	***(38.283.278.741,00)***	***(69.223.017.593,18)***
50	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**			
51	**Arus Masuk Kas**			
52	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.	0,00	0,00
53	**Jumlah Arus Masuk Kas**	5.5.3.	**0,00**	**0,00**
54	**Arus Keluar Kas**			
55	Pembayaran Pokok Pinjaman	5.5.3.	0,00	0,00
56	**Jumlah Arus Keluar Kas**	5.5.3.	**0,00**	**0,00**
57	***Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan***	***5.5.3.***	***0,00***	**0,00**
58	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**			
59	**Arus Masuk Kas**			
60	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4.	45.883.045.391,00	50.944.453.833,00
61	**Jumlah Arus Masuk Kas**	**5.5.4.**	**45.883.045.391,00**	**50.944.453.833,00**
62	**Arus Keluar Kas**			
63	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4.	45.856.201.681,00	51.039.774.955,00
64	**Jumlah Arus Keluar Kas**	**5.5.4.**	**45.856.201.681,00**	**51.039.774.955,00**
65	***Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris***	**5.5.4.**	***26.843.710,00***	***(95.321.122,00)***
66	**Kenaikan / Penurunan Kas**		**16.878.237.177,81**	**(3.630.957.252,71)**
67	**Saldo Awal Kas**		**4.849.337.935,69**	**8.480.304.393,60**
68	Koreksi SiLPA Tahun Sebelumnya	5.2.4.	29.396,00	(9.205,20)
69	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah Setelah Koreksi		4.849.367.331,69	8.480.313.598,80
70	**Saldo Akhir Kas**	**5.5.5.**	**21.727.604.509,50**	**4.849.337.935,69**
71	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.	15.999.375.461,40	51.385.522,63

No.	Uraian	Ref	Saldo 2025	Saldo 2024
72	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2.	0,00	0,00
73	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3.	0,00	0,00
74	Kas di BLUD	5.3.1.1.4.	4.276.865.432,10	4.769.301.860,10
75	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.5.	374.521.000,00	0,00
76	Kas Lainnya	5.3.1.1.6.	40.710.043,00	28.650.552,96
77	Setara Kas	5.3.1.1.7.	0,00	0,00
78	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.8.	1.036.132.573,00	0,00
79	**Saldo Akhir Kas**	**5.5.5.**	**21.727.604.509,50**	**4.849.337.935,69**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI MAJENE

Dr. H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	2025	2024
1	**EKUITAS AWAL**	5.6.1.	1.602.237.782.484,35	1.628.208.973.061,58
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	5.6.2.	(37.794.744.902,82)	(28.611.238.546,33)
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:**	5.6.3.		
4	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	74.096.666,85
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
6	Lain-lain		589.895.296,66	2.565.951.302,25
7	**EKUITAS AKHIR**	**5.6.4.**	**1.565.032.932.878,19**	**1.602.237.782.484,35**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI MAJENE

Dr. H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan daerah diarahkan pada terwujudnya pelaporan keuangan yang kredibel dan berorientasi pada kinerja. Laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kemampuan keuangan daerah, tingkat realisasi anggaran, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya keuangan. Pemerintah Daerah menempatkan laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja, sehingga penyusunannya harus selaras dengan capaian program dan kegiatan. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan yang konsisten dengan perencanaan dan penganggaran, serta mendukung evaluasi kinerja secara menyeluruh.

Kebijakan penyusunan laporan keuangan juga difokuskan pada peningkatan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi, serta penguatan kualitas data keuangan. Validitas dan keandalan data menjadi perhatian utama guna meminimalkan kesalahan pencatatan dan potensi temuan pemeriksaan. Selain itu, Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan laporan keuangan sebagai instrumen pengambilan keputusan bagi pimpinan daerah. Dengan penyajian informasi keuangan yang tepat dan mudah dipahami, laporan keuangan diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih tepat sasaran.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

b. Manajemen
   Membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;

c. Transparansi
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)
   Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka komponen laporan disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene menyediakan informasi mengenai pendapatan, beban, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas, dan arus kas. Seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itu Pemerintah Daerah selaku entitas akuntansi berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan, yang terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional (LO); (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Seluruh laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, untuk:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan sejauh mana sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene adalah:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 5);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 Nomor 5);

n. Peraturan Bupati Majene Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene;

o. Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024);

p. Peraturan Bupati Majene Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 7);

q. Peraturan Bupati Majene Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 Nomor 13);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Gambaran Ekonomi Makro dan Fiskal
2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
2.2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian

IV. Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Sesuai SAP
4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

VI. Penutup

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

BAB II
GAMBARAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL

BAB II
GAMBARAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Kabupaten Majene tahun 2025 merupakan implementasi dari Kerangka ekonomi makro yang meliputi evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Selain empat indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selain itu, hasil proyeksi ekonomi tersebut juga digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi global, kondisi ekonomi daerah, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan APBD tahun 2025. Selanjutnya, dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

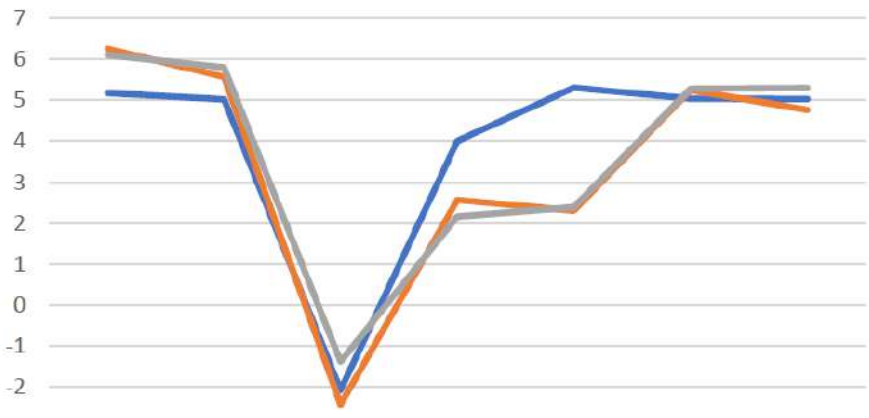
Arah kebijakan ekonomi nasional Indonesia tahun 2025 berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana diuraikan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab tantangan domestik dan global, mendukung transformasi ekonomi, serta 2025 akan tetap berupaya menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi rendah melalui pengendalian harga pangan, menjaga nilai tukar rupiah melalui kebijakan moneter Bank Indonesia, termasuk penguatan cadangan devisa, serta optimalisasi belanja pemerintah untuk mendukung permintaan domestik.

Dengan kondisi nasional dan global saat ini, maka Arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Majene tentunya harus selaras dengan kebijakan nasional, termasuk juga selaras dengan arah kebijakan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025, yakni memfokuskan kepada akselerasi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai penguatan pondasi transformasi. Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2025 memprioritaskan kepada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis potensi lokal. Pemanfaatan potensi lokal menjadi solusi terbaik, tentunya tidak hanya tentang bagaimana meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia lokal agar lebih produktif dan kompetitif, namun juga tentang kemampuan menjadikan sumber daya alam lokal yang dimiliki dapat memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat.

Asumsi pertumbuhan ekonomi nasional pada semester kedua Tahun 2024 ini, tentunya akan menjadi acuan bagi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Majene pada semester kedua Tahun 2025. Oleh karenanya akan disajikan kondisi ekonomi daerah dan tantangan prospek pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Majene sebagai berikut:

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene secara kumulatif terus tumbuh positif dimana pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,28 persen dan tahun 2024 sebesar 5,3 persen. Pertumbuhan ini lebih baik dari kondisi nasional dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5,05 persen dan turun pada tahun 2024 sebesar 5,03 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat pada tahun 2023 sebesar 5,25 persen dan turun pada tahun 2024 sebesar 4,76 persen. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene juga masih lebih baik dari Provinsi Sulawesi Barat. Namun meskipun tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene lebih baik dari nasional maupun provinsi, akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi masih melambat pada kenaikan hanya sebesar 0,02 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	5,17	5,02	-2,07	4	5,31	5,04	5,03
Provinsi	6,26	5,56	-2,42	2,56	2,3	5,25	4,76
Majene	6,1	5,8	-1,38	2,16	2,39	5,28	5,3

Sumber: BPS Kabupaten Majene Tahun 2025

Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Regional Provinsi Sulawesi Barat, dan Kabupaten Majene Tahun 2018-2024

Pada tahun 2024, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi dalam memberikan kontribusi terhadap angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, yakni pada angka 5,15. Sementara untuk lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi pada angka 6,04. Sementara lapangan usaha jasa perusahaan pada angka 9,23. Lapangan usaha lain, yakni administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi pada angka 1,70. Sementara jasa pendidikan dengan kontribusi pada angka 6,18. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024

No.	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	1,51	1,55	3,20	6,23	5,15
2.	Pertambangan dan Penggalian	(5,39)	5,73	2,32	2,21	6,17
3.	Industri Pengolahan	1,66	5,89	2,10	11,66	6,04
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,14	(3,4)	15,34	8,22	7,78
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,64	0,18	(2.17)	0,55	-4,08
6.	Konstruksi	(11,88)	9,64	(2.75)	5,01	7,63
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(1,55)	3,08	1.29	4,69	7,58
8.	Transportasi dan Pergudangan	(5,34)	3,07	8,97	11,45	5,54
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(6,04)	5,08	8,99	10,76	5,80
10.	Informasi dan Komunikasi	5,36	0,17	2.03	9,88	5,35
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,03	5,92	(1,44)	-0,89	2,14
12.	Real Estate	2,79	(2,70)	3,57	4,53	5,52
13.	Jasa Perusahaan	(4,94)	0,10	4,25	5,11	9,23
14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(6,36)	0,11	2,25	0,09	1,70
15.	Jasa Pendidikan	(5,68)	(1,68)	2,96	3,68	6,18
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(3,21)	(0,08)	4,14	4,46	8,50
17.	Jasa Lainnya	(3,41)	3,79	6,69	4,74	3,42
	Produk Domestik Regional Bruto	**(1,38)**	**2,16**	**2,39**	**5,29**	**5,30**

Sumber: BPS Kabupaten Majene Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas diharapkan Kabupaten Majene pada tahun 2025 dan 2026 dapat melanjutkan tren positif pertumbuhan ekonomi dengan melakukan berbagai kebijakan diantaranya:

a. Revitalisasi pusat-pusat perdagangan;
b. Modernisasi sarana pertanian, kelautan, dan perikanan;
c. Modernisasi metode produksi, distribusi, dan pemasaran pengelolaan SDA;
d. Peningkatan cadangan pangan daerah; dan
e. Penyusunan dan penerbitan regulasi pendukung peningkatan PAD, kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Tabel 2. 2 Perkembangan dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Majene Tahun 2015 – 2025

TAHUN	LPE (%)
2016	6,02
2017	6,29
2018	6,06

TAHUN	LPE (%)
2019	6,01
2020	-1,38
2021	2,16
2022	2.39
2023	5,28
2024	5,3
2025*	5,68
2026*	6,06

Keterangan : * Angka Proyeksi

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majene

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai alat ukur untuk menghitung pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain, PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Majene (Miliar Rupiah) Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	Tahun 2020	Rasio (%)	Tahun 2021	Rasio (%)	Tahun 2022	Rasio (%)	Tahun 2023	Rasio (%)	Tahun 2024	Rasio (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1248,7	35,4	1256,06	35,15	1305,60	35,43	1.385,30	35,72	1.456,65	35,67
Pertambangan dan Penggalian	89,90	2,5	95,04	2,64	97,25	2,64	99,40	2,56	105,53	2,58
Industri Pengolahan	199,9	5,7	211,64	5,88	216,10	5,86	241,11	6,22	255,67	6,26
Pengadaan Listrik dan Gas	4,6	0,1	4,46	0,12	5,15	0,14	5,57	0,01	6,00	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,1	0,1	5,16	0,14	5,27	0,14	5,35	0,01	5,13	0,01
Konstruksi	244,4	6,9	268,01	7,45	260,64	7,07	273,71	7,05	294,59	7,21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	335,4	9,5	345,72	9,61	350,19	9,50	366.60	9,45	394,39	9,65
Transportasi dan Pergudangan	57,3	1,66	59,11	1,64	64,41	1,75	71,78	1,85	75,76	1,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,1	0,3	10,71	0,30	11,67	0,32	12,92	0,33	13,67	0,33
Informasi dan Komunikasi	218,9	6,2	219,25	6,09	223,71	6,07	245,82	6,33	258,97	6,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	126,6	3,6	134,12	3,73	132,20	3,59	131,02	3,38	133,82	3,28
Real Estate	123,4	3,5	120,02	3,33	124,30	3,37	129,94	3,35	137,11	3,35
Jasa Perusahaan	1,7	0,0	1,74	0,05	1,81	0,05	1,91	0,04	2,08	0,05

Lapangan Usaha	Tahun 2020	Rasio (%)	Tahun 2021	Rasio (%)	Tahun 2022	Rasio (%)	Tahun 2023	Rasio (%)	Tahun 2024	Rasio (%)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	370,3	10,5	369,77	10,27	378,10	10,26	378,44	9,76	384,86	9,42
Jasa Pendidikan	320,5	9,1	315,12	8,76	324,44	8,80	336,37	8,67	357,17	8,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53,4	1,5	53,36	1,48	55,57	1,51	58,05	1,49	62,99	1,54
Jasa lainnya	116,3	3,3	120,67	3,35	128,74	3,34	134,85	3,48	139,46	3,41
Total	**3.526,8**	**100,0**	**3598,96**	**100,0**	**3685,15**	**100,0**	**3.878,13**	**100,0**	**4.083,86**	**100,0**

Sumber Data : BPS Kabupaten Majene, 2025

Tabel 2. 4 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Majene (Miliar Rupiah) Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	Tahun 2020	Rasio (%)	Tahun 2021	Rasio (%)	Tahun 2022	Rasio (%)	Tahun 2023	Rasio (%)	Tahun 2024	Rasio (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.894,7	37,9	1963,83	37,74	2.124,60	38,4	2.351,344	39,40	2.601,67	40,05
Pertambangan dan Penggalian	128,2	2,6	137,21	2,64	145,30	2,62	154,28	2,58	163,79	2,52
Industri Pengolahan	261,5	5,2	288,80	5,55	310,02	5,60	340,54	5,71	373,13	5,74
Pengadaan Listrik dan Gas	3,4	0,1	3,27	0,06	3,79	0,07	4,22	0,07	4,55	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,4	0,1	5,38	0,10	5,50	0,10	5,59	0,09	5,50	0,08
Konstruksi	313,3	6,3	357,62	6,87	365,69	6,61	396,21	6,64	435,96	6,71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	547,0	11,0	579,27	11,13	617,20	11,16	668,30	11,20	730,09	11,23
Transportasi dan Pergudangan	76,0	1,5	78,85	1,52	91,80	1,17	111,20	1,86	119,05	1,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,8	0,3	14,72	0,28	16,34	0,30	18,38	0,03	19,93	0,31
Informasi dan Komunikasi	274,3	5,5	274,77	5,28	280,77	5,1	309,98	5,19	326,85	5,03
Jasa Keuangan dan Asuransi	182,0	3,6	203,60	3,91	218,43	3.95	219,39	3,68	227,39	3,50
Real Estate	167,2	3,3	163,44	3,14	173,96	3,1	187,45	3,14	201,24	3,10
Jasa Perusahaan	2,1	0,0	2,14	0,04	2,29	0,04	2,47	0,04	2,76	0,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	485,6	9,7	482,37	9,27	496,12	8,97	484,51	8,12	504,90	7,77
Jasa Pendidikan	429,6	8,6	432,14	8,30	445,71	8,06	462,01	7,74	509,50	7,84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	67,3	1,3	67,45	1,30	70,97	1,3	77,35	1,30	86,00	1,32
Jasa lainnya	142,1	2,8	149,17	2,87	163,24	2.95	175,21	2,94	183,51	2,82
Total	4.993,5	100,0	5.204,02	100,0	5.531,73	100,0	5.968,43	100,00	6.495,83	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Majene, 2025

Berdasarkan data tabel di atas, terkait perkembangan 17 sektor PDRB Kabupaten Majene dalam periode 2020 – 2025 baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku menunjukkan bahwa Perekonomian Kabupaten Majene dominan bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan dominasi lebih dari sepertiganya dan juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan kedua dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Majene, dimana pada tahun 2025 untuk harga konstan kontribusinya pada angka 9,65 dan untuk harga berlaku kontribusinya pada angka 11,23.

2.1.3. Tingkat Inflasi Daerah Kabupaten Majene

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Inflasi dihitung pada 98 kota pada 38 Provinsi se-Indonesia. Tingkat inflasi suatu daerah ditentukan berdasarkan kota terdekat yang dilakukan perhitungan oleh BPS. Untuk Kabupaten Majene maka nilai inflasi diambil berdasarkan nilai inflasi daerah terdekat yang dilakukan perhitungan inflasi oleh BPS, yaitu Kabupaten Mamuju. Inflasi dihitung berdasarkan pemantauan harga eceran berbagai komoditas barang dan jasa yang dilakukan oleh BPS dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/ jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.

a. Perkembangan Inflasi Tahun Kalender

Selama semester II tahun 2024, Kabupaten Majene mengalami inflasi bulanan sebanyak tiga kali dan mengalami deflasi sebanyak tiga kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 0,70 persen.

Peningkatan harga yang terjadi pada Desember tersebut disebabkan kenaikan harga pada empat kelompok pengeluaran, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau terbesar 1,83 persen, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen, dan kelompok transportasi sebesar 0,10 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 0,37 persen. Deflasi ini disebabkan penurunan indeks harga pada satu kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,02 persen. Sementara untuk inflasi tahun kalender menurut kelompok pengeluaran Kabupaten Majene (2022=100) (persen), semester II tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

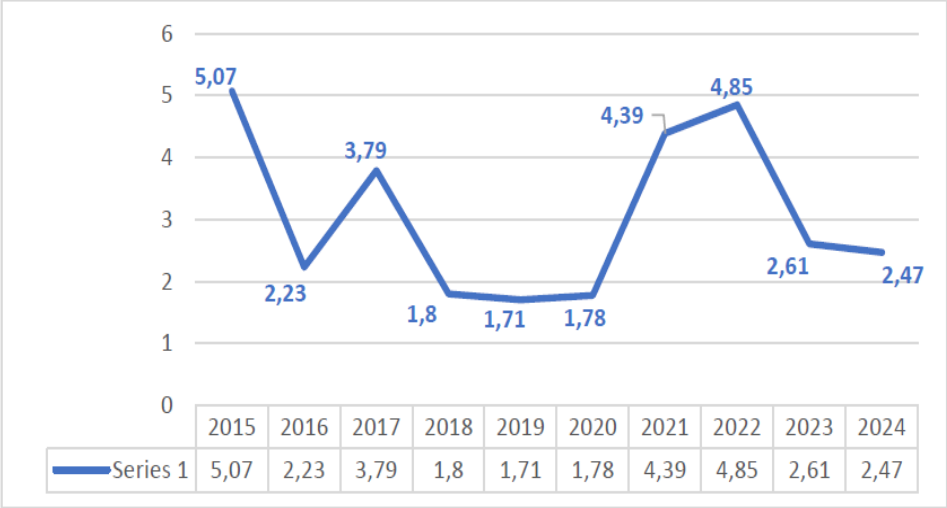
Tabel 2. 5 Tingkat Inflasi Umum Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2024

No.	Rincian	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2024
	Inflasi Umum	**0,87**
	Menurut Kelompok Pengeluaran	
1.	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,49
2.	Pakaian dan Alas Kaki	0,77
3.	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,57
4.	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,64
5.	Kesehatan	0,64
6.	Transportasi	0,51
7.	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,57
8.	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,39
9.	Pendidikan	0,71
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,03
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1,78

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2025

b. Perkembangan Inflasi Tahun ke Tahun (*Year on Year*)

Inflasi Tahun ke Tahun (YoY) adalah perbandingan IHK bulan n tahun y dibanding bulan n tahun y-1. Selama kurun waktu tahun 2015-2022 inflasi tertinggi tercatat di Tahun 2015 yakni sebesar 5,07 persen dan pada tahun 2016 laju inflasi dapat ditekan, namun kembali meningkat pada tahun 2017, kemudian stagnan di tahun 2018-2020 dan kembali meningkat di tahun 2021 yakni sebesar 4,39 persen kemudian meningkat lagi di tahun 2022 yakni sebesar 4,85 persen. Namun tingkat inflasi kemudian mengalami penurunan masing-masing pada Tahun 2023 diangka 2,61 dan 2024 diangka 2,47. Untuk lebih jelasnya tingkat inflasi dari Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber data: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2025

Grafik 2. 2 Tingkat Inflasi Regional Tahun 2015-2024

2.1.4. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut **Garis Kemiskinan (makanan & bukan makanan)**.

- Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kalori per kapita per hari).
- Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.

Berdasarkan data kemiskinan Kabupaten Majene, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2015 sedikit meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan turun lagi pada tahun 2016-2019. Sedangkan pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan sebesar 0,01 persen atau sebesar 13,73 persen dan kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 0,61 persen atau sebesar 14,34 persen. Angka kemiskinan Kabupaten Majene terus meningkat di tahun 2022 sebesar 15,13 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen dibandingkan tahun 2021. Namun pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami penurunan masing-masing pada angka 14,54 persen dan 13,64 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

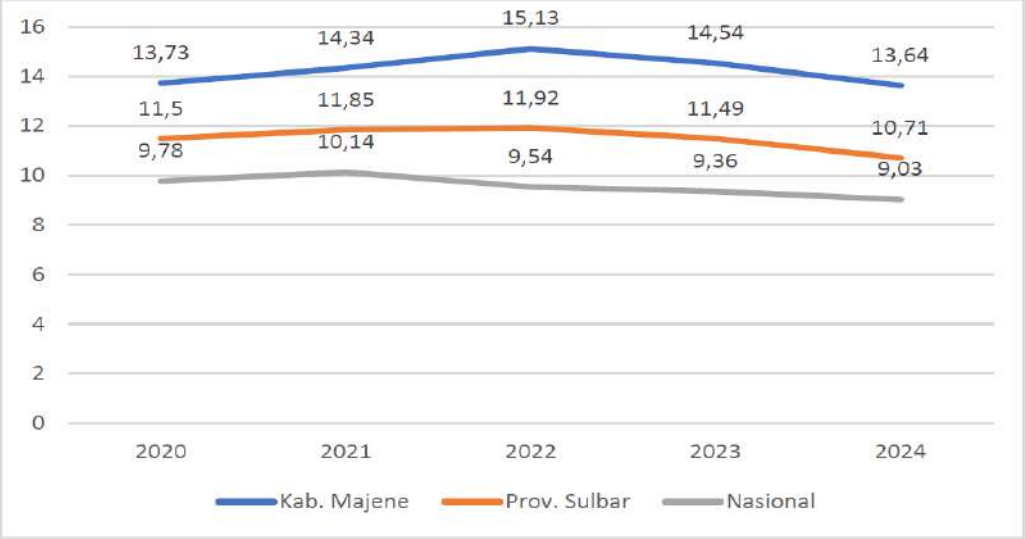
Tabel 2. 6 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Majene Tahun 2014-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (Ribu)	Persentase
2014	278.049	24,74	15,05
2015	290.568	25,79	15,57
2016	320.728	24,69	14,89
2017	335.248	23,48	13,94
2018	349.522	23,53	13,79
2019	360.362	23,76	13,72
2020	384.344	24,12	13,73
2021	399.350	25,01	14,34
2022	433.111	26,62	15.13
2023	461.255	25,80	14,54
2024	482.173	24,41	13,64

Sumber data: BPS Kabupaten Majene, Tahun 2025

2.1.4.1. Persentase Penduduk Miskin

Selama periode 2020 – 2024, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene mengalami fluktuatif, kondisi tersebut setiap tahunnya seiring dengan penurunan angka kemiskinan skala Provinsi Sulbar dan Nasional. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene mengalami penurunan selama empat tahun terakhir (2020- 2024) hingga mencapai angka 13,64 persen pada tahun 2024 dari 14,54 persen di tahun 2023. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, persentase penduduk miskin tertinggi adalah tahun 2022 (15,13 persen), sedangkan persentase penduduk miskin tahun 2021 dan 2020 yaitu 14,34 persen dan 13,73 persen. Lebih jelasnya jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Majene Tahun 2025

Grafik 2. 3 Grafik Penduduk Miskin Kabupaten Majene Periode 2020-2024

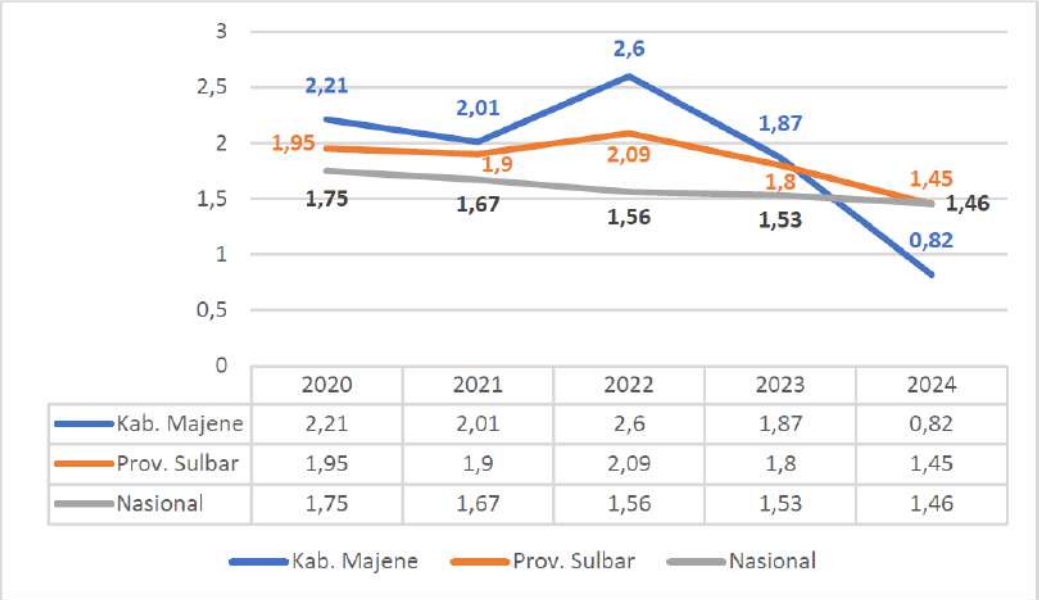
Persentase penduduk miskin merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik, Kabupaten Majene menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kabupaten Majene berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,93 persen. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan kinerja penurunan kemiskinan di tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai angka sebesar 0,71 persen, serta melampaui capaian penurunan kemiskinan secara nasional yang hanya sebesar 0,33 persen. Meskipun demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Majene masih berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat, dengan selisih sebesar 2,86 persen. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berprinsip keberpihakan terhadap masyarakat miskin dengan harapan angka kemiskinan di Kabupaten Majene dapat terus ditekan hingga setidaknya berada di bawah angka kemiskinan rata-rata di Provinsi Sulawesi Barat maupun Nasional.

2.1.4.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Majene

Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Persoalan kemiskinan bukan hanya mengacu pada jumlah dan persentase penduduk miskin. Tingkat Kedalaman dan Tingkat Keparahan Kemiskinan merupakan dimensi lain yang ikut menjadi parameter kemiskinan suatu wilayah. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman (P1) dan keparahan dari kemiskinan (P2).

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Majene dibandingkan dengan kabupaten lain dalam provinsi dan perbandingannya dengan capaian provinsi dan nasional. Dari grafik di bawah terlihat bahwa selama periode 2020–2024 terjadi fluktuasi pada indeks kedalaman kemiskinan, dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan perlambatan ekonomi se-Sulbar yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dalam memperoleh komoditi makanan dan non makanan.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	2,21	2,01	2,6	1,87	0,82
Prov. Sulbar	1,95	1,9	2,09	1,8	1,45
Nasional	1,75	1,67	1,56	1,53	1,46

Sumber: BPS Kabupaten Majene Tahun 2025

Grafik 2. 4 Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Majene, Provinsi dan Nasional Periode 2020-2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Majene tahun 2020- 2024 cenderung fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,82 dibanding tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Majene semakin jauh di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.

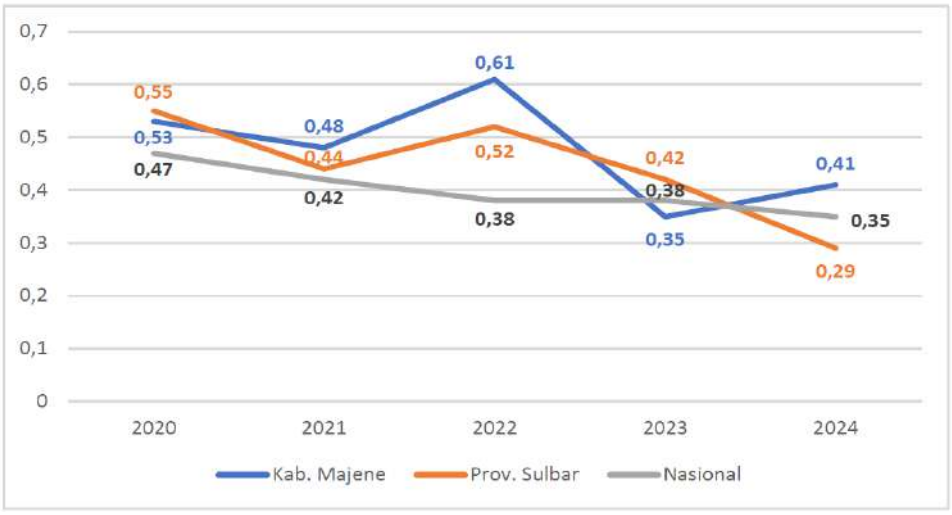
Secara nasional, indeks kedalaman kemiskinan stabil di angka 1,46 poin sementara di Kabupaten Majene meningkat sebesar 0,22 poin, lebih tinggi dibanding kenaikan skala provinsi yang juga mengalami kenaikan sebesar 1,45 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga komoditi di Kabupaten Majene masih sangat rentan terhadap instabilitas perekonomian. Oleh sebab itu, kebijakan pemerataan pembangunan menjadi langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga agar kesenjangan antar warga miskin tidak semakin melebar.

2.1.4.3. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majene

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) atau *Poverty Severity Index* memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks,

semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) selama tahun 2022 – 2023 cenderung menurun. Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2022 naik 0,13 poin dibanding tahun 2021, menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. Begitu juga dengan tahun 2024, dimana indeks kedalaman kemiskinan naik 0,06 dibanding tahun sebelumnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Majene Tahun 2025

Grafik 2. 5 Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majene, Provinsi dan Nasional Periode 2020-2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama periode 2020 – 2024 terjadi fluktuasi pada indeks keparahan kemiskinan, khususnya pada periode 2022 – 2023 dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan seiring dengan perlambatan ekonomi se-Sulbar yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dalam memperoleh komoditi makanan dan non makanan. Secara nasional, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan di angka 0,03 poin sementara skala Provinsi Sulawesi Barat juga mengalami

Penurunan seiring penurunan ditingkat nasional sebesar 0,13 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Majene menghadapi kondisi yang lebih pelik dari rata-rata penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh sebab itu, kebijakan bantuan dan jaminan sosial tepat sasaran menjadi langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga agar warga miskin di Kabupaten Majene tidak semakin terpuruk dalam kemiskinan yang akan semakin mempersulit perwujudan komitmen Pemkab. Majene dalam pengentasan kemiskinan.

2.1.4.4. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia yang paling esensial untuk kelangsungan hidup. Ini

melampaui sekadar kemiskinan biasa, karena mereka yang berada dalam kemiskinan ekstrem menghadapi kekurangan yang parah dalam berbagai aspek. Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

No.	Nama Daerah	Jumlah Kemiskinan Ekstrem (Ribu Jiwa)				Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)			
		2021*	2022*	2023**	2024**	2021*	2022*	2023**	2024**
1	**Sulawesi Barat**	**34,07**	**41,41**	**10,68**	***n/a***	**2,45**	**2,94**	**0,75**	**1,46**
2	Majene	4,94	5,04	0,66	*n/a*	2,83	2,87	0,37	0,78
3	Polewali Mandar	16,07	27,90	8,24	*n/a*	3,64	6,27	1,84	0,94
4	Mamasa	5,23	3,76	0,63	*n/a*	3,23	2,30	0,38	0,66
5	Mamuju	4,87	1,79	0,39	*n/a*	1,63	0,59	0,12	2,06
6	Pasangkayu	0,96	2,10	0,00	*n/a*	0,53	1,15	0,00	2,82
7	Mamuju Tengah	2,01	0,82	0,77	*n/a*	1,47	0,59	0,54	1,75

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Tahun 2025,
Keterangan:
*** : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)**
**** : Estimasi dihitung oleh Satgas Data P3KE**

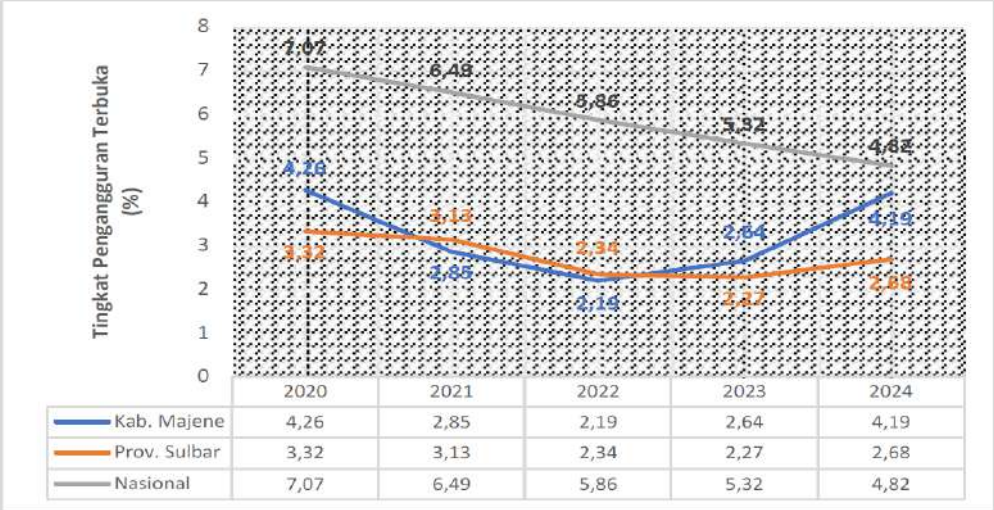
Berdasarkan pada tabel di atas, jumlah dan tingkat kemiskinan ekstrem di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2021- 2024, memperlihatkan bahwa pada data 2023 Provinsi Sulawesi Barat, jumlah kemiskinan ekstrem sebanyak 10,68 ribu jiwa dengan Tingkat persentase sebesar 0,78 persen dan mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2021 dan 2022, Penurunan ini bisa jadi merupakan keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat, Sedangkan pada wilayah Kabupaten Majene sedikit meningkat dari 4,94 ribu jiwa (2021) menjadi 5,04 ribu jiwa (2022) dan terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 0,66 ribu jiwa dengan Tingkat persentase 0,37 persen, meskipun data capaian untuk tahun 2024 belum tersedia,

2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majene

Secara umum, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi saling terkait erat, Tenaga kerja adalah tulang punggung produksi barang dan jasa, sehingga jumlah dan kualitas pekerja memengaruhi seberapa besar output ekonomi yang dihasilkan, Pekerja yang terampil dan produktif mendorong inovasi dan efisiensi, yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang kuat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memacu konsumsi, yang kembali menggerakkan roda ekonomi, Hubungan ini seperti lingkaran: tenaga kerja yang berkualitas mendukung ekonomi yang sehat, dan ekonomi yang berkembang memberikan peluang kerja serta kesejahteraan bagi tenaga kerja, Namun, jika tenaga kerja kurang terampil atau pengangguran tinggi, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat, begitu pula sebaliknya jika ekonomi stagnan, peluang kerja menurun,

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (penduduk berusia 15 tahun ke atas), Nilai TPT mencerminkan seberapa besar jumlah tenaga kerja yang belum dimanfaatkan, Menurut BPS Kabupaten Majene, pengangguran mencakup penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja,

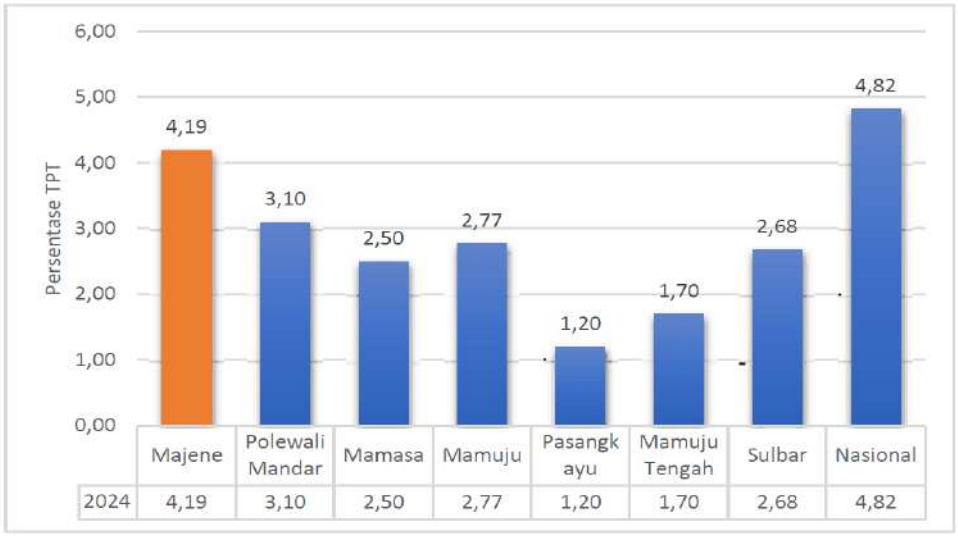
Perkembangan TPT di Kabupaten Majene antara tahun 2020-2024 menunjukkan tren meningkat di periode dua tahun terakhir, Di tahun 2020 TPT Kabupaten Majene sebesar 4,26 persen menurun menjadi 2,85 persen di tahun 2021 dan 2,19 persen di tahun 2022, Mulai tahun 2023 TPT Kabupaten Majene meningkat di angka 2,64 persen dan tahun 2024 sebesar 4,19 persen Kabupaten Majene pada tahun 2024, TPT lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Barat yang berada di angka 2,68 persen dan lebih rendah dibandingkan Tingkat nasional yang mencapai 4,82 persen Sedangkan pada lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene menduduki peringkat pertama dengan Tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, Secara rinci dapat Tingkat Pengangguran Terbuka dijelaskan pada gambar sebagai berikut,



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	4,26	2,85	2,19	2,64	4,19
Prov. Sulbar	3,32	3,13	2,34	2,27	2,68
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,82

Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2025

Grafik 2. 6 Perkembangan TPT Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



	Majene	Polewali Mandar	Mamasa	Mamuju	Pasangkayu	Mamuju Tengah	Sulbar	Nasional
2024	4,19	3,10	2,50	2,77	1,20	1,70	2,68	4,82

Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2025

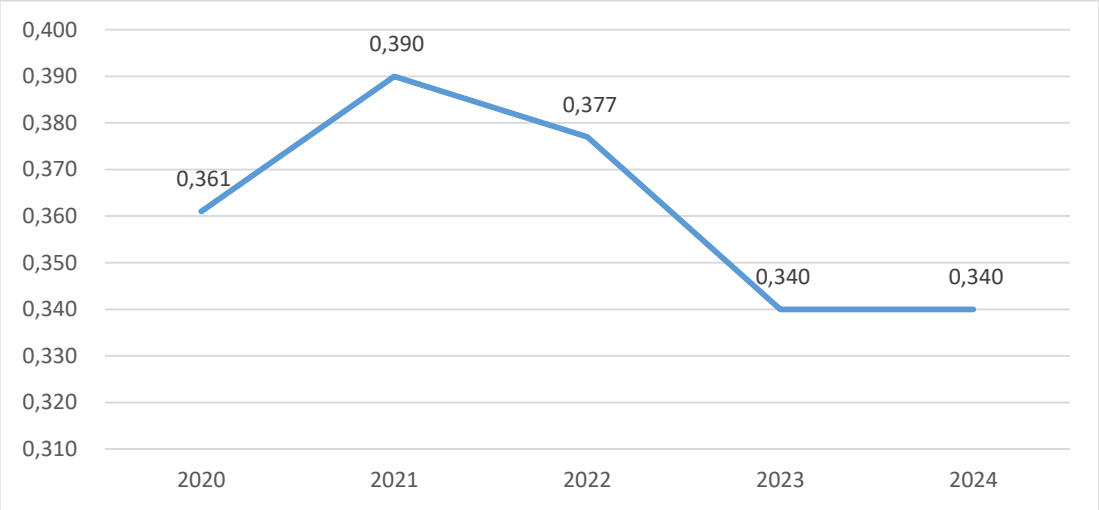
Grafik 2. 7 Posisi Relatif TPT Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

2.1.6. Indeks Gini (*Gini Ratio*) Kabupaten Majene

Indeks gini atau *gini ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Indikator ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Indeks gini/koefisien gini merupakan salah satu indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau dengan kata lain indikator pengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Angka koefisien gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna), Angka koefisien gini yang semakin mendekati nol berarti dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.

Gini Ratio Kabupaten Majene mengalami fluktuasi tiap Tahunnya dari 0,361 pada Tahun 2020 naik 0,02 poin menjadi 0,390 pada Tahun 2021 dan terus menurun 0,377 pada Tahun 2022 dan 0,340 Tahun 2023. Fluktuasi yang sama terjadi pada skala provinsi dan nasional di mana per Tahun 2023, Provinsi mencapai 0,35 dan pada skala nasional mencapai 0,380. Adapun perbandingan Indeks Gini Kabupaten Majene, dalam periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut,



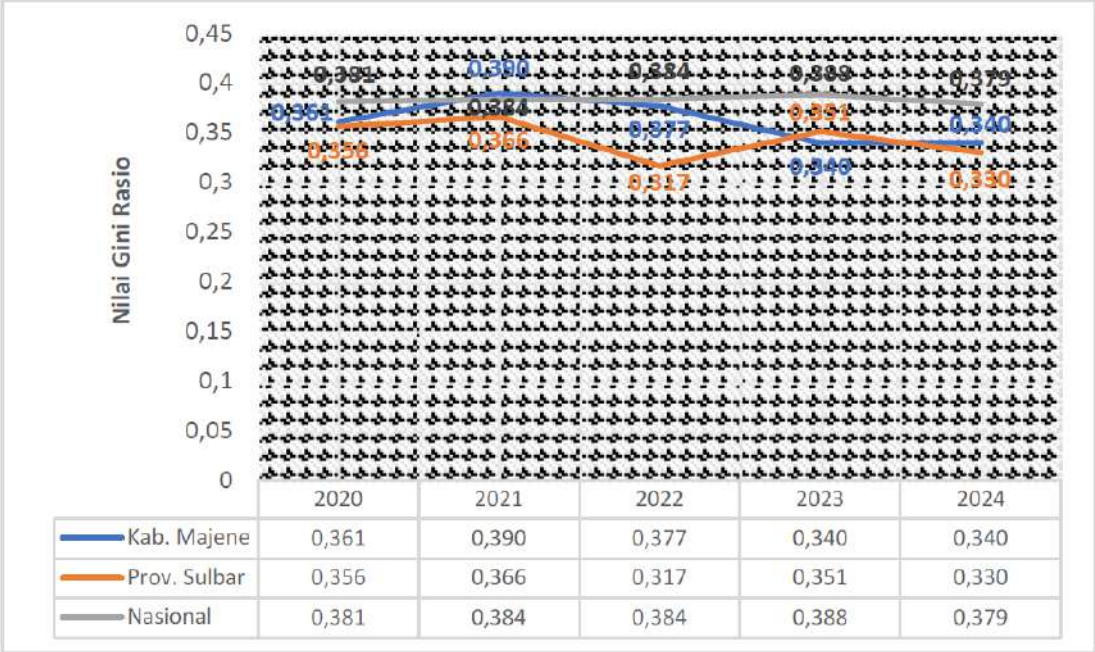
Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2025

Grafik 2. 8 Indeks Gini (*Gini Ratio*) Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

Koefisien semakin mendekati nol maka pendapatan semakin merata, Nilai 0,5-0,7 menggambarkan ketidakmerataan tinggi; 0,36-0,49 ketidakmerataan sedang; dan 0,20-0,35 mengalami ketidakmerataan rendah. Selama periode 2019-2023, pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 *gini ratio* Kabupaten Majene belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene sehingga masih menggunakan indeks gini tahun 2023.

Secara umum, Indeks Gini Kabupaten Majene masih berada di bawah Indeks Gini Nasional dan lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Barat, Dari tahun 2020 sampai 2024 indeks gini

Kabupaten Majene fluktuatif, cenderung menurun. Untuk Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 sebesar 0,356 dan menurun pada tahun 2024 sebesar 0,330. Sedangkan pada Tingkat Nasional, tahun 2020 sebesar 0,381 dan menurun di tahun 2024 menjadi 0,379.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	0,361	0,390	0,377	0,340	0,340
Prov. Sulbar	0,356	0,366	0,317	0,351	0,330
Nasional	0,381	0,384	0,384	0,388	0,379

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2025

Grafik 2. 9 Perbandingan Indeks Gini antara Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024

2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majene

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran gabungan yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan manusia suatu wilayah atau negara. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (diukur dari harapan hidup saat lahir), pendidikan (diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup (diukur dari pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli). Indeks ini dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) sebagai indikator yang memberikan gambaran secara lebih komprehensif mengenai kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga sosial. Nilai IPM berkisar antara 0 hingga 1, dengan kategori rendah (<0,550), sedang (0,550–0,699), tinggi (0,700–0,799), dan sangat tinggi (≥0,800). Semakin tinggi nilai IPM, semakin baik tingkat pembangunan manusia di wilayah tersebut. IPM membantu pemerintah dan organisasi merancang kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Angka Indeks Pembangunan Manusia untuk berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Se-Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Uraian	Kabupaten						Provinsi Sulawesi Barat
		Majene	Polewali Mandar	Mamasa	Mamuju	Pasang-kayu	Mamuju Tengah	
2020	IPM	70,71	67,47	66,36	69,64	69,12	65,92	68,40
	Peringkat	1	4	5	2	3	6	
2021	IPM	71,10	67,85	66,97	69,80	69,37	66,38	68,64
	Peringkat	1	4	5	2	3	6	
2022	IPM	71,64	68,42	67,53	70,35	69,94	67,07	69,19
	Peringkat	1	4	5	2	3	6	
2023	IPM	72,44	69,24	68,14	71,07	70,42	67,63	69,80
	Peringkat	1	4	5	2	3	6	
2024	IPM	73,25	69,88	68,68	71,86	71,04	68,53	70,46
	Peringkat	1	4	5	2	3	6	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada Tahun 2024 Kabupaten Majene masih menempati peringkat pertama dengan nilai IPM sebesar 73,25. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Sulawesi Barat yang hanya mencapai 70,46.

Selain itu, sejak perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan Umur Harapan Hidup (UHH) hasil *long form* SP2020, Kabupaten Majene secara konsisten berada pada peringkat pertama pencapaian angka IPM tertinggi di antara seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Majene dalam menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia melalui berbagai program pembangunan. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk, yang tercermin dalam bentuk kontribusi komponen utama IPM. Komponen tersebut meliputi dimensi kesehatan yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH); dimensi pendidikan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS), serta dimensi ekonomi yang diukur melalui pengeluaran per kapita.

2.2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD dan memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu Tahun anggaran, Dalam penyusunan anggaran yang akan termuat dalam APBD harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

a. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran;
b. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal; dan
c. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga tetap memperhatikan kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026. Selain

itu, arah kebijakan keuangan daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada;

b. Disiplin Anggaran, adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;

c. Keadilan Anggaran, pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan; dan

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Majene antara lain sebagai berikut:

a. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat;

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi;

c. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan Daerah, mengubah tarif khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM;

d. Melakukan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak dan retribusi untuk dapat melaksanakan kewajibannya;

e. Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak;

f. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh Daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;

g. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Daerah;

h. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan Retribusi melalui pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki;

i. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), kerja sama Pemanfaatan (KSP) dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah;

j. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan juga dengan pemerintah provinsi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan

k. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

Adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya, berdampak pada berkurangnya fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola penggunaan DAU. Pada awalnya, DAU merupakan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah yang tidak ditentukan penggunaannya, sehingga daerah dapat dengan leluasa mengalokasikan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah.

Di Kabupaten Majene dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut, berimbas pada terbatasnya anggaran pada perangkat daerah untuk operasional kantor dan pelaksanaan program kegiatan yang tidak bisa menggunakan DAU, dan mau tidak mau harus menggunakan dana PAD. Sampai saat ini PAD di Kabupaten Majene belum bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Dalam tiga tahun terakhir kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan rata-rata hanya sekitar 8 persen. Selain itu, realisasi PAD di Kabupaten Majene khususnya penerimaan pajak dan retribusi daerah masih belum mencapai target. Dalam 2 tahun terakhir realisasi pajak dan retribusi daerah hanya sekitar 49,28 persen - 88,61 persen.

Untuk itu diperlukan usaha yang lebih keras lagi dalam pengelolaan PAD, agar realisasinya dapat mencapai target dan juga akan meningkatkan kemandirian daerah. Jika realisasi PAD dapat mencapai target, tentunya anggaran untuk operasional kantor/program kegiatan yang tidak dapat menggunakan DAU dapat ditingkatkan. Namun demikian, koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus tetap dilaksanakan untuk meningkatkan

penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selain berpedoman pada arah kebijakan pendapatan daerah, dalam penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2025, perencanaan pendapatan daerah juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan target pendapatan tahun 2025 dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan juga melihat potensi dari masing-masing jenis pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer (DAU dan DBH) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dihitung dengan memperhatikan realisasi dari sumber-sumber pendapatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya; dan

c. Kebijakan fiskal yang turut memengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM.

Berikut adalah tabel realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 – 2024, target pendapatan daerah Tahun 2025 dan proyeksi pendapatan daerah Tahun 2026:

Tabel 2. 9 Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022-2026

Uraian	JUMLAH				
	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Target pada Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi pada Tahun 2026 (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**70.563.315.736,67**	**87.794.782.521,37**	**92.468.261.209,07**	**116.958.226.043,00**	**102.912.043.269,00**
Pajak Daerah	9.461.193.553,39	10.740.841.614,61	11.783.885.632,00	24.265.113.570,00	13.116.090.514,00
Retribusi Daerah	5.803.175.060,00	3.559.947.334,00	75.254.820.161,00	82.889.435.754,00	83.760.496.210,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.333.308.081,00	3.298.690.028,00	3.327.191.183,00	3.534.611.072,00	3.703.246.966,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.965.639.042,28	70.195.303.544,76	2.102.364.233,07	6.269.065.647,00	2.332.209.579,00
PENDAPATAN TRANSFER	**761.573.409.624,00**	**798.281.176.782,00**	**808.307.617.973,00**	**789.268.730.174,00**	**899.666.586.494,00**
Transfer Pemerintah Pusat	737.695.311.296,00	773.902.149.240,00	**783.780.588.110.00**	768.344.427.000,00	810.237.386.397,00
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	10.784.967.445,00	*8.064.980.017,00*	*6.639.074.000,00*	5.826.710.000,00	*7.389.455.339,00*
Dana Alokasi Umum	485.848.952.931,00	*508.603.740.400,00*	*548.935.022.195,00*	535.243.742.000,00	*610.978.403.079,00*
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	74.119.888.581,00	*78.097.585.458,00*	*41.802.623.094,00*	24.453.962.000,00	*46.527.364.569,00*
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	109.054.956.339,00	*123.320.564.365,00*	*130.583.017.821,00*	150.164.160.000,00	*145.342.163.410,00*
Dana Insentif Daerah	2.301.731.000,00	0.00	0,00	0,00	-

Uraian	JUMLAH				
	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Target pada Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi pada Tahun 2026 (Rp)
Dana Desa	55.584.815.000,00	*55.815.279.000,00*	55.820.851.000,00	52.655.853.000,00	*62.130.002.684,00*
Transfer Antar Daerah	**23.878.098.328,00**	**24.379.027.542,00**	**24.527.029.863,00**	**20.924.303.174,00**	**27.299.197.413,00**
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**833.363.725.360,67**	**887.077.959.303,37**	**900.775.879.182,07**	**906.226.956.217,00**	**1.002.578.629.763,00**

Untuk dapat merealisasikan target penerimaan pendapatan daerah untuk Tahun 2025 tersebut di atas, maka diperlukan strategi pencapaian sebagai berikut:

a. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:

1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;

2) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru;

3) Pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;

5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;

6) Penyuluhan secara aktif kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi untuk membangun *awareness* bahwa dengan membayar pajak/retribusi berarti masyarakat telah berkontribusi dalam peningkatan pembangunan daerah;

7) Pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan; dan

8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

b. Strategi pencapaian target dana transfer, dilakukan melalui:

1) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;

2) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; dan

3) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

c. Strategi pencapaian target lain-lain pendapatan yang sah, dilakukan dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi terkait.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Majene dalam perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, sebagaimana yang termuat dalam asta cita nasional, meliputi:

a. Kemandirian ekonomi berbasis sumber daya dan inovasi teknologi
b. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan
c. Kedaulatan pangan energi dan air
d. Transformasi digital dan ekonomi kreatif
e. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
f. Kedaulatan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemberantasan korupsi
g. Harmonisasi sosial dan toleransi beragama
h. Kedaulatan kepemimpinan nasional di kancah global

Dan secara spesifik disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem
d. Pengendalian inflasi daerah
e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
f. Dukungan swasembada pangan
g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kebijakan pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Majene yang termuat dalam Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 antara lain adalah:

a. Berperan serta dalam pelaksanaan program/kegiatan strategis yang mendukung agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah;

b. Penyusunan program dan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar dilakukan dengan memperhatikan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tersebut di atas disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari *output* kegiatan untuk mendukung prioritas nasional;

c. Penyusunan program dan kegiatan urusan non wajib pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang disusun untuk dapat mendukung prioritas nasional;

d. Penyelarasan sasaran program yang sesuai dengan urusan dan kewenangan terkait secara tepat kegiatan dan tepat anggaran, sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber anggaran serta diarahkan pada pencapaian efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah melalui pengalokasian belanja berdasarkan beban kerja masing-masing perangkat daerah;

e. Proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar lebih diutamakan;

f. Mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Majene;

g. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

h. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji murni dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan THR serta memperhitungkan *acress* gaji, Selain itu, alokasi anggaran untuk belanja tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diberikan berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah;

i. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

j. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa; dan

k. Belanja Tak Terduga digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan dana darurat seperti penanganan bencana alam.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut di atas, penyusunan anggaran belanja daerah dalam perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2025 juga memperhatikan kebijakan pemerintah pusat yang pada tahun lalu menetapkan PMK Nomor 102 tahun 2024 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025. Perangkat Daerah yang memiliki sub kegiatan yang bisa didanai dari DAU diarahkan untuk memprioritaskan dalam Renja sub kegiatan yang ditunjuk oleh PMK Nomor 102 Tahun 2024.

Adapun realisasi belanja daerah Kabupaten Majene Tahun 2022–2023, target Tahun 2024 dan proyeksi belanja daerah di Kabupaten Majene Tahun 2025-2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 Realisasi Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 - 2026

Uraian	JUMLAH				
	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Target Belanja Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)
BELANJA OPERASI	**663.261.505.807,25**	**667.164.512.064,80**	**729.988.167.952,60**	**754.940.405.263,69**	**812.495.080.635,00**
Belanja Pegawai	406.980.998.990,00	372.584.721.002,00	424.459.751.438,00	467.875.356.954,00	472.434.314.844,00
Belanja Barang dan Jasa	218.629.512.958,25	283.016.566.756,80	267.189.138.109,60	276.845.340.309,69	297.388.190.444,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	36.875.447.859,00	11.505.624.306,00	38.275.918.405,00	10.156.348.000,00	42.602.054.083,00

Uraian	JUMLAH				
	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Target Belanja Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	775.546.000,00	57.600.000,00	63.360.000,00	63.360.000,00	70.521.264,00
BELANJA MODAL	**89.753.902.940,00**	**103.848.841.602,00**	**69.228.942.593,18**	**43.213.252.689,00**	**77.053.543.830,00**
Belanja Modal Tanah	1.025.276.300,00	723.073.962,00	1.053.059.242,00	861.471.700,00	1.172.081.263,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.710.223.053,00	18.297.386.946,00	11.393.369.748,00	8.383.182.681,00	12.681.105.364,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.183.777.725,00	53.184.829.425,00	33.605.479.353,00	24.642.236.887,00	37.403.738.657,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.784.625.862,00	31.464.043.269,00	23.121.034.250,18	8.963.076.421,00	25.734.289.146,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	179.508.000,00	56.000.000,00	323.285.000,00	62.329.400,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	**2.633.036.163,00**	**1.977.663.278,00**	**1.330.046.402,00**	**2.900.000.000,00**	**1.480.374.897,00**
Belanja Tak Terduga	2.633.036.163,00	1.977.663.278,00	1.330.046.402,00	2.900.000.000,00	1.480.374.897,00
BELANJA TRANSFER	**102.225.932.872,00**	**112.024.733.374,00**	**103.764.358.365,00**	**109.508.794.961,00**	**115.492.324.969,00**
Belanja Bagi Hasil	1.237.099.872,00	1.216.354.374,00	0,00	2.696.704.257,00	-
Belanja Bantuan Keuangan	100.988.833.000,00	110.808.379.000,00	**103.764.358.365,00**	106.812.090.704,00	115.492.324.969,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	**857.874.377.782,25**	**885.015.750.318,80**	**904.311.515.312,78**	**910.562.452.913,69**	**1.006.521.324.969,00**

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal APBD diperkirakan mengalami surplus, kelebihan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dengan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan mengalami defisit, kebutuhan pendanaan dapat dipenuhi melalui penerimaan pembiayaan daerah yang juga ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah tabel realisasi pembiayaan daerah Tahun 2022 – 2024, target pembiayaan daerah Tahun 2025 dan proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2026 untuk Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Tabel 2. 11 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 - 2026

Uraian	JUMLAH				
	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Target Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi pada Tahun 2026 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**37.256.510.407,94**	**8.138.537.864,07**	**8.371.132.827,40**	**4.335.496.696,69**	**9.317.280.115,00**
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	37.256.510.407,94	8.138.537.864,07	8.371.132.827,40	4.835.496.696,69	9.317.280.115,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.620.000.000,00	1.725.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	4.620.000.000,00	1.725.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETO	**32.636.712.081,94**	**6.413.537.864,07**	**8.371.132.827,40**	**4.335.496.696,69**	**0,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun SiLPA Berkenaan	**8.126.059.660,36**	**8.475.746.848,64**	**4.835.496.696,69**	**0,00**	**9.317.280.115,00**

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK). Kedua jenis indikator ini berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.

Indikator dan target kinerja harus dinyatakan secara jelas pada tahap perencanaan serta dievaluasi pada akhir pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk menjamin terpenuhinya aspek akuntabilitas dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Majene yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, Adapun Visinya adalah Majene **Unggul**, **Mandiri**, **Religius**, Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Majene Unggul: Bermakna bahwa Menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,

Majene Mandiri: Bermakna bahwa Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas

pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri,

Majene Religius: Bermakna bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Majene yang mengamalkan nilai-nilai agama yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, budaya dan kearifan lokal yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Dengan demikian visi Kabupaten Majene yang Unggul, Mandiri dan Religius bermakna layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya, kemudian memfasilitasi kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang berbasis pada kemandirian yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut akan mendorong terwujudnya masyarakat religius sebagai perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Dalam rangka merealisasikan visi pembangunan tersebut, terdapat 4 (empat) misi pembangunan yang dicanangkan yaitu:

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Majene yang unggul dan kompetitif;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel;
c. Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan; dan
d. Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal, dan agamis,

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene dan pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 12 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2025
Visi: Majene Unggul, Mandiri, Religius

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025
1,	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif**	**Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat**		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Nilai**	**69,56**
			Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pelayanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,56
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,54
			Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	62,67
				Prevalensi Stunting	%	16,00
			Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsif gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	96,70
				Indeks Perlindungan Anak	Nilai	71,26
			Meningkatnya standar hidup	Persentase Penduduk Miskin	%	11,17

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025
			masyarakat yang merata hingga pedesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,82
				Gini Ratio	Poin	0,321
2,	**Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel**	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bermutu dan berbasis Teknologi informasi**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**poin**	**71 (BB)**
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Poin Predikat SAKIP	Predikat	BB
				Opini BPK	Predikat	WTP
				Nilai LPPD	Nilai	3,60
			Meningkatnya Kualitas dan ketepatan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86 (baik)
			Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah	Tingkat maturitas SPBE	Poin Predikat	3,0 (Baik)
			Terciptanya upaya pembangunan daerah yang inovatif pada segala sektor	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	%	90,00
3,	Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis Pembangunan berkelanjutan		Pendapatan Perkapita	Rp	29,33 (Juta)
			Meningkatnya kontribusi pengelolaan SDA dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,46
				Laju Inflasi (yoy)	Poin	1,79
			Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan permukiman masyarakat	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	78,15
			Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	71
3,	**Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis**	**Meningkatkan kesalihan sosial masyarakat**		**Indeks Kesalihan Sosial**	**%**	**78,00**
			Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara	Angka Kriminalitas	%	190

Prioritas Daerah Kabupaten Majene dalam RKPD Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Oleh karena itu, perumusan prioritas daerah perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga tercipta sinergi dan kesinambungan dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan adanya keterpaduan tersebut, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majene dapat berjalan secara efektif dan selaras dengan arah pembangunan nasional, guna mendukung terwujudnya Indonesia Maju.

Tema Pembangunan Kabupaten Majene tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dalam Menunjang Kemandirian Daerah**", Adapun dari penjabaran tema tersebut, dapat disusun prioritas daerah sebagai berikut:

a. Penguatan reformasi birokrasi, inklusifitas pelayanan publik dan supremasi hukum,
   Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
   1) Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi;
   2) Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
   3) Peningkatan profesionalitas ASN;
   4) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
   5) Optimalisasi pengawasan internal pemerintah;
   6) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik; dan
   7) Implementasi *Smart City*.

   Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:
   1) Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
   3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
   4) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
   5) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   6) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
   7) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
   8) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
   9) Program Informasi dan Komunikasi Publik; dan
   10) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

b. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia,
   Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

   1) Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
   2) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
   3) Implementasi perda literasi;
   4) Penurunan angka prevalansi stunting;
   5) Penurunan angka kematian ibu dan bayi;
   6) Penurunan angka putus sekolah;
   7) Penguatan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat;
   8) Penurunan angka kemiskinan ekstrem melalui penguatan kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat miskin seperti:
      a) Penguatan pendataan dan verivali data penduduk miskin
      b) Penguatan program PKH
      c) Bantuan sosial tepat sasaran
      d) Pemrioritasan lokus pembangunan infrastruktur dasar di pusat- pusat kemiskinan;
   9) Penguatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
   10) Pelayanan Jaminan Sosial bagi Masyarakat berpenghasilan rendah Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:
      a) Program Pengelolaan Pendidikan;
      b) Program Pengembangan Kurikulum;

c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
d) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
f) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
g) Program Pengendalian Penduduk;
h) Program Rehabilitasi Sosial;
i) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
j) Program Peningkatan Kapasitas Pemuda;
k) Program Penempatan Tenaga Kerja; dan
l) Program Pengendalian Pembangunan Daerah,

c. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak
Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
1) Pemenuhan hak dan perlindungan anak;
2) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
3) Penguatan kabupaten Layak anak,

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah
1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
2) Program Perlindungan Perempuan;
3) Program Perlindungan Khusus Anak;
4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
5) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha); dan
6) Program Perlindungan Khusus Anak,

d. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal
Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
1) Pengelolaan Sumber Daya Alam unggulan;
2) Peningkatan kualitas produk Unggulan;
3) Penguatan Kapasitas dan Produktivitas IKM, UMKM;
4) Penguatan BUMD Desa dalam meningkatkan perekonomian;
5) Optimalisasi bantuan usaha pelaku IKM dan UMKM serta ekonomi kreatif;
6) Penguatan pemasaran produk IKM dan UMKM serta ekonomi kreatif;
7) Penguatan promosi destinasi pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat;
8) Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan;
9) Penguatan agrobisnis dan agroteknologi; dan
10) Revitalisasi industrialisasi daerah,

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:
1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
2) Program Pengembangan UMKM;
3) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
5) Program Penyuluhan Pertanian;
6) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

8) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
9) Program Pemasaran Pariwisata;
10) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
11) Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
12) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
13) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
14) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
15) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
16) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
17) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; dan
18) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tabel 2. 13 Perbandingan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tahun 2025

Indikator makro	Target Kabupaten Majene	Target Provinsi Sulawesi Barat	Target Nasional
Pertumbuhan Ekonomi	6,46 %	5,8 %	5,3% – 5,6%
Tingkat Kemiskinan	11,17 %	9,73 %	7,0% – 8,0%
Indeks Pembangunan Manusia	69,56	70,36	74,27
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,82 %	2,45 %	4,5% – 5,0%
Indeks Gini Rasio	0,321	0,338	0,379 – 0,382

Sumber: RKPD Kabupaten Majene, 2025

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021-2026. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah ke dalam kinerja tahunan,

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita (Visi dan Misi) dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator kinerja pembangunan yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan.

Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukan parameter keberhasilan/pencapaian suatu daerah yang dapat menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja juga diperlukan oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdiri dari Indikator Tujuan, Indikator Sasaran Daerah, Indikator Kinerja sasaran OPD dan Indikator Kinerja Program.

2.3.1. Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi, Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tahun 2025

No	Indikator	Target
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	69,56
2	Indeks Reformasi Birokrasi	71 (BB)
3	Pendapatan Perkapita	30,03 (Juta)
4	Indeks Kesalihan Sosial	78%
5	Rata-rata Lama Sekolah	9,56 Tahun
6	Harapan Lama Sekolah	14,54 Tahun
7	Angka Harapan Hidup	62,67 Tahun
8	Prevalensi Stunting	16,00%
9	Indeks Pembangunan Gender	96,70 Poin
10	Indeks Perlindungan Anak	72,6 Poin
11	Persentase Penduduk Miskin	11,17%
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,82%
13	Gini Ratio	0,321 Poin
14	Poin Predikat SAKIP	BB
15	Opini BPK	WTP
16	Nilai LPPD	3,60 Poin
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	86 (Baik)
18	Tingkat maturitas SPBE	3 Poin (Baik)
19	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	90%
20	Pertumbuhan Ekonomi	6,46%
21	Laju Inflasi (yoy)	1,79 Poin
22	Indeks Infrastruktur Wilayah	78,15%
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71%
24	Angka Kriminalitas	190 Kasus
25	Laju Inflasi (yoy)	1,79 Poin

2.3.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Majene, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 15 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target
Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	Nilai	69,56
2	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	71 (BB)
3	Pendapatan Perkapita	Rp	30,03 (Juta)
4	Indeks Kesalihan Sosial	%	78
5	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,56
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,54
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	62,67
8	Prevalensi Stunting	%	16,00
9	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	96,70
10	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	72,6
11	Persentase Penduduk Miskin	%	11,17
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,82
13	Gini Ratio	Poin	0,321
14	Poin Predikat SAKIP	Predikat	BB
15	Opini BPK	Predikat	WTP
16	Nilai LPPD	Nilai	3,60
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86 (baik)
18	Tingkat Maturitas SPBE	Poin (predikat)	3,6 (Baik)
19	Persentase Inovasi Daerah yang Terimplementasikan Berkesinambungan	%	90
20	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,46
21	Laju Inflasi (yoy)	Poin	1,79
22	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	78,15
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	71,20
24	Angka Kriminalitas	%	190
Aspek Pelayanan Umum			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	Angka Partisipasi Kasar SD	%	105,91
2	Angka Partisipasi Kasar SMP	%	98,23
3	Angka Partisipasi Murni SD	%	99,50
4	Angka Partisipasi Murni SMP	%	99,00
5	Angka Partisipasi Sekolah SD	%	99,50
6	Angka Partisipasi Sekolah SMP	%	99,00
7	Persentase Sarpras Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	90,00
8	Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi B	%	87,00
9	Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi B	%	70,00

No	Indikator	Satuan	Target
10	Persentase Satuan Pendidikan dan Pendidikan Non Formal yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	100,00
11	Persentase Guru PAUD, SD, SMP yang Bersertifikasi	%	90,00
12	Persentase Izin yang Diterbitkan	%	70
13	Persentase Bahasa dan Sastra yang di Kembangkan	%	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,90
2	% Fasyankes yang Memiliki Dokumen Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien	%	73,00
3	Prevalensi Penyakit Menular	%	31,39
4	% Fasyankes yang Terpenuhi Kebutuhan ASPAK Sesuai Standar	%	90,91
5	Proporsi Anggaran yang Dialokasikan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	41,00
6	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	100,00
7	% Ketersediaan Apotek, Toko Obat, Alkes dan Optikal UMOT dan PIRT Sesuai Standar	%	95,00
8	Persentase Desa/ Kelurahan Sehat	%	60,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Persentase Bangunan Perkuatan Tebing (talud) dan Pengamanan Pantai (Tanggul) Dalam Kondisi Baik	%	89,62
2	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	96,75
3	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM / Jaringan Perpipaan Terhadap Jumlah Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten	%	65,82
4	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (Non Perpipaan)	%	34,18
5	Persentase Sarana Persampahan Regional	%	100
6	Persentase Akses Sanitasi	%	85,00
7	Proporsi Drainase Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	96,22
8	Persentase Infrastruktur di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	%	100,00
9	Persentase Kondisi Gedung Pemerintah Baik	%	100,00
10	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diawasi Atas Perizinan Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan	%	100,00
11	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	56,33
12	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	98,50
13	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	100,00
14	Persentase Permohonan LUJK yang Terlayani	%	100,00
15	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dan RDTR	%	100,00
16	Ketersediaan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat	Ada/Tidak Ada	Ada
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Persentase Perbaikan Rumah Akibat Bencana	%	80,00
2	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten	%	75,00
3	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	%	85,00

No	Indikator	Satuan	Target
4	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani Terhadap Total Luas Permukiman Kumuh Seluruh Kabupaten	%	85,00
5	Persentase Kawasan Permukiman di Kabupaten yang Ditangani	%	80,00
6	Persentase Kondisi PSU dalam Kondisi Baik	%	80,00
7	Persentase Perumahan yang Dilengkapi Dengan PSU	%	80,00
8	Persentase Sertifikat yang Diterbitkan	%	80,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diselesaikan	%	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100,00
3	Rasio PPNS Terhadap Jumlah Pegawai	%	75,00
4	Persentase PNS Satpol yang mengikuti Diklat/ Pendidikan	%	75,00
5	Persentase Anggota Linmas yang Bersertifikasi	%	75,00
6	Persentase Peningkatan Pelayanan, Responsifitas dalam Penanganan Bencana	%	100,00
7	Persentase Peningkatan Responsifitas dalam Penanganan Kebakaran	%	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	Persentase KAT yang Ditangani	%	100,00
2	Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100,00
3	Persentase PMKS yang Tertangani	%	75,00
4	Persentase Pemutakhiran Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	%	100,00
5	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100,00
6	Persentase Kampung Siaga yang Terbentuk	%	35,00
7	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100,00
8	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
1	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tenaga kerja	Ada/ Tidak ada	ada
2	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	100,00
3	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	100,00
4	Persentase Penempatan Pencari Kerja	%	100,00
5	Persentase Konflik Ketenagakerjaan yang Ditangani	%	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Persentase Lembaga PUG yang Aktif	%	65,00
2	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	48,00
3	Persentase Perangkat Daerah yang Responsif Gender	%	80,00
4	Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100,00

No	Indikator	Satuan	Target
5	Persentase Keluarga dan Anak yang Terlayani	%	100,00
6	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	55,00
7	Persentase Data Gender dan Anak yang Tersedia dan Disajikan Sesuai Standar	%	70,00
8	Persentase Pemenuhan Hak Anak	%	90,00
9	Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak	%	50,00
10	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang di Tangani	%	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
1	Persentase Lumbung Pangan Masyarakat yang Aktif	%	100,00
2	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	nilai	82,10
3	Persentase Kesediaan Pangan Utama	%	89,95
4	Persentase Desa Rawan Pangan	%	4,88
5	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN PERTANAHAN			
1	Persentase Pengajuan Izin Lokasi yang Disetujui	%	65,00
2	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terfasilitasi	%	80,00
3	Cakupan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	80,00
4	Persentase Tanah Milik Masyarakat yang Terfasilitasi Untuk Mendapatkan Sertifikat	%	90,00
5	Persentase pengelolaan Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	%	85,00
6	Persentase Luas Lahan yang Bersertifikat	%	65,00
7	Ketersediaan Dokumen Rencana Penggunaan Tanah	%	75,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100,00
2	Indeks Kualitas Air	%	59,15
3	Indeks Kualitas Udara	%	84,71
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	67,42
5	Luas RTH yang Tersedia	%	77,85
6	Persentase Perizinan Pengelolaan Limbah B3 yang Diterbitkan	%	100,00
7	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin PPLH yang Diterbitkan	%	90,00
8	Presentasi Data MHA yang Tersedia	%	25,00
9	Persentase Masyarakat / Komunitas Peduli Lingkungan Hidup yang Mendapatkan Edukasi Lingkungan Hidup	%	100,00
10	Persentase Pelatihan, Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	%	100,00
11	Klasifikasi Adipura	Peringkat	Kelas III
12	Persentase Aduan Lingkungan Hidup yang Ditangani	%	100,00
13	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	22,00
14	Persentase TP3SR Di Desa dan Kelurahan	%	20,73
15	Persentase Cakupan Area Penanganan Persampahan	%	64,75

No	Indikator	Satuan	Target
16	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	66,35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Persentase Kepemilikan KTP	%	100,00
2	Persentase Kepemilikan KK	%	100,00
3	Persentase Kepemilikan KIA	%	40,00
4	Persentase Kepemilikan Akte	%	100,00
5	Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran	%	100,00
6	Cakupan Dokumen Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	%	100,00
7	Persentase OPD / Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data (MOU) Kependudukan	%	55,00
8	Persentase Ketersediaan *Database* Kependudukan	%	100,00
9	Persentase Jenis Informasi yang Dimutakhirkan dalam Data Profil Kependudukan	%	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	100,00
2	Persentase Jumlah Kerja Sama Desa	%	82,10
3	Cakupan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%	100,00
4	Persentase Desa Berkembang; Mandiri; Maju	%	30,00
5	Persentase Bumdesa yang Aktif	%	35,00
6	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Dibina	%	4,00
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	%	80,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	TFR (*Total Fertility Rate*)	Nilai	2,52
2	Persentase *Contraceptive Prevalance Rate* (CPR)	%	75,93
3	Persentase peserta KB Aktif MKJP	%	42,00
4	Persentase Kampung KB	%	36,00
5	*Unmet Need*	%	9,12
6	Persentase PUS Kelompok Ketahanan Keluarga yang Ber-KB	%	83,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
1	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	%	80,50
2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	89,00
3	Cakupan Pengelolaan Pelayaran	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Persentase PPID yang Aktif	%	100,00
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online* dan Terintegrasi	%	80,00
3	Jumlah Sistem Informasi yang Sudah Terintegrasi	SIM	6,00
4	Jumlah Layanan yang Sudah Berbasis Digital	Layanan	2
5	Indeks SPBE	Poin	3,0
6	Persentase Perangkat Daerah Sudah Tersambung Jaringan Internet	%	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			

No	Indikator	Satuan	Target
1	Persentase KSP yang Difasilitasi Perizinannya	%	25,00
2	Persentase Koperasi yang Aktif	%	36,70
3	Persentase KSP/USP Koperasi yang Sesuai Dengan Kriteria Penilaian	%	57,50
4	Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	0,92
5	Persentase Pengelola Koperasi yang Bersertifikat	%	4,88
6	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	5,05
7	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	%	5,43
8	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	%	4,33
9	Persentase Usaha Mikro yang Melakukan Kemitraan	%	0,20
10	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	%	0,16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
1	Dokumen Pengembangan iklim Penanaman Modal	Dok	2
2	Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	60
3	Jumlah Nilai Investasi	Milyar Rp	160,00
4	Dokumen Strategi Penanaman Modal	ada/tidak ada	ada
5	Nilai IKM (Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan/Non Perizinan)	Point	85,00
6	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	%	100,00
7	Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	%	95,00
8	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	%	75,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	100
2	Cakupan Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	%	100
3	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
1	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terpenuhi	%	35
2	Persentase OPD yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	%	35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
1	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	%	55
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
1	Persentase *Event* Kesenian Skala Nasional/Regional yang Dilaksanakan	%	87,50
2	Persentase Lembaga Adat yang Dibina	%	100,00
3	Persentase Kelompok Kesenian yang Dibina	%	20,00
4	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	81,82
5	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	%	94,74
6	Persentase Sarana dan Prasarana Museum dalam Kondisi Baik	%	60,00

No	Indikator	Satuan	Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
1	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	40,00
2	Persentase Perpustakaan yang Dibina	%	100,00
3	Persentase Kelompok Literasi yang Dibina	%	100,00
4	Persentase Naskah Kuno yang Diakuisisi/ Dialih Media (di-gitalisasi)/ Terdaftar Dalam Wilayahnya	%	26,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	%	92,50
2	Persentase Arsip yang Didokumentasikan (*Scan*)	%	26,00
3	Persentase Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup yang Dikelola	%	90,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	%	100,00
2	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	%	100,00
3	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	100,00
4	Persentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	122,302
2	Jumlah Objek Wisata Super Prioritas yang Dikembangkan	Objek	5
3	Persentase Sarana dan Prasarana di Objek Wisata Prioritas dalam Kondisi Baik	%	75
4	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	0,80
5	Persentase Promosi Pariwisata	%	100
6	Persentase Ruang Berekspresi Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibangun	%	87,5
7	Persentase Peserta Pelatihan yang Memahami Materi Pelatihan	%	90,00
8	Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kompetensi (Terlatih)	%	93,33
9	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Bersertifikasi (Uji Kompetensi)	%	93,33
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	5,00
2	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	%	5,00
3	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	%	5,00
4	Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan	%	5,00
5	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	%	75,00
6	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Ternak	%	100,00
7	Persentase Hama Penyakit yang Ditangani	%	80,00
8	Persentase Luas Serangan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan yang Tertangani	%	75,00
9	Persentase Pemberian Rekomendasi Pada Kelompok Tani Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti	%	100,00
10	Persentase Penyuluh yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	100,00

No	Indikator	Satuan	Target
11	Persentase Kelembagaan Petani yang Dibina	%	90,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
1	Persentase Permohonan Ijin Usaha Perdagangan yang Memperoleh Rekomendasi	%	77,00
2	Persentase Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	%	68,18
3	Persentase Kecukupan *Stock* Barang Kebutuhan Pokok Daerah	%	100,00
4	Persentase Usaha Komoditi Ekspor yang Mendapat Fasilitasi Pengembangan	%	40,00
5	Persentase UTTP yang Bertanda Tera Sah	%	100,00
6	Persentase Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi Pemasaran	%	20,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
1	Persentase Sentra Industri Aktif	%	100,00
2	Persentase IKM yang Menempati Sentra Industri	%	100,00
3	Persentase IKM yang Memiliki Rekomendasi Penerbitan Izin	%	83,33
4	Persentase IKM yang Terdaftar di SIINas	%	83,33
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Transmigrasi	Dokumen	1
2	Persentase Transmigrasi Umum	%	100
3	Persentase Kawasan Transmigrasi yang di Kembangkan	%	100
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DAERAH			
1	Persentase Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang di Fasilitasi dan Terdokumentasi Dengan Baik	%	100,00
2	Persentase OPD Dengan Nilai IKM yang Kategori Baik	%	90,00
3	Persentase Tingkat Pemenuhan Data Indikator dalam Dokumen LPPD	%	100,00
4	Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan/ Diterbitkan	%	100,00
5	Persentase Fasilitasi Layanan Kesra	%	100,00
6	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	%	100,00
7	Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian	%	100,00
8	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan	%	100,00
9	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	%	100,00
10	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemantauan SDA	%	100,00
SEKRETARIAT DPRD			
1	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Untuk Anggota DPRD	%	100
2	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di Fasilitasi	%	100
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
PERENCANAAN			
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu Penyusunannya Berdasarkan Regulasi	%	100
2	Persentase Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu Penyusunannya Berdasarkan Regulasi	%	100

No	Indikator	Satuan	Target
3	Persentase Indikator Sasaran Dalam RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Tingkat Capaiannya di atas 90%	%	55,00
4	Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Tingkat Capaiannya di atas 90%	%	85,00
5	Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang Tingkat Capaiannya di atas 90%	%	55,00
KEUANGAN			
1	Opini BPK		WTP
2	Persentase SiLPA Terhadap APBD	%	1,20
3	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah daerah	%	100,00
4	Ketepatan waktu penyusunan Ranperda pertanggungjawaban APBD		Tepat Waktu
5	Ketepatan Waktu Pengesahan APBD		Tepat Waktu
6	Persentase OPD yang Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	90,00
7	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	%	5,44
8	Persentase peningkatan Pendapatan	%	5,23
KEPEGAWAIAN			
1	Persentase Data Kepegawaian yang *Up To Date*	%	100
2	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	25
3	Indeks kepuasan ASN Terhadap Pelayanan BKPSDM	%	90
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Persentase Pengembangan kompetensi ASN Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi	%	17
2	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural	%	39
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Persentase Rekomendasi Penelitian dan pengembangan inovasi yang Ditindaklanjuti	%	100
2	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Terdiseminasi	%	100
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
INSPEKTORAT DAERAH			
1	Persentase Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklajuti	%	100
2	Persentase catatan/Saran Hasil Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditindaklanjuti	%	100
3	Jumlah OPD yang Dievaluasi SAKIPnya Minimal B	OPD	18
4	Jumlah OPD yang Mendapatkan Pendampingan Menuju Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)	OPD	12
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
1	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	nilai	85,00
2	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	%	98,00

No	Indikator	Satuan	Target
3	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda Sesuai Kewenangan Kecamatan	%	58,00
4	Persentase Rekomendasi FKUB Kecamatan yang Ditindaklanjuti	%	98,00
5	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa dan Melaksanakan Siklus Tahunan Desa Tepat Waktu	%	58,00
Aspek Daya Saing Daerah			
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Rp	910.000
2	Nilai Tukar Petani	Poin	115,25
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	49,29
4	Produktivitas Total Daerah Berdasarkan PDRB ADBH	Poin	61,3
5	Indeks Desa Membangun (Desa kategori "Maju")	Desa	7
6	Rasio Ekspor Terhadap Impor	Rasio	0,65
7	Total Posisi Pinjaman yang Diberikan Bank Umum dan BPR	Juta Rupiah	1.410.000
8	Jumlah Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Skala Usaha	Juta Rupiah	490.000
9	Rasio Ketersediaan Listrik	Rasio	99,95
10	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Kasus	190
11	Rasio Ketergantungan	Rasio	0,5

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan adalah laporan yang menyajikan ringkasan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dengan membandingkan target dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Ikhtisar ini menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen APBD dan dapat memuat informasi persentase tingkat pencapaian program dan kegiatan, efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengetahui kinerja suatu entitas akuntansi dalam mengelola anggaran. Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100 persen, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100 persen, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Realisasi kinerja keuangan instansi pemerintah Kabupaten Majene pada periode pelaporan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan**.** Dari total pagu anggaran senilai Rp910.562.452.913,69 realisasi anggaran mencapai senilai Rp864.014.832.041,78 atau 94,88 persen, yang mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang optimal serta pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan sesuai rencana.

Realisasi pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Majene secara persentase menunjukkan tren positif dari target pendapatan senilai Rp906.226.956.217,00 mampu merealisasikan senilai Rp881.015.994.509,59 atau 97,21 persen. Jika ditelisik lebih jauh pendapatan utama pemerintah kabupaten Majene bersumber dari Pendapatan Transfer yang ditargetkan senilai Rp789.268.730.174,00 terealisasi senilai Rp779.225.014.984,00 atau 98,72 persen dan Pendapatan Asli Daerah ditargetkan senilai Rp116.958.226.043,00 terealisasi Rp101.790.979.525,59 atau 87,03 persen.

Adapun beberapa faktor yang memengaruhi realisasi anggaran antara lain penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, dinamika kebijakan, serta kondisi eksternal maupun internal, yang berdampak pada belum optimalnya realisasi pada sebagian kegiatan. Namun demikian, instansi telah melakukan langkah-langkah pengendalian dan evaluasi secara berkala guna meminimalkan deviasi antara perencanaan dan realisasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Untuk itu pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tantang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), terdapat beberapa peraturan lain yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7);

l. Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene ((Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 5);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 Nomor 5);

o. Peraturan Bupati Majene Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene;

p. Peraturan Bupati Majene Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 7); dan

q. Peraturan Bupati Majene Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 Nomor 13).

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan bagian strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjamin keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan ini dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Optimalisasi PAD dilakukan melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, penguatan sistem pemungutan berbasis digital, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian. Pemerintah daerah juga terus melakukan pembenahan regulasi dan basis data objek pajak guna meningkatkan akurasi dan potensi penerimaan daerah.

Dalam hal pendapatan transfer, pemerintah daerah berpedoman pada kebijakan fiskal nasional serta melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat guna memastikan penyaluran dana transfer berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Sementara itu, pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kemandirian keuangan, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang optimal, diharapkan pendapatan daerah mampu menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapat asli daerah, harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan agar dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat). Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

3.1.1.1.1 Intensifikasi

Intensifikasi pendapatan asli daerah, adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (Badan Pendapatan Daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain. Dengan berlakunya sistem dan prosedur tersebut, organisasi Badan Pendapatan Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pendapatan daerah, tidak lagi berorientasi pada sektor atau bidang pungutan tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional, sehingga:

    1) Dengan orientasi pada kegiatan pada fungsi-fungsi dalam organisasi dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga pola koordinasi dapat lebih terarah; dan
    2) Sistem pengawasan menjadi lebih baik.

b. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:

    1) Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
    2) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi;

3) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya; dan
4) Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.

c. Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
   1) Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan;
   2) Penyesuaian tarif; dan
   3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.

d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi:

   1) Pengawasan dan pengendalian yuridis
   Dalam hal ini perlu diteliti apakah pungutan PAD telah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

   2) Pengawasan dan pengendalian teknis
   Menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran.

   3) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan
   Menitikberatkan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.

e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD;
   Meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.

3.1.1.1.2 Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun dalam upaya intensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional. Secara eksplisit kemungkinan ekstensifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa jenis pajak yang memenuhi kriteria adalah yang bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Objek pajak terletak di wilayah daerah yang bersangkutan;
b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
c. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi/pusat;
d. Potensinya memadai;
e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;

f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan

g. Menjaga kelestarian lingkungan.

3.1.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri atas tiga kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat memengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

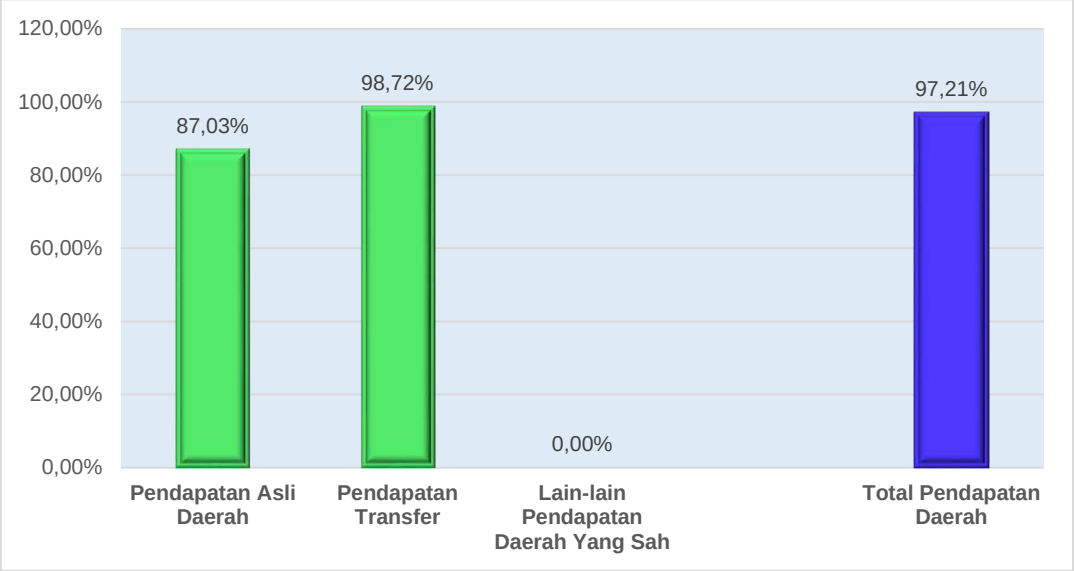
Untuk Tahun Anggaran 2025 jumlah pendapatan dalam APBD Pokok Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Majene Peraturan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 ditargetkan senilai Rp906.226.956.217,00. Dari jumlah tersebut yang terealisasi senilai Rp881.015.994.509,59 atau mencapai 97,21 persen. Target dan realisasi dari masing-masing kelompok pendapatan tersebut dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Kelompok Pendapatan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

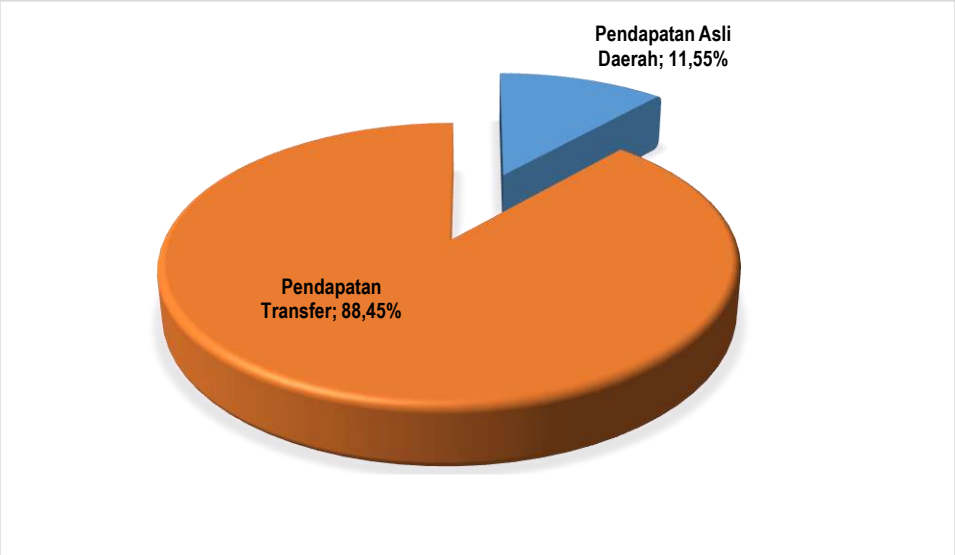
Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Asli Daerah	116.958.226.043,00	101.790.979.525,59	87,03
Pendapatan Transfer	789.268.730.174,00	779.225.014.984,00	98,72
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
Total	**906.226.956.217,00**	**881.015.994.509,59**	**97,21**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas untuk Pendapatan Asli Daerah senilai 87,03 persen, Pendapatan Transfer mencapai 98,72 persen dan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai 0,00 persen, sehingga secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan daerah Kabupaten Majene senilai Rp881.015.994.509,59 atau 97,21 persen dari target senilai Rp906.226.956.217,00. Gambaran tingkat capaian target dan komposisi realisasi dari ketiga jenis pendapatan daerah tersebut pada Tahun 2025 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Grafik 3. 1 Capaian Target dan Realisasi Pendapatan



Grafik 3. 2 Komposisi Capaian Realisasi Tiap Komponen Pendapatan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Dari diagram komposisi realisasi pendapatan daerah di atas untuk Tahun 2025 ini terlihat bahwa sektor Pendapatan Asli Daerah menyumbang senilai 11,55 persen dari total realisasi, sektor Pendapatan Transfer memberikan kontribusi senilai 88,45 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak memberikan kontribusi, yaitu senilai 0,00 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024 terdapat peningkatan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah di mana pada Tahun sebelumnya senilai 10,27 persen dan mengalami penurunan pada sektor Pendapatan Transfer Daerah yang sebelumnya mencatat senilai 89,73 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih mencatat senilai 0,00 persen terhadap total realisasi keseluruhan pendapatan. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat terus meningkat agar dapat memberikan kontribusi.

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing komponen penerimaan pendapatan daerah:

3.1.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah

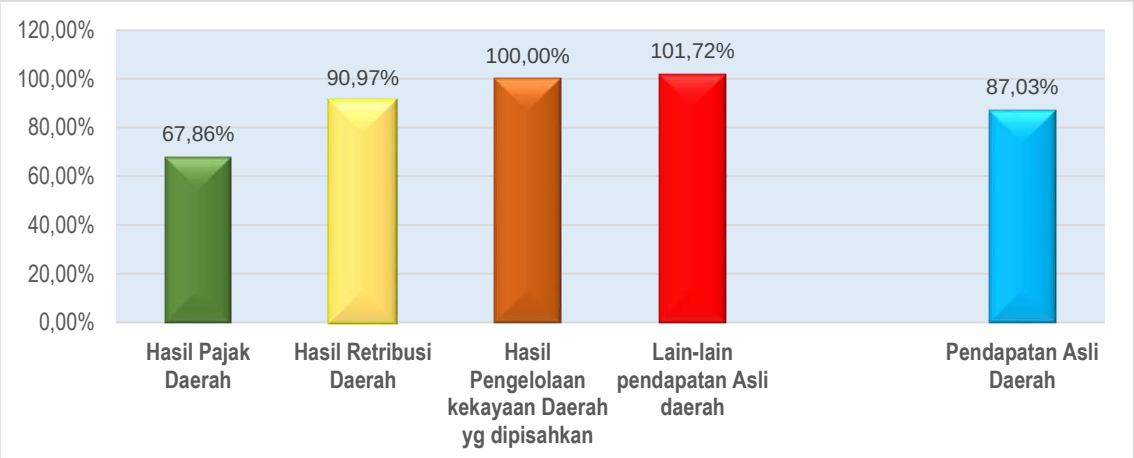
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan pendapatan asli daerah dapat memengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat akan semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan senilai Rp116.958.226.043,00 dan terealisasi senilai Rp101.790.979.525,59 atau mencapai 87,03 persen dari target. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Gambaran tingkat capaian target dari komponen pendapatan asli daerah pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Hasil Pajak Daerah	24.265.113.570,00	16.467.904.514,25	67,86
Hasil Retribusi Daerah	82.889.435.754,00	75.411.226.265,00	90,97
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.534.611.072,00	3.534.611.072,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli daerah	6.269.065.647,00	6.377.237.674,34	101,72
Pendapatan Asli Daerah	**116.958.226.043,00**	**101.790.979.525,59**	**87,03**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025



Grafik 3. 3 Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Dari tabel dan diagram di atas terlihat bahwa penerimaan pajak daerah belum dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan di mana tingkat penerimaan realisasi pajak daerah tersebut senilai 67,86 persen, sedangkan untuk hasil retribusi daerah senilai 90,97 persen, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai 100,00 persen dan untuk lain-lain pendapatan asli daerah senilai 101,72 persen. Dari keempat komponen pendapatan asli daerah ada dua jenis pendapatan asli daerah yang memenuhi target 100 persen yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai 100 persen dan lain-lain pendapatan asli daerah senilai 101,72 persen dan untuk pendapatan asli daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah kurang 9,03 persen lagi untuk mencapai realisasi senilai 100 persen.

3.1.1.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari dana transfer baik transfer tersebut bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Salah satu kelompok dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Dana Perimbangan, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang diberikan ke daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

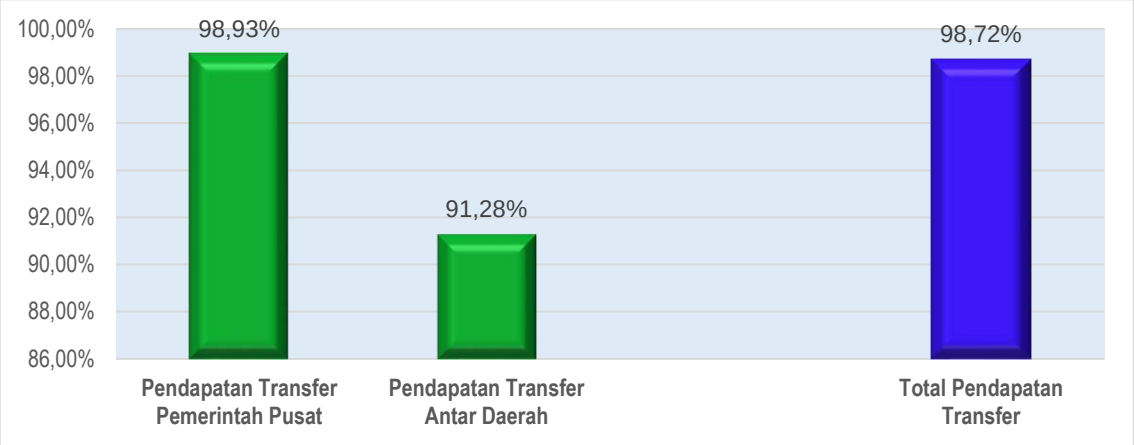
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Nonfisik. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut Dana Alokasi Umum merupakan penyumbang terbesar setiap Tahunnya dalam APBD Kabupaten Majene.

Untuk Tahun 2025 secara keseluruhan Pendapatan Transfer ditargetkan senilai Rp789.268.730.174,00 dan terealisasi senilai Rp779.225.014.984,00 atau mencapai 98,72 persen dari target. Gambaran tingkat capaian target dari komponen dana perimbangan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Dana Perimbangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	768.344.427.000,00	760.123.684.301,00	98,93
Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	91,28
Total Pendapatan Transfer	**789.268.730.174,00**	**779.225.014.984,00**	**98,72**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025



Grafik 3. 4 Persentase Capaian Target Pendapatan Transfer Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Dari tabel dan diagram di atas terlihat bahwa dari dua komponen penerimaan yang bersumber dari transfer, capaian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi tidak mencapai target yang ditentukan, Adapun kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat hanya terealisasi senilai 98,93 persen dan Pendapatan Transfer Antar Daerah hanya terealisasi senilai 91,28 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

3.1.1.2.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat merupakan penerimaan daerah yang merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan sumber pendapatan yang paling material memengaruhi kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Majene dalam menjalankan fungsi otonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Kelompok Transfer Pemerintah Pusat yang diperoleh Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Desa. Dana Perimbangan sendiri jenis pendapatan yang paling besar di antara semua kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di mana dalam rinciannya terdapat Dana Bagi Hasil Pajak maupun Non Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Capaian realisasi

pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan pada Tahun 2025 Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Dana Perimbangan	**715.688.574.000,00**	**712.396.005.533,00**	**99,53**
Dana Bagi Hasil	5.826.710.000,00	5.634.568.300,00	96,70
Dana Alokasi Umum	535.243.742.000,00	544.376.636.960,00	101,70
Dana Alokasi Khusus Fisik	24.453.962.000,00	24.111.344.842,00	98,59
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	150.164.160.000,00	138.273.455.431,00	92,08
Dana Desa	**52.655.853.000,00**	**47.727.678.768,00**	**90,64**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**768.344.427.000,00**	**760.123.684.301,00**	**98,93**
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah,Tahun 2025			

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa persentase tertinggi capaian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 adalah Dana Alokasi Umum dengan persentase 101,70 persen. Jenis pendapatan yang tidak terealisasi sesuai target adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dana Desa. Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2025 yang tertinggi berasal dari DBH

Pajak Bumi dan Bangunan, PPh Pasal 21, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent, DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Sumber Daya Alam Perikanan, dan DBH Sawit. Dana Bagi Hasil dalam perkembangan realisasinya bersifat tidak menetap, bergantung pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan daerah pada sektor-sektor perekonomiannya. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta keselarasan program Pemerintah Pusat dan daerah. Pada Tahun 2025 Dana Alokasi Umum telah melampaui target senilai Rp535.243.742.000,00 dan terealisasi senilai Rp544.376.636.960,00 atau senilai 101,70 persen. Adapun Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2025 hanya mampu mencapai target realisasi 92,99 persen di mana Dana Alokasi Khusus Fisik mencapai 98,59 persen dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik mencapai 92,08 persen.

3.1.1.2.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, atau Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 adalah Dana Bagi Hasil bersumber dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dana Bagi Hasil terdiri Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, BBN Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok. Bantuan Keuangan Khusus adalah transfer dari Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pendanaan program kegiatan prioritas Kabupaten Majene. Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	**20.924.303.174,00**	**19.101.330.683,00**	**91,28**
- **Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor**	1.049.872.846,00	1.429.672.684,00	136,17
- **Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**	870.189.112,00	896.638.937,00	103,03
- **Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**	8.071.919.900,00	6.165.862.899,00	76,38
- **Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan**	20.513.316,00	11.497.971,00	56,05
- **Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok**	10.911.808.000,00	10.597.658.192,00	97,12
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	**0,00**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**20.924.303.174,00**	**19.101.330.683,00**	**91,28**
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025			

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat penerimaan daerah dari kelompok Pendapatan Transfer Antar Daerah persentase realisasinya mencapai 91,28 persen. Realisasi pendapatan transfer dari provinsi sangat bergantung dengan kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk merealisasikan objek pendapatan yang akan dibagi hasilkan ke pemerintah kabupaten/kota. Pada Tahun 2025 Pendapatan Transfer Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 senilai Rp19.101.330.683,00 mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya Tahun 2024 di mana Tahun 2024 mampu merealisasikan senilai Rp24.527.029.863,00 atau turun senilai Rp5.425.699.180,00. Hampir seluruh komponen dari Transfer Antar Daerah Pendapatan Bagi Hasil mengalami penurunan drastis kecuali pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok yang mengalami peningkatan dari Rp9.573.132.367,00 di Tahun 2024 menjadi Rp10.597.658.192,00 atau senilai 10,70 persen, dan untuk 2025 Pemerintah Kabupaten Majene kembali tidak mendapatkan Bantuan Keuangan seperti Tahun sebelumnya.

3.1.1.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh penerimaan pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Untuk Tahun 2025 penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dianggarkan atau ditargetkan. Sama dengan tahun sebelumnya Tahun 2024.

Tabel 3. 6 Rekapitulasi Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Hibah	0.00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai UU	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**0,00**	**0,00**	0,00
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025			

3.1.2 Pengelolaan Belanja dan Transfer Daerah

3.1.2.1. Kebijakan Umum Belanja dan Transfer Daerah

Kebijakan Umum APBD merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Majene Tahun 2025 telah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Majene Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Sesuai Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian di dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Untuk itu penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Total belanja dan transfer daerah Kabupaten Majene untuk Tahun 2025 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 dan ditargetkan senilai Rp910.562.452.913,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Rekapitulasi Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Majene Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja	**801.053.657.952,69**	**760.927.584.227,78**	**94,99**
- **Belanja Operasi**	754.940.405.263,69	720.624.276.601,78	95,45
- **Belanja Modal**	43.213.252.689,00	37.803.728.541,00	87,48
- **Belanja Tak Terduga**	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	86,19
Transfer	**109.508.794.961,00**	**102.737.016.814,00**	**93,81**
- **Transfer Bagi Hasil**	2.696.704.257,00	853.100.342,00	31,63
- **Transfer Bantuan Keuangan**	106.812.090.704,00	101.883.916.472,00	95,38
Total Belanja dan Transfer	**910.562.452.913,69**	**863.664.601.041,78**	**94,84**

3.1.2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp801.053.657.952,69 terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp754.940.405.263,69, Belanja Modal senilai Rp43.213.252.689,00 dan Belanja Tak Terduga senilai Rp2.900.000.000,00. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025 total belanja daerah yang dapat terealisasi senilai Rp760.927.584.227,78 atau 94,99 persen dari anggaran. Anggaran dan realisasi dari masing-masing kelompok tersebut dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
- **Belanja Operasi**	754.940.405.263,69	720.624.276.601,78	95,45
- **Belanja Modal**	43.213.252.689,00	37.803.728.541,00	87,48
- **Belanja Tak Terduga**	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	86,19
Total Belanja	**801.053.657.952,69**	**760.927.584.227,78**	**94,99**
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025			

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas untuk Belanja Operasi senilai 95,45 persen, Belanja Modal senilai 87,48 persen, dan Belanja Tak Terduga senilai 86,19 persen.

3.1.2.2.1. Belanja Operasi

Kelompok Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk mendanai operasional Pemerintah Kabupaten Majene dalam menyelenggarakan fungsi dan kewenangan dalam pemerintahan. Belanja Operasi digunakan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Pelaksanaan Belanja Operasi pada Tahun 2025 mencatatkan Belanja Pegawai sebagai komponen belanja dengan realisasi tertinggi dengan persentase senilai 96,55 persen. Di tempat kedua tercatat Belanja Hibah dengan tingkat realisasi senilai 95,00 persen. Selanjutnya Belanja Barang dan Jasa dengan tingkat realisasi senilai 93,61 persen. Realisasi terendah terdapat pada Belanja Bantuan Sosial yaitu senilai 93,18 persen. Secara keseluruhan Belanja Operasi yang ditargetkan senilai Rp754.940.405.263,69 dapat terealisasi senilai Rp720.624.276.601,78 atau senilai 95,45 persen. Gambaran tingkat capaian target dari komponen Belanja Operasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Pegawai	467.875.356.954,00	451.753.620.104,00	96,55
Belanja Barang dan Jasa	276.845.340.309,69	259.163.085.597,78	93,61
Belanja Hibah	10.156.348.000,00	9.648.530.900,00	95,00
Belanja Bantuan Sosial	63.360.000,00	59.040.000,00	93,18
Total Belanja Operasi	**754.940.405.263,69**	**720.624.276.601,78**	**95,45**

***Sumber* : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025**

3.1.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya. Lima komponen Belanja Modal dari keenam komponen Belanja Modal tersebut rata-rata terealisasi di atas 85,00 persen, kecuali untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin hanya terealisasi 59,70 persen. Secara keseluruhan Belanja Modal yang ditargetkan senilai Rp43.213.252.689,00 dapat terealisasi senilai Rp37.803.728.541,00 atau senilai 87,48 persen.

Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari komponen Belanja Modal tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini.

Tabel 3. 10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Modal Tanah	861.471.700,00	732.371.100,00	85,01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.383.182.681,00	5.004.809.348,00	59,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.642.236.887,00	23.797.538.257,00	96,57
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.963.076.421,00	7.906.104.836,00	88,20
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	323.285.000,00	322.905.000,00	99,88
Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
Total Belanja Modal	**43.213.252.689,00**	**37.803.728.541,00**	**87,48**

***Sumber* : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025**

3.1.2.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tak terduga pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp2.900.000.000,00 dan terealisasi 86,19 persen yaitu senilai Rp2.499.579.085,00. Sama dengan tahun sebelumnya, Belanja Tak Terduga dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Pengeluaran atas pos Belanja Tak Terduga digunakan untuk bantuan perbaikan jalan poros Limboro Paminggalan Kecamatan Sendana; bantuan pembangunan bronjong dan normalisasi sungai Desa Seppong dan Mayamba Kecamatan Sendana; pembangunan talud Salobose Kecamatan Banggae; penanganan bahu jalan yang berpotensi amblas dilingkungan Baruga Barat; penanganan pembersihan longsor Jalan Poros Paminggalan; pembangunan talud Sungai Camba Camba Kecamatan Tammerodo Sendana; rehabilitasi jembatan Kelurahan Galung- Banggae; percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan; rehabilitasi gedung dan bangunan Kesehatan; pembayaran kekeliruan setoran pajak; pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah; perbaikan Tanggul pada Dusun Karondongan Tammeroddo dan Lingkungan Parappe kelurahan Sirindu; operasional pengamanan aksi demonstrasi di Kabupaten Majene; dan dalam rangka darurat bencana Hidrometeorologi basah dan cuaca *Ekstrem* di Kabupaten Majene.

3.1.2.3. Target dan Realisasi Transfer Daerah

Transfer adalah pengeluaran uang oleh Pemerintah Kabupaten Majene sebagai entitas pelaporan ke entitas lain sebagai kewajiban atas perintah peraturan perundang-undangan. Transfer Daerah terdiri atas Transfer Bagi Hasil dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi Hasil merupakan bagi hasil atas sejumlah Pendapatan Asli Daerah kepada Desa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara Transfer Bantuan Keuangan merupakan transfer ke pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa sebanyak 10 persen dari Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Majene serta Dana Desa yang merupakan transfer dari Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi desa.

Transfer Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp109.508.794.961,00 dan realisasinya mencapai 93,81 persen yaitu senilai Rp102.737.016.814,00. Berikut gambaran tingkat capaian realisasi Transfer Daerah pada APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3. 11 Anggaran dan Realisasi Transfer Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Transfer Bagi Hasil	2.696.704.257,00	853.100.342,00	31,63
Transfer Bantuan Keuangan	106.812.090.704,00	101.883.916.472,00	95,38
Total Transfer	**109.508.794.961,00**	**102.737.016.814,00**	**93,81**

***Sumber* : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025**

3.1.2.3.1. Transfer Bagi Hasil

Transfer Bagi Hasil merupakan transfer Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan bagi hasil atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah senilai 10 persen kepada seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Majene.

Transfer Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp2.696.704.257,00 dengan rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan senilai Rp2.048.029.357,00 dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah senilai Rp648.674.900,00. Pada Tahun 2025 realisasi atas transfer bagi hasil senilai Rp853.100.342,00 atau 31,63 persen. Berikut gambaran tingkat capaian realisasi Transfer Bagi Hasil pada APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Tabel 3. 12 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Bagi Hasil Pajak	2.048.029.357,00	679.215.030,00	33,16
Bagi Hasil Retribusi	648.674.900,00	173.885.312,00	26,80
Total Transfer Bagi Hasil	**2.696.704.257,00**	**853.100.342,00**	**31,63**

***Sumber* : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025**

3.1.2.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran daerah dalam rangka peningkatan pemerataan kemampuan keuangan dan atau tujuan tertentu lainnya.

Pada APBD TA 2025 Pemerintah Kabupaten menganggarkan Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa lingkup Kabupaten Majene dalam bentuk Bantuan Keuangan khusus Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dianggarkan senilai Rp106.812.090.704,00 dan terealisasi senilai Rp101.883.916.472,00 atau terealisasi senilai 95,38 persen.

Berikut gambaran realisasi Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3. 13 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Bantuan Keuangan Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Khusus	106.712.090.704,00	101.783.916.472,00	95,38
Total Bantuan Keuangan	**106.812.090.704,00**	**101.883.916.472,00**	**95,38**
***Sumber* : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025**			

3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

3.1.3.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah meliputi Selisih Lebih Perhitungan Tahun Lalu, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pengembalian bantuan modal. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Majene untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dari penerimaan Dana Bergulir.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut di atas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) Pemerintah Daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Majene APBD Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal bagi BUMD milik Pemerintah Kabupaten Majene berupa penyertaan modal kepada Perumda Tirta Air Minum Mandar senilai Rp500.000.000,00.

3.1.3.2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Besaran Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp4.835.526.092,69 yang terdiri atas Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya senilai Rp4.835.496.696,69 dan Sisa Belanja Lainnya berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD senilai Rp29.396,00. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dengan anggaran senilai Rp500.000.000,00 dapat terealisasi mencapai 100,00 persen atau senilai Rp500.000.000,00. Berdasarkan realisasi tersebut maka terdapat surplus pada pembiayaan daerah senilai Rp4.335.526.092,69.

Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 14 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Penerimaan Pembiayaan			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**4.835.496.696,69**	**4.835.526.092,69**	**100,00**
Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00
Sisa Belanja Lainnya	0,00	29.396,00	0,00
Total	**4.835.496.696,69**	**4.835.526.092,69**	**100,00**
Pengeluaran Pembiayaan	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100,00**
Penyertaan Modal	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
Total	**4.335.496.696,69**	**4.335.526.092,69**	**100,00**
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025			

3.1.4 *Mandatory Spending*

Pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara merata dan berkeadilan, pemerintah menetapkan kebijakan penganggaran yang mengutamakan sektor-sektor strategis melalui mekanisme *Mandatory spending*. *Mandatory spending* daerah adalah belanja atau pengeluaran negara maupun daerah yang pengalokasiannya telah ditetapkan dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja tersebut dengan persentase tertentu dan tidak dapat dikurangi atau dialihkan untuk keperluan lain. Pengaturan tersebut antara lain berupa batas minimal atau maksimal anggaran belanja/pengeluaran yang masuk dalam *mandatory spending* yang harus dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD.)

Mandatory spending merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk memastikan daerah mengalokasikan sumber dayanya demi pembangunan yang optimal. Agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pembangunan sektor prioritas maka dibuat ketentuan dalam peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan sebagian APBD-nya untuk keperluan belanja dalam fungsi tertentu. Kewajiban alokasi anggaran tersebut dilakukan mengingat sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan, alokasi belanja di daerah untuk sektor tertentu relatif lebih rendah. Namun evaluasi atas dampak peningkatan anggaran pada bidang tersebut pada kinerja pelayanan kepada masyarakat perlu untuk dilakukan.

Mandatory spending bertujuan untuk mengarahkan pengelolaan keuangan pemerintah agar pengeluaran pada sektor-sektor prioritas dapat dipenuhi secara wajib dan berkelanjutan. Tujuan ini memastikan bahwa anggaran pemerintah digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, berdasarkan praktik pengelolaan keuangan pemerintah, tujuan penerapan *mandatory spending* adalah sebagai berikut:

a. Menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat;

Mandatory spending berperan penting dalam menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat karena mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya *mandatory spending*, pemerintah tidak dapat mengurangi anggaran pada sektor pelayanan dasar meskipun terjadi keterbatasan keuangan daerah. Hal ini memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan

b. Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antardaerah;
   Mandatory spending berperan sebagai instrumen pemerintah dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antardaerah dengan mewajibkan pengalokasian anggaran pada sektor-sektor prioritas. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap daerah, termasuk daerah tertinggal, tetap mengalokasikan anggaran minimal untuk pendidikan, infrastruktur, dan pembangunan desa. Melalui alokasi anggaran yang terarah dan merata, *mandatory spending* mendorong pemerataan pembangunan sehingga daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap mampu menyediakan pelayanan publik yang memadai
c. Mendorong pemerataan pembangunan nasional dan daerah;
   Mandatory spending berperan penting dalam mendorong pemerataan pembangunan nasional dan daerah dengan menetapkan kewajiban pengalokasian anggaran pada sektor-sektor prioritas. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap daerah, tanpa memandang kemampuan fiskalnya, tetap mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan desa. Melalui *mandatory spending*, pemerintah pusat dan daerah dapat mengarahkan pembangunan agar tidak terpusat hanya di wilayah tertentu, melainkan menyebar secara merata ke seluruh daerah.
d. Menjaga kesinambungan program pembangunan pada sektor prioritas.
   Mandatory spending berperan dalam menjaga kesinambungan program pembangunan dengan mewajibkan pemerintah untuk tetap mengalokasikan anggaran pada sektor prioritas setiap tahun anggaran. Dengan adanya ketentuan ini, program pembangunan tidak mudah terhenti atau terganggu akibat perubahan kebijakan, pergantian pimpinan, maupun keterbatasan anggaran daerah. *Mandatory spending* memberikan kepastian pendanaan sehingga perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terarah

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran bidang pendidikan senilai 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Pemda wajib mengalokasikan belanja pendidikan (di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) minimal 20 persen, untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, yaitu untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan;

b. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

d. *Mandatory* bidang kesehatan adalah kewajiban alokasi anggaran minimal untuk sektor kesehatan yang sebelumnya diatur dalam UU Kesehatan 2009 (5 persen APBN, 10 persen APBD) tetapi telah dihapus dalam Undang-Undang Kesehatan baru (UU No. 17 Tahun 2023), menggantinya dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang lebih fleksibel namun menimbulkan kekhawatiran akan penurunan komitmen anggaran kesehatan dan potensi dampak negatif pada hak pelayanan kesehatan masyarakat

3.1.4.1 Bidang Pendidikan

Mandatory spending di bidang pendidikan adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran minimal bagi sektor pendidikan**,** sesuai amanat konstitusi dan undang-undang. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bicara mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Dengan semangat tersebut selanjutnya pada Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun tujuannya adalah menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, tanpa terkendala perbedaan kondisi fiskal antar daerah.

Alokasi anggaran yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2025 pada bidang pendidikan senilai Rp362.648.449.251,00 dengan realisasi senilai Rp266.442.341.122,00 atau 73,47 persen. Jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan senilai Rp910.562.452.913,69, maka anggaran pendidikan tersebut mencapai 29,26 persen dari Belanja Daerah atau memenuhi syarat berdasarkan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Pemda wajib mengalokasikan belanja pendidikan (di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) minimal 20 persen.

Alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Majene tiga tahun terakhir untuk bidang pendidikan Tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 15 Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023-2025

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Total Belanja Daerah (Rp)	885.015.750.318,80	346.031.376.274,00	910.562.452.913,69
2.	Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan (Rp)	310.176.829.454,00	125.915.321.698,00	362.648.449.251,00
3	Persentase *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan (%)	35,05	36,39	29.26
4	Ketentuan *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur (%)	20,00	20,00	20,00
5	Kesimpulan	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi *mandatory spending* bidang pendidikan Tahun 2023-2025 telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu minimal 20 persen.

3.1.4.2 Pembangunan Infrastruktur Publik

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana serta prasarana yang mendukung layanan publik. Infrastruktur ini mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan,

transportasi, energi, air bersih, dan telekomunikasi dasar. Tujuan utamanya adalah mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik, meningkatkan kualitas hidup, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pemerataan pembangunan antar daerah, khususnya daerah tertinggal, menciptakan kesempatan kerja melalui proyek pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan mempermudah distribusi barang dan jasa;

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40,00 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40,00 persen, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama lima tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pengalokasian belanja untuk pembangunan infrastruktur publik oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 senilai Rp183.826.186.707,78 jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan senilai Rp801.053.657.952,69 maka anggaran pembangunan infrastruktur publik tersebut mencapai 20,19 persen dari Belanja dan Transfer Daerah.

Pengalokasian Dana Transfer Umum (DTU) untuk kegiatan pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Majene tiga tahun terakhir Tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 16 Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023-2025

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Total Belanja Daerah di luar belanja Transfer (Rp)	772.991.016.944,80	300.612.271.289,00	801.053.657.952,69
2.	Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur (Rp)	234.575.965.911,00	10.750.000.000,00	183.826.186.707,78
3	Persentase realisasi *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur (%)	30,35	3,58	22,95
4	Ketentuan *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur (%)	40,00	40,00	40,00
5	Kesimpulan	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi *mandatory spending* bidang infrastruktur tahun 2023-2025 belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu paling rendah 40 persen. tidak terpenuhinya realisasi *mandatory spending* bidang infrastruktur hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan fiskal Kabupaten Majene yang hampir setengahnya digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai dan belanja masih digunakan pembayaran utang tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Majene kedepannya mampu memanfaatkan semua potensi daerah untuk menambah kemampuan fiskalnya.

3.1.4.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD**)** adalah bagian dari *mandatory spending* pemerintah daerah yang dialokasikan secara khusus untuk pembangunan dan pemberdayaan desa**.** Dana ini digunakan untuk: pembangunan infrastruktur dasar di desa (jalan, jembatan, irigasi dan sanitasi), peningkatan pelayanan publik di tingkat desa (pendidikan, kesehatan dan air bersih) dan program

pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antardaerah, dan memperkuat kapasitas desa dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pelayanan publik di desa-desa, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dua program penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Kedua program tersebut adalah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal;
d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;
f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa; dan
g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana 10 persen (sepuluh) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), wajib dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di desa. Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Majene mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp54.056.237.704,00.

Pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Kabupaten Majene 3 tahun terakhir Tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 17 Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2023-2025

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Dana Perimbangan (Rp)	712.982.069.240,00	718.338.290.000,00	712.396.005.533,00
2.	Dana Alokasi Khusus (Rp)	201.418.149.823,00	167.724.954.000,00	162.384.800.273,00
3	Bagi Hasil Sawit (Rp)	1.794.766.000,00	1.585.391.000,00	508.075.000,00
4.	**Dana Perimbangan yang diperhitungkan (4=1-2-3) (Rp)**	**509.769.153.417,00**	**549.027.945.000,00**	**549.503.130.260,00**
5.	Anggaran ADD (Rp)	50.866.289.200,00	54.902.794.500,00	54.056.237.704,00
6.	**Persentase (5/3*100%) (%)**	**9,98**	**10,00**	**9,84**
7	**Kesimpulan**	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Sesuai

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2023 telah menganggarkan Alokasi Dana Desa sebesar 9,98 persen dan pada Tahun 2024 sebesar 10,00 persen dari kewajiban penganggaran yang ditetapkan, yaitu paling sedikit 10 persen. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Majene hanya mampu mengalokasikan 9,84 persen dari ketentuan minimal 10 persen. Kekurangan penganggaran pada Tahun 2025 tersebut disebabkan oleh penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang dilakukan pada awal tahun dengan mengacu pada anggaran pokok. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang lebih cermat dan akurat dalam penyusunan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

3.1.4.4 Bidang Kesehatan

Kewajiban alokasi anggaran minimal untuk *mandatory spending* bidang kesehatan yang sebelumnya diatur dalam UU Kesehatan 2009 yakni 5 persen untuk APBN dan 10 persen untuk APBD telah dihapus dalam Undang-Undang Kesehatan baru yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggantinya dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang lebih fleksibel. Dengan Undang-Undang Kesehatan yang memberikan fleksibilitas melalui anggaran berbasis kinerja, maka pemerintah daerah tetap menjaga komitmen agar anggaran kesehatan sebagai pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu, secara formal mungkin telah dihapus, tetapi prinsip perlindungan hak masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap menjadi prioritas.

Sebagai bentuk komitmen pada bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 mengalokasikan anggaran untuk pada bidang kesehatan senilai Rp202.436.037.036,69, dalam bentuk Belanja Operasi senilai Rp186.131.789.849,69 dan dalam bentuk belanja modal senilai Rp16.304.247.187,00, jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan maka anggaran kesehatan tersebut mencapai 22,23 persen dari Belanja Daerah atau memenuhi syarat dialokasikan minimal 10,00 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Realisasi bidang kesehatan tiga tahun terakhir untuk bidang kesehatan Tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 18 Realisasi Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023-2025

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Total Belanja Daerah (Rp)	885.015.750.318,80	346.031.376.274,00	910.562.452.913,69
2.	Bidang Kesehatan (Rp)	185.036.416.902,00	64.152.217.435,00	202.436.037.036,69
3.	Persentase realisasi *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan (%)	30,85	36,38	22,23
4.	Ketentuan *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan (%)	10,00	10,00	10,00
5.	Kesimpulan	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa komitmen dalam bidang kesehatan tahun 2023-2025 masih di atas minimal 10,00 persen walaupun pendekatan anggaran telah berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang lebih fleksibel.

3.1.5 Pengawasan

Mandatory bidang pengawasan pada Pemerintah Daerah merupakan bidang pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Penetapan *mandator*y bidang pengawasan ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan *Mandatory* bidang pengawasan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pengawasan nasional dan daerah, serta hasil penilaian risiko atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. *Mandatory* ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah agar kegiatan pengawasan lebih terarah, fokus pada area berisiko tinggi, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan barang milik daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah, pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, pengadaan barang dan jasa, tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan eksternal dan internal, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko. Pengawasan pada bidang-bidang tersebut diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kepatuhan, serta memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program daerah.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya guna memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Selain itu, Bidang Pengawasan berperan dalam pelaksanaan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, antara lain RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, serta RKA dan DPA perangkat daerah, untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pengawasan juga diarahkan pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah melalui reviu LKPD dan LkjIP.

Melalui pelaksanaan *Mandatory* bidang pengawasan yang efektif dan berkesinambungan, Inspektorat Daerah diharapkan mampu berperan sebagai *early warning system*, pemberi *assurance* dan *consulting*, serta mitra strategis kepala daerah dan perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pembinaan guna mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:
   1) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;

2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
3) pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
4) reviu laporan keuangan;
5) kegiatan pengawasan lainnya meliputi *probity* audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
6) penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
c. Sarana dan prasarana pengawasan antara lain seperti, laptop, dan alat pengukur beton.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 untuk biaya operasional pengawasan Inspektorat senilai Rp2.475.752.682,00 jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan senilai Rp910.562.452.913,69 atau 0,27 persen dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi ini belum memenuhi kriteria yang diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar daerah dengan besaran APBD sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit senilai 1,00 persen dari total Belanja Daerah namun atas keterbatasan fiskal yang ada dengan target program prioritas visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Majene harus dipenuhi dalam rentang waktu efektif yang tergolong singkat, maka Pemerintah Kabupaten Majene hanya dapat mengalokasikan kegiatan pengawasan yang bersifat prioritas.

Alokasi anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada SKPD Inspektorat Kabupaten Majene 3 tahun terakhir 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 19 Alokasi Anggaran Bidang Pengawasan Kabupaten Majene Tahun 2023-2025

No.	Tahun	Anggaran (Rp)		Rasio (%)
		Belanja Daerah	Pengawasan	
1.	2023	942.811.788.997,00	676.495.855,00	0,07
2.	2024	939.791.525.077,00	1.137.210.208,00	0,12
3.	2025	910.562.452.913,69	2.475.752.682,00	0,27

Berdasarkan tabel di atas, bahwa anggaran yang digunakan untuk menjalankan bidang pengawasan masih di bawah ketentuan, yaitu 1 persen. Hal tersebut dikarenakan penggunaan DAU Umum diprioritaskan untuk Belanja Pegawai dan Belanja ADD, sedangkan untuk DAK dan DAU *Specific Grant* tidak dapat digunakan sebagai sumber dana anggaran bidang pengawasan. Adapun langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene agar dapat memenuhi batasan minimal 1 persen dengan memaksimalkan seluruh potensi PAD.

Dengan keterbatasan anggaran dalam bidang pengawasan Pemerintah Kabupaten Majene mampu menunjukkan kinerja terbaik terkait penyelesaian atas temuan. Berdasarkan hasil tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, hingga Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Majene telah menyelesaikan tindak lanjut atas temuan sebanyak 67,03 persen dari total rekomendasi sebanyak 1.283 dengan jumlah status telah sesuai rekomendasi sebanyak 860 walaupun secara persentase turun tapi dari jumlah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya .

3.1.6 Penanganan Dampak Inflasi

Mandatory Pengendalian Inflasi Daerah merupakan bagian dari kebijakan pengawasan dan pengendalian yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengendalian inflasi daerah menjadi prioritas nasional yang harus diimplementasikan secara konsisten melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Indeks tersebut adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Selain itu, inflasi terjadi pada saat permintaan (*demand*) lebih besar daripada penawaran (*supply*). Menurut Wikipedia, teori penawaran dan permintaan adalah penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar, antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model ini sangat penting untuk melakukan analisis ekonomi makro terhadap perilaku serta interaksi para pembeli dan penjual. Model ini memperkirakan bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kualitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen, sehingga terciptalah keseimbangan ekonomi antara harga dan kuantitas. Model ini mengakomodasi kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat mengubah keseimbangan, yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk terjadinya pergeseran dari permintaan dan penawaran. Definisi penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan

dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang memengaruhi penawaran:

a. Harga barang itu sendiri;
b. Harga sumber produksi;
c. Tingkat produksi; dan
d. Ekspektasi/perkiraan.

Sedangkan definisi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen, pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang memengaruhi permintaan:

a. Harga barang itu sendiri;
b. Harga barang lain yang berkaitan;
c. Tingkat pendapatan;
d. Selera konsumen; dan
e. Ekspektasi/perkiraan.

Inflasi menyebabkan turunnya daya beli terhadap barang dan jasa, besar kecil turunnya daya beli ditentukan oleh penawaran barang dan jasa. Faktor lain yang menentukan fluktuasi harga diantaranya kebijakan pemerintah mengenai tingkat harga, yaitu dengan mengadakan kontrol harga, pemberian subsidi, dan lain-lain

Dampak inflasi dapat bervariasi tergantung pada tingkat dan stabilitas inflasi itu sendiri. Inflasi yang rendah dan stabil dapat memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi, mengurangi beban utang, dan mendorong investasi. Namun, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, dan mengganggu perencanaan keuangan individu dan bisnis.

Mandatory Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Majene merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Majene dalam mendukung kebijakan nasional pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting di daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah sebagai wilayah pesisir dengan keterbatasan produksi pangan tertentu serta ketergantungan pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut menjadikan stabilitas harga komoditas pangan strategis, terutama beras, cabai, bawang merah, ikan, dan bahan pangan lainnya, sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi, kondisi cuaca, serta ketersediaan sarana transportasi dan logistik.

Pelaksanaan *mandatory* pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Majene dilakukan melalui penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)**,** pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas strategis, serta pelaksanaan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi sesuai karakteristik wilayah. Kebijakan ini diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, menjamin kelancaran distribusi, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait yang terintegrasi dan berkesinambungan, sehingga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga di tingkat lokal, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan

Mengantisipasi dampak inflasi Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Majene mengalokasikan senilai Rp12.359.999.736,00 yang terdiri dari kegiatan: (1) Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana dalam rangka kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga pada Dinas PUPR senilai Rp1.992.200.000,00; (2) Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga senilai Rp63.360.000,00; (3) Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota senilai Rp56.144.750,00; (4) Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal senilai Rp44.955.500,00; (5) Penyusunan neraca bahan makanan (NBM) senilai Rp12.938.500,00; (6) Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun Rp18.985.000,00; (7) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan senilai Rp17.040.000,00; (8) Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi senilai Rp5.720.000,00; (9) Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian senilai Rp342.153.000,00; (10) Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak senilai Rp152.521.000,00; (11) Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain senilai Rp103.838.000,00; (12) Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya senilai Rp2.550.000,00; (13) Penyusunan peta kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten/kota senilai Rp5.036.000,00; (14) Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani senilai Rp115.383.600,00; (15) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan senilai Rp11.018.750,00; (16) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan senilai Rp918.149.908,00; (17) Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan senilai Rp1.840.000,00; (19) penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan senilai Rp161.805.000,00; (20) Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa senilai Rp566.671.000,00; (21) Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa senilai Rp24.957.570,00; (22) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani senilai Rp577.921.300,00; (23) Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan senilai Rp54.573.800,00; dan (24) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian senilai Rp3.789.600,00.

Alokasi anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan mengantisipasi dampak inflasi yang merupakan belanja wajib perlindungan sosial 3 tahun terakhir 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 20 Alokasi Anggaran Mengantisipasi Dampak Inflasi Kabupaten Majene Tahun 2023-2025

No.	Tahun	Anggaran Mengantisipasi dampak Inflasi (Rp)
1.	2023	3.249.208.150,00
2.	2024	4.407.665.950,00
3	2025	12.359.999.736,00

Dari tabel di atas terdapat kenaikan pengalokasian anggaran pada Tahun 2025 untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan mengantisipasi dampak inflasi yang merupakan belanja wajib perlindungan sosial senilai Rp12.359.999.736,00 dari tahun sebelumnya senilai

Rp4.407.665.950,00 atau meningkat senilai Rp7.952.333.786,00 atau 180,42 persen.

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian

Kebijakan nasional mengenai pengendalian dan peningkatan kualitas belanja negara/daerah, pemerintah daerah melaksanakan penyesuaian anggaran sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut mengamanatkan dilakukannya rasionalisasi terhadap belanja yang bersifat kurang prioritas, antara lain belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat-rapat di luar kantor, belanja pendukung administrasi, serta belanja lain yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan ini di daerah dilakukan melalui penyesuaian pagu anggaran pada perangkat daerah, realokasi belanja, serta penajaman kembali program dan kegiatan agar lebih fokus pada prioritas pembangunan.

Pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut membawa sejumlah konsekuensi, antara lain penundaan atau pengurangan volume kegiatan tertentu, penyesuaian target kinerja, serta perlunya perubahan dokumen pelaksanaan anggaran. Di sisi lain, kebijakan ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dan berbasis kinerja dalam merencanakan belanja, sehingga setiap rupiah anggaran yang digunakan memiliki manfaat yang terukur. Melalui langkah efisiensi ini, diharapkan struktur belanja daerah menjadi lebih sehat, proporsional, dan berorientasi pada hasil (*outcome oriented*), dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik serta keberlanjutan program prioritas daerah.

3.2.1 Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima uang yang menambah kekayaan bersih daerah. Pendapatan daerah diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah. Sumber pendapatan daerah:

a. PAD berupa Pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Pendapatan Transfer berupa dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dan transfer dari Pemerintah Provinsi; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

PAD merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan PAD dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan. PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, PAD adalah

penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*) dan melaksanakan pembangunan (*development function*).

Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi daerah dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah antara lain:

a. Peran PAD yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat;
b. Penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan;
c. Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
d. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan;
e. Masih lemahnya sanksi hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya;
f. Masih belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana operasional yang diperlukan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
g. Masih belum meratanya tingkat profesionalisme kompetensi aparatur pengelola pendapatan daerah yang tersebar pada berbagai instansi pengelola pendapatan.

Untuk dapat merealisasikan target penerimaan pendapatan daerah tersebut di atas diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

a. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
    1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
    2) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru;
    3) Pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
    4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
    5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;
    6) Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

7) Pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan; dan

8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;

b. Strategi pencapaian target pendapatan transfer, dilakukan melalui:

1) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
2) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
3) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
4) Mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti WTP, SAKIP dan lainnya;
5) Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan yang sah, dilakukan dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, provinsi dan instansi terkait.

c. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dilakukan dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait.

3.2.2 Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Majene, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor unggulan daerah. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang memengaruhi efektivitas dan optimalisasi realisasi belanja daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam persoalan belanja daerah adalah belum optimalnya realisasi belanja pada awal tahun anggaran. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterlambatan penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, penyesuaian terhadap kebijakan

nasional, serta proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu. Akibatnya, penyerapan anggaran cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini terlihat dari adanya pergeseran anggaran pada saat perubahan APBD serta munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan perencanaan berbasis data serta sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

Kebijakan nasional mengenai pengendalian dan peningkatan kualitas belanja negara/daerah, pemerintah daerah harus melaksanakan penyesuaian anggaran sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut mengamanatkan dilakukannya rasionalisasi terhadap belanja yang bersifat kurang prioritas, antara lain belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat-rapat di luar kantor, belanja pendukung administrasi, serta belanja lain yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan ini di daerah dilakukan melalui penyesuaian pagu anggaran pada perangkat daerah, realokasi belanja, serta penajaman kembali program dan kegiatan agar lebih fokus pada prioritas pembangunan.

Pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut membawa sejumlah konsekuensi, antara lain penundaan atau pengurangan volume kegiatan tertentu, penyesuaian target kinerja, serta perlunya perubahan dokumen pelaksanaan anggaran. Di sisi lain, kebijakan ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dan berbasis kinerja dalam merencanakan belanja, sehingga setiap rupiah anggaran yang digunakan memiliki manfaat yang terukur. Melalui langkah efisiensi ini, diharapkan struktur belanja daerah menjadi lebih sehat, proporsional, dan berorientasi pada hasil (*outcome oriented*), dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik serta keberlanjutan program prioritas daerah.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan pada perangkat daerah. Dinamika regulasi dari pemerintah pusat, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa, menuntut aparatur untuk terus meningkatkan kompetensi agar pelaksanaan belanja tetap sesuai ketentuan dan terhindar dari temuan pemeriksaan. Dari sisi pengendalian internal, masih diperlukan penguatan sistem pengawasan agar belanja daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi kunci dalam memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Majene.

Dengan demikian, perbaikan tata kelola belanja daerah di Kabupaten Majene perlu diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan, percepatan proses pelaksanaan anggaran, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem pengendalian internal guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

Adapun strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021- 2026, sebagai berikut:

a. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa :

1) Belanja Operasi, terdiri dari:
   a) Belanja Pegawai;
   b) Belanja Barang dan Jasa;
   c) Belanja Bunga;
   d) Belanja Subsidi;
   e) Belanja Hibah; dan
   f) Belanja Bantuan Sosial;
2) Belanja Modal, terdiri dari :
   a) Belanja Modal Tanah;
   b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
   c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
   d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
   e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
   f) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
3) Belanja Tidak Terduga;
4) Belanja Transfer
   a) Belanja Bagi Hasil; dan
   b) Belanja Bantuan Keuangan

   yang disusun menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah.

b. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan pencapaian sasaran pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025, yaitu: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM, serta Memudahkan Akses Lapangan Kerja; Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berwawasan Lingkungan serta Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman; Pengendalian Harga-Harga Kebutuhan Pokok; Penguatan dan Preservasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal; Penguatan Ketahanan Pangan dan Kebencanaan; Penguatan Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik Berbasis Digital dan Supremasi Hukum; Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Perlindungan Anak dan Perempuan; dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berbasis Potensi Lokal.

c. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Majene yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang baik adalah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan entitas akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Produk dari entitas akuntansi adalah laporan keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ditunjuk sebagai entitas akuntansi yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi dalam sejarah implementasi akuntansi pemerintahan di Indonesia baik pada instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual, dan terakhir sejak Tahun 2015 diwajibkan bagi seluruh entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual.

a. Akuntansi Berbasis Kas (*Cash Based Accounting*)

   Akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PSAP Nomor 1 Paragraf 8). Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Ruang lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi berbasis kas adalah terbatasnya informasi yang dihasilkan karena terbatas pada

pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aset dan kewajiban.

b. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual Based Accounting*)

Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. Regulasi yang mengatur penerapan basis kas menuju akrual adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

c. Akuntansi Berbasis Akrual (*Accrual Based Accounting*)

Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PSAP Nomor 1 Paragraf 8). Fokus sistem akuntansi ini ada pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan daya pada suatu entitas. Sistem akuntansi dianggap sistem yang paling *modest*. Keberhasilan beberapa negara seperti Selandia Baru dalam menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang lebih dulu terbit, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah mewajibkan Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual secara penuh.

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah diatur bahwa seluruh entitas pelaporan baik instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual selambat-lambatnya pada periode pelaporan Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Majene sebagai entitas pelaporan berdasarkan amanat dari peraturan tersebut mulai pada Tahun 2015 telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah juga menyajikan laporan keuangan dengan basis kas pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana pendapatan serta penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang sehingga dapat dilakukan pengukuran dan analisis akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

4.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan

b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan

c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan

b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

4.3.1.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

a. Pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1) Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
2) Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD;
3) Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
4) Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
5) Pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. Pengukuran Pendapatan LRA

1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
3) Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat; dan
4) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

a. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

1) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
2) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
3) Pengakuan belanja yang berasal dari dana BOS dan dana JKN diakui pada saat disahkan oleh BUD.

b. Pengukuran Belanja

1) Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
3) Belanja yang berasal dari dana BOS dan dana JKN diukur sebesar belanja yang disahkan oleh BUD;
4) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-Lain-LRA; dan
5) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1) Belanja Operasi;
2) Belanja Modal; dan

3) Belanja Tak Terduga.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:

1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
3) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
4) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

4.3.1.3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

a. Pengukuran Transfer

Akuntansi transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen penerimaan atau pengeluaran yang sah.

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
   a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
   b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
2) Transfer Keluar dan Beban Transfer
   a) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
   b) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku/Keputusan Gubernur.

b. Penilaian Transfer

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

   a) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti

pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan;

b) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

Pengukuran transfer Keluar dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah.

c. Pengungkapan transfer

1) Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;

b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;

c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan

d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;

b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;

c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan

d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2. Neraca

4.3.2.1. Aset

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) atau Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

b. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Majene dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Majene yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
Piutang antara lain terdiri dari :

1) Piutang Pajak;
2) Piutang Retribusi;
3) Piutang Dana Perimbangan/Bagi Hasil termasuk DAU dan DAK;
4) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
5) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi;
6) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
7) Piutang Lain-Lain PAD yang sah.

Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value)*, maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis atau karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Majene, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

1) Barang atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Majene;
2) Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam proses produksi;
3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4) Barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

1) Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan sifatnya *continues* serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan pupuk di Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan.

2) Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Metode perpetual digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO *(First In First Out)*. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

d. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi non permanen dapat berupa:
   a) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
   b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
   c) Investasi non permanen lainnya; dan
   d) Modal kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir.
   Investasi Non Permanen Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

   Adapun karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

   (1) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
   (2) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
   (3) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
   (4) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan

(5) Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.

Penyajian Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV) dari Dana Bergulir bertujuan agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)* maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir. Alat untuk menyesuaikan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir adalah dengan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi permanen dapat berupa:
a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan; dan
b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

3) Metode Pengakuan Investasi Penyertaan Modal

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode yaitu:

a) Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

e. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Majene atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Majene harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(Depreciable Assets)* selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Masa Manfaat Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**Tanah**	-
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.01	Alat Besar	8
2.02	Alat Angkutan	8
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.04	Alat Pertanian	5
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	5
2.08	Alat Laboratorium	8
2.09	Alat Persenjataan	5
2.10	Komputer	5
2.11	Alat Eksplorasi	8
2.12	Alat Pengeboran	8
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	8
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	8
2.15	Alat Keselamatan Kerja	5
2.16	Alat Peraga	5
2.17	Peralatan Proses/Produksi	5
2.18	Rambu – Rambu	5
2.19	Peralatan Olahraga	4
3	**Gedung dan Bangunan**, yg terdiri atas:	

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
3.01	Bangunan Gedung	20
3.02	Monumen	20
3.03	Bangunan Menara	20
3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	20
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, terdiri atas:	
4.01	Jalan dan Jembatan	20
4.02	Bangunan Air	20
4.03	Instalasi	20
4.04	Jaringan	20
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.01	Bahan Perpustakaan	-
5.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	-
5.03	Hewan	-
5.04	Biota Perairan	-
5.05	Tanaman	-
5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	-

Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan dilakukan per bulan tetapi pencatatan atas penyusutan aset tetap dilakukan pada akhir tahun.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

2) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

3) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

4) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

5) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

6) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan

7) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal *(capital expenditures)* dan pengeluaran pendapatan *(revenue expenditures).* Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset, jika memenuhi semua *kriteria a dan b* sebagai berikut*:*

1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
   a) Bertambah ekonomis/efisiensi;
   b) Bertambah umur ekonomis;
   c) Bertambah volume;
   d) Bertambah kapasitas produksi;

2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi atas aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan, adapun batas kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Batas Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Batasan Minimal Kapitalisasi *)
1	**Tanah**	
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.01	Alat Besar	2 %
2.02	Alat Angkutan	2 %
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2 %
2.04	Alat Pertanian	2 %
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2 %
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2 %
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2 %

No.	Uraian	Batasan Minimal Kapitalisasi *)
2.08	Alat Laboratorium	2 %
2.09	Alat Persenjataan	2 %
2.10	Komputer	2 %
2.11	Alat Eksplorasi	2 %
2.12	Alat Pengeboran	2 %
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	2 %
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	2 %
2.15	Alat Keselamatan Kerja	2 %
2.16	Alat Peraga	2 %
2.17	Peralatan Proses/Produksi	2 %
2.18	Rambu – Rambu	2 %
2.19	Peralatan Olahraga	2 %
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas:	
3.01	Bangunan Gedung	2 %
3.02	Monumen	2 %
3.03	Bangunan Menara	2 %
3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2 %
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yang terdiri atas:	
4.01	Jalan dan Jembatan	2 %
4.02	Bangunan Air	2 %
4.03	Instalasi	2 %
4.04	Jaringan	2 %
5	**Aset Tetap Lainnya**	-

*) Nilai persentase disesuaikan dengan nilai rupiah.

f. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri atas:

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari

suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa:

a) Bangun Kelola/Guna Serah adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Kelola/Guna Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Kelola/Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;

b) Bangun Serah Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun Serah Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan

c) Kerja Sama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya. Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun

g. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Contoh: hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

1) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;
2) Lisensi dan *franchise;*
3) Hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya;
4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan

h. Aset Lain-Lain Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus sesuai masa manfaat aset tak berwujud tersebut. Apabila masa manfaat aset tak berwujud sulit diestimasi, perhitungan masa manfaat amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Masa Manfaat Amortisasi Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Tahun
	ASET TAK BERWUJUD	
1.	*Software* Komputer	4
2.	Lisensi	10
3.	Hak Cipta /Paten	50
4.	Hasil kajian/penelitian	4
5.	Warisan Budaya/Sejarah	Tidak Terbatas

i. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai Aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Pemerintah Daerah dapat memiliki Aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka Aset tersebut termasuk dalam definisi Properti Investasi.

Properti Investasi diakui sebagai aset pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai Properti Investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:

1) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari Aset Properti Investasi; dan

2) biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu Properti Investasi memenuhi kriteria pertama Pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu Pengakuan awal.

Kriteria kedua Pengakuan Properti Investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan Aset Properti Investasi tersebut. Apabila suatu Properti Investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya Properti Investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip Pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan Properti Investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan Properti Investasi.

Berdasarkan prinsip Pengakuan Properti Investasi, Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat Properti Investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

Bagian dari Properti Investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat Properti Investasi atas biaya penggantian bagian Properti Investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian Pengakuan pada Kebijakan Akuntansi ini.

4.3.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah kabupaten.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), terdiri dari: Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya

2) Utang Bunga;

Utang Bunga, terdiri dari Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya dan Utang Bunga Luar Negeri.

3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang terdiri dari Utang Bank, Utang Obligasi, Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Pemerintah Provinsi, Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kabupaten lain.

4) Pendapatan Diterima Dimuka;

Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III, Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III dan Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.

5) Utang Belanja;

Utang belanja diakui sebesar belanja yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

6) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah Daerah mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) Entitas bermaksud mendanai kembali *(refinance)* kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali *(refinancing)*, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi. Kewajiban jangka panjang terdiri utang kepada Pemerintah Pusat, utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan utang kepada masyarakat.

4.3.2.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majene yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal laporan. Komponen ekuitas terdiri dari 3 komponen, yaitu:

a. Ekuitas, yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majene yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas;

b. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit – LRA;

c. Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.

4.3.3. Laporan Operasional

4.3.3.1. Pendapatan

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

a. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

b. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya *(actual price)* yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;

c. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;

d. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang *(recurring)* atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;

e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;

f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;

g. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

1) PAD Melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Komponen Pendapatan-LO

Pendapatan- LO adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Pendapatan-LO terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari:

1) Pajak Daerah-LO merupakan pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah otonom bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

2) Retribusi Daerah-LO merupakan pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu;

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan penerimaan daerah otonom atas hasil penyertaan modal daerah; dan

4) Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan Transfer LO terdiri dari:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO merupakan pendapatan yang berasal dari APBN berupa dana perimbangan, dana intensif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa; dan

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah lain berupa bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah-LO merupakan pendapatan hibah termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

2) Dana Darurat-LO; dan

3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

d. Surplus Non Operasional-LO

Surplus Non Operasional-LO terdiri dari:

1) Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO;
2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO; dan
3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

e. Pendapatan Luar Biasa-LO merupakan pendapatan yang diakui pemerintah sebagai penambah nilai kekayaan bersih (ekuitas) yang tidak terikat pada kegiatan operasional sehari-hari. Pendapatan ini biasanya berasal dari kejadian atau transaksi yang tidak biasa, tidak diharapkan sering terjadi, dan berada di luar kendali entitas pemerintah.

4.3.3.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban terdiri dari:

a. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
    1) Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
    2) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi;
    3) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga *(interest)* yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang *(principal outstanding)* termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
    4) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
    5) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
    6) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;

7) Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu; dan

8) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ke tertagihan piutang.

b. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

c. Defisit Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional;

d. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah, beban luar biasa terdiri dari beban tak terduga dan beban luar biasa lainnya.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar. Pengakuan beban pada saat:

a. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;

b. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;

d. Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

e. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, di mana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;

f. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;

g. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, di mana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap, dan Aset Lainnya;

h. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;

i. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi; dan

j. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;

b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir Tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir Tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;

d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;

e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;

f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas;

g. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, di mana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban, pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca) komponen Aset Lancar dengan perhitungan secara bulanan tanpa memperhatikan tanggal transaksi.

Pengukuran Beban pada saat:

a. Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak).

b. Beban diukur berdasarkan:

   1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan

   2) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai SAP

Akuntabilitas sektor publik saat ini telah mendapatkan banyak perhatian seiring dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan meminimalkan campur tangan dari Pemerintah Pusat serta memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang di daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengalami banyak pembaharuan, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang diakui adalah pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan, serta pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran diakui berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terbit pada tanggal 22 Oktober 2010. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berdasarkan pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Entitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sebelum adanya peraturan pemerintah mengenai sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual (*basis accrual*), sistem yang digunakan adalah sistem akuntansi tata buku tunggal (*single entry accounting system*) berbasis kas (*cash basis*). Sistem pencatatan *single entry* ini sangat sederhana yaitu hanya mencatat satu kali setiap terjadi transaksi. Transaksi yang menyebabkan kas bertambah akan dicatat di sisi penerimaan dan yang menyebabkan kas berkurang akan dicatat di sisi pengeluaran. Sistem pencatatan *single entry* sangat sederhana dan mudah dipahami, namun di samping itu juga mempunyai banyak kelemahan. Sistem akuntansi yang berbasis kas memiliki kelemahan sebagai berikut:

a. Informasi yang lebih kompleks yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan tidak dapat disediakan oleh sistem akuntansi berbasis kas;

b. Relevansi laporan keuangan bagi para pengambil keputusan sangat kurang, karena basis kas hanya berfokus pada aliran kas dan mengabaikan aliran sumber daya lain; dan

c. Pertanggungjawaban ke publik terbatas pada penggunaan kas saja, tidak dicantumkan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset lainnya dan utang atau kewajiban.

Banyaknya kekurangan dari *single step* berbasis kas tersebut menuntut pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Maka sistem yang lama dikembangkan menjadi sistem baru yang dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan daerah berupa Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Laporan Keuangan (*financial reports*) yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Karakter dalam sistem yang baru adalah *double entry* dan basis akrual (*accrual basis*). Sistem tersebut dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tidak hanya dari transaksi masa lalu yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas tetapi juga kewajiban kas yang timbul di masa depan serta peramalan kas yang akan diterima di masa mendatang.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan SAP, di antaranya:

a. Kualitas SDM yang belum memadai. Persoalan ini sangat mendasar mengingat mekanisme perekrutan PNS yang bersifat terbatas. Padahal ketersediaan SDM aparatur yang memahami teknis di bidang akuntansi pemerintahan merupakan unsur paling dominan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ini. Pemerintah Kabupaten Majene hingga saat ini belum termasuk daerah dengan SDM akuntansi yang memadai;

b. Dinamika regulasi yang sering mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Inkonsistensi dalam penerbitan peraturan perundangan terkait penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan akuntansi secara maksimal;

c. Efektivitas tata laksana dan keorganisasian dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur pemerintah daerah. Dalam implementasi pengelolaan keuangan, masih banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan di tingkat SKPD yang belum memahami tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan di SKPD. Adapun pada ranah pelaporan, masih banyak PPK-SKPD yang tidak terlibat secara penuh dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Masih banyak PPK-SKPD masih bergantung terhadap bendahara maupun operator dalam menyusun laporan keuangan. Walaupun Pemerintah Kabupaten Majene telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri, namun sebagian

besar PPK-SKPD belum memanfaatkan sistem informasi secara efektif. Pekerjaan teknis tersebut lebih sering dilakukan oleh bendahara ataupun operator.

Namun dalam pelaksanaan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual ini, Pemerintah Kabupaten Majene telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Majene telah menggunakan SIPD Kemendagri dalam proses pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.;

b. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sistem akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Daerah telah menyusun perangkat regulasi yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan standar akuntansi pemerintah daerah. Pada Tahun 2014, Bupati Majene telah menerbitkan tiga peraturan kepala daerah sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan di daerah, yaitu Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur, dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene;

c. Pemerintah Kabupaten Majene dalam berbagai kesempatan senantiasa melakukan pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pengelola keuangan daerah. Setiap Tahun anggaran, pemerintah melalui SKPD yang mempunyai fungsi pembinaan pengelolaan keuangan daerah melaksanakan program bimbingan teknis dan pelatihan secara periodik. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar memperkuat sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah utamanya yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi maupun di SKPD selaku penyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada akhirnya Pemerintah Daerah telah melakukan segala upaya maksimal dalam menjalankan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun Pemerintah Kabupaten Majene telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak sebelas kali berturut-turut, namun hal tersebut bukan menjadi jaminan bahwa praktik pengelolaan keuangan utamanya pada ranah pelaporan tidak meninggalkan permasalahan. Masih cukup banyak pekerjaan rumah yang tersisa bagi Pemerintah Daerah dalam dunia pengelolaan keuangan daerah. Namun dengan strategi yang tepat, pemerintah berharap dapat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual dengan baik dan efektif agar mewujudkan aspek akuntabilitas dan transparansi yang baik demi terciptanya lingkungan *good governance* di Kabupaten Majene.

4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

4.5.1. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh

signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang; dan

b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan

b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang memengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang memengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan memengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan memengaruhi posisi kas dan tidak memengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada PSAP 10 paragraf 19, 20, 21 dan 23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada PSAP 10 paragraf 21, 22, dan 24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak memengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh kesalahan yang tidak memengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada PSAP 10 paragraf 20 adalah:

a. Belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebit pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap;

b. Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas Tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan

kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula Basis Kas Menuju Akrual menjadi Basis Akrual penuh, dilakukan:

a. Penyajian kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode; dan

b. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

4.5.3. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset, dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO Tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4.5.4. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tugas, pokok, dan fungsi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban Tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu Tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana

penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;

b. Fungsi tersebut tetap ada; dan

c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. Menutup suatu fasilitas yang bermanfaat amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.5.5. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50 persen atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;

c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar. Anggaran belanja tak terduga yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang terakhir diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan. Teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan antara Laporan Keuangan PPKD selaku entitas pelaporan dengan Laporan Keuangan seluruh SKPD lingkup Kabupaten Majene selaku entitas akuntansi.

Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan daerah.

5.1.1. Pendapatan – LRA

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan – LRA	881.015.994.509,59	900.775.879.182,07	(19.759.884.672,48)	(2,19)
Jumlah	**881.015.994.509,59**	**900.775.879.182,07**	**(19.759.884.672,48)**	**(2,19)**

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran (TA) 2025 tercatat sebesar Rp881.015.994.509,59 atau mencapai 97,21 persen dari target.

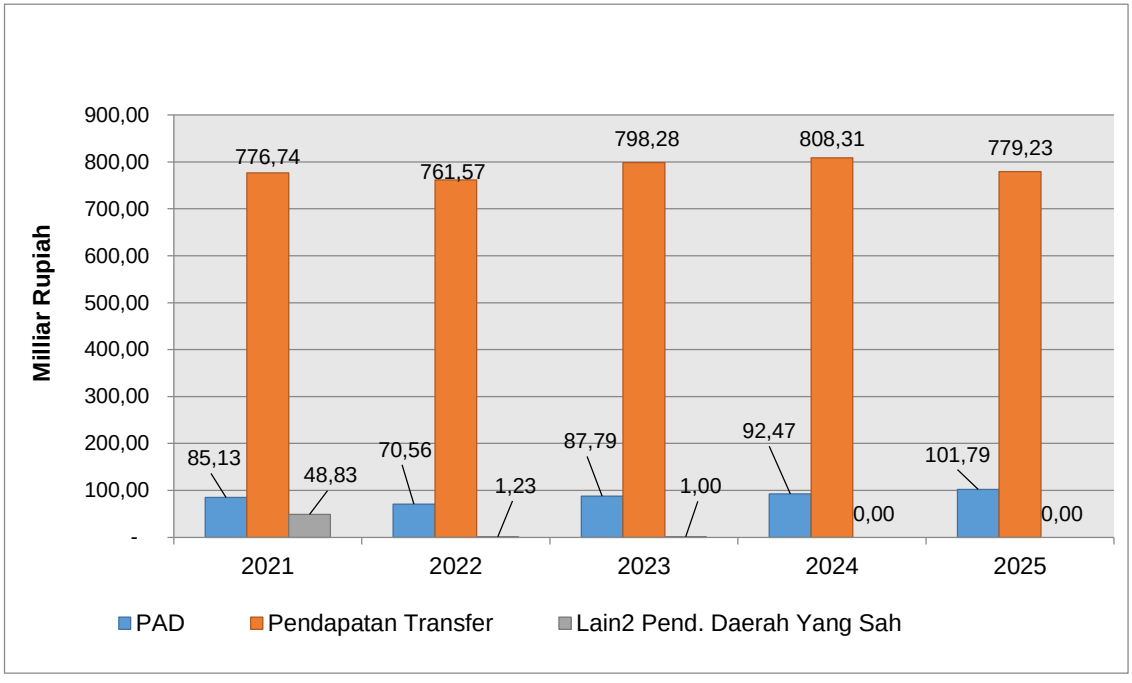
Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Majene sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp881.015.994.509,59 atau mencapai 97,21 persen dari target APBD TA 2025 senilai Rp906.226.956.217,00. Realisasi pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp101.790.979.525,59, Pendapatan Transfer senilai Rp779.225.014.984,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp0,00, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan Rp19.759.884.672,48 atau 2,19 persen jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yang tercatat senilai Rp900.775.879.182,07.

Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan - LRA TA 2024 dan 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN	**906.226.956.217,00**	**881.015.994.509,59**	**97,21**	**900.775.879.182,07**
Pendapatan Asli Daerah	116.958.226.043,00	101.790.979.525,59	87,03	92.468.261.209,07
Pendapatan Transfer	789.268.730.174,00	779.225.014.984,00	98,72	808.307.617.973,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah. kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan. potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam struktur APBD.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan kelompok pendapatan pada periode 2021-2025 dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Dibandingkan dengan realisasi di Tahun Anggaran 2024, realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan yang terjadi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah dan penurunan pada kelompok Pendapatan Transfer. Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan senilai Rp9.322.718.316,52 dan kelompok Pendapatan Transfer mengalami hal sebaliknya yakni penurunan senilai Rp29.082.602.989,00.

Rincian realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 2 Pendapatan – LRA

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN	**906.226.956.217,00**	**881.015.994.509,59**	**97,21**	**900.775.879.182,07**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**116.958.226.043,00**	**101.790.979.525,59**	**87,03**	92.468.261.209,07
Pendapatan Pajak Daerah	24.265.113.570,00	16.467.904.514,25	67,86	11.783.885.632,00
Pendapatan Retribusi Daerah	82.889.435.754,00	75.411.226.265,00	90,97	75.254.820.161,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.534.611.072,00	3.534.611.072,00	100,00	3.327.191.183,00
Lain-lain PAD yang Sah	6.269.065.647,00	6.377.237.674,34	101,72	2.102.364.233,07
PENDAPATAN TRANSFER	**789.268.730.174,00**	**779.225.014.984,00**	**98,72**	**808.307.617.973,00**
Transfer Pemerintah Pusat	**768.344.427.000,00**	**760.123.684.301,00**	**98,93**	**783.780.588.110,00**
Dana Perimbangan	**715.688.574.000,00**	**712.396.005.533,00**	**99,53**	**727.959.737.110,00**
- Dana Bagi Hasil (DBH)	5.826.710.000,00	5.634.568.300,00	96,70	6.639.074.000,00
- Dana Alokasi Umum	535.243.742.000,00	544.376.636.960,00	101,70	548.935.022.195,00
- Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik	24.453.962.000,00	24.111.344.842,00	98,59	41.802.623.094,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	150.164.160.000,00	138.273.455.431,00	92,08	130.583.017.821,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**52.655.853.000,00**	**47.727.678.768,00**	**90,64**	**55.820.851.000,00**
- Dana Desa	52.655.853.000,00	47.727.678.768,00	90,64	55.820.851.000,00
Transfer Antar Daerah	**20.924.303.174,00**	**19.101.330.683,00**	**91,28**	**24.527.029.863,00**
Pendapatan Bagi Hasil	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	91,28	24.527.029.863,00
Bantuan Keuangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Hibah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi total pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Majene mencapai 97,21 persen dari target yang dianggarkan, di mana capaian ini lebih tinggi dari capaian di Tahun Anggaran 2024 di mana realisasi pendapatan daerah seluruhnya berada di angka 95,32 persen. Jika dilihat pada tabel 5.2 di atas terlihat bahwa persentase capaian realisasi paling rendah terdapat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah yaitu di angka 87,03 persen. Capaian yang rendah ini disebabkan oleh kontribusi persentase capaian pada jenis Pendapatan Pajak Daerah dengan persentase 67,86 persen. Adapun Pendapatan Transfer secara anggaran dan realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dengan realisasi yaitu mencapai 98,72 persen sedangkan pada Tahun 2024 capaian realisasi senilai 99,04 persen. Penurunan terjadi pada semua jenis pendapatan transfer untuk Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan senilai Rp4.558.385.235,00 dari Tahun 2024 senilai Rp548.935.022.195,00 akan tetapi disisi lain realisasi di Tahun 2025 mampu melampaui dari target Tahun 2025 senilai Rp535.243.742.000,00 realisasi senilai 101,70 persen; Dana Bagi Hasil (DBH) menurun senilai Rp1.004.505.700,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai

Rp10.000.840.642,00 termasuk Dana Desa juga mengalami penurunan senilai Rp8.093.172.232,00 yang Tahun 2024 tercatat senilai Rp55.820.851.000,00.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LRA

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Asli Daerah	101.790.979.525,59	92.468.261.209,07	9.322.718.316,52	10,08
Jumlah	**101.790.979.525,59**	**92.468.261.209,07**	**9.322.718.316,52**	**10,08**

Pendapatan Asli Daerah sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp101.790.979.525,59 atau 87,03 persen dari anggaran sebesar Rp116.958.226.043,00.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp101.790.979.525,59 atau 87,03 persen dari anggaran senilai Rp116.958.226.043,00. Realisasi tersebut naik senilai Rp9.322.718.316,52 atau 10,08 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2024 di mana realisasi Pendapatan Asli Daerah tercatat senilai Rp92.468.261.209,07.

Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Pasar pada kelompok Retribusi Daerah serta PBJT - Tenaga Listrik dan Opsen PKB pada kelompok Pajak Daerah merupakan jenis pendapatan yang paling tinggi kontribusinya terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025.

a. Analisis Rasio Kemandirian Daerah

Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene tergolong ke kategori sangat rendah dengan rasio kemandirian berkisar di antara 9-13 persen

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana yang berasal dari pihak eksternal pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD dilakukan dengan membandingkan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi Sulawesi Barat dan pinjaman daerah.

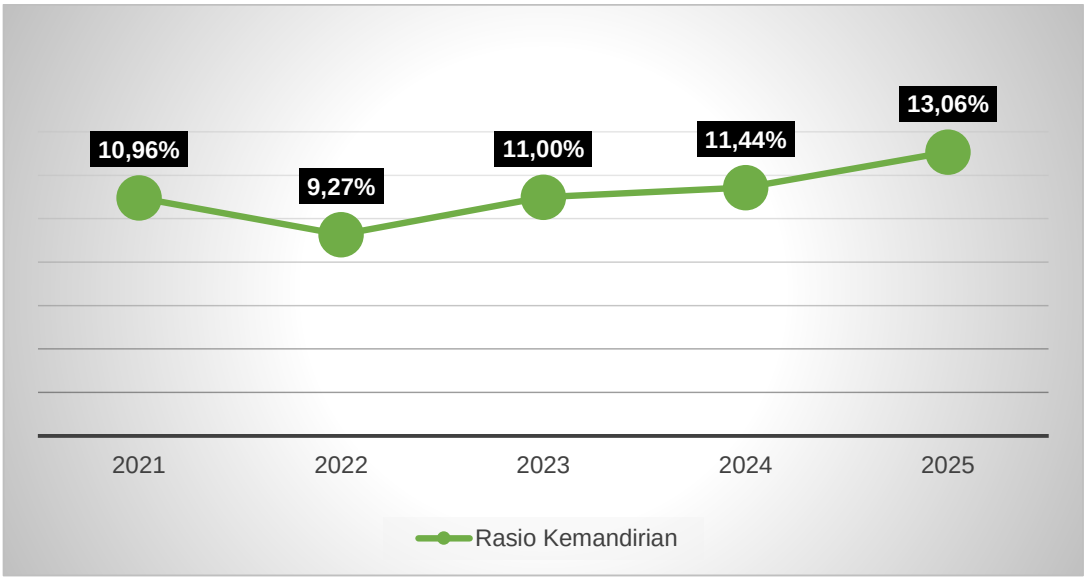
Tabel 5. 3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola hubungan
Sangat Rendah	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah);
2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;

3) Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang. mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah; dan
4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Berikut dapat kami gambarkan tren rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun terakhir.



Grafik 5. 2 Tren Rasio Kemandirian Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene berada di persentase 13,06 persen tergolong ke kategori sangat rendah dengan rasio kemandirian berkisar di antara 9 -14 persen. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Majene dengan Pemerintah Pusat dalam hubungan keuangannya memiliki pola hubungan instruktif di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dan kecenderungan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan karakteristik lokal daerah termasuk rendah. Rasio kemandirian tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2025. sedangkan rasio kemandirian terendah terjadi di Tahun 2022.

b. Analisis Rasio Efektivitas Daerah

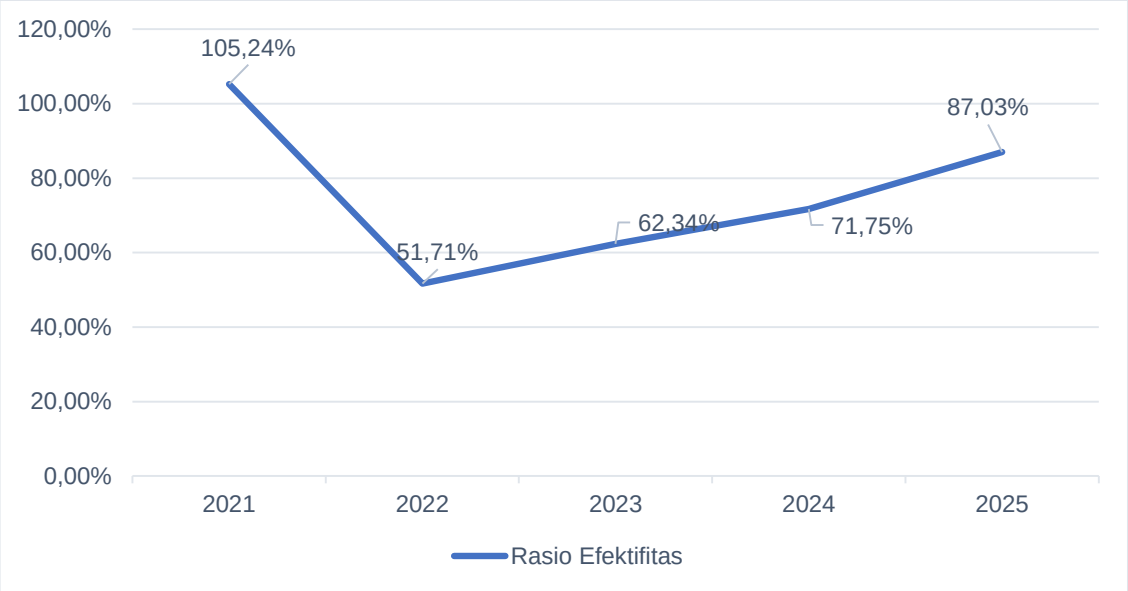
Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene sepanjang lima tahun terakhir tergolong tidak efektif, dan pada Tahun Anggaran 2025 mencatat rasio efektivitas yang meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 87,03%.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kriteria rasio efektivitas daerah dapat dikelompokkan berdasarkan tabel berikut.

Tabel 5. 4 Kriteria Rasio Efektivitas Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas
Tidak Efektif	X < 100 persen
Efektif Berimbang	X = 100 persen
Efektif	X > 100 persen

Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. 3 Tren Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Berdasarkan Grafik 5.3 tersebut rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene sepanjang 5 tahun terakhir mengalami penurunan namun naik secara bertahap di mana rasio efektivitas berada di atas 100 persen. Rasio efektivitas tertinggi terjadi pada periode sebelumnya di Tahun Anggaran 2021 di mana efektivitas pemenuhan target pendapatan mencapai 105,24 persen. Sedangkan rasio efektivitas terendah terjadi di Tahun Anggaran 2022 di mana efektivitas pemenuhan target pendapatan hanya di persentase 51,71 persen. Pada periode tersebut rasio efektivitas Kabupaten Majene termasuk dalam kriteria tidak efektif karena capaian rasionya berada di bawah 100 persen.

Tahun Anggaran 2025 mencatat rasio efektivitas yang termasuk rendah, di mana tingkat efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene hanya mencapai 87,03 persen. Capaian di tahun ini terkoreksi cukup dalam dari Tahun 2021 yang merupakan tren tertinggi selama 5 tahun terakhir, namun mengalami sedikit peningkatan dari Tahun 2023. Secara kuantitas, realisasi Pendapatan Asli Daerah pada seluruh jenis PAD pada periode ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kondisi ini diakibatkan beberapa objek pendapatan yang menetapkan target yang cukup tinggi, dan dapat direalisasikan secara optimal, seperti Retribusi Daerah mencatat realisasi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan capaian 90,97 persen. Serta didukung dengan realisasi 100,00 persen bahkan lebih oleh Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan dengan realisasi senilai 100,00 persen dan Lain-lain PAD yang Sah senilai 101,72 persen.

c. Analisis Rasio Efisiensi Daerah

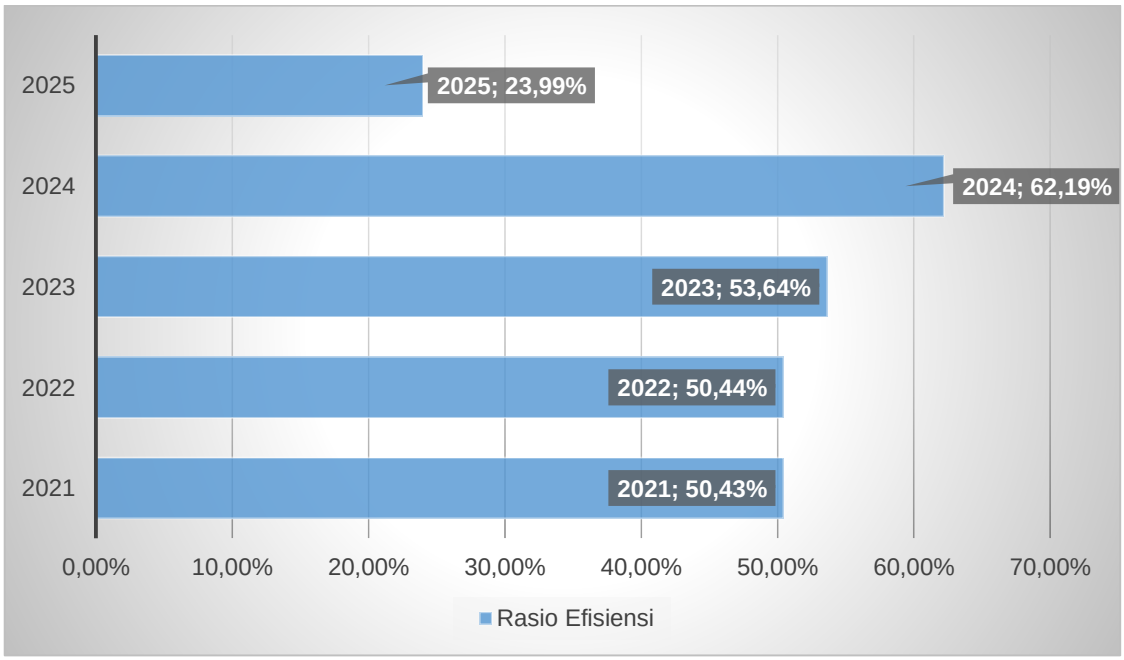
Kabupaten Majene masih termasuk efisien selama lima tahun. Rasio efisiensi tertinggi Kabupaten Majene terjadi pada tahun anggaran 2024

Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100 persen.

Tabel 5. 5 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi
Tidak efisien	X > 100 persen
Kurang Efisien	X = 90 persen-100 persen
Cukup Efisien	X = 80 persen-90 persen
Efisien	X = 60 persen-80 persen
Sangat Efisien	X = < 60 persen

Penilaian rasio efisiensi Kabupaten Majene dilakukan dengan menggunakan pendekatan realisasi pajak dan retribusi sebagai kapasitas riil keuangan daerah. Realisasi pajak dan retribusi yang diperoleh oleh Bapenda tersebut kemudian dibandingkan anggaran operasional Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah. Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 Tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. 4 Tren Rasio Efisiensi Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Berdasarkan Grafik 5.4 di atas tergambar bahwa untuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 secara umum Kabupaten Majene masih termasuk pada kriteria rasio sangat efisien dan di

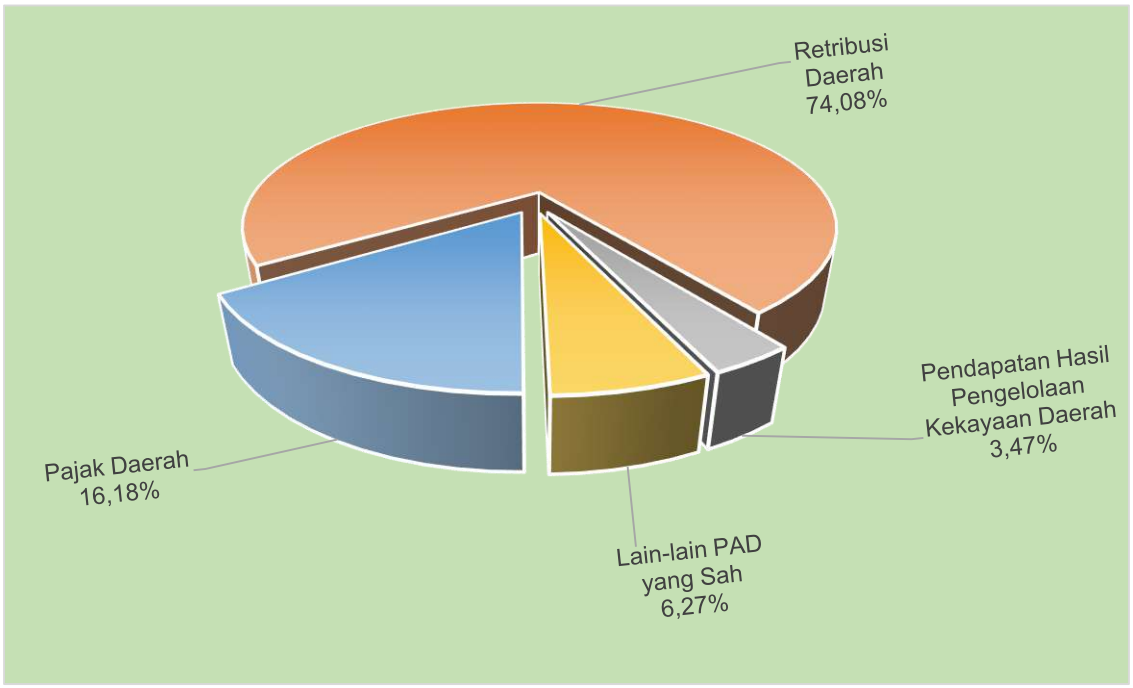
Tahun 2024 mengalami Rasio menurun menjadi efisien karena efisiensi keuangan daerah mencapai lebih besar dari 60 persen dimana rasio 62,19 persen, untuk Pendapatan Pajak dan Retribusi yang dihasilkan senilai Rp11.882.374.632,00 dengan Belanja Operasi Rp7.389.069.497,00. Adapun pada Tahun 2025 mengalami tren positif dengan efisiensi keuangan sangat efisien dengan capaian 23,99 persen. Rasio efisiensi Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dikelola Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2025 sangat efisien dalam mengumpulkan penerimaan daerah di kelompok Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**116.958.226.043,00**	**101.790.979.525,59**	**87,03**	**92.468.261.209,07**
Pendapatan Pajak Daerah	24.265.113.570,00	16.467.904.514,25	67,86	11.783.885.632,00
Pendapatan Retribusi Daerah	82.889.435.754,00	75.411.226.265,00	90,97	75.254.820.161,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.534.611.072,00	3.534.611.072,00	100,00	3.327.191.183,00
Lain-lain PAD yang Sah	6.269.065.647,00	6.377.237.674,34	101,72	2.102.364.233,07

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan realisasinya pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 5 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Majene TA 2025

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Pajak Daerah	16.467.904.514,25	11.783.885.632,00	4.684.018.882,25	39,75
Jumlah	**16.467.904.514,25**	**11.783.885.632,00**	**4.684.018.882,25**	**39,75**

Pendapatan pajak daerah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp24.265.113.570,00, terealisasi sebesar 16.467.904.514,25.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2025 dianggarkan senilai Rp24.265.113.570,00 sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp16.467.904.514,25 atau 67,86 persen. Dibanding dengan Tahun Anggaran 2024. Realisasi TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp4.684.018.882,25 atau 39,75 persen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 7 Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	**24.265.113.570,00**	**16.467.904.514,25**	**67,86**	**11.783.885.632,00**
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	199.018.358,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	1.850.545.569,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	102.257.000,00
Pajak Reklame	375.221.250,00	250.161.000,00	66,67	229.072.250,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	6.343.360.258,00
Pajak Air Tanah	20.256.000,00	5.717.423,08	28,22	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	30.800.000,00	1.900.000,00	6,16	3.080.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.600.200.000,00	274.642.345,17	17,16	192.802.275,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.619.759.320,00	1.090.998.925,00	19,41	1.117.911.819,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	574.497.730,00	621.498.100,00	108,18	1.745.838.103,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	9.896.514.420,00	8.116.027.193,00	82,00	0,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.083.752.450,00	3.509.694.628,00	69,03	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.064.112.400,00	2.597.264.900,00	244,07	0,00

Dari tabel di atas sebagian besar jenis pajak daerah belum mencapai target penerimaan yang ditetapkan. Kelompok pajak yang melampaui target anggaran yaitu Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 108,18 persen dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 244,07 persen. Capaian realisasi terendah terdapat pada Pajak Sarang Burung Walet sebesar 6,16 persen, disusul Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 17,16 persen, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 19,41 persen, Pajak Air Tanah sebesar 28,22 persen, Pajak Reklame 66,67 persen, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 69,03 persen, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencakup Pajak Hotel,

Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebesar 82,00 persen. Adapun penyebab dan atau kendala tidak tercapainya target perolehan pajak pada komponen-komponen tersebut:

1) Pajak hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan target dan realisasi senilai Rp0,00 ini karena adanya perubahan klasifikasi pajak menjadi bagian dari PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Pasal 50 dijelaskan bahwa objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi: (a) Makanan dan Minuman; (b) Tenaga Listrik; (c) Jasa Perhotelan; (d) Jasa Parkir dan (e) Jasa Kesenian dan Hiburan sehingga . Pada PBJT ada dua objek pajak yakni Pajak Hiburan dan Pajak Hotel pada periode berjalan belum dapat direalisasikan dengan optimal. Hal ini dipengaruhi kurangnya kegiatan-kegiatan hiburan yang dilaksanakan di kabupaten Majene yang berdampak pula pada tingkat hunian pada hotel berkurang. Dan sampai saat ini di Kabupaten Majene untuk penarikan pajak pada sektor pajak hiburan hanya memungut 2 objek pajak. Adapun hambatan pada sektor pajak hotel juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kejujuran oleh pihak hotel
2) Pajak Air tanah untuk periode tahun ini belum mampu memenuhi target disebabkan karena di tahun 2025 baru diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati sehingga prosesnya masih dalam tahap sosialsi ke wajib pajak terkait air tanah yang mereka gunakan, dan baru beberapa wajib pajak yang mengerti dan melakukan pembayaran pajak
3) Pajak Sarang Burung walet tidak optimalisasi penerimaannya disebabkan karena pada saat kolektor melakukan penagihan atas wajib pajak tersebut para petani mengeluhkan kurangnya hasil panen atas burung walet.
4) Capaian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2025 bisa dikatakan masih sangat rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan hanya mampu mencapai Rp274.642.345,17 atau terealisasi 17,16 persen. Salah satu titik permasalahannya adalah pemungutan atas pajak ini hanya dapat dilakukan secara efektif pada pelaku usaha swasta atau Pihak Ketiga yang mengerjakan proyek fisik APBD baik yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat maupun APBD Kabupaten Majene. Adapun pada objek lain seperti pemilik usaha tambang maupun penyelenggara proyek fisik yang bersumber dari pembiayaan APBN tidak dapat dilakukan secara optimal dikarenakan kewenangan izin tambang berada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta penyelenggara program APBN lebih sering tidak melaporkan proyek yang dikerjakan pada Pemerintah Daerah setempat;
5) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Perkotaan dan Pedesaan tidak mencapai target disebabkan data wajib pajak yang tidak andal akibat belum di-*update*. Keadaan ini menyebabkan penetapan pajak oleh Pemerintah Daerah sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Akibatnya sering terdapat penetapan yang ganda, nilai penetapan yang tidak relevan. dan penetapan atas objek tanah yang tidak dapat diidentifikasi keberadaannya, belum lagi kendala teknis petugas lapangan karena kesulitan melakukan penagihan disebabkan karena biaya operasional yang terbatas.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Retribusi Daerah	75.411.226.265,00	75.254.820.161,00	156.406.104,00	0,21
Jumlah	**75.411.226.265,00**	**75.254.820.161,00**	**156.406.104,00**	**0,21**

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp82.889.435.754,00 terealisasi sebesar Rp75.411.226.265,00

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp82.889.435.754,00. Jumlah retribusi yang diterima Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp75.411.226.265,00 atau 90,97 persen. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan senilai Rp156.406.104,00 atau 0,21 persen, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 8 Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	**82.889.435.754,00**	**75.411.226.265,00**	**90,97**	**75.254.820.161,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	76.741.114.754,00	71.509.780.372,00	93,18	71.833.922.198,00
Retribusi Pelayanan Persampahan	575.000.000,00	352.819.000,00	61,35	361.698.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	889.440.000,00	730.355.000,00	82,11	538.710.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.574.301.000,00	943.520.000,00	59,93	817.707.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.000.000,00	15.150.000,00	25,25	8.850.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	638.660.000,00	497.162.000,00	77,84	398.630.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	81.360.000,00	111.215.000,00	136,69	95.160.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	310.560.000,00	219.829.000,00	70,78	209.477.100,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	800.000.000,00	404.129.900,00	50,51	221.871.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	19.000.000,00	19.008.000,00	100,04	19.008.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.200.000.000,00	608.257.993,00	50,68	749.786.863,00

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Penerimaan Retribusi Daerah Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah mencapai 90,97 persen dari target yang ditetapkan. Presentasi realisasi paling tinggi terdapat pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar 136,69 persen, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 100,04 persen, Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 93,18 persen, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 82,11 persen, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 77,84 persen, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 70,78 persen, Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar 61,35 persen, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 59,93 persen, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 50,68 persen dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 50,51 persen. Sementara realisasi paling rendah terdapat pada Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar 25,25 persen.

1) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan mencatat persentase capaian tertinggi dari seluruh pendapatan retribusi daerah yang ditargetkan untuk senilai 136,69 persen atau melebihi Rp29.855.000,00 dari target yang telah ditetapkan. Kemudian jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya, penerimaan ini mengalami kenaikan senilai Rp16.055.000,00 dari tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp95.160.000,00;

2) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Tahun anggaran 2025 mencatat capaian yang positif di mana target yang ditetapkan Rp19.000.000,00 mampu merealisasikan pendapatan 100,04 persen senilai Rp19.008.000,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, dengan capaian nilai yang sama dengan Tahun 2024 yaitu Rp19.008.000,00.

3) Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu penerimaan yang memiliki persentase capaian realisasi yang tinggi sampai Rp76.741.114.754,00 dengan realisasi senilai Rp71.509.780.372,00 atau 93,18 persen. Retribusi ini merupakan pungutan atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Secara umum pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan telah berjalan cukup baik. namun masyarakat yang berkunjung ke fasilitas kesehatan mengalami fluktuasi yang cukup beragam dari Tahun ke Tahun sehingga sering terjadi penetapan target yang terlalu optimistis;

4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah yang mempunyai tren realisasi tahunan yang selalu rendah. Namun tahun ini mengalami kenaikan signifikan dengan realisasi mencapai 82,11 persen, yaitu senilai Rp730.355.000,00 terealisasi dari target anggaran Rp889.440.000,00. Selain target yang ditetapkan tiap tahunnya terlalu tinggi dibanding objek pungutnya. Pengendalian atas pengelolaan retribusi pada Dinas Perhubungan masih menjadi perhatian dalam evaluasi pengelolaan pendapatan daerah, baik di internal Pemerintah Kabupaten Majene maupun di pihak DPRD Kabupaten Majene ketika melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Potensi perolehan atas retribusi parkir cukup tinggi mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan pertambahan pengguna kendaraan bermotor di kawasan Majene diakibatkan rutinitas sebagai kawasan pengembangan pendidikan tinggi. Objek parkir dengan kontribusi paling tinggi terhadap objek pendapatan ini adalah retribusi parkir tepi jalan umum. Sedangkan objek retribusi parkir yang masih kurang kontribusinya adalah terminal, pasar, RSUD Majene dan tempat-tempat umum lainnya;

5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2025 mencatat peningkatan realisasi sebesar 77,84 persen atau senilai Rp497.162.000,00 dari target yang telah ditentukan senilai Rp638.660.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi mengalami kenaikan sebesar 24,72 persen atau senilai Rp98.532.000,00 dari realisasi senilai Rp398.630.000,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari terdiri dari: (1) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan merupakan objek pendapatan pada Sekretariat Daerah yang mencatat realisasi 106,85 persen atau senilai Rp183.900.000,00 dari target senilai Rp172.100.000,00 penyewaan tanah ini biasa disewa oleh pihak perbankan untuk digunakan sebagai lokasi ATM sedangkan untuk bangunan berupa pemakaian ruangan Gedung Assamalewuang yang digunakan untuk kegiatan pesta pernikahan dan kegiatan indoor lainnya; (2) Retribusi Pemakaian Ruangan yang mencatat realisasi 38,76 persen atau senilai Rp87.820.000,00 dari target Rp226.560.000,00, untuk retribusi pemakaian ruangan ini berupa sewa atas penggunaan rumah dinas; (3) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor yang mencatat

realisasi 93,93 persen atau senilai Rp225.442.000,00 dari target Rp240.000.000,00; retribusi ini ditarik atas penggunaan kendaraan angkut, alat berat pada Dinas PUPR.

6) Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Tahun 2025 menargetkan senilai Rp310.560.000,00 dan mampu merealisasikan sebesar 70,78 persen atau senilai Rp219.829.000,00. Kelompok retribusi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencatat realisasi senilai Rp209.477.100,00. Retribusi ini menarik parkir di tempat yang telah ditentukan. Untuk titik parkir khusus ini masih dominan berada di pelataran parkir untuk pasar di tiap kecamatan;

7) Retribusi Pelayanan Persampahan mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya. Realisasi yang tercatat per 31 Desember 2025 senilai Rp352.819.000,00 atau 61,35 persen, dari target capaian realisasi 575.000.000,00, sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat realisasi senilai Rp361.698.000,00;

8) Retribusi Pelayanan Pasar merupakan penerimaan atas pelayanan penyediaan tempat/fasilitas pasar untuk kegiatan usaha. Pelayanan pasar mengalami peningkatan senilai Rp125.813.000,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp943.520.000,00 atau senilai 59,93 persen dari target capaian realisasi sebesar Rp1.574.301.000,00, sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat realisasi senilai Rp817.707.000,00;

9) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dulunya disebut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan salah satu komponen PAD yang hanya mampu merealisasikan senilai Rp608.257.993,00 atau sebesar 50,68 persen dari target senilai Rp1.200.000.000,00. sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat realisasi senilai Rp749.786.863,00. Hal ini juga dipengaruhi untuk izin Persetujuan Bangunan Gedung masih terkendala kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran sehingga membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang melibatkan pihak desa dan kelurahan serta Satuan Polisi Pamong Praja yang berdampak pada kebutuhan anggaran operasional.

10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tahun 2025 menargetkan Rp800.000.000,00 hanya mampu merealisasikan 50,51 persen atau senilai Rp404.129.900,00. Walaupun masih tergolong rendah, capaian realisasi ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya terealisasi sebesar Rp221.871.000,00.

11) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tercatat sebagai objek pendapatan dengan capaian realisasi terendah pada Tahun Anggaran 2025, yaitu Rp15.150.000,00 atau 25,25 persen dari Rp60.000.000,00. Sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat realisasi senilai 8.850.000,00. Objek pendapatan ini dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Majene di mana terdapat fasilitas berupa mobil operasional penyedotan kakus serta fasilitas daur ulang limbah. Kendala tidak tercapainya realisasi pada objek retribusi ini adalah dikarenakan belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya proses sanitasi pada kakus dan telah tersedianya fasilitas penyedotan dan daur ulang limbah rumah tangga pada pemerintah daerah;

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.534.611.072,00	3.327.191.183,00	207.419.889,00	6,23
Jumlah	**3.534.611.072,00**	**3.327.191.183,00**	**207.419.889,00**	**6,23**

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar Rp3.534.611.072,00, merupakan dividen yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Bank Sulselbar.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut merupakan dividen yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah yaitu Bank Sulselbar. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp3.534.611.072,00 dan terealisasi senilai Rp3.534.611.072,00 atau 100,00 persen. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut mengalami kenaikan senilai Rp207.419.889,00 atau 6,23 persen dibandingkan dengan TA 2024.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Lain-lain PAD yang Sah	6.377.237.674,34	2.102.364.233,07	4.274.873.441,27	203,34
Jumlah	**6.377.237.674,34**	**2.102.364.233,07**	**4.274.873.441,27**	**203,34**

Lain-lain PAD yang Sah tercatat terealisasi mencapai Rp6.377.237.674,34 naik signifikan 203,34 persen dari tahun TA. 2024

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp6.269.065.647,00, dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp6.377.237.674,34 atau 101,72 persen. Capaian ini cukup signifikan perbedaannya bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.102.364.233,07.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada TA 2025 mengalami kenaikan signifikan senilai Rp4.274.873.441,27 atau 203,34 persen dari periode sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 9 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	**6.269.065.647,00**	**6.377.237.674,34**	**101,72**	**2.102.364.233,07**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.080.000,00	30.449.800,00	30,42	7.925.000,00
Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.003.826.886,00	100,38	945.170.520,00
Pendapatan Bunga	100.000.000,00	285.582.324,00	285,58	329.035.900,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.340.000.000,00	1.343.039.732,34	100,22	806.537.889,07
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	500.000,00	35.853.285,00	7.170,65	13.694.924,00
Pendapatan dari Pengembalian	3.678.485.647,00	3.678.485.647,00	100,00	0,00
Jumlah	**6.269.065.647,00**	**6.377.237.674,34**	**101,72**	**2.102.364.233,07**

Dari tabel di atas dapat kita lihat sebagian besar jenis pendapatan melampaui target yang ditetapkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencatat surplus pendapatan dari target penerimaan yaitu Jasa Giro senilai 100,38 persen, Pendapatan Bunga yang mencapai 285,58 persen, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah senilai 100,22 persen, Pendapatan dari Pengembalian senilai 100,00 persen dan yang tertinggi ada pada Pendapatan Denda Pajak Daerah senilai 7.170,65 persen.

Objek pendapatan yang mencatat realisasi paling rendah adalah Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan sebesar 30,42 persen, Permasalahan yang melatar belakangi tercapai dan tidaknya target pendapatan di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan penjualan atas Barang Milik Daerah yang sudah ditetapkan sebagai barang rusak berat dan tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk kegiatan operasional. Pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan penjualan pada sebagian barang milik daerah dalam bentuk hasil bongkaran bangunan;
2) Penerimaan Jasa Giro merupakan penerimaan yang sumbernya berasal dari penempatan uang pada bank. Penerimaan jasa giro tahun anggaran 2025 mencatat realisasi sebesar 100,38 persen senilai Rp1.003.826.886,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan giro mengalami peningkatan sebesar 6,21 persen di mana pada tahun 2024 tercatat realisasi jasa giro senilai Rp945.170.520,00;
3) Pendapatan Bunga tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 13,21 persen atau senilai Rp43.453.576,00, namun persentase capaian lebih tinggi dibanding diantara target penerimaan lainnya karena mampu mencatat 285,58 persen atau senilai Rp285.582.324,00 dari target senilai Rp100.000.000,00;
4) Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah mengalami peningkatan realisasi yang signifikan yaitu terealisasi senilai Rp1.343.039.732,34. Rasio kenaikan mencapai 66,52 persen dari realisasi tahun sebelumnya, di mana pada Tahun hanya 2024 tercatat realisasi senilai Rp806.537.889,07;
5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan yang diterima akibat terlambatnya penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan. Tahun ini tidak mencatatkan realisasi dari target yang direncanakan senilai Rp50.000.000,00;
6) Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Tahun 2025 mencatat realisasi paling tinggi yaitu sebesar 7.170,65 persen atau senilai Rp35.853.285,00 dari target pendapatan senilai Rp500.000,00. Diantara rincian objek pendapatan yang lain dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi ini merupakan realisasi Pendapatan Denda Pajak atas Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

7) Pendapatan dari Pengembalian merupakan setoran pengembalian atas gaji dan tunjangan tahun sebelumnya. Realisasi yang tercatat sampai 31 Desember 2025 senilai Rp3.678.485.647,00 atau sebesar 100,00 persen. Nilai ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp0,00.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	760.123.684.301,00	783.780.588.110,00	(23.656.903.809,00)	(3,02)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.101.330.683,00	24.527.029.863,00	(5.425.699.180,00)	(22,12)
Jumlah	**779.225.014.984,00**	**808.307.617.973,00**	**(29.082.602.989,00)**	**(3,60)**

Pendapatan Transfer pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp789.268.730.174,00 sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp779.225.014.984,00 atau 98,72 persen

Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

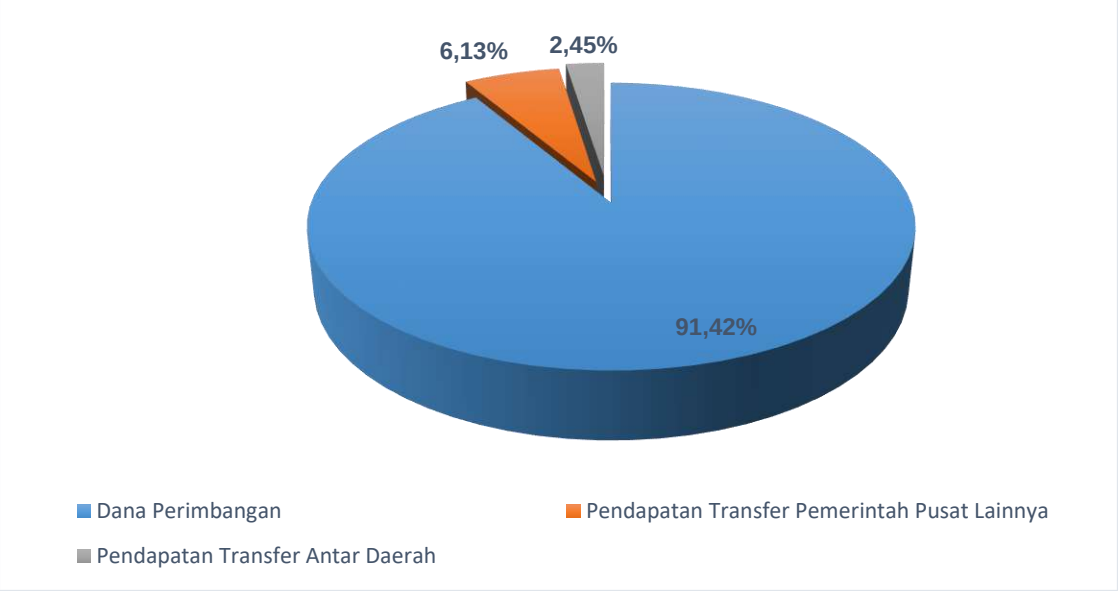
Pendapatan Transfer berupa Dana Perimbangan. Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa serta transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp789.268.730.174,00 sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp779.225.014.984,00 atau 98,72 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp808.307.617.973,00, realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp29.082.602.989,00 atau 3,60 persen atau dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 10 Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	**768.344.427.000,00**	**760.123.684.301,00**	**98,93**	**783.780.588.110,00**
Dana Perimbangan	**715.688.574.000,00**	**712.396.005.533,00**	**99,53**	**727.959.737.110,00**
Dana Bagi Hasil	5.826.710.000,00	5.634.568.300,00	96,70	6.639.074.000,00
Dana Alokasi Umum	535.243.742.000,00	544.376.636.960,00	101,70	548.935.022.195,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	24.453.962.000,00	24.111.344.842,00	98,59	41.802.623.094,00
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	150.164.160.000,00	138.273.455.431,00	92,08	130.583.017.821,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**52.655.853.000,00**	**47.727.678.768,00**	**90,64**	**55.820.851.000,00**
Dana Desa	52.655.853.000,00	47.727.678.768,00	90,64	55.820.851.000,00
Transfer Antar Daerah	**20.924.303.174,00**	**19.101.330.683,00**	**91,28**	**24.527.029.863,00**
Pendapatan Bagi Hasil	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	91,28	24.527.029.863,00
Jumlah Pendapatan Transfer	**789.268.730.174,00**	**779.225.014.984,00**	**98,72**	**808.307.617.973,00**

Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer sebagaimana dicantumkan pada tabel di atas dapat diperhatikan bahwa jenis pendapatan transfer yang paling berkontribusi terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Majene masih didominasi oleh pendapatan transfer yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat pada jenis Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Berikut komposisi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah berdasarkan persentase per jenisnya disajikan dalam grafik di bawah ini.



Grafik 5. 6 Komposisi Pendapatan Transfer

Berdasarkan grafik di atas tergambar bahwa pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai sektor pendapatan yang paling dominan dalam APBD Kabupaten Majene, transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil masih merupakan komponen terbesar yang mencapai 91,42 persen dari total pendapatan transfer. Dana Perimbangan merupakan kelompok transfer yang sejatinya dialokasikan dalam rangka mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Komponen dana perimbangan tidak banyak dipengaruhi kinerja pemerintah daerah, namun lebih banyak mempertimbangkan aspek tipologi daerah berdasarkan karakteristik seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan semacamnya. Adapun sektor transfer lainnya seperti Dana Insentif Daerah (DID), bagi hasil

pajak, serta dana desa merupakan kelompok transfer yang bergantung kepada indikator yang lebih mengarah ke kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Majene masih tergolong daerah yang belum memiliki kemandirian fiskal untuk membiayai kebutuhannya sehingga masih sangat bergantung pada kelompok pendapatan transfer.

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa.

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Perimbangan	712.396.005.533,00	727.959.737.110,00	(15.563.731.577,00)	(2,14)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	47.727.678.768,00	55.820.851.000,00	(8.093.172.232,00)	(14,50)
Jumlah	**760.123.684.301,00**	**783.780.588.110,00**	**(23.656.903.809,00)**	**(3,02)**

5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.634.568.300,00	6.639.074.000,00	(1.004.505.700,00)	(15,13)
Jumlah	**5.634.568.300,00**	**6.639.074.000,00**	**(1.004.505.700,00)**	**(15,13)**

Kelompok Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp5.826.710.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp5.634.568.300,00 atau 96,70 persen, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 11 Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	
Dana Bagi Hasil (DBH)	**5.826.710.000,00**	**5.634.568.300,00**	**96,70**	**6.639.074.000,00**
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	852.913.000,00	815.066.700,00	95,56	646.085.000,00
DBH PPh Pasal 21	3.000.994.000,00	2.665.743.300,00	88,82	2.565.796.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	153.631.000,00	296.265.000,00	192,84	2.809.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	38.320.300,00	0,00	66.645.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.223.000,00	14.224.000,00	100,00	29.566.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.296.874.000,00	1.296.874.000,00	100,00	1.742.782.000,00
DBH Sawit	508.075.000,00	508.075.000,00	100,00	1.585.391.000,00

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Alokasi Umum (DAU)	544.376.636.960,00	548.935.022.195,00	(4.558.385.235,00)	(0,83)
Jumlah	**544.376.636.960,00**	**548.935.022.195,00**	**(4.558.385.235,00)**	**(0,83)**

Kelompok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp535.243.742.000,00 dan sampai pada akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp544.376.636.960,00 atau 101,71 persen. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp4.558.385.235,00 atau 0,83 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2024.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Alokasi Khusus Fisik	24.111.344.842,00	41.802.623.094,00	(17.691.278.252,00)	(42,32)
Dana Alokasi Khusus-Nonfisik	138.273.455.431,00	130.583.017.821,00	7.690.437.610,00	5,89
Jumlah	**162.384.800.273,00**	**172.385.640.915,00**	**(10.000.840.642,00)**	**(5,80)**

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp162.384.800.273,00 dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp174.618.122.000,00 atau 92,99 persen. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp10.000.840.642,00 atau 5,80 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari:

a. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Pada Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan senilai Rp24.453.962.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp24.111.344.842,00 atau 98,59 persen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 12 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**24.453.962.000,00**	**24.111.344.842,00**	**98,59**
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	728.126.000,00	725.873.554,00	99,69
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	384.935.000,00	384.025.000,00	99,76
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	422.800.000,00	422.630.000,00	99,95
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	322.006.000,00	317.484.100,00	98,59
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.704.411.000,00	7.488.971.000,00	97,20
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.873.861.000,00	3.873.861.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	6.929.803.099,00	0,00

Uraian	2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	11.017.823.000,00	3.968.697.089,00	36,02

b. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Pada Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan senilai Rp150.164.160.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp138.273.455.431,00 atau 92,08 persen dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 5. 13 Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	**150.164.160.000,00**	**138.273.455.431,00**	**92,08**
DAK Nonfisik-BOS Reguler	25.656.882.000,00	25.632.682.000,00	99,90
DAK Nonfisik-BOS Kinerja	1.573.000.000,00	1.573.000.000,00	100,00
DAK Nonfisik-TPG PNSD	81.400.707.000,00	72.896.784.618,00	89,55
DAK Nonfisik-Tamsil Guru PNSD	1.114.250.000,00	765.810.000,00	68,72
DAK Nonfisik-TKG PNSD	10.051.326.000,00	9.105.344.845,00	90,58
DAK Nonfisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	492.085.000,00	491.398.280,00	99,86
DAK Nonfisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	354.629.000,00	354.629.000,00	100,00
DAK Nonfisik-Dana Bantuan BLPS	499.994.000,00	499.994.000,00	100,00
DAK Nonfisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	358.818.600,00	89,55
DAK Nonfisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	483.018.000,00	483.018.000,00	100,00
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.868.896.000,00	4.819.839.000,00	98,99
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.351.640.000,00	3.313.410.900,00	98,85
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00
DAK Nonfisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.787.007.000,00	4.421.693.927,00	92,36
DAK Nonfisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10.997.966.000,00	9.426.852.261,00	85,71
DAK Nonfisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.862.100.000,00	3.860.180.000,00	99,95

5.1.1.2.1.4 Dana Insentif Daerah (DID)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan Dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang Tata Kelola Keuangan Daerah,

Pelayanan Umum Pemerintahan, dan Pelayanan Dasar Publik sampai dengan per 31 Desember 2025 tidak menganggarkan Dana Insentif Daerah.

5.1.1.2.1.5 Dana Desa

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Desa	47.727.678.768,00	55.820.851.000,00	(8.093.172.232,00)	(14,50)
Jumlah	**47.727.678.768,00**	**55.820.851.000,00**	**(8.093.172.232,00)**	**(14,50)**

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer langsung ke rekening desa namun tetap dilaporkan dalam APBD Kabupaten Majene serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, Dana desa per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp47.727.678.768,00 dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp52.655.853.000,00 atau 90,64 persen. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2024 senilai Rp8.093.172.232,00 atau 14,50 persen.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	19.101.330.683,00	24.527.029.863,00	(5.425.699.180,00)	(22,12)
Jumlah	**19.101.330.683,00**	**24.527.029.863,00**	**(5.425.699.180,00)**	**(22,12)**

Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan senilai Rp20.924.303.174,00 sampai pada akhir Tahun Anggaran 2025 dapat direalisasikan senilai Rp19.101.330.683,00 atau 91,28 persen. Hal ini mengalami penurunan dari tahun lalu senilai Rp5.425.699.180,00 dengan persentase sebesar 22,12 persen.

Penurunan pendapatan transfer antar daerah tersebut mengalami penurunan cukup signifikan disebabkan karena Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air permukaan mengalami penundaan pencairan triwulan III berdasarkan:

a. SK Gubernur Nomor 758 Tahun 2025 Tanggal 4 November 2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Triwulan III dengan nilai Rp2.313.838.150,00;
b. SK Gubernur Nomor 769 Tahun 2025 Tanggal 9 November 2025 tentang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Triwulan III senilai Rp52.251.589,00; dan
c. SK Gubernur Nomor 819 Tahun 2025 Tanggal 8 Desember 2025 tentang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Triwulan III dengan nilai Rp4.217.004,00.

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Bagi Hasil	19.101.330.683,00	24.527.029.863,00	(5.425.699.180,00)	(22,12)
Jumlah	**19.101.330.683,00**	**24.527.029.863,00**	**(5.425.699.180,00)**	**(22,12)**

Pendapatan Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp20.924.303.174,00. Sampai pada akhir Tahun Anggaran 2025, dapat direalisasikan senilai Rp19.101.330.683,00 atau 91,28 persen, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 14 Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Bagi Hasil	**20.924.303.174,00**	**19.101.330.683,00**	91,28
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.049.872.846,00	1.429.672.684,00	136,17
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	870.189.112,00	896.638.937,00	103,03
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.071.919.900,00	6.165.862.899,00	76,38
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	20.513.316,00	11.497.971,00	56,05
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.911.808.000,00	10.597.658.192,00	97,12

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada entitas/daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah atau desa penerima. Contohnya adalah bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota serta desa dan bantuan keuangan dari kabupaten/kota ke desa. Tahun 2025 tidak terdapat anggaran Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan begitupun yang terjadi pada Tahun 2024.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan per 31 Desember 2025 target dan realisasi Rp0,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp0,00 dari jumlah yang telah dianggarkan senilai Rp0,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah kelompok pendapatan APBD selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 tidak terdapat anggaran maupun realisasi pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA, demikian pula pada Tahun 2024. Berikut perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021-2025 disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 5. 7 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021-2025

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Hibah yang bersumber dari pemerintah pusat cenderung menurun sejak tahun 2021 dan tidak ada realisasi di tahun 2024 dan 2025. Pada tahun anggaran 2021, pendapatan hibah terealisasi cukup tinggi dengan nilai Rp48.827.690.000,00 lalu ditahun 2022 turun drastis senilai Rp1.227.000.000,00 selanjutnya ditahun 2023 kembali turun menjadi Rp1.002.000.000,00 dan tahun 2024 serta 2025 senilai Rp0,00, disebabkan karena perubahan kebijakan terkait penganggaran dan pelaporan dana Biaya Operasional Sekolah di mana sebelumnya dianggarkan pada pos Pendapatan Asli Daerah dan sejak tahun 2020 dianggarkan dan dilaporkan pada pos Pendapatan Hibah pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Tidak terdapat realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

Tabel 5. 15 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Uraian	2025			2024
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pendapatan Hibah merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau dari Pemerintah Daerah lainnya. Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Majene tidak memperoleh hibah baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

5.1.2. Belanja dan Transfer

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Belanja dan Transfer	863.664.601.041,78	904.311.515.312,78	(40.646.914.271,00)	(4,49)
Jumlah	**863.664.601.041,78**	**904.311.515.312,78**	**(40.646.914.271,00)**	**(4,49)**

Realisasi Belanja dan Transfer TA 2025 sebesar Rp863.664.601.041,78 atau 94,85 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp910.562.452.913,69

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

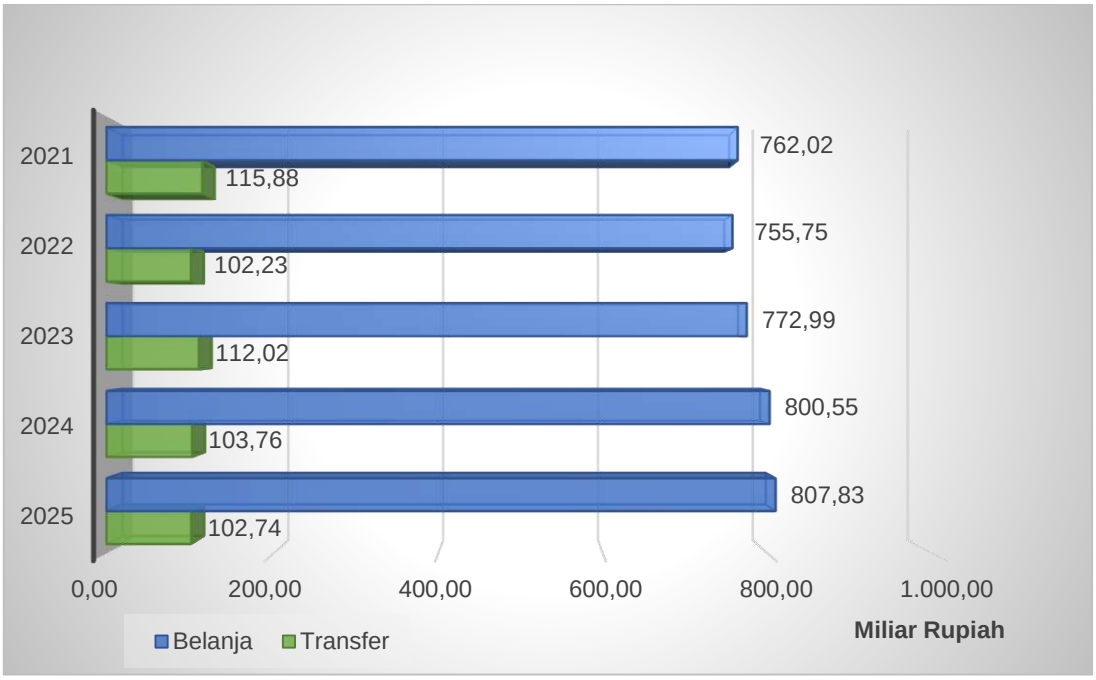
Belanja Daerah dan Transfer adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*Performance-Based Budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Rincian belanja menurut jenis disajikan secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 16 Rincian Belanja Menurut Jenis

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
BELANJA OPERASI	**754.940.405.263,69**	**720.624.276.601,78**	**95,45**	**729.988.167.952,60**
Belanja Pegawai	467.875.356.954,00	451.753.620.104,00	96,55	424.459.751.438,00
Belanja Barang dan Jasa	276.845.340.309,69	259.163.085.597,78	93,61	267.189.138.109,60
Belanja Hibah	10.156.348.000,00	9.648.530.900,00	95,00	38.275.918.405,00
Belanja Bantuan Sosial	63.360.000,00	59.040.000,00	93,18	63.360.000,00
BELANJA MODAL	**43.213.252.689,00**	**37.803.728.541,00**	**87,48**	**69.228.942.593,18**

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	861.471.700,00	732.371.100,00	85,01	1.053.059.242,00
Belanja Peralatan dan Mesin	8.383.182.681,00	5.004.809.348,00	59,70	11.393.369.748,00
Belanja Gedung dan Bangunan	24.642.236.887,00	23.797.538.257,00	96,57	33.605.479.353,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.963.076.421,00	7.906.104.836,00	88,21	23.121.034.250,18
Belanja Aset Tetap Lainnya	323.285.000,00	322.905.000,00	99,88	56.000.000,00
Belanja Aset Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	**2.900.000.000,00**	**2.499.579.085,00**	**86,19**	**1.330.046.402,00**
BELANJA TRANSFER	**109.508.794.961,00**	**102.737.016.814,00**	**93,81**	**103.764.358.365,00**
Transfer Bagi Hasil	2.696.704.257,00	853.100.342,00	31,63	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	106.812.090.704,00	101.883.916.472,00	95,38	103.764.358.365,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**910.562.452.913,69**	**863.664.601.041,78**	**94,85**	**904.311.515.312,78**

Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 direalisasikan senilai Rp863.664.601.041,78 atau menurun 4,49 persen dari saldo tahun sebelumnya di Tahun 2024 yang tercatat senilai Rp904.311.515.312,78. Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi senilai Rp720.624.276.601,78, Belanja Modal senilai Rp37.803.728.541,00, Belanja Tak Terduga senilai Rp2.499.579.085,00 dan Transfer senilai Rp102.737.016.814,00. Berikut perkembangan realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Majene disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 5. 8 Perkembangan Belanja dan Transfer Tahun 2021-2025

Dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis

belanja. Khusus dalam kelompok belanja, sesuai dengan Paragraf 18 PSAP Nomor 02 yang menyebutkan bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CaLK.

a. Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Organisasi

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 terdiri atas belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Belanja pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini PPKD. Berikut disajikan dalam tabel ringkasan realisasi belanja menurut organisasi secara berurutan berdasarkan besaran realisasi belanja.

Tabel 5. 17 Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Organisasi

No.	Organisasi	Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	340.132.416.323,00	328.275.546.123,00	96,51
2.	Dinas Kesehatan	135.685.570.113,69	130.691.204.588,00	96,32
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	66.750.466.923,00	58.857.783.668,00	88,18
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.820.007.296,00	52.990.097.302,78	94,93
5.	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	11.628.854.170,00	11.032.424.198,00	94,87
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	5.058.520.298,00	4.749.551.938,00	93,89
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.335.134.706,00	6.149.255.313,00	83,83
8.	Dinas Sosial	1.751.435.402,00	1.518.016.077,00	86,67
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.233.478.034,00	2.926.229.351,00	90,50
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.947.792.451,00	2.784.636.863,00	94,47
11.	Dinas Ketahanan Pangan	1.937.960.791,00	1.837.549.510,00	94,82
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.797.938.727,00	6.476.724.883,00	95,27
13.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.189.674.710,00	2.926.368.305,00	91,75
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.364.102.338,00	2.087.806.776,00	88,31
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.229.388.401,00	6.971.234.576,00	96,43
16.	Dinas Perhubungan	3.503.317.872,00	3.274.163.177,00	93,46
17.	Dinas Komunikasi Informatika. Statistik dan Persandian	3.283.096.474,00	3.183.881.948,00	96,98
18.	Dinas Koperasi UKM. Perindustrian dan Perdagangan	4.332.506.058,00	4.113.024.625,00	94,93
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2.215.666.967,00	2.114.547.858,00	95,44
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.848.846.312,00	6.623.100.494,00	96,70
21.	Dinas Perpustakaan	2.993.874.906,00	2.887.635.453,00	96,45
22.	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.299.035.801,00	6.099.901.993,00	96,84
23.	Dinas Pertanian. Peternakan dan Perkebunan	13.991.773.388,00	13.349.639.156,00	95,41
24.	Sekretariat Daerah	24.578.162.699,00	23.050.668.762,00	93,79
25.	Sekretariat DPRD	18.791.186.866,00	17.822.098.079,00	94,84
26.	Badan Perencanaan Daerah	3.535.558.094,00	3.176.432.372,00	89,84

No.	Organisasi	Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	119.835.673.948,00	112.258.011.302,00	93,68
28.	Badan Pendapatan Daerah	4.308.110.825,00	3.971.760.893,00	92,19
29.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	4.191.505.023,00	3.912.116.903,00	93,33
30.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.250.063.039,00	1.189.927.082,00	95,19
31.	Inspektorat Daerah	6.236.513.580,00	5.716.178.643,00	91,66
32.	Kecamatan Banggae	6.781.820.671,00	6.622.868.169,00	97,66
33.	Kecamatan Banggae Timur	7.854.008.117,00	7.507.427.418,00	95,59
34.	Kecamatan Pamboang	3.100.721.952,00	2.975.979.305,00	95,98
35.	Kecamatan Sendana	3.600.831.614,00	3.378.036.061,00	93,81
36.	Kecamatan Tammerodo	1.118.245.335,00	1.000.839.035,00	89,50
37.	Kecamatan Tubo Sendana	1.770.677.541,00	1.623.036.894,00	91,66
38.	Kecamatan Ulumanda	1.473.188.096,00	1.290.084.132,00	87,57
39.	Kecamatan Malunda	3.531.156.367,00	3.302.962.140,00	93,54
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.274.170.685,00	2.945.849.676,00	89,97
JUMLAH		**910.562.452.913,69**	**863.664.601.041,78**	**94,85**

Dapat dilihat bahwa SKPD dengan urutan 5 (lima) teratas dengan anggaran belanja yang paling tinggi adalah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga dengan jumlah anggaran senilai Rp340.132.416.323,00, Dinas Kesehatan senilai Rp135.685.570.113,00,Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp119.835.673.948,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp55.820.007.296,00, serta Sekretariat Daerah Rp24.578.162.699,00. Postur belanja yang dominan pada kelompok satuan kerja tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Majene untuk memprioritaskan bidang Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam arah pembangunan daerah.

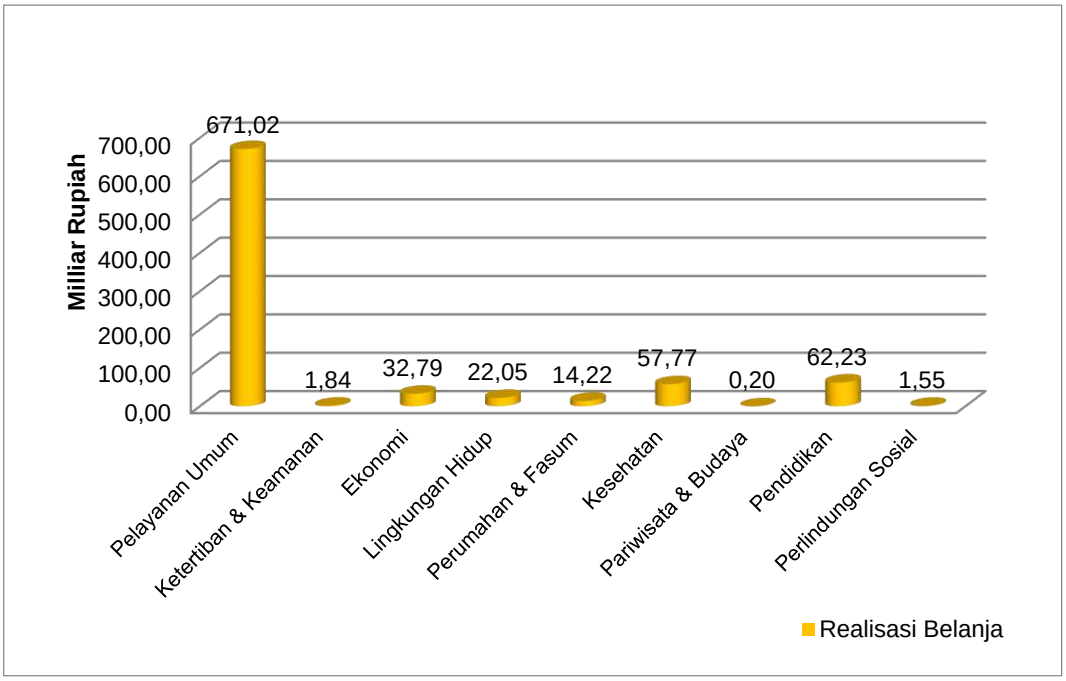
b. Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Urusan Pemerintahan

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Majene juga dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan fungsi. Fungsi merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Belanja Pemerintah Daerah menurut fungsi terbagi dalam 9 (sembilan) fungsi. yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Majene per fungsi pada tahun anggaran 2025 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 18 Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Fungsi

No.	Uraian Fungsi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
1.	Pelayanan Umum	708.786.388.862,10	671.021.791.613,00	94,67
2.	Ketertiban dan Keamanan	2.899.526.300,00	1.841.847.850,00	63,52
3.	Ekonomi	35.129.668.033,00	32.788.109.286,78	93,33
4.	Lingkungan Hidup	23.055.102.838,00	22.052.870.862,00	95,65
5.	Perumahan dan Fasilitas Umum	14.671.177.174,00	14.217.520.983,00	96,91
6.	Kesehatan	60.173.803.640,59	57.767.907.604,00	96
7.	Pariwisata dan Budaya	195.769.000,00	195.769.000,00	100
8.	Pendidikan	63.815.634.218,00	62.230.583.032,00	97,52
9.	Perlindungan Sosial	1.835.382.848,00	1.548.200.811,00	84,35
Jumlah		**910.562.452.913,69**	**863.664.601.041,78**	**94,85**

Komposisi realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Majene menurut fungsi tahun anggaran 2025 terlihat pada grafik berikut:



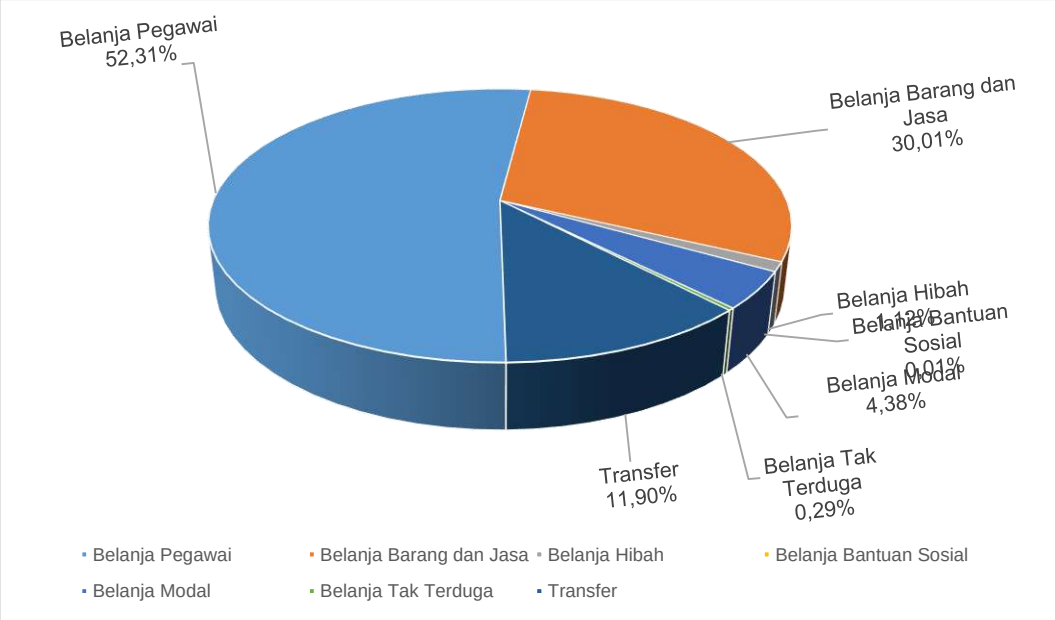
Grafik 5. 9 Komposisi Belanja Daerah Menurut Fungsi Tahun 2025

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2025, bidang penyelenggaraan pemerintahan atau fungsi yang memiliki alokasi anggaran belanja yang paling dominan adalah pelayanan umum, pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang mengacu pada peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

c. Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Jenis

Berdasarkan PSAP Nomor 02, Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan klasifikasi ekonominya terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp720.624.276.601,78, Belanja Modal senilai Rp37.803.728.541,00, Belanja Tak Terduga senilai Rp2.499.579.085,00, dan Transfer senilai Rp102.737.016.814,00. Komposisi belanja Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 berdasarkan klasifikasi ekonomi disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 5. 10 Komposisi Belanja Menurut Jenis TA 2025

d. Belanja Wajib Dana Transfer Umum dan Perlindungan Sosial

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. pada Pasal 50 diatur bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, maka daerah berpotensi menerima sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum oleh Menteri Keuangan. Ketentuan ini kemudian dipertegas lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Belanja Wajib. Berikut ringkasan laporan realisasi belanja wajib dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5. 19 Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Wajib

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Pemenuhan Mandatory Spending (%)
1.	Pendidikan	362.648.449.251,00	266.442.341.122,00	73,47	29,26
2.	Infrastruktur Publik	199.972.717.787,69	183.826.186.707,78	91,93	22,95
3.	Anggaran Dana Desa	54.056.237.704,00	54.056.237.704,00	100,00	9,84
4.	Pengawasan	2.475.752.682,00	2.029.329.298,00	81,97	0,27
Jumlah		**619.153.157.424,69**	**506.354.094.831,78**	**81,78**	

Belanja wajib yang dimaksud terdiri atas belanja pendidikan paling sedikit sebesar 20 persen dari dana transfer umum dan untuk di Kabupaten Majene atas belanja tersebut pemerintah telah merealisasikan sebesar 266.442.341.122,00 atau 73,47 persen atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40,00 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40,00 persen, Pengalokasian belanja untuk pembangunan infrastruktur publik oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 senilai Rp183.826.186.707,78 jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan senilai Rp801.053.657.952,69 maka anggaran pembangunan infrastruktur publik tersebut mencapai 22,95 persen dari Belanja Daerah dan belum memenuhi, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan fiskal Kabupaten Majene yang hampir setengahnya digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai dan belanja masih digunakan melakukan pembayaran utang tahun sebelumnya. Sehingga Pemerintah Kabupaten Majene mampu kedepannya mampu memanfaatkan semua potensi daerah untuk menambah kemampuan fiskalnya.

Alokasi Dana Desa 10 persen. Kewajiban alokasi anggaran minimal untuk *mandatory spending* Tahun 2025 menganggarkan senilai Rp54.056.237.704,00 dengan realisasi 100,00 persen berdasarkan perhitungan pemerintah Kabupaten hanya mampu mengalokasikan 9,84 persen, kekurangan penganggaran pada Tahun 2025 tersebut disebabkan oleh penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang dilakukan pada awal tahun dengan mengacu pada anggaran pokok. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang lebih cermat dan akurat dalam penyusunan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Bidang Pengawasan Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 untuk biaya operasional pengawasan Inspektorat senilai Rp2.475.752.682,00 jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan senilai Rp910.562.452.913,69 atau 0,27 persen dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi ini belum memenuhi kriteria yang diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar daerah dengan besaran APBD sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit senilai 1,00 persen dari total Belanja Daerah namun atas keterbatasan fiskal yang ada dengan target program prioritas visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Majene harus dipenuhi dalam rentang waktu efektif yang tergolong singkat, maka Pemerintah Kabupaten Majene hanya dapat mengalokasikan kegiatan pengawasan yang bersifat prioritas.

Kewajiban alokasi anggaran minimal untuk *mandatory spending* bidang kesehatan yang sebelumnya diatur dalam UU Kesehatan 2009 yakni 5 persen untuk APBN dan 10 persen untuk APBD telah dihapus dalam Undang-Undang Kesehatan baru yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggantinya dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang lebih fleksibel. Sebagai bentuk komitmen pada Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 mengalokasikan anggaran untuk pada bidang kesehatan senilai Rp202.436.037.036,69, dalam bentuk Belanja operasi senilai Rp186.131.789.849,69 dan dalam bentuk belanja modal senilai Rp16.304.247.187,00, jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan maka anggaran kesehatan tersebut mencapai 22,23 persen dari Belanja Daerah atau memenuhi syarat dialokasikan minimal 10,00 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5.1.2.1. Belanja Operasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Operasi	720.624.276.601,78	729.988.167.952,60	(9.363.891.350,82)	(1,28)
Jumlah	**720.624.276.601,78**	**729.988.167.952,60**	**(9.363.891.350,82)**	**(1,28)**

Pengeluaran Belanja Operasi pada tahun 2025 realisasi sebesar Rp720.624.276.601,78 dengan capaian realisasi 95,45 persen

Pengeluaran Belanja Operasi pada Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp754.940.405.263,69 dengan realisasi senilai Rp720.624.276.601,78 atau 95,45 persen. Belanja Operasi pada periode APBD Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp9.363.891.350,82 dari tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 20 Belanja Operasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi
Belanja Pegawai	467.875.356.954,00	451.753.620.104,00	96,55	424.459.751.438,00
Belanja Barang dan Jasa	276.845.340.309,69	259.163.085.597,78	93,61	267.189.138.109,60
Belanja Hibah	10.156.348.000,00	9.648.530.900,00	95,00	38.275.918.405,00
Belanja Bantuan Sosial	63.360.000,00	59.040.000,00	93,18	63.360.000,00
Jumlah	**754.940.405.263,69**	**720.624.276.601,78**	**95,45**	**729.988.167.952,60**

Kalau dilihat pada Tabel di atas, belanja hibah berdasarkan realisasi berkurang secara signifikan senilai Rp28.627.387.505,00 atau 74,79 persen, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 merupakan masa pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, oleh karena itu di tahun tersebut jumlah belanja hibah yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan tahun lainnya, belanja hibah yang dikeluarkan berupa bantuan keuangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres Majene dan Kodim 1401/Majene.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Pegawai	451.753.620.104,00	424.459.751.438,00	27.293.868.666,00	6,43
Jumlah	**451.753.620.104,00**	**424.459.751.438,00**	**27.293.868.666,00**	**6,43**

Realisasi belanja pegawai pada TA 2025 rata-rata komponen belanja gaji terealisasi 96,55 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp467.875.356.954,00

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp467.875.356.954,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp451.753.620.104,00 atau 96,55 persen. Adapun rincian realisasi belanja pegawai dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5. 21 Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	364.304.387.563,00	353.779.593.860,00	97,11	321.163.492.076,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	94.802.623.500,00	89.842.202.049,00	94,77	7.257.126.357,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	0,00	0,00		87.886.106.914,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.462.079.569,00	7.210.229.141,00	96,62	7.495.943.775,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.250.974,00	194.250.974,00	100,00	178.542.316,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	100,00	478.540.000,00
Belanja Pegawai BLUD	601.135.348,00	216.464.080,00	36,00	0,00
Jumlah	**467.875.356.954,00**	**451.753.620.104,00**	**96,55**	**424.459.751.438,00**

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun 2025 direalisasikan senilai Rp353.779.593.860,00 atau 97,11 persen dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai Rp364.304.387.563,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 22 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Gaji Pokok ASN	282.312.275.059,60	274.733.770.573,00	97,31
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.819.421.512,40	23.703.987.796,00	95,50
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.271.010.358,00	4.987.840.000,00	94,62
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.412.886.060,00	15.156.361.000,00	98,33
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.729.764.874,00	6.558.795.000,00	97,45
Belanja Tunjangan Beras ASN	15.100.589.017,00	14.462.460.860,00	95,77

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	646.400.867,00	598.998.053,00	92,66
Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.394.670,00	4.008.275,00	91,20
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.585.255.953,00	11.285.693.160,00	97,41
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	613.389.191,00	571.922.513,00	93,23
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.809.000.001,00	1.715.756.630,00	94,84
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**364.304.387.563,00**	**353.779.593.860,00**	**97,11**

Realisasi belanja pegawai pada TA 2025 menunjukkan capaian realisasi yang baik di mana rata-rata komponen belanja gaji terealisasi di atas 90,00 persen.

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada Tahun 2025 direalisasikan senilai Rp89.842.202.049,00 atau 94,77 persen dari jumlah anggaran senilai Rp94.802.623.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 23 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.641.000.000,00	1.449.000.000,00	88,29
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	93.161.623.500,00	88.393.202.049,00	94,88
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**94.802.623.500,00**	**89.842.202.049,00**	**94,77**

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp88.393.202.049,00 atau 94,88 persen dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai Rp93.161.623.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 24 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	35.000.000,00	28.724.886,00	82,07
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	241.003.050,00	142.367.600,00	59,07
Belanja Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	44.472.000,00	6.949.500,00	15,62
Belanja Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	78.715.050,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	48.854.400,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.068.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	15.528.000,00	2.450.600,00	15,78
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olah Raga	35.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	950.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	60.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	28.750.000,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	81.400.707.000,00	78.341.554.618,00	96,24
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	10.051.326.000,00	9.105.344.845,00	90,58
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.114.250.000,00	765.810.000,00	68,72
Jumlah	**93.161.623.500,00**	**88.393.202.049,00**	**94,88**

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp7.210.229.141,00 atau 96,62 persen dari jumlah anggaran pokok senilai Rp7.462.079.569,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 25 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	43.570.800,00	43.570.800,00	100,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	65.902.200,00	65.902.200,00	100,00
Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.223.000,00	814.233.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	86.051.700,00	86.051.700,00	100,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	26.856.900,00	15.666.525,00	58,33
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	331.660,00	331.660,00	100,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	17.421,00	17.368,00	99,69

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	809.283.888,00	809.283.888,00	100,00
Belanja Tunjangan transportasi DPRD	2.403.000.000,00	2.403.000.000,00	100,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**7.462.079.569,00**	**7.210.229.141,00**	**96,62**

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp194.250.974,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggaran pokok senilai Rp194.250.974,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 26 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Uraian	2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Gaji Pokok KDH / WKDH	70.800.000,00	70.800.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH / WKDH	5.532.000,00	5.532.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH / WKDH	104.760.000,00	104.760.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Beras KDH / WKDH	5.431.500,00	5.431.500,00	100,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH / WKDH	873.354,00	873.354,00	100,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH / WKDH	2.600,00	2.600,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH / WKDH	6.264.000,00	6.264.000,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH / WKDH	146.880,00	146.880,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH / WKDH	440.640,00	440.640,00	100,00
Jumlah	**194.250.974,00**	**194.250.974,00**	100,00

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp510.880.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai Rp510.880.000,00 terdiri dari:

1) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direalisasikan senilai Rp110.880.000,00 atau 100,00 persen dari Anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp110.880.00,00; dan
2) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH pada TA 2025 direalisasikan senilai Rp400.000.000,00 atau 100,00 persen dari Anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp400.000.000,00.

g. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp216.464.080,00 atau 36,00 persen dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai Rp601.135.348,00.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Barang dan Jasa	259.163.085.597,78	267.189.138.109,60	(8.026.052.511,82)	(3,00)
Jumlah	**259.163.085.597,78**	**267.189.138.109,60**	**(8.026.052.511,82)**	**(3,00)**

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2025 sampai dengan per 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp259.163.085.597,78 atau 93,61 persen

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan senilai Rp276.845.340.309,69 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 telah direalisasikan senilai Rp259.163.085.597,78 atau 93,61 persen. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 27 Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
BELANJA BARANG				
Belanja Barang Pakai Habis	63.326.694.994,59	60.175.010.391,00	95,02	62.049.133.862,50
Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.100.000,00	5.085.000,00	99,70	0,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.300.500,00	2.300.000,00	99,97	219.091.269,00
BELANJA JASA				
Belanja Jasa Kantor	37.320.975.294,00	33.302.226.306,00	89,23	33.661.530.886,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.261.293.192,00	20.005.099.831,00	98,73	15.540.770.218,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.132.056.200,00	1.092.416.990,00	96,49	717.627.997,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.434.352.500,00	1.174.563.000,00	81,88	929.150.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	14.200.000,00	14.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	10.921.655.325,00	9.283.619.266,00	85,00	2.979.429.385,00
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	4.875.134.820,00	4.673.062.660,00	95,85	17.171.895.156,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	237.300.000,00	237.299.999,00	99,99	127.500.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	153.000.000,00	17.000.000,00	11,11	348.545.800,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Pajak Daerah	125.000.000,00	112.307.000,00	89,84	0,00
BELANJA PEMELIHARAAN				
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.728.919.054,00	2.441.774.366,00	89,47	3.168.076.291,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.002.645.480,00	912.716.377,00	91,03	1.043.718.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.508.495.725,00	13.162.916.538,78	97,44	8.243.048.979,00
BELANJA PERJALANAN DINAS				
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.326.922.260,00	16.959.748.205,00	92,54	21.102.270.741,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	100	100.000.000,00
BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT				
Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	169.500.000,00	159.500.000,00	94,10	130.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA BOSP				
Belanja Barang dan Jasa BOSP	26.535.282.000,00	26.557.092.000,00	100,08	26.924.610.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA BLUD				
Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.764.512.965,10	68.875.147.668,00	92,12	72.732.039.025,10
Jumlah	**276.845.340.309,69**	**259.163.085.597,78**	**93,61**	**267.189.138.109,60**

Pada tabel di atas terdapat Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS atas kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan yang realisasinya hanya mencapai 11,11 persen hal ini disebabkan karena pengajuan untuk pembayaran pada akhir tahun dan kapasitas fiskal tidak mungkin dilakukan pembayaran akhirnya menjadi utang senilai Rp136.000.000,00 di Dinas Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelampauan atas belanja BOSP disebabkan adanya kesalahan perhitungan penganggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS dengan tidak mempertimbangkan besaran pendapatan DAK Nonfisik-BOS Reguler 2025, termasuk tidak mengakomodir penambahan satu Entitas sekolah pada tingkatan menengah dimana tahun 2024 jumlah sekolah menengah sebanyak tiga puluh delapan (38) sekolah dan di tahun 2025 menjadi tiga puluh sembilan (39) sekolah

Terjadinya kenaikan yang signifikan pada Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh beberapa proyek nasional membutuhkan biaya konsultasi perencanaan seperti pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga untuk pembangunan sekolah dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan Jalan dan Irigasi sehingga berdampak juga pada penurunan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi dibandingkan dengan Tahun 2024.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Hibah	9.648.530.900,00	38.275.918.405,00	(28.627.387.505,00)	(74,79)
Jumlah	**9.648.530.900,00**	**38.275.918.405,00**	**(28.627.387.505,00)**	**(74,79)**

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp10.156.348.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.648.530.900,00 atau 95,00 persen.

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp10.156.348.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp9.648.530.900,00 atau 95,00 persen, jika dibandingkan dengan Tahun 2024 berkurang secara signifikan senilai Rp28.627.387.505,00 atau 74,79 persen, hal ini disebabkan karena di Tahun 2024 belanja hibah tersebut dipergunakan untuk bantuan keuangan dalam rangka mensukseskan pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala

Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres Majene, Kodim 1401/Majene. aktivitas tersebut tidak ada lagi di tahun 2025. Adapun rincian belanja hibah di Tahun 2025 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 28 Belanja Hibah Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	29.440.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	694.600.000,00	635.400.000,00	91,47	8.141.953.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	711.212.000,00	711.212.000,00	100,00	693.965.405,00
Belanja Hibah Dana BOSP	8.490.536.000,00	8.041.918.900,00	94,71	0,00
Jumlah	**10.156.348.000,00**	**9.648.530.900,00**	**95,00**	**38.275.918.405,00**

Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional. Pemerintah Pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat perubahan mendasar terhadap mekanisme pengelolaan hibah pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelola belanja hibah mulai dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPKD. Namun dengan ketentuan yang terakhir, belanja hibah dapat dikelola di tingkat SKPD. Realisasi belanja hibah berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 29 Daftar Realisasi Belanja Hibah Berdasarkan SKPD

No.	SKPD	Anggaran (Rp)	Total Realisasi (Rp)
1.	**Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga**	**9.185.136.000,00**	**8.677.318.900,00**
	Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima Satdikdas	694.600.000,00	635.400.000,00
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.003.896.000,00	4.758.948.000,00
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.486.640.000,00	3.282.970.900,00
2.	**Sekretariat Daerah**	**260.000.000,00**	**260.000.000,00**
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	260.000.000,00	260.000.000,00
3.	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**711.212.000,00**	**711.212.000,00**
	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	711.212.000,00	711.212.000,00
TOTAL		**10.156.348.000,00**	**9.648.530.900,00**

Hibah pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga merupakan hibah berbentuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Satuan Pendidikan Dasar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta hibah ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP TK dan PAUD), Hibah tersebut bersumber dari Dana Alokasi Nonfisik Bidang Pendidikan. Selain itu terdapat hibah bagi organisasi sosial kemasyarakatan seperti Pesantren Ihyaul Ulum DDI Baruga, BKMT, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene dan Belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan hibah yang berbentuk bantuan keuangan Partai Politik.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Bantuan Sosial	59.040.000,00	63.360.000,00	(4.320.000,00)	(6,82)
Jumlah	**59.040.000,00**	**63.360.000,00**	**(4.320.000,00)**	**(6,82)**

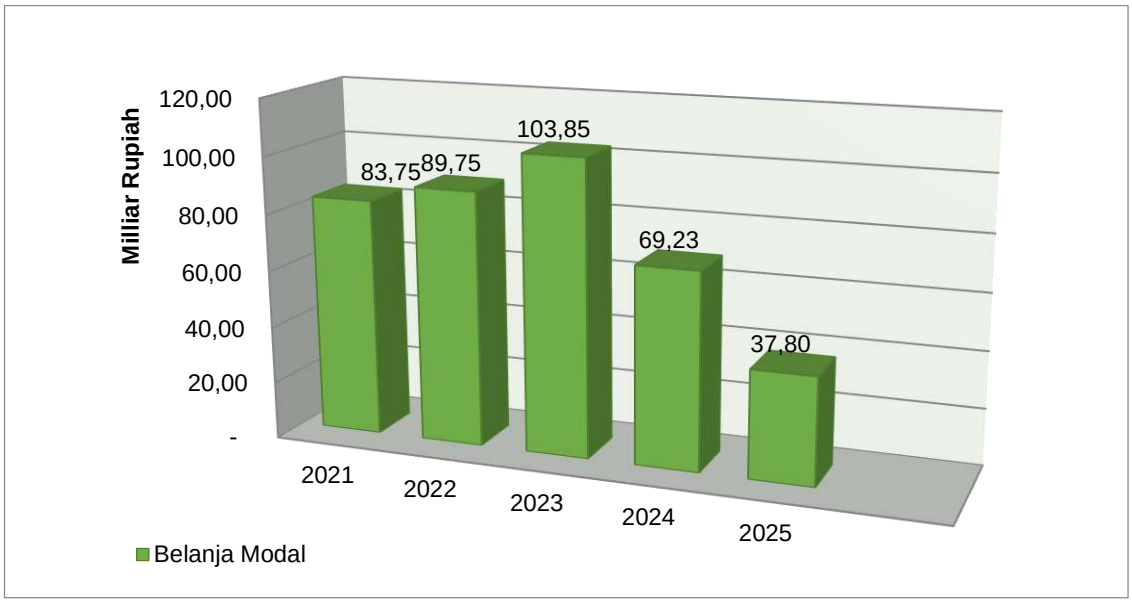
Selain mekanisme hibah, mekanisme belanja bantuan sosial juga mengalami perubahan pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja. Sebagaimana belanja hibah, belanja bantuan sosial sebelumnya mulai dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPKD. Namun dengan ketentuan yang terakhir, belanja bantuan sosial dapat dikelola di tingkat SKPD. Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat memengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya. Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pada satu SKPD yaitu Dinas Sosial berupa Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga yang dianggarkan senilai Rp63.360.000,00. Sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp59.040.000,00 atau 93,18 persen. Bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat eks penyandang penyakit kusta dengan penerima manfaat sebanyak 13 orang/keluarga yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Majene Nomor 100.3.32/820/XI/TAHUN 2025 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Eks Penyandang Penyakit Kusta Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025.

5.1.2.2. Belanja Modal

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Modal	37.803.728.541,00	69.228.942.593,18	(31.425.214.052,18)	(45,39)
Jumlah	**37.803.728.541,00**	**69.228.942.593,18**	**(31.425.214.052,18)**	**(45,39)**

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp37.803.728.541,00

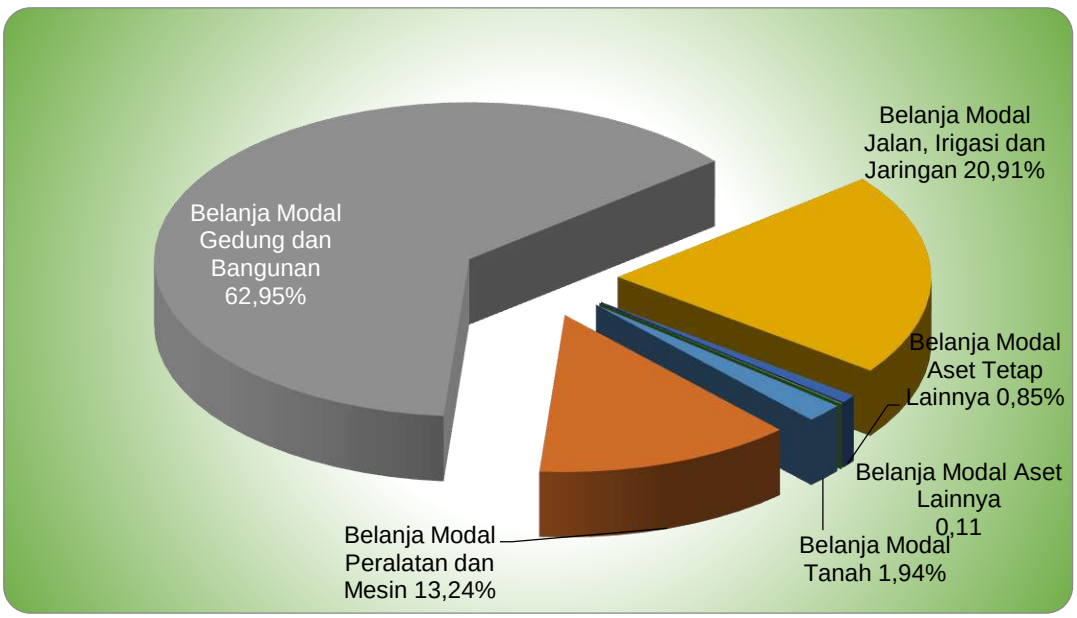
Belanja modal pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp43.213.252.689,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp37.803.728.541,00 atau 87,48 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya, realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan senilai Rp31.425.214.052,18 atau 45,39 persen hal ini disebabkan karena salah satu sumber pendapatan yakni pendapatan atas DAK Fisik juga mengalami penurunan sehingga berdampak pada belanja modal infrastruktur selain itu penggunaan Dana DAK Fisik digunakan untuk membiayai belanja barang yang akan diserahkan. Berikut kami gambarkan perbandingan belanja modal Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025.



Grafik 5. 11 Perbandingan Belanja Modal Tahun 2021-2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja modal dalam kurun lima tahun terakhir mencapai nilai tertinggi pada Tahun Anggaran 2023, yaitu senilai Rp103.848.841.602,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi senilai Rp83.749.169.412,51, pada Tahun 2022 realisasi mengalami kenaikan menjadi senilai Rp89.753.902.940,00. Selanjutnya, pada Tahun 2023 kembali mengalami kenaikan senilai Rp103.848.841.602,00. Pada tahun 2024, realisasi belanja modal mengalami penurunan menjadi senilai Rp69.228.942.593,18, dan hingga akhir tahun 2025 kembali menurun menjadi senilai Rp37.803.728.541,00.

Komposisi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Majene TA 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5. 12 Komposisi Belanja Modal per Jenis TA 2025

Grafik komposisi belanja modal berdasarkan jenisnya pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa belanja modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja modal dengan persentase tertinggi yaitu 62,95 persen. Kemudian pada posisi kedua adalah belanja modal jenis Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan Persentase 20,91 persen. Kemudian disusul oleh Peralatan dan Mesin dengan persentase 13,24 persen, lalu belanja modal jenis Tanah dengan komposisi 1,94 persen, selanjutnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan persentase 0,85 persen dan Belanja Modal Aset Lainnya 0,11 persen terakhir persen. Realisasi belanja modal berdasarkan jenisnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 30 Belanja Modal

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah	861.471.700,00	732.371.100,00	85,01	1.053.059.242,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.383.182.681,00	5.004.809.348,00	59,70	11.393.369.748,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.642.236.887,00	23.797.538.257,00	96,57	33.605.479.353,00
Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan	8.963.076.421,00	7.906.104.836,00	88,20	23.121.034.250,18
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	323.285.000,00	322.905.000,00	99,88	56.000.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	**100,00**	0,00
Jumlah	**43.213.252.689,00**	**37.803.728.541,00**	**87,48**	**69.228.942.593,18**

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan senilai Rp861.471.700,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 telah terealisasi senilai Rp732.371.100,00 atau 85,01 persen. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan senilai Rp320.688.142,00 atau 30,45 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Tanah sebagai berikut.

Tabel 5. 31 Belanja Modal Tanah

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Modal Tanah			
Pengadaan tanah untuk Sport Center Desa Adolang Dhua	206.772.000,00	206.772.000,00	100,00
Pengadaan tanah untuk TK IDHATA Camba Kelurahan Baru Kecamatan Banggae.	200.534.000,00	200.534.000,00	100,00
Pengadaan tanah untuk Relokasi Korban Banjir pada Desa Salutambung Kec. Ulumanda	161.424.000,00	161.424.000,00	100,00
Biaya Pengelolaan	185.000.000,00	74.402.400,00	40,22
Biaya Sertifikat Tanah	50.000.000,00	37.453.700,00	74,91

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Ganti Rugi Pembebasan Tanah Pelebaran Jalan & Jembatan Desa Tubo Poang [Utang TA. 2022]	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Biaya Pengelolaan Pengadaan Tanah [Utang TA. 2022]	5.956.700,00	0,00	0,00
Penilaian Biaya Pembebasan Lahan/Tanah-Relokasi Korban Banjir Desa Salutambung Kec.Ulumanda Kab, Majene [Utang TA. 2023]	49.395.000,00	49.395.000,00	100,00
Perluasan Bak Penampungan Air PDAM di Kec. Banggae Timur [Utang TA. 2022]	625.000,00	625.000,00	100,00
Perluasan Sport Center [Utang TA. 2022]	765.000,00	765.000,00	100,00
Jumlah	**861.471.700,00**	**732.371.100,00**	**85,01**

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp8.383.182.681,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp5.004.809.348,00 atau 59,70 persen. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan senilai Rp6.388.560.400,00 atau 56,07 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 5. 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	8.625.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	938.450.000,00	938.140.930,00	99,96	4.964.859.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.948.300.931,00	1.882.309.400,00	96,61	1.492.702.500,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	60.434.000,00	35.434.000,00	58,63	24.000.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	32.967.000,00	32.967.000,00	100,00	2.172.679.450,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	276.450.000,00	276.390.000,00	99,97	7.138.842,00
Belanja Modal Komputer	589.083.499,00	536.458.170,00	91,06	799.310.250,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	125.338.500,00	125.084.950,00	99,79	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.412.158.751,00	1.178.024.898,00	26,69	1.924.054.706,00
Jumlah	**8.383.182.681,00**	**5.004.809.348,00**	**59,70**	**11.393.369.748,00**

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp24.642.236.887,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp23.797.538.257,00 atau 96,57 persen. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan senilai Rp9.807.941.096,00 atau 29,19 persen bila

dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya senilai Rp33.605.479.353,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 33 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	22.710.436.148,00	21.895.384.388,00	96,41	30.991.481.222,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	89.188.273,00	89.188.273,00	100,00	106.256.000,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	3.354.465,00	3.354.465,00	100,00	744.829.600,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.677.880.928,00	1.648.234.058,00	98,23	660.700.080,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	161.377.073,00	161.377.073,00	100,00	1.102.212.451,00
Jumlah	**24.642.236.887,00**	**23.797.538.257,00**	**96,57**	**33.605.479.353,00**

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp8.963.076.421,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp7.906.104.836,00 atau 88,20 persen dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5. 34 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jalan	3.187.876.696,00	2.501.197.430,00	78,45	18.448.248.613,18
Belanja Modal Jembatan	20.000.000,00	7.829.940,00	39,14	614.578.730,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	116.405.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	4.996.452.877,00	4.691.737.466,00	93,90	3.899.701.907,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	195.000.000,00	194.667.000,00	99,82	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	40.245.848,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	387.501.000,00	374.673.000,00	96,68	42.100.000,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	136.000.000,00	136.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**8.963.076.421,00**	**7.906.104.836,00**	**88,20**	**23.121.034.250,18**

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp323.285.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp322.905.000,00 atau 99,88 persen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 35 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	323.285.000,00	322.905.000,00	99,88	56.000.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**323.285.000,00**	**322.905.000,00**	**99,88**	**56.000.000,00**

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

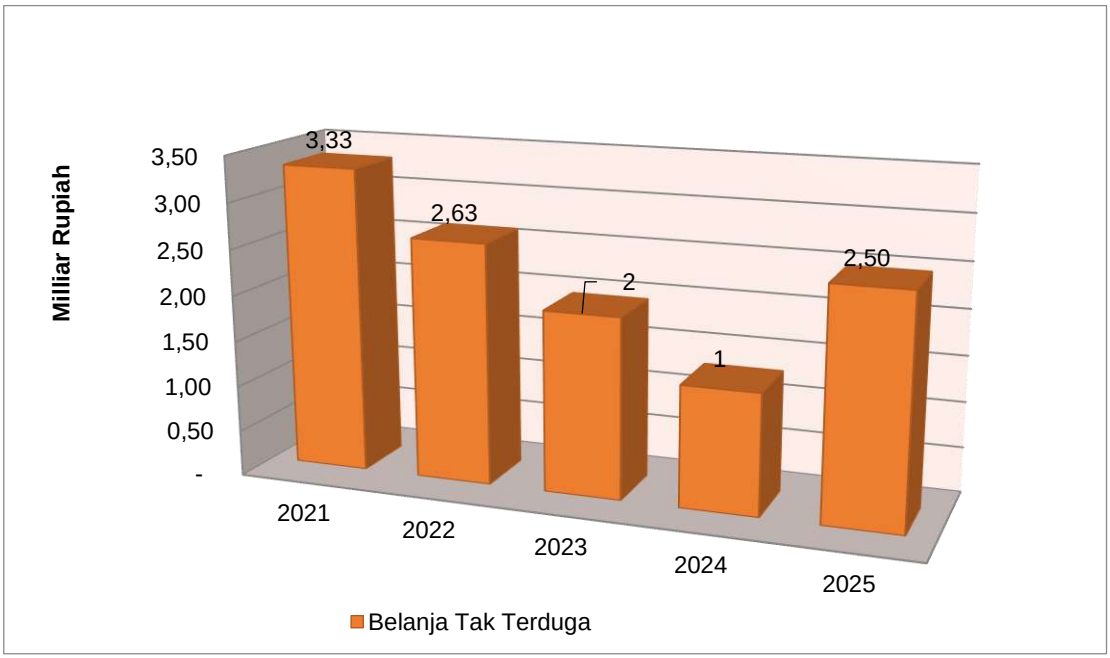
Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp40.000.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp40.000.000,00 atau 100,00 persen.

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Tak Terduga	2.499.579.085,00	1.330.046.402,00	1.169.532.683,00	87,93
Jumlah	**2.499.579.085,00**	**1.330.046.402,00**	1.169.532.683,00	**87,93**

Belanja Tak Terduga tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.499.579.085,00 atau 86,19 persen

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran yang sifatnya tidak biasa, dan untuk keperluan yang mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp2.900.000.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp2.499.579.085,00 atau 86,19 persen. Tren perkembangan realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Majene selama kurun 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 13 Tren Perkembangan Belanja Tak terduga Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Belanja Tak Terduga pada Tahun 2025 digunakan pada beberapa jenis pengeluaran mulai dari Pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Perbaikan Jalan Poros Limboro Paminggalang, Pembangunan Talud sungai Dusun Camba-Camba, Pembangunan Bronjong dan Normalisasi sungai, pembangunan talud, gerakan Pangan murah, darurat bencana hidrometerologi basah dan cuaca ekstrem dan beberapa kegiatan lainnya. Rincian Belanja Tak Terduga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 36 Belanja Tak Terduga

No.	Uraian	Dasar Penetapan	Nilai (Rp)	Kepemilikan Aset
A	**Belanja Tak Terduga untuk Penanggulangan Bencana**			
1.	Perbaikan Jalan Poros Limboro Paminggalan	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/147/III/ Tahun 2025	150.000.000,00	Milik Pemda
2.	Bantuan Alat Berat Pembersihan Longsor Jalan Poros Puttada	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/292/IV/ Tahun 2025	150.000.000,00	Milik Pemda
3.	Pembangunan Talud Sungai Dusun Camba-Camba	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/293/IV/ Tahun 2025	270.000.000,00	Milik Pemda
4.	Penanganan Bahu Jalan yang Berpotensi Amblas	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/294/IV/ Tahun 2025	41.575.000,00	Milik Pemda
5.	Pembangunan Bronjong dan Normalisasi Sungai	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/313/V/ Tahun 2025	296.364.000,00	Milik Pemda
6.	Pembangunan Talud Salabose	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/334/V/ Tahun 2025	150.000.000,00	Milik Pemda
7.	Bantuan Rehabilitasi Jembatan Kelurahan Galung	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/358/V/ Tahun 2025	200.000.000,00	Milik Pemda
8.	Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah dan Cuaca Ekstrem	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/920/XII/ Tahun 2025	50.000.000,00	Milik Pemda
9.	Perbaikan Tanggul Lingkungan Parappe Kel. Sirindu	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/752/X/ Tahun 2025	200.000.000,00	Milik Pemda

No.	Uraian	Dasar Penetapan	Nilai (Rp)	Kepemilikan Aset
10.	Perbaikan Tanggul Pada Dusun Karondongan	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/753/X/ Tahun 2025	250.000.000,00	Milik Pemda
11.	Bantuan Kegiatan dan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Kesehatan	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/404/VI/ Tahun 2025	530.000.000,00	Milik Pemda
B	**Belanja Tak Terduga untuk Kebutuhan Mendesak**			
1.	Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/403/VI/Tahun 2025	130.906.000,00	
2.	Gerakan Pangan Murah	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/573/VII/ Tahun 2025	30.000.000,00	
3.	Biaya Operasional Pengamanan Aksi Demonstrasi	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/803/X/ Tahun 2025	50.000.000,00	
4.	Pembayaran Kekeliruan Setoran Pajak	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/492/IV/ Tahun 2025	734.085,00	
Jumlah			**2.499.579.085,00**	

Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga untuk keperluan mendesak TA 2025 yang dianggarkan sebagai Belanja Tak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atas kementerian Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang merupakan wujud Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam Pembangunan dari Desa untuk Upaya Pemerataan Ekonomi maka diperlukan dukungan untuk menunjang Program Nasional tersebut menyediakan Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan percepatan pembetukan koperasi desa/Kelurahan merah putih dan digunakan untuk pemberian

Program pangan Murah termasuk bagian dari Belanja Tak Terduga karena adanya Perkembangan data harga Pangan strategis yang menunjukkan adanya kenaikan harga yang signifikan pada Komoditas beras,baik beras medium maupun beras premium dan bahan pangan lainnya keadaan ini berpotensi menjadi salah satu penyebab kenaikan inflasi dan ini merupakan kegiatan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang bertujuan memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan distribusi pangan merata dan menekan tingkat inflasi di Kabupaten Majene.

Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga untuk keperluan mendesak TA 2025 untuk membiayai Operasional Pengamanan Aksi Demonstrasi di Kabupaten Majene Tahun 2025, Hal ini membutuhkan pengamanan ekstra agar situasi Kabupaten Majene tetap Kondusif, jika tidak disiapkan sesegera mungkin berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Keamanan merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dipenuhi pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat.

Pembayaran Kekeliruan Setoran Pajak termasuk dari belanja Tak terduga untuk keperluan mendesak karena kewajiban atas kekeliruan setoran pajak merupakan hak pihak penyetor yang harus dipenuhi segera sesuai dengan ketentuan dan bersifat insidentil yang sifatnya tidak dapat diprediksi saat penyusunan APBD, tidak direncanakan, mendesak dan harus diselesaikan untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada Pihak terkait.

5.1.2.4. Transfer

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Transfer	102.737.016.814,00	103.764.358.365,00	(1.027.341.551,00)	(0,99)
Jumlah	**102.737.016.814,00**	**103.764.358.365,00**	**(1.027.341.551,00)**	**(0,99)**

Transfer Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp102.737.016.814,00 atau 93,82 persen

Belanja Transfer adalah pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendanai desentralisasi, termasuk DBH, DAU dan DAK yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah. Transfer pada Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan senilai Rp109.508.794.961,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 telah direalisasikan senilai Rp102.737.016.814,00 atau 93,81 persen yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 37 Belanja Transfer

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Transfer Bagi Hasil	**2.696.704.257,00**	**853.100.342,00**	**31,63**	0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	2.048.029.357,00	679.215.030,00	33,16	0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	648.674.900,00	173.885.312,00	26,80	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	**106.812.090.704,00**	**101.883.916.472,00**	**95,39**	**103.764.358.365,00**
Belanja bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (Dana Desa)	106.712.090.704,00	101.783.916.472,00	95,38	103.764.358.365,00
Jumlah	**109.508.794.961,00**	**102.737.016.814,00**	**93,81**	**103.764.358.365,00**

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Majene yang bersumber dari Dana Transfer Umum kepada Pemerintah Desa dan Dana Desa kepada seluruh desa lingkup Kabupaten Majene dapat dilihat lebih jelas pada **lampiran 1** dan **lampiran 2** dari catatan atas laporan keuangan ini.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dianggarkan senilai Rp2.048.029.357,00 namun realisasi pada tahun 2025 senilai Rp679.215.030,00 atau 33,16 persen. Sedangkan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa Rp648.674.900,00 namun realisasi pada tahun 2025 senilai Rp173.885.312,00 atau 26,80 persen. Nilai ini merupakan realisasi belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa bulan Januari sampai bulan Juni Tahun 2025. Sehingga masih tersisa enam bulan belanja bagi hasil yang belum dibayarkan pada Pemerintah Desa di Tahun 2025. Hal ini disebabkan adanya penurunan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

5.1.3. Pembiayaan

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp4.835.526.092,69 atau 100,00 persen.

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp4.835.496.696,69 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp4.835.526.092,69 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan. Terdapat selisih antara anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan senilai Rp29.396,00. Hal ini disebabkan karena adanya koreksi SiLPA BLUD tahun sebelumnya pada Puskesmas Totoli. Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai Rp3.535.606.734,71.

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp500.000.000,00 atau 100,00 persen

Pengeluaran Pembiayaan merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang dianggarkan senilai Rp500.000.000,00 dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp500.000.000,00 atau 100,00 persen.

5.1.3.3. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto adalah selisih antara Realisasi Penerimaan Pembiayaan senilai Rp4.335.526.092,69 dan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp500.000.000,00. Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2024 senilai Rp8.371.132.827,40 sedangkan Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 senilai Rp4.335.526.092,69. Rincian dan perhitungan Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 38 Perhitungan Pembiayaan Neto

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.835.496.696,69	4.835.526.092,69	100,00	8.371.132.827,40
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan	4.835.496.696,69	4.835.526.092,69	**100,00**	**8.371.132.827,40**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
Pembiayaan Netto	**4.335.496.696,69**	**4.335.526.092,69**	**100,00**	**8.371.132.827,40**

5.1.3.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	21.686.919.560,50	4.835.496.696,69	16.851.422.863,81	348,49
Jumlah	**21.686.919.560,50**	**4.835.496.696,69**	**16.851.422.863,81**	**348,49**

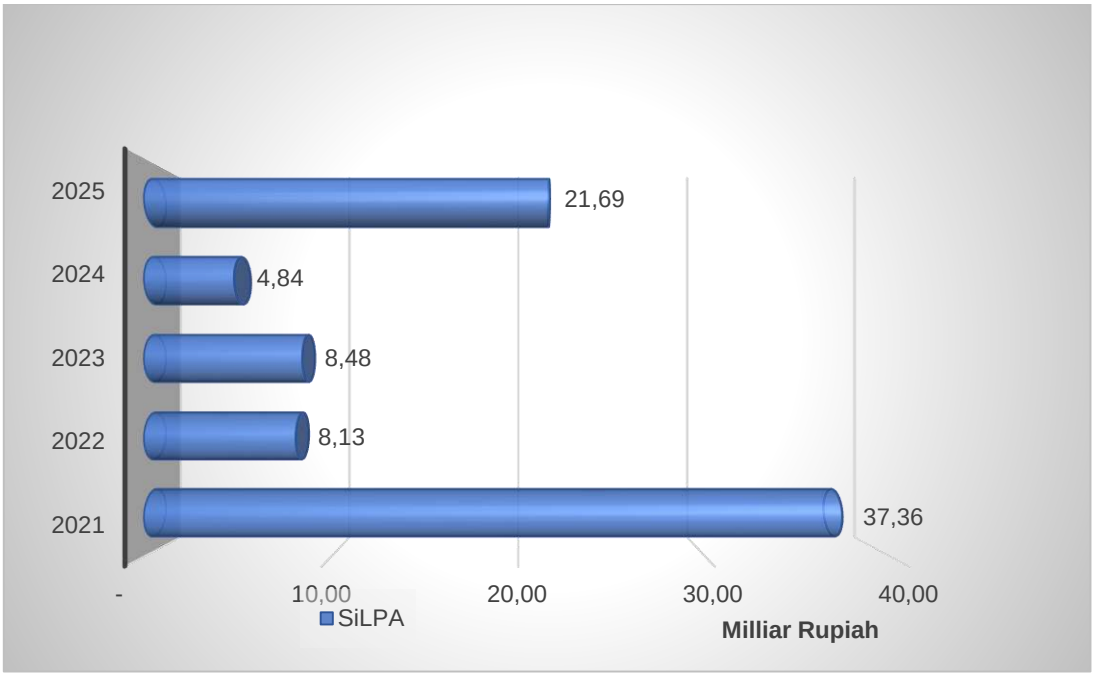
SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Meskipun keberadaan SiLPA masih bisa digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah, namun secara umum SiLPA dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengeluaran pemerintah karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD sekaligus terjadi Pembiayaan Neto positif, atau Pembiayaan Neto lebih besar dari defisit APBD. Dengan adanya surplus anggaran tahun sebelumnya yang menjadi SiLPA, maka defisit APBD di tahun berikutnya bisa tertutupi.

SiLPA pada Tahun 2025 terbentuk dari saldo kas di kas yang terdiri atas saldo kas pada rekening BNI senilai Rp11.709.536,00; saldo rekening BRI senilai Rp997.819,00; sisa kas di kas daerah (KASDA) senilai Rp95.287.219,18 yang terdiri atas senilai Rp31.687.219,18 dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan senilai Rp63.600.000,00 dari kelebihan pembayaran; Kas di RKUD (2779-2) senilai Rp72.887,22; dan Kas Dana Alokasi Umum Tambahan sebesar Rp15.891.308.000,00 untuk TPG dan TKG Gaji 13 dan 14; Saldo Kas di BLUD terdiri atas saldo pada BLUD RSUD senilai Rp3.249.948.356,00 dan saldo BLUD Puskesmas senilai Rp1.026.917.076,10. Selain itu, terdapat saldo kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas senilai Rp1.036.132.573,00; saldo kas Dana BOS senilai Rp374.521.000,00 dan Saldo Kas Lainnya senilai Rp25.094,00. serta terdapat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 39 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	**Kas di KASDA**	**15.999.375.461,40**
	1) BNI (No. Rekening 0183493358)	11.709.536,00
	2) BRI (No. Rekening 004701000225305)	997.819,00
	3) Rekening KASDA (No. Rekening 0720010000000011)	95.287.219,18
	4) RKUD (No. Rekening 0720010000027792)	72.887,22
	5) DAU Tambahan TPG dan TKG (No. Rekening 0720010000032249	15.891.308.000,00
B	**Kas di BLUD**	**4.276.865.432,10**
	1) BLUD RSUD	3.249.948.356,00
	2) BLUD Puskesmas	1.026.917.076,10
C	Kas BOK Puskesmas	1.036.132.573,00
D	Kas Dana BOS	374.521.000,00
E	Kas Lainnya	25.094,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		**21.686.919.560,50**

Berikut tren perkembangan SiLPA Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021 hingga 2025 disajikan dalam grafik.



Grafik 5. 14 Tren Perkembangan SiLPA Kabupaten Majene 2020-2025

SiLPA pada Tahun Anggaran 2025 tercatat senilai Rp21.686.919.560,50 di mana nilai tersebut mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya di Tahun 2024 senilai Rp4.835.496.696,69 atau sebesar 348,49 persen, berdasarkan data yang ditunjukkan pada grafik di atas dapat dilihat bahwa SiLPA pada Tahun 2021 merupakan SiLPA tertinggi yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam lima tahun terakhir yaitu Rp37.362.520.716,94.

Tingginya SiLPA pada periode tersebut disebabkan karena terdapat penerimaan kas yang merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana yang diterima menjelang akhir periode pelaporan di tahun tersebut. Kondisi ini menyebabkan pendapatan tersebut tidak dapat langsung digunakan di tahun berjalan sehingga menjadi SiLPA di akhir tahun. Tahun 2022 SiLPA tercatat senilai Rp8.126.059.660,36 atau mengalami penurunan drastis 78,25 persen atau senilai Rp29.236.461.056,58. Selanjutnya pada Tahun 2023 mencatat SiLPA senilai Rp8.475.746.848,64 atau mengalami kenaikan 4,30 persen atau senilai Rp349.687.188,28. Pada Tahun 2024 SiLPA tercatat senilai Rp4.835.496.696,69 kembali terjadi penurunan SiLPA senilai Rp3.640.250.151,95 atau sekitar 42,95 persen.

Tahun 2025 mencatat SiLPA tertinggi kedua pada kurun waktu lima tahun dan mengalami kenaikan senilai Rp16.851.422.863,81 atau 348,49 persen. SiLPA Tahun Berkenaan senilai Rp21.686.919.560,50 adalah hasil dari penjumlahan antara Surplus/Defisit Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp17.351.393.467,81 dengan Pembiayaan Neto senilai Rp4.335.526.092,69. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5. 40 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan	906.226.956.217,00	881.015.994.509,59	97,21	900.775.879.182,07
Belanja dan Transfer	910.562.452.913,69	863.664.601.041,78	94,84	904.311.515.312,78
Surplus/(Defisit)	**(4.335.496.696,69)**	**17.351.393.467,81**	**(400,21)**	**(3.535.636.130,71)**
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	4.835.496.696,69	4.835.526.092,69	100,00	8.371.132.827,40
Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	500.000.000,00	100.00	0.00
Pembiayaan Neto	**4.335.496.696,69**	**4.335.526.092,69**	100,00	**8.371.132.827,40**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	**0,00**	**21.686.919.560,50**	**0.00**	**4.835.496.696,69**

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasi

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Entitas yang menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih awalnya hanya ditujukan pada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Sejalan dengan pemberlakuan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Laporan Perubahan SAL yang sebelumnya hanya dibuat oleh PPKD sebagai konsolidator LKPD, saat ini juga harus dibuat oleh entitas Badan Layanan Umum Daerah. Berikut kami uraikan pos-pos akun yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025.

SAL identik dengan aset kas yang berasal dari perhitungan realisasi pendapatan-LRA, belanja serta pembiayaan yang menghasilkan SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran. SAL bukan dihasilkan dari LAK, karena di dalam LAK juga mencantumkan transaksi transitoris, di mana transaksi transitoris bukan merupakan transaksi realisasi anggaran. SAL merupakan bagian dari ekuitas, karena di dalam suatu ekuitas juga terdapat aset kas.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir per 31 Desember 2025 direalisasikan senilai Rp21.686.919.560,50. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp16.851.422.863,81 atau 348,49 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2024 dimana Saldo Anggaran Lebih

Akhir tercatat senilai Rp4.835.496.696,69. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2025 dapat dilihat dengan rincian mutasi sebagaimana dalam laporan berikut ini.

Tabel 5. 41 Laporan Perubahan Saldo Anggaran

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	4.835.496.696,69	8.475.746.848,64
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	4.835.526.092,69	8.371.132.827,40
3.	**Sub Total**	**(29.396,00)**	**104.614.021,24**
4.	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)	21.686.919.560,50	4.835.496.696,69
5.	**Sub Total**	**21.686.890.164,50**	**4.940.110.717,93**
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	29.396,00	(104.614.021,24)
7.	Lain–Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		**21.686.919.560,50**	**4.835.496.696,69**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal senilai Rp4.835.496.696,69 merupakan SiLPA tahun 2024 berdasarkan hasil audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Majene TA 2024. Saldo SiLPA tersebut digunakan sebagai penerimaan pembiayaan pada periode APBD Perubahan TA 2025. Sedangkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir adalah saldo akhir yang dimiliki pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai SiLPA pada periode anggaran berikutnya. Tercatat Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 senilai Rp21.686.919.560,50.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Saldo Anggaran Lebih Awal	4.835.496.696,69	8.475.746.848,64	(3.640.250.151,95)	(42,95)
Jumlah	**4.835.496.696,69**	**8.475.746.848,64**	**(3.640.250.151,95)**	**(42,95)**

SAL Awal Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp4.835.496.696,69 atau turun sebesar 42,95 persen dari SAL Awal tahun 2024 sebesar Rp8.475.746.848,64

Saldo Anggaran Lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp4.835.496.696,69 atau turun 42,95 persen dari SAL Awal Tahun 2024 senilai Rp8.475.746.848,64. SAL awal Tahun 2025 merupakan SAL Akhir Tahun 2024 atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	4.835.526.092,69	8.371.132.827,40	(3.535.606.734,71)	(42,24)
Jumlah	**4.835.526.092,69**	**8.371.132.827,40**	**(3.535.606.734,71)**	**(42,24)**

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun berjalan. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp4.835.526.092,69 atau turun sekitar 42,24 persen dari penggunaan SAL Awal Tahun 2024 senilai Rp8.371.132.827,40.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
SiLPA/SIKPA	21.686.919.560,50	4.835.496.696,69	16.851.422.863,81	348,49
Jumlah	**21.686.919.560,50**	**4.835.496.696,69**	**16.851.422.863,81**	**348,49**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan tabel di atas per 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Majene mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp21.686.919.560,50. Saldo SiLPA tersebut mengalami kenaikan senilai Rp16.851.422.863,81 atau 348,49 persen dari Tahun 2024 senilai Rp4.835.496.696,69.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	29.396,00	(104.614.021,24)	104.643.417,24	100,03
Jumlah	**29.396,00**	**(104.614.021,24)**	**104.643.417,24**	**100,03**

Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 terdapat koreksi sebesar Rp29.396,00 atau naik sekitar 100,03 persen dari tahun sebelumnya yang menyebabkan perubahan pada Laporan LP-SAL

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan pos yang menjelaskan koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang memengaruhi posisi kas. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmetika, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 mencatat koreksi SiLPA atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang menyebabkan perubahan pada akun kas. Transaksi ini terjadi pada Puskesmas Totoli. Berdasarkan PSAP 10 dinyatakan bahwa koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Untuk lebih jelasnya koreksi yang dilakukan atas kesalahan pembukuan di tahun sebelumnya yang memengaruhi Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 42 Rincian Koreksi Saldo Kas atas Kesalahan Pembukuan di Tahun Sebelumnya

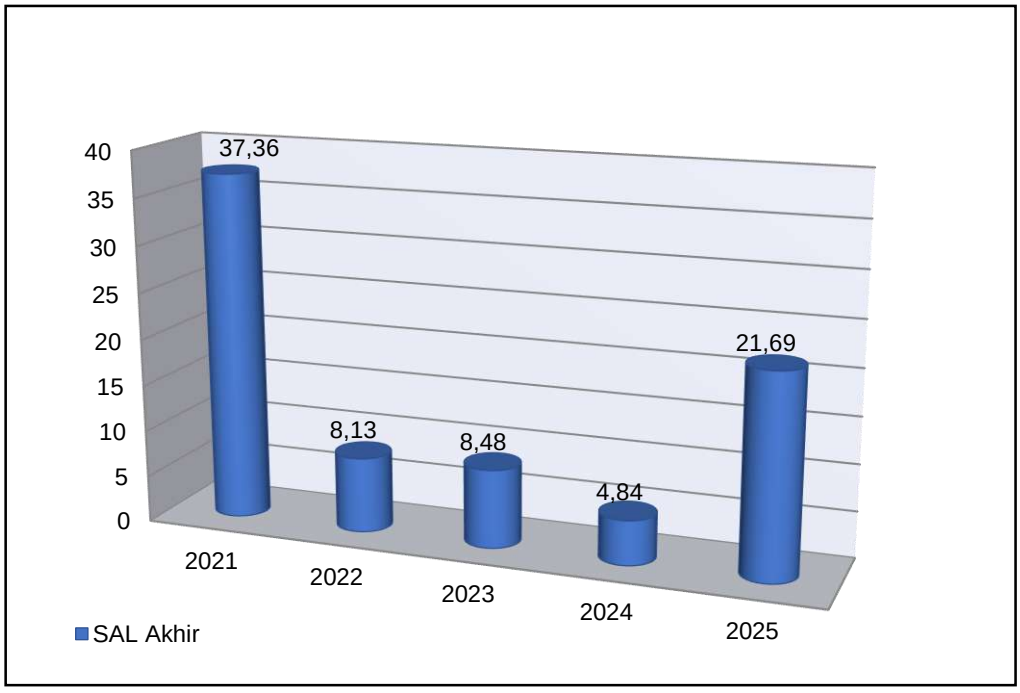
No.	Nama SKPD/Unit Kerja	Nilai Koreksi (Rp)	Keterangan
1.	Puskesmas Totoli	29.396,00	Koreksi kas atas utang pfk pada puskesmas totoli
JUMLAH		**29.396,00**	

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran	21.686.919.560,50	4.835.496.696,69	16.851.422.863,81	348,49
Jumlah	**21.686.919.560,50**	**4.835.496.696,69**	**16.851.422.863,81**	**348,49**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir adalah saldo akhir kas yang dimiliki pemerintah daerah pada saat tutup buku di akhir periode pelaporan. Tercatat sampai dengan 31 Desember 2025 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp21.686.919.560,50. Saldo tersebut tercatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan yang akan dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai penerimaan pembiayaan di tahun anggaran 2026.

Pada grafik di bawah ini disajikan tren Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene kurun 2021-2025 (dalam miliar rupiah).



Grafik 5. 15 Tren Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

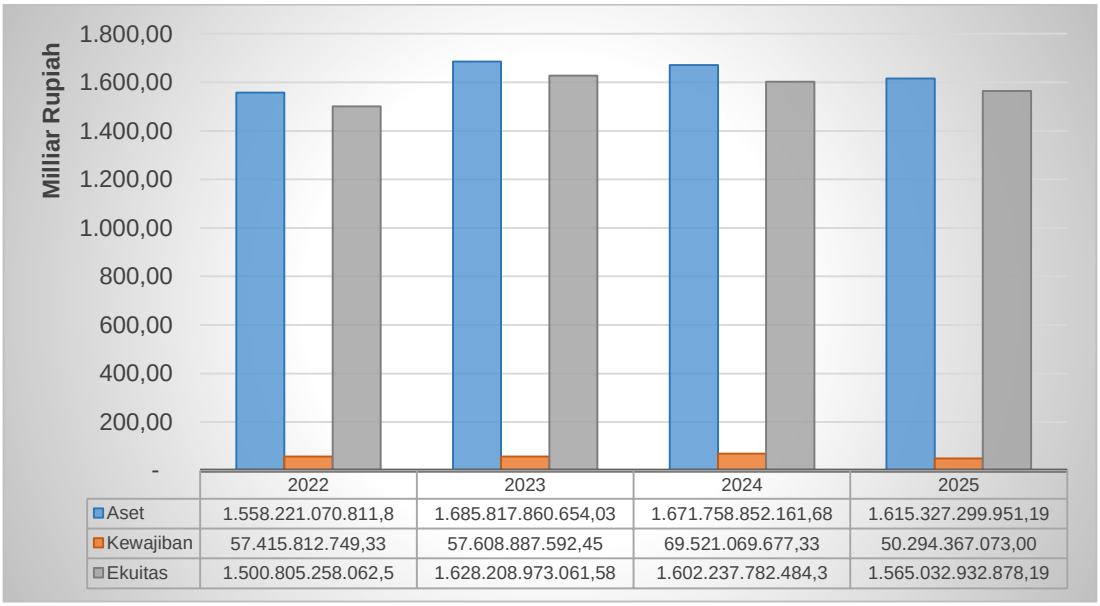
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca merupakan salah satu komponen dari laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah sebagai entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 43 Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2025 dan 2024

Posisi Neraca	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Aset Lancar	51.150.313.248,78	44.471.142.447,85
Investasi Jangka Panjang	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67
Aset Tetap	1.475.883.616.947,45	1.547.906.920.646,29
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya	10.021.848.510,86	10.595.796.785,87
Properti Investasi	10.815.873.221,00	**0,00**
Jumlah Aset	**1.615.327.299.951,19**	**1.671.758.852.161,68**
Kewajiban Jangka Pendek	50.294.367.073,00	69.521.069.677,33
Kewajiban Jangka Panjang	00,00	00,00
Jumlah Kewajiban	**50.294.367.073,00**	**69.521.069.677,33**
Ekuitas	1.565.032.932.878,19	1.602.237.782.484,35
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**1.615.327.299.951,19**	**1.671.758.852.161,68**

Perkembangan nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene selama empat tahun terakhir disajikan pada grafik di bawah ini.



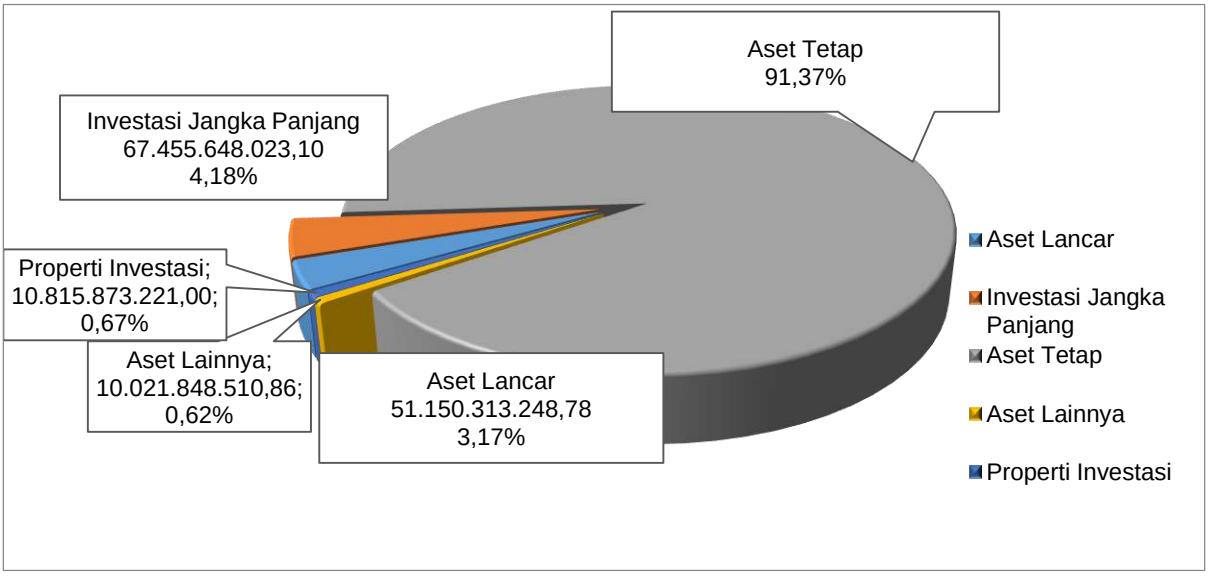
	2022	2023	2024	2025
Aset	1.558.221.070.811,8	1.685.817.860.654,03	1.671.758.852.161,68	1.615.327.299.951,19
Kewajiban	57.415.812.749,33	57.608.887.592,45	69.521.069.677,33	50.294.367.073,00
Ekuitas	1.500.805.258.062,5	1.628.208.973.061,58	1.602.237.782.484,3	1.565.032.932.878,19

Grafik 5. 16 Perkembangan Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Tahun 2021-2025

5.3.1. ASET

Aset pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan dapat diukur dalam satuan uang. Aset juga dapat diartikan sebagai sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Berikut komposisi Aset Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025.



Grafik 5. 17 Komposisi Aset Kabupaten Majene Tahun 2025

5.3.1.1. Aset Lancar

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Lancar	51.150.313.248,78	44.471.142.447,85	6.679.170.800,93	15,02
Jumlah	**51.150.313.248,78**	**44.471.142.447,85**	**6.679.170.800,93**	**15,02**

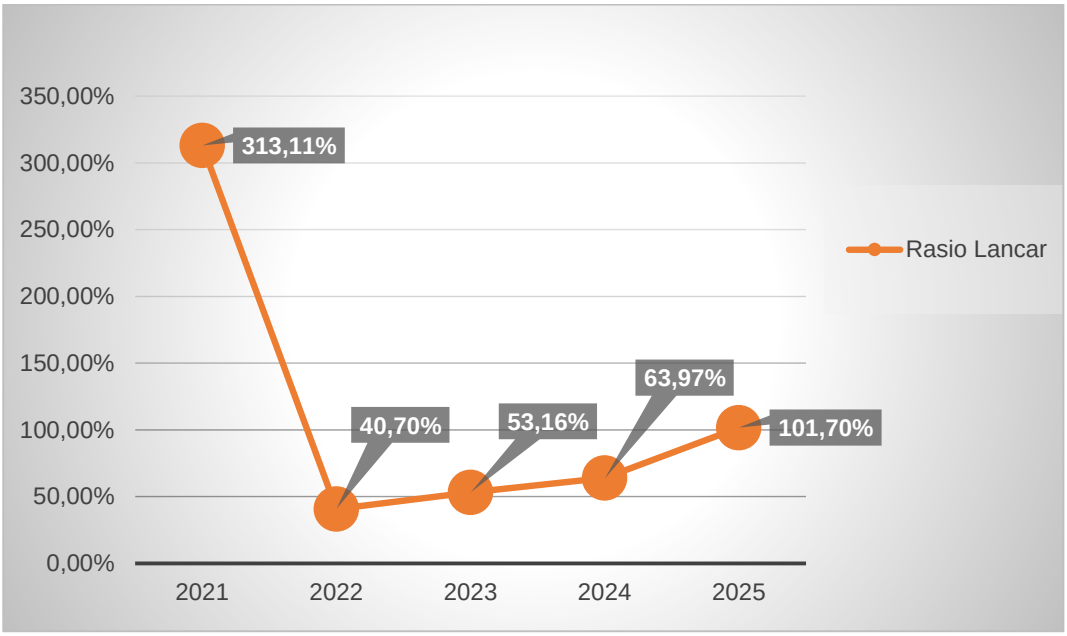
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
b. Berupa kas dan setara kas;
c. Semua aset selain yang termasuk dalam a dan b, diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer bagi hasil daerah, piutang pendapatan lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor dan barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Aset lancar merupakan indikator likuiditas Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang menyebabkan beban atas pengeluaran APBD. Berikut ini kami uraikan analisis rasio likuiditas Pemerintah Daerah dengan pendekatan rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*).

a. Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau untuk melihat kemampuan pemerintah untuk mendanai kebutuhan. Walaupun Pemerintah Daerah sudah menyusun anggaran kas. Tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas. Analisis likuiditas dapat dilihat dari rasio lancar. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi. Rasio lancar menggambarkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi utangnya. Rasio ini membandingkan antara aset lancar dengan utang lancar. Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 tahun terakhir berdasarkan perkembangan aset lancar dan kewajiban jangka pendek sebagai utang lancar, rasio tersebut dapat dilihat grafik berikut.

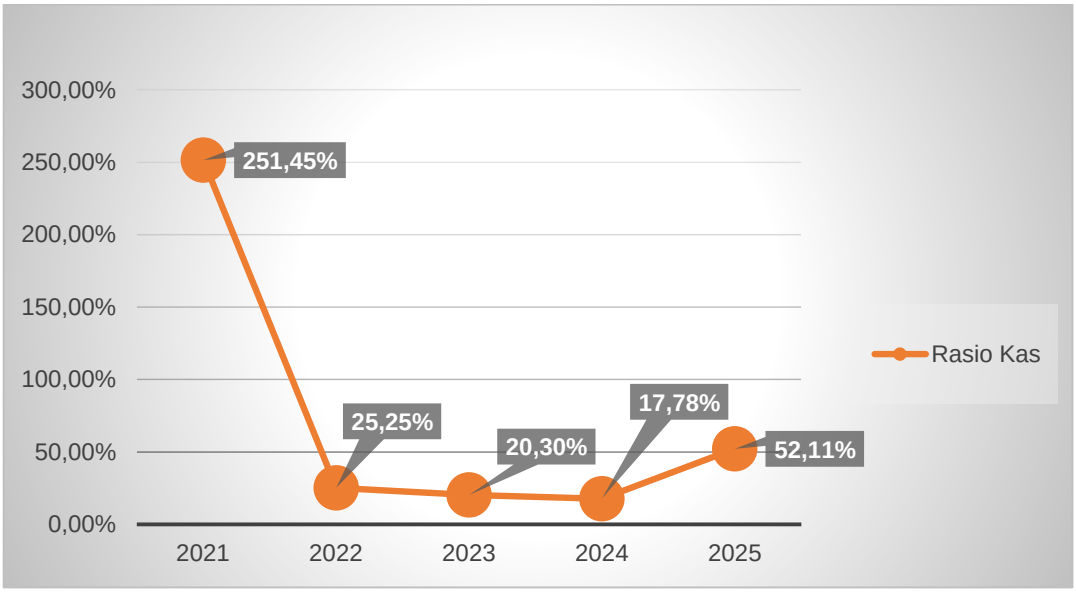


Grafik 5. 18 Perkembangan Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 berada pada 101,70 persen. Rasio ini mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 di mana hanya 63,97 persen.

b. Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) merupakan penjelasan lebih lanjut dari Rasio Lancar (*Current Ratio*). Penghitungan Rasio Cepat hanya menggunakan aset yang paling likuid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Persediaan tidak termasuk dalam kelompok aset lancar yang diperbandingkan dengan kewajiban lancar dikarenakan tidak dapat ditukar dengan kas. Rasio Cepat menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya dengan perhitungan yang lebih ketat. Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 Tahun terakhir berdasarkan perbandingan antara perkembangan aset lancar dikurang persediaan dan perkembangan kewajiban jangka pendek sebagai utang lancar dapat dilihat grafik berikut.



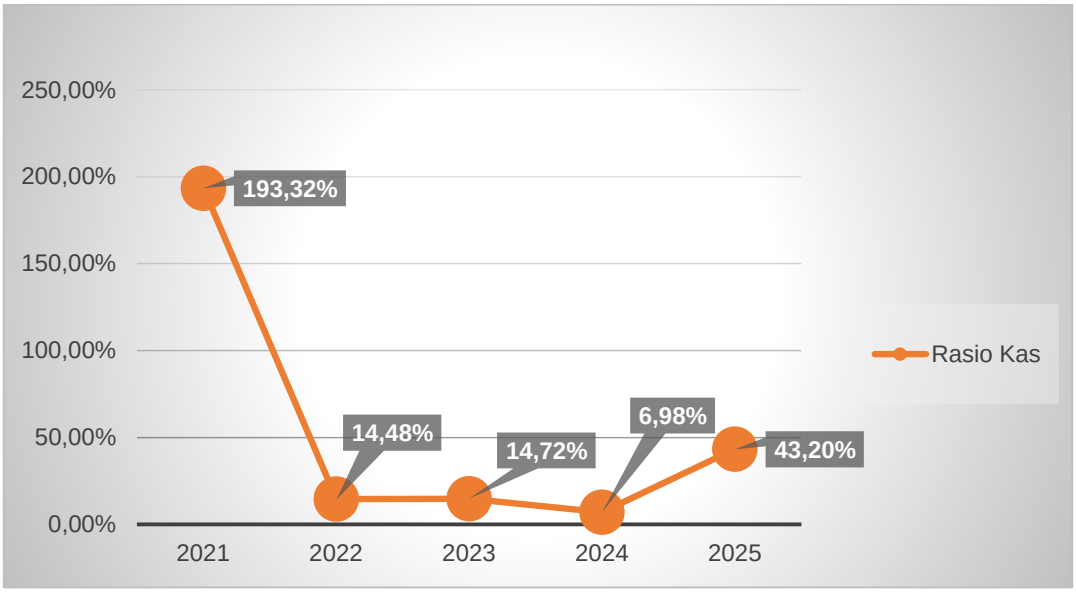
Grafik 5. 19 Perkembangan Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Berdasarkan grafik tersebut di atas terlihat bahwa Rasio Cepat (*Quick Ratio*) pada Tahun Anggaran 2025 berada pada 52,11 persen. Sebagaimana pada analisis Rasio Lancar, analisis Rasio Cepat juga menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Majene untuk dapat menyelesaikan kewajiban dengan aset lancar yang dimiliki dan dapat secara cepat dikonversi menjadi kas tergolong sangat rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan analisis Rasio Cepat, maka perhitungan kemampuan penyelesaian kewajiban oleh Pemerintah Kabupaten Majene cenderung meningkat daripada Tahun 2022 sampai 2025.

Berdasarkan data pada grafik juga dapat disimpulkan bahwa Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2021. Sebelumnya pada pendekatan Rasio Lancar (*Current Ratio*) juga menunjukkan rasio likuiditas tertinggi terjadi pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perhitungan Rasio Likuiditas melalui pendekatan rasio cepat yang lebih ketat. Likuiditas tertinggi tetap tercatat di Tahun 2021.

c. Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio Kas (*Cash Ratio*) adalah cara menghitung likuiditas Pemerintah Daerah yang melibatkan posisi saldo kas Pemerintah Daerah. Penghitungan Rasio Kas hanya menggunakan kas sebagai acuan untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Piutang pendapatan dan persediaan tidak termasuk dalam kelompok aset lancar yang diperbandingkan dengan kewajiban lancar dikarenakan sulit ditukar dengan kas. Rasio Kas menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya dengan perhitungan yang paling realistis dan efisien. Rasio Kas (*Cash Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 tahun terakhir berdasarkan perbandingan antara perkembangan aset lancar berupa kas dan setara kas dan perkembangan kewajiban jangka pendek sebagai utang lancar dapat dilihat grafik berikut.



Grafik 5. 20 Perkembangan Rasio Kas (*Cash Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan rincian yang diuraikan berikut ini.

5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas dan Setara Kas	21.727.604.509,50	4.849.337.935,69	16.878.266.573,81	348,05
Jumlah	**21.727.604.509,50**	**4.849.337.935,69**	**16.878.266.573,81**	**348,05**

Kas dan setara kas adalah uang tunai di tangan Bendahara Penerimaan dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Tidak termasuk Kas adalah Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pajak pemerintah pusat seperti PPN dan PPh Pasal 21, 22, 23, dan Pasal 4 ayat (2), iuran Tapera, dan iuran wajib pegawai lainnya yang harus disetorkan ke kas negara atau pihak lainnya yang berhak (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek).

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab BUD/Kuasa BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, kas di BLUD, dan kas lainnya. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD/Kuasa BUD terdiri dari:

a. Saldo akun kas daerah, yaitu saldo akun-akun pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan

b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

5.3.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas di Kas Daerah	15.999.375.461,40	51.385.522,63	15.947.989.938,77	31.035,96
Jumlah	**15.999.375.461,40**	**51.385.522,63**	**15.947.989.938,77**	**31.035,96**

Saldo Kas di Kas Daerah (Kasda) adalah saldo kas yang terdapat pada Rekening Umum Kas Daerah sesuai dengan Buku Kas Umum Kasda dan rekening koran per 31 Desember 2025 senilai Rp15.935.775.461,40 Terdapat selisih senilai Rp63.600.000,00. Hal ini disebabkan adanya SP2D yang *double* cair dan lebih bayar oleh pihak bank Sulselbar pada tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 44 Selisih Kas di Kas Daerah

No.	SKPD	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Kecamatan Banggae	LS- Belanja Jasa Tenaga Babinsa dan Babinkantibnas, bulan Oktober - November Tahun 2025, Dengan SK NO. 100.3.3.2/350/V/2025, dan No SPD. 800/8146/LP-SPD/BKAD/2025, Sumber Dana DBH Pusat	400.000,00	*Double* Cair
2.	Sekretariat Daerah	Belanja LS Biaya Jasa Tenaga Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sesuai BAPP No. 26/BAPP/HK/XII/2025 dan SPD No. 800/7986/LP-SPD/BKAD/2025. Bulan Oktober s.d November 2025. PAD.	1.500.000,00	*Double* Cair
3.	Inspektorat Daerah	LS Jasa Tenaga Administrasi Sub. Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (DBH PROV) Bulan Oktober-November 2025 Sesuai SK No : 100.3.3.2/886/XI/2025 & SPD No : 800/8079/LP-SPD/BKAD/2025 Inspektorat Kabupaten Majene TA 2025	7.700.000,00	*Double* Cair
4.	Dinas Perkimtan	Pemb Ganti Rugi Pengadaan Tanah Sekolah MAN IC Kalasa' Kab Majene Pemby Tahap I Terletak di Lingk Kalasa' Luas Tanah Kurang Lebih 16.410 M2 Sesuai SPD No:800/7889/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl 22/12/2025 & BAKH No:B-900.1.3.6/1083/XII/2025 Tgl 22/12/2025 (DAU UMUM) **senilai 539.076.782,00** **Namun yang cair senilai Rp593.076.782,00**	54.000.000,00	Lebih bayar
Jumlah			**63.600.000,00**	

Atas selisih kas berdasarkan tabel di atas bahwa pada Kecamatan Banggae terjadi *double* cair senilai Rp400.000,00 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 12 Februari 2026, pada Sekretariat Daerah terjadi *double* cair senilai Rp1.500.000,00 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 06 Januari 2026; pada Inspektorat Daerah terjadi *double* cair senilai Rp7.700.000,00 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 12 Februari 2026 dan pada Dinas Perkimtan terjadi lebih cair senilai Rp54.000.000,00. Atas selisih kas tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 02 Januari 2026.

Saldo Tahun 2025 senilai Rp15.999.375.461,40 mengalami kenaikan dibandingkan saldo Kas di Kasda tahun sebelumnya senilai Rp51.385.522,63. Rincian saldo kas di Kasda pada rekening giro Kasda adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 45 Saldo Kas di Kas Daerah di Rekening Giro Kasda

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Pemilik	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
1.	Bank Sulselbar Cab. Majene	072-001-0001-1	Rek. Kas Umum Daerah – PAD/lain-lain pendapatan	31.687.219,18
2.	Bank Sulselbar Cab. Majene	072-001-2779-2	Rek. Kas Umum Daerah – DAU/DBH	72.887,22
3.	Bank Sulselbar Cab. Majene	072-001-3224-9	Rek. Kas Umum Daerah – DAK	15.891.308.000,00
4.	BRI Cabang Majene	0047-01-0225-30-5	Bupati Majene	997.819,00
5.	BNI Cabang Majene	18349335-8	Pemda Kabupaten Majene	11.709.536,00
Jumlah				**15.935.775.461,40**

Atas penggunaan rekening tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Bank Sulselbar Cabang Majene 072-001-0001-1 digunakan untuk melakukan transaksi penerimaan maupun pengeluaran. Untuk transaksi yang sifatnya penerimaan daerah, rekening ini digunakan untuk menerima dan menyimpan sumber-sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah, dana bagi hasil provinsi, pemindahbukuan realisasi PBB dari rekening BRI, jasa giro dan deposito, adapun untuk transaksi yang sifatnya pengeluaran daerah rekening tersebut diperuntukkan untuk melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa, serta pengeluaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD baik melalui mekanisme uang persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan maupun pembayaran langsung;

2) Bank Sulselbar Cabang Majene 072-001-2779-2 digunakan untuk menyelenggarakan transaksi atas penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan yang meliputi transfer atas Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus. Adapun transaksi pengeluaran pada rekening ini digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran untuk pembiayaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikerjasamakan ke pihak ketiga, serta penyaluran belanja transfer Alokasi Dana Desa kepada Desa, pembayaran hibah kepada partai politik, dan Pembayaran gaji ASN;

3) Bank Sulselbar Cabang Majene 072-001-3224-9 digunakan untuk menyimpan dan menyalurkan pembayaran atas pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dari Pemerintah Pusat khusus pada kelompok Dana Alokasi Khusus. Rekening ini digunakan dengan tujuan untuk memisahkan dana transfer yang sifat dan peruntukannya secara khusus telah diatur. Hal ini bertujuan untuk kepentingan kemudahan rekonsiliasi dan laporan penyerapan yang secara berkala harus dilaporkan ke Pemerintah Pusat;

4) BRI Cabang Majene 0047-01-0225-30-5 digunakan untuk menampung penerimaan jasa giro serta pendapatan atas deposito Pemerintah Daerah di BRI. Rekening ini tidak melakukan transaksi penerimaan dari sumber pendapatan daerah. Aktivitas yang dilakukan kebanyakan hanya berupa pemindahbukuan pasca pendapatan atas deposito maupun jasa giro tersebut; dan

5) BNI Cabang Majene 18349335-8 digunakan untuk menampung dana yang akan didepositokan, sehingga Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bunga dari deposito tersebut untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

5.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 tercatat nihil.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang bersumber dari pungutan maupun setoran atas pendapatan daerah yang per 31 Desember 2025 belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Kas Daerah senilai Rp0,00. Nilai ini sama dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.3.1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 tercatat nihil.

Nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00. Terdapat saldo pada rekening bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025, yang merupakan transaksi Tahun 2025 yang ditarik pada tanggal 2 Januari 2026. Berikut daftar saldo pada rekening bank bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2025.

Tabel 5. 46 Daftar Saldo Rekening

No	Uraian	No. Rekening	Saldo Bank
1.	Dinas Kesehatan	0720020000000042	113.000.000,00
2.	Badan Penanggulan Bencana Daerah	0720020000121737	50.000.000,00
3.	Kelurahan Baruga	0720020000077665	1.250,00
JUMLAH			**163.001.250,00**

5.3.1.1.1.4. Kas di BLUD

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas di BLUD	4.276.865.432,10	4.769.301.860,10	(492.436.428,00)	(10,33)
Jumlah	**4.276.865.432,10**	**4.769.301.860,10**	**(492.436.428,00)**	**(10,33)**

Saldo Kas di Bendahara BLUD merupakan saldo kas di Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Diketahui bahwa terdapat saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 senilai Rp4.276.865.432,10. Jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya senilai Rp4.769.301.860,10, terjadi penurunan senilai Rp492.436.428,00 atau 10,33 persen. Laporan Keuangan BLUD RSUD dan 12 BLUD Puskesmas di Kabupaten Majene telah melalui proses audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, laporan tersebut terbit pada bulan April 2026. Rincian saldo Kas di Bendahara BLUD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 47 Kas di Bendahara BLUD

No	Uraian	Nama Bank	No. Rekening	Saldo Tunai	Saldo Bank	Total
1.	RSUD	BANK SULSELBAR	720020000169390	736.630,00	3.249.211.726,00	3.249.948.356,00
2.	Puskesmas Banggae I	BNI	339834578	0,00	83.099.316,00	83.099.316,00
3.	Puskesmas Banggae II	BNI	339840037	0,00	20.699.357,00	20.699.357,00
4.	Puskesmas Totoli	BNI	339867945	0,00	66.393.097,00	66.393.097,00
5.	Puskesmas Lembang	BNI	339989544	0,00	144.916.309,00	144.916.309,00
6.	Puskesmas Pamboang	BNI	287544704	0,00	153.383.452,00	153.383.452,00
7.	Puskesmas Sendana I	BRI	4701001077307	0,00	343.590.317,00	343.590.317,00
8.	Puskesmas Tammerodo	BRI	4701001078303	0,00	66.869.597,20	66.869.597,20
9.	Puskesmas Sendana II	BRI	4701001080300	0,00	140.771.805,00	140.771.805,00
10.	Puskesmas Salutambung	BRI	4701001081306	0,00	2.032.239,00	2.032.239,00
11.	Puskesmas Ulumanda	BRI	4701001076301	0,00	68.416,90	68.416,90
12.	Puskesmas Malunda	BRI	4701001079309	0,00	5.093.170,00	5.093.170,00
JUMLAH					**4.276.128.802,10**	**4.276.865.432,10**

PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa Kas dan Setara Kas pada Neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Dalam rangka perhitungan saldo Kas dengan catatan SAL pada BLU. BLU harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLU yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum BLU sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLU dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN/APBD

5.3.1.1.1.5. Kas Dana BOSP

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas Dana BOSP	374.521.000,00	0,00	374.521.000,00	0,00
Jumlah	**374.521.000,00**	**0,00**	**374.521.000,00**	**0,00**

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 senilai Rp374.521.000,00 pada Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan lingkup Kabupaten Majene. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 bersaldo nihil, terjadi kenaikan senilai Rp374.521.000,00. Saldo ini adalah sisa belanja yang belum dipertanggungjawabkan dan pajak yang belum disetorkan per 31 Desember 2025. Berikut rincian saldo kas di bendahara BOS :

- Sisa Dana BOSP Kinerja senilai Rp13.190.000,00
- Sisa Dana BOP Kinerja senilai Rp75.000.000,00
- Sisa Dana BOP Reguler senilai Rp286.331.000,00

5.3.1.1.1.6. Kas Lainnya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas Lainnya	40.710.043,00	28.650.552,96	12.059.490,04	42,09
Jumlah	**40.710.043,00**	**28.650.552,96**	**12.059.490,04**	**42,09**

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp40.710.043,00, nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2024 yaitu senilai Rp28.650.552,96 atau 42,09 persen. Saldo kas lainnya tahun ini merupakan saldo pada rekening tabungan PPTK dan rekening sekolah yang belum tersetor ke kasda per 31 Desember 2025 dan Pajak yang telah dipungut oleh bendahara namun belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2025.

Tabel 5. 48 Daftar Rincian Kas Lainnya atas Pajak Belum Setor

No.	SKPD	Nama Rekening/Nasabah	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Pajak Belum Setor- Bendahara Pengeluaran	26.006.421,00
2.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pajak Belum Setor Dana BOSP	3.163.650,00
3.	Puskesmas Lembang	Pajak Belum Setor - Bendahara BLUD	1.813.245,00
4.	Puskesmas Totoli	Pajak Belum Setor - Bendahara BLUD	1.494.154,00
5.	Puskesmas Sendana I	Pajak Belum Setor - Bendahara BLUD	706.761,00
6.	Puskesmas Malunda	Pajak Belum Setor - Bendahara BLUD	7.361.161,00
Jumlah			**40.545.392,00**

Selain itu, terdapat Jasa Giro pada rekening PPTK dan rekening sekolah per 31 Desember 2025 yang belum disetor ke Kas Daerah. Berikut daftar rincian Jasa Giro pada rekening PPTK dan rekening sekolah per 31 Desember 2025.

Tabel 5. 49 Daftar Rincian Jasa Giro pada Rekening PPTK dan Sekolah

No.	SKPD	Nama Pemilik Rekening	No. Rekening	Saldo (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	PPTK Bagian Kesra Setda	072 202 000006439 5	25.094,00
2	Dinas Kesehatan	PPTK BID Pelayanan dan SDK	072-002-000018011-3	2.993,00
3	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	PPTK Diklat BKPSDM Kabupaten Majene	072 002 000018062 8	444,00
4.	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	PPTK Diklat BKPSDM Kabupaten Majene	072 002 000018062 8	30.150,00
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	072-002-000016994-2	452,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PPTK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Majene	072-002-000017000-2	5.289,00
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PPTK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Majene	082-002-000016997-7	13.493,00
8.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	PPTK Kegiatan DAK Nonfisik	072-002-000016991-8	2,00
9.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	PPTK Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	072-002-000018003-2	88,00
10.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	PPTK Bidang Pemuda Olahraga	072-002-000018000-8	2.578,00
11.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	Yayasan TK AL Mardiah Tg. Batu Barat	072-002-000018012-1	3.527,00
12.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	PKBM Ifra Naraya	072-002-000018016-4	22.444,00
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PPTK Bidang Perpustakaan	072-002-000018021-1	56.817,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPTK Bid. PHP PKA dan PUBA	072-002-000016987-0	1.264,00
15.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	PPTK Bidang Penyuluhan	072-002-000018013-0	16,00
Jumlah				**164.651,00**

5.3.1.1.1.7. Setara Kas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Setara Kas	00,00	00,00	00,00	00,00
Jumlah	**00,00**	**00,00**	**00,00**	**00,00**

PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas. Investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Deposito berjangka Pemerintah Kabupaten Majene selama Tahun 2025 terdiri dari:

a. Deposito Nomor B062937 senilai Rp5.000.000.000,00, dengan jangka waktu 1 bulan terhitung tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan 30 Juli 2025, dan telah dilakukan pencairan pada tanggal 30 Desember 2025;
b. Deposito Nomor B062939 senilai Rp5.000.000.000,00 dengan jangka 1 bulan terhitung tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan 30 Juli 2025, dan telah dilakukan pencairan tanggal 30 Desember 2025; dan

c. Deposito Nomor B062938 senilai Rp5.000.000.000,00 dengan jangka 1 bulan terhitung tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan 30 Juli 2025, dan telah dilakukan pencairan tanggal 30 Desember 2025.

Berdasarkan uraian di atas maka Setara Kas per 31 Desember 2025 adalah nihil.

5.3.1.1.1.8. Kas Dana BOK Puskesmas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas Dana BOK Puskesmas	1.036.132.573,00	00,00	1.036.132.573,00	00,00
Jumlah	**1.036.132.573,00**	**00,00**	**1.036.132.573,00**	**00,00**

Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas adalah Dana BOK yang diperuntukkan bagi Puskesmas sebagai pelaksana program kesehatan. Dana BOK Puskesmas merupakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang bersumber dari Transferan Pusat Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dikelola langsung oleh Puskesmas. Berdasarkan hal tersebut, TA 2023 BOK tersaji sebagai bagian dari Kas di BLUD dikarenakan perubahan struktur organisasi dari FKTP menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 1053/HK/KEP/BUP/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022.

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 senilai Rp1.036.132.573,00 pada masing-masing Bendahara BLUD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 50 Daftar Saldo Kas BOK Puskesmas Per 31 Desember 2025

NO	Uraian	NAMA PEMILIK REKENING	REKENING BANK		SALDO PER 31 DES 2025	KREDIT SISTEM JASA GIRO	SALDO BOK
1	Puskesmas Banggae I	76050200001 BOK PKM BANGGAEI	BNI	1590076524	29.111.023,00	64.212,00	29.046.811,00
2	Puskesmas Banggae II	76050200003 BOK PKM BANGGAEII	BNI	1590076477	119.008.506,00	100.111,00	118.908.395,00
3	Puskesmas Totoli	76050200002 BOK PKM TOTOLI	BNI	1590076499	199.659.424,00	262.836,00	199.396.588,00
4	Puskesmas Lembang	76050200004 BOK PKM LEMBANG	BNI	1590076513	34.950.502,00	41.776,00	34.908.726,00
5	Puskesmas Pamboang	76050200005 BOK PKM PAMBOANG	BNI	1590076568	113.964.067,00	240.207,00	113.723.860,00
6	Puskesmas Sendana I	76050200006 BOK PKM SENDANAI	BNI	1590076557	97.718.736,00	218.238,00	97.500.498,00
7	Puskesmas Tammerodo	76050200008 BOK PKM TAMMERODDO	BNI	1590076535	80.978.038,09	137.956,09	80.840.082,00
8	Puskesmas Sendana II	76050200007 BOK PKM SENDANAII	BNI	1590076502	76.793.588,00	69.430,00	76.724.158,00
9	Puskesmas Salutambung	76050200011 BOK PKM SALUTAMBUNG	BNI	1590076466	77.469.723,00	103.768,00	77.365.955,00
10	Puskesmas Ulumanda	76050200010 BOK PKM ULUMANDA	BNI	1590076488	81.480.671,00	169.671,00	81.311.000,00

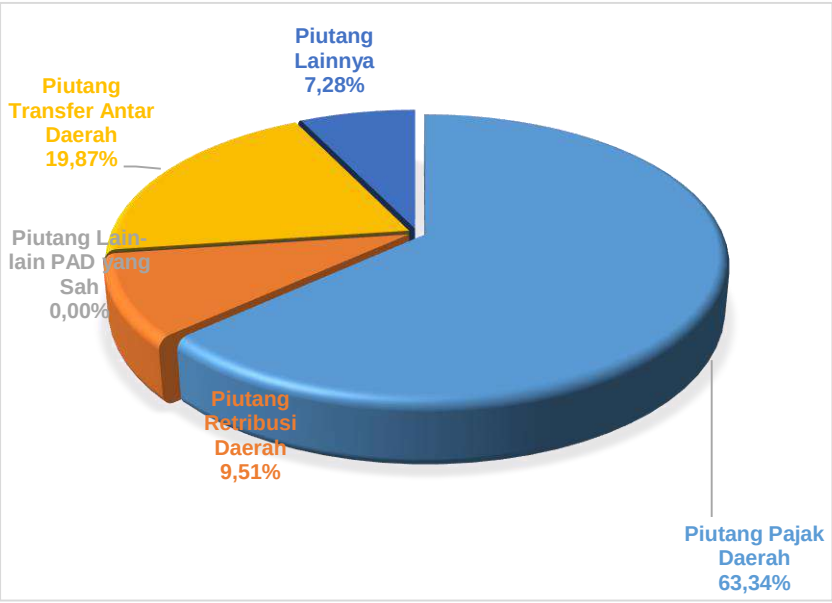
NO	Uraian	NAMA PEMILIK REKENING	REKENING BANK		SALDO PER 31 DES 2025	KREDIT SISTEM JASA GIRO	SALDO BOK
11	Puskesmas Malunda	76050200009 BOK PKM MALUNDA	BNI	1590076546	126.619.658,00	213.158,00	126.406.500,00
JUMLAH					**1.037.753.936,09**	**1.621.363,09**	**1.036.132.573,00**

Berdasarkan Surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), TBK Nomor: INS1/6/3, Tanggal 2 Januari 2026 yang menyatakan bahwa transaksi pada Tanggal 29 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 bukan merupakan transaksi Jasa Giro yang diproses, posisi saldo Giro BOK Puskesmas pada Tanggal 31 Desember 2025 adalah *Ending Balance* (Posisi saldo Giro) per 31 Desember 2025 dikurangi dengan transaksi kredit sistem yang masuk ke rekening Giro BOK Puskesmas pada tanggal 31 Desember 2025.

5.3.1.1.2. PIUTANG

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Piutang	4.374.161.694,40	7.408.588.830,94	(3.034.427.136,54)	(40,96)
Jumlah	**4.374.161.694,40**	**7.408.588.830,94**	**(3.034.427.136,54)**	**(40,96)**

Piutang daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Timbulnya piutang karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih. Piutang Tahun 2025 senilai Rp4.374.161.694,40 merupakan piutang neto atas piutang pendapatan senilai Rp12.007.134.256,44 dan penyisihan piutang senilai Rp7.632.972.562,04. Piutang tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.034.427.136,54 dari tahun sebelumnya senilai Rp7.408.588.830,94. Komposisi piutang daerah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 21 Komposisi Piutang TA 2025

Secara keseluruhan piutang daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Majene dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 51 Piutang Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

SKPD	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	**Piutang Pajak Daerah**	**7.557.256.778,40**	**7.071.388.398,40**
	Piutang Retribusi Daerah	**1.134.548.117,00**	**1.184.109.860,00**
Dinas Kesehatan	- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	176.691.357,00	237.701.100,00
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	- Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	501.830.060,00	489.897.060,00
	- Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	233.774.200,00	213.639.200,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	- Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.352.500,00	38.352.500,00
Sekretariat Daerah	- Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	87.500.000,00	120.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	- Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	95.800.000,00	82.720.000,00
Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	- Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	600.000,00	1.800.000,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**0,00**	**0,00**
Badan Keuangan dan Aset Daerah	- Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00
	- Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa- Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah	- Piutang Pendapatan BLUD	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	- Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00
	Piutang Transfer Antar Daerah	**2.370.353.184,00**	**5.641.920.831,00**
Badan Keuangan dan Aset Daerah	- Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	52.251.589,00	1.204.910.221,00
	- Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	858.799.412,00
	- Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.313.838.150,00	2.102.291.055,00
	- Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.263.445,00	3.562.343,00
	- Piutang Bagi Hasil Bea Pajak Rokok	0,00	1.472.357.800,00
	Piutang Lainnya	**944.976.177,04**	**580.153.629,44**
Badan Keuangan dan Aset Daerah	- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	887.976.878,00	523.154.330,40
	- Bagian Lancar Tagihan Penjualan	56.999.299,04	56.999.299,04
Jumlah		**12.007.134.256,44**	**14.477.572.718,84**

5.3.1.1.2.1. Piutang Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Piutang Pajak Daerah	7.557.256.778,40	7.071.388.398,40	485.868.380,00	6,87
Jumlah	**7.557.256.778,40**	**7.071.388.398,40**	**485.868.380,00**	**6,87**

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp7.557.256.778,40 sedangkan pada Tahun 2024 senilai Rp7.071.388.398,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 52 Daftar Piutang Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
PBB P2	6.185.084.921,00	5.747.665.991,00
Pajak BPHTB	186.132.996,50	186.132.996,50
Pajak Hotel	20.620.000,00	20.620.000,00
Pajak tempat Hiburan	2.250.000,00	2.250.000,00
Pajak Restoran	507.833.341,00	458.080.891,00
Pajak Reklame	68.569.200,00	68.569.200,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	586.766.319,90	588.069.319,90
Jumlah	**7.557.256.778,40**	**7.071.388.398,40**

5.3.1.1.2.2. Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Piutang Retribusi Daerah	1.134.548.117,00	1.184.109.860,00	(49.561.743,00)	(4,19)
Jumlah	**1.134.548.117,00**	**1.184.109.860,00**	**(49.561.743,00)**	**(4,19)**

Piutang Retribusi Daerah pada Tahun 2025 senilai Rp1.134.548.117,00 sedangkan pada Tahun 2024 senilai Rp1.184.109.860,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 53 Daftar Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	176.691.357,00	237.701.100,00
Retribusi Pelayanan Pasar	501.830.060,00	489.897.060,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.352.500,00	38.352.500,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	183.300.000,00	202.720.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	233.774.200,00	213.639.200,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	600.000,00	1.800.000,00
Jumlah	**1.134.548.117,00**	**1.184.109.860,00**

5.3.1.1.2.3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 nihil. Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 Rp0,00.

5.3.1.1.2.4. Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Piutang Transfer Antar Daerah	2.370.353.184,00	5.641.920.831,00	(3.271.567.647,00)	(57,99)
Jumlah	**2.370.353.184,00**	**5.641.920.831,00**	**(3.271.567.647,00)**	**(57,99)**

Piutang Transfer Antar Daerah adalah piutang yang berasal dari pendapatan bagi hasil dari Provinsi Sulawesi Barat periode Triwulan IV Tahun 2025 yang belum diterima daerah sampai dengan 31 Desember 2025. Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp2.370.353.184,00 dan Rp5.641.920.831,00. Berikut rincian Piutang Transfer Antar Daerah dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 54 Daftar Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
- **Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor**	52.251.589,00	1.204.910.221,00
- **Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**	0,00	858.799.412,00
- **Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**	2.313.838.150,00	2.102.291.055,00
- **Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan**	4.263.445,00	3.562.343,00
- **Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok**	0,00	1.472.357.800,00
Jumlah	**2.370.353.184,00**	**5.641.920.831,00**

5.3.1.1.2.5. Piutang Lainnya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Piutang Lainnya	944.976.177,04	580.153.629,44	364.822.547,60	62,88
Jumlah	**944.976.177,04**	**580.153.629,44**	**364.822.547,60**	**62,88**

Piutang Lainnya adalah piutang yang berasal dari pungutan kepada pihak lain yang tidak termasuk dalam piutang pendapatan per 31 Desember 2025. Piutang Lainnya yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 senilai Rp944.976.177,04 dan 31 Desember 2024 senilai Rp580.153.629,44, dengan rincian berikut.

Tabel 5. 55 Daftar Piutang Lainnya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Setoran Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	**56.999.299,04**	**0,00**	**56.999.299,04**
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	**887.976.878,00**	**0,00**	**523.154.330,40**
Tunjangan Komunikasi Insentif dan Biaya Operasional DPRD Tahun 2006 yang Belum Dikembalikan ke Kas Daerah sampai 31 Desember 2019	466.851.500,00	0,00	466.851.500,00
Tunggakan Penjualan Kendaraan Dinas dan Operasional Sesuai SK Bupati Nomor 307 Tahun 2006	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
Denda Keterlambatan atas Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2015	2.845.630,40	0,00	2.845.630,40
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	413.599.747,60	0,00	48.777.200,00
Jumlah	**944.976.177,04**	**0,00**	**580.153.629,44**

Pada tahun 2025 telah diadakan sidang MPTGR atas pihak tertuntut dan telah menandatangani SKTJM sehingga menyebabkan penambahan piutang pada bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp301.315.481,60 . Selain itu terdapat koreksi atas *double* catat pengakuan piutang TGR an. Amran, S, Sos senilai Rp13.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum.

Dari Piutang lainnya senilai Rp944.976.177,04 masih terdapat Piutang Lainnya senilai Rp170.927.672,00 yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan Jaminan atas:

a. Kelebihan Tunjangan gaji yang tidak masuk kantor lebih dari 10 hari berturut turut pada Sekretariat Daerah senilai Rp50.418.608,00;
b. Kelebihan Tunjangan gaji yang tidak masuk kantor lebih dari 10 hari berturut turut pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp66.793.184,00;
c. Kelebihan Tunjangan gaji yang tidak masuk kantor lebih dari 10 hari berturut turut pada Kecamatan Tubo Sendana senilai Rp53.715.880,00;

5.3.1.1.2.6. Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Penyisihan Piutang	(7.632.972.562,04)	(7.068.983.887,90)	(563.988.674,14)	(7,98)
Jumlah	**(7.632.972.562,04)**	**(7.068.983.887,90)**	**(563.988.674,14)**	**(7,98)**

Penyisihan Piutang pada Tahun 2025 senilai Rp7.632.972.562,04 dan pada Tahun 2024 senilai Rp7.068.983.887,90. Rincian piutang dan penyisihannya dapat dilihat lebih jelas pada **lampiran 3** dalam catatan atas Laporan Keuangan ini. Adapun rincian penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 56 Daftar Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(6.439.654.637,17)	(6.002.111.838,80)
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(612.423.416,78)	(458.508.815,50)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(11.851.765,91)	(28.209.604,16)
Penyisihan Piutang Lainnya:		
- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(56.999.299,04)	(56.999.299,04)
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(512.043.443,14)	(523.154.330,40)
Jumlah	**(7.632.972.562,04)**	**(7.068.983.887,90)**

5.3.1.1.3. Beban Dibayar di Muka

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Beban Dibayar di Muka	104.545.912,40	104.545.912,40	0,00	0,00
Jumlah	**104.545.912,40**	**104.545.912,40**	**0,00**	**0,00**

Saldo Beban dibayar di Muka per 31 Desember 2025 senilai Rp104.545.912,40 atau sama dengan saldo tahun sebelumnya. Beban dibayar di muka merupakan kegiatan rehabilitasi pagar SDN 14 Bambangan. Hal ini sesuai dengan perhitungan realisasi keuangan pada kegiatan tersebut yang telah mencapai 75,00 persen sementara realisasi fisik sebesar 26,53 persen. Oleh karena itu, selisih dari perhitungan tersebut diakui sebagai beban dibayar di muka pada Dinas Pendidikan Dan Pemuda Olahraga.

5.3.1.1.4. Persediaan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Persediaan	24.944.001.132,48	32.108.669.768,82	(7.164.668.636,34)	(22,31)
Jumlah	**24.944.001.132,48**	**32.108.669.768,82**	**(7.164.668.636,34)**	**(22,31)**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 senilai Rp24.944.001.132,48 atau mengalami penurunan sebesar 22,31 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp32.108.669.768,82, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 57 Daftar Rincian Persediaan

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Bahan	821.960.322,35	1.524.700,00
2.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	233.990.819,00	774.888.035,99
3.	Obat-obatan	10.057.000.241,13	9.655.969.113,84
4.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	13.818.748.600,00	21.662.383.250,99
5.	Natura dan Pakan	12.301.150,00	13.904.668,00
Total		**24.944.001.132,48**	**32.108.669.768,82**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kenaikan signifikan pada rekening Bahan yang disebabkan oleh perubahan pengklasifikasian persediaan pada tahun 2025, yaitu Persediaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) yang sebelumnya dicatat pada rekening Obat-obatan lainnya direklasifikasi ke rekening Bahan lainnya karena tidak lagi mengandung unsur obat. Namun demikian, secara keseluruhan persediaan mengalami penurunan sebesar Rp7.164.668.636,34 atau 22,31 persen, yaitu dari Rp32.108.669.768,82 per 31 Desember 2024 menjadi Rp24.944.001.132,48 per 31 Desember 2025. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pemakaian persediaan obat-obatan dan instalasi farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas se-Kabupaten Majene, serta berkurangnya persediaan barang yang belum diserahterimakan kepada masyarakat.

Dalam daftar persediaan di atas khususnya pada jenis persediaan obat-obatan masih mencatat obat dalam kondisi kedaluwarsa senilai Rp2.069.850,00 pada: (1) Puskesmas Sendana I jenis obat IV Chateter No. 16 G sebanyak 40 Pcs senilai Rp408.480,00; (2) Puskesmas Totoli jenis Alat Suntik 0.5 sebanyak 1.402 pcs dengan nilai Rp1.661.370,00. Rincian persediaan dapat dilihat lebih jelas pada **lampiran 4**. Adapun rincian persediaan pada SKPD pada tabel berikut.

Tabel 5. 58 Rincian Persediaan per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	Persediaan
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	82.000,00
2.	Dinas Kesehatan (Unit)	5.901.931.344,83
3.	PKM Banggae I	205.813.649,95
4.	PKM Banggae II	217.766.033,77
5.	PKM Lembang	245.654.556,67
6.	PKM Totoli	200.707.893,00
7.	PKM Pamboang	204.324.704,72
8.	PKM Sendana I	327.769.305,19
9.	PKM Tammeroddo	123.570.021,00
10.	PKM Sendana II	144.724.775,64
11.	PKM Salutambung	150.357.560,00
12.	PKM Ulumanda	144.479.392,65
13.	PKM Malunda	109.604.221,00
14.	Rumah Sakit Umum Daerah	2.825.030.439,06
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.691.448.604,00
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	201.526.938,00
17.	Badan Perencanaan Daerah	371.000,00
18.	Badan Pendapatan Daerah	23.980.881,00
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	224.857.812,00
Total		**24.944.001.132,48**

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Investasi Jangka Panjang	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67	(1.329.344.258,57)	(1,93)
Jumlah	**67.455.648.023,10**	**68.784.992.281,67**	**(1.329.344.258,57)**	(1,93)

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 senilai Rp67.455.648.023,10 dan pada Tahun 2024 senilai Rp68.784.992.281,67 mengalami penurunan sebesar 1,93 persen, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 59 Daftar Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00
2.	Investasi Non Permanen Lainnya	(2.958.167.671,00)	(2.958.167.671,00)
3.	Investasi Permanen – Penyertaan modal	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67
	Jumlah	**67.455.648.023,10**	**68.784.992.281,67**

5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Investasi Non Permanen- Dana Bergulir	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00	0,00	0,00
JUMLAH	**2.958.167.671,00**	**2.958.167.671,00**	**0,00**	**0,00**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Dana Bergulir sebesar Rp2.958.167.671,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Dana Bergulir. Dana bergulir merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat seperti kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Usaha yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya, rincian atas penerima Dana Bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 5** . Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Dana Bergulir per 31 Desember 2025 senilai Rp2.958.167.671,00, tidak mengalami perubahan tahun lalu. Adapun rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 60 Daftar Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2025

Nama SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00	0,00	0,00
JUMLAH	**2.958.167.671,00**	**2.958.167.671,00**	**0,00**	**0,00**

5.3.1.2.2. Penyisihan Investasi Non Permanen

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Investasi Non Permanen	(2.958.167.671,00)	(2.958.167.671,00)	0,00	0,00
Jumlah	**(2.958.167.671,00)**	**(2.958.167.671,00)**	**0,00**	**0,00**

Penyisihan Investasi Non Permanen merupakan penyisihan atas Dana Bergulir yang diragukan tertagih atau dikategorikan macet sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Saldo Penyisihan Investasi Non Permanen per 31 Desember 2025 senilai (Rp2.958.167.671,00).

5.3.1.2.3. Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67	(1.329.344.258,57)	(1,93)
Jumlah	**67.455.648.023,10**	**68.784.992.281,67**	(1.329.344.258,57)	(1,93)

Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp67.455.648.023,10 atau turun 1,93 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp68.784.992.281,67

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene berupa Penyertaan Modal pada Bank Sulselbar, Perumda Air Minum Tirta Mandar dan Perusda Aneka Usaha.

Rincian atas kepemilikan modal milik Pemerintah Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 61 Rincian Kepemilikan Modal Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2025

No.	Perusahaan	Persentase Kepemilikan Modal (%)
1.	Perusda Aneka Usaha	100
2.	Perumda Air Minum Tirta Mandar	100
3.	Bank Sulselbar	0,82

Untuk Jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah sepenuhnya dicatat dengan menggunakan metode ekuitas yaitu Perusda Aneka Usaha dan Perumda Air Minum Tirta Mandar. Bank Sulselbar dicatat dengan menggunakan metode *cost* (biaya).

Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp67.455.648.023,10 atau mengalami penurunan sebesar 1,93 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp68.784.992.281,67. Penurunan saldo investasi permanen terjadi pada tahun 2025 disebabkan atas kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Mandar sebesar Rp347.368.707,00 dan Perusda Aneka Usaha sebesar Rp1.481.975.551,57.

Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mandar dikeluarkan berdasarkan SK Bupati Nomor: 100.3.3.2/754/X/ Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025, penyertaan modal digunakan untuk biaya seleksi Direktur dan biaya pengadaan lahan di daerah Renggeang Polewali Mandar (relokasi *intake* Intalasi Pengelolaan Air Galung Lombok).

Nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majene pada Perumda Air Minum Tirta Mandar dan Perusda Aneka Usaha Kabupaten Majene mengalami penurunan akibat kerugian yang dialami berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Suparman Bambang Ghanis dengan Nomor 00083/2.1081/AU.8/11/1224-1/1/III/2026 tanggal 12 Maret 2026 terhadap laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene mengalami kerugian senilai Rp347.368.707,00 pada laporan laba rugi, sedangkan Perusda Aneka Usaha Kabupaten Majene memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian dalam laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Kuncara Budi Santosa & Rekan dengan Nomor 00001/3.0543/AU.8/05/1712-1/1/IV/2026 tanggal 30 April 2026 terhadap laporan Keuangan Perusda Aneka Usaha Kabupaten Majene juga mengalami kerugian senilai Rp1.481.975.551,57 pada laporan laba rugi. Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017, Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene dan Perusda Aneka Usaha Kabupaten Majene merupakan BUMD yang kepemilikan modalnya 100 persen milik pemerintah daerah atas komposisi kepemilikan modal tersebut, maka metode pencatatan investasi dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas. Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Oleh karena itu kerugian Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene tersebut diakui dan dicatat sebagai beban penurunan nilai investasi pemerintah daerah yang mengurangi nilai penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene.

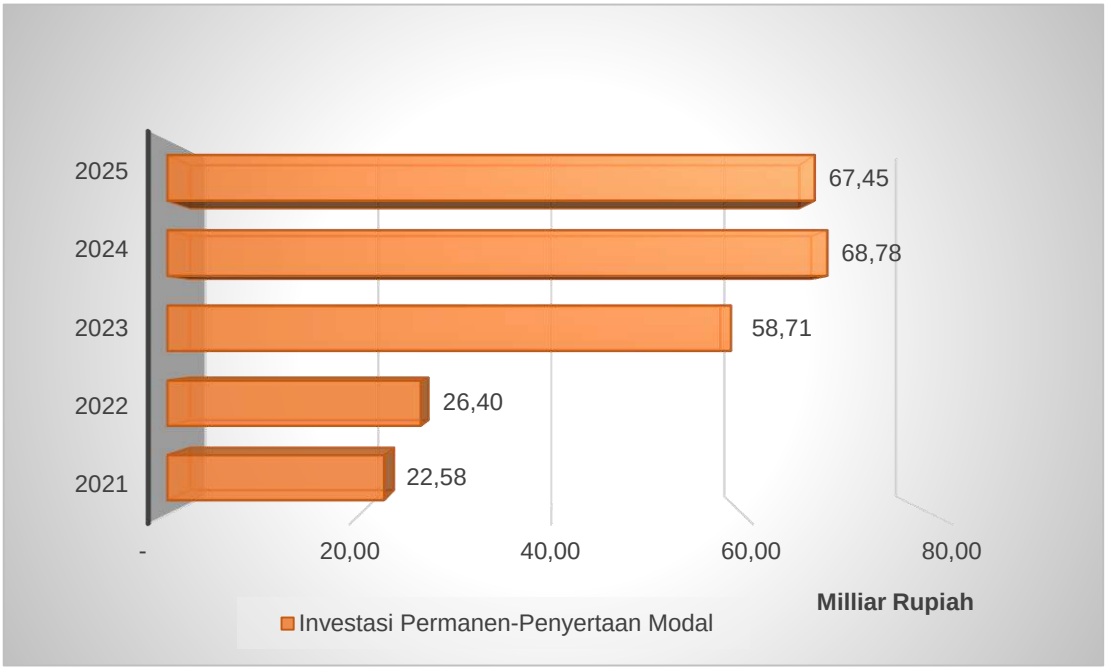
Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Majene hanya melakukan Penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene sehingga memperoleh Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp67.455.648.023,10. Nilai ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 62 Mutasi Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Tahun 2025

No.	Perusahaan	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
1.	Perusda Aneka Usaha	41.228.586.071,00	0,00	1.481.975.551,57	39.746.610.519,43
2.	Perumda Air Minum Tirta Mandar	9.320.406.210,67	500.000.000,00	347.368.707,00	9.473.037.503,67

No.	Perusahaan	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
3.	Bank Sulselbar	18.236.000.000,00	0,00	0,00	18.236.000.000,00
Jumlah		**68.784.992.281,67**	**500.000.000,00**	**1.829.344.258,57**	**67.455.648.023,10**

Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majene dari Tahun 2021-2025. Dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 22 Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

5.3.1.3. Aset Tetap

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Tetap	1.475.883.616.947,45	1.547.906.920.646,29	(72.023.303.698,84)	(4,65)
Jumlah	**1.475.883.616.947,45**	**1.547.906.920.646,29**	**(72.023.303.698,84)**	**(4,65)**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Perubahan nilai aset tetap merupakan indikator kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi operasional penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai penopang peningkatan ekonomi wilayah Kabupaten Majene.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD. Melalui pembelian. Pembangunan. Hibah atau donasi. Pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap antara lain terdiri dari :

a. Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
b. Peralatan dan Mesin, meliputi mesin dan peralatan alat besar, alat angkutan bermotor, alat angkutan tak bermotor, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga alat studio, alat besar, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/produksi, rambu – rambu, dan peralatan olahraga;
c. Gedung dan Bangunan, meliputi gedung tempat kerja, bangunan gedung, monumen, bangunan menara, tugu titik kontrol/ pasti, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, irigasi, instalasi;
e. Aset Tetap Lainnya, meliputi bahan perpustakaan, bahan perpustakaan tercetak, bahan perpustakaan lainnya, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman dan barang koleksi, dan aset renovasi; dan
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, dicatat sebesar seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

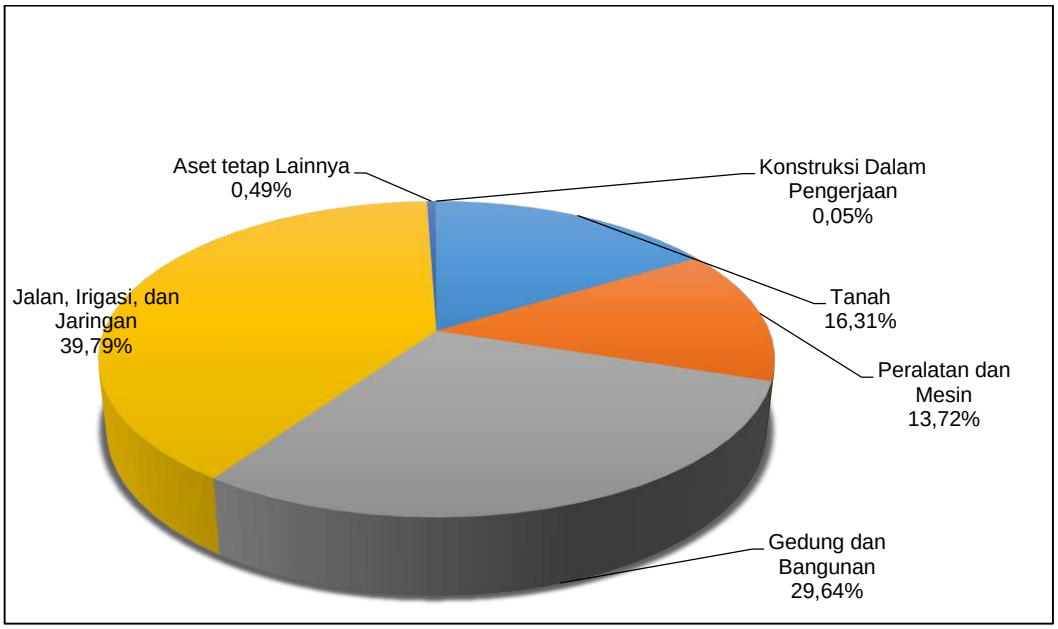
Selain itu, pada Tahun Anggaran 2024 terdapat Aset Tetap yang memenuhi klasifikasi sebagai Aset Properti Investasi, namun Pemerintah Kabupaten Majene belum menyajikan Aset Properti Investasi dikarenakan pada Tahun 2024 belum terdapat peraturan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Properti Investasi. Kebijakan akuntansi tentang Properti Investasi baru ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah pada tanggal 15 April 2025.

Saldo aset tetap pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.475.883.616.947,45 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 63 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tanah	443.305.977.555,00
2.	Peralatan dan Mesin	373.116.163.248,03
3.	Gedung dan Bangunan	805.789.842.264,28
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.081.642.931.941,40
5.	Aset Tetap Lainnya	13.438.459.764,08
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	1.241.180.088,15
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.242.650.937.913,49)
	Jumlah	1.475.883.616.947,45

Komposisi aset tetap berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 5. 23 Komposisi Aset Tetap berdasarkan Jenisnya

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa kelompok aset paling material yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Majene adalah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Sedangkan kelompok aset yang paling rendah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah aset tetap lainnya. Laporan saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 berdasarkan Tabel di atas merupakan akibat dari Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan sebagai gambarannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 64 Tabel Penambahan dan Pengurangan Aset tetap TA 2025

No.	Uraian	Saldo Aset Tetap Tahun 2024 (Rp)	Mutasi Aset		Saldo Aset Tetap Tahun 2025 (Rp)
			Penambahan Aset Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Aset Tahun 2025 (Rp)	
1.	Tanah	454.372.482.897,00	1.367.688.179,00	12.434.193.521,00	443.305.977.555,00
2.	Peralatan dan Mesin	368.063.935.365,38	12.658.186.543,00	7.605.958.660,35	373.116.163.248,03
3.	Gedung dan Bangunan	757.337.493.107,65	55.576.918.672,00	7.124.569.515,37	805.789.842.264,28
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.073.448.390.089,92	10.854.805.012,00	2.660.263.160,52	1.081.642.931.941,40
5.	Aset Tetap Lainnya	13.110.297.264,08	328.162.500,00	0,00	13.438.459.764,08
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.220.083.821,60	130.637.811,55	15.109.541.545,00	1.241.180.088,15
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.134.645.761.899,34)	(108.005.176.014,15)		(1.242.650.937.913,49)
Jumlah		**1.547.906.920.646,29**			**1.475.883.616.947,45**

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkenaan dengan mutasi akun aset tetap selama Tahun 2025 yaitu:

5.3.1.3.1. Tanah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Tanah	443.305.977.555,00	454.372.482.897,00	(11.066.505.342,00)	(2,44)
Jumlah	**443.305.977.555,00**	**454.372.482.897,00**	**(11.066.505.342,00)**	**(2,44)**

Aset Tetap Tanah Tahun 2025 sebesar Rp443.305.977.555,00 atau terjadi penurunan sebesar 2,44 persen dari Tahun 2024

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Nilai tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Jumlah bidang tanah yang telah memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Majene sejumlah 209 bidang tanah dengan total luas tanah sebesar 859.646 m^2. Saldo tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp443.305.977.555,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.066.505.342,00 atau sebesar 2,44 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp454.372.482.897,00. Adapun tabel mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 5. 65 Tabel Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Tanah

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**454.372.482.897,00**
a. Penambahan		
1)	Realisasi Belanja Modal	732.371.100,00
2)	Mutasi Masuk	635.317.079,00
Jumlah		**1.367.688.179,00**
b. Pengurangan		
1)	Mutasi Keluar	12.254.988.221,00
2)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset	179.205.300,00
Jumlah		**12.434.193.521,00**
Saldo per 31 Desember 2025		**443.305.977.555,00**

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah selama TA 2025 adalah sebagai berikut.

a. **Penambahan** Aset Tetap Tanah senilai Rp1.367.688.179,00 yang terdiri dari:

1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp732.371.100,00;

2) Mutasi masuk sebesar Rp635.317.079,00 yang terdiri dari:

   a) Penerimaan hibah barang sebesar Rp290.000.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

   b) Kurang Pencatatan/Pengakuan sebesar Rp345.317.079,00 pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan

b. **Pengurangan** Aset Tetap Tanah sebesar Rp12.434.193.521,00 yakni

1) Mutasi Keluar sebesar Rp12.254.988.221,00 terdiri dari:

   a) Mutasi keluar aset tetap tanah karena dialihkan ke properti investasi sebesar Rp10.815.873.221,00, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor:

100.3.3.2/442/VII/TAHUN 2025 tentang Penetapan Aset Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp13.680.815.924,00 namun berdasarkan hasil koreksi terdapat aset yang tidak memenuhi syarat sebagai Properti Investasi senilai Rp2.864.942.703,00 pada Sekretariat Daerah sehingga Aset Properti Investasi pada Sekretariat Daerah senilai Rp10.749.317.900,00 dan Aset Properti terdapat pada Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp66.555.321,00.

b) Mutasi keluar aset tetap tanah karena pemberian hibah sebesar Rp1.387.330.000,00 yang terdiri dari:

(1) senilai Rp695.200.000,00 pada Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/847/XI/TAHUN 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Majene Karena Dihibahkan Kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene Tahun Anggaran 2025;

(2) senilai Rp692.130.000,00 pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/788/X/TAHUN 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Majene Karena Dihibahkan Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025;

c) Penghapusan aset tetap tanah karena pembayaran utang tahun sebelumnya sebesar Rp51.785.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

2) Reklasifikasi dan Koreksi aset sebesar Rp179.205.300,00 yang terdiri dari:

a) Koreksi aset tetap tanah karena salah pos belanja modal sebesar Rp72.805.300,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; dan

b) Koreksi pencatatan aset tetap tanah atas pencatatan tahun sebelumnya sebesar Rp106.400.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tahun 2025 terdapat delapan bidang tanah yang akan digunakan untuk Objek Lokasi Pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan luas 53.354 M^2 harga Rp3.206.501.988,00 hal sesuai tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4911/SJ tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, adapun rincian Objek Lokasi Pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 66 Daftar Objek Lokasi Pembangunan Gerai KDMP

No.	Objek Lokasi	Luas (M^2)	Harga Perolehan (Rp)	Alamat
1.	Lokasi Pemb. Rumah Nelayan	19.666	1.275.744.031	Desa Limbua Kecamatan Sendana
2.	Eks Lokasi TPA Lembang	13.000	130.000.000	Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur
3.	Lokasi Pasar Malunda	1.057	162.165.267	Desa Lamungan Batu Kecamatan Malunda
4.	Lokasi Eks Pasar Palipi	782	16.794.300	Desa Palipi Kecamatan Sendana

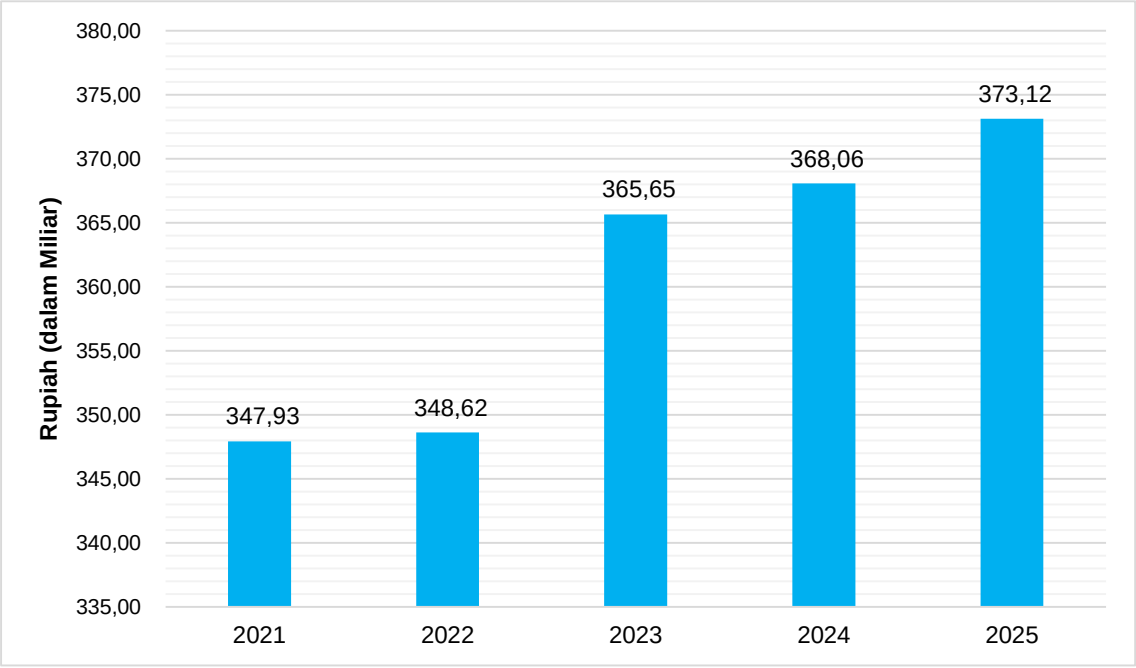
No.	Objek Lokasi	Luas (M^2)	Harga Perolehan (Rp)	Alamat
5.	Lokasi Komp. Sport Centre	3.430	551.339.500	Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae
6.	Lokasi Pasar Parabaya	3.059	195.240.318	Desa Parabaya Onang Kecamatan Sendana
7.	Lokasi Pembangunan Rumah Nelayan	10.014	850.484.272	Pa'ga Mekkata Selatan Kecamatan Malunda
8.	Lokasi Pasar Salutambung	2.346	24.734.300	Salutambung Sambabo Kecamatan Ulumanda
Jumlah		**53.354**	**3.206.501.988**	

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Peralatan dan Mesin	373.116.163.248,03	368.063.935.365,38	5.052.227.882,65	1,37
Jumlah	**373.116.163.248,03**	**368.063.935.365,38**	**5.052.227.882,65**	**1,37**

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp373.116.163.248,03 atau terjadi Kenaikan sebesar 1,37 persen dari Tahun 2024

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp373.116.163.248,03 Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.052.227.882,65 atau sebesar 1,37 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp368.063.935.365,38. Berikut grafik perkembangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun terakhir



Grafik 5. 24 Grafik Perkembangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: alat besar, alat angkutan bermotor, alat angkutan tak bermotor, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga alat studio, alat besar, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat

laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/produksi, rambu–rambu, peralatan olahraga dan lain sebagainya. Adapun rincian Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 67 Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Alat Besar	17.744.450.168,00	14.898.867.000,00
2.	Alat Angkutan	72.652.846.067,84	72.816.201.496,84
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.306.371.840,98	2.377.557.232,98
4.	Alat Pertanian	2.882.047.565,25	3.293.346.465,25
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	83.329.402.836,72	79.989.219.459,07
6.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.525.958.785,44	8.773.737.285,44
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	85.588.260.667,40	85.564.781.456,40
8.	Alat Laboratorium	28.745.216.816,75	28.656.872.816,75
9.	Alat Persenjataan	300.459.243,00	282.009.243,00
10.	Komputer	64.155.351.093,68	64.621.949.746,68
11.	Alat Keselamatan Kerja	3.152.622.532,00	3.083.107.532,00
12.	Peralatan Proses/Produksi	49.527.000,00	49.527.000,00
13.	Rambu-Rambu	2.088.333.474,97	2.088.333.474,97
14.	Peralatan Olah Raga	1.595.315.156,00	1.568.425.156,00
Jumlah		**373.116.163.248,03**	**368.063.935.365,38**

Peralatan dan mesin dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Adapun mutasi tambah kurang Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 68 Tabel Mutasi Tambah/Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per : 1 Januari 2025		**368.063.935.365,38**
a. Penambahan		
1)	Realisasi Belanja Modal	7.522.346.378,00
2)	Mutasi Masuk	2.124.939.400,00
3)	Reklasifikasi dan Koreksi masuk	3.010.900.765,00
Jumlah		**12.658.186.543,00**
b. Pengurangan		
1)	Mutasi Keluar	7.531.555.232,05
2)	Reklasifikasi Koreksi Keluar	156.067.051,35
3)	Tambah/Kurang Aset Ekstrakomptabel	(81.663.623,05)
Jumlah		**7.605.958.660,35**
Saldo per 31 Desember 2025		**373.116.163.248,03**

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2025 adalah sebagai berikut.

a. **Penambahan** Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp12.658.186.543,00 yang terdiri dari:
   1) Penambahan bersumber dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 Rp7.522.346.378,00 yang terdiri dari:
      a) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.826.784.450,00;
      b) Belanja modal yang dipisahkan sebesar Rp2.517.537.030,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersumber dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
      c) Belanja Modal sebesar Rp1.178.024.898,00 yang bersumber dari dana JKN pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari: (1) Puskesmas Banggae I sebesar Rp86.413.683,00; (2) Puskesmas Banggae II sebesar Rp40.065.000,00; (3) Puskesmas Lembang sebesar Rp45.600.000,00; (4) Puskesmas Malunda sebesar Rp94.392.082,00; (5) Puskesmas pamboang sebesar Rp146.200.000,00; (6) Puskesmas Salutambung sebesar Rp50.333.500,00; (7) Puskesmas Sendana I sebesar Rp98.871.760,00; (8) Puskesmas Sendana II sebesar Rp57.365.000,00; (9) Puskesmas Tammeroddo sebesar Rp114.929.273,00; (10) Puskesmas Totoli sebesar Rp54.024.000,00; (11) Puskesmas Ulumanda sebesar Rp17.816.000,00; (12) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp372.014.600,00;
   2) Penambahan Mutasi Masuk sebesar Rp2.124.939.400,00 yang terdiri dari:
      a) Mutasi masuk disebabkan karena ada hibah peralatan dan mesin sebesar Rp1.319.392.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/846/XI/TAHUN 2025 Tanggal 25 November 2025 Tentang Pencatatan Aset Berupa Alat Berat ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Majene Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun Anggaran 2025;
      b) Mutasi masuk disebabkan karena perolehan aset Peralatan Mesin yang bersumber dari utang sebesar Rp698.687.400,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp17.094.000,00 pada Sekretariat Daerah; (2) senilai Rp681.593.400,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
      c) Mutasi tambah/masuk disebabkan karena berpindahnya aset peralatan dan mesin dari SKPD ke SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Rp106.860.000,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/848/XI/TAHUN 2025 Tanggal 25 November 2025 tentang Mutasi Pencatatan Barang Milik Daerah Antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025:

      Mutasi masuk Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 69 Mutasi Masuk Peralatan Akibat Mutasi antar SKPD

No.	Penambahan pada SKPD	SKPD Asal	Nilai (*Rupiah*)
1.	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan	35.700.000,00
2	Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan	71.160.000,00
	Jumlah		**106.860.000,00**

   3) Penambahan akibat Reklasifikasi dan Koreksi masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.010.900.765,00 terdiri dari:

a) Reklasifikasi/Kapitalisasi Aset (non Belanja Modal) berasal dari belanja barang dan jasa sebesar Rp211.432.168,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp204.009.168,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; (2) senilai Rp7.423.000,00 pada Kecamatan Malunda;

b) Reklasifikasi Antar Akun Belanja Rp383.923.997,00 terdiri dari:

(1) Reklasifikasi dari belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp339.423.997,00 terdiri dari: (1) senilai Rp119.333.000,00 Pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp41.105.000,00 Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (3) senilai Rp178.985.997,00 pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; dan

(2) Reklasifikasi dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp44.500.000,00 pada Dinas Kesehatan.

c) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp2.415.544.600,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

b. **Pengurangan** Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp7.605.958.660,35 yang terdiri dari:

1) Pengurangan yang bersumber dari mutasi keluar sebesar Rp7.531.555.232,05 terdiri dari:

a) Penghapusan Barang milik Daerah berupa peralatan dan mesin dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Majene sebesar Rp7.424.695.232,05 terdiri dari:

(1) Penghapusan/Pemusnahan BMD sebesar Rp2.850.076.790,05 terdiri dari:

(a) Pemberian hibah berupa peralatan mesin sebesar Rp7.006.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

(b) Pemberian hibah berupa peralatan mesin sebesar Rp59.551.500,00 pada Kecamatan Banggae Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/767/X/TAHUN 2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Majene Berupa Hibah Peralatan Dan Mesin Kepada Pemerintah Kelurahan Baruga Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025;

(c) Mutasi Kurang karena Penghapusan Peralatan dan Mesin karena kategori pakai habis (BPH) sebesar Rp23.486.790,05 pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/765/X/TAHUN 2025 Tanggal 23 Oktober 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Kategori Barang Habis Pakai Dari Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025;

(d) Mutasi Kurang karena Penghapusan Peralatan dan Mesin karena pemusnahan sebesar Rp302.087.900,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/766/X/TAHUN 2025 Tanggal 23 Oktober 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Pemusnahan Dari Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2025 terdiri dari: (1) senilai Rp299.717.900,00 pada Sekretariat DPRD; (2) senilai Rp73.000,00 pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan; (3) senilai Rp2.148.000,00 pada Kecamatan Banggae Timur; (4) senilai Rp149.000,00 pada Kecamatan Pamboang;

(e) Mutasi kurang karena penghapusan Peralatan dan Mesin karena tercatat ganda sebesar Rp42.400.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah; dan

(f) Mutasi Kurang karena direklasifikasi sebesar Rp2.415.544.600,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

(2) Penghapusan BMD Karena Telah Beralih Kepemilikan Melalui Penjualan Langsung sebesar Rp4.574.618.442,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene SK Nomor: 100.3.3.2/764/TAHUN 2025 Tanggal 23 Oktober 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Inventaris Pemerintah Kabupaten Majene Karena Telah Dilakukan Penjualan Langsung terdiri dari: (1) senilai Rp3.136.181.100,00 pada Sekretariat DPRD; (2) senilai Rp30.117.629,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (3) senilai Rp21.487.340,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (4) senilai Rp8.149.840,00 pada Dinas Perhubungan; (5) senilai Rp213.310.998,00 pada Dinas Kesehatan; (6) senilai Rp20.234.969,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (7) senilai Rp200.234.969,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (8) senilai Rp104.130.000,00 pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan; (9) senilai Rp104.911.000,00 pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah; (10) senilai Rp368.677.593,00 pada Badan Pendapatan Daerah; (11) senilai Rp83.478.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP; (12) senilai Rp103.697.390,00 pada Badan Perencana Daerah; (13) senilai Rp4.944.000,00 pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah; (14) senilai Rp52.000.000,00 pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; (15) senilai Rp19.210.000,00 pada Badan Kepegawaian dan PSDM; (16) senilai Rp6.800.000,00 pada Kecamatan Banggae; (17) senilai Rp48.592.083,00 pada Kecamatan Banggae Timur; (18) senilai Rp28.527.500,00 pada Kecamatan Pamboang; (19) senilai Rp19.935.000,00 pada Kecamatan Sendana;

b) Pengurangan yang bersumber dari mutasi keluar sebesar Rp106.860.000,00 disebabkan karena berpindahnya aset Peralatan dan Mesin SKPD ke SKPD lain dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/848/XI/TAHUN 2025 Tanggal 25 November 2025 tentang Mutasi Pencatatan Barang Milik Daerah Antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Tabel 5. 70 Mutasi Keluar Peralatan Mesin Akibat Mutasi antar SKPD

No.	Mutasi Keluar	SKPD Penerima	Nilai (*Rupiah*)
1.	Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan	35.700.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan	71.160.000,00
	Jumlah		**106.860.000,00**

2) Pengurangan karena reklasifikasi dan koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp156.067.051,35 terdiri dari:

a) Koreksi atas belanja modal peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi definisi aset tetap karena kesalahan belanja sebesar Rp565.246.015,00 terdiri dari: (1) senilai Rp25.415.318,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai 213.078.800,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (3) senilai Rp178.985.997,00 pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; (4) senilai Rp147.765.900,00 pada Kecamatan Banggae;

b) Koreksi atas belanja modal peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi definisi aset tetap karena merupakan belanja utang barang jasa yang terealisasi di Belanja Modal senilai Rp64.800.000,00 pada Sekretariat DPRD;

c) Pengurangan karena pembayaran utang tahun sebelumnya sebesar Rp864.118.000,00 terdiri dari: (1) senilai Rp9.900.000,00 pada Sekretariat DPRD; (2) senilai Rp59.200.000,00 pada Sekretariat Daerah; (3) senilai Rp9.100.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) senilai Rp32.967.000,00 pada Dinas Kesehatan; (5) senilai Rp254.730.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (6) senilai Rp287.122.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (7) senilai Rp49.834.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (8) senilai Rp44.300.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (9) senilai Rp4.080.000,00 pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan; (10) senilai Rp23.435.000,00 pada Dinas Kelautan Dan Perikanan; (11) senilai Rp30.850.000,00 pada Badan Perencanaan Daerah; (12) senilai Rp19.400.000,00 pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian; (13) senilai Rp20.500.000,00 pada Kecamatan Banggae; (14) senilai Rp9.200.000,00 pada Kecamatan Sendana; (15) senilai Rp9.500.000,00 pada Kecamatan Malunda;

d) Reklasifikasi penambahan aset lainnya sebesar Rp5.880.176.545,35 terdiri dari: (1) senilai Rp878.282.500,00 pada Sekretariat DPRD; (2) senilai Rp808.330.733,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (3) senilai Rp77.500.540,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (4) senilai Rp42.598.562,00 pada Dinas Kesehatan; (5) senilai Rp240.782.165,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (6) senilai Rp17.943.494,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; (7) senilai Rp174.552.782,00 pada Dinas Sosial; (8) senilai Rp7.822.448,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (9) senilai Rp10.850.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan; (10) senilai Rp236.488.170,35 pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan; (11) senilai Rp202.513.050,00 pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah; (12) senilai Rp624.522.254,00 pada Badan Pendapatan Daerah; (13) senilai Rp71.000.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP; (14) senilai Rp796.200.900,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; (15) senilai Rp828.832.000,00 pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; (16) senilai Rp78.725.000,00 pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja; (17) senilai 54.700.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (18) senilai Rp27.355.000,00 pada Badan Kepegawaian Dan PSDM; (19) senilai Rp193.643.728,00 pada Kecamatan Banggae; (20) senilai Rp5.100.000,00 pada Kecamatan Banggae Timur; (21) senilai Rp199.596.219,00 pada Kecamatan Pamboang; (22) senilai Rp69.630.000,00 pada Kecamatan Sendana; (23) senilai Rp175.206.000,00 pada Kecamatan Tammeroddo; (24) senilai Rp38.445.000,00 pada Kecamatan Tubo Sendana; (25) senilai Rp19.556.000,00 pada Kecamatan Malunda;

e) Reklasifikasi pengurangan aset lainnya peralatan dan mesin dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Majene sebesar Rp(7.250.974.109,00) terdiri dari: (1) senilai Rp(3.385.265.000,00) pada Sekretariat DPRD; (2) senilai Rp(30.117.629,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (3) senilai Rp(21.487.340,00) pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (4) senilai Rp(8.149.840,00) pada Dinas Perhubungan; (5) senilai Rp(210.355.000,00) pada Dinas Kesehatan; (6) senilai Rp(20.234.000,00) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak; (7) senilai Rp(199.253.634,00) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (8) senilai Rp(110.180.000,00) pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan; (9) senilai Rp(104.911.000,00) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; (10) senilai Rp(384.002.593,00) pada Badan Pendapatan Daerah; (11) senilai Rp(83.478.000,00) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP; (12) senilai Rp(103.697.390,00) pada Badan Perencanaan Daerah; (13) senilai Rp(4.944.000,00) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah; (14) senilai Rp(2.415.544.600,00) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; (15) senilai Rp(52.000.000,00) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; (16) senilai Rp(19.210.000,00) pada Badan Kepegawaian dan PSDM; (17) senilai Rp(6.800.000,00) pada Kecamatan Banggae; (18) senilai Rp(43.279.083,00) pada Kecamatan Banggae Timur; (19) senilai Rp(27.950.000,00) pada Kecamatan Pamboang; (20) senilai Rp(19.935.000,00) pada Kecamatan Sendana;

f) Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi antar akun belanja modal ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp32.700.600,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;

3) Tambah/Kurang Aset Ekstrakomptabel Rp(81.663.623,05) terdiri dari: (1) senilai Rp(50.563.000,00) pada Sekretariat DPRD; (2) senilai Rp(2.775.998,00) pada Dinas Kesehatan; (3) senilai Rp(981.335,00) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (4) senilai Rp(17.509.790,05) pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan; (5) senilai Rp(1.575.000,00) pada Badan Pendapatan Daerah; (6) senilai Rp(7.461.000,00) pada Kecamatan Banggae Timur; (7) senilai Rp(726.500,00) pada Kecamatan Pamboang.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Gedung dan Bangunan	805.789.842.264,28	757.337.493.107,65	48.452.349.156,63	6,40
Jumlah	**805.789.842.264,28**	**757.337.493.107,65**	**48.452.349.156,63**	**6,40**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp805.789.842.264,28 atau terjadi Kenaikan sebesar 6,40% dari Tahun 2024

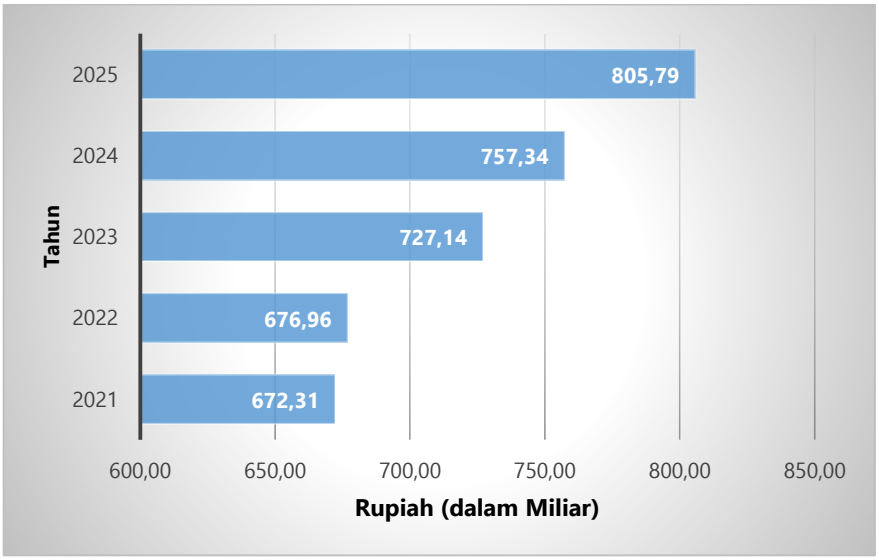
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp805.789.842.264,28. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp48.452.349.156,63 atau sebesar 6,40 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp757.337.493.107,65

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Tugu Titik Kontrol/ Pasti.

Tabel 5. 71 Rincian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Bangunan Gedung	789.146.763.293,05	741.635.493.026,99
2.	Bangunan Monumen	2.722.175.999,57	2.732.533.046,00
3.	Bangunan Menara	664.331.983,00	664.331.983,00
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	13.256.570.988,66	12.305.135.051,66
Jumlah		**805.789.842.264,28**	**757.337.493.107,65**

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tren perkembangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Majene sampai dengan per 31 Desember 2025 dalam grafik berikut.



Grafik 5. 25 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 72 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**757.337.493.107,65**
a. Penambahan		
1)	Realisasi Belanja Modal	23.797.538.257,00
2)	Mutasi Masuk	16.501.955.428,00
3.)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Masuk	15.277.424.987,00
Jumlah		**55.576.918.672,00**
b. Pengurangan		
1)	Mutasi Keluar	2.493.196.258,00
2)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Keluar	4.631.373.257,37
3)	Tambah/(Kurang) Aset Ekstrakomptabel	0.00
Jumlah		**7.124.569.515,37**
Saldo per 31 Desember 2025		**805.789.842.264,28**

Adapun rincian penambahan/pengurangan Aset Gedung dan Bangunan selama TA 2025 adalah sebagai berikut.

a. **Penambahan** Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp55.576.918.672,00 yang terdiri dari:
   1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp23.797.538.257,00 yang terdiri dari:
      a) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.636.161.184,00;

b) Belanja modal yang dipisahkan sebesar Rp161.377.073,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersumber dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

2) Penambahan mutasi masuk Gedung dan Bangunan senilai Rp16.501.955.428,00 yang terdiri dari:

a) Mutasi masuk Gedung dan Bangunan disebabkan adanya hibah senilai Rp15.485.644.139,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/698/X/TAHUN 2025 Tanggal; 3 Oktober 2025 Tentang Pencatatan Barang Milik Daerah Atas Perolehan Hibah Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke dalam Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025;

b) Penambahan mutasi masuk atas perolehan aset dari utang belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp533.851.050,00 yang terdiri: (1) senilai Rp179.423.615,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp354.427.435,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Tabel 5. 73 Mutasi Masuk atas Pengakuan Hutang Belanja Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Nilai (Rupiah)
1.	Dinas Kesehatan	179.423.615,00
2.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	354.427.435,00
Jumlah		**533.851.050,00**

c) Mutasi masuk/bertambah Gedung dan Bangunan disebabkan perpindahan antar SKPD sebesar Rp482.460.239,00 terdiri dari: (1) senilai Rp282.970.608,00 pada Sekretariat Daerah mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp199.489.631,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mutasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Untuk Jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5. 74 Mutasi Masuk Gedung dan Bangunan Akibat Mutasi antar SKPD

No.	Penambahan pada SKPD	SKPD Asal	Nilai (*Rupiah*)
1.	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	282.970.608,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	199.489.631,00
	Jumlah		**482.460.239,00**

3) Penambahan akibat Reklasifikasi dan Koreksi masuk Gedung dan Bangunan senilai Rp15.277.424.987,00 terdiri dari:

a) Reklasifikasi/Kapitalisasi Aset (non Belanja Modal) sebesar Rp159.393.442,00 berasal dari belanja barang dan jasa yang terdiri dari: (1) senilai Rp21.393.442,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp138.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;

b) Penambahan Gedung dan Bangunan yang bersumber dari reklasifikasi belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.490.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

c) Penambahan Gedung dan Bangunan yang bersumber dari aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp15.109.541.545,00 yang terdiri dari: (1) senilai

Rp15.025.570.450,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah berupa Gedung IBS Lantai 2 Bagian dari Gedung B dan Ruangan Bersalin Lantai 3 dan 4 Bagian dari Gedung B; (2) senilai Rp83.971.095,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa Taman Semi Permanen.

b. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp7.124.569.515,37 yang terdiri dari:

1) Pengurangan/ Mutasi Keluar Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.493.196.258,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pemberian hibah BMD berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.948.600,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

b) Pengurangan karena pembayaran utang tahun sebelumnya sebesar Rp2.003.787.419,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp83.551.044,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp249.729.663,00 pada Dinas Kesehatan; (3) senilai Rp161.377,073,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (4) senilai Rp1.369.829.639,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (5)senilai Rp68.060.000,00 pada Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian; (6) senilai Rp20.175.000,00 pada Inspektorat Daerah; (7) senilai Rp48.315.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; (8) senilai Rp2.750.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c) Mutasi kurang/keluar disebabkan karena berpindahnya aset Gedung dan Bangunan dari SKPD ke SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene sebanyak Rp482.460.239,00 terdiri dari: (1) senilai Rp282.970.608,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mutasi ke Sekretariat Daerah; (2) senilai Rp199.489.631,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mutasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan untuk mutasi keluar dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5. 75 Mutasi Keluar Gedung dan Bangunan Akibat Mutasi antar SKPD

No.	Mutasi Keluar	SKPD Penerima	Nilai (*Rupiah*)
1.	Dinas PUPR	Sekretariat Daerah	282.970.608,00
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas PUPR	199.489.631,00
	Jumlah		**482.460.239,00**

2) Pengurangan/Mutasi Keluar Aset tetap Gedung dan Bangunan disebabkan karena reklasifikasi/koreksi senilai Rp4.631.373.257,37 terdiri dari:

a) Koreksi atas belanja modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi definisi aset tetap karena kesalahan belanja yang seharusnya menjadi belanja barang diserahkan sebesar Rp42.557.625,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

b) Koreksi kesalahan pengakuan atas utang belanja modal senilai Rp2.241.150,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

c) Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi antar akun belanja modal ke sebesar Rp2.117.315.551,00 terdiri dari:

(1) Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp339.423.997,00 terdiri dari: (1) senilai Rp119.333.000,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp41.105.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (3) senilai Rp178.985.997,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

(2) Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke belanja Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.777.891.554,00 terdiri dari: (1) senilai Rp1.239.843.002,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp210.872.780,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (3) senilai Rp327.175.772,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

d) Koreksi atas kurang volume belanja modal Gedung dan Bangunan yang berasal dari temuan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Nomor: 10.B/LHP/XIX.MAM/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025 senilai Rp471.358.931,37 yang terdiri dari: (1) senilai Rp10.357.046,43 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp459.734.546,52 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (3) senilai Rp1.267.338,42 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

e) Koreksi atas aset tetap Gedung dan Bangunan yang tercatat ganda berdasarkan hasil pemeriksaan dan koreksi BPK senilai Rp1.997.900.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.081.642.931.941,40	1.073.448.390.089,92	8.194.541.851,48	0,76
Jumlah	**1.081.642.931.941,40**	**1.073.448.390.089,92**	**8.194.541.851,48**	**0,76**

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp1.081.642.931.941,40 atau terjadi Kenaikan sebesar 0,76 persen dari Tahun 2024

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.081.642.931.941,40 Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.194.541.851,48 atau sebesar 0,76 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.073.448.390.089,92. Termasuk dalam klasifikasi Jalan, Irigasi, Dan Jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Adapun rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 76 Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Jalan dan Jembatan	685.188.993.614,93	682.922.520.957,77
2.	Bangunan Air (Irigasi)	370.000.304.486,82	365.770.467.894,50
3.	Instalasi	17.207.764.433,00	15.509.531.831,00
4.	Jaringan	9.245.869.406,65	9.245.869.406,65
Jumlah		**1.081.642.931.941,40**	**1.073.448.390.089,92**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 77 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (*Rupiah*)
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**1.073.448.390.089,92**
a. Penambahan		
1)	Realisasi Belanja Modal	7.906.104.836,00
2)	Mutasi Masuk	1.138.108.022,00
3)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset	1.810.592.154,00
Jumlah		**10.854.805.012,00**
b. Pengurangan		
1)	Mutasi keluar	1.676.246.043,00
2)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset	984.017.117,52
3.	Tambah / (Kurang) Aset Ekstrakomptabel	0,00
Jumlah		**2.660.263.160,52**
Saldo per 31 Desember 2025		**1.081.642.931.941,40**

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2025 adalah sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp10.854.805.012,00 yang terdiri dari:

1) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp7.906.104.836,00;

2) Penambahan Mutasi Masuk aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp1.138.108.022,00 terdiri dari

   a) Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan bersumber dari hibah sebesar Rp287.068.000 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/698/X/TAHUN 2025 Tanggal; 3 Oktober 2025 Tentang Pencatatan Barang Milik Daerah Atas Perolehan Hibah Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke dalam Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025; dan

   b) Penambahan mutasi masuk atas perolehan aset dari utang belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp851.040.022,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp844.515.522,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp5.192.500,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (3) senilai Rp1.332.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

3) Penambahan akibat Reklasifikasi dan Koreksi masuk Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.810.592.154,00 terdiri dari:

   a) Penambahan Jalan Jaringan dan Irigasi yang bersumber dari Reklasifikasi dan koreksi aset dari belanja modal Peralatan Mesin sebesar Rp32.700.600,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;

   b) Penambahan Jalan Jaringan dan Irigasi yang bersumber dari Reklasifikasi dan koreksi aset dari belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.777.891.554,00 terdiri dari: (1) senilai Rp1.239.843.002,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp210.872.780,00

pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (3) senilai Rp327.175.772,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

b. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai senilai Rp2.660.263.160,52 yang terdiri dari:

1) Pengurangan/ Mutasi Keluar Jalan, Irigasi dan Jaringan disebabkan karena pembayaran utang tahun sebelumnya sebesar Rp1.676.246.043,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp1.356.222.867,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp269.245.391,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (3) senilai Rp6.855.000,00 pada Dinas Kesehatan; (4) senilai Rp37.922.785,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (5) senilai Rp6.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

2) Reklasifikasi/Koreksi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp984.017.117,52 yang terdiri dari:

a) Koreksi atas kurang volume belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari temuan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Nomor: 10.B/LHP/XIX.MAM/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025 senilai Rp315.857.039,94 yang terdiri dari: (1) senilai Rp298.176.604,26 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp17.680.435,68 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;

b) Koreksi atas belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak memenuhi definisi aset tetap sebesar Rp284.715.538,00 karena kesalahan belanja yang semestinya masuk pada kategori belanja barang dan jasa yang terdiri dari: (1) senilai Rp148.715.538,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp136.000.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;

c) Koreksi atas belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang merupakan belanja utang barang jasa sebesar Rp106.950.000,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp10.250.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp96.700.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;

d) Mutasi Kurang karena bersumber dari Reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke belanja Peralatan Mesin sebesar Rp44.500.000,00 pada Dinas Kesehatan;

e) Mutasi Kurang karena bersumber dari Reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.490.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

f) Mutasi Kurang karena bersumber dari Reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke belanja Aset Tak Berwujud sebesar Rp7.829.940,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

g) Mutasi Kurang karena bersumber dari Reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke belanja Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp130.637.811,55 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

h) Mutasi Kurang karena bersumber dari Reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp65.898.688,45 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

i) Mutasi Kurang karena bersumber dari Reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp19.138.099,58 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Tetap Lainnya	13.438.459.764,08	13.110.297.264,08	328.162.500,00	2,50
Jumlah	**13.438.459.764,08**	**13.110.297.264,08**	**328.162.500,00**	**2,50**

Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp13.438.459.764,08 atau terjadi kenaikan sebesar 2,50persen dari Tahun 2024

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.438.459.764,08. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp328.162.500,00 atau sebesar 2,50 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.110.297.264,08.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga, hewan, ikan, dan tanaman dan termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Adapun rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 78 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Bahan Perpustakaan	5.674.805.415,08	5.346.642.915,08
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.111.080.453,00	3.111.080.453,00
3.	Tanaman	112.647.000,00	112.647.000,00
4.	Aset Tetap Renovasi	4.539.926.896,00	4.539.926.896,00
Jumlah		**13.438.459.764,08**	**13.110.297.264,08**

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Kelompok aset tetap lainnya terdiri dari bahan perpustakaan, Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, Tanaman dan Aset Tetap Renovasi.

Aset Tetap Renovasi adalah aset yang berasal dari pengakuan belanja modal atas biaya renovasi aset yang bukan milik Satker, namun memenuhi persyaratan kapitalisasi aset.

Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 79 Mutasi Tambah/Mutasi Kurang atas Aset Tetap Lainnya

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (*Rupiah*)
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**13.110.297.264,08**
a. Penambahan		
1)	Realisasi Belanja Modal	328.162.500,00
2)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	0,00
Jumlah		**328.162.500,00**
b. Pengurangan		
1)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	0,00
2)	Tambah / (Kurang) Aset Ekstrakomptabel	0,00
Jumlah		0,00
Saldo per 31 Desember 2025		**13.438.459.764,08**

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya selama TA 2025 adalah sebagai berikut.

a. **Penambahan** Aset Tetap Lainnya senilai Rp328.162.500,00 yang terdiri dari:

1) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 senilai Rp328.162.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

a)Realisasi belanja modal non BOS sebesar Rp322.905.000,00 Tahun Anggaran 2025;

b) Realisasi belanja modal BOS sebesar Rp5.257.500,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.241.180.088,15	16.220.083.821,60	(14.978.903.733,45)	(92,35)
Jumlah	**1.241.180.088,15**	**16.220.083.821,60**	**(14.978.903.733,45)**	**(92,35)**

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 sebesar Rp1.241.180.088,15 atau terjadi penurunan sebesar 92,35 persen dari Tahun 2024

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.241.180.088,15. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.978.903.733,45 atau sebesar 92,35 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.220.083.821,60. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5. 80 Tabel Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (*Rupiah*)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**16.220.083.821,60**
Penambahan	
Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	130.637.811,55
Jumlah	**130.637.811,55**
Pengurangan	
Reklasifikasi Aset Tetap	15.109.541.545,00
Jumlah	**15.109.541.545,00**
Saldo per 31 Desember 2025	**1.241.180.088,15**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Penjelasan penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

a. **Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan** sebesar Rp130.637.811,55 yang terdiri dari:

1) Penambahan akibat Reklasifikasi dan Koreksi masuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp130.637.811,55 terdiri dari Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bersumber dari Reklasifikasi dan koreksi aset dari belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp130.637.811,55 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b. **Pengurangan** Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp15.109.541.545,00 yakni pengurangan akibat reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.109.541.545,00 terdiri dari: (1) senilai Rp15.025.570.450,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah berupa Gedung IBS Lantai 2 Bagian dari Gedung B dan Ruangan Bersalin Lantai 3 dan 4 Bagian dari Gedung B; dan (2) senilai Rp83.971.095,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa Taman Semi Permanen.

Adapun rincian barang Konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 81 Rincian Jenis Barang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Nama SKPD	Tahun Perolehan	Jenis barang	Letak/Lokasi	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2020	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Lurah Labuang Kelurahan Labuang	86.695.657,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2021	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	Kel. Baru Desa Teppo	103.298.916,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2022	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	Kelurahan Galung Kec. Banggae	230.150.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2021	Jembatan Pada Jalan Desa	Dusun Siiyang	155.006.084,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2021	Jembatan Pada Jalan Desa	Dusun Siiyang Desa Adolang Dhua	149.180.000,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2025	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Dusun Leppangan Timur Desa Leppangan	130.637.811,55
7.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	2018	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	Bonde Bonde Kec. Tubo Sendana	94.126.000,00
8.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	2018	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	Desa Tubo Poang Kec. Sendana	94.126.000,00
9.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	2024	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	SDN 15 Ulumanda, Kec. Ulumanda	119.140.032,00
10.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	2024	Pagar Permanen	Kantor Lurah Labuang Kelurahan Labuang	78.819.587,60
	Jumlah				1.241.180.088,15

Pada Simda BMD tidak ada akun yang memuat Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah, namun untuk mengakomodir pencatatannya maka dicatat pada Akun

Kartu Inventaris Barang (KIB) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp85.036.788,03 yakni:

a) Pekerjaan Bangunan Penguat Tebing/Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp65.898.688,45;

b) Pekerjaan Jalan Kabupaten Arteri Kaida-Ratte Lambe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp19.138.099,58.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Akumulasi Penyusutan	1.242.650.937.913,49	1.134.645.761.899,34	108.005.176.014,15	9,52
Jumlah	**1.242.650.937.913,49**	**1.134.645.761.899,34**	**108.005.176.014,15**	**9,52**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp1.242.650.937.913,49 atau terjadi Kenaikan sebesar 9,52 dari Tahun 2024

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.242.650.937.913,49. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp108.005.176.014,15 atau 9,52 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.134.645.761.899,34. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan per 31 Desember 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 82 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan TA 2025 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	443.305.977.555,00	0,00	443.305.977.555,00
2.	Peralatan dan Mesin	373.116.163.248,03	323.782.595.920,03	49.333.567.328,00
3.	Gedung dan Bangunan	805.789.842.264,28	394.353.313.662,46	411.436.528.601,82
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.081.642.931.941,40	522.032.222.469,00	559.610.709.472,40
5.	Aset Tetap Lainnya	13.438.459.764,08	2.482.805.862,00	10.955.653.902,08
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.241.180.088,15	0,00	1.241.180.088,15
	Jumlah	**2.718.534.554.860,94**	**1.242.650.937.913,49**	**1.475.883.616.947,45**

5.3.1.4. Aset Lainnya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Lainnya	10.021.848.510,86	10.595.796.785,87	(573.948.275,01)	(5,42)
Jumlah	**10.021.848.510,86**	**10.595.796.785,87**	**(573.948.275,01)**	**(5,42)**

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.021.848.510,86 atau terjadi penurunan sebesar Rp573.948.275,01 atau 5,42% dari Tahun 2024

Mengacu pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Selain itu, terdapat juga Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Sementara Aset Lain-Lain merupakan aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan dikategorikan rusak berat.

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Tagihan Jangka Panjang	334.283.791,00	334.283.791,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.502.518.065,00	8.725.895.231,00	(3.223.377.166,00)	(36,94)
Aset Lain-Lain	61.531.351.073,79	62.428.242.355,45	(896.891.281,66)	(1,44)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.084.883.983,00)	(5.254.689.810,00)	2.169.805.827,00	(41,29)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(54.261.420.435,93)	(55.667.176.781,58)	1.405.756.345,65	2,52
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	29.242.000,00	(29.242.000,00)	(100,00)
Jumlah	**10.021.848.510,86**	**10.595.796.785,87**	**(573.948.275,01)**	**(5,42)**

Aset tetap yang dikelompokkan sebagai Aset Lainnya merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain yang disebabkan karena kondisi rusak berat. Tidak diketahui keberadaannya serta kondisi lain yang menyebabkan aset tetap tidak bisa dimanfaatkan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp10.021.848.510,86. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp573.948.275,01 dari saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp10.595.796.785,87.

5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Tagihan Jangka Panjang	334.283.791,00	334.283.791,00	0,00	0,00
Jumlah	**334.283.791,00**	**334.283.791,00**	**0,00**	**0,00**

Tagihan Jangka Panjang merupakan tagihan atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara atas sisa kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2005 s.d 2009 yang belum dikembalikan. Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp334.283.791,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan sebagaimana periode pembukuan sebelumnya per 31 Desember 2024 dikarenakan tidak terdapat realisasi pembayaran atas pengembalian saldo kas tersebut sepanjang periode Tahun Anggaran 2025. Adapun rincian Tagihan Jangka Panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 83 Rincian Tagihan Jangka Panjang Tahun 2025

No.	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)
A	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara**	
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Pemuda Olahraga an.Hj.Rukiah Fattah	61.613.763,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang an. Alimuddin, S.Sos	12.772.078,00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja an.Muhammad Ihsan	10.500.000,00
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan an. Akhyar, S.Kel	7.500.000,00
5.	Sekretariat DPRD an.Kaimuddin,S.Sos	195.003.950,00
6.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	34.834.000,00
	Sub Total	**322.223.791,00**
B	**Tuntutan Ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara**	
1.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah an.Ramli Puloo	12.060.000,00
	Sub Total	**12.060.000,00**
TOTAL		**334.283.791,00**

5.3.1.4.2. Aset Tak Berwujud

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Tak Berwujud	5.502.518.065,00	8.725.895.231,00	(3.223.377.166,00)	(36,94)
Amortisasi	(3.084.883.983,00)	(5.254.689.810,00)	2.169.805.827,00	(41,29)
Neto	**2.417.634.082,00**	**3.471.205.421,00**	**(1.053.571.339,00)**	**(30,35)**

Nilai Netto Aset Tak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp2.417.634.082,00 atau terjadi penurunan sebesar 30,35 persen dari Tahun 2024

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah berdasarkan nilai bruto senilai Rp5.502.518.065,00 nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.223.377.166,00 atau sebesar 36,94 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp8.725.895.231,00. Sedangkan jika dilihat dari nilai Neto pada Tahun 2025 Aset Tak Berwujud milik Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp2.417.634.082,00 juga mengalami penurunan senilai Rp1.053.571.339,00 dari nilai 3.471.205.421,00 di Tahun 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 84 Mutasi Tambah/Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud

No	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (*Rupiah*)
Saldo Awal per : 1 Januari 2025		**8.725.895.231,00**
Penambahan		
1)	Mutasi Masuk	40.000.000,00
2)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (ATB)	7.829.940,00
J u m l a h		**47.829.940,00**
Pengurangan		
3)	Mutasi Keluar	3.271.207.106,00
J u m l a h		**3.271.207.106,00**
Saldo per 31 Desember 2025		**5.502.518.065,00**

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

Penambahan Aset Tak Berwujud senilai **Rp47.829.940,00** bersumber dari penambahan dari:

1) Penambahan dari Realisasi belanja modal Aset Tak Berwujud sebesar Rp40.000.000,00;
2) Penambahan yang bersumber dari Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke Belanja Modal Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp7.829.940,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pengurangan Aset Tak Berwujud sebesar **Rp3.271.207.106,00** bersumber dari:

1) Mutasi keluar Aset Tak Berwujud dikarenakan pembayaran utang sebesar Rp40.000.000,00 pada Sekretariat DPRD;
2) Penghapusan Aset Tak Berwujud senilai Rp3.231.207.106,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor:100.3.3.2/768/X/TAHUN 2025 Tanggal: 23 Oktober 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Dari Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2025 yang terdiri dari: (1) senilai Rp110.800.000,00 pada Sekretariat Daerah; (2) senilai Rp91.194.477,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (3) senilai Rp49.800.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (4) senilai Rp1.185.232.500,00 pada Dinas Kesehatan; (5) senilai Rp753.972.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (6) senilai Rp14.077.320,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; (7) senilai Rp3.120.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (8) senilai Rp4.870.372,00 pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan; (9) senilai Rp4.870.372,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan; (10) senilai Rp49.900.000,00 pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian; (11) senilai Rp731.500.657,00 pada Badan Pendapatan Daerah; (12) senilai Rp54.870.372,00 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP; (13) senilai Rp31.999.036,00 pada Badan Perencanaan Daerah; (14) senilai Rp145.000.000,00 pada Badan Kepegawaian dan PSDM.

Untuk mengetahui lebih jelas penyajian nilai Aset Tak Berwujud dengan nilai neto dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 85 Aset Tak Berwujud dan Amortisasi

No.	Nama SKPD	Harga Perolehan 2025 (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku/Neto (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	40.000.000,00	30.833.333,00	9.166.667,00
2.	Dinas PUPR	4.950.029.127,00	2.719.770.043,00	2.230.259.084,00
3.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	49.395.000,00	25.726.563,00	23.668.437,00
4.	Dinas Perhubungan	29.431.438,00	9.197.325,00	20.234.113,00
5.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	182.432.500,00	151.312.761,00	31.119.739,00
6.	Badan Pendapatan Daerah	84.600.000,00	84.600.000,00	-
7.	Badan Perencanaan Daerah	130.000.000,00	35.208.333,00	94.791.667,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan	36.630.000,00	28.235.625,00	8.394.375,00
Jumlah Nilai Perolehan		**5.502.518.065,00**	**3.084.883.983,00**	**2.417.634.082,00**

Bahwa untuk nilai Aset Tak Berwujud (ATB) saldo per 31 Desember 2025 dengan nilai perolehan senilai Rp5.502.518.065,00 dan Amortisasi sebesar Rp3.084.883.983,00. Berikut rincian jenis barang aset tak berwujud pada masing-masing SKPD:

Tabel 5. 86 Rincian Jenis Barang Aset Tak Berwujud

No.	Nama SKPD	Jenis Barang	Jumlah barang (Buah)	Harga Perolehan 2025 (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	*Software* Lainnya	1	40.000.000,00
2.	Dinas PUPR	Kajian	40	4.950.029.127,00
3.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kajian Lainnya	1	49.395.000,00
4.	Dinas Perhubungan	*Software*	1	29.431.438,00
5.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	Kajian	4	42.678.500,00
6.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	*Software*	18	139.754.000,00
7.	Badan Pendapatan Daerah	*Software*	18	84.600.000,00
8.	Badan Perencanaan Daerah	*Software*	1	130.000.000,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan	*Software*	1	36.630.000,00
		Jumlah	**68**	**5.502.518.065,00**

5.3.1.4.3. Aset Lain-lain

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Lain-lain	**61.531.351.073,79**	**62.428.242.355,45**	**(896.891.281,66)**	**(1,44)**
Aset Rusak Berat/Usang	59.891.516.938,76	61.262.314.502,41	(1.370.797.563,65)	**(2,24)**
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(54.261.420.435,93)	(55.667.176.781,58)	1.405.756.345,65	**(2,53)**
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.639.834.135,03	1.165.927.853,04	473.906.281,99	**40,65**
Jumlah (Neto)	**7.269.930.637,86**	**6.761.065.573,87**	**508.865.063,99**	**7,53**

Aset lain (Aset Rusak Berat/Usang) tahun 2025 sebesar Rp59.891.516.938,76 nilai Netto Rp7.269.930.637,86 mengalami kenaikan sebesar 7,53 persen dari tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp62.428.242.355,45 nilai Netto Rp6.761.065.573,87

Aset Lain-lain Tahun 2025 dengan nilai bruto senilai Rp61.531.351.073,79 yang terdiri dari: (1) Aset rusak berat/usang senilai Rp59.891.516.938,76 dan (2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah senilai Rp1.639.834.135,03 atau mengalami penurunan senilai Rp896.891.281,66 atau 1,44 persen daripada saldo bruto pada Tahun 2024 yang mencatat senilai Rp62.428.242.355,45.

Aset Lain-lain pada Tahun 2025 dengan nilai Neto senilai Rp7.269.930.637,86 yang terdiri dari: (1) nilai Neto Aset rusak berat/usang senilai Rp5.630.096.502,83 dan (2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah senilai Rp1.639.834.135,03 atau mengalami kenaikan senilai Rp473.906.281,99 atau 40,65 persen dari nilai Aset Lain-lain pada Tahun 2024 senilai Rp1.165.927.853,04.

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional merupakan nilai aset hasil koreksi atas kekurangan volume, adapun rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 87 Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

No.	Uraian	Tahun	Harga Perolehan (Rp)
1.	Kekurangan Volume atas Belanja pengadaan Peralatan dan Mesin	2022	244.200.000,00
2.	Kekurangan Volume atas Belanja pengadaan Gedung dan Bangunan	2022	36.632.630,12
3.	Kekurangan Volume atas Belanja pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2022	101.017.242,51
4.	Kekurangan Volume atas Belanja pengadaan Gedung dan Bangunan	2023	361.814.382,84
5.	Kekurangan Volume atas Belanja pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2023	377.731.636,12
6.	Kekurangan Volume atas Belanja pengadaan Gedung dan Bangunan	2024	359.039.458,04
7.	Kekurangan Volume atas Belanja pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2024	159.398.785,40
Jumlah			**1.639.834.135,03**

Pemerintah Kabupaten Majene belum sepenuhnya melakukan penghapusan barang/aset rusak berat disebabkan karena beberapa aset rusak berat berupa kendaraan dinas memerlukan proses penilaian dari penilai pemerintah dalam hal ini KPKNL dan selanjutnya dilakukan lelang secara terbuka dan itu membutuhkan anggaran, sedangkan anggaran tidak tersedia, adapun sebab lain pada saat akan dilakukan proses pengecekan fisik atas barang yang diusulkan untuk dihapus SKPD (bendahara barang) tidak memperlihatkan fisik barang rusak berat tersebut.

Tabel 5. 88 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	0,00	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	49.433.785.042,33	47.313.466.978,03	2.120.318.064,30
3.	Gedung dan Bangunan	3.502.155.685,03	2.469.730.416,00	1.032.425.269,03
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.531.912.849,50	3.528.663.410,00	2.003.249.439,50
5.	Aset Tetap Lainnya	1.423.663.361,90	949.559.631,90	474.103.730,00
Jumlah		**59.891.516.938,76**	**54.261.420.435,93**	**5.630.096.502,83**

5.3.1.4.4. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	29.242.000,00	(29.242.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	**29.242.000,00**	**(29.242.000,00)**	**(100,00)**

Kas yang Dibatasi Penggunaannya berupa *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp29.242.000,00 atau 100,00 persen dari nilai Kas yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2024 senilai Rp29.242.000,00.

5.3.1.5. Properti Investasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Properti Investasi	10.815.873.221,00	0,00	10.815.873.221,00	0,00
Jumlah	**10.815.873.221,00**	**0,00**	**10.815.873.221,00**	**0,00**

Properti investasi adalah aset berupa tanah, bangunan, atau keduanya yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai aset (*capital gain*), atau keduanya, bukan untuk digunakan sendiri, produksi, atau dijual dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Properti ini sering dianggap sebagai instrumen jangka panjang karena nilainya cenderung stabil dan meningkat seiring waktu. Properti investasi melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 (PSAP 17) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021. Kebijakan ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti yang bertujuan menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai aset, atau keduanya, terpisah dari aset tetap operasional.

Properti Investasi Tanah pada tahun 2025 senilai Rp10.815.873.221,00 terdapat pada Sekretariat Daerah senilai Rp10.749.317.900,00 dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp66.555.321,00. Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 89 Rincian Properti Investasi

SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1.136.800.000,00	Pusat Pertokoan IV
Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	3.370.380.000,00	Pusat Pertokoan I
Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	981.000.000,00	Pusat Pertokoan II
Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	564.750.000,00	Pusat Pertokoan III
Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Gudang	1.126.387.900,00	Gedung Assamalewuang
Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.570.000.000,00	Perwakilan Pemda Majene
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	51.387.400,00	Tanah Milik Dinas Koperasi/Tempat Pengisian Galon
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	15.167.921,00	Tanah Milik Dinas Koperasi
Jumlah		**10.815.873.221,00**	

Tanah dan Bangunan Pusat pertokoan adalah tempat yang digunakan untuk aktivitas jual beli dan setiap penggunaan Ruko tersebut dikenakan retribusi atas pemanfaatan aset daerah, Gedung Assamalewuang difungsi untuk kegiatan-kegiatan bersifat seremonial yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja dan ditarik sewa atas penggunaan gedung berdasarkan acara apa yang dilaksanakan di gedung tersebut seperti acara pernikahan, wisuda atau pertemuan lainnya, dan dua tanah Milik Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dalam kondisi idle belum ada penentuan penggunaannya.

5.3.2. KEWAJIBAN

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Kewajiban	50.294.367.073,00	69.521.069.677,33	(19.226.702.604,33)	(27,66)
Jumlah	**50.294.367.073,00**	**69.521.069.677,33**	**(19.226.702.604,33)**	**(27,66)**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.294.367.073,00 yang mengalami penurunan sebesar (Rp19.226.702.604,33) atau sebesar 27,66 persen . persen dari tahun sebelumnya

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp50.294.367.073,00 sedangkan pada periode sebelumnya pada Tahun 2024 senilai Rp69.521.069.677,33. Saldo kewajiban tersebut mengalami penurunan senilai Rp19.226.702.604,33 atau sebesar 27,66 persen dari tahun sebelumnya. Kewajiban terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek senilai Rp50.294.367.073,00 dan Kewajiban Jangka Panjang senilai Rp0,00. Kewajiban Jangka Pendek yang mengalami Kenaikan yaitu Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan pendapatan diterima dimuka dan Kewajiban Jangka Pendek yang mengalami Penurunan yaitu Utang Belanja.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Kewajiban Jangka Pendek	50.294.367.073,00	69.521.069.677,33	(19.226.702.604,33)	(27,66)
Jumlah	**50.294.367.073,00**	**69.521.069.677,33**	**(19.226.702.604,33)**	**(27,66)**

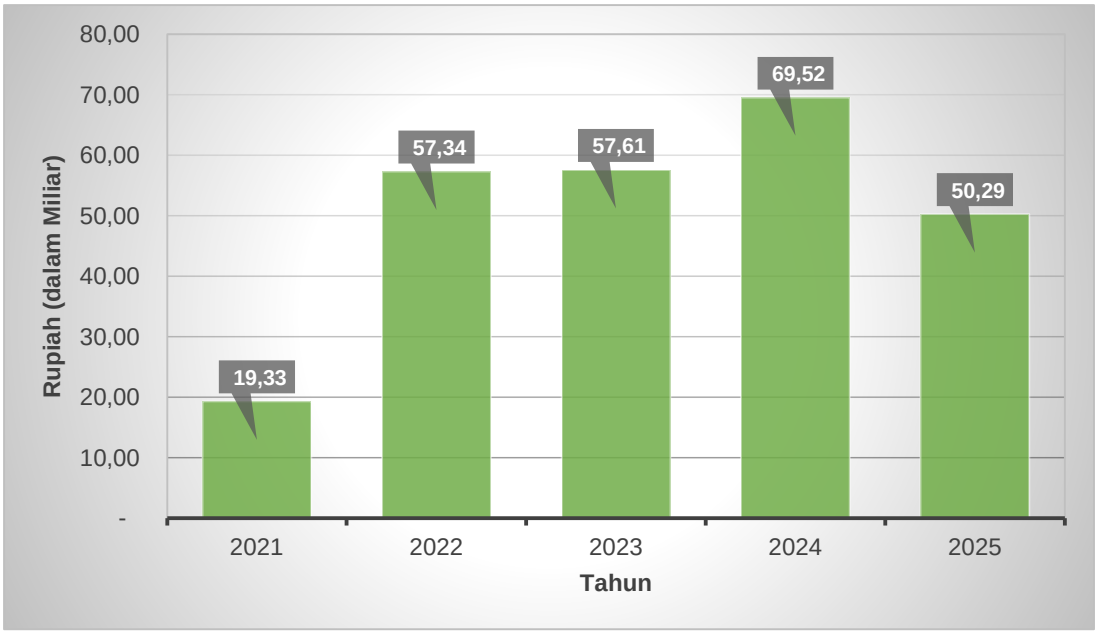
Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.294.367.073,00 yang mengalami penurunan sebesar (Rp19.226.702.604,33) atau sebesar 27,66 persen dari tahun sebelumnya

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp50.294.367.073,00 yang terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga senilai Rp40.545.392, Pendapatan diterima dimuka senilai Rp82.500.000 dan Utang belanja senilai Rp50.171.321.681,00 dan Tahun 2024 senilai Rp69.521.069.677,33. Saldo tersebut mengalami penurunan senilai Rp19.226.702.604,33 atau sebesar 27,66 persen. Berikut tabel rincian kewajiban jangka pendek tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 90 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Kewajiban Jangka Pendek					
1	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	40.545.392,00	13.841.239,00	26.704.153,00	192,93
2	Pendapatan Diterima Dimuka	82.500.000,00	3.583.333,33	78.916.666,67	2202,32
3	Utang Belanja	50.171.321.681,00	69.503.645.105,00	(19.332.323.424,00)	(27,81)
	Jumlah	**50.294.367.073,00**	**69.521.069.677,33**	**(19.226.702.604,33)**	**(27,66)**

Tren Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. 26 Komposisi Kewajiban Jangka Pendek 2025

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar. Dan kewajiban pemerintah yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman dalam negeri (obligasi). Pinjaman lembaga internasional, Pinjaman dari pemerintah lain, atau pinjaman lembaga keuangan dalam negeri. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Karakteristik kewajiban jangka pendek yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang relatif cepat. Maka kewajiban jangka pendek menjadi salah satu indikator dalam analisis laporan keuangan pada aspek solvabilitas.

1) Analisis Rasio Solvabilitas – *Debt to Equity*

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki pemerintah. Baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset pemerintah dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung pemerintah dibandingkan dengan asetnya. Rasio solvabilitas – *Debt to Equity* dihitung dengan membandingkan antara total utang dengan total ekuitas. Rasio solvabilitas – *Debt to Equity* Pemerintah Kabupaten Majene selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 91 Tren Rasio Solvabilitas – *Debt to Equity* Kabupaten Majene 2021-2025

Tahun	Utang (Rp)	Ekuitas (Rp)	*Debt to Equity Ratio*
2021	19.331.177.833,82	1.591.813.548.616,05	0,0121
2022	57.415.812.749,33	1.500.805.258.062,52	0,0382
2023	57.608.887.592,45	1.628.208.973.061,58	0,0354
2024	69.521.069.677,33	1.602.237.782.484,35	0,0434
2025	50.294.367.073,00	1.565.032.932.878,19	0,0321

Rasio solvabilitas *Debt to Equity* Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 0,0321 dan jika dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,0434 maka diketahui bahwa terdapat penurunan rasio solvabilitas *Debt to Equity* sebesar 0,0113. Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan utang Tahun 2025 yang bersumber dari pembayaran kewajiban jangka pendek Tahun 2025. Adapun rasio solvabilitas *Debt to Equity* paling rendah terjadi pada Tahun Anggaran 2021. Namun secara umum rasio solvabilitas *Debt to Equity* Pemerintah Kabupaten Majene masih relatif sangat kecil atau dapat dikatakan dalam batas aman.

2) Analisis Rasio Solvabilitas – *Debt to Assets*

Rasio solvabilitas *Debt to Assets* dihitung dengan membandingkan antara total utang dengan total aset pemerintah daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang Pemerintah Daerah yang berpengaruh terhadap pembiayaan dari aset. Semakin tinggi rasio ini semakin besar risiko yang dihadapi. Sehingga dengan demikian, rasio ini merupakan indikator sejauh mana utang Pemerintah Daerah dapat ditutupi dengan aset yang dimilikinya. Tabel di

bawah ini merupakan daftar rasio solvabilitas – *Debt to Assets* Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2025.

Tabel 5. 92 Tren Rasio Solvabilitas – *Debt to Assets* Kabupaten Majene 2021-2025

Tahun	Utang (Rp)	Aset (Rp)	*Debt to Assets Ratio*
2021	19.331.177.833,82	1.611.222.196.425,87	0,0120
2022	57.415.812.749,33	1.558.221.070.811,85	0,0368
2023	57.608.887.592,45	1.685.817.860.654,03	0,0342
2024	69.521.069.677,33	1.671.758.852.161,68	0,0415
2025	50.294.367.073,00	1.615.327.299.951,19	0,0311

Dalam kurun waktu lima Tahun, rasio solvabilitas *Debt to Assets* Pemerintah Kabupaten Majene mengalami peningkatan tajam Tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 0,0248 poin hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah utang yang cukup signifikan. Antara Tahun 2021 hingga 2022 dan terjadi penurunan pada Tahun 2023 sebesar 0,0026, dan selanjutnya kenaikan rasio solvabilitas *Debt to Assets* kembali terjadi Tahun 2024, dan pada Tahun 2025 mengalami Penurunan sebesar 0,0104, Adapun rasio paling rendah terjadi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 0,0120 dan tertinggi Tahun 2024 yaitu sebesar 0,0415. Berdasarkan rasio tersebut diketahui bahwa aset Pemerintah Kabupaten Majene dapat menjamin utang yang dimiliki.

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	40.545.392,00	13.841.239,00	26.704.153,00	192,93
Jumlah	**40.545.392,00**	**13.841.239,00**	**26.704.153,00**	**192,93**

Utang PFK menurut PSAP 09 paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum. Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp40.545.392,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tersebut terdapat pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga yakni SMP Negeri 6 Majene, SD 7 Taukong, SD 39 Manyamba dan SD 26 Adolang Adapun Rincian utang Perhitungan Pihak ketiga untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Lampiran 6** dalam catatan laporan keuangan ini. Berikut daftar utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025.

Tabel 5. 93 Daftar Utang PFK per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	26.366.684,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)	10.507.326,00
3	Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)	2.450.551,00
4	Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)	18.000,00
5	Iuran Jaminan Kesehatan	1.202.831,00
	Jumlah	**40.545.392,00**

Adapun rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 5. 94 Rincian utang perhitungan pihak ketiga

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Utang Iuran jaminan kesehatan	Utang PPh21 (Rp)	Utang PPh 22 (Rp)	Utang PPh 23 (Rp)	Utang PPN (Rp)	Total Utang PFK (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	0,00	1.030.050,00	0,00	18.000,00	2.115.600,00	3.163.650,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	5.089.970,00	1.657.034,00	0,00	19.259.417,00	26.006.421,00
3.	Puskesmas Lembang	518.070,00	1.295.175,00	0,00	0,00	0,00	1.813.245,00
4.	Puskesmas Totoli	684.761,00	809.393,00	0,00	0,00	0,00	1.494.154,00
5.	Puskesmas Sendana I	0,00	0,00	184.107,00	0,00	522.654,00	706.761,00
6.	Puskesmas Malunda	0,00	2.282.738,00	609.410,00	0,00	4.469.013,00	7.361.161,00
	Jumlah	**1.202.831,00**	**10.507.326,00**	**2.450.551,00**	**18.000,00**	**26.366.684,00**	**40.545.392,00**

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Diterima Dimuka				
- **Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi**	82.500.000,00	3.583.333,33	78.916.666,67	2202,32
Jumlah	**82.500.000,00**	**3.583.333,33**	**78.916.666,67**	2202,32

Pendapatan Diterima Dimuka atas retribusi penyewaan kekayaan sebesar Rp82.500.000,00 tercatat pada Sekretariat Daerah.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di kas daerah tetapi belum menjadi hak Pemerintah Daerah karena masih terdapat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di kas daerah tersebut.

Dalam pengelolaan dan pencatatan pendapatan daerah yang berlangsung di Kabupaten Majene, transaksi penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka diberlakukan pada 2 (dua) sumber pendapatan yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Pendapatan Diterima Dimuka Pajak, wajib pajak menyetorkan beban pajak kepada Pemerintah Daerah atas suatu hak yang dapat dijamin dan difasilitasi oleh pemerintah. Begitu juga dengan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi di mana masyarakat membayarkan retribusi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka memperoleh suatu hak atas barang/jasa yang dimiliki pemerintah. Pendapatan Diterima Dimuka pada Tahun 2025 hanya terdapat pada satu SKPD pada Sekretariat Daerah yaitu penyewaan sebagian tanah dari untuk fasilitas ATM kepada Bank Sulselbar Cabang Majene dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Diketahui terdapat Pendapatan Diterima Dimuka dari Retribusi Daerah tercatat pada Sekretariat Daerah atas sewa lahan dan bangunan, per 31 Desember 2025 terdapat saldo senilai Rp82.500.000,00. Saldo tersebut dicatat dan diakui atas Pendapatan Diterima Dimuka yang timbul pada TA 2025. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 95 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
1.	Sekretariat Daerah	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Atas Sewa Tanah Dan Gedung	82.500.000,00	3.583.333,33	78.916.666,67	2202,32
Jumlah			**82.500.000,00**	**3.583.333,33**	**78.916.666,67**	2202,32

Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan perjanjian sewa lahan yang dikelola tercatat pada Sekretariat Daerah terdiri atas PT. Bank Sulselbar Cabang Majene dengan Kontrak Nomor 134.4/08/Ks-Lembaga/V/2025 Tanggal 05 Mei 2025 menghasilkan pendapatan diterima dimuka senilai Rp80.000.000,00 sampai per 31 Desember 2025. Begitu pun pada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Kontrak Nomor 134.4/04/Ks-Lembaga/II/2025 Tanggal 19 Februari 2025 juga menghasilkan pendapatan diterima dimuka senilai Rp2.500.000,00 per 31 Desember 2025. Sehingga total Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp82.500.000,00.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan perjanjian sewa lahan yang dikelola dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 96 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Perjanjian Sewa Lahan

No.	Nama Penyewa	Waktu Perjanjian	Sewa/Tahun (Rp)	Jumlah/Total (Rp)	Pendapatan Diterima Muka (Rp)
1	PT Bank Rakyat Indonesia a. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Halaman Kantor Bupati Majene b. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Ex. Kantor Dispenda Jl. Sultan Hasanuddin, Lembang c. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan RSUD Majene Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Banggae	19/02/2025 1 Tahun (19 Februari 2025 s/d 19 Februari 2026	30.000.000,00	30.000.000,00	2.500.000,00
2	PT Bank SulSelbar Cab,Majene a.Sewa Menyewa lahan Pembangunan ATM pada lahan Tanah Halaman Depan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga. b. Sewa menyewa Lahan Pembangunan ATM pada lahan tanah Halaman kantor Satpol PP Kab.Majene	05/05/2026 5 Tahun (1 Januari 2025 s/d 1 Januari 2030)	20.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00
Jumlah			**50.000.000,00**	**130.000.000,00**	**82.500.000,00**

5.3.2.1.3. Utang Belanja

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Utang Belanja	50.171.321.681,00	69.503.645.105,00	(19.332.323.424,00)	(27,81)
Jumlah	50.171.321.681,00	**69.503.645.105,00**	**(19.332.323.424,00)**	**(27,81)**

Utang Belanja per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp50.171.321.681,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 senilai Rp50.171.321.681,00 per 31 Desember 2024 senilai Rp69.503.645.105,00 di mana terjadi penurunan senilai Rp19.332.323.424,00 atau 27,81 persen. Utang senilai Rp50.171.321.681,00 merupakan sisa utang Tahun 2020 hingga 2024 serta penambahan utang baru pada Tahun 2025 yang hingga akhir periode belum terbayarkan, berikut rincian utang per jenis belanja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025:

Tabel 5. 97 Rincian Utang Perjenis Belanja Tahun 2020 s.d. 2025

No	Utang Perjenis Belanja	Tahun						Total
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00	3.396.795.472,00	3.746.346.206,00	4.340.068.856,00	304.917.988,00	11.788.128.522,00
2	Utang Belanja Barang Jasa	0,00	0,00	2.023.878.411,00	57.123.600,00	9.087.703.686,00	20.444.055.196,00	31.612.760.893,00
3	Utang Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227.900,00	0,00	17.227.900,00
4.	Utang Belanja Modal	2.000.000,00	0,00	52.186.700,00	17.710.555,00	4.340.578.639,00	2.080.728.472,00	6.493.204.366,00
5.	Utang Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	260.000.000,00	0	0	0	260.000.000,00
Total		**2.000.000,00**	**0,00**	**5.732.860.583,00**	**3.821.180.361,00**	**17.785.579.081,00**	**22.829.701.656,00**	**50.171.321.681,00**

Rekapitulasi Utang Perjenis Belanja Masing-Masing SKPD Per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 7 ,** Adapun rincian utang belanja berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 98 Utang Belanja Menurut Jenisnya s.d. 31 Desember 2025

No.	Jenis	Total Utang s.d 2025 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	11.788.128.522,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	31.612.760.893,00
3	Utang Belanja Hibah	17.227.900,00
4	Utang Belanja Modal Tanah	5.956.700,00
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.509.220.870,00
6	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.748.863.551,00
7	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.099.163.245,00
8	Utang Belanja Tak Terduga	260.000.000,00
9	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	130.000.000,00
Jumlah		**50.171.321.681,00**

Untuk Lampiran Daftar Jenis Utang, Tahun, dan SKPD per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 8**

Kewajiban jangka pendek tersebut berdasarkan kriterianya disajikan pada jenis Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang Belanja senilai Rp50.171.321.681,00 merupakan sisa utang tahun 2020 hingga tahun 2025. Dalam Utang Belanja terdapat sisa Utang Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp1,00 hal ini dikarenakan saldo Utang Bantuan Keuangan tahun lalu senilai Rp6.957.392.386,00 dilakukan permintaan pencairan SP2D Senilai Rp6.957.392.385,00 berdasarkan SP2D No. 76.05/04.0/000002/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/ M/2/2025 tanggal 15 Januari 2025 dan utang yang diakui pada Tahun 2025 berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat Nomor 700.07/3/2026 tanggal 02 Maret 2026, LHR Nomor 700.08/3/2026 tanggal 02 Maret 2026, dan LHR Nomor: 700.06/III/2025 tanggal 02 Maret 2025.

Dan adapun Rincian jumlah utang belanja per SKPD dan pembayarannya sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 9.**

Berikut perkembangan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2022 sampai Tahun 2025 yang disajikan pada grafik berikut:



Grafik 5. 27 Perkembangan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya 2021-2025

5.3.3. EKUITAS

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Ekuitas	1.565.032.932.878,19	1.602.237.782.484,35	(37.204.849.606,16)	(2,32)
Jumlah	**1.565.032.932.878,19**	**1.602.237.782.484,35**	**(37.204.849.606,16)**	**(2,32)**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Posisi ekuitas Pemerintah Daerah pada setiap periodenya dapat dijadikan indikator penilaian kinerja keuangan maupun operasional Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Utamanya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp1.565.032.932.878,19 atau turun sebesar 2,32 persen dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2024 yang tercatat senilai Rp1.602.237.782.484,35. Ekuitas tersebut merupakan Ekuitas Awal yang ditambah/dikurang Surplus/Defisit LO. Kemudian ditambah/dikurang Koreksi Ekuitas serta Perubahan Kebijakan Mendasar Lainnya. Rincian saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 99 Saldo Ekuitas 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Ekuitas Awal	**1.602.237.782.484,35**
Surplus / Defisit-LO	(37.794.744.902,82)
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	589.895.296,66
Ekuitas Akhir	**1.565.032.932.878,19**

Pada periode Tahun 2025, terdapat perubahan-perubahan yang menambah dan mengurangi ekuitas pemerintah daerah. Perubahan tersebut yaitu karena adanya Defisit-LO dan terdapat koreksi-koreksi ekuitas SKPD yang disajikan pada akun Koreksi Ekuitas Lainnya. Koreksi Ekuitas disebabkan oleh perubahan nilai aset tetap akibat reklas dan mutasi antar SKPD, perubahan nilai piutang, perubahan nilai utang. Penjelasan atas Koreksi Ekuitas Lainnya dapat dilihat pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

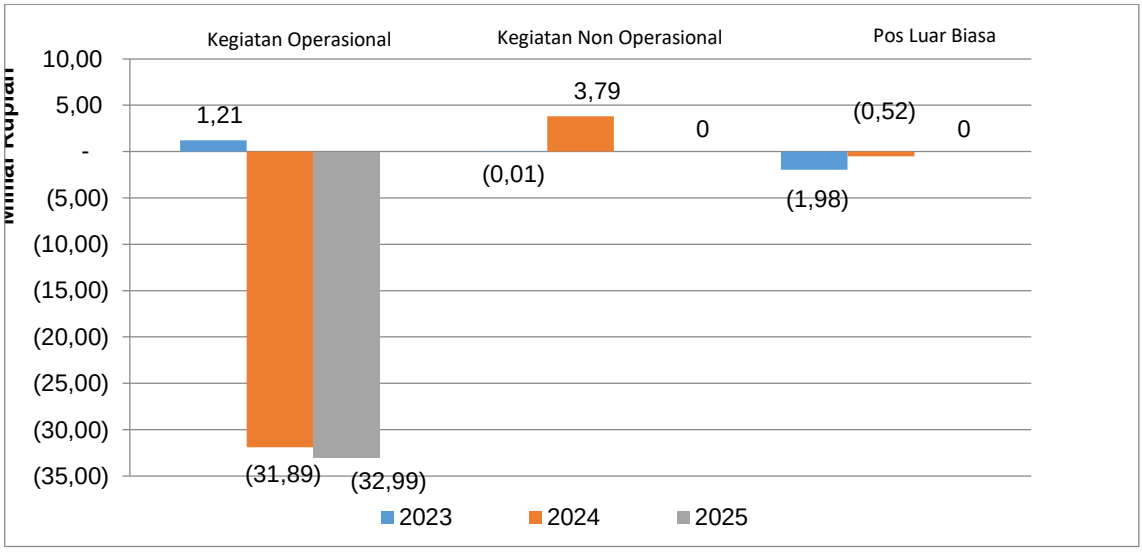
Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2025 tercatat sebesar (Rp37.794.744.902,82)

Laporan operasional adalah salah satu unsur dalam laporan keuangan yang menggambarkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO.

Penyelenggaraan operasional Pemerintah Kabupaten Majene selama Tahun pelaporan 2025 mencatatkan Defisit-LO senilai (Rp37.794.744.902,82) dimana nilai ini mengalami kenaikan senilai (Rp9.183.506.356,49) atau sebesar 32,10 persen dibandingkan Defisit-LO pada Tahun 2024 senilai (Rp28.611.238.546,33). Surplus/(Defisit) LO Tahun 2025 terdiri dari Defisit

dari Kegiatan Operasional senilai (Rp32.988.599.380,25) dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai (Rp2.306.566.437,57) kemudian Pos Luar Biasa tercatat senilai (Rp2.499.579.085,00).

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 diperoleh dari Pendapatan Operasional senilai Rp847.706.615.831,17 dan Beban Operasional senilai Rp880.695.215.211,42. Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2025 tercatat senilai (Rp2.306.566.437,57) yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencatatkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp3.792.996.469,07. Laporan Operasional Tahun 2025 menyajikan angka Tahun 2024 sebagai pembanding. Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2023 (dalam miliar) dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 28 Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2023-2025

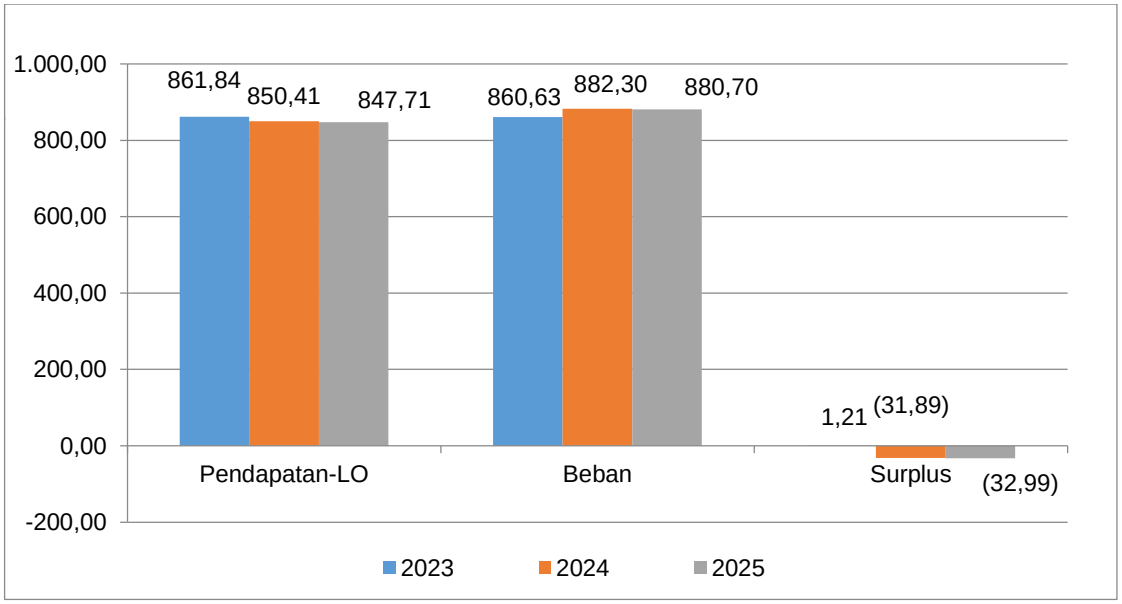
5.4.1. Kegiatan Operasional

Defisit dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Majene tercatat sebesar (Rp32.988.599.380,25) dari Pendapatan Operasional sebesar Rp847.706.615.831,17 dan Beban Operasional sebesar Rp880.695.215.211,42

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah tercermin dalam Pendapatan – LO, Beban – LO, dan Surplus/Defisit Operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Operasional secara keseluruhan merupakan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO, Pendapatan Transfer – LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO. Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BLUD, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain.

Selama periode Tahun 2025, nilai defisit dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Majene tercatat senilai (Rp32.988.599.380,25) yang diperoleh dari Pendapatan Operasional senilai Rp847.706.615.831,17 dan Beban Operasional senilai Rp880.695.215.211,42.

Perbandingan pendapatan, beban, dan surplus dari kegiatan operasional Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 29 Kegiatan Operasional 2023-2025

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2023-2025, Beban Operasional pada Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data Tahun 2024, dan Pendapatan-LO 2025 juga mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional, Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 sudah optimal dalam merealisasikan pendapatan daerah. Dari perbandingan data tersebut bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene masih perlu mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang menimbulkan beban di periode berjalan. Pendapatan-LO Tahun 2025 mengalami penurunan pada kelompok Pendapatan Transfer tetapi mengalami kenaikan signifikan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

5.4.1.1. Pendapatan – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan – LO	847.706.615.831,17	850.414.371.243,55	(2.707.755.412,38)	(0,32)
Jumlah	**847.706.615.831,17**	**850.414.371.243,55**	**(2.707.755.412,38)**	**(0,32)**

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp847.706.615.831,17

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah. Yang dihasilkan oleh transaksi operasional yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

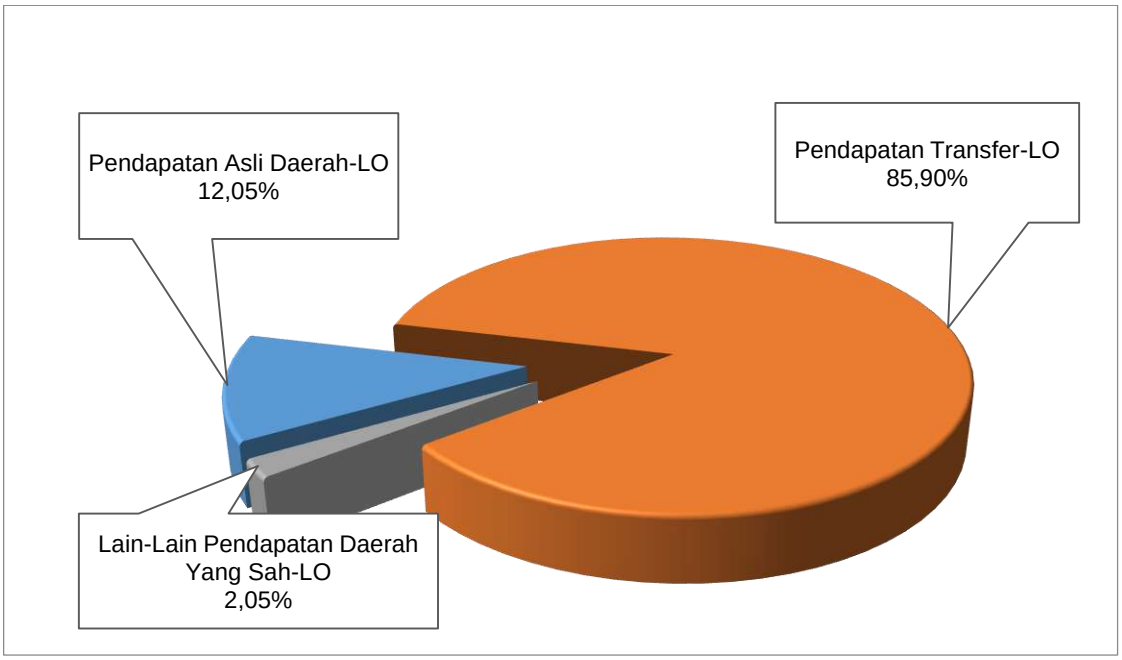
Pendapatan – LO Tahun Anggaran 2025 senilai Rp847.706.615.831,17 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO senilai Rp102.127.985.123,17, Pendapatan Transfer – LO senilai Rp728.196.526.569,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sampai dengan akhir

TA 2025 senilai Rp17.382.104.139,00. Rincian Pendapatan – LO TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 100 Rincian Pendapatan LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	**102.127.985.123,17**	**92.982.251.284,55**
Pendapatan Pajak Daerah – LO	16.953.772.894,25	12.164.320.098,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	75.282.747.855,33	75.608.092.284,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	3.534.611.072,00	3.327.191.183,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	6.356.853.301,59	1.882.647.719,55
PENDAPATAN TRANSFER – LO	**728.196.526.569,00**	**756.198.582.685,00**
Pendapatan Transfer Pem. Pusat – Dana Perimbangan –LO	712.366.763.533,00	727.357.034.110,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	15.829.763.036,00	28.841.548.575,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	**17.382.104.139,00**	**1.233.537.274,00**
Pendapatan Hibah – LO	17.382.104.139,00	1.233.537.274,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO	0,00	0,00
Jumlah	**847.706.615.831,17**	**850.414.371.243,55**

Komposisi Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Majene pada TA 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5. 30 Komposisi Pendapatan – LO TA 2025

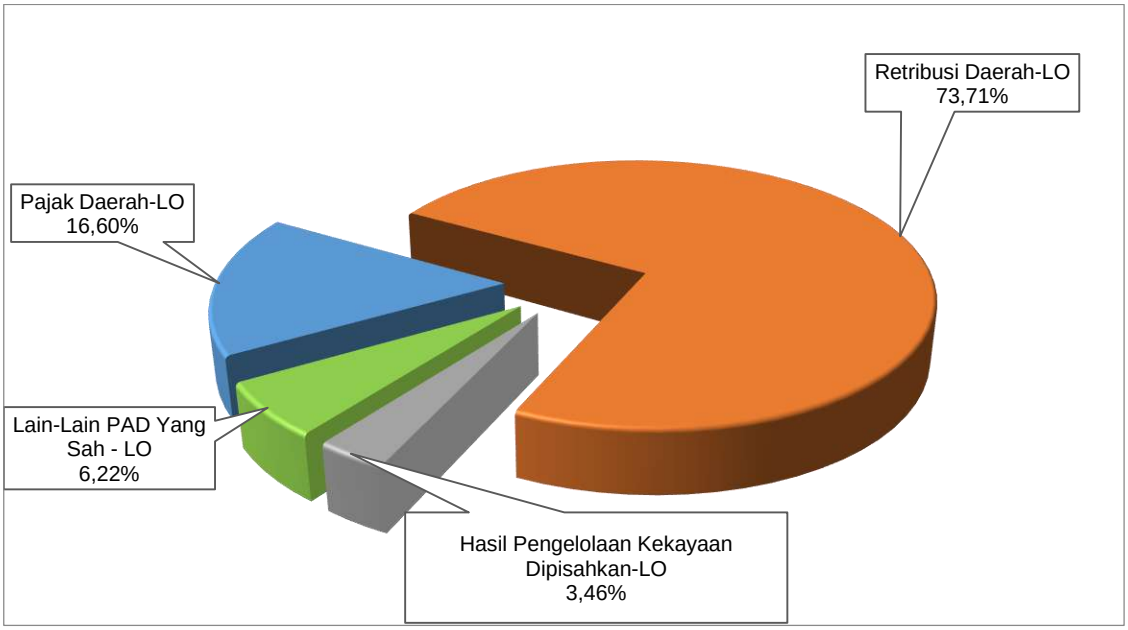
5.4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional pada TA 2025 senilai Rp102.127.985.123,17. Nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp9.145.733.838,62 atau sebesar 9,84 persen dibanding Tahun 2024 di mana tercatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO terealisasi senilai Rp92.982.251.284,55. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5. 101 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	16.953.772.894,25	12.164.320.098,00
Pendapatan Retribusi Daerah	75.282.747.855,33	75.608.092.284,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.534.611.072,00	3.327.191.183,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.356.853.301,59	1.882.647.719,55
Jumlah	**102.127.985.123,17**	**92.982.251.284,55**

Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada TA 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 31 Komponen Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Majene TA 2025

Secara rinci tentang Pendapatan Asli Daerah – LO dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Uraian	Jumlah (Rp)
Pajak Daerah – LO	**16.953.772.894,25**
Pajak Reklame – LO	250.161.000,00
Pajak Air Tanah	5.717.423,08
Pajak Sarang Burung Walet – LO	1.900.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	273.339.345,17
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO	1.528.417.855,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	621.498.100,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	8.165.779.643,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	3.509.694.628,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	2.597.264.900,00
Retribusi – LO	**75.282.747.855,33**
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	71.448.770.629,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	352.819.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	730.355.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	955.453.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	15.150.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	398.825.333,33
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	131.350.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	219.829.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	402.929.900,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	19.008.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	608.257.993,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	**3.534.611.072,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – LO	3.534.611.072,00
Lain-Lain PAD yang Sah – LO	**6.356.853.301,59**
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya – LO	10.000.000,00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain – LO	20.449.800,00
Jasa Giro pada Kas Daerah – LO	1.003.966.443,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah – LO	285.582.324,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – LO	1.322.515.802,59
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran – LO	40.000,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO	1.597.444,00
Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	1.509.686,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	32.509.029,00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	197.126,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	3.678.485.647,00
Jumlah	**102.127.985.123,17**

5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Transfer	728.196.526.569,00	756.198.582.685,00	(28.002.056.116,00)	(3,70)
Jumlah	**728.196.526.569,00**	**756.198.582.685,00**	**(28.002.056.116,00)**	**(3,70)**

Pendapatan Transfer – LO per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp728.196.526.569,00 Pendapatan jenis ini mengalami penurunan senilai Rp28.002.056.116,00 atau 3,70 persen dari tahun sebelumnya. Realisasi Pendapatan Transfer – LO dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 102 Rincian Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Jumlah (Rp)
a) Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO	**712.366.763.533,00**
1) **DBH Pajak-LO**	3.519.130.300,00
2) **DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO**	1.578.121.000,00
3) **DBH Lainnya-LO**	508.075.000,00
4) **DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO**	415.300.422.500,00
5) **DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO**	129.076.214.460,00
6) **DAK Fisik-LO**	24.111.344.842,00
7) **DAK Nonfisik-LO**	138.273.455.431,00
b) Transfer Antar Daerah – LO	**15.829.763.036,00**
1) **Pendapatan Bagi Hasil – LO**	15.829.763.036,00
Jumlah	**728.196.526.569,00**

5.4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	17.382.104.139,00	1.233.537.274,00	16.148.566.865,00	1.309,13
Jumlah	**17.382.104.139,00**	**1.233.537.274,00**	**16.148.566.865,00**	**1.309,13**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp17.382.104.139,00 sedangkan pada Tahun 2024 tercatat senilai Rp1.233.537.274,00. Pendapatan ini mengalami kenaikan signifikan senilai Rp16.148.566.865,00 atau 1.309,13 persen dari tahun sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari penambahan hibah aset yang berasal dari beberapa SKPD, yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menerima hibah senilai Rp15.772.712.139,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan senilai Rp744.392.000,00 dan Rp575.000.000,00 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga senilai Rp290.000.000,00. Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 103 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

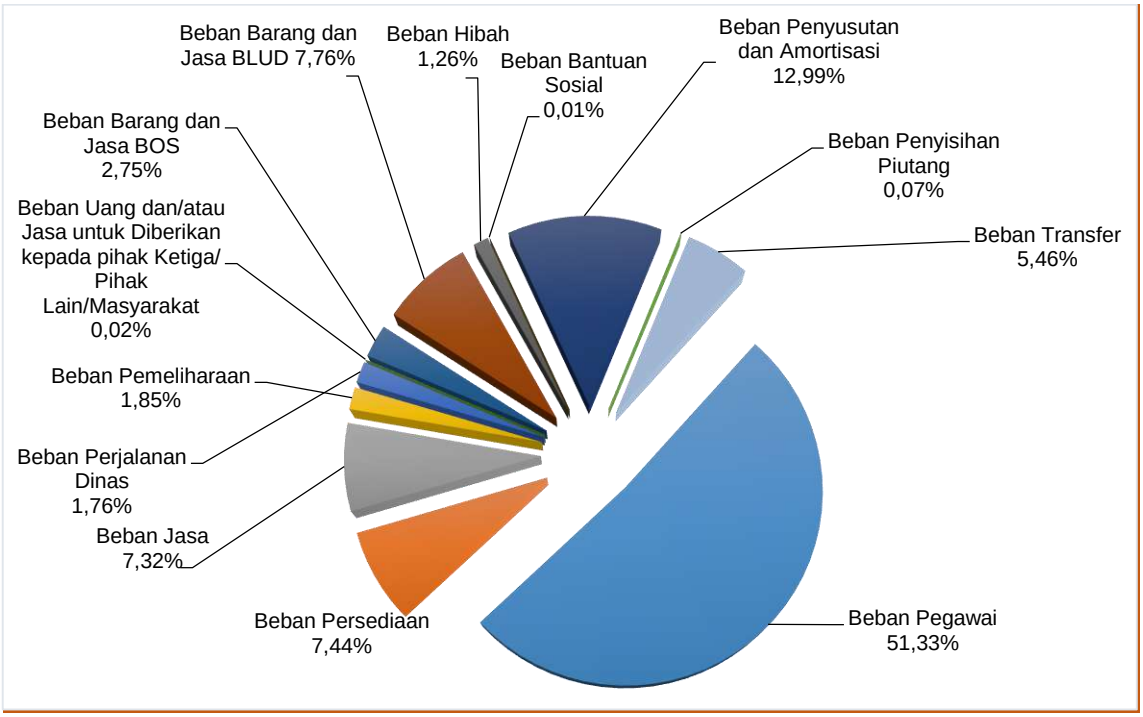
Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	15.772.712.139,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	744.392.000,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	290.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO	575.000.000,00
Jumlah	**17.382.104.139,00**

5.4.1.2. Beban – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Beban – LO	880.695.215.211,42	882.299.940.615,95	(1.604.725.404,53)	(0,18)
Jumlah	**880.695.215.211,42**	**882.299.940.615,95**	**(1.604.725.404,53)**	**(0,18)**

Beban-LO Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2025 adalah sebesar Rp880.695.215.211,42

Beban – LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional Tahun 2025 adalah senilai Rp880.695.215.211,42. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.604.725.404,53 atau 0,18 persen dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp882.299.940.615,95. Perbandingan besaran Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Majene pada TA 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 32 Perbandingan Beban Operasi TA 2025

Beban untuk Laporan Operasional per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 senilai Rp880.695.215.211,42 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 104 Rincian Beban Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban – LO		
Beban Pegawai – LO	452.057.328.693,00	430.946.033.222,00
Beban Barang – LO	65.515.253.582,63	46.374.026.348,79
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	984.388.239,00
Beban Jasa – LO	64.428.117.169,00	67.412.320.035,00
Beban Pemeliharaan – LO	16.280.052.167,78	11.198.663.296,00
Beban Perjalanan Dinas – LO	15.494.004.886,00	21.974.998.320,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat – LO	159.500.000,00	128.450.000,00
Beban Hibah – LO	11.109.367.000,00	38.293.146.305,00
Beban Bantuan Sosial – LO	59.040.000,00	63.360.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	114.358.997.167,50	108.864.386.901,29
Beban penyisihan Piutang – LO	606.386.783,80	704.124.143,32
Beban Transfer – LO	48.051.945.661,00	55.178.321.370,98
Beban Barang dan Jasa BOS	24.247.376.270,00	25.397.107.624,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	68.327.845.830,71	74.780.614.810,57
Jumlah	**880.695.215.211,42**	**882.299.940.615,95**

5.4.1.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp452.057.328.693,00. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5. 105 Beban Pegawai

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Gaji Pokok ASN	274.732.694.773,00
2.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	23.703.946.762,00
3.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.987.840.000,00
4.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	15.156.361.000,00
5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.558.795.000,00
6.	Beban Tunjangan Beras ASN	14.462.460.860,00
7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	598.960.868,00
8.	Beban Pembulatan Gaji ASN	4.007.888,00
9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.285.648.487,00
10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	571.919.936,00
11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.715.748.887,00
12.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.449.000.000,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
13.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.393.202.049,00
14.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00
15.	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00
16.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00
17.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	304.917.988,00
18.	Beban Honorarium	0,00
19.	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
20.	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	43.570.800,00
21.	Beban Tunjangan Beras DPRD	65.902.200,00
22.	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00
23.	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
24.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	86.051.700,00
25.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.666.525,00
26.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
27.	Beban Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
28.	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	331.660,00
29.	Beban Pembulatan Gaji DPRD	17.368,00
30.	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	809.283.888,00
31.	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.403.000.000,00
32.	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00
33.	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	70.800.000,00
34.	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.532.000,00
35.	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	104.760.000,00
36.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.431.500,00
37.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	873.354,00
38.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.600,00
39.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	6.264.000,00
40.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	146.880,00
41.	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	440.640,00
42.	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
43.	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
44.	Beban Pegawai BLUD	216.464.080,00
	Jumlah	**452.057.328.693,00**

5.4.1.2.2. Beban Barang

Beban barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang pakai habis. Barang periode 31 Desember 2025 pada Pemerintah Kabupaten Majene adalah senilai Rp65.515.253.582,63 Nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp18.156.838.994,84 dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp47.358.414.587,79.

Barang-barang yang pada akhir tahun tidak habis digunakan berdasarkan PSAP Nomor 05 pada akhir periode pencatatan dicatat sebagai persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen-komponen rambu-rambu, dan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi seperti Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang. Pada tabel berikut rincian Beban Barang pada akhir TA 2025 Pemerintah Kabupaten Majene.

Tabel 5. 106 Beban Barang

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	249.017.300,00
2.	Beban Bahan-Bahan Kimia	8.200.000,00
3.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	692.766.390,00
4.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.018.667.786,00
5.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	275.065.629,00
6.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.039.642.054,00
7.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.510.000,00
8.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00
9.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	178.975.200,00
10.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	179.529.397,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	0,00
12.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00
13.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.386.189.596,00
14.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	297.055.400,00
15.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.172.485.543,00
16.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00
17.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	221.138.450,00
18.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	263.872.000,00
19.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	389.557.600,00
20.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	385.042.500,00
21.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	94.600.000,00
22.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	150.030.000,00
23.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.820.000,00
24.	Beban Obat-Obatan-Obat	1.501.768.292,62

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
25.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.490.545.503,02
26.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36.284.926.503,99
27.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.729.844.140,00
28.	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.669.990.105,00
29.	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	14.430.000,00
30.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.969.924.344,00
31.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.612.448.949,00
32.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	3.480.000,00
33.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00
34.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	39.240.000,00
35.	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00
36.	Beban Pakaian Olahraga	15.000.000,00
37.	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu (beban tak pakai habis)	5.085.000,00
38.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	148.405.900,00
Jumlah		**65.515.253.582,63**

Penjelasan sebelumnya atas pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada jenis Belanja Barang dan Jasa mencatat realisasi senilai Rp259.163.085.597,78 per 31 Desember 2025. Di antara komponen Belanja Barang dan Jasa tersebut, terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan persediaan senilai Rp65.515.253.582,63 . Dibandingkan dengan saldo beban barang Tahun Anggaran 2024 yang tercatat senilai Rp46.374.026.348,79 maka dapat dikatakan terdapat beberapa transaksi yang memengaruhi saldo beban persediaan selain dari pembelian persediaan. Penjelasan transaksi yang memengaruhi beban persediaan di tahun berjalan dapat diuraikan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. 107 Transaksi Memengaruhi Saldo Beban Persediaan di Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	**Menambah beban persediaan di Tahun berjalan**	**30.507.961.705,46**
	a. Penambahan beban persediaan atas jurnal balik persediaan untuk penghapusan persediaan Tahun sebelumnya	28.900.810.511,46
	b. Beban persediaan akibat reklas dari aset tetap ke Beban Barang (Persediaan)	642.914.822,00
	c. Penambahan beban atas utang persediaan yang timbul di Tahun berjalan	964.236.372,00
2.	**Mengurangi beban persediaan di Tahun berjalan**	**(25.199.001.513,83)**
	a. Pengurangan beban persediaan karena adanya reklas belanja barjas ke aset tetap	(31.321.000,00)
	b. Pengurangan beban persediaan atas utang Tahun sebelumnya yang terbayar di Tahun 2025	(5.255.207.614,00)
	c. Pengurangan beban persediaan karena jurnal penyesuaian atas pengakuan persediaan baru	(19.912.472.899,83)
Akumulasi Penambahan (Pengurangan) Tahun 2025		**5.308.960.191,63**

5.4.1.2.3. Beban Jasa-LO

Beban Jasa dalam Laporan Operasional adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terjadi dalam periode pelaporan yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban terkait jasa yang diterima atau digunakan.

Beban Jasa - LO pada per 31 Desember 2025 senilai Rp64.428.117.169,00. Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp2.984.202.866,00 atau sebesar 4,43 persen dibanding Tahun 2024 dimana tercatat Beban Jasa terealisasi senilai Rp67.412.320.035,00. Beban Jasa – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 108 Rincian Beban Jasa Per SKPD

No.	Unit Organisasi	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	6.356.364.834,00
2.	Dinas Kesehatan	20.903.516.693,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.585.190.091,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	3.368.910.732,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	450.977.419,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	967.013.774,00
7.	Dinas Sosial	290.020.035,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	675.748.824,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	293.207.922,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	49.223.200,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.162.717.802,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	261.374.952,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	130.287.546,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.540.248.752,00
15.	Dinas Perhubungan	330.063.959,00
16.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1.226.698.720,00
17.	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	316.342.990,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	167.358.224,00
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	932.370.433,00
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	329.677.798,00
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	861.210.990,00
22.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	849.646.107,00
23.	Sekretariat Daerah	5.568.327.813,00
24.	Sekretariat DPRD	1.825.537.912,00
25.	Badan Perencanaan Daerah	224.023.781,00
26.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.868.162.200,00
27.	Badan Pendapatan Daerah	631.610.432,00
28.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	870.745.314,00
29.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	72.708.730,00
30.	Inspektorat	1.903.333.267,00
31.	Kecamatan Banggae	889.474.690,00
32.	Kecamatan Banggae Timur	897.106.868,00
33.	Kecamatan Pamboang	255.141.740,00

No.	Unit Organisasi	Nilai (Rp)
34.	Kecamatan Sendana	333.374.000,00
35.	Kecamatan Tammerodo	139.940.500,00
36.	Kecamatan Tubo Sendana	112.111.000,00
37.	Kecamatan Ulumanda	84.750.000,00
38.	Kecamatan Malunda	394.592.000,00
39.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	309.005.125,00
Jumlah		**64.428.117.169,00**

Beban Jasa per 31 Desember 2025 senilai Rp64.428.117.169,00, dengan rincian per Jenis sebagai berikut.

Tabel 5. 109 Beban Jasa Per Jenis

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Jasa Kantor	33.563.115.905,00
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	15.370.021.703,00
3.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.829.491,00
4.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.155.044.558,00
5.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	14.200.000,00
6.	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	9.433.310.113,00
7.	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	3.388.988.400,00
8.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	237.299.999,00
9.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	153.000.000,00
10.	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	112.307.000,00
	Jumlah	**64.428.117.169,00**

5.4.1.2.4. Beban Pemeliharaan – LO

Beban Pemeliharaan dalam Laporan Operasional merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya dalam kondisi normal. Ini adalah komponen yang menyusun Laporan Operasional Pemerintah Daerah dan mencerminkan kegiatan operasional keuangan daerah.

Beban Pemeliharaan - LO pada per 31 Desember 2025 senilai Rp16.280.052.167,78. Nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp5.081.388.871,78 atau sebesar 45,37 persen dibanding Tahun 2024 dimana tercatat Beban Pemeliharaan terealisasi senilai Rp11.198.663.296,00. Beban Pemeliharaan – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 110 Rincian Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.062.821.228,00
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	871.419.527,00
3.	Beban Pemeliharaan jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.345.811.412,78
	Jumlah	**16.280.052.167,78**

5.4.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas – LO

Beban Perjalanan Dinas – LO merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendukung kegiatan perjalanan dinas pegawai dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan jabatan. Beban ini biasanya mencakup biaya transportasi, akomodasi, makan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan perjalanan dinas tersebut.

Beban Perjalanan Dinas - LO pada per 31 Desember 2025 senilai Rp15.494.004.886,00. Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp6.480.993.434,00 atau sebesar 29,49 persen dibanding Tahun 2024 dimana tercatat Beban Perjalanan Dinas terealisasi senilai Rp21.974.998.320,00. Beban Perjalanan Dinas – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 111 Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.565.361.206,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Tetap	130.305.080,00
3.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.792.578.600,00
4.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.760.000,00
5.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00
6.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00
JUMLAH		**15.494.004.886,00**

Berikut rincian Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025 jika diurai menurut SKPD.

Tabel 5. 112 Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025 per SKPD

No.	UNIT ORGANISASI	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	349.353.418,00
2.	Dinas Kesehatan	6.478.719.021,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73.751.700,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	53.618.335,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	55.370.100,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40.885.000,00
7.	Dinas Sosial	37.560.800,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.190.172,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	658.406.671,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	83.113.550,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	77.783.210,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38.609.000,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98.242.240,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.306.170.000,00
15.	Dinas Perhubungan	15.925.000,00
16.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	50.344.000,00
17.	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	96.795.640,00

No.	UNIT ORGANISASI	Jumlah
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	21.954.800,00
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	132.957.564,00
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	184.981.300,00
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	128.172.485,00
22.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	207.839.070,00
23.	Sekretariat Daerah	2.038.647.542,00
24.	Sekretariat DPRD	2.084.956.876,00
25.	Badan Perencanaan Daerah	147.402.646,00
26.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	420.091.485,00
27.	Badan Pendapatan Daerah	58.097.000,00
28.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	182.664.111,00
29.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	49.035.800,00
30.	Inspektorat	168.239.150,00
31.	Kecamatan Banggae	16.299.600,00
32.	Kecamatan Banggae Timur	27.149.000,00
33.	Kecamatan Pamboang	7.200.000,00
34.	Kecamatan Sendana	5.440.000,00
35.	Kecamatan Tammerodo	5.710.000,00
36.	Kecamatan Tubo Sendana	4.000.000,00
37.	Kecamatan Ulumanda	0,00
38.	Kecamatan Malunda	10.540.000,00
39.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41.788.600,00
	TOTAL	**15.494.004.886,00**

5.4.1.2.6. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	159.500.000,00	128.450.000,00	31.050.000,00	24,17
Jumlah	**159.500.000,00**	**128.450.000,00**	**31.050.000,00**	**24,17**

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun 2025 senilai Rp159.500.000,00 dengan rincian Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga senilai Rp6.000.000,00, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp37.000.000,00, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp16.500.000,00, dan Sekretariat Daerah senilai Rp100.000.000,00.

5.4.1.2.7. Beban Barang dan Jasa BOS – LO

Saldo Beban Barang dan Jasa BOS pada Pemerintah Kabupaten Majene sampai 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp24.247.376.270,00 pada unit kerja Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 4,53 persen jika dibandingkan dengan saldo Beban Barang dan Jasa BOS pada tahun 2024 senilai Rp25.397.107.624,00.

5.4.1.2.8. Beban Barang dan Jasa BLUD – LO

Saldo Beban Barang dan Jasa BLUD-LO pada Pemerintah Kabupaten Majene sampai 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp68.327.845.830,71 pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 8,63 persen jika dibandingkan dengan saldo Beban Barang dan Jasa BLUD pada tahun 2024 senilai Rp74.780.614.810,57.

Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan Beban Barang Dan Jasa yang tercatat pada satuan kerja yang melaksanakan prinsip Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Majene hingga saat ini telah menetapkan 12 satuan kerja yang menyelenggarakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan berbentuk BLUD. Satuan kerja tersebut yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dan sebelas Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Majene. Saldo Beban Barang dan Jasa BLUD pada Pemerintah Kabupaten Majene sampai 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp68.327.845.830,71. Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD masing-masing unit kerja yang menyelenggarakan sistem Badan Layanan Umum Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 113 Beban Barang dan Jasa BLUD

No.	Unit Organisasi	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	(4.425.684,00)
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	49.392.422.631,80
3.	Puskesmas Banggae I	1.892.426.941,04
4.	Puskesmas Banggae II	881.662.771,02
5.	Puskesmas Lembang	2.015.187.831,28
6.	Puskesmas Malunda	2.734.170.767,00
7.	Puskesmas Pamboang	3.082.373.796,54
8.	Puskesmas Salutambung	628.834.054,00
9.	Puskesmas Sendana I	2.684.734.264,81
10.	Puskesmas Sendana II	1.305.479.964,92
11.	Puskesmas Tammerodo	1.398.439.143,00
12.	Puskesmas Totoli	1.597.073.234,95
13.	Puskesmas Ulumanda	719.466.114,35
Jumlah		**68.327.845.830,71**

Beban Barang dan Jasa BLUD senilai Rp68.327.845.830,71 merupakan beban yang timbul atas persediaan, obat-obatan dan realisasi belanja barang dan jasa BLUD yang bersumber dari inputan transaksi non anggaran di seluruh puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, serta bersumber dari jurnal penyesuaian utang, aset dan persediaan pada seluruh puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. Adanya koreksi senilai Rp4.425.684,00 pada beban persediaan Dinas Kesehatan disebabkan adanya koreksi tambah atas persediaan yang ada di Rumah Sakit Pratama.

5.4.1.2.9. Beban Hibah – LO

Beban Hibah – LO per 31 Desember 2025 senilai Rp11.109.367.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 114 Beban Hibah – LO Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	**Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya**	**695.200.000,00**
	Sekretariat Daerah	695.200.000,00
2.	**Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**1.011.681.500,00**
	a). Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	692.130.000,00
	b). Sekretariat Daerah	260.000.000,00
	c). Kecamatan Banggae Timur	59.551.500,00
3.	**Beban Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri dan Satdikmen Swasta**	**635.400.000,00**
	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	635.400.000,00
4.	**Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**	**711.212.000,00**
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	711.212.000,00
5.	**Beban Hibah Dana BOSP**	**8.055.873.500,00**
	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	8.055.873.500,00
Jumlah		**11.109.367.000,00**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Hibah diakui berdasarkan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban Hibah diakui ketika timbul penurunan manfaat ekonomi yang memengaruhi ekuitas pemerintah daerah. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya tercatat senilai Rp695.200.000,00, Beban Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia tercatat senilai Rp1.011.681.500,00. Beban Hibah Dana BOS tercatat realisasi senilai Rp635.400.000,00, Beban Hibah Kepada Partai Politik tercatat realisasi senilai Rp711.212.000,00, dan Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD dan Kesetaraan senilai Rp8.055.873.500,00.

5.4.1.2.10. Beban Bantuan Sosial – LO

Beban Bantuan Sosial – LO per 31 Desember 2025 pada Pemerintah Kabupaten Majene adalah Rp59.040.000,00. Nilai ini mengalami penurunan 6,82 persen jika dibandingkan dengan saldo Beban Bantuan Sosial pada tahun 2024 senilai Rp63.360.000,00. Beban Sosial – LO yang disajikan pada Tahun Anggaran 2025 tercatat pada Dinas Sosial di mana beban tersebut digunakan untuk membantu fakir miskin dalam upaya bantuan sosial kesejahteraan keluarga di wilayah Kabupaten Majene.

5.4.1.2.11. Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berdasarkan PSAP Nomor 07 ditetapkan bahwa nilai penyusutan atas aset

tetap dan amortisasi atas aset tak berwujud untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dalam neraca pada akun Akumulasi Penyusutan, Akumulasi Amortisasi, dan akun Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Laporan Operasional. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025 senilai Rp114.358.997.167,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 115 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	23.390.238.641,50
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.997.247.913,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.861.643.630,00
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	226.996.342,00
5.	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0
6.	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	882.870.641,00
Jumlah		**114.358.997.167,50**

5.4.1.2.12. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang – LO merupakan beban yang diakui dalam Laporan Operasional untuk mencerminkan potensi piutang yang tidak dapat dikoleksi. Beban ini mewakili Cadangan yang dibentuk untuk memperkirakan kemungkinan piutang yang tidak akan dapat dibayar oleh debitur.

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 senilai Rp606.386.783,80. Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp97.737.359,52 atau sebesar 13,88 persen dibanding tahun 2024 dimana tercatat Beban Penyisihan Piutang terealisasi senilai Rp704.124.143,32. Beban Penyisihan Piutang – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 116 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	437.542.798,37
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	155.103.106,78
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00
4.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	11.851.765,91
5.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1.889.112,74
Jumlah		**606.386.783,80**

5.4.1.2.13. Beban Transfer – LO

Beban Transfer – LO per 31 Desember 2025 senilai Rp48.051.945.661,00 berupa beban atas Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Defisit dari Kegiatan Operasional Lainnya. Beban Transfer – LO mengalami penurunan senilai Rp7.126.375.709,98 atau sebesar 12,92 persen dibanding Tahun 2024 dimana tercatat Beban Transfer – LO terealisasi senilai

Rp55.178.321.370,98. Beban Transfer – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 117 Beban Transfer - LO

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	679.215.030,00
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	173.885.312,00
3.	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	100.000.000,00
4.	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	47.098.845.319,00
Jumlah		**48.051.945.661,00**

5.4.2. Kegiatan Non Operasional

5.4.2.1. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam Kegiatan Non Operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari Kegiatan Non Operasional antara lain Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2025 tercatat Defisit senilai Rp2.306.566.437,57.

Rincian atas peristiwa surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 118 Rincian atas Peristiwa Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO					
A	**Surplus dari Kegiatan Non Operasional-LO**				
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	2.251.355.225,00	(2.251.355.225,00)	(100,00)
2	Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO	0,00	6.181.110.940,00	(6.181.110.940,00)	(100,00)
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1,00		1	(100,00)
	Sub Total	**1,00**	**8.432.466.165,00**	**(8.432.466.164,00)**	**(100,00)**
B	**Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO**				
1	Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	1.126.216.885,00	(1.126.216.885,00)	(100,00)
2	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan–LO	0,00	2.948.594.994,00	(2.948.594.994,00)	(100,00)
3	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud	178.530.638,00	0,00	178.530.638,00	100,00
4	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	298.691.542,00	342.166,00	298.349.376,00	87.194,34
5	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.829.344.258,57	564.315.650,93	1.265.028.607,64	224,17
	Sub Total	**2.306.566.438,57**	**4.639.469.695,93**	**(2.332.903.257,36)**	**(50,28)**
	TOTAL	**(2.306.566.437,57)**	**3.792.996.469,07**	**(6.099.562.906,64)**	**(160,81)**

5.4.2.2. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa senilai (Rp35.295.165.817,82) merupakan jumlah antara Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp32.988.599.380,25 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp2.306.566.437,57. Ini Menunjukkan Bahwa Beban Untuk Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Rutin Organisasi Lebih Besar Daripada Pendapatan Operasional Yang Diterima, Dimana Pemerintah Kabupaten Majene Telah Mengeluarkan Sumber Daya Ekonomi Yang Besar Untuk beberapa kegiatan seperti Beban Pelayanan Publik, Beban Bantuan Sosial ,Beban Gaji Pegawai, dan Beban Belanja Barang/Jasa Atau Biaya Penyusutan Aset.

Tabel 5. 119 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		
- **Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**	(32.988.599.380,25)	(31.885.569.372,40)
- **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**	(2.306.566.437,57)	3.792.996.469,07
Jumlah	**(Rp35.295.165.817,82)**	**(28.092.572.903,33)**

5.4.3. Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp2.499.579.085,00. Nilai ini mengalami kenaikan 381,92 persen atau sebesar Rp1.980.913.442,00 dibanding Tahun 2024 dimana saldo Pos Luar Biasa tercatat senilai Rp518.665.643,00.

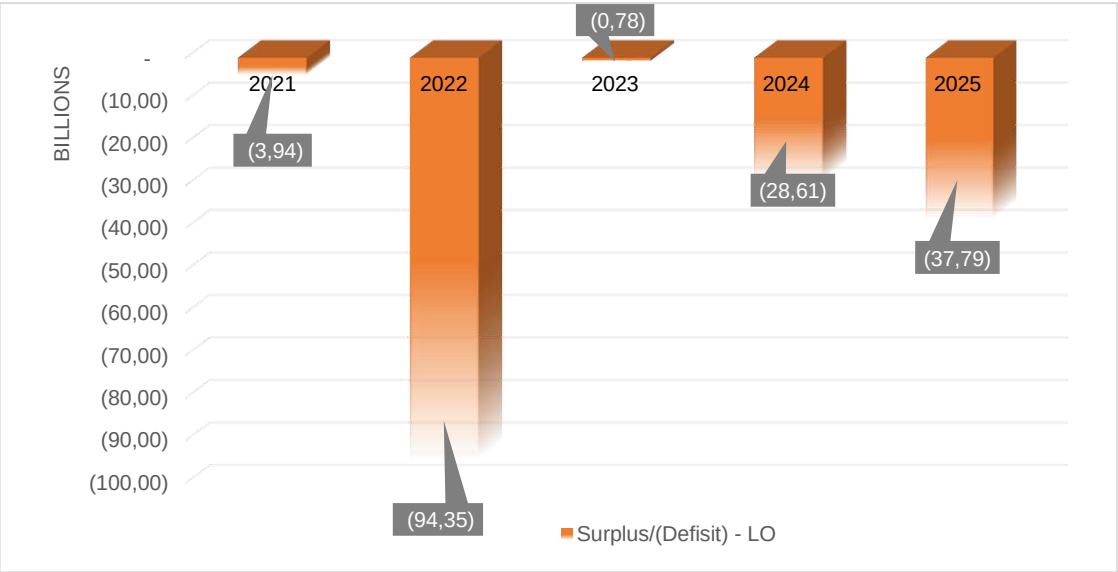
5.4.3.1. Beban Luar Biasa/Beban Tak Terduga - LO

Beban Luar Biasa pada Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2025 tercatat senilai Rp2.499.579.085,00 Beban Luar Biasa – LO mengalami kenaikan senilai Rp1.980.913.442,00 atau sebesar 381,92 persen dibanding tahun 2024 dimana tercatat Beban Luar Biasa – LO terealisasi senilai Rp518.665.643,00.

Beban Luar Biasa merupakan reklas dari Beban Tak Terduga yang sebelumnya tercatat senilai Rp2.499.579.085,00. Nilai Beban Luar biasa Tahun 2025 merupakan Beban Tak Terduga yang diakibatkan oleh alam rangka bantuan perbaikan jalan poros Limboro Paminggalan Kec Sendana dengan nilai Rp150.000.000,00; bantuan pembangunan Bronjong dan Normalisasi Sungai Desa Seppong dan Mayamba Kecamatan Sendana senilai Rp296.364.000,00; bantuan pembangunan Talud Salobose Kecamatan Banggae senilai Rp150.000.000,00; bantuan penanganan Bahu jalan yang berpotensi amblas di lingkungan Baruga Barat senilai Rp41.575.000,00; penanganan alat berat Pembersihan Longsor Jalan Poros Paminggalan senilai Rp150.000.000,00; rangka pembangunan Talud Sungai Camba-Camba Kecamatan Tammerodo Sendana senilai Rp270.000.000,00; Rehabilitasi Jembatan Kelurahan Galung- Banggae senilai Rp200.000.000,00; Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan senilai Rp130.906.000,00; Rehabilitasi gedung dan Bangunan Kesehatan senilai Rp530.000.000,00; Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pangan Murah senilai Rp30.000.000,00; Perbaikan Tanggul pada dusun karondongan Tammeroddo dan Lingkungan Parappe Kelurahan Sirindu senilai Rp450.000.000,00, Operasi Pengamanan Aksi Demonstrasi senilai Rp50.000.000,00; dalam Rangka Darurat Bencana Hidrometeorologi basah dan cuaca Ekstrem di Kabupaten Majene senilai Rp50.000.000,00.

5.4.4. Surplus/(Defisit) - LO

Defisit LO senilai (Rp37.794.744.902,82) berasal dari Defisit Sebelum Pos Luar Biasa senilai (Rp35.295.165.817,82) ditambah Pos Luar Biasa senilai (Rp2.499.579.085,00). Nilai tersebut mengalami Kenaikan nilai Defisit senilai Rp9.183.506.356,49 atau 32,10 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut perkembangan Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Majene 5 (lima) tahun terakhir dalam grafik di bawah ini.



Grafik 5. 33 Tren Perkembangan Surplus/Defisit-LO Kabupaten Majene 2021-2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Majene mencatatkan Kenaikan Defisit signifikan yaitu senilai Rp9.183.506.356,49 atau senilai 32,10 persen. Defisit pada Pemerintah Daerah merupakan konteks operasional yang positif. Artinya Pemerintah Kabupaten Majene mencatatkan aktivitas operasional yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Defisit-LO yang terjadi menunjukkan bahwa beban Operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih lebih besar dibandingkan pendapatan operasional yang diterima. Selama Tahun Anggaran 2021 hingga 2025 belum pernah terjadi Surplus. Surplus/Defisit-LO pada Tahun 2023 tercatat sebagai defisit dengan nilai defisit paling rendah selama lima tahun terakhir

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

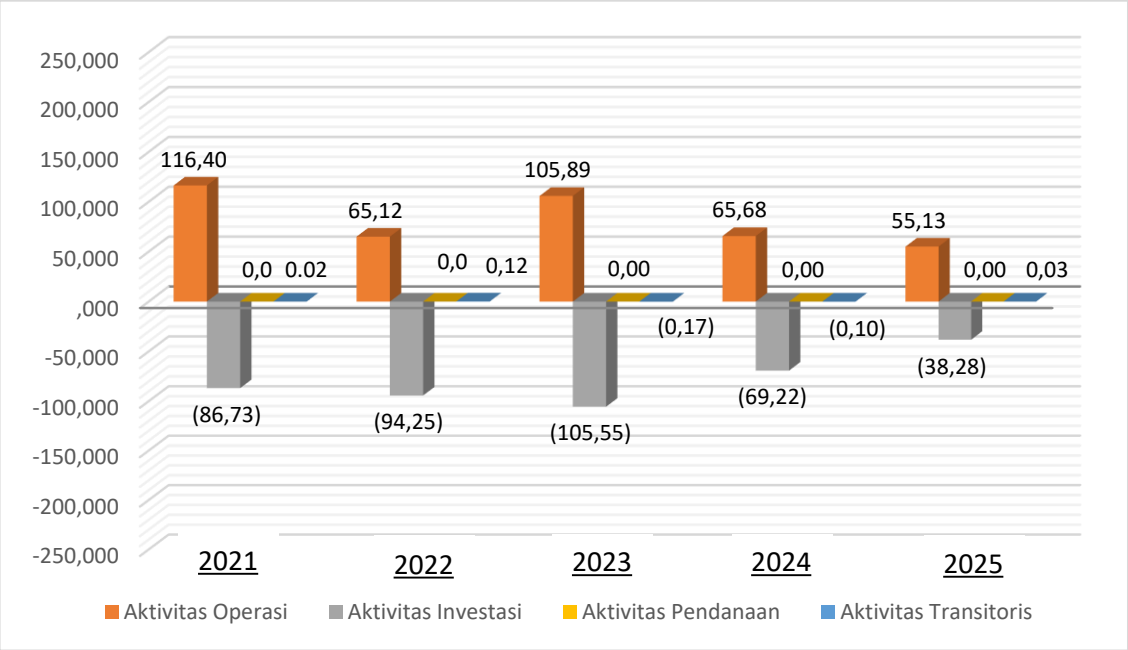
Laporan Arus Kas merupakan informasi keuangan yang sangat penting baik bagi manajemen pengguna laporan eksternal, para pemangku kepentingan, dan masyarakat. Laporan Arus Kas tersebut mencerminkan kondisi objektif kas, perubahan selama satu periode, arus masuk, dan keluar kas yang sangat jelas yang dapat diuji kebenarannya dengan melihat Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai saldo awal kas, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2025. Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas Kabupaten Majene periode 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Komposisi Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 berdasarkan aktivitas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 120 Posisi Arus Kas Bersih Berdasarkan Aktivitas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	55.134.672.208,81	65.687.381.462,47
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(38.283.278.741,00)	(69.223.017.593,18)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	26.843.710,00	(95.321.122,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas	**16.878.237.177,81**	**(3.630.957.252,71)**

Tren arus kas bersih Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan aktivitas selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5. 34 Komposisi Arus Kas Bersih Tahun 2021 s.d. 2025

Penjelasan mengenai arus kas bersih dari masing-masing aktivitas di atas adalah sebagai berikut.

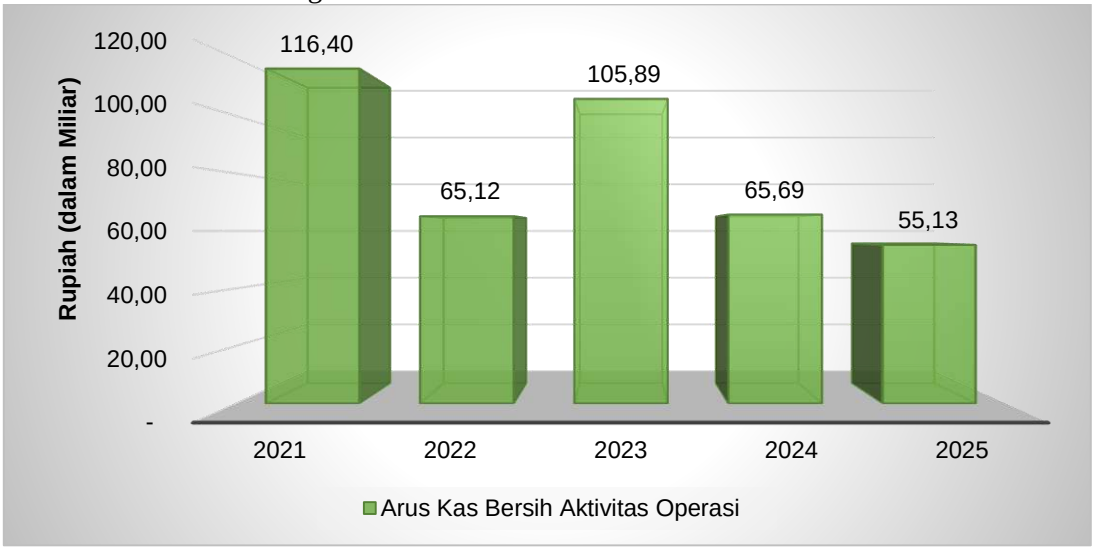
5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	55.134.672.208,81	65.687.381.462,47	(10.552.709.253,66)	(16,06)
Jumlah	**55.134.672.208,81**	**65.687.381.462,47**	**(10.552.709.253,66)**	**(16,06)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 sebesar Rp55.134.672.208,81 atau terjadi Penurunan sebesar 16,06 persen dari Tahun 2024.

.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Berikut tren perkembangan arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Majene selama lima Tahun terakhir dalam grafik di bawah ini.



Grafik 5. 35 Tren Perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Kabupaten Majene 2021-2025

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah akibat aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi menunjukkan efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam mengelola penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan operasional Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Arus Kas Operasi yang baik adalah arus kas yang bersaldo positif dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari data di atas dapat dilihat bahwa arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Majene bersaldo positif dari tahun 2021-2025. Walaupun di Tahun 2022 mengalami penurunan, namun di Tahun 2023 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mengalami peningkatan sebesar 105,89 persen. Tetapi di Tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 37,97 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah

Kabupaten Majene kembali menurun. Arus kas positif dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan daerah dalam rangka mengembalikan pinjaman jangka pendek, menambah investasi daerah, atau memberikan subsidi kepada masyarakat. Dari grafik di atas dapat dilihat Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi tertinggi Pemerintah Kabupaten Majene tercatat pada Tahun 2021, sedangkan terendah terjadi pada Tahun 2025.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2025 adalah senilai Rp55.134.672.208,81 dimana terjadi penurunan sebesar 16,06 persen dari aktivitas operasi pada Tahun 2024 yang tercatat senilai Rp65.687.381.462,47. Penurunan tersebut disebabkan pada beberapa *item* arus kas masuk mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Penerimaan Pendapatan Hibah. Pada tahun 2025 ada beberapa Arus Kas Masuk mengalami sedikit kenaikan namun beberapa Arus Kas Keluar yang mengalami kenaikan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut rincian arus kas masuk dan arus kas keluar aktivitas operasi sepanjang Tahun 2025.

Tabel 5. 121 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

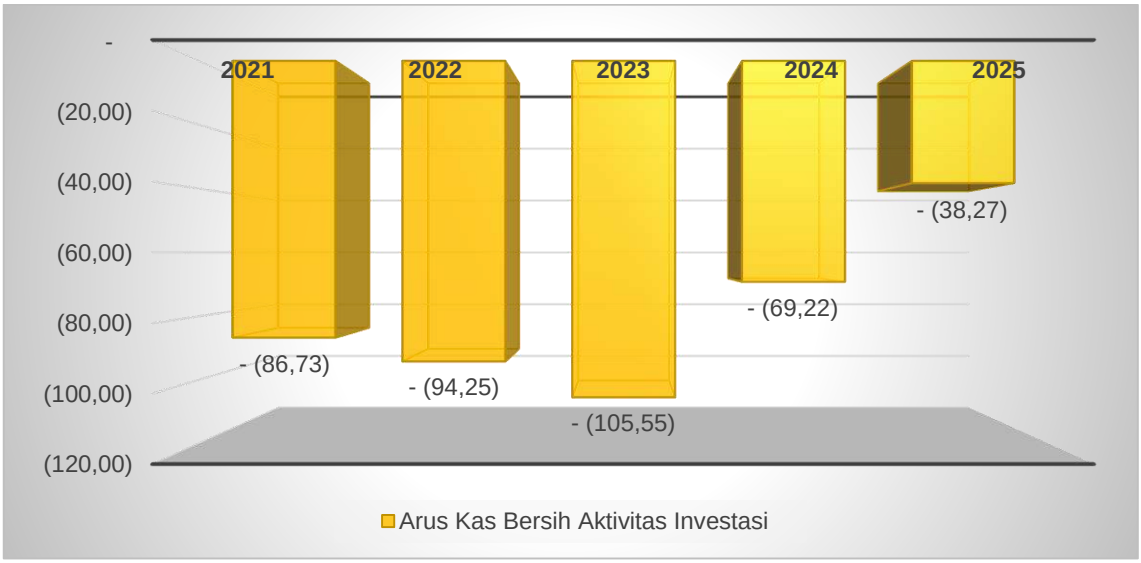
Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah – LRA	16.467.968.514,25	11.783.885.632,00
Penerimaan Retribusi Daerah – LRA	75.411.226.265,00	75.254.820.161,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	3.534.611.072,00	3.327.191.183,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	6.356.723.874,34	2.096.439.233,07
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	3.519.130.300,00	6.639.074.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.607.363.000,00	0,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya	508.075.000,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	544.376.636.960,00	548.935.022.195,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	162.384.800.273,00	172.385.640.915,00
Penerimaan Dana Desa	47.727.678.768,00	55.820.851.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.101.330.683,00	24.527.029.863,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**880.995.544.709,59**	**900.769.954.182,07**
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	451.753.620.104,00	424.459.751.438,00
Pembayaran Barang dan Jasa	259.163.085.597,78	267.189.138.109,60
Pembayaran Hibah	9.648.530.900,00	38.275.918.405,00
Pembayaran Bantuan Sosial	59.040.000,00	63.360.000,00
Pembayaran Tak Terduga	2.499.579.085,00	1.330.046.402,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	679.215.030,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	173.885.312,00	0,00
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	101.883.916.472,00	103.764.358.365,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**825.860.872.500,78**	**835.082.572.719,60**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**55.134.672.208,81**	**65.687.381.462,47**

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(38.283.278.741,00)	(69.223.017.593,18)	30.939.738.852,18	44,70
Jumlah	**(38.283.278.741,00)**	**(69.223.017.593,18)**	**30.939.738.852,18**	**44,70**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 sebesar (Rp38.283.278.741,00) atau sebesar 44,70 persen dari Tahun 2024.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi terkait dengan pengeluaran kas untuk memperoleh aset tetap baru atau penambahan kapasitas aset tetap lama serta penerimaan kas dari penjualan aset tetap lama. Arus kas dari aktivitas investasi yang bersaldo negatif menunjukkan pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap yang nilainya lebih besar dibanding dengan kas yang diperoleh dari penghentian atau penjualan aset tetap. Sebaliknya jika arus kas dari aktivitas investasi bersaldo positif, maka hal itu mengindikasikan pemerintah daerah tidak melakukan investasi pelepasan aset tetap. Oleh karena itu, saldo negatif (defisit) atas arus kas dari aktivitas investasi lebih disukai. Sedangkan saldo positif diupayakan untuk dihindari karena jika bersaldo positif maka pertumbuhan aset tetapnya akan bernilai negatif padahal pemerintah daerah diharapkan memiliki pertumbuhan aset tetap yang positif. Tren perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Majene selama lima Tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 36 Tren Perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Kabupaten Majene 2021-2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa saldo kas bersih dari aktivitas investasi bersaldo negatif, sehingga ini menunjukkan adanya pertumbuhan aset yang positif yang berarti di Pemerintah Kabupaten Majene terjadi pembangunan fisik berupa pembangunan infrastruktur. seperti perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, belanja tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan. Arus kas bersih aktivitas investasi tertinggi tercatat terjadi pada Tahun Anggaran 2023. Sedangkan arus kas bersih aktivitas investasi terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2025.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2025 adalah senilai(Rp38.283.278.741,00) atau

turun sebesar 44,70 persen dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2024 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5. 122 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	20.449.800,00	5.925.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**20.449.800,00**	**5.925.000,00**
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	732.371.100,00	1.053.059.242,00
Perolehan Peralatan dan mesin	5.004.809.348,00	11.393.369.748,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	23.797.538.257,00	33.605.479.353,00
Perolehan Jalan. Irigasi. dan Jaringan	7.906.104.836,00	23.121.034.250,18
Perolehan Aset Tetap Lainnya	322.905.000,00	56.000.000,00
Perolehan Aset Lainnya	40.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	500.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**38.303.728.541,00**	**69.228.942.593,18**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(38.283.278.741,00)**	**(69.223.017.593,18)**

Sepanjang Tahun 2025 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi bersumber dari Penjualan Penjualan Aset Lainnya Senilai Rp20.449.800,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan senilai Rp14.524.800,00 jika dibandingkan tahun 2024. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2025 tercatat senilai Rp38.303.728.541,00. Nilai ini mengalami penurunan senilai (Rp30.925.214.052,18) atau 44,70 persen dibanding Arus Keluar Kas tahun sebelumnya senilai Rp69.228.942.593,18.

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pada Tahun 2025 tidak terdapat Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan atau nihil.

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan surplus/defisit anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Majene tidak mencatat arus kas masuk dan keluar dari aktivitas pendanaan baik yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank maupun pihak lainnya.

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	26.843.710,00	(95.321.122,00)	122.164.832,00	128,16
Jumlah	**26.843.710,00**	**(95.321.122,00)**	**122.164.832,00**	**128,16**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar Rp26.843.710,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp122.164.832,00 atau 128,16 persen dari Tahun 2024

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yaitu transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 tercatat senilai Rp26.843.710,00 dimana terjadi kenaikan senilai Rp122.164.832,00 atau 128,16 persen dari Tahun 2024 senilai (Rp95.321.122,00). Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 123 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	45.883.045.391,00	50.944.453.833,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**45.883.045.391,00**	**50.944.453.833,00**
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	45.856.201.681,00	51.039.774.955,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**45.856.201.681,00**	**51.039.774.955,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**26.843.710,00**	**(95.321.122,00)**

Arus kas masuk dan keluar dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2025 bersumber dari penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sampai akhir Tahun 2025. Tercatat terdapat Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2025 senilai Rp45.883.045.391,00. Adapun pada sisi arus keluar kas tercatat pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2025 senilai Rp45.856.201.681,00.

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Saldo Akhir Kas	21.727.604.509,50	4.849.337.935,69	16.878.266.573,81	348,05
Jumlah	**21.727.604.509,50**	**4.849.337.935,69**	**16.878.266.573,81**	**348,05**

Saldo Akhir Kas Tahun 2025 sebesar Rp21.727.604.509,50 atau terjadi peningkatan sebesar 348,05 persen dari Tahun 2024

Saldo Akhir Kas sampai dengan per 31 Desember 2025 senilai Rp21.727.604.509,50, dibandingkan dengan sebelumnya di Tahun 2024 senilai Rp4.849.337.935,69. Maka dapat dilihat terjadi kenaikan senilai Rp16.878.266.573,81 atau 348,05 persen. Berikut rincian pembentuk Saldo Akhir Kas berdasarkan Arus Kas sepanjang Tahun Anggaran 2025 dari

Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris, serta Kenaikan/Penurunan Kas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 124 Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	55.134.672.208,81	65.687.381.462,47
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(38.283.278.741,00)	(69.223.017.593,18)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	26.843.710,00	(95.321.122,00)
Kenaikan / Penurunan Kas	**16.878.237.177,81**	**(3.630.957.252,71)**
Saldo Awal Kas	**4.849.337.935,69**	**8.480.304.393,60**
Koreksi SiLPA Tahun Lalu	29.396,00	(9.205,20)
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah Setelah Koreksi	4.849.367.331,69	8.480.295.188,40
Saldo Akhir Kas	**21.727.604.509,50**	**4.849.337.935,69**
Kas di Kas Daerah	15.999.375.461,40	51.385.522,63
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	4.276.865.432,10	4.769.301.860,10
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	374.521.000,00	0,00
Kas Lainnya/ Kas Dana BOK	1.036.132.573,00	28.650.552,96
Kas Lainnya	40.710.043,00	0,00
Saldo Akhir Kas	**21.727.604.509,50**	4.849.337.935,69

Penjelasan nilai kas bersih dari masing-masing aktivitas dalam Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
   Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sampai dengan per 31 Desember 2025 senilai Rp55.134.672.208,81 merupakan selisih antara Arus Masuk Kas Penerimaan senilai Rp880.995.544.709,59 dan Arus Keluar Kas Pembayaran senilai Rp825.860.872.500,78;

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
   Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sampai dengan per 31 Desember 2025 senilai (Rp38.283.278.741,00) merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Hasil Penjualan Aset Lainnya senilai Rp20.449.800,00 dan Arus Keluar Kas Perolehan Aset Tetap senilai Rp38.303.728.541,00;

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
   Aktivitas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun 2025 senilai Rp0,00. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aktivitas arus kas masuk maupun keluar dari aktivitas pendanaan

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
   Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sampai dengan per 31 Desember 2025 senilai Rp26.843.710,00 merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran senilai Rp45.883.045.391,00 dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran senilai Rp45.856.201.681,00;

e. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2025 senilai Rp21.727.604.509,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 125 Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Unit Kerja	Jumlah (Rp)
1.	Kas di Kasda	15.999.375.461,40
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
4.	Kas di BLUD	4.276.865.432,10
5.	Kas Dana BOS	374.521.000,00
6.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.036.132.573,00
7.	Kas Lainnya	40.710.043,00
8.	Setara Kas	0,00
Jumlah		**21.727.604.509,50**

5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi Ekuitas, dan Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 berasal dari Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya sepanjang periode Tahun 2025. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 adalah senilai Rp1.565.032.932.878,19.

5.6.1. Ekuitas Awal

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio persen (%)
Ekuitas Awal	1.602.237.782.484,35	1.628.208.973.061,58	(25.971.190.577,23)	(1,60)
Jumlah	**1.602.237.782.484,35**	**1.628.208.973.061,58**	**(25.971.190.577,23)**	**(1,60)**

Ekuitas awal merupakan posisi kekayaan bersih Pemerintah Daerah di awal tahun yang akan diperhitungkan untuk membiayai operasional Pemerintah Kabupaten Majene sepanjang Tahun Anggaran 2025. Ekuitas awal pada Tahun 2025 senilai Rp1.602.237.782.484,35 yang merupakan saldo ekuitas akhir pada Tahun 2024. Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 1,60 persen atau senilai Rp25.971.190.577,23 dibandingkan di Tahun 2024 di mana Ekuitas Awal tercatat senilai Rp1.628.208.973.061,58.

5.6.2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan – LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit-LO merupakan pengurangan Pendapatan - LO senilai Rp847.706.615.831,17 terhadap Beban-LO senilai Rp880.695.215.211,42 dan Jumlah defisit dari kegiatan non operasional Senilai Rp2.306.566.437,57 serta beban luar biasa Rp2.499.579.085,00.

Pada Tahun 2025 tercatat Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp37.794.744.902,82. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp9.183.506.356,49

dibandingkan tahun 2024 tercatat Defisit-LO senilai Rp28.611.238.546,33. Rincian Surplus/Defisit– LO per SKPD disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 126 Surplus/Defisit LO per SKPD

No.	Surplus/Defisit-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	(335.020.561.115,00)	(322.619.497.607,67)
2.	Dinas Kesehatan	(120.348.314.846,13)	(119.115.266.754,86)
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(95.072.080.167,77)	(60.137.194.262,76)
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(5.672.361.238,00)	(9.839.861.444,00)
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	(4.757.642.138,00)	(6.219.960.808,00)
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.804.125.348,00)	(32.118.293.196,00)
7.	Dinas Sosial	(1.574.682.564,00)	(1.945.482.864,00)
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(7.808.825.716,00)	(5.564.794.571,00)
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(3.628.742.048,00)	(3.924.030.046,00)
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.717.541.363,00)	(3.516.499.260,00)
11.	Dinas Ketahanan Pangan	(1.792.696.050,00)	(1.645.956.712,00)
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(4.939.608.555,00)	(6.049.747.939,00)
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.782.984.545,00)	(2.707.257.900,00)
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(2.132.652.782,00)	(2.092.729.975,00)
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(7.850.553.210,00)	(12.766.273.102,00)
16.	Dinas Perhubungan	(2.527.959.975,00)	(2.902.157.931,00)
17.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	(3.175.600.787,00)	(3.625.623.134,50)
18.	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	(4.084.208.446,00)	(4.441.565.771,00)
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(2.128.288.723,00)	(2.745.965.616,00)
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(6.154.655.692,00)	(8.350.332.298,00)
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(3.078.200.829,00)	(2.633.286.714,00)
22.	Badan Perencanaan Daerah	(2.958.476.729,00)	(3.232.524.646,00)
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	678.477.296.339,37	704.758.373.081,01
24.	Badan Pendapatan Daerah	12.308.202.689,88	3.796.212.962,40
25.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	(4.144.791.020,00)	(4.842.863.427,00)
26.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(1.176.442.430,00)	(2.003.236.362,00)
27.	Sekretariat Daerah	(25.680.653.553,67)	(28.798.254.534,00)
28.	Sekretariat DPRD	(17.038.544.371,00)	(17.147.195.349,00)
29.	Inspektorat Daerah	(6.000.609.776,00)	(5.040.694.848,00)
30.	Kecamatan Banggae	(6.905.605.271,00)	(6.903.558.760,00)
31.	Kecamatan Banggae Timur	(8.052.703.271,00)	(7.702.364.757,00)
32	Kecamatan Pamboang	(3.148.548.215,00)	(3.149.262.663,00)
33	Kecamatan Sendana	(3.600.492.151,00)	(3.485.793.785,00)
34	Kecamatan Tammerodo Sendana	(1.064.537.759,00)	(1.185.673.669,00)
35	Kecamatan Tubo Sendana	(1.716.590.917,00)	(1.603.659.520,00)
36	Kecamatan Ulumanda	(1.395.155.240,00)	(1.324.380.275,00)

No.	Surplus/Defisit-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
37	Kecamatan Malunda	(3.505.152.178,00)	(3.320.586.322,00)
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	(6.471.523.366,00)	(16.666.817.750,50)
39	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	(15.668.131.546,00)	(15.797.180.015,45)
Jumlah		**(37.794.744.902,82)**	**(28.611.238.546,33)**

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan/atau kesalahan mendasar seperti Koreksi Ekuitas awal atas Kas, Piutang, Beban Dibayar Dimuka, Persediaan, Investasi, Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Lainnya. Koreksi Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah senilai Rp589.895.296,66. Saldo Koreksi Ekuitas tersebut merupakan akumulasi dari koreksi-koreksi yang secara langsung menambah atau mengurangi ekuitas di Tahun berjalan. Koreksi-koreksi yang langsung menambah ekuitas tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5. 127 Koreksi yang Langsung Menambah Ekuitas

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Koreksi SiLPA atas kas BLUD tahun sebelumnya pada Puskesmas Totoli	29.396,00
2.	Koreksi atas mutasi tambah aset tanah Tahun 2025	345.317.079,00
3.	Koreksi penyusutan atas mutasi kurang aset tetap	71.160.000,00
4.	Penghapusan utang Tahun 2022, dobel catat	4.981.821,00
5.	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap	297.684.696,00
6.	Koreksi atas penyisihan piutang tahun berjalan	29.398.109,66
Jumlah		**748.571.101,66**

Selain koreksi yang secara langsung menambah ekuitas, pada Tahun Anggaran 2025 juga terdapat koreksi-koreksi yang langsung mengurangi ekuitas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 128 Koreksi yang Langsung Mengurangi Ekuitas

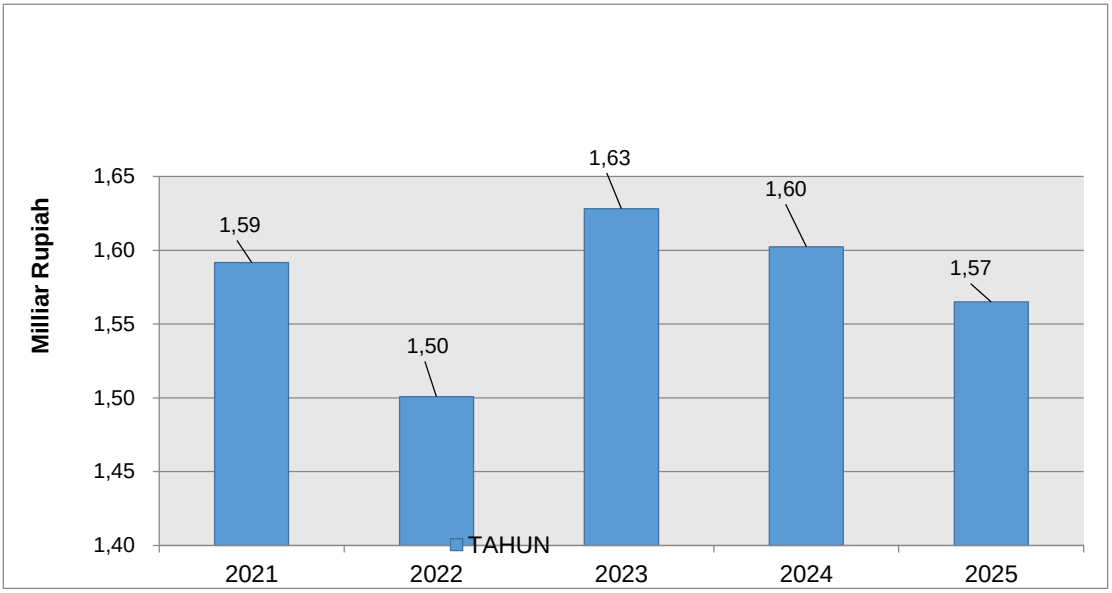
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi penyusutan atas mutasi tambah aset tetap	35.700.000,00
2	Koreksi penyusutan saldo awal dan koreksi tahun berjalan	14.512.016,00
3	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan bangunan dan gedung	2.063.789,00
4	Koreksi atas penghapusan aset tanah tahun sebelumnya karena dobel catat	106.400.000,00
Jumlah		**158.675.805,00**

5.6.4. Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Ekuitas Akhir	1.565.032.932.878,19	1.602.237.782.484,35	(37.204.849.606,16)	(2,32)
Jumlah	**1.565.032.932.878,19**	**1.602.237.782.484,35**	**(37.204.849.606,16)**	(2,32)

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas mencerminkan kondisi sumber daya ekonomi yang dimiliki Pemerintah Daerah pada suatu periode tertentu dalam menyelenggarakan operasionalisasi fungsi dan kewenangannya.

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp1.565.032.932.878,19 Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp37.204.849.606,16 atau menurun sebesar 2,32 persen dari Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024. Perubahan tersebut diakibatkan adanya pengurangan oleh Defisit-LO senilai Rp37.794.744.902,82 dan penambahan dari akumulasi Koreksi Ekuitas senilai Rp589.895.296,66. Berikut analisis tren ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene sejak lima tahun terakhir.



Grafik 5. 37 Tren Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene 2021-2025

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

BAB VI
KEWAJIBAN KONTIJENSI

BAB VI
KEWAJIBAN KONTIJENSI

Berdasarkan Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor: 1/Pdt.G/2026/PN Mjn, bahwa pada Hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 atas nama Wahyuni Masrin, SE Jurusita pada Pengadilan Negeri Majene, atas perintah Hakim Ketua dalam pekara perdata Nomor: 1/Pdt.G/2026/PN Mjn Tanggal 20 Januari 2026, Telah Memanggil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Bupati Majene (Pemerintah Kabupaten Majene), Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene sebagai Tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 03 Februari 2026 dalam perkara perdata antara Darman Mahmud sebagai Penggugat. Adapun perkara yang diajukan oleh Penggugat mengenai sebidang Tanah Perkarangan, yang terletak di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan luas ±12,59 x 29 m atau ± 365 m^2 yang di atasnya telah berdiri Bangunan Permanen PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) Milik Pemerintah Kabupaten Majene.

Menurut Penggugat Objek Sengketa adalah milik penggugat yang diperoleh secara sah melalui Jual-beli pada Tanggal 12 Juli 1995, atas penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat (Pemerintah Kabupaten Majene) telah melakukan Pembangunan Bangunan Permanen berupa PUSKESMAS PEMBANTU di atas objek sengketa, Tanpa Hak dan Tanpa seizin Penggugat, kemudian tidak mengakui kepemilikan Penggugat, serta tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat.

Relaas Pemberitahuan Putusan *Verstek* Kepada Tergugat Nomor: 1/Pdt.G/2026/PN Mjn, tanggal 29 April 2026 menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan *verstek*, menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan luas ±12,59 x 29 m atau ± 365 m^2 adalah milik penggugat.

Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan putusan tersebut akan melakukan upaya hukum untuk membuktikan kepemilikan atas barang milik daerah tersebut.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

BAB VII
PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 yaitu:

   1) Pendapatan Asli Daerah - LRA senilai Rp101.790.979.525,59 atau 87,03 persen dari anggaran senilai Rp116.958.226.043,00;

   2) Pendapatan Transfer - LRA senilai Rp779,225,014,984,00 atau 98,72 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp789.268.730.174,00; dan

   3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA untuk tahun 2025 adalah Nihil.

b. Realisasi Belanja Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 yaitu:

   1) Belanja Operasi senilai Rp720.624.276.601,78 atau 95,45 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp754.940.405.263,69;

   2) Belanja Modal senilai Rp 37.803.728.541.00 atau 87,48 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp43.213.252.689,00; dan

   3) Belanja Tak Terduga senilai Rp2.499.579.085,00 atau 86,19 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp2.900.000.000,00.

c. Realisasi Transfer Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 yaitu:.

   1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan senilai Rp853.100.342,00 atau 31,63 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp2.696.704.257,00;

   2) Transfer Bantuan Keuangan senilai Rp101.883.916.472,00 atau 95,38 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp106.812.090.704,00; dan

   3) Terdapat Surplus/(Defisit) Belanja dan Transfer senilai Rp17.351.393.467,81

d. Neraca Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 menunjukkan:

1) Aset

a)	Aset Lancar	: Rp	51.150.313.248,78
b)	Investasi Jangka Panjang	: Rp	67.455.648.023,10
c)	Aset Tetap	: Rp	1.475.883.616.947,45
d)	Aset Lainnya	: Rp	10.021.848.510,86
e)	Properti Investasi	: Rp	10.815.873.221,00

2) Kewajiban

a)	Kewajiban Jangka Pendek	: Rp	50.294.367.073,00
b)	Kewajiban Jangka Panjang	: Rp	0,00

3) Ekuitas : Rp 1.565.032.932.878,19

e. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Majene untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan:

1)	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	: Rp	55.134.672.208,81
2)	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	: Rp	(38.283.278.741,00)
3)	Arus Kas Bersih dari Pembiayaan	: Rp	0,00
4)	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	: Rp	26.843.710,00
5)	Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2025	: Rp	21.727.604.509,50

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025.

BUPATI MAJENE

Dr. H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Lampiran

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
REALISASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA DESA	PAGU	PENYALURAN	SISA ANGGARAN	PERSEN-TASI
1	Adolang	988.388.000,00	988.388.000,00	-	100%
2	Adolang Dhua	743.936.000,00	743.936.000,00	-	100%
3	Awo	902.499.000,00	607.338.600,00	295.160.400,00	67%
4	Bababulo	807.558.000,00	807.558.000,00	-	100%
5	Bababulo Utara	693.725.000,00	497.121.950,00	196.603.050,00	72%
6	Balombong	707.690.000,00	539.093.180,00	168.596.820,00	76%
7	Bambangan	997.798.000,00	997.798.000,00	-	100%
8	Banua Adolang	1.015.942.000,00	707.915.200,00	308.026.800,00	70%
9	Banua Sendana	968.256.000,00	621.475.200,00	346.780.800,00	64%
10	Betteng	893.892.000,00	893.892.000,00	-	100%
11	Binanga	875.081.000,00	875.081.000,00	-	100%
12	Bonde	822.870.000,00	822.870.000,00	-	100%
13	Bonde Utara	903.554.000,00	903.554.000,00	-	100%
14	Bonde bonde	655.649.000,00	423.809.000,00	231.840.000,00	65%
15	Bukit Samang	817.026.000,00	817.026.000,00	-	100%
16	Buttu Baruga	699.653.000,00	699.653.000,00	-	100%
17	Buttu Pamboang	725.273.000,00	725.273.000,00	-	100%
18	Kabiraan	844.575.000,00	844.575.000,00	-	100%
19	Kayuangin	844.863.000,00	844.863.000,00	-	100%
20	Lalatedzong	690.032.000,00	527.912.300,00	162.119.700,00	77%
21	Leppangang	692.432.000,00	692.432.000,00	-	100%
22	Limboro Rambu-Rambu	731.501.000,00	479.834.000,00	251.667.000,00	66%
23	Limbua	815.322.000,00	815.322.000,00	-	100%
24	Lombang	862.218.000,00	862.218.000,00	-	100%
25	Lombang Timur	923.691.000,00	923.691.000,00	-	100%
26	Lombong	833.112.000,00	833.112.000,00	-	100%
27	Lombong Timur	977.618.000,00	977.618.000,00	-	100%
28	Maliaya	843.855.000,00	617.431.800,00	226.423.200,00	73%
29	Manyamba	861.624.000,00	861.624.000,00	-	100%
30	Mekkatta	874.092.000,00	874.092.000,00	-	100%
31	Mekkatta Selatan	741.872.000,00	741.872.000,00	-	100%
32	Onang	1.017.044.000,00	656.057.600,00	360.986.400,00	65%
33	Onang Utara	710.786.000,00	478.586.000,00	232.200.000,00	67%

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
REALISASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA DESA	PAGU	PENYALURAN	SISA ANGGARAN	PERSEN-TASI
34	Palipi Soreang	981.204.000,00	981.204.000,00	-	100%
35	Pamboborang	1.131.840.000,00	1.131.840.000,00	-	100%
36	Paminggalan	879.772.000,00	879.772.000,00	-	100%
37	Panggalo	1.042.560.000,00	1.042.560.000,00	-	100%
38	Pesuloang	686.078.000,00	491.928.596,00	194.149.404,00	72%
39	Popenga	1.049.914.000,00	1.049.914.000,00	-	100%
40	Pundau	908.021.000,00	908.021.000,00	-	100%
41	Puttada	714.983.000,00	714.983.000,00	-	100%
42	Salutahongan	1.061.784.000,00	1.061.784.000,00	-	100%
43	Salutambung	814.140.000,00	814.140.000,00	-	100%
44	Sambabo	912.171.000,00	673.106.400,00	239.064.600,00	74%
45	Sendana	651.377.000,00	651.377.000,00	-	100%
46	Seppong	820.494.000,00	820.494.000,00	-	100%
47	Simbang	665.981.000,00	437.945.342,00	228.035.658,00	66%
48	Sulai	832.962.000,00	705.244.800,00	127.717.200,00	85%
49	Tallambalao	962.326.000,00	596.092.600,00	366.233.400,00	62%
50	Tallubanua	867.048.000,00	867.048.000,00	-	100%
51	Tallubanua Utara	800.232.000,00	800.232.000,00	-	100%
52	Tammerodo	786.246.000,00	529.058.400,00	257.187.600,00	67%
53	Tammerodo Utara	971.046.000,00	971.046.000,00	-	100%
54	Tandeallo	992.137.000,00	992.137.000,00	-	100%
55	Tinambung	797.919.000,00	797.919.000,00	-	100%
56	Totolisi Sendana	777.828.000,00	777.828.000,00	-	100%
57	Tubo	930.359.000,00	680.291.600,00	250.067.400,00	73%
58	Tubo Poang	695.633.000,00	695.633.000,00	-	100%
59	Tubo Selatan	884.375.000,00	884.375.000,00	-	100%
60	Tubo Tengah	687.257.000,00	513.822.800,00	173.434.200,00	75%
61	Ulidang	803.745.000,00	491.864.400,00	311.880.600,00	61%
62	Ulumanda	1.062.994.000,00	1.062.994.000,00	-	100%
JUMLAH		**52.655.853.000,00**	**47.727.678.768,00**	**4.928.174.232,00**	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
REALISASI ANGGARAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PEMILIK REKENING	REALISASI		TOTAL REALISASI
		KURANG BAYAR	TAHUN 2025	
1	Palipi Soreang	108.701.567,00	740.263.873,00	848.965.440,00
2	Pamboborang	122.582.123,00	805.167.717,00	927.749.840,00
3	Adolang	106.566.959,00	685.748.081,00	792.315.040,00
4	Bababulo	105.167.141,00	681.649.899,00	786.817.040,00
5	Bonde	117.882.369,00	743.142.071,00	861.024.440,00
6	Betteng	111.488.474,00	700.156.566,00	811.645.040,00
7	Simbang	91.079.846,00	669.526.874,00	760.606.720,00
8	Bonde Utara	133.130.408,00	836.049.432,00	969.179.840,00
9	Bababulo Utara	94.435.795,00	650.232.245,00	744.668.040,00
10	Buttu Pamboang	101.141.327,00	669.863.713,00	771.005.040,00
11	Banua Adolang	115.354.905,00	759.742.535,00	875.097.440,00
12	Adolang Dhua	100.977.870,00	669.385.170,00	770.363.040,00
13	Tinambung	103.353.335,00	748.872.505,00	852.225.840,00
14	Pesuloang	121.939.497,00	625.912.543,00	747.852.040,00
15	Balombong	97.746.933,00	635.659.707,00	733.406.640,00
16	Totolisi Sendana	109.053.941,00	693.029.099,00	802.083.040,00
17	Tallubanua	118.718.492,00	750.443.228,00	869.161.720,00
18	Lalatedzong	97.494.619,00	712.573.501,00	810.068.120,00
19	Binanga	92.096.739,00	643.384.301,00	735.481.040,00
20	Puttada	105.319.904,00	682.097.136,00	787.417.040,00
21	Paminggalan	107.711.409,00	689.098.631,00	796.810.040,00
22	Leppangang	98.102.361,00	660.966.679,00	759.069.040,00
23	Pundau	98.816.019,00	663.056.021,00	761.872.040,00
24	Sendana	92.683.348,00	674.221.372,00	766.904.720,00
25	Banua Sendana	102.609.634,00	674.162.406,00	776.772.040,00
26	Tallubanua Utara	122.072.404,00	731.142.636,00	853.215.040,00
27	Limboro Rambu-Rambu	105.814.856,00	683.546.184,00	789.361.040,00
28	Limbua	103.603.102,00	677.070.938,00	780.674.040,00
29	Bukit Samang	108.591.323,00	715.941.117,00	824.532.440,00
30	Bambangan	142.413.306,00	916.612.614,00	1.059.025.920,00
31	Lombang	108.267.720,00	787.526.520,00	895.794.240,00
32	Lombong	111.712.526,00	826.731.394,00	938.443.920,00
33	Mekkatta	123.942.732,00	935.069.988,00	1.059.012.720,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
REALISASI ANGGARAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PEMILIK REKENING	REALISASI		TOTAL REALISASI
		KURANG BAYAR	TAHUN 2025	
34	Maliaya	129.523.925,00	774.035.995,00	903.559.920,00
35	Lombang Timur	113.833.640,00	852.088.000,00	965.921.640,00
36	Salutahongan	140.099.965,00	880.720.275,00	1.020.820.240,00
37	Lombong Timur	103.453.649,00	676.633.391,00	780.087.040,00
38	Mekkatta Selatan	101.349.339,00	670.472.701,00	771.822.040,00
39	Kayuangin	112.624.776,00	776.016.064,00	888.640.840,00
40	Kabiraan	113.667.129,00	875.866.911,00	989.534.040,00
41	Sambabo	116.087.913,00	887.807.407,00	1.003.895.320,00
42	Tandeallo	134.068.882,00	935.596.158,00	1.069.665.040,00
43	Ulumanda	164.050.327,00	1.023.279.453,00	1.187.329.780,00
44	Salutambung	106.984.257,00	832.035.383,00	939.019.640,00
45	Popenga	143.247.647,00	962.468.393,00	1.105.716.040,00
46	Sulai	104.463.413,00	752.122.427,00	856.585.840,00
47	Panggalo	152.393.822,00	989.245.218,00	1.141.639.040,00
48	Seppong	104.708.597,00	781.959.923,00	886.668.520,00
49	Tammerodo	112.403.015,00	780.220.105,00	892.623.120,00
50	Ulidang	108.638.680,00	866.265.040,00	974.903.720,00
51	Tallambalao	124.426.736,00	772.359.384,00	896.786.120,00
52	Tammerodo Utara	101.677.779,00	743.967.061,00	845.644.840,00
53	Manyamba	117.928.962,00	767.278.478,00	885.207.440,00
54	Awo	124.532.142,00	859.143.098,00	983.675.240,00
55	Onang	144.664.014,00	971.468.306,00	1.116.132.320,00
56	Tubo	101.381.928,00	743.100.912,00	844.482.840,00
57	Onang Utara	106.713.357,00	763.562.763,00	870.276.120,00
58	Tubo Selatan	122.799.043,00	720.550.477,00	843.349.520,00
59	Bonde-Bonde	90.889.402,00	639.849.638,00	730.739.040,00
60	Tubo Tengah	91.940.156,00	715.458.684,00	807.398.840,00
61	Tubo Poang	92.409.393,00	692.832.447,00	785.241.840,00
62	Buttu Baruga	95.857.509,00	654.394.535,00	750.252.044,00
TOTAL		**6.957.392.381,00**	**47.098.845.323,00**	**54.056.237.704,00**

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHANNYA
PER 31 DESEMBER 2025

U R A I A N		KATEGORI PIUTANG				JUMLAH PIUTANG BRUTO	PENYISIHAN				JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG NETTO
		LANCAR (1 THN)	KURANG LANCAR (1 - 2 THN)	DIRAGUKAN (2 - 3 THN)	MACET (DI ATAS 3 THN)		LANCAR (1 THN) 0,5 %	KURANG LANCAR (1 - 2 THN) 10%	DIRAGUKAN (2 - 3 THN) 50%	MACET (DI ATAS 3 THN) 100%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PIUTANG PAJAK												
PBB P 2		**460.885.724,00**	**406.566.159,00**	**432.249.700,00**	**4.885.383.338,00**	**6.185.084.921,00**	**2.304.428,62**	**40.656.615,90**	**216.124.850,00**	**4.885.383.338,00**	**5.144.469.232,52**	**1.040.615.688,48**
	Tahun Tagihan 2010	-	-	-	128.202.893,00	128.202.893,00	-	-	-	128.202.893,00	128.202.893,00	-
	Tahun Tagihan 2011	-	-	-	140.468.394,00	140.468.394,00	-	-	-	140.468.394,00	140.468.394,00	-
	Tahun Tagihan 2012	-	-	-	176.483.440,00	176.483.440,00	-	-	-	176.483.440,00	176.483.440,00	-
	Tahun Tagihan 2013	-	-	-	369.997.788,00	369.997.788,00	-	-	-	369.997.788,00	369.997.788,00	-
	Tahun Tagihan 2014	-	-	-	445.176.876,00	445.176.876,00	-	-	-	445.176.876,00	445.176.876,00	-
	Tahun Tagihan 2015	-	-	-	296.384.026,00	296.384.026,00	-	-	-	296.384.026,00	296.384.026,00	-
	Tahun Tagihan 2016	-	-	-	427.028.286,00	427.028.286,00	-	-	-	427.028.286,00	427.028.286,00	-
	Tahun Tagihan 2017	-	-	-	448.503.644,00	448.503.644,00	-	-	-	448.503.644,00	448.503.644,00	-
	Tahun Tagihan 2018	-	-	-	453.634.250,00	453.634.250,00	-	-	-	453.634.250,00	453.634.250,00	-
	Tahun Tagihan 2019	-	-	-	547.730.783,00	547.730.783,00	-	-	-	547.730.783,00	547.730.783,00	-
	Tahun Tagihan 2020	-	-	-	447.384.034,00	447.384.034,00	-	-	-	447.384.034,00	447.384.034,00	-
	Tahun Tagihan 2021	-	-	-	616.716.851,00	616.716.851,00	-	-	-	616.716.851,00	616.716.851,00	-
	Tahun Tagihan 2022	-	-	-	387.672.073,00	387.672.073,00	-	-	-	387.672.073,00	387.672.073,00	-
	Tahun Tagihan 2023	-	-	432.249.700,00	-	432.249.700,00	-	-	216.124.850,00	-	216.124.850,00	216.124.850,00
	Tahun Tagihan 2024	-	406.566.159,00	-	-	406.566.159,00	-	40.656.615,90	-	-	40.656.615,90	365.909.543,10
	Tahun Tagihan 2025	460.885.724,00	-	-	-	460.885.724,00	2.304.428,62		-		2.304.428,62	458.581.295,38
BPHTB		**-**	**-**	**-**	**186.132.996,50**	**186.132.996,50**	**-**	**-**	**-**	**186.132.996,50**	**186.132.996,50**	**-**
	Tahun Tagihan 2011	-		-	28.097.936,50	28.097.936,50	-	-	-	28.097.936,50	28.097.936,50	-
	Tahun Tagihan 2015	-	-	-	133.250.000,00	133.250.000,00	-	-	-	133.250.000,00	133.250.000,00	-
	Tahun Tagihan 2017	-	-	-	21.285.060,00	21.285.060,00	-	-	-	21.285.060,00	21.285.060,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHANNYA
PER 31 DESEMBER 2025

U R A I A N			KATEGORI PIUTANG				JUMLAH PIUTANG BRUTO	PENYISIHAN				JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG NETTO
			LANCAR (1 THN)	KURANG LANCAR (1 - 2 THN)	DIRAGUKAN (2 - 3 THN)	MACET (DI ATAS 3 THN)		LANCAR (1 THN) 0,5 %	KURANG LANCAR (1 - 2 THN) 10%	DIRAGUKAN (2 - 3 THN) 50%	MACET (DI ATAS 3 THN) 100%		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tahun Tagihan 2019	-	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
	Hotel		**-**	**-**	**-**	**20.620.000,00**	**20.620.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.620.000,00**	**20.620.000,00**	**-**
		Tahun Tagihan 2015		-	-	3.850.000,00	3.850.000,00	-	-	-	3.850.000,00	3.850.000,00	-
		Tahun Tagihan 2017		-	-	15.650.000,00	15.650.000,00	-	-	-	15.650.000,00	15.650.000,00	-
		Tahun Tagihan 2020	-	-	-	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	-	1.120.000,00	1.120.000,00	-
								-	-	-	-	-	-
	Tempat Hiburan		**-**	**-**	**-**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**-**
		Tahun Tagihan 2015	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-
		Tahun Tagihan 2016	-	-	-	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	-	1.750.000,00	1.750.000,00	-
								-	-	-	-	-	-
	Restoran		**55.003.450,00**	**23.647.800,00**	**1.950.000,00**	**427.232.091,00**	**507.833.341,00**	**275.017,25**	**2.364.780,00**	**975.000,00**	**427.232.091,00**	**430.846.888,25**	**76.986.452,75**
		Tahun Tagihan 2015	-	-	-	112.467.300,00	112.467.300,00	-	-	-	112.467.300,00	112.467.300,00	-
		Tahun Tagihan 2016	-	-	-	27.765.400,00	27.765.400,00	-	-	-	27.765.400,00	27.765.400,00	-
		Tahun Tagihan 2017	-	-	-	79.632.621,00	79.632.621,00	-	-	-	79.632.621,00	79.632.621,00	-
		Tahun Tagihan 2018	-	-	-	15.340.000,00	15.340.000,00	-	-	-	15.340.000,00	15.340.000,00	-
		Tahun Tagihan 2019	-	-	-	23.751.050,00	23.751.050,00	-	-	-	23.751.050,00	23.751.050,00	-
		Tahun Tagihan 2020	-	-	-	43.002.050,00	43.002.050,00	-	-	-	43.002.050,00	43.002.050,00	-
		Tahun Tagihan 2021	-	-	-	72.975.920,00	72.975.920,00	-	-	-	72.975.920,00	72.975.920,00	-
		Tahun Tagihan 2022	-	-	-	52.297.750,00	52.297.750,00	-	-	-	52.297.750,00	52.297.750,00	-
		Tahun Tagihan 2023	-	-	1.950.000,00	-	1.950.000,00	-	-	975.000,00	-	975.000,00	975.000,00
		Tahun Tagihan 2024	-	23.647.800,00	-	-	23.647.800,00	-	2.364.780,00	-	-	2.364.780,00	21.283.020,00
		Tahun Tagihan 2025	55.003.450,00	-	-	-	55.003.450,00	275.017,25	-	-	-	275.017,25	54.728.432,75

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHANNYA
PER 31 DESEMBER 2025

U R A I A N		KATEGORI PIUTANG				JUMLAH PIUTANG BRUTO	PENYISIHAN				JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG NETTO
		LANCAR (1 THN)	KURANG LANCAR (1 - 2 THN)	DIRAGUKAN (2 - 3 THN)	MACET (DI ATAS 3 THN)		LANCAR (1 THN) 0,5 %	KURANG LANCAR (1 - 2 THN) 10%	DIRAGUKAN (2 - 3 THN) 50%	MACET (DI ATAS 3 THN) 100%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reklame		**-**	**-**	**-**	**68.569.200,00**	**68.569.200,00**	**-**	**-**	**-**	**68.569.200,00**	**68.569.200,00**	**-**
	Tahun Tagihan 2015	-	-	-	66.493.000,00	66.493.000,00	-	-	-	66.493.000,00	66.493.000,00	-
	Tahun Tagihan 2016	-	-	-	2.076.200,00	2.076.200,00	-	-	-	2.076.200,00	2.076.200,00	-
								-	-	-	-	-
Galian C		**-**	**-**	**-**	**586.766.319,90**	**586.766.319,90**	**-**	**-**	**-**	**586.766.319,90**	**586.766.319,90**	**-**
	Tahun Tagihan 2015	-	-	-	3.872.000,00	3.872.000,00	-	-	-	3.872.000,00	3.872.000,00	-
	Tahun Tagihan 2016	-	-	-	543.750.000,00	543.750.000,00	-	-	-	543.750.000,00	543.750.000,00	-
	Tahun Tagihan 2017	-	-	-	31.267.000,00	31.267.000,00	-	-	-	31.267.000,00	31.267.000,00	-
	Tahun Tagihan 2018	-	-	-	5.341.000,00	5.341.000,00	-	-	-	5.341.000,00	5.341.000,00	-
	Tahun Tagihan 2019	-	-	-	1.705.319,90	1.705.319,90	-	-	-	1.705.319,90	1.705.319,90	-
	Tahun Tagihan 2022	-	-	-	831.000,00	831.000,00	-	-	-	831.000,00	831.000,00	-
Jumlah Piutang Pajak		**515.889.174,00**	**430.213.959,00**	**434.199.700,00**	**6.176.953.945,40**	**7.557.256.778,40**	**2.579.445,87**	**43.021.395,90**	**217.099.850,00**	**6.176.953.945,40**	**6.439.654.637,17**	**1.117.602.141,23**
PIUTANG RETRIBUSI												
Pemakaian Rumah Dinas		**21.040.000,00**	**17.720.000,00**	**15.000.000,00**	**42.040.000,00**	**95.800.000,00**	**105.200,00**	**1.772.000,00**	**7.500.000,00**	**42.040.000,00**	**51.417.200,00**	**44.382.800,00**
	Tahun Tagihan 2015	-	-	-	12.280.000,00	12.280.000,00	-	-	-	12.280.000,00	12.280.000,00	-
	Tahun Tagihan 2017	-	-	-	720.000,00	720.000,00	-	-	-	720.000,00	720.000,00	-
	Tahun Tagihan 2018	-	-	-	4.360.000,00	4.360.000,00	-	-	-	4.360.000,00	4.360.000,00	-
	Tahun Tagihan 2019	-	-	-	4.280.000,00	4.280.000,00	-	-	-	4.280.000,00	4.280.000,00	-
	Tahun Tagihan 2020	-	-	-	6.360.000,00	6.360.000,00	-	-	-	6.360.000,00	6.360.000,00	-
	Tahun Tagihan 2021	-	-	-	8.120.000,00	8.120.000,00	-	-	-	8.120.000,00	8.120.000,00	-
	Tahun Tagihan 2022	-	-	-	5.920.000,00	5.920.000,00	-	-	-	5.920.000,00	5.920.000,00	-
	Tahun Tagihan 2023	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHANNYA
PER 31 DESEMBER 2025

U R A I A N		KATEGORI PIUTANG				JUMLAH PIUTANG BRUTO	PENYISIHAN				JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG NETTO
		LANCAR (1 THN)	KURANG LANCAR (1 - 2 THN)	DIRAGUKAN (2 - 3 THN)	MACET (DI ATAS 3 THN)		LANCAR (1 THN) 0,5 %	KURANG LANCAR (1 - 2 THN) 10%	DIRAGUKAN (2 - 3 THN) 50%	MACET (DI ATAS 3 THN) 100%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tahun Tagihan 2024	-	17.720.000,00	-	-	17.720.000,00	-	1.772.000,00	-	-	1.772.000,00	15.948.000,00
	Tahun Tagihan 2025	21.040.000,00	-	-		21.040.000,00	105.200,00	-	-	-	105.200,00	20.934.800,00
Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga		**-**	**600.000,00**	**-**	**-**	**600.000,00**	**-**	**60.000,00**	**-**	**-**	**60.000,00**	**540.000,00**
	Retribusi Gedung Olahraga	-	600.000,00	-	-	600.000,00	-	60.000,00	-	-	60.000,00	540.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian		**-**	**-**	**23.862.500,00**	**14.490.000,00**	**38.352.500,00**	**-**	**-**	**11.931.250,00**	**14.490.000,00**	**26.421.250,00**	**11.931.250,00**
Menara	Tahun Tagihan 2021	-	-	-	3.795.000,00	3.795.000,00	-	-	-	3.795.000,00	3.795.000,00	-
	Tahun Tagihan 2022	-	-	-	10.695.000,00	10.695.000,00	-	-	-	10.695.000,00	10.695.000,00	-
	Tahun Tagihan 2023	-	-	23.862.500,00	-	23.862.500,00	-	-	11.931.250,00	-	11.931.250,00	11.931.250,00
Pemakaian Sarana Daerah		**-**	**-**	**-**	**87.500.000,00**	**87.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**87.500.000,00**	**87.500.000,00**	**-**
	Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	-	-	87.500.000,00	87.500.000,00	-	-	-	87.500.000,00	87.500.000,00	-
Retribusi Pasar		**76.355.000,00**	**99.313.000,00**	**98.620.000,00**	**227.542.060**	**501.830.060,00**	**381.775,00**	**9.931.300,00**	**49.310.000,00**	**227.542.060,00**	**287.165.135,00**	**214.664.925,00**
	Tahun Tagihan 2017		-	-	13.700.000,00	13.700.000,00	-	-	-	13.700.000,00	13.700.000,00	-
	Tahun Tagihan 2018	-	-	-	18.742.060,00	18.742.060,00	-	-	-	18.742.060,00	18.742.060,00	-
	Tahun Tagihan 2019	-	-	-	12.523.000,00	12.523.000,00	-	-	-	12.523.000,00	12.523.000,00	-
	Tahun Tagihan 2020	-	-	-	45.486.000,00	45.486.000,00	-	-	-	45.486.000,00	45.486.000,00	-
	Tahun Tagihan 2021	-	-	-	95.242.000,00	95.242.000,00	-	-	-	95.242.000,00	95.242.000,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHANNYA
PER 31 DESEMBER 2025

U R A I A N		KATEGORI PIUTANG				JUMLAH PIUTANG BRUTO	PENYISIHAN				JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG NETTO
		LANCAR (1 THN)	KURANG LANCAR (1 - 2 THN)	DIRAGUKAN (2 - 3 THN)	MACET (DI ATAS 3 THN)		LANCAR (1 THN) 0,5 %	KURANG LANCAR (1 - 2 THN) 10%	DIRAGUKAN (2 - 3 THN) 50%	MACET (DI ATAS 3 THN) 100%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tahun Tagihan 2022	-	-	-	41.849.000,00	41.849.000,00	-	-	-	41.849.000,00	41.849.000,00	-
	Tahun Tagihan 2023	-	-	98.620.000,00	-	98.620.000,00	-	-	49.310.000,00	-	49.310.000,00	49.310.000,00
	Tahun Tagihan 2024	-	99.313.000,00	-	-	99.313.000,00	-	9.931.300,00	-	-	9.931.300,00	89.381.700,00
	Tahun Tagihan 2025	76.355.000,00				76.355.000,00	381.775,00	-	-	-	381.775,00	75.973.225,00
Ret. Pasar Grosir / Pertokoan		**22.835.000,00**	**34.905.000,00**	**41.325.000,00**	**134.709.200,00**	**233.774.200,00**	**114.175,00**	**3.490.500,00**	**20.662.500,00**	**134.709.200,00**	**158.976.375,00**	**74.797.825,00**
	Tahun Tagihan 2015	-	-	-	7.810.600,00	7.810.600,00	-	-	-	7.810.600,00	7.810.600,00	-
	Tahun Tagihan 2016	-	-	-	1.119.800,00	1.119.800,00	-	-	-	1.119.800,00	1.119.800,00	-
	Tahun Tagihan 2017	-	-	-	450.800,00	450.800,00	-	-	-	450.800,00	450.800,00	-
	Tahun Tagihan 2018	-	-	-	2.628.000,00	2.628.000,00	-	-	-	2.628.000,00	2.628.000,00	-
	Tahun Tagihan 2019	-	-	-	7.320.000,00	7.320.000,00	-	-	-	7.320.000,00	7.320.000,00	-
	Tahun Tagihan 2020	-	-		31.080.000,00	31.080.000,00	-	-	-	31.080.000,00	31.080.000,00	-
	Tahun Tagihan 2021	-		-	62.970.000,00	62.970.000,00	-	-	-	62.970.000,00	62.970.000,00	-
	Tahun Tagihan 2022	-	-	-	21.330.000,00	21.330.000,00	-	-	-	21.330.000,00	21.330.000,00	-
	Tahun Tagihan 2023	-	-	41.325.000,00	-	41.325.000,00	-	-	20.662.500,00	-	20.662.500,00	20.662.500,00
	Tahun Tagihan 2024	-	34.905.000,00	-	-	34.905.000,00	-	3.490.500,00	-	-	3.490.500,00	31.414.500,00
	Tahun Tagihan 2025	22.835.000,00			-	22.835.000,00	114.175,00	-	-	-	114.175,00	22.720.825,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan		**176.691.357,00**	**-**	**-**	**-**	**176.691.357,00**	**883.456,78**	**-**	**-**	**-**	**883.456,78**	**175.807.900,22**
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	143.707.357,00	-	-	-	143.707.357,00	718.536,78	-	-	-	718.536,78	142.988.820,22
	BANGGAE II	3.775.000,00	-	-	-	3.775.000,00	18.875,00	-	-	-	18.875,00	3.756.125,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHANNYA
PER 31 DESEMBER 2025

U R A I A N		KATEGORI PIUTANG				JUMLAH PIUTANG BRUTO	PENYISIHAN				JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG NETTO
		LANCAR (1 THN)	KURANG LANCAR (1 - 2 THN)	DIRAGUKAN (2 - 3 THN)	MACET (DI ATAS 3 THN)		LANCAR (1 THN) 0,5 %	KURANG LANCAR (1 - 2 THN) 10%	DIRAGUKAN (2 - 3 THN) 50%	MACET (DI ATAS 3 THN) 100%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BANGGAE I		2.952.000,00	-	-	-	2.952.000,00	14.760,00	-	-	-	14.760,00	2.937.240,00
LEMBANG		10.182.000,00	-	-	-	10.182.000,00	50.910,00	-	-	-	50.910,00	10.131.090,00
PAMBOANG		7.258.000,00	-	-	-	7.258.000,00	36.290,00	-	-	-	36.290,00	7.221.710,00
SALUTAMBUNG		250.000,00	-	-	-	250.000,00	1.250,00	-	-	-	1.250,00	248.750,00
SENDANA I		2.890.000,00	-	-	-	2.890.000,00	14.450,00	-	-	-	14.450,00	2.875.550,00
TAMMERODO		2.580.000,00	-	-	-	2.580.000,00	12.900,00	-	-	-	12.900,00	2.567.100,00
TOTOLI		2.497.000,00	-	-	-	2.497.000,00	12.485,00	-	-	-	12.485,00	2.484.515,00
ULUMANDA		600.000,00	-	-	-	600.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00	597.000,00
Jumlah Piutang Retribusi		**296.921.357,00**	**152.538.000,00**	**178.807.500,00**	**506.281.260,00**	**1.134.548.117,00**	**1.484.606,78**	**15.253.800,00**	**89.403.750,00**	**506.281.260,00**	**612.423.416,78**	**522.124.700,22**
PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH												
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-
					-							
PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH												
	Piutang DBH PBBKB Triwulan 3 tahun 2025	2.313.838.150,00		-	-	2.313.838.150,00	11.569.190,75	-	-	-	11.569.190,75	2.302.268.959,25
	Piutang DBH PKB Triwulan 3 tahun 2025	52.251.589,00		-	-	52.251.589,00	261.257,94	-	-	-	261.257,94	51.990.331,06
	Piutang DBH Air Permukaan Triwulan 3 tahun 2025	4.263.445,00		-	-	4.263.445,00	21.317,22	-	-	-	21.317,22	4.242.127,78
Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah		**2.370.353.184,00**	**-**	**-**	**-**	**2.370.353.184,00**	**11.851.765,91**	**-**	**-**	**-**	**11.851.765,91**	**2.358.501.418,09**
PIUTANG LAINNYA												

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHANNYA
PER 31 DESEMBER 2025

U R A I A N		KATEGORI PIUTANG				JUMLAH PIUTANG BRUTO	PENYISIHAN				JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG NETTO
		LANCAR (1 THN)	KURANG LANCAR (1 - 2 THN)	DIRAGUKAN (2 - 3 THN)	MACET (DI ATAS 3 THN)		LANCAR (1 THN) 0,5 %	KURANG LANCAR (1 - 2 THN) 10%	DIRAGUKAN (2 - 3 THN) 50%	MACET (DI ATAS 3 THN) 100%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		**377.822.547,60**	**-**	**-**	**510.154.330,40**	**887.976.878,00**	**1.889.112,74**	**-**	**-**	**510.154.330,40**	**512.043.443,14**	**375.933.434,86**
	Sekretariat DPRD	-	-	-	466.851.500,00	466.851.500,00	-	-	-	466.851.500,00	466.851.500,00	-
	Badan Keuangan Daerah dan Aset	377.822.547,60	-	-	30.302.830,40	408.125.378,00	1.889.112,74	-	-	30.302.830,40	32.191.943,14	375.933.434,86
	Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	-	13.000.000,00	13.000.000,00	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		**-**	**-**	**-**	**56.999.299,04**	**56.999.299,04**	**-**	**-**	**-**	**56.999.299,04**	**56.999.299,04**	**-**
	Badan Keuangan Daerah dan Aset	-	-	-	56.999.299,04	56.999.299,04	-	-	-	56.999.299,04	56.999.299,04	-
Jumlah Piutang Lainnya		**377.822.547,60**	**-**	**-**	**567.153.629,44**	**944.976.177,04**	**1.889.112,74**	**-**	**-**	**567.153.629,44**	**569.042.742,18**	**375.933.434,86**
Jumlah Piutang		**3.560.986.262,60**	**582.751.959,00**	**613.007.200,00**	**7.250.388.834,84**	**12.007.134.256,44**	**17.804.931,30**	**58.275.195,90**	**306.503.600,00**	**7.250.388.834,84**	**7.632.972.562,04**	**4.374.161.694,40**

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR SISA PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	UNIT KERJA	BAHAN	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR							OBAT-OBATAN	PERSEDIAAN BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN		NATURA DAN PAKAN	JUMLAH
		Bahan Lainnya	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Benda Pos	Bahan Komputer	Alat Listrik	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Natura dan Pakan Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Kesehatan (Instalasi Farmasi & Rs Pratama)									5.901.931.344,83				**5.901.931.344,83**
2	PKM Banggae I									205.813.649,95				**205.813.649,95**
3	PKM Banggae II	1.031.190,00		315.000,00		120.000,00	660.000,00		192.000,00	215.447.843,77				**217.766.033,77**
4	PKM Lembang		145.000,00							245.509.556,67				**245.654.556,67**
5	PKM Totoli	333.000,00								200.374.893,00				**200.707.893,00**
6	PKM Pamboang		160.000,00						110.000,00	204.054.704,72				**204.324.704,72**
7	PKM Sendana I		630.300,00	920.000,00	80.000,00	490.000,00	1.140.000,00	785.100,00	1.622.000,00	322.101.905,19				**327.769.305,19**
8	PKM Tammeroddo									123.570.021,00				**123.570.021,00**
9	PKM Sendana II									144.724.775,64				**144.724.775,64**
10	PKM Salutambung									150.357.560,00				**150.357.560,00**
11	PKM Ulumanda									144.479.392,65				**144.479.392,65**
12	PKM Malunda									109.604.221,00				**109.604.221,00**

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR SISA PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	UNIT KERJA	BAHAN	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR							OBAT-OBATAN	PERSEDIAAN BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN		NATURA DAN PAKAN	JUMLAH
		Bahan Lainnya	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Benda Pos	Bahan Komputer	Alat Listrik	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Natura dan Pakan Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	RSUD	820.596.132,35	441.000,00						219.600,00	1.991.472.556,71			12.301.150,00	**2.825.030.439,06**
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang										13.042.585.303,00	648.863.301,00		**13.691.448.604,00**
15	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil				201.526.938,00									**201.526.938,00**
16	Badan Pendapatan Daerah				23.980.881,00									**23.980.881,00**
17	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana									97.557.816,00	127.299.996,00			**224.857.812,00**
18	Badan Perencanaan Daerah		180.000,00	191.000,00										**371.000,00**
19	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		20.000,00	62.000,00										**82.000,00**
TOTAL		**821.960.322,35**	**1.576.300,00**	**1.488.000,00**	**225.587.819,00**	**610.000,00**	**1.800.000,00**	**785.100,00**	**2.143.600,00**	**10.057.000.241,13**	**13.169.885.299,00**	**648.863.301,00**	**12.301.150,00**	**24.944.001.132,48**
JUMLAH		**821.960.322,35**	**233.990.819,00**							**10.057.000.241,13**	**13.818.748.600,00**		**12.301.150,00**	**24.944.001.132,48**

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
	Bidang PEMBANGUNAN							
1	TOKO WAHYU TANI		Kompleks Pasar Sentral	TAHUN 2007	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
2	TOKO H. MUSTAFA		Kompleks Pasar Sentral	TAHUN 2007	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
3	VARIASI MOTOR		Tulu Majene	TAHUN 2007	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	
4	DOBBI		Jl. Gatot Subroto	TAHUN 2007	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	
5	USAHA JUMRAH		Lingk. Pakkola	TAHUN 2007	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
6	USAHA KOPRA MANDIRI		Kel. Mosso Dhua Sendana	TAHUN 2007	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
7	COTO SINAR PAGI		Pertokoan Majene	TAHUN 2007	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	
8	USAHA DARNO KASIM		Jl. Gatot Subroto	TAHUN 2007	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
9	USAHA MANDIRI		Desa Pundau Sendana	TAHUN 2007	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
10	USAHA TERNAK PAMMASE		Jl. Kapten Taufik Abdullah	TAHUN 2007	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
11	USAHA CAMPURAN		Tanjung Batu Majene	TAHUN 2007	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
12	TOKO HJ. SAHARA		Kompleks Pasar Sentral	TAHUN 2007	900.000,00	0,00	900.000,00	
13	RELAWAN BERSATU		Totolisi Utara	TAHUN 2007	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
14	USAHA ROTI		Lingk. Leppe	TAHUN 2007	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	
15	USAHA HASIL BUMI		Lingkungan Malunda	TAHUN 2007	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
16	SUMBER LAUT		Lingkungan Mosso Dhua	TAHUN 2007	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	
17	KLP. SIPATUO		Somba Kel. Mosso	TAHUN 2007	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	
18	USAHA LESTARI		Perumahan Lutang	TAHUN 2007	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
19	SUMBER REZEKI		Kompleks Terminal	TAHUN 2007	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	
20	TUMBUR WAY		Labuang	TAHUN 2007	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
21	USAHA REZEKI		Kompleks Terminal	TAHUN 2007	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
22	KLP. SEPAKAT		Somba Utara	TAHUN 2007	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	
23	ANFAL JAYA PRINTING		Jl. Lanto Dg. Pasewang	TAHUN 2007	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	
24	SYAHRIR TOPPORANG		Rangas Kelurahan Totoli	TAHUN 2007	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
25	HARAPAN JAYA		Palipi Majene	TAHUN 2007	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	
26	USAHA AZZAHRAH		Komp. Pasar sentral	TAHUN 2007	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	
27	KLP. MADANI		Pamboang Majene	TAHUN 2007	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
28	KLP. RIOMU		Totolisi Utara	TAHUN 2007	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
29	USAHA BATU MERAH		Taukong Desa	TAHUN 2007	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
30	USAHA SEMBAKO		Lingk. Malunda	TAHUN 2007	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	
31	TOKO RIRIN		Komp. Pasar sentral	TAHUN 2007	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	
32	TOKO MALIOBORO	WAJDI	Jl. Gatot Subroto	TAHUN 2007	900.000,00	0,00	900.000,00	
33	TOKO NUR HIKMAH		Komp. Pasar sentral	TAHUN 2007	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	
34	KLP. SIPARANNU		sendana	TAHUN 2007	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	
35	PENGECER BBM		Pappota Majene	TAHUN 2007	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
36	REPARASI BECAK		Parappe	TAHUN 2007	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
37	USAHA BARU	Tayyeb	Lalattedong Sendana	TAHUN 2008	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
38	PATANI TAYLOR	Mustakim, S. Ag	Lipu Majene	TAHUN 2008	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	
39	REZKI UTAMA	Zakiah	Komp. BTN Leppe	TAHUN 2008	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	
40	RM. MASSIPA	Rahmianti	Komp. Terminal Majene	TAHUN 2008	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
41	USAHA HARIANI	Hariani	Malunda Majene	TAHUN 2008	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	
42	USAHA BERSAMA		Binanga Majene	TAHUN 2008	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
43	WIWIN MOTOR	Hj. Hasna	Malunda	TAHUN 2008	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	
44	KIOS ADNAN		Somba Sendana	TAHUN 2008	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	
45	KEL. ASOKA	Halimia	Hasmiah	TAHUN 2008	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
46	SAEPUL RIZAL	Muh. Rizal	Muh. Rizal	TAHUN 2008	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	
47	USRIB MOTOR	Muhlis Idrus	Camba Majene	TAHUN 2008	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	
48	ANUGERAH ILAHI	Rusdi	Komp. Pasar sentral	TAHUN 2008	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	
49	IAN KOSMETIK	Abd. Chalik	Komp. Pasar sentral	TAHUN 2008	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
50	KIOS MURNI	Murni	Tanjung Batu Majene	TAHUN 2008	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
51	KUB SEPAKAT	Kurniati	Komp BTN Leppe	TAHUN 2008	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
52	TOKO SILMI	Muh. Zibli	Depan kantor Bupati	TAHUN 2008	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
53	RENADA I ORGANISER	Darwan B	Komp BTN Leppe	TAHUN 2008	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
54	USAHA PANDE BESI		Lingk Pamboborang	TAHUN 2008	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
55	TOKO MAJU REZEKI	Irma/Dirham	Lingk Tanangan	TAHUN 2008	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	
56	USAHA BAHTIAR	Bahtiar	Ulumanda	TAHUN 2008	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
57	USAHA ABADI	Abdul Rahman	Lingk Pamboborang	TAHUN 2008	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
JUMLAH					**330.000.000,00**	**0,00**	**330.000.000,00**	
Bidang KELAUTAN & PERIKANAN					-			
1	HUSEN/HAPI		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	2.277.000,00	0,00	2.277.000,00	
2	MANGGAR		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	3.152.000,00	0,00	3.152.000,00	
3	RIDWAN/JUMAALI		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	2.937.000,00	0,00	2.937.000,00	
4	BUJAENI		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	3.127.000,00	0,00	3.127.000,00	
5	AGUS/BORAHIMA		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	2.812.000,00	0,00	2.812.000,00	
6	RAHMAT MUSA		Somba Utara	TAHUN 2000-2001	2.597.000,00	0,00	2.597.000,00	
7	ABD. RAZAK		Labuang Somba	TAHUN 2000-2001	2.898.000,00	0,00	2.898.000,00	
8	LUKMAN/USMAN		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	2.737.000,00	0,00	2.737.000,00	
9	SUKRI/SAPARUDDIN		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	2.827.000,00	0,00	2.827.000,00	
10	RAUF		Apoang	TAHUN 2000-2001	3.037.000,00	0,00	3.037.000,00	
11	KAMARUDDN		Apoang	TAHUN 2000-2001	3.577.000,00	0,00	3.577.000,00	
12	M. DARDI		Luwaor	TAHUN 2000-2001	3.097.000,00	0,00	3.097.000,00	
13	SAPPE, HK/HASBULLAH		Pangali-ali Majene	TAHUN 2000-2001	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	
14	HASANUDDIN		Somba Utara	TAHUN 2000-2001	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	
15	JARUM/BAHIH		Rangas/Somba	TAHUN 2000-2001	7.855.000,00	0,00	7.855.000,00	
16	HASBULLAH		Karondongan	TAHUN 2000-2001	775.000,00	0,00	775.000,00	
17	JASMAR		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	2.627.000,00	0,00	2.627.000,00	
18	DAMING		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	2.487.000,00	0,00	2.487.000,00	
19	BAKRI		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	
20	HAMIL		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	
21	BAHYUDDIN		Pellatoang	TAHUN 2000-2001	3.197.000,00	0,00	3.197.000,00	
22	SAIL		Tamo	TAHUN 2000-2001	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	
23	NURDIN		Bababulo Pamboang	TAHUN 2000-2001	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	
24	CAENGGA		Labuang Somba	TAHUN 2000-2001	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	
25	ABD. RAHIM		Passarang	TAHUN 2000-2001	807.000,00	0,00	807.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
26	RAHMAT		Garo'go	TAHUN 2000-2001	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	
27	NABIB, R		Mekkatta/Malunda	TAHUN 2000-2001	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	
28	DAHLAN		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	
29	RAJAB		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	
30	ILYAS		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	3.085.000,00	0,00	3.085.000,00	
31	HASMINUDDIN		Mosso	TAHUN 2000-2001	2.327.000,00	0,00	2.327.000,00	
32	TURUNG		Somba Utara	TAHUN 2000-2001	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	
33	M. YUSUF		Pangali-ali Majene	TAHUN 2000-2001	3.477.000,00	0,00	3.477.000,00	
34	NAHARUDDIN		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	
35	MUH. AMIN		Pangali-ali Majene	TAHUN 2000-2001	4.946.000,00	0,00	4.946.000,00	
36	BONANG		Garo'go	TAHUN 2000-2001	2.846.000,00	0,00	2.846.000,00	
37	ABD. RASYID		Baurung	TAHUN 2000-2001	5.226.000,00	0,00	5.226.000,00	
38	RISWAN TAHIR/YUSRAN		Baru/Banggae	TAHUN 2000-2001	7.246.000,00	0,00	7.246.000,00	
39	HABIB/HALBI		Rangas Timur	TAHUN 2000-2001	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	
40	SAPPE/JASMAN		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	
41	SALAHUDDIN		Karondongan	TAHUN 2000-2001	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	
42	JALALUDDIN		Tallu Banua	TAHUN 2000-2001	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	
43	ABD. LATIF		Rangas Timur	TAHUN 2000-2001	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	
44	SARJONO		Belalang/onang	TAHUN 2000-2001	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00	
45	ANDALING		Rangas Barat	TAHUN 2000-2001	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	
46	ABD. SAMAD		Labuang Somba	TAHUN 2000-2001	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	
47	ABD. AZIS		Rangas Barat	TAHUN 2000-2001	3.763.750,00	0,00	3.763.750,00	
48	KASMAN		Somba Utara	TAHUN 2000-2001	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	
49	DARMING		Galung-galung	TAHUN 2000-2001	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	
50	SAMI/IDRIS		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	
51	M. ANAS		Batu Taku	TAHUN 2000-2001	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
52	SANUDDIN, P		Maliaya/mekkatta	TAHUN 2000-2001	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
53	ABD. MUIN		Labuang Somba	TAHUN 2000-2001	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	
54	DAHANG/KAIS		Belalang/onang	TAHUN 2000-2001	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
55	HABO		Para'baya/Onang	TAHUN 2000-2001	3.695.000,00	0,00	3.695.000,00	
56	KANNUR		Somba Utara	TAHUN 2000-2001	4.415.000,00	0,00	4.415.000,00	
57	UDDIN		Labuang Somba	TAHUN 2000-2001	3.915.000,00	0,00	3.915.000,00	
58	SYAMSUDDIN		Timbo-timbo	TAHUN 2000-2001	9.746.000,00	0,00	9.746.000,00	
59	ISMAIL		Rangas Barat	TAHUN 2000-2001	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	
60	ABD. RAHIM		Rangas Barat	TAHUN 2000-2001	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	
61	SYAFRULLAH		Kp. Baru/Pamboang	TAHUN 2000-2001	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00	
62	AHMAD/BAHTIAR		Rangas Barat	TAHUN 2000-2001	1.591.000,00	0,00	1.591.000,00	
63	YAHYA		Barane/Baurung	TAHUN 2000-2001	8.058.600,00	0,00	8.058.600,00	
64	KADDAS		Lombong	TAHUN 2000-2001	5.998.600,00	0,00	5.998.600,00	
65	GUSTI		Labuang Somba	TAHUN 2002	3.902.500,00	0,00	3.902.500,00	
66	ABD. RAUF		Malunda	TAHUN 2002	5.907.500,00	0,00	5.907.500,00	
67	ABD. KADIR		Tammero'do	TAHUN 2002	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00	
68	JAWARIS		Garo'go	TAHUN 2002	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	
69	MUH. SADRI		Pangali-ali Majene	TAHUN 2002	6.107.500,00	0,00	6.107.500,00	
70	BASRI		Tanangan Majene	TAHUN 2002	8.865.000,00	0,00	8.865.000,00	
71	HARNAWI		Pangali-ali Majene	TAHUN 2002	11.932.500,00	0,00	11.932.500,00	
72	RAHMAN		Timbo-timbo	TAHUN 2002	9.255.000,00	0,00	9.255.000,00	
73	BAHARUDDN		Tanjung Batu Majene	TAHUN 2002	4.612.500,00	0,00	4.612.500,00	
74	RAFIUDDIN		Bababulo Pamboang	TAHUN 2002	5.252.500,00	0,00	5.252.500,00	
75	JUFRI		Bababulo Pamboang	TAHUN 2002	4.902.500,00	0,00	4.902.500,00	
76	M. DAUSU		Bababulo Pamboang	TAHUN 2002	9.289.250,00	0,00	9.289.250,00	
77	BASRI, S		Bababulo Pamboang	TAHUN 2002	8.427.750,00	0,00	8.427.750,00	
78	ALIMIN		Kabiraan	TAHUN 2002	6.159.100,00	0,00	6.159.100,00	
79	KAWICCI		Camba Majene	TAHUN 2002	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	
80	SAIL			TAHUN 2002	4.052.500,00	0,00	4.052.500,00	
81	ASNUDDIN			TAHUN 2002	3.702.500,00	0,00	3.702.500,00	
82	NURDIN, R			TAHUN 2002	4.377.500,00	0,00	4.377.500,00	
83	M. ALWI			TAHUN 2002	7.385.000,00	0,00	7.385.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
84	ASRAR			TAHUN 2002	8.285.000,00	0,00	8.285.000,00	
85	RUSLAN			TAHUN 2002	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00	
86	M. IDRIS			TAHUN 2002	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	
87	RAMLI			TAHUN 2002	4.592.500,00	0,00	4.592.500,00	
88	M. MUNIR			TAHUN 2002	2.552.500,00	0,00	2.552.500,00	
89	ABD. HAMID			TAHUN 2002	3.932.500,00	0,00	3.932.500,00	
90	MUSTAFA			TAHUN 2002	7.635.000,00	0,00	7.635.000,00	
91	NASRUDDIN			TAHUN 2002	3.961.500,00	0,00	3.961.500,00	
92	M. TAHIR			TAHUN 2002	3.397.500,00	0,00	3.397.500,00	
93	KARIMIN			TAHUN 2002	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
94	WACO			TAHUN 2002	3.547.500,00	0,00	3.547.500,00	
95	IDHAM, S.Sos			TAHUN 2002	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00	
96	SAMSUDDIN			TAHUN 2002	8.018.175,00	0,00	8.018.175,00	
97	ABD. RAHMAN			TAHUN 2002	4.872.095,00	0,00	4.872.095,00	
98	SAHRIR, R			TAHUN 2002	7.930.518,00	0,00	7.930.518,00	
99	SUAIB, G			TAHUN 2002	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	
100	BAHE PALA			TAHUN 2002	12.610.000,00	0,00	12.610.000,00	
101	DJUAENI ATJO			TAHUN 2002	12.610.000,00	0,00	12.610.000,00	
102	MULIADI			TAHUN 2002	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	
103	RASMAN			TAHUN 2002	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	
104	SUARDI			TAHUN 2002	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	
105	KASMIN			TAHUN 2002	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	
106	MAHMUDI			TAHUN 2002	9.377.920,00	0,00	9.377.920,00	
107	HAIYA		Baurung	TAHUN 2003	4.976.000,00	0,00	4.976.000,00	
108	ABD. RIFAI		Tangnga-tangnga	TAHUN 2003	5.211.000,00	0,00	5.211.000,00	
109	HASRY		Tanjung Batu Majene	TAHUN 2003	4.721.000,00	0,00	4.721.000,00	
110	SARIBANON		Tangnga-tangnga	TAHUN 2003	5.295.000,00	0,00	5.295.000,00	
111	NURDIN, R		Tangnga-tangnga	TAHUN 2003	10.185.000,00	0,00	10.185.000,00	
112	HADARAWI		Pa'leo	TAHUN 2003	5.101.000,00	0,00	5.101.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
113	SUMARDI		Tanangan Majene	TAHUN 2003	9.085.000,00	0,00	9.085.000,00	
114	RUSMAN		Pa'leo	TAHUN 2003	9.785.000,00	0,00	9.785.000,00	
115	NURSALAM		Pangali-ali Majene	TAHUN 2003	9.235.000,00	0,00	9.235.000,00	
116	MASNUR		Cilallang	TAHUN 2003	9.735.000,00	0,00	9.735.000,00	
117	AZALI		Pangali-ali Majene	TAHUN 2003	4.559.000,00	0,00	4.559.000,00	
118	HASRUDDIN		Cilallang	TAHUN 2003	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	
119	M. RAJAI		Tanangan Majene	TAHUN 2003	7.854.000,00	0,00	7.854.000,00	
120	M. IDRIS		Garo'go	TAHUN 2003	6.610.000,00	0,00	6.610.000,00	
121	MASDAR		Pangali-ali Majene	TAHUN 2003	10.185.000,00	0,00	10.185.000,00	
122	BURHANUDDIN		Garo'go	TAHUN 2003	7.060.000,00	0,00	7.060.000,00	
123	MUHIDDIN		Deteng-deteng	TAHUN 2003	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	
124	SUHARBI		Deteng-deteng	TAHUN 2003	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	
125	SYARIFUDDIN		Bababulo Pamboang	TAHUN 2003	8.430.000,00	0,00	8.430.000,00	
126	RAHMAT		Bababulo Pamboang	TAHUN 2003	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	
127	BUNJAMIN		Bababulo Pamboang	TAHUN 2003	5.626.000,00	0,00	5.626.000,00	
128	HAMUSA		Apoang	TAHUN 2003	4.976.000,00	0,00	4.976.000,00	
129	JALUNDING		Somba Utara	TAHUN 2003	5.326.000,00	0,00	5.326.000,00	
130	NASRUDDIN		Somba Utara	TAHUN 2003	9.885.000,00	0,00	9.885.000,00	
131	ALIMUDDIN		Salabose	TAHUN 2003	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00	
132	FATARAI		Deteng-deteng	TAHUN 2005	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	
133	RAHMAT		Pa'leo	TAHUN 2005	7.895.625,00	0,00	7.895.625,00	
134	SYAHRAN		Garo'go	TAHUN 2005	7.875.000,00	0,00	7.875.000,00	
135	RAMLI		Pa'leo	TAHUN 2005	7.825.000,00	0,00	7.825.000,00	
136	SYAMSUDDIN		Tanangan Majene	TAHUN 2005	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00	
137	SAENAL		Leppe	TAHUN 2005	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	
138	ENDANG		Bababulo Pamboang	TAHUN 2005	2.512.500,00	0,00	2.512.500,00	
139	HASRUDDIN		Bababulo Pamboang	TAHUN 2005	8.222.500,00	0,00	8.222.500,00	
140	HASRI		Somba Utara	TAHUN 2005	3.403.500,00	0,00	3.403.500,00	
141	JALUDDIN		Somba Utara	TAHUN 2005	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
142	MASDAR		Labuang Somba	TAHUN 2005	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	
143	RAHMADI		Bababulo Pamboang	TAHUN 2005	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	
144	RUSLIADI		Banua Sendana	TAHUN 2005	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	
145	ABD. KARIM		Malunda	TAHUN 2005	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00	
146	MAHMUD USMAN		Deking Malunda	TAHUN 2005	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	
147	NATSIR		Toppo Ds. Lombong	TAHUN 2005	1.450.750,00	0,00	1.450.750,00	
148	MUHAMMAD NUR		Cilallang	TAHUN 2005	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	
149	ABD.MAJID			TAHUN 2006	8.580.000,00	0,00	8.580.000,00	
150	WAFID			TAHUN 2006	9.680.000,00	0,00	9.680.000,00	
151	HAMMANUR			TAHUN 2006	9.380.000,00	0,00	9.380.000,00	
152	MAHMUD			TAHUN 2006	9.630.000,00	0,00	9.630.000,00	
153	BAKRI			TAHUN 2006	8.360.000,00	0,00	8.360.000,00	
154	LUKI			TAHUN 2006	8.260.000,00	0,00	8.260.000,00	
155	RAMLI			TAHUN 2006	5.505.000,00	0,00	5.505.000,00	
156	KAMARUDDIN			TAHUN 2006	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	
157	RAMALI			TAHUN 2006	3.476.400,00	0,00	3.476.400,00	
158	JAMALUDDIN			TAHUN 2006	-	0,00	-	
159	NASIR			TAHUN 2006	4.006.800,00	0,00	4.006.800,00	
160	MUHLIS			TAHUN 2006	3.450.800,00	0,00	3.450.800,00	
161	H.M. SUNUSI			TAHUN 2006	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	
162	SURIKA			TAHUN 2006	8.723.000,00	0,00	8.723.000,00	
163	MULIADI			TAHUN 2006	10.026.000,00	0,00	10.026.000,00	
164	BACONG			TAHUN 2006	5.660.000,00	0,00	5.660.000,00	
165	LA'BI			TAHUN 2006	5.922.000,00	0,00	5.922.000,00	
166	KAMARUDDIN			TAHUN 2006	6.022.000,00	0,00	6.022.000,00	
167	NURDIN			TAHUN 2006	6.022.000,00	0,00	6.022.000,00	
168	NAWAWI			TAHUN 2006	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	
169	KAMARUDDIN			TAHUN 2006	9.580.000,00	0,00	9.580.000,00	
170	BONANSA			TAHUN 2006	9.930.000,00	0,00	9.930.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
171	JAWAS SAKUR			TAHUN 2006	7.970.000,00	0,00	7.970.000,00	
172	IRWAN			TAHUN 2006	8.780.000,00	0,00	8.780.000,00	
173	RUSDI			TAHUN 2006	5.780.000,00	0,00	5.780.000,00	
174	BUDIMAN			TAHUN 2006	9.480.000,00	0,00	9.480.000,00	
175	M. SAID			TAHUN 2006	8.490.000,00	0,00	8.490.000,00	
176	TAJUDDIN			TAHUN 2006	0,00	0,00	0,00	
177	KACO			TAHUN 2006	3.841.400,00	0,00	3.841.400,00	
178	JAHAMA			TAHUN 2006	3.390.400,00	0,00	3.390.400,00	
179	SAID			TAHUN 2006	3.844.400,00	0,00	3.844.400,00	
180	ABD. RAZAK			TAHUN 2006	3.639.400,00	0,00	3.639.400,00	
181	ABD. RASAK			TAHUN 2006	3.807.400,00	0,00	3.807.400,00	
182	ADAM			TAHUN 2006	3.517.400,00	0,00	3.517.400,00	
183	BACONG			TAHUN 2006	4.161.800,00	0,00	4.161.800,00	
184	ABD. JALIL			TAHUN 2006	1.357.300,00	0,00	1.357.300,00	
185	BARUDDIN			TAHUN 2006	4.604.000,00	0,00	4.604.000,00	
186	SAI			TAHUN 2006	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	
187	DARWIS			TAHUN 2006	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	
188	RAHMADI			TAHUN 2006	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	
189	SUHARDI			TAHUN 2006	1.997.000,00	0,00	1.997.000,00	
190	AHMAD			TAHUN 2006	2.512.400,00	0,00	2.512.400,00	
191	SAHARIL			TAHUN 2006	1.957.400,00	0,00	1.957.400,00	
192	HAMSAH			TAHUN 2006	2.688.000,00	0,00	2.688.000,00	
193	BASRI/HAMSI			TAHUN 2006	4.036.800,00	0,00	4.036.800,00	
194	HASANUDDIN		Lalampanua	TAHUN 2006	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00	
195	PASIAR		Bababulo Pamboang	TAHUN 2006	7.178.000,00	0,00	7.178.000,00	
196	ASIS		Bababulo Pamboang	TAHUN 2006	11.954.400,00	0,00	11.954.400,00	
197	SUKARMAN		Bababulo Pamboang	TAHUN 2006	3.184.000,00	0,00	3.184.000,00	
198	RUSDI		Bababulo Pamboang	TAHUN 2006	6.988.000,00	0,00	6.988.000,00	
199	M. ARAS		Bababulo Pamboang	TAHUN 2006	5.104.000,00	0,00	5.104.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
200	DAHLAN		Bonde	TAHUN 2006	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	
201	M. SYARIF		Lalampanua	TAHUN 2006	8.219.050,00	0,00	8.219.050,00	
202	RAHMAT		Bababulo Pamboang	TAHUN 2006	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	
203	MADANG		Bababulo Pamboang	TAHUN 2006	6.152.000,00	0,00	6.152.000,00	
204	KAMEL		Bababulo Pamboang	TAHUN 2006	3.809.000,00	0,00	3.809.000,00	
205	ARIFUDDIN BA'DI		Sirindu	TAHUN 2006	5.494.600,00	0,00	5.494.600,00	
206	HAMA		Bonde	TAHUN 2006	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	
207	YUNDING		Bonde	TAHUN 2006	3.906.000,00	0,00	3.906.000,00	
208	HALMI		Bonde	TAHUN 2006	3.773.000,00	0,00	3.773.000,00	
209	ABD. RAHMAN		Bababulo Pamboang	TAHUN 2006	4.207.400,00	0,00	4.207.400,00	
210	FIRMAN		Bonde	TAHUN 2006	3.842.400,00	0,00	3.842.400,00	
211	MUHIDDIN		Bonde	TAHUN 2006	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	
212	ZAINUDDIN		Tubo	TAHUN 2006	8.528.000,00	0,00	8.528.000,00	
213	ASRI		Tubo	TAHUN 2006	9.930.000,00	0,00	9.930.000,00	
214	NASRUN		Somba Utara	TAHUN 2006	4.996.800,00	0,00	4.996.800,00	
215	ASRI		Labuang Somba	TAHUN 2006	4.196.800,00	0,00	4.196.800,00	
216	SYUKUR HAMARONG		Leba-leba	TAHUN 2006	2.985.800,00	0,00	2.985.800,00	
217	BA'NI		Ulidang	TAHUN 2006	5.096.800,00	0,00	5.096.800,00	
218	SUDIRMAN		Ulidang	TAHUN 2006	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	
219	SYAMSUL		Totolisi Utara	TAHUN 2006	5.484.000,00	0,00	5.484.000,00	
220	MAKRUP		Mosso	TAHUN 2006	5.392.000,00	0,00	5.392.000,00	
221	SYAHRIR		Totolisi Utara	TAHUN 2006	1.819.000,00	0,00	1.819.000,00	
222	SUHARTO		Mosso	TAHUN 2006	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00	
223	NAHAWU		Somba Utara	TAHUN 2006	3.280.400,00	0,00	3.280.400,00	
224	HERMAN/DAHLAN		Somba Utara	TAHUN 2006	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	
225	M. ALI		Somba Utara	TAHUN 2006	3.640.400,00	0,00	3.640.400,00	
226	MANNAN		Somba Utara	TAHUN 2006	4.390.400,00	0,00	4.390.400,00	
227	SUPARDI		Somba Utara	TAHUN 2006	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	
228	MASDAR		Somba Utara	TAHUN 2006	3.560.400,00	0,00	3.560.400,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
229	HAMAL		Somba Utara	TAHUN 2006	4.390.400,00	0,00	4.390.400,00	
230	PALMAN		Somba Utara	TAHUN 2006	4.390.400,00	0,00	4.390.400,00	
231	KASIDAN		Somba Utara	TAHUN 2006	3.535.400,00	0,00	3.535.400,00	
232	MASIR		Somba Utara	TAHUN 2006	6.370.000,00	0,00	6.370.000,00	
233	MANSUR		Totolisi Selatan	TAHUN 2006	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00	
234	RAHMAN		Somba Utara	TAHUN 2006	4.820.000,00	0,00	4.820.000,00	
235	SAMUNDING		Somba Utara	TAHUN 2006	5.105.000,00	0,00	5.105.000,00	
236	MASDAR		Somba Utara	TAHUN 2006	5.055.000,00	0,00	5.055.000,00	
237	SYAMSUL		Tubo Selatan	TAHUN 2006	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	
238	MASKUR		Somba Utara	TAHUN 2006	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	
239	RAHMAT		Apoleang Mosso II	TAHUN 2006	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	
240	HAMSAH/TO MANDAR		totoli/Passarang	TAHUN 2006	4.761.000,00	0,00	4.761.000,00	
241	SYARIFUDDIN		Mekkatta/Malunda	TAHUN 2006	957.000,00	0,00	957.000,00	
242	HAMEL		Lombong	TAHUN 2006	2.462.800,00	0,00	2.462.800,00	
243	ABD. RAHMAN		Deking Malunda	TAHUN 2006	3.607.296,00	0,00	3.607.296,00	
244	AHMAD		Lombong	TAHUN 2006	3.014.000,00	0,00	3.014.000,00	
245	SYAMSIAR,K		Sasende	TAHUN 2006	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	
246	HUSNAH		Sasende	TAHUN 2006	5.661.000,00	0,00	5.661.000,00	
247	HERMAN		Malunda	TAHUN 2006	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	
248	SYAMSUL/SARIPUDDIN		Malunda	TAHUN 2006	3.475.400,00	0,00	3.475.400,00	
249	MARHAM		Deking Malunda	TAHUN 2006	562.400,00	0,00	562.400,00	
250	HAMMA ARAS		Deking Malunda	TAHUN 2006	1.182.296,00	0,00	1.182.296,00	
251	ABD. RAZAK		Lombong	TAHUN 2006	341.000,00	0,00	341.000,00	
252	M. IDRIS		Maliaya	TAHUN 2006	4.587.000,00	0,00	4.587.000,00	
253	IUSMAN/ABD		Malunda	TAHUN 2006	9.130.000,00	0,00	9.130.000,00	
254	KAMALUDDIN		Malunda	TAHUN 2006	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	
255	JAMIL		Malunda	TAHUN 2006	9.240.000,00	0,00	9.240.000,00	
256	SAHABUDDIN		Malunda	TAHUN 2006	11.404.000,00	0,00	11.404.000,00	
257	RISAL		Malunda	TAHUN 2006	9.930.000,00	0,00	9.930.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
258	USMAN		Malunda	TAHUN 2006	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	
259	Qodrat Ilahi	Usman Ali	Garo'go	TAHUN 2007	11.508.800,00	0,00	11.508.800,00	
260	Cahaya Rizki	M.Yunus	Pangali-ali	TAHUN 2007	13.710.200,00	0,00	13.710.200,00	
261	Nursida	Iham	TG.Batu	TAHUN 2007	13.410.200,00	0,00	13.410.200,00	
262	Bahagia	Mannang	Banggae	TAHUN 2007	13.210.200,00	0,00	13.210.200,00	
263	Al-Muhaimin	Husain	Camba	TAHUN 2007	13.060.200,00	0,00	13.060.200,00	
264	Musdalifa	Syawal	Tamo	TAHUN 2007	15.668.800,00	0,00	15.668.800,00	
265	Pindu	Syahlan	Rangas	TAHUN 2007	4.365.200,00	0,00	4.365.200,00	
266	Ridho Ilahi	Syahrul	Rangas	TAHUN 2007	4.930.200,00	0,00	4.930.200,00	
267	Ganepo	Siara	Rangas	TAHUN 2007	5.030.200,00	0,00	5.030.200,00	
268	Fatmawati	Abd. Rahim	Deteng-deteng	TAHUN 2007	4.978.800,00	0,00	4.978.800,00	
269	Samudra	Mustafa	Banggae	TAHUN 2007	5.180.200,00	0,00	5.180.200,00	
270	Remaja	Mansyur	Rangas	TAHUN 2007	4.030.200,00	0,00	4.030.200,00	
271	Mina Jaya Mandiri	Nurdin	Pangali-Ali	TAHUN 2007	5.380.200,00	0,00	5.380.200,00	
272	Mina Sahabat	Ilham	Rangas	TAHUN 2007	5.380.200,00	0,00	5.380.200,00	
273	Siamasei	Sulang	Rangas	TAHUN 2007	5.380.200,00	0,00	5.380.200,00	
274	Madina	Haeril	Banggae	TAHUN 2007	5.380.200,00	0,00	5.380.200,00	
275	Labuang Tiga	Amri	Banggae	TAHUN 2007	5.918.000,00	0,00	5.918.000,00	
276	Bulalia	Lukman	TG.Batu	TAHUN 2007	6.159.400,00	0,00	6.159.400,00	
277	Labuang Dua	Nasaruddin	TG.Batu	TAHUN 2007	5.758.000,00	0,00	5.758.000,00	
278	Cakalang	Hamdani	TG.Batu	TAHUN 2007	6.049.400,00	0,00	6.049.400,00	
279	Pammase Dua	Mahmud	Parappe	TAHUN 2007	5.838.000,00	0,00	5.838.000,00	
280	Tuna Pantai	Syukri	TG.Batu	TAHUN 2007	5.738.000,00	0,00	5.738.000,00	
281	Siarioi	Baharuddin	Tangnga-tangnga	TAHUN 2007	5.988.000,00	0,00	5.988.000,00	
282		Yunding	Banggae	TAHUN 2007	2.528.000,00	0,00	2.528.000,00	
283	Kurnia Rahmat	Arifuddin	Tanangan	TAHUN 2007	6.148.800,00	0,00	6.148.800,00	
284	Cahaya Ilham	Nurdin	Tanangan	TAHUN 2007	6.148.800,00	0,00	6.148.800,00	
285	Mina Mandiri	Rusli	labuang	TAHUN 2007	6.748.000,00	0,00	6.748.000,00	
286	Merpati 1	Idris	Camba	TAHUN 2007	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
287	Permataku	Anja	Lalampanua	TAHUN 2007	5.380.200,00	0,00	5.380.200,00	
288	Putra Tunggal	Ilyas	Sendana	TAHUN 2007	13.638.800,00	0,00	13.638.800,00	
289	Sarassa	Dulman	Somba Selatan	TAHUN 2007	2.143.000,00	0,00	2.143.000,00	
290	Cahaya Sulbar	Zainuddin	Somba Selatan	TAHUN 2007	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00	
291	cahaya Sulbar II	Ahrimon	Somba Selatan	TAHUN 2007	2.048.000,00	0,00	2.048.000,00	
292	Usaha Baru	Usman	Somba Selatan	TAHUN 2007	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00	
293	Cahaya selamat	Najamuddin	Somba Selatan	TAHUN 2007	2.143.000,00	0,00	2.143.000,00	
294	Sirendengang	Jarul	Somba Selatan	TAHUN 2007	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00	
295	Bina Bersama	Sahaluddin	Somba Selatan	TAHUN 2007	2.168.000,00	0,00	2.168.000,00	
296	Sipatuo	Saharul	Somba Selatan	TAHUN 2007	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00	
297	Batu Karang	Mahmuddin	Somba Selatan	TAHUN 2007	2.228.000,00	0,00	2.228.000,00	
298	Buana	Jainuddin	Somba Selatan	TAHUN 2007	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	
299	Sipatuo	Saruddin	Sendana	TAHUN 2007	6.359.400,00	0,00	6.359.400,00	
300	Buttu Popos	Sukman	Sendana	TAHUN 2007	6.358.000,00	0,00	6.358.000,00	
301	Siwali Parri	M.Yusuf	Tammero'do	TAHUN 2007	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00	
302	Surya Alam	Ambasong	Sendana	TAHUN 2007	5.030.200,00	0,00	5.030.200,00	
303	Bura Lembong	Hamiluddin	Sendana	TAHUN 2007	5.230.200,00	0,00	5.230.200,00	
304	Nelayan Mandiri	Delman	Sendana	TAHUN 2007	4.865.200,00	0,00	4.865.200,00	
305	Sinar Bahari	Syahrul	Sendana	TAHUN 2007	5.130.200,00	0,00	5.130.200,00	
306	Cahaya Laut	Hamadia.R	Sendana	TAHUN 2007	5.180.200,00	0,00	5.180.200,00	
307	Siamasei	Sarjang	Sendana	TAHUN 2007	5.380.200,00	0,00	5.380.200,00	
308	Sinar Harapan	Darwis	Sendana	TAHUN 2007	4.960.200,00	0,00	4.960.200,00	
309	Sari Laut	Jumaali/Rahman	Batu Taku	TAHUN 2007	5.158.000,00	0,00	5.158.000,00	
310	Bura' Lembong	Rahmadi/Firdaus	Onang/Bt.Taku	TAHUN 2007	5.558.000,00	0,00	5.558.000,00	
311	Batu Sarassa	Ligo/Alinurdin	Somba Selatan	TAHUN 2007	6.358.000,00	0,00	6.358.000,00	
312	Mitra Bahari	Syahrir	Somba Selatan	TAHUN 2007	5.382.800,00	0,00	5.382.800,00	
313	Siamasei	Syamsuddin/Akhsan	Batu Taku	TAHUN 2007	5.608.000,00	0,00	5.608.000,00	
314	Pammase	Gani	Ds.Jolengmea	TAHUN 2007	6.358.000,00	0,00	6.358.000,00	
315	Bura' Laut	Borahima	Kel.Malunda	TAHUN 2007	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
316	Mutiara Laut	Saharuddin	Deking	TAHUN 2007	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	
	JUMLAH				**1.627.233.775,00**	**0,00**	**1.627.233.775,00**	
	Bidang PERINDAGTAMBEN				-			
1	MANJA			TAHUN 2006	3.799.950,00	0,00	3.799.950,00	
2	DALNIATI			TAHUN 2006	2.499.850,00	0,00	2.499.850,00	
3	AHMAD			TAHUN 2006	3.133.200,00	0,00	3.133.200,00	
4	MUH. AFIF			TAHUN 2006	7.400.500,00	0,00	7.400.500,00	
5	JUNAEDI			TAHUN 2006	833.000,00	0,00	833.000,00	
6	SURMAN			TAHUN 2006	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	
7	M. NATSIR			TAHUN 2006	1.666.600,00	0,00	1.666.600,00	
8	HJ. ANNY RAHMAT			TAHUN 2007	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	
9	ST. HAERIAH			TAHUN 2007	1.649.900,00	0,00	1.649.900,00	
10	MUH. TASHIN			TAHUN 2007	3.333.200,00	0,00	3.333.200,00	
11	HISBULLAH			TAHUN 2007	3.749.900,00	0,00	3.749.900,00	
12	ABD. KARIM			TAHUN 2007	2.499.950,00	0,00	2.499.950,00	
13	HUSAINY ABDULLAH			TAHUN 2007	999.800,00	0,00	999.800,00	
14	ABD. AZIS			TAHUN 2007	999.850,00	0,00	999.850,00	
15	KARSIDI			TAHUN 2007	4.583.300,00	0,00	4.583.300,00	
16	HARISA			TAHUN 2007	4.583.300,00	0,00	4.583.300,00	
17	SAMAWIAH			TAHUN 2007	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	
18	RAHMA			TAHUN 2007	3.174.900,00	0,00	3.174.900,00	
	JUMLAH				**65.782.200,00**	**0,00**	**65.782.200,00**	
	Bidang KOPERASI, UKM				-			
1	NURLELA KASLAN			TAHUN 2005	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	
2	A. NURSIAH TASRIF			TAHUN 2005	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3	KUB. HASTIA			TAHUN 2006	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00	
4	HARMIN ININDRIA			TAHUN 2006	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	
5	SAIL (KIOS ILHAM)			TAHUN 2006	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
6	SAFARUDDIN/SYARIFUDDIN			TAHUN 2006	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
7	UMAR IDHAM			TAHUN 2006	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	
8	RASDIANA KAPAS			TAHUN 2006	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
9	NOVIANTI HERMAN			TAHUN 2006	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	
10	AMANSYAH DARWIS			TAHUN 2006	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	
11	NANNA KADIR			TAHUN 2006	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
12	SIRAJUDDIN/SABIR			TAHUN 2006	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
13	HASAN PANNA			TAHUN 2006	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
14	HUSAINI ABDULLAH			TAHUN 2006	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	
15	ABDULLAH RAHMI			TAHUN 2006	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
16	ARIANSYAH			TAHUN 2006	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
17	YABU			TAHUN 2006	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	
18	SAIDA (BOGASARI)			TAHUN 2006	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	
19	GARMANIA KASLAN			TAHUN 2006	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
20	MARHUNI SANUSI			TAHUN 2006	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
21	BAHARUDDIN BOTOLO			TAHUN 2006	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
22	KUD. TAMALANRE			TAHUN 2007	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
23	KOPNEL SINAR LAUT			TAHUN 2007	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	
24	KOPNEL SIPAKAINGA			TAHUN 2007	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	
25	KSU PADA-PADA			TAHUN 2007	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	
26	KSU AL-IKHLAS			TAHUN 2007	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	
27	KSU KARYA MANDIRI			TAHUN 2007	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	
28	KOPTAN PADASALAMA			TAHUN 2007	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	
29	MUHARSYAH			TAHUN 2007	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
30	A. TITIK AB			TAHUN 2007	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
31	BUSMAN (BENGKEL)			TAHUN 2007	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	
32	ST. ENI SARMAN			TAHUN 2007	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	
33	TAUPIK ALIMUCHTAR			TAHUN 2007	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	
34	H. HAMA			TAHUN 2007	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	
35	HAIDIR			TAHUN 2007	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
36	DEWAN AHMAD			TAHUN 2007	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	
37	HAMSAH ARDEDI			TAHUN 2007	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	
38	NY. YANCE			TAHUN 2007	750.000,00	0,00	750.000,00	
39	ALFI MOTOR			TAHUN 2008	350.000,00	0,00	350.000,00	
40	TAMZIL BB			TAHUN 2008	41.550.000,00	0,00	41.550.000,00	
	JUMLAH				**188.075.000,00**	**0,00**	**188.075.000,00**	
	Bidang KEHUTANAN & PERKEBUNAN							
1	KOMPAK I	Abd. Fattah	Karondongan	TAHUN 2002	14.980.000,00	0,00	14.980.000,00	
2	BATUNIALLU	M. Ajis	Sumakuyu	TAHUN 2002	14.910.000,00	0,00	14.910.000,00	
3	TUNAS BARU	Hasrifuddin	Ulidang	TAHUN 2002	16.940.000,00	0,00	16.940.000,00	
4	BUNGA PELITA	Abd. Rahman	Pangaleroang	TAHUN 2002	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	
5	TEMBOK JAYA	Rahman	Manyambah	TAHUN 2002	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	
6	HIJRAH	M. Yunus	Ratte Padang	TAHUN 2002	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00	
7	TUO MARENDENG	Huda	Belalang	TAHUN 2002	8.995.000,00	0,00	8.995.000,00	
8	BUKIT BERBUNGA	Syamsudin	Manyambah Timur	TAHUN 2002	19.115.000,00	0,00	19.115.000,00	
9	JAYA VANILI GROUP	As'ad	Limboro	TAHUN 2002	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	
10	EMAS HIJAU	Sumaali	Ulumanda	TAHUN 2002	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	
11	TASONGA LESTARI	Jamaluddin	Ulumanda	TAHUN 2002	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	
12	SIPATUO	Basiran	Kabiraan	TAHUN 2002	6.290.000,00	0,00	6.290.000,00	
13	LEMBA HIJAU	Sayadi	Kabiraan	TAHUN 2002	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
14	SADAR HIJAU	Sidar	Kabiraan	TAHUN 2002	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	
15	BUKIT LESTARI	Sainuddin	Kabiraan	TAHUN 2002	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	
16	CERDAS	Sunusi	Batu Lotong	TAHUN 2002	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	
17	ULU MALETUNG	Sahlan	Kabiraan	TAHUN 2002	3.822.000,00	0,00	3.822.000,00	
18	TUNAS HARAPAN	H. Aco, DP	Seppong	TAHUN 2003	8.990.000,00	0,00	8.990.000,00	
19	MESA GAU	Kaharuddin	Tallambalao	TAHUN 2003	8.210.000,00	0,00	8.210.000,00	
20	PUNCAK INDAH	Mustari, BA	Seppong	TAHUN 2003	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00	
21	SIAMASEI	Abdullah	Tallubanua	TAHUN 2003	8.268.000,00	0,00	8.268.000,00	
22	AL-KAUTSAR	Drs. Ilham	Tallubanua	TAHUN 2003	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
23	MAKKARESO	Sudirman	Sumakuyu	TAHUN 2003	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	
24	MESARIO	Sirajuddin	Tammeroddo	TAHUN 2003	15.270.000,00	0,00	15.270.000,00	
25	BATU MEAPPAR	Darami	Mosso Dhua	TAHUN 2003	9.140.000,00	0,00	9.140.000,00	
26	BARANEMI'LALANG	Idrus	Kabiraan	TAHUN 2003	8.390.000,00	0,00	8.390.000,00	
27	SALU PANIKI	Abidin	Kabiraan	TAHUN 2003	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	
28	CAHAYA PANILI	Usman	Kabiraan	TAHUN 2003	6.740.000,00	0,00	6.740.000,00	
29	GIAT SEJAHTERA	Rifai	Kabiraan	TAHUN 2003	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	
30	JAYA MAPPURA ONRO	Ismail	Ulumanda	TAHUN 2003	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	
31	LEMBANG PAO	M. Syarif	Mekkatta	TAHUN 2003	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	
32	BATU MEAPPAR	Kahar	Lembang	TAHUN 2006	20.650.000,00	0,00	20.650.000,00	
33	MANATTATUANG	Abd. Kadir	Lembang	TAHUN 2006	21.700.000,00	0,00	21.700.000,00	
34	ADA TUO	M. Said	Lombang	TAHUN 2006	10.450.000,00	0,00	10.450.000,00	
35	AYU BAUANG	Jamaluddin	Maliaya	TAHUN 2006	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	
36	MATANDE	Susanto, MD	Maliaya	TAHUN 2006	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	
37	BINTANG MANDIRI	M. Idris	Lombong	TAHUN 2006	7.980.000,00	0,00	7.980.000,00	
38	TANETE AKAR BUNGA	H. abd. Azis	Tubo	TAHUN 2006	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	
	JUMLAH				**376.155.000,00**	**0,00**	**376.155.000,00**	
	Bidang PERTANIAN				-			
1	BURA SENDANA	Kunding	Sendana	TAHUN 2009 - 2010	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	
2	TIWEANG BALUADI	M. Ali	Pundau	TAHUN 2009 - 2010	2.159.000,00	0,00	2.159.000,00	
3	TIWEANG BALUADI	Hadi	Pundau	TAHUN 2009 - 2010	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	
4	BUNGA NINDANG	Salling	Sendana	TAHUN 2009 - 2010	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	
5	BA'BA TIMUNGAN	Rusman	Putta'da	TAHUN 2009 - 2010	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	
6	BUKIT INDAH	M. Harun Kayyen	Belalang-Onang	TAHUN 2003	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	
7	MESA ATE	St. Adila	Batu Lopi-Onang	TAHUN 2003	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	
8	MANA RAYA	Badawi Tanto	Lombong	TAHUN 2003	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00	
9	GALUNG MALOANG	Suwardi	Mekkatta	TAHUN 2003	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
10	BURA DORONG	Muh. Yadul	Banua Malunda	TAHUN 2003	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	
11	PAMMASE	Sayadi	Tande	TAHUN 2003	1.378.624,00	0,00	1.378.624,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
12	SIARIOI	Ahmad	Landang	TAHUN 2003	662.535,00	0,00	662.535,00	
13	BURA' LEMO	Hamzah	Sibunoang	TAHUN 2003	1.343.275,00	0,00	1.343.275,00	
14	PAO JAWA	Sarifuddin	Sendana	TAHUN 2003	15.889.134,00	0,00	15.889.134,00	
15	BATU ISSUNG	Sahlul, S.Ag	Mosso	TAHUN 2003	2.370.718,00	0,00	2.370.718,00	
16	SIAMASEI	M. Yadal	Sumakuyu	TAHUN 2003	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	
17	BURA' KAWENI	Ahmad	Lombong	TAHUN 2003	15.157.372,00	0,00	15.157.372,00	
18	MANARAYA	Mustar	Lombong	TAHUN 2003	562.624,00	0,00	562.624,00	
19	SADAR LESTARI	Abd. Rahman	Tande allo	TAHUN 2003	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00	
20	MATA URANG	Syahril, Z	lombong	TAHUN 2003	15.670.518,00	0,00	15.670.518,00	
	JUMLAH DINAS PERTANIAN				116.073.800,00	0,00	116.073.800,00	
	Bidang PETERNAKAN				-			
1	**KEC. BANGGAE**				-	0,00	-	
	Perorangan	Hassani	Pakkola	TAHUN 2002	13.245.548,00	0,00	13.245.548,00	
	Perorangan	Nasrul Haq	Baruga	TAHUN 2002	6.199.884,00	0,00	6.199.884,00	
	Loa Tongan	M. Tahir Dua	Soreang	TAHUN 2002	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	
	Perorangan	Mustamin, SH	Galung	TAHUN 2002	7.380.595,00	0,00	7.380.595,00	
	Perorangan	M. Said	Lipu	TAHUN 2002	6.138.929,00	0,00	6.138.929,00	
	Simarendeng	B. Muchsin	Baruga	TAHUN 2002	2.704.418,00	0,00	2.704.418,00	
	Saromannassa	Arsyad	Baruga	TAHUN 2002	7.377.019,00		7.377.019,00	
	Salama	H. M. Amir L	Pakkola	TAHUN 2002	3.060.918,00	0,00	3.060.918,00	
	Perorangan	M. Amin	Baruga	TAHUN 2002	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	
	Perorangan	Abd. Rahman	Baruga	TAHUN 2002	3.784.935,00	0,00	3.784.935,00	
	Perorangan	Jaharuddin	Baruga	TAHUN 2002	7.873.477,00	0,00	7.873.477,00	
	Peternakan Irzam	Asnuddin	Baru	TAHUN 2003	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	
	Perorangan	Basir	Deteng-deteng	TAHUN 2003	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00	
	Loa Tongan	Ahmad, AB	Labuang	TAHUN 2003	6.740.000,00	0,00	6.740.000,00	
	Perorangan	Mahsin Hasry	Pangali-ali	TAHUN 2003	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	
	Perorangan	M. Isar	Passarang	TAHUN 2003	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00	
2	**KEC. PAMBOANG**				-	0,00	-	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PENYALURAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA BADAN USAHA	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TAHUN	TUNGGAKAN DANA BERGULIR TAHUN SEBELUMNYA	SETORAN TAHUN 2025	SISA TUNGGAKAN PER 31 DES. 2025	KET
	Perorangan	M. Syahril	Sirindu	TAHUN 2002	8.127.087,00	0,00	8.127.087,00	
	Bura Pandeng	Abidin	Pesuloang	TAHUN 2002	13.784.674,00	0,00	13.784.674,00	
	Perorangan	Abd. Khalik	Sirindu	TAHUN 2002	2.777.533,00	0,00	2.777.533,00	
	Bunga Tg. Melati	Kamaruddin	Adolang	TAHUN 2002	14.859.963,00	0,00	14.859.963,00	
	Sipatokkong	Bu'du	Adolang	TAHUN 2002	16.902.960,00	0,00	16.902.960,00	
	Perorangan	Syamsuddin	Sirindu	TAHUN 2002	7.148.777,00	0,00	7.148.777,00	
3	**KEC. SENDANA**				-	0,00	-	
	Perorangan	Mansur	Mosso Dhua	TAHUN 2002	7.887.100,00	0,00	7.887.100,00	
	Madina	Muh. Aris	Mosso	TAHUN 2002	4.149.973,00	0,00	4.149.973,00	
	Perorangan	Husaema	Mosso Dhua	TAHUN 2002	2.984.106,00	0,00	2.984.106,00	
	Limosin Perkasa	Marsudi	Mosso	TAHUN 2003	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00	
	Sipatuo	Candu	Tammeroddo	TAHUN 2003	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	
	Talongga Indah	Sidin	Seppong	TAHUN 2003	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	
4	**KEC. MALUNDA**				-	0,00	-	
	Taji Cempaka	Tuang	Malunda	TAHUN 2003	9.740.000,00	0,00	9.740.000,00	
	Perorangan	Murniati	Mekkatta	TAHUN 2003	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	
	Perorangan	Suaib	Lombong	TAHUN 2003	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	
5	**PPEK**				-	0,00	-	
	Perorangan	Rukumuddin	Limboro	TAHUN 2006	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
	Perorangan	Mansur	Limboro	TAHUN 2006	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
	JUMLAH				254.847.896,00	0,00	254.847.896,00	
JUMLAH TOTAL					**2.958.167.671,00**	**0,00**	**2.958.167.671,00**	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG PFK
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	IURAN JAMINAN KESEHATAN	IURAN WAJIB PEGAWAI	PPN	PPH 21	PPH 22	PPH 23	JUMLAH	TANGGAL SETOR
1	Dinas Kesehatan	-	-	19.259.417,00	5.089.970,00	1.657.034,00	-	26.006.421,00	02 januari 2026
2	Puskemas Lembang	518.070,00	-	-	1.295.175,00	-	-	1.813.245,00	01 Januari 2026
3	Puskemas Totoli	684.760,00	-	-	809.393,00	-	-	1.494.153,00	03 Maret 2026 dan 27 Maret 2026
4	Puskemas Sendana I	-	-	522.654,00		184.107,00	-	706.761,00	05 Februari 2026
5	Puskesmas Malunda	-	-	4.469.013,00	2.282.738,00	609.410,00	-	7.361.161,00	Belum setor
6	SMP Negeri 6 Majene	-	-	1.929.600,00	859.050,00	-	18.000,00	2.806.650,00	10 Februari 2026
7	SD Negeri 7 taukong	-	-	-	70.800,00	-	-	70.800,00	04 Februari 2026
8	SD Negeri 39 Manyamba	-	-	186.000,00	-	-	-	186.000,00	02 Maret 2026
9	SD Negeri 28 Adolang	-	-	-	100.200,00	-	-	100.200,00	16 Maret 2026
Jumlah		**1.202.830,00**	**-**	**26.366.684,00**	**10.507.326,00**	**2.450.551,00**	**18.000,00**	**40.545.391,00**	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
REKAPITULASI UTANG PER JENIS BELANJA MASING-MASING SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama SKPD	Utang Belanja							TOTAL
		Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang jasa	Utang Belanja Hibah	Utang Belanja Modal	Utang Belanja Tak Terduga	Utang Belanja Bantuan Keuangan	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga	9.646.343.976,00	719.046.795,00	0,00	1.865.193.470,00	0,00	0,00	0,00	12.230.584.241,00
2	Dinas Kesehatan	174.332.554,00	3.806.455.629,00	0,00	489.778.896,00	0,00	0,00	0,00	4.470.567.079,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	304.917.988,00	16.672.929.876,00	0,00	1.430.270.870,00	0,00	0,00	0,00	18.408.118.734,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.759.964.436,00	0,00	2.404.979.889,00	0,00	0,00	0,00	4.164.944.325,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	211.994.317,00	0,00	64.862.337,00	0,00	0,00	0,00	276.856.654,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	39.593.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.593.600,00
7	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	0,00	30.316.760,00	0,00	25.160.000,00	0,00	0,00	0,00	55.476.760,00
8	Dinas Sosial	0,00	183.987.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.987.500,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	129.372.973,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	134.272.973,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	102.751.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.751.400,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	42.470.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470.800,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
REKAPITULASI UTANG PER JENIS BELANJA MASING-MASING SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama SKPD	Utang Belanja							TOTAL
		Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang jasa	Utang Belanja Hibah	Utang Belanja Modal	Utang Belanja Tak Terduga	Utang Belanja Bantuan Keuangan	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	283.463.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.463.200,00
13	Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil	0,00	305.987.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.987.800,00
14	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	0,00	50.451.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.451.780,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	159.736.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.736.896,00
16	Dinas Perhubungan	0,00	21.789.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.789.200,00
17	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	0,00	87.183.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.183.300,00
18	Dinas Koperasi undustri UKM pedagangan perindustrian	0,00	97.347.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.347.740,00
19	Dinas Penanaman modal dan PTSP	0,00	43.724.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.724.600,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	205.771.712,00	0,00	24.255.000,00	0,00	0,00	0,00	230.026.712,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	43.528.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.528.940,00
22	Dinas Kelautan dan perikanan	0,00	814.358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.358.100,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
REKAPITULASI UTANG PER JENIS BELANJA MASING-MASING SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama SKPD	Utang Belanja							TOTAL
		Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang jasa	Utang Belanja Hibah	Utang Belanja Modal	Utang Belanja Tak Terduga	Utang Belanja Bantuan Keuangan	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
23	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	0,00	867.945.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.945.510,00
24	Sekretariat Daerah	0,00	1.416.950.186,00	0,00	17.094.000,00	0,00	0,00	0,00	1.434.044.186,00
25	Sekretariat DPRD	18.480.000,00	876.450.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.930.528,00
26	Badan Perencanaan Daerah	0,00	376.316.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	506.316.920,00
27	Badan Keuangan Aset Daerah	1.644.054.004,00	25.910.600,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	1.929.964.604,00
28	Badan Pendapatan daerah	0,00	411.841.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.841.750,00
29	Badan Kepegawaian dan Pemberdyaan SDM	0,00	136.000.200,00	0,00	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	156.700.200,00
30	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	68.341.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.341.300,00
31	Inspektorat	0,00	889.061.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.061.490,00
32	Kecamatan Banggae	0,00	90.819.400,00	0,00	2.601.000,00	0,00	0,00	0,00	93.420.400,00
33	Kecamatan Banggae Timur	0,00	106.784.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.784.920,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
REKAPITULASI UTANG PER JENIS BELANJA MASING-MASING SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama SKPD	Utang Belanja							TOTAL
		Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang jasa	Utang Belanja Hibah	Utang Belanja Modal	Utang Belanja Tak Terduga	Utang Belanja Bantuan Keuangan	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
34	Kecamatan Pamboang	0,00	9.406.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406.800,00
35	Kecamatan Sendana	0,00	117.672.500,00	0,00	2.913.904,00	0,00	0,00	0,00	120.586.404,00
36	Kecamatan Tammeroddo	0,00	50.337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.337.500,00
37	Kecamatan Tubo Sendana	0,00	40.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.801.000,00
38	Kecamatan Ulumanda	0,00	36.023.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.023.800,00
39	Kecamatan Malunda	0,00	70.794.332,00	0,00	10.495.000,00	0,00	0,00	0,00	81.289.332,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	209.074.803,00	17.227.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.302.703,00
Total		**11.788.128.522,00**	**31.612.760.893,00**	**17.227.900,00**	**6.363.204.366,00**	**260.000.000,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**50.171.321.681,00**

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
I	**UTANG BELANJA PEGAWAI**		**11.788.128.522,00**
I.1	**TAHUN 2022**		**3.396.795.472,00**
A	**DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA**		**2.328.732.612,00**
1	TAGIHAN 4% IURAN IURAN WAJIB PEMDA ATAS TUNJANGAN PROFESI GURU TAHUN 2022	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.328.732.612,00
B	**DINAS KESEHATAN**		**137.155.376,00**
1	TAGIHAN 4% ATAS IURAN WAJIB PEMDA TAHUN 2022		137.155.376,00
c	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**		**930.907.484,00**
1	TAGIHAN 4% ATAS IURAN WAJIB PEMDA TAHUN 2022		930.907.484,00
I.2	**TAHUN 2023**		**3.746.346.206,00**
A	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**		**404.279.460,00**
1	Koreksi pengakuan saldo piutang BPJS Kesehatan atas kekurangan iuran wajib 4% Pemda Tahun 2023 sesuai Surat Tagihan Kepala Cabang BPJS Polman Nomor 406/IX-05/0324 tanggal 3 Maret 2024 tentang Tagihan Tunggakan Iuran Wajib Pemda atas Penghasilan PNS Daerah Tahun 2022 - 2023 (JUKOR 42)		404.279.460,00
B	**DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA**		**3.304.889.568,00**
2	Koreksi pengakuan saldo piutang BPJS Kesehatan atas kekurangan iuran wajib 4% Pemda Tahun 2023 sesuai Surat Tagihan Kepala Cabang BPJS Polman Nomor 406/IX-05/0324 tanggal 3 Maret 2024 tentang Tagihan Tunggakan Iuran Wajib Pemda atas Penghasilan PNS Daerah Tahun 2022 - 2023 (JUKOR 42)		3.304.889.568,00
C	**DINAS KESEHATAN**		37.177.178,00
1	**TAGIHAN 4% ATAS IURAN WAJIB PEMDA TAHUN 2023**		37.177.178,00
I.3	**TAHUN 2024**		4.340.068.856,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
A	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**		308.867.060,00
1	tagihan 4 % iuran pemda atas tunjangan TPP TAHUN 2024		308.867.060,00
B	**DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA**		4.012.721.796,00
1	tagihan 4 % iuran pemda atas tunjangan profesi guru tahun 2024		4.012.721.796,00
C	**SEKRETARIAT DPRD**		18.480.000,00
1	Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan (BOP) DPRD Kab. Majene Bulan November s/d Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD sesuai SPD No : 800/7179/LP-SPD/BKAD/2024, Sumber Dana Dau Umum		18.480.000,00
I.4	**TAHUN 2025**		304.917.988,00
A	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**		304.917.988,00
1	**IURAN TUNJANGAN JASA MEDIS KE BPJS 4 % (PENGAKUAN 2025)**		304.917.988,00
II	**UTANG BELANJA BARANG DAN JASA**		**31.609.910.893,00**
II.1	**TAHUN 2022**		2.023.878.411,00
A	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		200
1	SPP-LS Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sesuai Dengan SPJ Yang Di Lampirkan Pada BKPSDM Kab. Majene TA. 2022. Sumber Dana : LPAD	Rekening Penampungan Gaji	200
B	**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**		25.118.700,00
2	Pemby. LS Perjalanan Dinas Luar Daerah, Sesuai SPD Nomor : 090/ /2022, Sumber Dana LAIN-LAIN PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.804.300,00
3	Pemby. LS Perjalanan Dinas Luar Daerah, Sesuai SPD Nomor : 090/ /2022, Sumber Dana LAIN-LAIN PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.554.900,00
4	Pemby. LS Perjalanan Dinas Luar Daerah, Sesuai SPD Nomor : 090/ /2022, Sumber Dana LAIN-LAIN PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.946.600,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
5	Pemby. LS Perjalanan Dinas Luar Daerah, Sesuai SPD Nomor : 090/ /2022, Sumber Dana LAIN-LAIN PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.634.500,00
6	Pemby. LS Perjalanan Dinas Luar Daerah, Sesuai SPD Nomor : 090/ /2022, Sumber Dana LAIN-LAIN PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.178.400,00
C	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		30.733.000,00
1	Pembayaran Langsung Belanja Makan Dan minum Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela negara & Karakter Kebangsaan sesuai Nota Terlampir Sumber Dana Dau	SUHAEDA, SE (Pimpinan Cafe INA)	1.550.000,00
2	Pemabayaran langsung Perjalanan Dinas Dalam Kota & Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Dengan No : 090/132/XI/2022 & No : 090/66/VI/2022 Simber Dana Lain PAD	Rek .Penampungan Gaji	4.325.000,00
3	Pembayaran langsung perjalanan Dinas Dalam Kota Dan Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Dengan No ;090/66/VI/2022 & No :090/08/1/2022 Sumber Dana Lain PAD	Rek .Penampungan Gaji	3.900.000,00
4	Pembayaran langsung Perjalanan Dinas Biasa & Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pengganti Transpor Peserta) Kegiatan Koordinasi di bidang ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara dengan No : 090/98/IX/2022 Dan No : 090/117/XI/2022 Sumber Dana DAU	Rek .Penampungan Gaji	12.000.000,00
5	Pembayaran langsung perjalanan Dinas Dalam Kota Dan Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Dengan No ;090/66/VI/2022 & No :090/08/1/2022 Sumber Dana Lain PAD	Rek .Penampungan Gaji	1.640.000,00
6	Pembayaran langsung Perjalanan Dinas Biasa & Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pengganti Transpor Peserta) Kegiatan Koordinasi di bidang ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara dengan No : 090/98/IX/2022 Dan No : 090/117/XI/2022 Sumber Dana DAU	Rek .Penampungan Gaji	4.368.000,00
7	Pemabayaran langsung Perjalanan Dinas Dalam Kota & Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Dengan No : 090/132/XI/2022 & No : 090/66/VI/2022 Simber Dana Lain PAD	Rek .Penampungan Gaji	2.950.000,00
D	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**		3.855.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Alat tulis Kantor Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Sumber Dana Pajak Rokok		3.855.000,00
E	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**		17.076.800,00
1	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Administrasi dan Operasional Kantor BPBD Kab. Majene Sumber Dana DBH PROV	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.130.000,00
2	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Penyelengaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi Kantpr BPBD Kab. Majene, Sumber Dana DBH Prov	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.610.000,00
3	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Administrasi Penyelengaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD Kantpr BPBD Kab. Majene Sumber Dana LAIN-LAIN PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	8.336.800,00
F	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**		268.500.000,00
1	Pembayaran biaya kegiatan survey/pendataan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kab. Majene sesuai SPK No : 007/KONT-PEND.PBB/XII/2022 pada bapenda Kab. Majene T.A 2022 (Sumber Dana : Lain-Lain PAD)	PT. BUMI PRASIDI TEKNOLOGI	268.500.000,00
G	**BADAN PERENCANAAN DAERAH**		163.992.770,00
1	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/193/2022 tanggal 12 Desember 2022 (Lain-Lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.000.000,00
2	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian sesuai Surat Tugas Nomor : 090/1211/2022 tanggal 29 Agustus 2022 (PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.252.000,00
3	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/188/2022 Tanggal 7 Desember 2022 (lain-lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.271.200,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
4	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/191/2022 Tanggal 12 Desember 2022 (lain-lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.796.200,00
5	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/126/2022 tanggal 26 Agustus 2022 (Lain-Lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.966.000,00
6	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/191/2022 Tanggal 12 Desember 2022 (lain-lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.155.860,00
7	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/194/2022 tanggal 12 Desember 2022 (Lain-Lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.119.010,00
8	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/190/2022 Tanggal 12 Desember 2022 (PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	11.620.600,00
9	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/176/2022 Tanggal 15 November 2022 (lain-lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	15.085.800,00
10	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/011/2022 tanggal 11 Februari 2022 (PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	15.148.400,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
11	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/151/2022 tanggal 14 Oktober 2022 (Lain-Lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	20.165.600,00
12	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/077/2022 tanggal 7 Juni 2022 (Lain-Lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	17.736.600,00
13	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/131/2022 tanggal 30 Agustus 2022 (Lain-Lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	14.436.500,00
14	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/124/2022 tanggal 5 Agustus 2022 (Lain-Lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	772.000,00
15	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/124/2022 tanggal 5 Agustus 2022 (PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.144.000,00
16	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai Surat Tugas Nomor:050.13/139/2022 tanggal 1 Oktober 2022(Lain-Lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.800.000,00
17	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian sesuai Surat Tugas Nomor:050.13/124/2022 tanggal 5 Agustus 2022 (PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.994.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
18	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/088/2022 Tanggal 20 Juni 2022 (DBH PROV)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.346.000,00
19	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/136/2022 tanggal 14 September 2022 (Lain-Lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.600.000,00
20	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/109/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 (Lain-Lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.318.000,00
21	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/124/2022 Tanggal 5 Agustus 2022 (lain-lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.355.000,00
22	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/124/2022 Tanggal 5 Agustus 2022 (DBH PROV)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.000.000,00
23	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai Surat Tugas Nomor : 050.13/112/2022 Tanggal 11 Februari 2022 (lain-lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	14.910.000,00
H	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**		52.041.497,00
1	Pengajuan SPM LS Pembayaran Swakelola Pelaksanaan Kegiatan Pelestarian Nilai Nilai Sejarah, dengan No SK : 023/HK/KEP-BUP/II/2022, BASTP No. 233/BASTP-KEU/Disbudpar/XII/2022 TA. 2022 (Lain-lain PAD) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Majene TA. 2022	PPTK BIDANG PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN MAJENE	2.600.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
2	Pengajuan SPM LS Perjalanan Dinas Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Bulan Desember 2022 dengan Surat Tugas No : 090/75/2022, 090/76/2022, 090/17/2022, 090/112/2022 (Lain-lain PAD)	Rekening Penampungan Gaji	7.975.450,00
3	Pengajuan SPM LS Pembayaran Perjalanan Dinas Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Dengan Nomor Surat Tugas 090/113/2022, Bulan Desember 2022 (DBH Provinsi)	Rekening Penampungan Gaji	4.326.000,00
4	Pengajuan SPM LS Pembayaran Perjalanan Dinas Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Dengan Nomor Surat Tugas 090/108/2022 & 090/113/2022, Bulan Desember 2022 (Lain-lain PAD)	Rekening Penampungan Gaji	3.908.300,00
5	Pengajuan SPM LS Pembayaran Swakelola Pelaksanaan Kegiatan Pelestarian Nilai Nilai Sejarah, dengan No SK : 023/HK/KEP-BUP/II/2022, BASTP No. 233/BASTP-KEU/Disbudpar/XII/2022 TA. 2022 (Lain-lain PAD) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Majene TA. 2022	PPTK BIDANG PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN MAJENE	6.027.500,00
6	Pengajuan SPM LS Permintaan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk Bulan Sampai Dengan Bulan Desember. 2022. Dengan Nomor Surat Tugas : 090/1121/2022, 090/54/2022, 090/71.a/2022, 090/73.a/2022 (DAU)	Rekening Penampungan Gaji	27.204.247,00
I	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**		58.357.300,00
1	Pembayaran LS Pengawasan Normalisasi Tambak, CV. AKBAR CONSULTANT, SPK No : 53/SPK/DKP-PGW/XII/2022 Tgl 12 Desember 2022, BAST No : 905/524/BAST/XII/2022 Tgl 22 Desember 2022, BAP No : 905/525/BAP/XII/2022 Tgl 22 Desember 2022 Sumber Dana LLPAD	CV. AKBAR CONSULTANT	3.900.000,00
2	Pembayaran LS Perencanaan Normalisasi Tambak, CV. GOLEM CONSULTANT, SPK No : 52/SPK/DKP-PRC/XII/2022 Tgl 07 Desember 2022, BAST No : 905/527/BAST/XII/2022 Tgl 22 Desember 2022, BAP No : 905/528/BAP/XII/2022 Tgl 22 Desember 2022 Sumber Dana LLPAD	CV. GOLEM CONSULTANT	3.900.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
3	Pembayaran LS Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sesuai Surat Tugas Nomor : 094/355.c/2022 Tanggal 14 Agustus 2022 Pada Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sumber Dana LLPAD	Hj. ICHWANTI, MUH. IRFAN USA, DIAH YULIANI, YULIANA, ADRIANI, HASLITA ARIEF SALEH, MURSYIDAH, NENENG ARIATI, DARMAWAN, M. IDRIS, NASRAH, IFA TRISUSWANTI, ROBI TRIO SAPUTRA, RONI EKO SAPUTRA, HASRIANI HASANUDDIN, MUFTIRAINI SARMIN, MUH JENAR, SYARIFAH AINI, FITRIANA, MUNAWARAH, SITI NURHAYANI, NURALMIAH, MUH. YASRIB, M. SIBLI, MUSTAKIN, GISMAN, ABD. WAHAB, NURWAHIDAH, FREDERICK ROBINSON, MUH TAKWIN, MUHYIDDIN, ROSDIANA, MUH.ISRA, RESKIANA	14.008.000,00
4	Pembayaran LS Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sesuai Surat Tugas : 094/485.a/2022 Tanggal 5 Oktober 2022 Pada Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana DAU	GISMAN, M. SIBLI, MUH. ARIS IDRIS, AHDIAT, MUH. JENAR	1.920.000,00
5	Pembayaran LS Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sesuai Surat Tugas : 094/561/2022 Tanggal 18 November 2022 Pada Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil Sumber Dana DBH PROV	FACHRIADI J BACHTIAR, ANWAR HAMBALI, HARMIATY, DAMAYANTI, BINTANG ANUGRAH, BUDI ATAN ARAS, MUHAMMAD GUSNADI,	2.000.000,00
6	Pembayaran LS Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Sesuai Surat Tugas : 094/570/2022 Tanggal 10 Mei 2022 Pada Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana LLPAD	FACHRIADI J BACHTIAR, ANWAR HAMBALI, DAMAYANTI, HASMIDA	550.000,00
7	Pembayaran LS Biaya Perjalanan Dinas Biasa Sesuai Surat Tugas Nomor : 090/1752/2022 Tanggal 18 Juli 2022 Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sumber Dana LLPAD	Hj. ICHWANTI, MUH. IRFAN USA, GISMAN, ABD. WAHAB, MUH. YASRIB, MURSYIDAH, SITI NURHAYANI	20.289.300,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
8	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sesuai Surat Tugas :094/436.b/2022 Tgl 31 Agustus 2022 dan Perjalanan Dinas Dalam Kota Sesuai Surat Tugas : 094/277.a/2022 Tgl 29 Juni 2022 Sumber Dana LLPAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.277.000,00
9	Pembayaran LS Biaya Perjalanan Dinas Biasa SesuaiSuratTugas:094/467.c/2022 Tgl27Oktober2022 dan Perjalanan Dinas Dalam Kota SesuaiSuratTugas:094/592/2022 Tgl2Desember2022 Pada Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana LLPAD		1.013.000,00
10	Pembayaran LS Biaya Perjalanan Dinas Biasa Sesuai Surat Tugas:094/534/2022 Tgl 09 November 2022 dan Perjalanan Dinas Dalam Kota Sesuai Surat Tugas :094/551/2022 Tgl 28 Oktober 2022 Pada Kegiatan Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Sumber Dana LLPAD		1.500.000,00
J	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**		300.987.800,00
1	Bayar Belanja Bahan Komputer berupa Belanja Tinta /Ribbon Pd Keg Pencatatan,Penatausahaan & Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan sesuai SPK No.902/SPK-1/DISDUKCAPIL/I/2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Majene TA 2022	ENDAN SUPRIADI/PT SAHABAT INTI SUKSES MADANI	120.000.000,00
2	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022	H MUH ASRI ALBAR, SYAMSUL, LIMRIL, HUSAIN, BASRIANTO, NURDIN, ABD, AZIS, MUH FUDAIL HUSENG, MASRUR R	37.551.600,00
3	Pembayaran Uang Lembur PNS dan Non PNS Pd Kegiatan Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Peristiwa Kependudukan Sesuai SPK No. 08.a/SPK-KEU/Duk-Capil/VII/2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene T.A 2022	H.MUH ASRI ALBAR KUSMIRAN BASRIANTO HUSAIN HARRY KRISNATA	1.656.000,00
4	Pembayaran Uang Lembur PNS dan Non PNS Pd Keg Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pelaksananaan, Pemantauan Penyelenggaran Adminduk Sesuai SPK No. 011.a/SPK-KEU/Duk-Capil/VIII/2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majene T.A 2022	SYAMSUL, KUSMIRAN, RIMLIL, HJ. ST ARPAH, HARRY KRISNATA, MUH FUDAIL HUSENG, NURUL MAGFIRAH, ANDINA	1.227.800,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
		ARIYANTI, HIJRAYANTI, HASMIRA	
5	Pembayaran Uang Lembur PNS dan Non PNS Pd Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai SPK No. 012/SPK-KEU/Duk-Capil/X/2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene T.A 2022	SYAMSUL, NUR SYAMSI, HIJRAYANTI, ANDINA ARIYANTI, MUH ICSAN	971.300,00
6	Pembayaran Uang Lembur PNS dan Non PNS Pd Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sesuai SPK No. 013/SPK-KEU/Duk-Capil/X/2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene T.A 2022	SYAMSU, NUR SYAMSI, HIJRAYANTI, ANDI ARIYANTI, MUH, ICSAN,	971.300,00
7	Pembayaran Uang Lembur PNS dan Non PNS Pd Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Sesuai SPK No. 014/SPK-KEU/Duk-Capil/X/2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene T.A 2022	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.450.000,00
8	Pembayaran Uang Lembur PNS dan Non PNS Pd Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sesuai SPK No. 02.c/SPK-KEU/Duk-Capil/II/2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene T.A 2022	WIPAYANI PAWELLOI NURDIN	592.000,00
9	Pembayaran Uang Lembur PNS dan Non PNS Pd Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendafatarn Penduduk Sesuai SPK No. 06/SPK-KEU/Duk-Capil/VI/2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene T.A 2022 (2.12.02.2.01.04)	LIMRUL, HJ.ST ARPAH, SYARIPOA MUSRIFA, FITRIANI, ANDI MANTASIAH, MUSLIM, MUH FUDAIL HUSENG, MELINDA SARI, REKA IRWAN, SAPRIANI BAKRI, MASRUR, HIJRAYANTI,M, SYAHRUL	1.447.800,00
10	Bayar Belanja Perjalananan Dinas Dalam Kota pada Kegiatan Jasa Surat Menyurat tahun 2022 pada Dinas kependudukan dan pencatatatan Sipil Kabupaten Majene tahun Anggaran 2022 dana Lain-lain PAD (2.12.01.2.08.01)	H MUH ASRI ALBAR, RIMLIL, HUSAIN, BASRIANTO, HARRY KRISNATA, MARWAN, MUH FUDAIL HUSENG, SINTA SARI, SURIATI, MUH AS'AD, NURALAMSYAH, MASRUR	4.225.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
11	Bayar Belanja Perjalananan Dinas Dalam Kota pada Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Adminduk tahun 2022 pada Dinas kependudukan dan pencatatatan Sipil Kabupaten Majene tahun Anggaran 2022 (2.12.04.2.03.05)	SYAMSUL, ANDI MANTASIAH, FITRIANI, SYARIFA MUSRIFA, NUR ASIAH, JUMIATI, MUSLIM, HARRY KRISNATA, WIPAYANI PAWELLOI, RIMAWATI, INDAH FITRIANI, HUJRAYANTI, MASTIRIAMI, HASMIRAH, HASLIA N, MASLIA, NURUL MAGFIRAH, RAHMAWATI, FIRMAYANTI, ANDINA ARIANTI, WAHIDA HAJAR, SALMA, ILHAM K, M,SYAHRUL, ABD RAHMAT, NURALASMSYAH, HUSAIN	12.960.000,00
12	Bayar Belanja Perjalananan Dinas Dalam Kota pada Kegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan tahun 2022 pada Dinas kependudukan dan pencatatatan Sipil Kabupaten Majene tahun Anggaran 2022 (2.12.03.2.03.03)		5.590.000,00
13	Bayar Belanja ATK berupa Blangko KIA pd kegiatan pencatatan. penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan sesuai SPK No.902/SPK03/DISDUKCAPIL/VIII/2022 Pada Dinas Kependudukan dan pencatatatan Sipil Kab.Majene TA 2022 (2.12.02.2.01.05)		30.000.000,00
14	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kanupaten Majene Tahun Anggaran 2022 (Lain-lain PAD) (2.12.01.2.06.09)	H.MUH ASRI ALBAR, LIMRIRL, JUMIATI, BASRIANTO, HARRY KRISNATA, NURUL MAGFIRAH, MUH AS'AD, AWIT GOTRO PRAKOSO, NIZAR ASQAH,	3.500.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
15	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022 (DAU) (2.12.01.2.06.09)	H MUH ASRI ALBAR SYAMSUL, LIMRIL,KUSMIRAN,H ST ARPAH, SUPRIADI, SYARIFA MUSYRIFA,JUMIATI, HUSAIN,MUSLIM, BASRIANTO, SUMARNI, HARRY KRISNATA, WIPAYANI PAWELLOI, MAHSAN DJ, MUH FUDAIL HUSEN, IRMAWATI, INDA FITRIANI, HIJRAYANTI, MASTURIAMI, CITRA NARUL DIAN HASMANDRA, HASLIA N, MUH AS'AD, NURMAYANTI, ANDINA ARIANTI, REKA IRWAN, HUSAIN, MUH IRDAN, WAHIDA HAJAR, SALMA, ILHAM K, ABD RAHMAT, NURALAMSYAM, NIZAR ASKA, MASRUR R	26.035.000,00
16	Bayar Belanja Kertas dan Cover Pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk bulan Desember Tahun 2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene TA 2022 (Lain-lain PAD) (2.12.02.2.01.04)	Usaha Damai	900.000,00
17	Bayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Pada Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu untuk Bulan Desember Tahun 2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene TA 2022 (Lain-lain PAD)	Hj. Murtafia	23.080.000,00
18	Bayar Belanja Bahan Kertas dan Cover Pd Keg.Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan untuk bulan Desember Tahun 2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene TA 2022 (Lain-lain PAD) (2.12.02.2.01.05)		2.480.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
19	Bayar Belanja Bahan Cetak berupa Film Printer pd keg pencatatan.penatausahaan & penerbitan dok atas pelaporan peristiwa kependudukan sesuai SPK No.902/SP-04/DISDUKCAPIL/VIII/2022 Rincian Sumber DBHProv. Rp.7.500.000 dan Lain-Lain PAD Rp.28.500.000 TA 2022 (2.12.02.2.01.05)		18.000.000,00
20	Bayar Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Pada Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene TA 2022 (2.12.04.2.03.05)		7.350.000,00
K	**DINAS KESEHATAN**		42.613.736,00
1	Pembayaran LS Belanja Perjalanan dinas Luar daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD di Provinsi Mamuju & Makassar tahun 2022 sesuai SPPD & Surat Tugas terlampir, dinkes kab. Majene T.A 2022 bersumber dana (Pajak Rokok)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	42.613.736,00
L	**DINAS KETAHANAN PANGAN**		36.041.200,00
1	SPP-Ls Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Biasa Pada Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Sesuai Kwitansi Nomor : 10 s/d 22 Sumber Dana LLPA	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.400.000,00
2	SPP-LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahap Anggaran 2022 Sesuai Dengan Kwitansi Nomor: K56 s/d K73 Sumber Dana LLPA	REK. PENAMPUNGAN GAJI	200
3	SPP-LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun tahun Anggaran 2022 sessuai Kwitansi Nomor : K46 - K61 Sumber Dana LLPA	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.035.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
4	SPP-LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Kab. Majene Sesuai Kwitansi No. 40 s/d 51 Sumber Dana LLPA	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.100.000,00
5	SPP-LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Pada Kegiatan Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Tahun Anggaran 2022 SPPD Terlampir Sumber Dana LLPA	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.031.000,00
6	SPP-LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Pada Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA. 2022 Sesuai Kwitansi No : 227 s/d 248 Dan 458 s/d 576 Sumber Dana LLPA	REK. PENAMPUNGAN GAJI	20.475.000,00
M	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**		34.634.400,00
1	Pembayaran LS Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,No.Surat Tugas : 090/743/2022 pada DLHK Kabupaten Majene. Lain2 PAD	Andi Suardi, ST	8.445.600,00
2	Pembayaran LS Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi & Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan,No.Surat Tugas : 090/733/2022 Lain2 PAD	Ulfah Diana Sagena H,S.Sos,MM	6.240.000,00
3	Pembayaran LS Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali No.Surat Tugas : 090/744/2022 pada DLHK Kabupaten Majene. Lain2 PAD	Ahmad Saihu,SE	2.728.800,00
4	Pembayaran LS Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) No.Surat Tugas : 090/665/2022,090/655/2022,090/731/2022,090/467.a/2022 pada DLHK Kabupaten Majene. Lain2 PAD	Edy Hartanto Taufik,SE,MM	2.356.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
5	Pembayaran LS Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota No.Surat Tugas : 090/653/2022,090/656/2022,090/657/2022,090/697/2022,090/711/2022,090/714.a/2022,090/727/2022,pada DLHK Kabupaten Majene. Lain2 PAD	Ulfah Diana Sagena H,S.Sos,MM	7.986.000,00
6	LS Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Koordinasi & Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan No.Surat Tugas 090/666/2022,090/750/2022 Lain2 PAD	Ulfah Diana Sagena H,S.Sos,MM Suryani Syam,ST,MT Hj.Naila,SP Jusnati,SP Mahdia Mansyur, S.Sos Rahmawati Rahmiani,S.IP Mansur,S.Kom Marlina Masruhim Zainuddin Nurhamudin	3.230.000,00
7	LS Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,No.Surat Tugas : 090/834/2022,090/717/2022,090/718/2022 Lain2 PAD	Andi Suardi, ST, Mika Irawati Muhsin,S.Pi, Haniah,S.Si,MM, Muhammad Cahyadi, Rahmiani,S.IP, Marlina Masruhim	3.648.000,00
N	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		6.755.000,00
1	Pembayaran Biaya Pengelolaan Berupa Biaya ATK & Penggandaan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Dinas PUPR Kab. Majene TA.2022.(DAU DTU).Sesuai Nota Terlampir	TOKO MIRA SENTOSA (RAHMAWATI SJAMSIDAR EKAPUTRI)	80.000,00
2	Kegiatan Rutin yang di tagih oleh toko (BELANJA GU)	Eka Rahmawaty (Toko Mira Sentosa)	730.000,00
3	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa & Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik Surat Tugas No.094/4128/ST/XII/2022 Tgl.2/12/2022 & SPPD No.094/4129/SPPD/XII/2022 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2022.(LAIN PAD)	LOGHA PUTRA, CV	1.020.000,00
4	Pembayaran (LS) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas PUPR Kab. Majene TA.2022.(LAIN- LAIN PAD).Sesuai Daftar Terlampir	IBNATI, CV	4.705.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
5	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa & Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik Surat Tugas No.094/4128/ST/XII/2022 Tgl.2/12/2022 & SPPD No.094/4129/SPPD/XII/2022 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2022.(LAIN PAD)	LOGHA PUTRA, CV	220.000,00
O	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		32.198.900,00
1	Belanja Langsung Perjalanan Dinas Tetap Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kantor Dinas PMD Kab. Majene TA. 2022 (Sumber Dana DAU)	H. Sudirman, S.Pd., M.Si	3.013.900,00
2	Belanja Langsung Perjalanan Dinas Tetap Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kantor Dinas PMD Kab. Majene TA. 2022 (Sumber Dana LLPAD)	Usman Rasyid, SE	8.910.000,00
3	Belanja Langsung Perjalanan Dinas Tetap Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa pada Kantor Dinas PMD Kab. Majene TA. 2022 (Sumber Dana LLPAD)	Edi Bastian, SE	4.210.000,00
4	Belanja Langsung Perjalanan Dinas Tetap Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Kantor Dinas PMD Kab. Majene TA. 2022 (Sumber Dana LLPAD)	Muhammad Ayatullah Rachim, S.Sos., M.Si	2.450.000,00
5	Belanja Langsung Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa pada Kantor Dinas PMD Kab. Majene TA. 2022 (Sumber Dana LLPAD)	Nurdin, S.Pd	530.000,00
6	Belanja Langsung Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kantor Dinas PMD Kab. Majene TA. 2022 (Sumber Dana LLPAD)	Usman Rasyid, SE	13.085.000,00
P	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**		38.671.800,00
1	Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai Surat Tugas Nomor: 090/169/2022 Tanggal 8 Desember Tujuan Ke Mamuju Selama 2 Hari Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumber Dana Lain- Lain PAD	HJ. LIES HIRAWATI THAHAIR, S.Sos, Dra. HJ. NAMIRAH SALEH, HASRIAH, SE, MUH. YUSUF, RAHMAWATI MUHAJANG, SE, MALIANA, MUHAMMAD ISRAM, MUH. SAFRIL, S.PD, M.AP , ANDI ERMIN, SE, SUBRIAH, S.AG.	20.824.800,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
2	Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Kegiatan Penyusunan Ranperda Dengan Surat Tugas Nomor:094/197/2022 Tanggal 30 Juni 2022 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumber Dana LAIN-LAIN PAD	MUH. SAFRIL, S.PD, M.AP, HJ. LIES HIRAWATI THAHAIR, S.Sos, HASRIAH, SE, MUH. YUSUF, MASRIANI, SE, HERMIATI, SE	17.172.000,00
3	Biaya Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barng Milik Daerah Pada SKPD Sumber Dana Lain - Lain Pendapatan	PERTASHOP ISMAIL HASAN BASRI	675.000,00
Q	**DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA**		11.102.132,00
1	LS Pembayaran Uang lembur Kegiatan Pengembangan Sistem pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan SP No. 04/SP/DISDIKPORA-GTK/XII/2022 Tanggal 1 Desember. (Sumber Dana : Lain-Lai PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.923.600,00
2	LS Pembayaran Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pengembangan Sistem pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan SP No. 06/SP/DISDIKPORA-GTK/XII/2022 Tanggal 1 Desember. (Sumber Dana : Lain-Lai PAD)	ANDRIANI HAMID (WARUNG PRIYANGAN)	4.500.000,00
3	LS Pembayaran Kegiatan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Berdasarkan SPK No. 01/SPK/MULOK/DISDIKPORA/XI/2022 Tanggal 22 Oktober 2022. (Sumber Dana : Lain- Lain PAD)	TOKO NUR ALIM	45.000,00
4	LS Pembayaran Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah/ SPM Berdasarkan SPK No. 01.04/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/VIII/2022 Tanggal 2 Agustus 2022. (Lain-Lain PAD)	TOKO BERKAH ANANDA	50.000,00
5	LS Pembayaran Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Peserta Didik Asesmen SMP Berdasarkan SPK No. 01.03/SPK/ASESMEN-SMP/DISDIKPORA-DIKDAS/IV/2022 Tanggal 6 April 2022. (Sumber Dana : Lain-Lain PAD)	TOKO BERKAH ANANDA	1.000,00
6	LS Pembayaran Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Peserta Didik Asesmen SMP Berdasarkan SPK No. 01.03/SPK/ASESMEN-SMP/DISDIKPORA-DIKDAS/IV/2022 Tanggal 6 April 2022. (Sumber Dana : Lain-Lain PAD)	TOKO BERKAH ANANDA	24.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
7	LS Pembayaran ATK, Kertas Cover, Dan Bahan Komputer Pada Kegiatan Lomba Gerak Jalan Antar Siswa Jenjang SD Berdasarkan SPK No. 01.04/SPK/SPM/DISIDKPORA-DIKDAS/XII/2022 Tanggal 1 Desember 2022. (Sumber Dana :Lain Lain PAD)	TOKO BERKAH ANANDA	108.312,00
8	LS Pembayaran ATK, Kertas Cover, Dan Bahan Komputer Pada Kegiatan Lomba Gerak Jalan Antar Siswa Jenjang SD Berdasarkan SPK No. 01.04/SPK/SPM/DISIDKPORA-DIKDAS/XII/2022 Tanggal 1 Desember 2022. (Sumber Dana :Lain Lain PAD)	TOKO BERKAH ANANDA	218.500,00
9	LS Pembayaran Kegiatan Pembinaan Paskibraka (Perjalanan Dinas Tetap) Berdasarkan SPK No. 02/SPK-PO/PASKI/DISDIKPORA/VII/2022 Tanggal 1 Juli 2022. (Sumber Dana : Lain-Lain PAD)	ARIANSYAH, S. IP	231.720,00
R	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		18.936.900,00
1	BAyar SPPD Luar Kunjungan terkait Percepatan Penurunan Stunting Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA. 2022. (Lain - Lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	18.936.900,00
S	**DINAS PERHUBUNGAN**		21.789.200,00
1	Pembayaran Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas No : 090/1896.a/2022- 090/1949.a/2022-090/369/20220 sumber dana Lain lain PAD	1. MUHAMMAD YUSUP, S.Pd	21.789.200,00
T	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**		23.958.500,00
1	SPM-LS Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa Dalam rangka Koordinasi di DPK Prov. Sulbar Terkait Bantuan Buku dan rak Buku di Desa Wilayah Kab. Majene Sesuai Surat Tugas 090/2407/2022.Keg. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota. (lain-lain PAD)	REK.PENAMPUNGAN GAJI	2.050.000,00
2	SPM-LS Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Mamuju dan ke Polewali Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sesuai Surat Tugas 090/2326/2022. dst. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Majene. Sumber Dnana Lain-lain PAD	REK.PENAMPUNGAN GAJI	3.195.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
3	SPM-LS Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai Surat Tugas No. 090/096/2022. dst. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sumber Dana Lain-lain PAD	REK.PENAMPUNGAN GAJI	5.409.000,00
4	SPM-LS Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Keg. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota. (Pendampingan Lomba Perpustakaan Sekolah) Sesuai Surat Tugas No. 090/66/2022. dst. Dinas Perpustakaan & Kearsipan. Sumber Dana Lain-lain PAD	REK.PENAMPUNGAN GAJI	1.600.000,00
5	SPM-LS Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam rangka Dalam rangka Melaksanakan Audit Pengawasan Kearsipan Internal di Kecamatan Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Sesuai Surat Tugas No. 090/106/2022 Sumber Dana Lain-lain PAD	REK.PENAMPUNGAN GAJI	1.803.000,00
6	SPM-LS Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Daerah kegiatan layanan Perpustakaan Keliling di tiap Kecamatan Se-Kab Majene sesuai Surat Tugas 090/133/2022 Sumber Dana Lain-lain PAD	REK.PENAMPUNGAN GAJI	1.760.500,00
7	SPM-LS Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Keg. Pengelolaan & Pengembangan Bahan Pustaka (Penulusuran Naskah kuno dan Etnis Daerah Sesuai No. Surat Tugas 090/125/2022. dst. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Majene. Sumber dana Lain-lain PA	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.920.000,00
8	SPP-LS Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Keg. Pengelolaan & Pengembangan Bahan Pustaka (Penulusuran Naskah kuno dan Etnis Daerah Sesuai No. Surat Tugas 090/112/2022. dst. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Majene. Sumber dana Lain-lain PAD	REK.PENAMPUNGAN GAJI	2.221.000,00
U	**DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**		143.253.970,00
1	Byr 100% Pkrjn Biya Perenc,Pengwsn,dan Pengloln (Kec.BanggaeTmr,Pamboang,Ulumnda)sub keg.Pemb Rehb dan Pmlihrn Jringn Irigsi UshTni SPK No.038/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/XII/2022Tgl.28 Nopmbr 2022,BASTP No.520/2744.a/Distanakbun/12/2022 Tgl.9Des 2022 (LL PAD)	CV. AKBAR CONSULTAN	1.600.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
2	Bayar Perjalanan Dinas Biasa Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamtan dan Desa 2022 sesuai Daftar Nominatif No.900/2787/2022 Tgl. 12 Desember 2022 dan BAPP No. 900/2788/2022 Tgl. 12 Desember 2022 terlampir (Lain" PAD)	Astuti, Hj.Maslian	228.140,00
3	Bayar Perjalanan Dinas Biasa sub Keg.Pengemb.Kapasitas Kelembagaan Petani di Kec.dan Desa TA.2022 sesuai Daftar Nominatif No. 900/2809/2022 Tgl. 12 Desember 2022 dan BAPP No. 900/2810/2022 Tgl. 12 Desember 2022 terlampir.(DBH Prov)	Hj. Maslian	545.800,00
4	Bayar Perjalanan Dinas Biasa pd sub Keg. Pendampingn Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Distanakbun, BAPP No.900/2555/BAPP/XI/2022 Tgl.22 November 2022 dan Daftr Nomntf Perjlnan Dinas Biasa No.900/2553/Distanakbun/XI/2022 Tgl.22 Novmbr 2022 (Lain" PAD)	Muhammad Syafri, Andi Elly Munawarawanti,	1.790.000,00
5	Bayar Perjalanan Dinas Biasa pd Sub Keg. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) TA.2022, sesuai BAPP No. 520/2738/2022 Tgl. 8 Desember 2022 dan Daftar Nominatif No. 900/2737/2022 Tgl. 8 Desember 2022, Terlampir (DBH Prov)	Lusmin, Ajyad, Basruddin, Samsuri, Mohammad Abdul Rozik, Daaming, Hatimah Kuba	7.367.000,00
6	Bayar Perjalanan Dinas Biasa pd Sub Keg. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) TA.2022, sesuai Daftar Nominatif No. 800/3124/XII/2022 dan BAPP No. 520/3123/Distanakbun/XI/2022 Tgl. 23 Desember 2022, Terlampir (DBH Prov)	Hapsah, Sunarti, Andi Nur Intan, Mu'min, Anggun Sri Buana, Fitriani, Muhammad Syafei, Hasruddin	10.870.000,00
7	Bayar Perjalanan Dinas Biasa sub Keg. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultra, sesuai BAPP No. 900/2750/2022 Tgl. 9 Desember 2022, terlampir Daftar Nominatif (DBH PMK 134)	Lusmin, Iskandar Agung, Suhudiah, Hapzah, Suminarti, Khaerul ihwan, Hasruddin, Anggun Sri Buana Obed	10.875.460,00
8	Bayar Perjalanan Dinas Dalam Kota pd Sub Keg. Pengemb.Kapasitas Kelembagaan Petani di Kec dan Desa TA.2022,Daftar Nominatif Pembayaran No.900/2785/2022 Tgl.12 Desember 2022, dan BAPP No.900/2786/2022 Tgl. 12 Desember 2022 terlampir.(DAU)	Husniar Harbi	301.570,00
9	Bayar Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Keg.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa TA. 2022 sesuai Daftar Nominatif Pembayaran No. 900/2816/2022 Tgl. 13 Desember 2022 dan BAPP No. 900/2817/2022 Tgl. 13 Desember 2022, terlampir.	Ahmad Rezki, Husniar Harbi, Hj. Maslian	729.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
10	Bayar Pembyran Surt Perjalnan Dinas Dalam Daerah (Kota) sub Keg. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pd Distanakbun TA. 2022 TA.2022, sesuai BAPP No. 900/3109/XII/2022 Tgl. 23 Desember 2022, terlampir (SILPA)	Muhammad Syafei, Vitri Harfiani, Sunusi R, Syafriadi, Taufiq, hasanuddin, Sri Wahyuti, Muhammad Multaji, Munda, jalaludin taijeb, Hasruddin, Fitrianingsih, Fitriani, Hasriati, Novianti, Marlina, Nurbaya	5.084.000,00
11	Bayar Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Keg. Ppengawsan Penggunaan Sarana Pendkung Pertanian sesuai Komdts Teknlgi, dan spesifik Lokal sesuai BAPP No.900/2946/XII/2022 Tgl.16 Desembr 2022 dan Daftar Nominatif No.900/2531/XI/2022 Tgl. 18 Nov 2022 (Lain"PAD)	Ahmad Rafly Nur, Siti Arwini Puspita, Herianto, Munawir, Muhammad Syafri Syam, Alimuddin, Wahiddin, Andi Elly Munawarawanti, Muhammad Khaliq, Muhammad Ihsan, Andi Hirwantahir, Putri Sundari, Iswandi Idris, Saiful Umam, Andi Mulyawan, Nur Fadillah, Rudiansyah	5.370.000,00
12	Bayar Perjlanan Dinas Dalam Kota Sub Keg. Penjaminan Peredrn HPT Bahn Pakan/Pakan, sesuai Daftr Nomintf Perjlanan No. 520/2816.a/DISTANAKBUN/XII/2022 Tgl. 13 Desember 2022 dan BAPP No.520/2817.a/BAPP/Distanakbun/XII/2022 Tgl. 13 Desmber 2022 (Lain" PAD)	Abdul Hafid, Juliasman, Marwanti, Andi Nur Intan, Muhammad Syuhud, Rahmat, Zaenuddin, Muhammad Yusuf, Nur Mutmainnah, Risnayalti	5.434.000,00
13	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub Keg. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Distanakbun, sesuai Daftar Nominatf Perjalanan No. 800/06/XI/2022 dan BAPP No.520/2490/Distanakbun/XI/2022 Tgl. 09 Desember 2022 terlampir (DBH Prov)	Muhammad Syafei, Munda, Taufiq, Hasanuddin, Vitri Harfiani, Jalaluddin, Muhammad Multaji, Syafriadi, Fitriani, Fitrianingsih, Ahmad Rafly Nur, Munawir, Mu'min, Sri Wahyuti, Khaerul Ihkwan, Ahmad Abdullah, Hasruddin, Hasriati, Nurbaya	6.383.000,00
14	Bayar Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamtan dan Desa 2022 sesuai Daftar Nominatif No.900/2792/2022 Tgl. 12 Desember 2022 dan BAPP No. 900/2793/2022 Tgl. 12 Desember 2022 terlampir (DBH Prov)	Ahmad Rezki, Husniar Harbi, Maslian, Ahmad SP, Supardi, La Gimbang, Marhama, Ihva S Kuba, Filzah Wahyuddin, Erwiansyah, Taufiq, Hasruddin, Hasanuddin, Devianti, Rosmiani, Astuti	10.388.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
15	Bayar Perjalanan Dinas Dalam Daerah pd Sub Keg. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultra, sesuai BAPP No. 900/2749/2022 Tgl. 9 Desember 2022 (Terlampir Daftr Nomintf) (DBH PMK 134)	Iskandar Agung, Rusdin, Basruddin, Nurjannah, Hapzah, Hasruddin, Saenab, Jumariah, Suhudiah, Khaerul Ihwan, Ahmad Abdullah, Sari Intan, Wahyuti, Suminarti, Sudirman, Muhammad Multaji, Nikmah, Sunusi, Hatimah Kuba, Sarmini, Anggun Sri Buana Obed, Subhan, Mu'min, Samsuri, Ajyad, Darami, Edy, Misrukiah, Maslian, Husniar Harbi, Nahriana Tahir, Asmawaty Alimin, Marwanti, Fatmawati Gasma, Andi Nur Intan, Irmayanti, St Masniati Hambali, Wasdiah, Vitri Harfiani, Lusmin, Masykur, Ripai, Munda, Nurlaela, Reka	10.770.000,00
16	Bayar Perjalanan Dinas Dalam Daerah sub Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian TA.2022, sesuai BAPP No. 900/2748/2022 Tgl. 9 Desember 2022, (Terlampir Daftar Nominatif) (DBH PMK 134)	Hapzah, Suminarti, Suhudiah, Iskandar Agung, Lusmin, Muhammad Syafei, Irmayanti, Misrukiah, Masykur, Ripai, Andi Nur Intan, Nurlaela, Nahriana Tahir, Masfa, Muhammad Asmadi, Jernih, Subhan, Ardiansyah, Vitri Harfiani, Abd Hafid, Fatmawati Gasma, Sudirman, Munda, Muhammad Multaji, Jalalaluddin Taijeb, Syafriadi, Taufiq, Sri Wahyuti, hasruddin, Mu'min, Wasdiah, Nursiang, Saenab, Abdul Ripai, Rosmiati, Jumiati, hasanuddin, Nurjannah, Jumariah, Reka, Nikma, Aisyah Noor	15.470.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
17	Bayr Perjalanan Dinas Dlm Kota sub keg.Pemb Rehab dan Pemliharan Jaringan Irigsi Usha Tani Distanakbun TA. 2022, BAPP No.900/2517/XI/2022 Tgl. 16 November 2022 dan Daftar Nominatf Perjalanan Dinas Dalam Kota No. 900/2486/XI/2022 Tgl. 11 Nov 2022(Lain"PAD)	Muhammad Syafri Syam, Lusmin, Wahiddin, Iswandi Idris, Tamlika Ali, Rudiansyah, Alimuddin, Muhammad Ihsan, Muhammad Khaliq, Aisyah Noor, Irmayanti, Dahlia Nurdin, Andi Nur Intan, Abdul Hafid, Ripai, Marwanti, Andi Elly Munawarawanti, Sahrul Arif, Hardiah Mustafa, Mustakim, Muhammad Rahmat, Fatmawati Gasma, Masykur, Zulkifli Kadir, Iskandar Agung, Suhudiah, Hapzah, Suminarti, Andi Mulyawan, Herianto, Putri Sundari, Siti Arwini Puspita, Andi Hirwan Tahir, Hasnawati, Saiful Umam, Nurfadillah, Hartina, St Marniati Hambali, Sukriani, Fitriani	21.000.000,00
18	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dlm Kota Sub Keg.Pengadaan Benih/Bibit Ternak yg Sumbernya dr Daerah Kab/Kota Lain TA.2022 sesuai BAPP No.900/2963/Distanakbun/XII/2022 dan Daftr Nomintf No.900/2962/Distanakbun/XII/2022 Tgl. 19 Desember 2022 (Lain lain PAD)	Aisyah Noor, Abdul Hafid, Marwanti, Jadil, Drh Siti Kahdijah Hardiyanti, kamaruddin, Dahlia Nurdin, Andi Nur Intan, Irmayanti, Ripai, Masykur, Munda, Asmawati alimin, Erry Budiertaba, Muhammad Arif, Ridwan, Rusman, bahar, Abdi, Harni, Drh Muhammad Alwi, Arman, Basruddin, M Talib, Surahman, Ahmad, Bahraeni, Sudarman, Nurhayat, Nasir, Mardi, Basri, Drh Ibnu Zikrillah, Suardi, Nasaruddin	29.048.000,00
V	**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN** **DAN PERTANAHAN**		48.359.500,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Ls. Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Makassar Keg. Penyelesaiaan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah, Sesuai ST No:54/ST.LD/DPKPP/VI/2022 Tgl 28/6/2022 & SPPD No:115.a/SPPD.LD/DPKPP/VI/2022 Tgl 28/6/2022 (Sumber Dana DBH (PMK 07)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.718.400,00
2	Ls Pemb Biaya Honorarium Pengad. Tanah SD Banua, SD Pettaweang, SD Aholeang, BLK & UNSULBAR Keg Peny Masalah Ganti Kerugian & Santunan Tanah Sesuai SK NO:800/HK/KEP-BUP/VIII/2022 Tgl 1/8/2022 & BAP No:92/BAP/DPKPP/06/XI/2022 Tgl 30/11/2022 (DBH PMK 07)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.100.000,00
3	Pembayaran LS Retensi Pemeliharaan 5% atas pengadaan sumur bor lingk Battayang Kel. Banggae sesuai SPK No:02.01/SPK-SAB/ DPKPP-KP/XI/2022 Tgl. 26/11/2022 dan BAST No:02.30a/BAST-SAB/DPKPP-KP/APBDP/XII/2022 Tgl 12/12/2022 (Lain Lain PAD)	CV. SURYA NUSANTARA	1.122.000,00
4	Ls Pemb Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Februari s/d Desember Kendaraan Dinas Roda Empat (DC 81 B) & Kendaraan Operasional PJU Roda Enam (DC 9003) Pada Keg Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Sesuai Nota Terlampir (Sumber Dana DBH PROV)	FATHUL MAJID	8.485.000,00
5	Pembayaran SPPD Luar Daerah sesuai ST No : 090/1008/2022 Tgl. 18/7/2022 & SPPD No. 121/SPPD-LD/DPKPP/VII/2022 Tgl. 18/7/2022 pada kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (sumber dana : DBH Prov)	BARQAH FOTOCOPY	564.200,00
6	Pembayaran LS SPPD Luar Daerah sesuai ST No. 61/ST.LD/DPKPP/XI/2022 Tgl 24/11/2022 & SPPD No. 146/SPPD-LD/DPKPP/XI/2022 Tgl 24/11/2022 kegiatan Kerjasama Perbaikan Tidak Layak Huni Beserta PSU (DAU - PMK 07)	BARQAH FOTOCOPY	6.413.900,00
7	Ls. Pemb. Biaya SPPD Luar Daerah Bidan Penjal Sub. Keg. Penyediaan Prasarana Sarana, dan Utilitas Umum, Sesuai ST No:76/LD/DPKPP/XII/2022 Tgl 12/12/2022 dan SPPD No:153/LD/DPKPP/XII/2022 Tgl 12/12/2022 (Sumber Dana Lain-lain PAD)	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	7.538.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
8	Pembayaran LS SPPD Dalam Kota sesuai ST No. 97/ST-DD/DPKPP/XI/2022 Tgl. 7/11/2022 & SPPD No.242/SPPD-DD/DPKPP/XI/2022 kegiatan kerjasama perbaikan tidak layak huni beserta PSU T.A. 2022 (Sumber Dana : DAU - PMK 07)	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	2.418.000,00
9	Ls. Pemb. Biaya SPPD Dalam Kota Keg. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), Sesuai ST No:103.a/DD/DPKPP/XI/2022 Tgl 28/11/2022 dan SPPD No:964/DD/DPKPP/XI/2022 Tgl 28/11/2022 (Sumber Dana DBH PROV)	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	7.000.000,00
W	**DINAS SOSIAL**		33.505.000,00
1	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL DINAS SOSIAL T.A 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	2.400.000,00
2	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL T.A 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	5.080.000,00
3	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL T.A 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	1.120.000,00
4	PEMBAYARAN SPPD PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DINAS SOSIAL T.A 2022 SUMBER DANA PAD LAIN-LAIN	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	2.900.000,00
5	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL T.A 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	1.607.000,00
6	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL T.A 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	6.310.000,00
7	PEMBAYARAN SPPD DALAM DAERAH DINAS SOSIAL T.A 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	2.240.000,00
8	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL T.A 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	4.570.000,00
9	PEMBAYARAN SPPD DALAM DAERAH DINAS SOSIAL T.A 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD DAN DBH PROV	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	7.278.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
X	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**		49.700.000,00
1	Sumber Dana (LLPAD). Pembayaran Kegiatan Pelatihan Olahan Kopra Putih, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene Dengan Generasi Sosial Peduli Indonesia. No.SPK : 800/626/2022 Tgl 6 Desember 2022. BAPP No : 800/955/2022 Tgl 16 Desember 2022. BA	REK. PENAMPUNGAN GAJI	49.700.000,00
Y	**INSPEKTORAT**		104.421.740,00
1	LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (LAIN2 PAD) Berdasar SK Bupati No : 02/HK/KEP-BUP/I/2022 Sesuai ST No : /INSP-MN/VI/2022 Inspektorat Kab. Majene Tahun 2022	rekening penampungan gaji	93.656.740,00
2	LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Keg. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub. Keg. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (LAIN2 PAD) Berdasar SK Bupati No : 02/HK/KEP-BUP/I/2022 Sesuai ST No : 700.030/INSP-MN/III/2022 Insp. Kab. Majene Tahun 2022	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.035.000,00
3	LS Belanja Perj Dinas dlm Kota Keg. Pendampingan & Asistensi Sub. Keg. Monev Pemberantasan Korupsi (LAIN2 PAD) Berdasar SK Bupati No : 02/HK/KEP-BUP/I/2022 Sesuai ST No : 700.108,113/INSP-MN/XII/2022 Inspektorat Kab. Majene Tahun 2022	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.730.000,00
Z	**KECAMATAN BANGGAE DAN KELURAHAN**		1.921.200,00
Z.1	**Kecamatan Banggae**		**621.200,00**
1	LS - SPPD Luar Daerah An. ARJUNA HAERUDDIN, SE Mengantar Atlet Kontingen Majene (Cabor Taekwondo) Mengikuti Pekan Olahraga Provinsi PORPROV (IV) Pada hari Senin s/d Selasa Tanggal 19 s/d 20 Desember 2022 di Mamuju.	ARJUNA HAERUDDIN, SE	621.200,00
Z.2	**Kelurahan Pangali-ali**		**1.300.000,00**
1	Pembayaran Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pada Kantor Kelurahan Pangali-Ali		1.300.000,00
AA	**KECAMATAN BANGGAE TIMUR DAN KELURAHAN**		13.461.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
AA.1	**Kecamatan Banggae Timur**		4.601.000,00
1	Belanja Langsung (LS) Lembur Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan s.d Bulan Oktober T,A 2022 tanggal 29 Oktober 2022 s.d 03 November 2022 pada Kantor Kec. Banggae Timur Kab. Majene, sebagaimana daftar terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.300.000,00
2	Belanja Langsung (LS) Lembur Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) T.A 2022 Tanggal 09 November 2022 s.d 14 November 2022 pada Kantor Kec. Banggae Timur Kab. Majene, sebagaimana daftar terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.301.000,00
AA.2	**Kelurahan Baruga**		**5.200.000,00**
1	Bayar Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor untuk Bulan Desember T.A 2022 pada Kantor Kelurahan Baruga (Sumber Dana Lain-Lain PAD)		2.400.000,00
2	Belanja Langsung (LS) Perjalanan Dinas Luar Daerah T.A 2022 pada Kantor Kelurahan Baruga Sumber Dana Lain-Lain PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.800.000,00
AA.3	**Kelurahan Labuang**		**1.200.000,00**
1	Belanja Langsung (LS) Insentif Penunjang Koordinasi Babinsa dan Bhabinkamtibmas Untuk Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2022 pada Kantor Kelurahan Labuang (Sumber Dana Lain-Lain PAD)	rekening penampungan gaji	1.200.000,00
AA.4	**Kelurahan Tande Timur**		**2.460.000,00**
1	Pengajuan Belanja Langsung LS Rekap perjalanan Dinas Biasa Rp 3.280.000 Perjalanan Dinas Tetap Rp. 3884000 Dan Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.020.000 Pada Kantor Kelurahan Tande Timur tahun 2022 Sumber Dana LAIN LAIN PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	920.000,00
2	Pengajuan Belanja Langsung LS Rekap perjalanan Dinas Biasa Rp 3.280.000 Perjalanan Dinas Tetap Rp. 3884000 Dan Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.020.000 Pada Kantor Kelurahan Tande Timur tahun 2022 Sumber Dana LAIN LAIN PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.540.000,00
BB	**KECAMATAN MALUNDA DAN KELURAHAN**		13.014.332,00
BB.1	**Kecamatan Malunda**		4.834.332,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Bayar belanja tagihan air dari bulan Agustus S/D Oktober, Listrik dari bulan Agustus S/D November dan tagihan Wifi indihome dari bulan Oktober S/D Desember 2022 pada sumber dana DAU, DBH PROV, LAIN-LAIN PAD		1.964.682,00
2	Bayar belanja tagihan air dari bulan Agustus S/D Oktober, Listrik dari bulan Agustus S/D November dan tagihan Wifi indihome dari bulan Oktober S/D Desember 2022 pada sumber dana DAU, DBH PROV, LAIN-LAIN PAD		138.000,00
3	Bayar belanja tagihan air dari bulan Agustus S/D Oktober, Listrik dari bulan Agustus S/D November dan tagihan Wifi indihome dari bulan Oktober S/D Desember 2022 pada sumber dana DAU, DBH PROV, LAIN-LAIN PAD		580.000,00
4	Belanja Alat / bahan untuk Kegiatan kantor Alat tulis Kantor dari bulan April S/D Agustus tahun 2022 pada sumber dana DAU		647.650,00
5	Belanja Makan Minum Rapat dari bulan April S/D Agustus dan Makan Minum jamuan tamu dari bulan April S/D agustus 2022. Pada Sumber dana DAU		1.000.000,00
6	Belanja Makan Minum Rapat dari bulan April S/D Agustus dan Makan Minum jamuan tamu dari bulan April S/D agustus 2022. Pada Sumber dana DAU		504.000,00
BB.2	**Kelurahan Malunda**		**2.680.000,00**
1	Pembayaran Belanja biasa, SPPD tetap, dan SPPD Dalam Kota Kantor Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda untuk Bulan Juli s/d Desember 2022. pada sumber dana Lain PAD	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	630.000,00
2	Pembayaran Belanja biasa, SPPD tetap, dan SPPD Dalam Kota Kantor Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda untuk Bulan Juli s/d Desember 2022. pada sumber dana Lain PAD	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	770.000,00
3	Pembayaran Belanja biasa, SPPD tetap, dan SPPD Dalam Kota Kantor Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda untuk Bulan Juli s/d Desember 2022. pada sumber dana Lain PAD	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	1.280.000,00
BB.3	**Kelurahan Lamungan Batu**		**5.500.000,00**

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas biasa Kantor Kelurahan Lamungan batu Kecamatan Malunda untuk Bulan januari s/d Desember dan Juli S/D desember 2022. pada sumber dana Lain-lain PAD	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	2.460.000,00
2	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas biasa Kantor Kelurahan Lamungan batu Kecamatan Malunda untuk Bulan januari s/d Desember dan Juli S/D desember 2022. pada sumber dana Lain-lain PAD	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	3.040.000,00
CC	**KECAMATAN SENDANA DAN KELURAHAN**		29.826.500,00
CC.1	**Kecamatan Sendana**		13.792.500,00
1	Bayar biaya perjalanan dinas dalam daerah anggota Forkopimcam Sendana sesuai surat tugas Nomor 090/01/Forkopimcam/2022 tanggal 14 Maret 2022 dan SPPD nomor 092/01/Forkopimcam/2022 tanggal 14 Maret 2022	REK. PENAMPUNGAN GAJI	11.520.000,00
2	Pembayarn biaya perjalanan dinas luar daerah Camat dan Staf, sesuai Surat Tugas Nomor 090/2210.a/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan SPPD Nomor 092/149/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, Sumber Dana DAU	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.272.500,00
CC.2	**Mosso**		**11.140.000,00**
1	Pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan HUT RI Tahun 2022 pada Kantor Kelurahan Mosso bulan Desember 2022, sumber dana lain-lain PAD	CAFÉ INA	1.500.000,00
2	Pembayaran belanja pakaian olah raga kantor Kel. Mosso bulan Desember 2022 sesuai SPK No. 01/SPK/KM/2022 tanggal 19 Desember 2022 dan BAPP No. 01/BAPP/KM/2022	SOBA KONVEKSI DAN SABLON	2.450.000,00
3	Pembayaran biaya makanan dan minuman kegiatan PKK Kel. Mosso Bulan Desember 2022	CAFÉ INA	360.000,00
4	Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah sekretaris lurah Kel.Mosso ke Mamuju tanggal 14-15 Oktober 2022 sesuai surat tugas No. 090/099/KM/X/2022 Tgl 14 Oktober 2022 dan SPPD No. 094/099//2022 tgl 14-15 Oktober 2022	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.230.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
5	Pembayaran biaya perjalanan dinas ASN dan Staf Kantor Kel.Mosso Bulan Mei s/d Desember 2022, Sumber dana Lain-lain PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.960.000,00
6	Pembayaran biaya perjalanan dinas Ketua PKK Kel. Mosso TA 2022	REK. PENAMPUNGAN GAJI	640.000,00
CC.3	**Mosso Dhua**		**4.894.000,00**
1	Pembayaran biaya perjalanan dinas Luar Daerah ASN dan Staf Kantor Kel.Mosso Dhua Bulan Desember 2022, Sumber dana DBH Prov.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.591.522,00
2	Pembayaran biaya perjalanan dinas Luar Daerah ASN dan Staf Kantor Kel.Mosso Dhua Bulan Desember 2022, Sumber dana DAU (Non Emark)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.302.478,00
DD	**KECAMATAN TAMMERODDO**		20.187.500,00
1	LS - Pembayaran Belanja Perjalan Dinas (SPPD) Dalam Kota Pegawai Sesuai Surat Tugas, Nomor : 090/1877.a/2022 Pada Kantor Kecamatan Tammerodo Sendana TA.2022. (Sumber Dana : DAU) Rekap Terlampir	1. Muhammad Akbar Tambaru, S. Sos	6.650.000,00
2	LS - Pembayaran Belanja Perjalan Dinas (SPPD) Tetap/Luar Daerah Pegawai Sesuai Surat Tugas, Nomor : 090/2009.a/2022 dan Dalam Kota Sesuai Surat Tugas, Nomor : 090/666/2022 Pada Kantor Kecamatan Tammerodo Sendana TA.2022 (Sumber Dana : DAU) Rekap Terlampir	1. Hasanuddin Haruna	5.450.000,00
3	LS - Pembayaran Belanja Perjalan Dinas (SPPD) Tetap/Luar Daerah Pegawai Sesuai Surat Tugas, Nomor : 090/2009.a/2022 dan Dalam Kota Sesuai Surat Tugas, Nomor : 090/666/2022 Pada Kantor Kecamatan Tammerodo Sendana TA.2022 (Sumber Dana : DAU) Rekap Terlampir	1. Hasanuddin Haruna	8.087.500,00
EE	**KECAMATAN TUBO**		24.261.000,00
1	Pembayaran Sarana Penyediaan Alat listrik Kantor (Tagihan Listrik Kantor) untuk Kecamatan Tubo Sendana Tahun Anggaran 2022 Sumber Dana Alokasi Umum		9.321.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
2	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah untuk Pegawai Kantor Kecamatan Tubo Sendana Tahun Anggaran 2022 Sumber Dana Alokasi Umum (DAU)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.000.000,00
3	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah untuk Pegawai Kantor Kecamatan Tubo Sendana Tahun Anggaran 2022 Sumber Dana Alokasi Umum (DAU)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.940.000,00
FF	**KECAMATAN ULUMANDA**		12.280.000,00
1	Belanja Langsung (LS) Pengadaan Pakaian Dinas Kantor Kecamatan Ulumanda TA. 2022		9.000.000,00
2	Belanja Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Kantor camat Ulumanda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022 (Sumber Dana DAU) Sesuai Belanja Perjalanan Dinas Tetap Nomor : 090/114/2022 dan Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Nomor : 090/100/2022	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.280.000,00
GG	**SATUAN POLISI PAMONG PARAJA**		12.978.400,00
1	LS - Pembayaran Langsung Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Belanja Iuran Surat Kabar) Bulan Desember TA 2022. Sesuai Nota Pesanan No. 800/912/2022 Tgl 05/12/2022 dan BAST No. 820/POL-PP/XII/2022 Tgl 05/12/2022. Sumber Dana DAU		500.000,00
2	LS - Pemb. Langsung Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu (Belanja Makan Minum Tamu) Bulan Desember Tahun 2022. Sesuai Nota Pesanan No. 800/914/2022 Tgl. 05/12/2022 dan BAST No. 817/POL-PP/XII/2022 Tgl. 05/12/2022. Sumber Dana DAU		3.000.000,00
3	LS - Pembayaran Langsung Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Belanja Onderdil Kendaraan Dinas) bulan Desember. Nota Pesanan No. 800/915/2022 Tgl 05/12/2022, BAST No. 816/POL-PP/XII/2022 Tgl 05/12/2022. Sumber Dana DAU		3.700.000,00
4	LS - Pembayaran Langsung Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Belanja Alat Tulis Kantor) untuk Bulan Desember Tahun Anggaran 2022. Nota Pesanan No. 800/910/2022 Tgl. 05-12-2022, BAST No. 818/POL-PP/XII/2022 Tgl. 05-12-2022. Sumber Dana DBH Provinsi		2.550.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
5	LS - Pemb. Langsung Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu (Belanja Makan Minum Tamu) Bulan Desember 2022. Sesuai Nota Pesanan No. 800/818/2022 Tgl. 03/09/2022 dan BAST No. 817/POL-PP/XII/2022 Tgl. 05/12/2022. Dana DAU		2.000.000,00
6	LS - Pembayaran Langsung Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Biaya Pajak Kendaraan Dinas) bulan Desember. Nota Pesanan No. 800/825/2022 Tgl. 16/12/2022 dan BAST No. 830/POL-PP/XII/2022 Tgl. 20/12/2022. Dana DBH Provinsi		1.228.400,00
HH	**SEKRETARIAT DAERAH**		329.010.934,00
1	Belanja LS Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negri (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sesuai dengan BAPP Nomor: 900/BAG-KS/83/2022 Tangal 12 Desember 2022. Sumber Dana Lain-Lain PAD		1.407.000,00
2	Belanja LS Biaya Kertas dan Cover pada Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian sesuai BAPP No. 32/EK-SETDA/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022. Tahun Anggaran 2022. LAIN2 PAD		1.935.000,00
3	Belanja LS Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negri (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sesuai dengan BAPP Nomor: 900/BAG-KS/82/2022 Tangal 12 Desember 2022. Sumber Dana Lain-Lain PAD		17.396.900,00
4	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman pada Rapat pada Kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1444 H/2022 sesuai BAPP No. 400/179-KSR/2022 Tanggal 14 Desember 2022. Sumber Dana Lain-Lain PAD		1.200.000,00
5	Belanja LS Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Evaluasi Kerjasama sesuai dengan BAPP Nomor : 0080/BAPP/BAG-KS/XII/2022 Tanggal 09 Desember 2022 pada OPD Sekretariat Daerah Kab. Majene Bagian Kerjasama TA 2022 (Sumber Dana Lain-Lain PAD)		3.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
6	Belanja LS Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Fasilitas Dalam Negri sesuai dengan BAPP Nomor : 0079/BAPP/BAG-KS/XII/2022 Tanggal 09 Desember 2022 pada OPD Sekretariat Daerah Kab. Majene Bagian Kerjasama TA 2022 (Sumber Dana Lain-Lain PAD)		10.800.000,00
7	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman pada Jamuan Tamu pada Kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1444 H/2022 sesuai BAPP No. 400/180-KSR/2022 Tanggal 14 Desember 2022. Sumber Dana Lain-Lain PAD		3.000.000,00
8	Belanja Biaya Kegiatan Barang dan Jasa Langganan Jurnal, Surat Kabar/Majallah (Pendokumentasian Tugas Pimpinan melalui Media Tribun Sulbar) sesuai Surat Perjanjian No. 040/22/SP-PROKOMPI/I/2022 tanggal 10 Januari 2022. DBH PROVINSI		20.000.000,00
9	Belanja LS Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, sesuai NPP-DIV No. 22243241-000		27.091.584,00
10	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, sesuai BAPP No. 800/010.a.ORG/SETDA/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.851.200,00
11	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, sesuai BAPP No. 800/08.a.ORG/SETDA/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.550.000,00
12	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri sesuai dengan Nomor : 77/BAPP/BAG-KS/XII/2022 Tanggal 09 Desember 2022 OPD Sekretariat Daerah Kab. Majene Bag. Kerjasama.T.A 2022 (SUMBER DANA Lain-Lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.991.300,00
13	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama sesuai dengan Nomor : 78/BAPP/BAG-KS/XII/2022 Tanggal 09 Desember 2022 OPD Sekretariat Daerah Kab. Majene Bag. Kerjasama.T.A 2022 (Sumber Dana Lain-Lain PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.169.200,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
14	Pembayaran LS Sub. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sesuai dengan BAPP Nomor : 076/BAPP/BAG-KS/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022 pada OPD Sekretariat Daerah Kab. Majene (Sumber Dana Lain2 PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	10.438.100,00
15	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Dalam Biasa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, sesuai BAPP No. 800/07.a.ORG/SETDA/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	12.922.800,00
16	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Biasa pada Sub. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Daerah Tahun Anggaran 2022. LAIN2 PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	17.242.800,00
17	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Biasa pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, sesuai BAPP No. 25/BAPP/HK/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022. Sumber Dana LAIN2 PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	22.160.000,00
18	Belanja LS Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Kegiatan Pemantauan Kebijakan SDA, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi & Evaluasi Kebijakan Energi dan Air sesuai BAPP Nomor: 900/40/SDA/XII/2022 Tgl 6 Desember 2022. Sumber Dana Lain-Lain PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.389.200,00
19	Biaya Belanja Dinas Luar Daerah pada Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sesuai BAPP Nomor: 900/1819.a/UMUM-SETDA/XII/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Sumber Dana Lain-Lain PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	66.649.600,00
20	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Biasa pada Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil sesuai BAPP No. 15/EK-SETDA/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Tahun Anggaran 2022. LAIN2 PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	38.998.500,00
21	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, sesuai BAPP No. 800/09.a.ORG/SETDA/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	476.000,00
22	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Daerah pada Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai dengan BAPP Nomor : 900/1981.a/UMUM-SETDA/XII/2022 Tanggal 22 Desember 2022 (Sumber Dana Lain-Lain PAD). T.A 2022	REK. PENAMPUNGAN GAJI	51.341.750,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
II	**SEKRETARIAT DPRD**		332.500,00
1	Belanja ATK untuk keperluan Kantor Sekretariat DPRD Kab. Majene pada Sub Kegiatan Pembahasan APBD Pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran TA 2022, sesuai BAPP No: 021/BAP-Persid/Sekr-DPRD/XI/2022. Dana		332.500,00
II.2	**TAHUN 2023**		57.123.600,00
A	**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**		3.335.000,00
1	Pembayaran LS Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Sumber Dana PAD	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	1.920.000,00
2	Pembayaran LS Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Sumber Dana PAD	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	190.000,00
3	Pembayaran LS Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Sumber Dana PAD	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	1.225.000,00
B	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**		7.202.300,00
1	Pengajuan SPM LS Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Per Tanggal 20 Desember 2023. Dengan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (PAD)	Rekening Penampungan Gaji	3.481.000,00
2	Pengajuan SPM LS Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Per 20 Desember 2023 Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (PAD)	Rekening Penampungan Gaji	3.721.300,00
C	**DINAS KESEHATAN**		2.000.000,00
1	Pembayaran LS Desember 2023, Honorarium Tim Perencana Kegiatan Pengecetan Kantor dinas kesehatan, Sesuai SK terlampir, dinkes Kab. Majene T.A 2023 Bersumber dana (DAU) kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.000.000,00
D	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**		1.100.400,00
1	Pembayaran LS TAGIHAN PAJAK KENDARAAN DINAS T.A 2023 Nota Tagihan Nomor : 190/2.11.01.2.09.02.0067/1.C/XII/2023, BAST Nomor : 191/2.11.01.2.09.02.0067/2.B/XII/2023 & BAP Nomor :193/2.11.01.2.09.02.0067/2.B/XII/2023 PAD	UPTBD SAMSAT MAJENE	1.100.400,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
E	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		12.518.900,00
1	Pembayaran LS Berupa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas PUPR Kab. Majene T.A.2023.(Sumber Dana PAD) Sesuai Surat Tugas Dan SPPD Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.925.000,00
2	Pembayaran LS Berupa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas PUPR Kab. Majene T.A.2023.(Sumber Dana PAD) Sesuai Surat Tugas Dan SPPD Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.835.000,00
3	Pengadaan Sumur Bor bagi masyarakat di Kecamatan Pamboang dan Sendana	CV. KARYA MANDIRI LESTARI	4.475.000,00
4	Pemb. Sarana Air Bersih Lingk. Copala Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU-KES)	TALAGA TUJUH STRUKTURINDO, CV	2.283.900,00
F	**DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA**		9.525.000,00
1	LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pembinaan Paskibraka Tingkat Kabupaten Majene T.A 2023 Berdasarkan Surat Tugas No. T.800.1.11.1/170/VIII/2023 Tanggal 15 Maret 2023. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.405.000,00
2	LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kekantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Barat Berdasarkan Surat Tugas No. T.800.I.II.I/185.a/X/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.000.000,00
3	Rehabilitasi Ruang Kelas TK PGRI kartini Kabiraan	CV. DUA PUTRA PERKASA	1.120.000,00
G	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**		4.496.000,00
1	SPM-LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sesuai Nomor surat Tugas 090/21/2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023. Sumber Dana PAD	REK.PENAMPUNGAN GAJI	4.496.000,00
H	**SEKRETARIAT DAERAH**		16.946.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Belanja Biaya bahan Bakar Pelumas Sekretariat Daerah Berupa Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Dinas sesuai No. B.600/2019/UMUM-SETDA/XII/2023 dan SPD No. 800/7596/LP-SPD/BKAD/2023	EKA PRAYITNO JKS (Manager Pertashop SPBU Majene) - SPBU RANGAS MAJENE	5.850.000,00
2	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Sekretariat Daerah Berupa Pemeliharaan Kendaraan Dinas sesuai No. B.003.3/2123/UMUM-SETDA/XII/2023	RUKMAN A. (BENGKEL MENARA TEHNIK)	1.300.000,00
3	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rumah Negara Golongan I Sekretariat Daerah Berupa Pemeliharaan Kendaraan Dinas sesuaiNo. B.600/1626/UMUM-SETDA/XII/2023 dan SPD No. 800/7593/LP-SPD/BKAD/2023.	H. M. DARWIS / TOKO PELITA	4.900.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah (Biaya BBM Bus Sekolah) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan. sesuai SPD No. 800/7378/LP-SPD/BKAD/2023.	EKA PRAYITNO JKS (Manager Pertashop SPBU Majene) - SPBU RANGAS MAJENE	4.896.000,00
II.3	**TAHUN 2024**		9.087.703.686,00
A	**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**		31.887.600,00
1	Bayar Biaya Belanja ATK Pada Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengemb. Bid. Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masy. SPD No: 800/4280/LP-SPD/BKAD/2024, Sumber Dana DAU PENDIDIKAN	LILIS AMBARWATI (KIOS UTAMI)	800.000,00
2	Bayar Biaya Belanja Makan Minum Pada Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengemb. Bid. Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masy. SPD No: 800/5036/LP-SPD/BKAD/2024, Sumber Dana DAU PENDIDIKAN	FARAMITHA R (USAHA CATERING BERKAH 4PUTRA)	767.000,00
3	Bayar Belanja Makan Minum Jamuan Tamu		1.500.000,00
4	Bayar Belanja Pemeliharaan Sarana prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2024		4.400.000,00
5	Bayar Belanja Makan Minum Rapat		1.540.000,00
6	Bayar Belanja Pemeliharaan Sarana prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2024		5.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
7	Bayar Biaya Belanja Makan Minum Rapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		500.000,00
8	Bayar Biaya Belanja Makan Minum Rapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		500.000,00
9	Bayar Biaya Belanja Makan Minum Rapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		500.000,00
10	Bayar Biaya Belanja Makan Minum Rapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		441.000,00
11	Bayar Belanja Tenaga Administrasi Bulan Desember	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.800.000,00
12	Bayar Belanja Tenaga Kebersihan Bulan Desember	REK. PENAMPUNGAN GAJI	350.000,00
13	Bayar Belanja Tenaga Kebersihan Bulan Desember	REK. PENAMPUNGAN GAJI	350.000,00
14	Bayar Belanja Tenaga Operator Sirup Bulan Desember	REK. PENAMPUNGAN GAJI	200.000,00
15	Bayar Belanja Tenaga Operator Komputer Bulan Desember	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.250.000,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.429.600,00
17	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.560.000,00
B	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		119.333.594,00
1	Pembayaran Langsung makan minum Kegiatan Rapat Kegiatan Tim Kewaspadaan dini Daerah Dengan No : 800/6158/LP-SPD/2024 Sumber Dana DAU UMUM	ANDRIANI HAMID Pimpinan Warung Priyangan	9.360.000,00
2	Pembayaran Langsung Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor Kegiatan Tim Kewaspadaan dini Masyarakat Dengan No : 800/6176/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana DAU UMUM	TASRIF Pimpinan Marasana	1.840.000,00
3	Pembayaran langsung Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan bermotor Penumpang Dengan No : 800/6914/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana DBH PUSAT	Bengkel Gean Motor / LIA KANIDI	11.650.000,00
4	Pemayarn Langsung Sewa Kendaraan kegiatan Paskibraka dengan No : 800/7337/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	ISWAHYUDI / WHY Rental Car	11.200.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
5	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam & Luar Daerah Kegiatan Pembinaan LanjutanKepada Purna Paskibraka dengan B.800.1.11.1/1436.a/IX/2024 No : B.800.1.11.1/1308.a/VIII/2024 Dengan No Persetujuan : 800/7339/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	Rek .Penampungan Gaji	15.339.989,00
6	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam & Luar Daerah Kegiatan Pembinaan LanjutanKepada Purna Paskibraka dengan B.800.1.11.1/1436.a/IX/2024 No : B.800.1.11.1/1308.a/VIII/2024 Dengan No Persetujuan : 800/7339/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	Rek .Penampungan Gaji	7.940.000,00
7	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam & Luar Daerah Kegiatan Pembinaan LanjutanKepada Purna Paskibraka dengan B.800.1.11.1/96.a/I/2024 No : B.800.1.11.1/31/XI/2024 Dengan No Persetujuan : 800/7338/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	Rek .Penampungan Gaji	30.251.000,00
8	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam & Luar Daerah Kegiatan Pembinaan LanjutanKepada Purna Paskibraka dengan B.800.1.11.1/96.a/I/2024 No : B.800.1.11.1/31/XI/2024 Dengan No Persetujuan : 800/7338/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	Rek .Penampungan Gaji	5.800.000,00
9	Pembayaran langsung Perjalanan Dinas Dalam Kota (SPPD) Kegiatan Desk Pilkada serentak Tahun 2024 Dengan No : 800/6157/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana DAU UMUM	Rek .Penampungan Gaji	14.295.000,00
10	Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas Dalam Kota (SPPD) Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan di Bid. Pendaftaran Ormas Dengan No : 800/5690/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana DAU UMUM	Rek .Penampungan Gaji	1.280.000,00
11	1.Melaksanakan Kunjungan Kerja dalam Rangka Sharing Session Model Implementasi Pengelolaan Partisipasi Interes 10% pada Biro Perekonomian Pemerintah Prov. Kalimantan Timur pada Tanggal 15 s.d 17 Desember 2024 di Samarinda Mendampingi PERUMDA Aneka Usaha Kab. Majene dalam rangka menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT.Dangsanak Banua Sebuku di Jakarta pada Tanggal 16 s.d 18 Desember 2024		10.377.605,00
C	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**		22.055.600,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Bayar Biaya perjalanan dinas luar daerah Ke Mamuju An untuk 5 orang pegawai surat tugas No: 800.1.11.1/345/XII/2024 tgl 2 desember 2024 spd No: 800/6934/LP-SPD/BKAD/2024 PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.467.300,00
2	Bayar Biaya perjalanan dinas luar daerah Ke Mamuju An untuk 6 orang pegawai surat tugas No: 800.1.11.1/354/XII/2024 tgl 2 desember spd No: 800/6936/LP-SPD/BKAD/2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.849.800,00
3	Bayar Biaya perjalanan dinas luar daerah Ke Mamuju An untuk 6 orang pegawai surat tugas No: 800.1.11.1/345/XII/2024 SPD No: 800/6935/LP-SPD/BKAD/2024 PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.738.500,00
D	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**		7.350.000,00
1	Sumber Dana (DAU Pendidikan) Pembayaran Atas Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional Kantor BPBD Kab. Majene Untuk Bulan Desember 2024, No SPD Persetujuan : 800/7137/LP-SPD/BKAD/2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.350.000,00
E	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**		126.844.000,00
1	Pembayaran Biaya Makanan & Minuman Untuk Bidang Pendapatan II Sesuai SPK No.058/SPK-PBB-P2/BAPENDA/XI/2024 & BAP No. 058.02/BAP/BAPENDA/XII/2024 Pada BapendaKab.Majene (Sumber Dana : PAD) Sesuai SPD No.800/7270/LP-SPD/2024	KAMISA BALI / RUMAH MAKAN PARAHYANGAN	4.336.000,00
2	Pembayaran Biaya Makanan & Minuman Untuk Bidang Pendapatan II Sesuai SPK No.057/SPK-PBB-P2/BAPENDA/X/2024 & BAP No. 057.02/BAP/BAPENDA/XII/2024 Pada BapendaKab.Majene (Sumber Dana : PAD) Sesuai SPD No.800/7271/LP-SPD/BKAD/2024	KAMISA BALI / RUMAH MAKAN PARAHYANGAN	2.315.000,00
3	Pembayaran Biaya Operasional Pajak PBB P2 Kab. Majene Sesuai SK Bupati No.100.3.3.2/795/X/2024 Tgl, 08 Oktober 2024 Untuk Operasional Pengelola PBB P2 T.H 2023 Pada Bapenda Kab.Majene T.A 2024. (Sumber Dana : PAD) SPD No. 800/7272/LP-SPD/BKAD/2024	ABD. HALIM, SE / BENDAHARA PENGELUARAN	120.193.000,00
F	**BADAN PERENCANAAN DAERAH**		212.324.150,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian berdasarkan SPD No.800/6690/LP-SPD/BKAD/2024 tgl 12 Desember 2024	CATERING ALIZA (NUR AMANAH)	6.000.000,00
2	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Lembur Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota ST:050.13/14/ST/2024 26 Juli 2024 SPD Nomor: 800/7352/LP-SPD/BKAD/2024 tgl 20 Desember 2024 (DBH PUSAT)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	24.646.000,00
3	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Kantor Bapeda SPD No.800/6836/LP-SPD/BKAD/2024 tgl 17 Desember 2024 (DBH PUSAT)	toko Inti Motor, Usaha Bintang Berkas, Faiz Motor, Agung Motor	4.750.000,00
4	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Bahan Cetak Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota SPD Nomor: 800/7344/LP-SPD/BKAD/2024 tgl 20 Desember 2024 (DBH PUSAT)	TOKO PRIMA UTAMA (REZKY UTAMY RAMLI)	7.244.600,00
5	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan pada Kantor Bapeda SPD No.800/7345/LP-SPD/BKAD/2024 tgl 20 Desember 2024 (DBH PUSAT)	Wahyu Motor	5.435.000,00
6	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Jasa Tenaga Administrasi kegiatan Musrenbang Kabupaten/Kota SPD Nomor: 800/7351/LP-SPD/BKAD/2024 tgl 20 Desember 2024 (DBH PROV)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	12.000.000,00
7	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Surat Tugas No: 050.13/21.A/2022 dan SPD Nomor: 800/7348/LP-SPD/BKAD/2024 tgl 20 Desember 2024 (DBH PUSAT)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.271.200,00
8	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur ST No: 050.13/41/2022 tgl 21 juni 2024 SPD No: 800/7346/LP-SPD/BKAD/2024 tgl 20 Desember 2024 (DBH PUSAT)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.029.200,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
9	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan ST:050.13/21.A/2022 tgl 19 Maret 2024 SPD No.800/7349/LP-SPD/BKAD/2024 tgl 20 Desember 2024(DBH PUSAT)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.271.200,00
10	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia ST: 050.13/34/2022 tgl 27 Mei 2024 SPD No: 800/7347/LP-SPD/BKAD/2024 tgl 20 Desember 2024(DBH PUSAT)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.271.200,00
11	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Surat Tugas No: 050.13/58/2022 tgl 13 Maret 2024 dan SPD Nomor: 800/7350/LP-SPD/BKAD/2024 tgl 20 Desember 2024 (DBH PUSAT)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	11.324.300,00
12	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Biasa kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai ST No.B.800.1.11.1/1089/VI/2024 SPD No.800/6834/LP-SPD/BKAD/2024 tgl 17 Desember 2024 (DBH PUSAT)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	19.416.500,00
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar daerah	REK. PENAMPUNGAN GAJI	114.264.950,00
14	Makan Minum Rapat FGD Penyusunan Rantek RPJMD Kab. Majene Tahun 2025-2029	Purnama Catering	1.400.000,00
G	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**		146.527.915,00
1	Perencanaan (Bahan Pakai Habis) Rehab./Pembangunan Cagar Budaya Makam Maradia Onang. SPK No. 02.c/SPK-PA/PPCB/Disbudpar/X/2024, Tgl. 21 Oktober 2024. SPD No. 800/6519/LP-SPD/BKAD/2024. DAU Pendidikan	TOKO MEKAR	10.250.000,00
2	Pengawasan (Bahan Pakai Habis) Rehab./Pembangunan Cagar Budaya Makam Maradia Onang. SPK No. 02.e/SPK-PA/PPCB/Disbudpar/X/2024, Tgl. 21 Oktober 2024. SPD No. 800/6517/LP-SPD/BKAD/2024. DAU Pendidikan	TOKO MEKAR	1.840.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
3	Biaya Pengelolaan (Belanja Bahan Pakai Habis) Penataan Taman Pinggir Pantai Dato. SPK No. 013.a/SPK-PA/PSDPEK/Disbudpar/XI/2024, Tgl. 4 November 2024. SPD No. 800/6953/LP-SPD/BKAD/2024. DAU Pendidikan	TOKO MEKAR	7.500.000,00
4	Biaya Pengelolaan (Belanja Bahan Pakai Habis) Rehab. Berat Tracking - Gazebo Pantai Dato. SPK No. 017.a/SPK-PA/PSDPEK/Disbudpar/XI/2024, Tgl. 4 November 2024. SPD No. 800/6950/LP-SPD/BKAD/2024. DAU Pendidikan	TOKO MEKAR	7.500.000,00
5	Biaya Pengelolaan (Belanja Bahan Pakai Habis) Rehabilitasi Berat Tangga Masuk Pantai Dato. SPK No. 011.a/SPK-PA/PSDPEK/Disbudpar/XI/2024, Tgl. 4 November 2024. SPD No. 800/6955/LP-SPD/BKAD/2024. DAU Pendidikan	TOKO MEKAR	7.500.000,00
6	Biaya Pengelolaan (Belanja Bahan Pakai Habis) Penataan Taman Ujung Tebing Pantai Dato. SPK No. 015.a/SPK-PA/PSDPEK/Disbudpar/XI/2024, Tgl. 4 November 2024. SPD No. 800/6952/LP-SPD/BKAD/2024. DAU Pendidikan	TOKO MEKAR	4.950.000,00
7	Pembayaran Honor Tim Pengelolaan Kegiatan Rehabilitasi Berat Tangga Masuk Pantai Dato. Sk No. 100.3.3.2/844/XI/TAHUN 2024, Tgl, 19 November 2024. SPD No. 800/6956/LP-SPD/BKAD/2024. DAU Pendidikan	Rekening Penampungan Gaji	12.500.000,00
8	Pembayaran Honor Tim Pengelolaan Kegiatan Penataan Taman Pinggir Pantai Dato. SK No. 100.3.3.2/845/XI/TAHUN 2024, Tgl. 19 November 2024. SPD No. 800/6954/LP-SPD/BKAD/2024. DAU Pendidikan	Rekening Penampungan Gaji	12.500.000,00
9	Pembayaran Honor Tim Pengelolaan Kegiatan Penataan Taman Ujung Tebing Pantai Dato. SK No. 100.3.3.2/846/XI/TAHUN 2024, Tgl. 19 November 2024. SPD No. 800/6957/LP-SPD/BKAD/2024. DAU Pendidikan	Rekening Penampungan Gaji	10.050.000,00
10	Pembayaran Honor Tim Pengelolaan Kegiatan Rehab. Berat Tracking - Gazebo Pantai Dato. SK No. 100.3.3.2/847/XI/TAHUN 2024, Tgl. 19 November 2024. SPD No. 800/6951/LP-SPD/BKAD/2024. DAU Pendidikan	Rekening Penampungan Gaji	12.500.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
11	Pembayaran 100% Swakelola Kegiatan Rehab. Berat Tracking - Gazebo Pantai Dato. SK No. 100.3.3.2/847/XI/Tahun 2024, Tgl. 19-11-2024. SPK No. 017/SPK-PA/PSDPEK/Disbudpar/XI/2024, Tgl. 15-11-2024. SPD. 800/7229/LP-SPD/BKAD/2024. DAU Pendidikan	BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	16.546.095,00
12	Pembayaran 100% Swakelola Kegiatan Penataan Taman Ujung Tebing Pantai Dato. SK No. 100.3.3.2/846/XI/Tahun 2024, Tgl. 19-11-2024. SPK No. 015/SPK-PA/PSDPEK/Disbudpar/XI/2024, Tgl. 15-11-2024. SPD. 800/7232/LP-SPD/BKAD/2024. DAU Pendidikan	BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	7.190.000,00
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Monitoring Evaluasi Destinasi, Surat Tugas : 800/1.11.1/44.a/X/2024 Tgl. 16 Oktober 2024. SPD No. 800/6958/LP-SPD/BKAD/2024. DAU Pendidikan	Rekening Penampungan Gaji	1.120.000,00
14	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	REK. PENAMPUNGAN GAJI	34.581.820,00
H	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**		746.857.900,00
1	Pembayaran LS Belanja Bahan-bahan/ Bibit Ternak/ Bibit Ikan, Nota Pesanan Nomor : 30/NPD/DKP/XII/2024 Tanggal 09 November 2024, BAST No : 905/570/BAST/XII/2024, Tgl 20 Desember 2024, SPD No: 800/7003/LP-SPD/BKAD/2024, SumberDanaDAU-PEND	NURNAS JAYA MANDIRI	12.200.000,00
2	Pembayaran LS Belanja Bibit Ikan Air Tawar dan Pakan , SPK Nomor : 25/SP/DKP/IX/2024 Tanggal 09 September 2024, BAST No : 905/558/BAST/XII/2024, Tgl 09 Desember 2024, SPD No: 800/6828/LP-SPD/BKAD/2024, SumberDanaDAU-PEND	CV. SIRANNUANG	199.999.900,00
3	Pembayaran LS Pengadaan UPI (Unit Pengolahan Ikan), SPK Nomor : 25/SPK/DKP-PENG/XI/2024 Tanggal 12 November 2024, BAST No : 905/564/BAST/XII/2024, Tgl 20 Desember 2024, SPD No: 800/7001/LP-SPD/BKAD/2024, SumberDanaDAU-PEND	CV. KARYA MANDIRI LESTARI	174.700.000,00
4	Pembayaran LS Pengadaan Prasarana Kelautan dan Perikanan, SPK Nomor : 27/SPK/DKP-PENG/XII/2024 Tanggal 06 November 2024, BAST No : 905/567/BAST/XII/2024, Tgl 20 Desember 2024, SPD No: 800/7002/LP-SPD/BKAD/2024, SumberDanaDAU-PEND	CV. KARYA SUBUR SEJAHTERA	173.800.000,00
5	Pembayaran LS Biaya Perjalanan Dinas Biasa pada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudigdaya Ikan Kecil, Sesuai Surat Tugas Nomor : B.800.I.II.III/225/XII/2024, Tgl 26 November 2024, SPD No: 800/6758/LP-SPD/BKAD/2024, SumberDana DAU-PEND	INDRAYANA MIYANTO, MUSTAKIM, RAMADHAN, AFRIATI	4.432.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
6	Pembayaran LS Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota - Aksi Intervensi Stunting Pada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, Sesuai Surat Tugas No : 000.1.2.3/123/VII/2024, Tgl 04 Juli 2024, SPD No: 800/6759/LP-SPD/BKAD/2024, SumberDana DAU-PEND	FURIYANTI HAMARONG, ABD. WAHAB, M. SIBLI, HARMIATY, MUH. YASRIB, RAHMAT YAMIN, SYARIFAH AINI, MUHYIDDIN, ROSDIANA, HUSNIAH, NURWAHIDAH, MUH. JENAR,KARMILA, BAIQ NUNUNG APRIANI, MUH. TAKWIN	4.800.000,00
7	Pembayaran LS Biaya Perjalanan Dinas Biasa-Aksi Interfensi Penanganan Inflasi, Surat Tugas No : B.800.I.II.III/236/XII/2024, Tgl10Desember2024 Dan No : B.I.III.I/1885.a/XII/2024, Tgl09Desember2024SPD No: 800/6757/LP-SPD/BKAD/2024, SumberDana DAU-PEND	Hj. ICHWANTI, HASLITA ARIEF SALEH, FACHRIADI J BACHTIAR, FURIYANTI HAMARONG, RAMLI, MUCHLIS AMIPUTRA, MUSTAKIM, MURSYIDAH, BAKRI P, RONI EKO SAPUTRA, MUH. IRFAN USA, MUH FAJAR SUSNUSI, MUHAMMAG GUSNADI, MUHAMMMAD BINTANG ANUGRAH	29.431.000,00
8	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Bulan Desember 2024)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.650.000,00
9	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Bulan Desember 2024)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	12.300.000,00
10	Belanja Perlengkapan Dinas (Baju Kaos) 39 pcs	SIPODALLE	3.900.000,00
11	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -bahan komputer	TOKO MIRA SENTOSA	1.104.000,00
12	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -bahan komputer	TOKO MIRA SENTOSA	1.610.000,00
13	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -alat tulis kantor	TOKO MIRA SENTOSA	2.748.000,00
14	Belanja makanan dan minuman rapat	KIOS VERA	2.285.000,00
15	Biaya Perjalanan Dinas	Hj.ICHWANTI, HASLITA ARIEF SALEH, FURIYANTI HAMARONG, MUH YASRIB, ABD. WAHAB, BAKRI, SYARIFAH AINI, HASRIANI HASANUDDIN, MURSYIDAH, MUHYIDDIN, MUH. JENAR,	119.898.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
		ROSDIANA, NURWAHIDA, HUSNIAH, MUH. TAKWIM	
I	**DINAS KESEHATAN**		368.314.000,00
1	Pembayaran LS Desember 2024, Jasa tenaga Administrasi digunakan untuk Insentif Kader Kegiatan Posyandu Kelurahan, Wilaya kerja PKM Lembang, sesuai SPD No.800/6122/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	24.200.000,00
2	Pembayaran LS Desember 2024, Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran, Bulan September s/d Nopember 2024 RS. Pratam Salutambung, sesuai SPD No.800/6664/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	APOTIK AN-NUR FARMA	10.812.000,00
3	Pembayaran LS Desember 2024, Konsumsi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh di Puskesmas, sesuai SPD No.800/6775/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	Catering Mabarakka	19.978.000,00
4	Pembayaran LS Desember 2024, Jasa tenaga Administrasi digunakan untuk Insentif Kader Kegiatan Posyandu Kelurahan, Wilaya kerja PKM Totoli Bulan Nopember 2024, SPD No.800/7079/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.150.000,00
5	Pembayaran LS Desember 2024, Biaya Pengiriman Spesimen Suspek Campak & AFP ke Surabaya bulan Oktober Program Surveilans, SPD No.800/7081/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAK) Non Fisik	RAHMAT	184.000,00
6	Pembayaran LS Desember 2024, Sewa Gedung Kegiatan Pertemuan Diseminasi / Publikasi data Stanting Lintas Program & Lintas Sektor, sesuai SPD No.800/6992/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	CAFE RESTRO PENGINAPAN ANDINI	3.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
7	Pembayaran LS Desember 2024, Belanja Makan Minum Kegiatan Pertemuan Diseminasi/Publikasi data Stunting kepada Lintas Program & Lintas Sektor, sesuai SPD No.800/6994/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	CAFE RESTRO PENGINAPAN ANDINI	14.400.000,00
8	Pembayaran LS Desember 2024, Belanja Sewa Gedung Pertemuan Kegiatan Koordinasi Penguatan Germas Tingkat kabupaten, sesuai SPD No.800/6915/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	Hotel DAVINA INN	3.000.000,00
9	Pembayaran LS Desember 2024, Honorarium Narasumber Kegiatan Pertemuan Koordinasi Penguatan Germas Tingkat kabupaten SK terlampir, sesuai SPD No.800/6778/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.200.000,00
10	Pembayaran LS Desember 2024, Biaya Makan Minum Kegiatan manajemen data Rapat Koordinasi Tenaga Gizi, TPK dalam Survailans, Upaya Percepatan Penurunan Stanting, SPD No.800/7008/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAU) Kesehatan	KIOS SIBLI	2.880.000,00
11	Pembayaran LS Desember 2024, Honorarium Narasumber Kegiatan Pertemuan Diseminasi/Publikasi data Stanting Pada Lintas Program & Lintas Sektor, sesuai SPD No.800/7070/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	8.000.000,00
12	Pembayaran LS Desember 2024, Cetak Baliho Kegiatan Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor, Meningkatkan Capaian Pelayanan Usia Lanjut, bidang Kesmas Sesuai SPD No.800/6983/LP-SPD/BKAD/2024, Dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	Percetakan AL Design Grafis	800.000,00
13	Pembayaran LS Desember 2024, Belanja Konsumsi Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Gizi Masyarakat di Wilayah Kerja PKM, sesuai SPD No.800/6779/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	Warung Aliyah	25.635.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
14	Pembayaran LS Desember 2024, Belanja Baliho Kegiatan Pertemuan Diseminasi/Publikasi data Stanting Lintas Program Sektor, Sesuai SPD No.800/6993/LP-SPD/BKAD/2024, Dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	SIOLA PRINT	320.000,00
15	Pembayaran LS Desember 2024, Jasa tenaga Administrasi digunakan untuk Insentif Kader Kegiatan Posyandu Kelurahan, Wilaya kerja PKM Lembang Bulan Nopember 2024, SPD No.800/7078/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.050.000,00
16	Pembayaran LS Desember 2024, Jasa tenaga Administrasi digunakan untuk Insentif Kader Kegiatan Posyandu Kelurahan, Wilaya kerja PKM Banggae II Bulan Nopember 2024, SPD No.800/7082/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.550.000,00
17	Pembayaran LS Desember 2024, Jasa tenaga Administrasi digunakan untuk Insentif Kader Kegiatan Posyandu Kelurahan, Wilaya kerja PKM Banggae I Bulan Nopember 2024, SPD No.800/7084/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.250.000,00
18	Pembayaran LS Desember 2024, Jasa tenaga Administrasi digunakan untuk Insentif Kader Kegiatan Posyandu Kelurahan, Wilaya kerja PKM Malunda Bulan Nopember 2024, SPD No.800/7085/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.900.000,00
19	Pembayaran LS Desember 2024, Jasa tenaga Administrasi digunakan untuk Insentif Kader Kegiatan Posyandu Kelurahan, Wilaya kerja PKM Sendana I Bulan Nopember 2024, SPD No.800/7076/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.000.000,00
20	Pembayaran LS Desember 2024, Jasa tenaga Administrasi digunakan untuk Insentif Kader Kegiatan Posyandu Kelurahan, Wilaya kerja PKM Pamboang Bulan Nopember 2024, SPD No.800/7077/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.100.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
21	Pembayaran LS Desember 2024, 100% Jasa Pendamping Fasilitator Non ASN, kegiatan DAK Fisik Swakelola, SK terlampir, SPD No.800/7130/LP-SPD/BKAD/2024,Dinkes Kab. Majene TA 2024, (DAK) Fisik	EDY SUSANTO	2.000.000,00
22	Pembayaran LS Desember 2024, Belanja Tagihan Listrik PSC 119 Kab. Majene Untuk Bulan desember 2024, SPD No.800/7177/LP-SPD/BKAD/2024, Dinkes Kab. Majene TA 2024, (DAU) Kesehatan	Owner Toko Ahnaf	3.912.000,00
23	Pembayaran LS Desember 2024, Honorarium Narasumber Pertemuan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar, SPD No.800/7188/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.600.000,00
24	Pembayaran LS Desember 2024, Sewa Gedung Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan PKM, SPD No.800/7150/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAU) Kesehatan	Hotel DAVINA INN	15.000.000,00
25	Pembayaran LS Desember 2024, Uang Harian Pertemuan Koordinasi Lintas sektor terkait dalam Meningkatkan Capaian Pelayanan Usia Lanjut, sesuai SPD No.800/6990/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	PPTK BIDANG KESMAS	19.200.000,00
26	Pembayaran LS Desember 2024, Pembayaran Uang harian & Transportasi ke IFP Propinsi Sulbar dalam Rangka Pengambilan Obat & BMHP PKD, SPD No.800/6984/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	13.530.000,00
27	Pembayaran LS Desember 2024, Perjadin dalam Kota Kegiatan Verifikasi sinyal Penyakit Berpotensi Kib/Wabah/Keracunan Pangan Lingkungan & Penyakit Infeksi Emerging, SPD No.800/7075/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAK) Non Fisik	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.490.000,00
28	Pembayaran LS Desember 2024, Perjadin dalam Kota Kegiatan (PE) Penyakit Berpotensi Kib/Wabah/Keracunan Pangan, Media Lingkungan & penyakit Infeksi Emerging, SPD No.800/7074/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAK) Non Fisik	REK. PENAMPUNGAN GAJI	18.882.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
29	Pembayaran LS Desember 2024, Perjadin dalam Kota Kegiatan Penyemprotan Fogging & Pelaksana Penyelidikan Epidemologi kasus DBD bulan September-Desember 2024, SPD No.800/7080/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	56.630.000,00
30	Pembayaran LS Desember 2024, Biaya Transport Peserta Kegiatan Pertemuan Desiminasi/Publikasi data Stanting, sesuai SPD No.800/7011/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	PPTK BIDANG KESMAS	15.000.000,00
31	Pembayaran LS Desember 2024, Uang Harian Perjalanan dinas Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Tenaga Gizi TPK Surfeilans Gizi percepatan penurunan Stanting, SPD No.800/7009/LP-SPD/BKAD/2024, Dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	PPTK BIDANG KESMAS	1.600.000,00
32	Pembayaran LS Desember 2024, Perjalana dinas Dalam Rangka Koordinasi Kegiatan Kaji Tiru Penerapan ILP di PKM Maros, sesuai SPD No.800/6995/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.186.000,00
33	Pembayaran LS Desember 2024, Perjadin (Uang Harian) Kegiatan Pemantauan Minum TTD bagi rematri oleh kader editing crew, Upaya Percepatan Penurunan Stanting, SPD No.800/7006/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.880.000,00
34	Pembayaran LS Desember 2024, Perjadin Wilayah Kerja PKM Kegiatan Pemantauan KAP Konsumsi TTD bagi Ibu Hamil Upaya Percepatan Penurunan Stanting, SPD No.800/7007/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	14.080.000,00
35	Pembayaran LS Desember 2024, Uang Harian Perjadin Peserta Kegiatan KAP Pemantauan Pertumbuhan & Perkembangan Balita Upaya Percepatan Penurunan Stanting, SPD No.800/7010/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAU) Kesehatan	PPTK BIDANG KESMAS	26.400.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
36	Pembayaran LS Desember 2024, Perjadin ke Wilayah Kerka PKM dalam rangka Kegiatan Kawal Tumbuh Kembang Siwaliparri, sesuai SPD No.800/7005/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.520.000,00
37	Pembayaran LS Desember 2024, Belanja Bakar & Pelumas dalam Rangka Penyediaan BBM PSC 119 majene Bulan Desember, SPD No.800/7067/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	SPBU 74.194.57 Majene	5.995.000,00
J	**DINAS KETAHANAN PANGAN**		6.429.600,00
1	Melakukan Pertemuan Evaluasi Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam di Jawa Timur selama 5 Hari tanggal 8 s/d 12 Oktober Tahun 2024	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	2.450.000,00
2	Mengantar dan menjemput Kepala Dinas ke Makassar melakukan peretemuan Evaluasi Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur ayam di Jawa Timur Tahun 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.079.600,00
3	Biaya Jasa Operator Aplikasi Keuangan/Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Desember 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.500.000,00
4	Biaya Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Desember 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	350.000,00
5	Biaya Jasa Kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Desember 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	350.000,00
6	Biaya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnis Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Desember 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	700.000,00
K	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN**		87.183.300,00
1	Pembayaran LS Belanja ATK - Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Kab. Majene TA. 2024, SPD No: 800/5697/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	TOKO MIRA SENTOSA / RAHMAWATI SYAMSIDAR EKA PUTRI	2.500.000,00
2	Pembayaran LS Belanja ATK - Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover pada Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Kab. Majene TA. 2024, SPD No: 800/5694/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	TOKO MIRA SENTOSA / RAHMAWATI SYAMSIDAR EKA PUTRI	2.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
3	Pembayaran LS Belanja ATK - Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover pada Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Kab. Majene TA. 2024, SPD No: 800/5694/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	TOKO MIRA SENTOSA / RAHMAWATI SYAMSIDAR EKA PUTRI	1.000.000,00
4	Pembayaran LS Belanja ATK - Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kab. Majene TA. 2024, SPD No: 800/5700/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	TOKO MIRA SENTOSA / RAHMAWATI SYAMSIDAR EKA PUTRI	2.500.000,00
5	Pembayaran LS Belanja ATK - Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kab. Majene TA. 2024, SPD No: 800/5700/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	TOKO MIRA SENTOSA / RAHMAWATI SYAMSIDAR EKA PUTRI	2.480.000,00
6	Pembayaran LS Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Kab. Majene TA. 2024, SPD No: 800/5693/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	TOKO MIRA SENTOSA / RAHMAWATI SYAMSIDAR EKA PUTRI	1.000.000,00
7	Pembayaran LS Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Kab. Majene TA. 2024, SPD No: 800/5693/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	TOKO MIRA SENTOSA / RAHMAWATI SYAMSIDAR EKA PUTRI	1.084.000,00
8	Pembayaran LS Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Kab. Majene TA. 2024, SPD No: 800/5693/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	TOKO MIRA SENTOSA / RAHMAWATI SYAMSIDAR EKA PUTRI	1.000.000,00
9	Pembayaran LS Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Kab. Majene TA. 2024, SPD No: 800/5693/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	TOKO MIRA SENTOSA / RAHMAWATI SYAMSIDAR EKA PUTRI	2.000.000,00
10	Pengajuan LS Pembayaran Pekerjaan Layanan Iklan dan Publikasi Media Kab.Majene T.A 2024, SPK No: B.100.3.7/11/XI/2024, BAST No:B.000.3.3/997.a/XII/2024, BAP No:B.900.1.1/1052/XII/2024 Tahun Anggaran 2024. SPD No:800/7330/LP-SPD/BKAD/2024, Sumber Dana PAD	UJUNGPANDANG EKSPRES BIRO MAJENE	8.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
11	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pada Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dinas Kominfo TA. 2024 No SPD: 800/7355/LP-SPD/BKAD/2024, Sumber Dana PAD	1. SELFIAH	4.350.000,00
12	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral Kab. Majene TA. 2024, SPD No: 800/5698/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	1. MOHD. ANDRI A. NUGRAHA, S.STP.,M.SI	5.000.000,00
13	Pengajuan SPM LS Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, pembawa Acara, dan Panitia Kab.Majene TA 2024 Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Sumber Dana PAD	TIRTAKUSUMA WIJAYA WIHARJO	9.900.000,00
14	Pengajuan SPM LS Belanja Jasa tenaga Informasi dan Teknologi. sumber Dana PAD	1. MUHAMMAD SAUDI, S.KOM 2. IRMAWATI,ST	10.000.000,00
15	Pengajuan SPM LS Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Pada Keg. Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN untuk Triwulan IV (Bulan Desember 2024) sesuai SK Bupati No: 100.3.3.2/630/VII/TAHUN 2024 Tanggal 11 Juli 2024.Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene TA 2024.		7.200.000,00
16	Pengajuan SPM LS Honorarium Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik untuk Triwulan IV (Bulan Desember 2024) sesuai SK Bupati No: 100.3.3.2/12/III/2024 Tanggal 13 Maret 2024.Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene TA 2024.		1.600.000,00
17	Pengajuan SPM LS Honorarium Jasa Tenaga Operasional Komputer (SIPD) Pada Keg. Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN untuk Triwulan IV (Bulan Desember 2024) sesuai SK Bupati No: 100.3.3.2/207/II/TAHUN 2024 Tanggal 21 Februari 2024.Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene TA 2024.		2.250.000,00
18	Pengajuan SPM LS Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk Triwulan IV Bulan Desember sesuai SK Bupati No: 100.3.3.2/652/VII/TAHUN 2024 pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.		1.500.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
19	Belanja Makan Minum Rapat	CATERING ALIZA (NUR AMANAH, SH)	9.381.600,00
20	Pembayaran sppd Luar Daerah	1. HADI FAUZI DHARNADI, S.Tr.IP	12.437.700,00
L	**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN**		93.421.140,00
1	LS 100% BelanjaATK,KertasCover,Bahan&PemeliharaanKomputer&Printer, sesuai dgn DPPA No.DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2024 Tgl.31/10/2024 BAP No.900/452.c/BAP/2024 Tgl.11/12/2024 SPD No.800/7250/LP-SPD/BKAD/2024 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber PAD	SAHABAT ATK	1.583.300,00
2	LS 100% BelanjaATK,KertasCover,Bahan&PemeliharaanKomputer&Printer, sesuai dgn DPPA No.DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2024 Tgl.31/10/2024 BAP No.900/452.c/BAP/2024 Tgl.11/12/2024 SPD No.800/7250/LP-SPD/BKAD/2024 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber PAD	SAHABAT ATK	1.475.000,00
3	LS 100% BelanjaATK,KertasCover,Bahan&PemeliharaanKomputer&Printer, sesuai dgn DPPA No.DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2024 Tgl.31/10/2024 BAP No.900/452.c/BAP/2024 Tgl.11/12/2024 SPD No.800/7250/LP-SPD/BKAD/2024 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber PAD	SAHABAT ATK	980.000,00
4	LS 100% Belanja Tagihan STNK Kendaraan Dinas Jabatan,sesuai dgn DPPA No.DPPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2024 Tgl.31/10/2024 BAP No.900/472.c/BAP/2024 Tgl.18/12/2024 SPD No.800/7055/LP-SPD/BKAD/2024 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber Dana PAD.	Koperasi Wahana (MASITA)	1.537.000,00
5	LS 100% Belanja Tagihan STNK Kendaraan Dinas Operasional, sesuai dgn DPPA No.DPPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2024 Tgl.31/10/2024 BAP No.900/473.c/BAP/2024 Tgl.18/12/2024 SPD No.800/7136/LP-SPD/BKAD/2024 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber Dana PAD.	Koperasi Wahana (MASITA)	4.753.340,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
6	LS 100% Belanja Makan Minum Rapat, sesuai dgn DPPA No.DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2024 Tgl.31/10/2024 BAP No.900/458.c/BAP/2024 Tgl.13/12/2024 SPD No.800/7251/LP-SPD/BKAD/2024 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber PAD.	Koperasi Wahana (MASITA)	3.765.000,00
7	LS 100% Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, sesuai dgn DPPA No.DPPA/A.2/2.17.3.30.31.17.0000/001/2024 Tgl.31/10/2024 BAP No.900/460.c/BAP/2024 Tgl.13/12/2024 SPD No.800/7134/LP-SPD/2024 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber DBH Pusat.	Bengkel Menara Teknik (RUKMAN A)	9.500.000,00
8	LS 100% Belanja BBM Kendaraan Dinas Jabatan, sesuai dgn DPPA No.DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2024 Tgl.31/10/2024 BAP No.900/469.c/BAP/2024 Tgl.18/12/2024 SPD No.800/7252/LP-SPD/BKAD/2024 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber Dana DBH Pusat.	SPBU Rangas Majene (EKA PRAYITNO)	4.400.000,00
9	LS 100% Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional, sesuai dgn DPPA No.DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2024 Tgl.31/10/2024 BAP No.900/471.c/BAP/2024 Tgl.18/12/2024 SPD No.800/7255/LP-SPD/BKAD/2024 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber Dana DBH Pusat	SPBU Rangas Majene (EKA PRAYITNO)	2.754.000,00
10	LS 100% Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional, sesuai dgn DPPA No.DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2024 Tgl.31/10/2024 BAP No.900/471.c/BAP/2024 Tgl.18/12/2024 SPD No.800/7255/LP-SPD/BKAD/2024 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber Dana DBH Pusat	SPBU Rangas Majene (EKA PRAYITNO)	5.850.000,00
11	LS 100% BelanjaATK,KertasCover,Bahan&PemeliharaanKomputer&Printer, sesuai dgn DPPA No.DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2024 Tgl.31/10/2024 BAP No.900/452.c/BAP/2024 Tgl.11/12/2024 SPD No.800/7250/LP-SPD/BKAD/2024 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber PAD	SAHABAT ATK	190.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
12	LS 100% BelanjaATK,KertasCover,Bahan&PemeliharaanKomputer&Printer, sesuai dgn DPPA No.DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2024 Tgl.31/10/2024 BAP No.900/452.c/BAP/2024 Tgl.11/12/2024 SPD No.800/7250/LP-SPD/BKAD/2024 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber PAD	SAHABAT ATK	2.070.000,00
13	LS 100% Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, sesuai dgn DPPA No.DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2024 Tgl.13/10/2024 BAP No.900/459.c/BAP/2024 Tgl.13/12/2024 SPD No.800/7254/LP-SPD/BKAD/2024 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber DBH Pusat	Bengkel Menara Teknik (RUKMAN A)	10.220.000,00
14	LS 100% Perjandis Dalam Daerah Ke Kecamatan Banggae, sesuai dgn Surat Tugas No. 090/510/002/SPT/2024 Tgl.28/10/2024, BAP No.510/497.c/BAP/2024 Tgl.27/11/2024, SPD No.800/7253/LP-SPD/BKAD/2024 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber DBH Prov.	Rek. Penampungan Gaji	1.600.000,00
15	LS 100% Perjandis Luar Daerah, sesuai dgn DPPA No.DPPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2024 Tgl.31/10/2024 BAP No.900/450.c/BAP/2024 Tgl.11/12/2024 SPD No.800/7135/LP-SPD/BKAD/2024 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber Dana PAD.	Rek. Penampungan Gaji	14.593.500,00
16	LS 100% Gaji/Honorer Bulan Desember 2024, sesuai dengan SK Bupati 100.3.3.2/145/II/2024, Tgl. 13 Februari 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	28.150.000,00
M	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**		172.128.400,00
1	Pembayaran LS KLHS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KE 2 Nota Pesanan No.0073/2.11.03.2.01.0001.0052/1.C/XI/2024 & BAP No.0096/2.11.03.2.01.0001.0052/2.B/XII/2024 No. SPD : 800/6390/LP-SPD/BKAD/2024.DAU	CATERING ALIZA (NUR AMANAH, SH)	11.238.000,00
2	Pembayaran LS KLHS BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR KE 2 Nota Pesanan No.0072/2.11.03.2.01.0001.0024/1.C/XI/2024 & BAP No.0090/2.11.03.2.01.0001.0024/2.B/XII/2024 SPD : 800/6392/LP-SPD/BKAD/2024.DAU	PERCETAKAN MARASANA DIGITAL PRINTING (TASRIF)	1.260.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
3	LS KLHS BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- BAHAN CETAK T.A 2024, Nota Pesanan No.0073.a/2.11.03.2.01.0001.0026/1.C/XI/2024, BAP No.0093/2.11.03.2.01.0001.0026/2.B/XII/2024 No. SPD : 800/6385/LP-SPD/BKAD/2024.DAU	PERCETAKAN KITA (MUHRAM RAHMAN)	1.114.000,00
4	LS BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR BERODA TIGA Nota Pesanan No.0099/2.11.11.2.01.0012.0039/1.C/XII/2024 BAP No.0109/2.11.11.2.01.0012.0039/2.B/XII/2024 SPD No.800/7068/LP-SPD/BKAD/2024 PAD	MENARA TEHNIK (RUKMAN A)	2.000.000,00
5	LS KE 2 Biaya Penginapan, uang Harian dan Akomodasi KLHS Sesuai SK : 100.3.3.2/629/VII/Tahun 2024 pada DLHK Kabupaten Majene. No.SPD : 800/6393/LP-SPD/BKAD/2024 DAU	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.084.000,00
6	LS Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator SIPD (operator Pertanggungjawaban dan perencanaan) bulan 12 sesuai SK No. 100.3.3.2/377/III/Tahun 2024 pada Dinas DLHK Kab. Majene.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.500.000,00
7	LS Honorarium Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pengolahan Persampahan, Administrasi Perkantoran dan Administrasi Retribusi Persampahan bulan 12 sesuai SK No. 100.3.3.2/362/III/Tahun 2024 pada Dinas DLHK Kab. Majene.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.650.000,00
8	LS Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, penyapu pasar TPI dan Camba, Sopir Dump Truck dan Buruh sampah bulan 12 sesuai SK No. 100.3.3.2/397/III/Tahun 2024 pada Dinas DLHK Kab. Majene.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.700.000,00
9	LS Honorarium Belanja Jasa Tenaga laboratorium bulan 12 sesuai SK No. 100.3.3.2/362/III/Tahun 2024 pada Dinas DLHK Kab. Majene.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.800.000,00
10	LS Honorarium Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air, petugas sungai bulan 12 sesuai SK No. 100.3.3.2/362/III/Tahun 2024 pada Dinas DLHK Kab. Majene.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.400.000,00
11	LS Honorarium Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Pengaman Kantor, Penjaga TPA Moloku bulan 12 sesuai SK No. 100.3.3.2/362/III/Tahun 2024 pada Dinas DLHK Kab. Majene.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.050.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
12	LS Honorarium Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota, Pasar Sentral, Pembersih Kantor dan Pembersih Taman Kota bulan 12 sesuai SK No. 100.3.3.2/362/III/Tahun 2024 pada Dinas DLHK Kab. Majene.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	40.050.000,00
13	LS Honorarium Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Pendukung Kebersihan Pasar Sentral bulan 12 sesuai SK No. 100.3.3.2/376/III/Tahun 2024 pada Dinas DLHK Kab. Majene.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.500.000,00
14	LS Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Operator Keuangan (KAS) bulan 12 sesuai SK No. 100.3.3.2/362/III/Tahun 2024 pada Dinas DLHK Kab. Majene.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	750.000,00
15	LS Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Operator Keuangan (KAS) bulan 12 sesuai SK No. 100.3.3.2/362/III/Tahun 2024 pada Dinas DLHK Kab. Majene.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	17.500.000,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	H.Inindria,SE,M.Si, Suryani Syam,ST,MT, Jusniati,SP, Hj.Naila,SP, Nurhamuddin, Hafid	10.578.400,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	H.Inindria,SE,M.Si, Suryani Syam,ST,MT, Jusniati,SP, Hj.Naila,SP, Nurhamuddin, Hafid	3.190.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan Kantor	Toko Wahyu Motor	43.764.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan Kantor	Toko Wahyu Motor	9.000.000,00
N	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		985.432.658,00
1	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pantai Berupa (ATK) Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana PAD) SPD No.800/5281/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.22/10/2024.(Nota Terlampir)	MUHAMMAD SYUKRI (TOKO AMANAH)	6.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
2	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Majene Berupa Honor SK No.100.3.3.2/509/V/2024 Tgl.28/5/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAU PU) SPD No.800/5449/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.29/10/2024.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	18.950.000,00
3	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Majene Berupa Honor SK No.100.3.3.2/508/V/2024 Tgl.28/5/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAU PU) SPD No.800/5229/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.21/10/2024.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	40.000.000,00
4	Pembayaran MC 01 100% Pekerjaan Biaya Pengawasan Keg. Pembangunan Sumur Bor di Kecamatan Banggae & Banggae Timur Kontrak No.03.03/SPK/AIR-DPUPR/XI/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana PAD) SPD No.800/6843/LP-SPD/BKAD/2024.	GEMA TEKNIK KONSULTAN, PT	2.950.380,00
5	Pembayaran LS Belanja Barang Jasa Berupa Pemeliharaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(PAD) SPD No.800/7099/LP-SPD/BKAD/2024 tgl 20/12/2024. (Terlampir)	ACHMAD MAHMUD (TOKO WAHYU MOTOR)	6.300.000,00
6	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Pangali-Ali) Berupa Makan & Minum Rapat Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana PAD) SPD No.800/6509/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.12/12/2024. TERLAMPIR	MURTAFIAH (ABYAN CATERING)	4.000.000,00
7	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Survey LHR Jalan DAK TA. 2025) Berupa Honor,SPPD,ATK & Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAU PU) SPD No.800/7023/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	14.600.000,00
8	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Survey Kondisi Jalan Kab. Majene) Berupa SPPD,Honor,Penggandaan & ATK Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAU PU) SPD No.800/7021/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	50.690.000,00
9	Pembayaran Retensi 5% Pek. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan-Percepatan Penurunan Stunting Desa Tammerodo Kec. Tammerodo Kontrak No.05.02/KONT.DAK-AM/CK-DPUPR/VI/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(DAK AIR MINUM) SPD No.800/7141/LP-SPD/BKAD/2024.	MAJAPAHIT, CV	34.096.750,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
10	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Survey Kondisi Jembatan Kab. Majene) Berupa ATK & Honor Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAU PU) SPD No.800/7044/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024. TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.985.000,00
11	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Majene) Berupa ATK Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024. (Dana DAU PU) SPD No.800/7046/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	MUHAMMAD SYUKRI (TOKO AMANAH)	1.000.000,00
12	Pembayaran LS Perjalanan dinas ke/ dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan pengendalian dan pengawasan (Penugasan) - Tematik Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAK) SPD No.800/7042/LP-SPD/BKAD/2024 Bidang Cipta Karya. (Terlampir)	MUHAMMAD MUFLI, ST. MT	2.400.000,00
13	Pembayaran LS Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana PAD) SPD No.800/7267/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl. 20/12/2024. (Nota Terlampir)	MULYATI (BUDITA CAKE & BAKERY)	2.200.000,00
14	Pembayaran LS Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota SK No.100.3.3.2/125/II/2024 Dinas PUPR kab. Majene TA.2024.(PAD) SPD No.800/7266/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	10.800.000,00
15	Pembayaran MC02 95% Pek. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan-Percepatan Penurunan Stunting Desa Tammerodo Kec. Tammerodo Kontrak No.05.02/KONT.DAK-AM/CK-DPUPR/VI/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(DAK AIR MINUM) SPD No.800/7142/LP-SPD/BKAD/2024.	MAJAPAHIT, CV	167.074.076,00
16	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana PAD) SPD No.800/7264/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.Surat Tugas & SPPD Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.440.000,00
17	Biaya Pengelolaan Kegiatan Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Honor+atk)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	10.117.600,00
18	Biaya Pengelolaan Kegiatan Operasional Pemeliharaan Sungai (Honor+SPPD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	16.598.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
19	Biaya Pengelolaan Kegiatan Operasional Pemeliharaan Pantai (Honor)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.600.000,00
20	Honor Penjaga Pintu Air Irigasi PPA Bulan Agustus-Desember 2024 Keg. Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan SK No. 100.3.3.2/411/IV/2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	29.750.000,00
21	Biaya Beban Kerja Operator Aplikasi untuk Bulan Desember 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.750.000,00
22	Biaya Pengeloaan (Perencanaan Pemetaan Irigasi Kec. Malunda)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	4.000.000,00
23	Biaya Pengeloaan (Penyusunan Data E-Paksi Jaringan Irigasi 2024)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	4.000.000,00
24	Biaya Pengeloaan (Penyusunan Data Teknis Sungai Kec. Tubo)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	4.000.000,00
25	Biaya Pengeloaan (Penyusunan Data Teknis Daerah Areal Rawan Longsor Kec. Malunda)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	4.000.000,00
26	Biaya Pengeloaan (Penyusunan Data Teknis Daerah Areal Rawan Longsor Kec. Tubo)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	4.000.000,00
27	Biaya Pengeloaan (Penyusunan Data Teknis Tanggul Pangali-Ali)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	4.000.000,00
28	Biaya Pengeloaan (Penyusunan Data Teknis Tanggul Kec. Sendana)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	4.000.000,00
29	Biaya Pengeloaan (Penyusunan Data Teknis Tanggul Kec. Malunda)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	4.000.000,00
30	Biaya Pengeloaan (Penyusunan Dok. Lingkungan Hidup Daerah Irigasi Kab. Majene)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	4.000.000,00
31	Biaya Pengeloaan (Penyusunan Dok. Ren. Strategis Pengelolaan SDA Kab. Majene)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	4.000.000,00
32	Biaya Pengeloaan (Penyusunan Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2025)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	4.000.000,00
33	Biaya Pengeloaan (Penyusunan Perencanaan Peningkatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2025)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	4.000.000,00
34	Biaya Pengeloaan (Peny. Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi Kab. Majene	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	4.000.000,00
35	Biaya Pengeloaan (Perencanaan Pemetaan Irigasi Kec. Sendana)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	4.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
36	Biaya Pengeloaan (Pemb. Sumur Bor di Kec. Banggae dan Banggae Timur)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	4.000.000,00
37	Biaya Pengawasan (Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Baurung)	CV. MAKKULAU ENGINEERING	5.900.000,00
38	Biaya Perencanaan (Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Baurung)	CV. AFINRA KONSULINDO	5.887.662,00
39	Pembayaran Retensi Pemeliharaan (5%) Pek. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Pangali-Ali	CV. MAKKASAU	8.970.035,00
40	Biaya Pengawasan (Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Pangali-Ali)	CV. MAKKULAU ENGINEERING	5.938.500,00
41	Biaya Perencanaan Pemb. SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Pangali Ali	CV. PARADUTA PRATAMA	5.905.200,00
42	Biaya Pengelolaan (Normalisasi Drainase Kel. Lalampanua)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	8.606.000,00
43	DED Perenc. Pem. Main Entrance Kawasan Mesjid Terapung Tangnga Tangnga	Dinas PUPR Kab. Majene	90.000.000,00
44	Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan Lingkungan Rencana Pem. Mesjid Terapung Tangnga Tangnga	Dinas PUPR Kab. Majene	60.000.000,00
45	Pembayaran MC 01 (95%) Pek. Pembangunan Rumah Tahfidz	CV. INDONESIA INDAH	89.775.000,00
46	Pembayaran Retensi Pemeliharaan (5%) Pek. Pembangunan Rumah Tahfidz	CV. INDONESIA INDAH	9.975.000,00
47	Biaya Pengawasan (Pembangunan Rumah Tahfidz)	CV. HANUHAZA MULTI ARTISTIK	8.858.355,00
48	Biaya Pengawasan (Lapangan Tennis Kejari)	CV. HANUHAZA MULTI ARTISTIK	5.827.500,00
49	Biaya Pengawasan (Rehabilitasi Rumah Dinas Perwira POLRES Majene) (PAD)	CV. ARYA BAKTI KONSULTAN	38.500.000,00
50	Biaya Pengawasan (Rehabilitasi Rumah Dinas Perwira POLRES Majene) (DAU PU)	CV. ARYA BAKTI KONSULTAN	14.763.000,00
51	Pembyr 100% Pek. Perencanaan Percepatan Wilayah Cepat Tumbuh Kab. Majene (Pendampingan)	PT. ANGKASA GLOBAL CONSULTANT	95.000.000,00
52	Pembayaran Retensi Pemeliharaan (5%) Pek. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Baurung	CV. REZKY NINI	8.950.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
53	Melakukan koordinasi terkait kegiatan Fisik Dinas PUPR Prov.Sulawesi Barat di Mamuju Tanggal 3-4 Juli 2024	Rekening Penampungan	7.387.200,00
54	Mengikuti koordinasi kegiatan pemerintah dan pembangunan di Mamuju tanggal 22 Agustus 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.502.400,00
55	Mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektor Mengenai keberlanjutan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat di Grand Maleo Hotel and Convention Mamuju, tanggal 18-19 April 2024	Rekening Penampungan	3.716.200,00
56	Biaya Perjalanan Dinas ke Mamuju Selama 2 Hari	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.975.200,00
57	Melakukan Koordinasi terkait kegiatan Fisik Bidang Pengairan di Dinas PUPR Prov. Sulbar Mamuju Tanggal 5 Juni 2024	Rekening Penampungan	3.693.600,00
O	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		8.110.000,00
1	Bj. Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Penumpang (suku cadang) Kendaraan Dinas 24 B Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Kantor Dinas PMD sesuai Nomor SPD 800/6897/LP-SPD/BKAD/2024 & Sumber Dana DBH PUSAT T.A 2024	RUKMAN A./BENGKEL MENARA TEHNIK	1.790.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Operasional Jasa Tenaga Pembersih untuk bulan Oktober s/d November Dinas PMD T.A 2024 Sumber Dana DAU & No SPD : 800/7115/LP-SPD/BKAD/2024	1. SAMSUL (700.000) 2. ALPIAN ANSAR (700.000)	1.400.000,00
3	Pembayaran Belanja alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Dinas PMD sesuai No SPD 800/7175/LP-SPD/BKAD/2024 dan sumber DANA PAD T.A 2024	RAHMAWATI SJAMSIDAR EKAPUTRI	300.000,00
4	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota Pada Kantor Dinas PMD TA.2024 dengan Nomor SPD 800/5471/LP-SPD/BKAD/2024, Sumber Dana PAD	ARMAN	980.000,00
5	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Daerah Dinas PMD Sesuai Nomor SPD : 800/7174/LP-SPD/BKAD/2024 dan Sumber Dana PAD T.A 2024	H. Sudirman, S.Pd., M.Si	3.640.000,00
P	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK**		49.904.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	BIAYA ORIENTASI PENINGKATAN KEPEMIMPINAN PKK DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA SEHAT SESUAI SPK NOMOR: 024/SPK/DPP&PA/SEK/XI/2024 DAN BAP NOMOR : 024/BAP/DPP&PA/SEK/XII/2024, SPD 800/6824/LP-SPD/BKAD/2024 SUMBER DANA PAD TA 2024.	SOLIDARITAS MEMBANGUN RAKYAT MAJENE	49.904.000,00
Q	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**		4.752.800,00
1	Pembayaran Langsung Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua Keg.Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sesuai SPD Nomor;800/5717/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana DBH Pusat	ACHMAD MAHMUD,SE / TOKO WAHU MOTOR	1.270.000,00
2	Biaya Perjadin ke Makassar Sulsel Menghadiri Kegiatan Rakor dan Evaluasi Pembangunan Kab. Majene , sesuai ST No. 800.1.11.1/106/2024 dan SPPD No. 000.1.2.3/278/ 2024 tanggal 1 Nopember 2024. Nomor SPD : 800/6894/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	Hj.Lies Hirawati	3.482.800,00
R	**DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA**		486.466.103,00
1	LS Pemb. Biaya Honor Narasumber,Moderator, Pembawa Acara & Panitia Keg.Analisis Capaian Standar Pelayanan Pendidikan Dasar(SPM) SMP T.A 2024,SK Bupati No.100.3.3.2/722/VIII/TAHUN 2024 Tgl 30 Agustus 2024 SPD 800/5933/LP-SPD/BKAD/2024 (SD : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	10.500.000,00
2	LS Pemb. Honorarium Narasumber Pembahas,Moderator,Pembawa Acara &Panitia Pada Keg.Asesmen SD (Sosialisasi Penulisan Ijazah) T.A 2024,SK Bupati No.100.3.3.2/382/III/TAHUN 2024 Tanggal 28 Maret 2024,SPD 800/5930/LP-SPD/BKAD/2024.(SD : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	24.900.000,00
3	LS Pemb. Honor Narasumber Pembahas,Moderator,Pembawa Acara &Panitia Keg.Asesmen SMP(Pelatihan Proktor dan Zoom Meeting)T.A 2024,SK Bupati No.100.3.3.2/382/III/TAHUN 2024 Tgl 28 Maret 2024,SPD 800/5936/LP-SPD/BKAD/2024.(SD : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	20.400.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
4	LS Pembayaran 5% Atas Keg. Pembangunan Ruang UKS TK Aisyiyah Amanah Lutang Berdasarkan SPK No. 24/SPK/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/IX/2024 Tanggal 17 September 2024, SPD 800/5795/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	BINTANG MAS, CV	2.525.103,00
5	LS Pembayaran 100% Keg. Orientasi Pengurus Kwartir Ranting, Berdasarkan SPKS No. 046/SPKS-PO/DISDIKPORA/XI/2024 Tanggal 25 Nopember 2024, SPD 800/6815/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	LEMBAGA PENINGKATAN SDMM MAJENE	50.000.000,00
6	LS Pembayaran 5% Pembangunan Ruang UKS KB SEJATI, Berdasarkan SPK No. 27/SPK/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/IX/2024 Tanggal 17 September 2024, SPD 800/6611/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	RIFQI, CV	2.522.500,00
7	LS Pembayaran 95%Pembangunan Pagar TK Nahdiyat Labuang, Berdasarkan SPK No. 34/SPK/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/XI/2024 Tanggal 6 Nopember 2024, SPD 800/6612/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	BUKIT JABAR, CV	37.810.000,00
8	LS Pembayaran 5%Pembangunan Pagar TK Nahdiyat Labuang, Berdasarkan SPK No. 34/SPK/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/XI/2024 Tanggal 6 Nopember 2024, SPD 800/6613/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	BUKIT JABAR, CV	1.990.000,00
9	LS Pembayaran 100% Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan(Pembangunan Ruang UKS KB SEJATI), SPK No. 31/SPK-PENUN/DAU/DISIDKPORA/PAUD-PNF/IX/2024 Tanggal 17 September 2024, SPD 800/6850/LP-SPD/BKAD/2024. (SD : DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	3.330.000,00
10	LS Pembayaran 5% Atas Pelaksanaan Pembangunan Pavin Blok di GOR Samaturu, Berdasarkan SP No. 014/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/X/2024 Tanggal 15 Oktober 2024, SPD 800/6394/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	MUBARAK, CV	6.905.000,00
11	LS Pembayaran Biaya Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover dalam Rangka Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga T.A 2024 Nota Pesanan Terlampir, SPD No. 800/6145/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	TOKO NUR ALIM	1.207.500,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
12	LS Pembayaran Biaya Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover dalam Rangka Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga T.A 2024 Nota Pesanan Terlampir, SPD No. 800/6145/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	TOKO NUR ALIM	502.500,00
13	LS Pembayaran Biaya Makan dan Minum dalam Rangka Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga T.A 2024 Nota Pesanan Terlampir, SPD No. 800/6144/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CATERING ALIZA	16.000.000,00
14	LS Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dam Panitia dalam Rangka Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga T.A 2024,SPD No. 800/6143/LP-SPD/BKAD/2024.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	50.400.000,00
15	LS Pemb. Biaya Honor Narasumber, Moderator, Pembawa Acara & Panitia Keg.Analisis Capaian Standar Pelayanan Pendidikan Dasar(SPM) SD T.A 2024,SK Bupati No.100.3.3.2/722/VIII/TAHUN 2024 Tgl 30 Agustus 2024 SPD 800/5931/LP-SPD/BKAD/2024 (SD : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	10.500.000,00
16	LS Pemb. Honor Narasumber Pembahas,Moderator,Pembawa Acara &Panitia Keg.Asesmen SMP(Sosialisasi Asesmen Sumatif Akhir&Penulisan Ijazah)T.A 2024,SK Bupati No.100.3.3.2/382/III/TAHUN 2024 Tgl 28 Maret 2024,SPD 800/3798/LP-SPD/BKAD/2024(SD:DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.600.000,00
17	LS Pembayaran 100% Atas kegiatan Pengawasan (Pembangunan Pavin Blok di Gor Samaturu) Berdasarkan SPK No. 015/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024, SPD No. 800/6622/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	SUTIYA UTAMA KARYA, CV	3.805.000,00
18	LS Pembayaran Belanja Baju Tim Gugus dan Fasilitator Atas Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) PAUD HI, Nota Pesanan Terlampir, SPD 800/5901/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	Wss. OL Shop RAISYA/NURDIN	15.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
19	LS Pemb. Honorarium Narasumber Pembahas,Moderator,Pembawa Acara &Panitia Pada Keg.Asesmen SD (Sosialisasi Asesmen Sumatif Akhir) T.A 2024,SK Bupati No.100.3.3.2/382/III/TAHUN 2024 Tanggal 28 Maret 2024,SPD 800/3791/LP-SPD/BKAD/2024.(SD : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	26.700.000,00
20	LS Pembayaran 100% Keg. Kursus Pembina Pramuka Mahir Dasar Berdasarkan SPKS No. 042/SPKS-PO/DISDIKPORA/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024, SPD 800/6968/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	INDONESIA JAYA KARYA	50.000.000,00
21	LS Pembayaran 100% Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan(Pemb. Ruang Kelas TK BHAYANGKARI POLRES MAJENE), SPK No. 28/SPK-PENUN/DAU/DISIDKPORA/PAUD-PNF/IX/2024 Tanggal 17 September 2024, SPD 800/6852/LP-SPD/BKAD/2024. (SD : DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	3.274.500,00
22	LS Pembayaran 100% Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan(Pemb.Area Bermain Berserta APE Luar TK MELATI), SPK No. 32/SPK-PENUN/DAU/DISIDKPORA/PAUD-PNF/IX/2024 Tanggal 17 September 2024, SPD 800/6849/LP-SPD/BKAD/2024. (SD : DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	3.370.000,00
23	LS Pembayaran 100% Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan(Pembangunan Pagar TK Nahdiyat Labuang), Berdasarkan SPK No. 35/SPK-PENUN/DAU/DISIDKPORA/PAUD-PNF/XI/2024 Tanggal 7 Nopember 2024, SPD 800/6851/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	3.309.500,00
24	LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Analisis Capaian Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (SPM) SD T.A 2024, Sesuai Surat Tugas No. T.800.1.11.1/170/2024 Tgl 5 Agustus 2024 SPD 800/3770/LP-SPD/BKAD/2024 (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	11.890.000,00
25	LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Analisis Capaian Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (SPM) SMP T.A 2024, Sesuai Surat Tugas No. T.800.1.11.1/09/2024 Tgl 12 Februari 2024 SPD 800/3818/LP-SPD/BKAD/2024 (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	11.890.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
26	LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Analisis Capaian Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (SPM) SD T.A 2024, Sesuai Surat Tugas No. T.800.1.11.1/268/2024 Tgl 22 Nopember 2024 SPD 800/5932/LP-SPD/BKAD/2024 (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.760.000,00
27	LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Analisis Capaian Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (SPM) SMP T.A 2024, Sesuai Surat Tugas No. T.800.1.11.1/269/2024 Tgl 22 Nopember 2024 SPD 800/5934/LP-SPD/BKAD/2024 (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	10.080.000,00
28	LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pada Kegiatan Asesmen SMP T.A 2024, Sesuai Surat Tugas No. T.800.1.11.1/88/2024 Tanggal 8 Mei 2024, SPD 800/3795/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	18.000.000,00
29	LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pada Kegiatan Asesmen SMP T.A 2024, Sesuai Surat Tugas No. T.800.1.11.1/195/IX/2024 Tanggal 4 September 2024, SPD 800/5935/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	24.000.000,00
30	LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Pada Kegiatan Asesmen SD T.A 2024, Sesuai Surat Tugas No. T.800.1.11.1/249/2024 Tanggal 25 Oktober 2024, SPD 800/3794/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	18.000.000,00
31	LS Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Pada Kegiatan Asesmen SD T.A 2024, Sesuai Surat Tugas No. T.800.1.11.1/87/2024 Tanggal 8 Mei 2024, SPD 800/5937/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	18.000.000,00
32	LS Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga T.A 2024, Sesuai Surat No. T.800.1.11.1/189.a/2024,SPD 800/6745/LP-SPD/BKAD/2024.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	10.294.500,00
S	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		13.500.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Belanja MaMin Rapat Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB SPD No. 800/7102/LP-SPD/BKAD/2024 (DAU KES)	Muhammad Cahyadi (Warung Idamayanti)	13.500.000,00
T	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**		14.674.440,00
1	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Dalam Rangka Melakukan Koordinasi Konsultasi terkait Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan Sesuai Surat tugas No.800.1.11.1/28/XII/2024 No.SPD 800/6710/LP-SPD/BKAD/2024. TA.2024 SumberDana(PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.300.000,00
2	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Dalam Rangka Koordinasi Singkronisasi Program & KegiatanPerpustakaan PerpustakaanNasional yang dapat dilaksanakan diKab Majene No.SPD 800/7209/LP-SPD/BKAD/2024. TA.2024 SumberDana(PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	8.374.440,00
U	**DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**		429.917.300,00
1	Belanja sewa personal computer (sewa GPS dan Sewa Laptop dilengkapi aplikasi pemetaan Arcgis) pada Sub Keg. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TA 2024 SPD No: 800/6699/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana DBH PUSAT	PATLY PARAKKASI (TOKO ANUGERAH JAYA)	1.400.000,00
2	100% atas pekrjaan Pelaksna Pekrjaan Bimbingan Teknis Tematik Pupuk Organik pd Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kec dan Desa TA 2024. SPD No: 800/6817/LP-SPD/BKAD/2024, Sumber Dana PAD	FAKLI ANRAWANSYAH (TRILOGI INSTITUT)	50.000.000,00
3	100% atas Pekerj. Pelaksana Pekerj. Pelatihan dan Pembuatan Pakan Ternak yang Efisien pd sub Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kec dan Desa TA 2024, SPD No: 800/6816/LP-SPD/BKAD/2024, Sumber Dana PAD	FAKLI ANRAWANSYAH (TRILOGI INSTITUT)	50.000.000,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor-ATK pada sub Keg. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TA 2024, SPD No: 800/7000/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana DBH Pusat	Hj. SYAHRIAH (TOKO NUR ALIM)	2.250.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
5	Belanja Makanan dan Minum Rapat pd Sub Keg. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TA 2024 SPD No: 800/6999/LP-SPD/BKAD/2024, Sumber Dana DBH Pusat	Hj. Sitti Nurbaya (NINDA CATERING)	7.550.000,00
6	Biaya perjalanan dinas biasa pd sub keg. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TA 2024. SPD No: 800/7303/LP-SPD/BKAD/2024, Sumber Dana PAD	Rek.Penampungan Gaji	13.355.210,00
7	Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Keg. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kab/Ko TA 2024, SPD No: 800/6702/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana DAU PENDIDIKAN	Andi Adlina Basharoe, Hj Ganiah, Maslian, husniar Harbi, Ahmad, Alam Saubil	7.290.000,00
8	Perjalanan dinas dalam kota pada Sub Keg. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang kelompok Tani tingkat Kab/Ko TA 2024 SPM NO: 800/6701/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana DAU PENDIDIKAN	Abdul Azis, Hj Ganiah, La Gimbang, Alia Pelu, Ihva S Kuba, Husniar Harbi, Alam Saubil, Rosmiani, Astuti, Devianti Sunusi, Nabila Khaerunnisa, Kusmanto	3.200.000,00
9	Biaya Perjalanan Dinas Pada Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Holtikultura TA.2024 Pada Dinas Pertanian Peternakan dan perkebunan Kab. Majene	Nur Chasanah, Abdul Azis, Lusmin, Sahtul Arif, Aisyah Noor, Desy Reniyanti, Vitri harfiani, Muhammad Ihsan, Sri Wahyuti, Mu'min, Syafriadi, Muliani, Hasriati, kusmanto, Andi Adlina Basharoe	14.930.000,00
10	Biaya Perjalanan Dinas Pada Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Holtikultura TA.2024 Pada Dinas Pertanian Peternakan dan perkebunan Kab. Majene	Nur Chasanah, Abdul Azis, Lusmin, Sahtul Arif, Aisyah Noor, Desy Reniyanti, Vitri harfiani, Muhammad Ihsan, Sri Wahyuti, Mu'min, Syafriadi, Muliani, Hasriati, kusmanto, Andi Adlina Basharoe	12.763.590,00
11	Belanja Pembelian Makanan dan Minuman Rapat untuk KegaitanPenyusunan Dokumen PLP2B Kabupaten Majene pada Sub Kegaiatan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan TA.2024		1.648.500,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
12	Pengadaan Bibit Kambing untuk Kelompok Tani Dusun pamboboran Desa Pamboboran pada Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain TA.2024	ABDULLAH (CV. BUANA REZHO)	140.580.000,00
13	Pembayaran 45% atas Pekerjaan Pambangunan Jalan Usaha Tani Desa Onang Utara Kec.Tubo Sendana pada Sub Kegaiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kab. Majene TA.2024		44.820.000,00
14	Retensi Pekerjaan sebesar 5% atas Pekerjaan Pembangunan JalanUsaha Tani Desa Onang Utara, Kec. Tubo Sendana pada Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kab. Majene TA. 2024		4.980.000,00
15	Pembayaran 45% atas Pekerjaan Pambangunan Jalan Usaha Tani Dusun Wagimo Desa Ulidang Kec. Tammeroddo Sendana pada Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kab. Majene TA.2024		44.775.000,00
16	Retensi Pekerjaan sebesar 5% atas Pekerjaan jalan Tani Dusun Wagimo Desa ulidang Kec.Tammeroddo Sendana pada Sub.Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Tani Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kab.Majene TA.2024		4.975.000,00
17	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Penata Usahaan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Aministrasi Pelaksana Tugas ASN	Nur Hikma, Ade Pratama, Yuli Annisa, Nurhafisah, Gita Afmiranti Mas'udin, Novianti, Musdalifah, Ardiansyah	1.600.000,00
18	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Penata Usahaan Keuangan pada Sub Kegiatan Penyediaan administrasi Pelaksana Tugas ASN	Hasanuddin, Anggun Sribuana Obed, Yulia Rahmayani	2.250.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
19	Belanja Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak, Tenaga Operasional dan Tenaga Administrasi/Teknis pda Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan TA.2024	Mansur, Nasruddin SP, Samsir SP, Alimuddin SP, Akmal, Nurmutmainnah, Risnayalti, Fitriyani, Irmafianti, Rahmat Hidayat, Siti Aswini Puspita, Marlina, Hasanuddin, Daaming, M.Asri, Fitriadi, Rahmat, Zaenuddin, M.Syuhud, Ardiansyah Syarif, Pratiwi, Lindawati, Andi Hirwan Thahir, Asriani, Erry Budi Erthaba, Iqbal, Rusman, Eliawty, St.Masniati Hambali, Yulia Rahmayani, Ramadani, Nurbaya, Hasriati, Muliani, Nurasisyah, Sitti Nurbaya, Nurhidayat, Karmelia Yasi, Andi Wardani, Nurbaya, Shinta, Muhammad Faisal, Reka, Meilinda Sari, Jumariah, Wahyuti, Rahmat, Juliani, Kamaruddin, Muhammad Abdi, Nasir, Mana, Bahraeni, Nurfaikah, Syamsiah, Jusnawati, Mariati, Ahmad, Suardi, nasaruddin, M.Ridwan, Harni, Suhriani, Fitriani, Awaluddin, Sapar, Zainuddin, Amaliah, Sarmina, Awaluddin, Yusran, Sudirman, Hasnawati, Nurbaya, Muhammad Arif, Nurhayat Nasrul, Nur Afiat, Sapar, Sumiati, Rahmiah, Syamsiah, Edi Warman, Zainuddin, Fitria Kumalasari, Sitti Nurma, Musdalipa, Mauliddin, Rosmiani, Devianti Sunusi, Astuti, Hasnawati, Wahyudi, Muhammad Naim, Nikmah, Nurjannah,	21.550.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
		Muhammad Alwi Yasin, Andi Muliawan, Putri Sundari, Hartina, Sri Wahyuni	
20	**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**		159.189.817,00
21	Pembayaran Belanja ATK Pengadaan Tanah Keg. Koordinasi & Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian & Santunan Tanah untuk Pembangunan sesuai NP No. B-800.1.11/350.a/XI/2024 Tgl. 4/11/2024 & SPD No. 800/7354/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl. 20/12/2024 (PAD)	BARQAH FOTOCOPY	7.040.000,00
22	Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Pek. Pengadaan Sumur Bor Lingk. Galung sesuai SK No. 100.3.3.2/239/II/Tahun 2024 Tgl. 29/02/2024 ; 100.3.3.2/720/VIIi/Tahun 2024 Tgl. 30/08/2024 & SPD No. 800/7353/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl. 20/12/2024 Dinas Perkimtan (SPD)	Rek. Penampungan Gaji	1.220.000,00
23	Ls. Pemb. Biaya Perencanaan Pengadaan Lampu Jalan Sesuai SPD No:800/4017/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl 4/9/2024 & SPK No:02.03/SPK-PREC./DPKPP-PJU/VI/2024 Tgl 20/6/2024 (Sumber Dana : PAD)	SUTIYA UTAMA KARYA, CV	1.350.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
24	Ls. Pemb. Biaya Perecanaan Pengadaan & Pemasangan PJU Kec. Banggae Timur Sesuai SPD No:800/4019/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl 4/9/2024 & SPK No:01.03/SPK-PREC./DPKPP-PJU/VIII/2024 Tgl 2/8/2024 (Sumber Dana : PAD)	SUTIYA UTAMA KARYA, CV	2.100.000,00
25	Bayar SPPD Biasa Keg. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh sesuai ST No. B-800.1.11.1/24.3/XI/2024 Tgl. 19 Nov 2024 & SPD No. 800/7329/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl. 20 Des 2024 Pada Dinas Perkimtan (PAD)	Rek. Penampungan Gaji	8.974.300,00
26	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Bulan Desember 2024)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.000.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Bulan Desember 2024)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	19.950.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Bulan Desember 2024)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.400.000,00
29	Pembangunan Jalan Setapak Pekuburan	CV. TEMPURAN KONSTRUKSI	8.983.350,00
30	Pengawasan Pekerjaan Pembangunan/Pengecoran Jalan Setapak di Lingkungan Lembang	CV. SAHARA ENGINEERING	4.384.500,00
31	Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak di Kelurahan Galung	CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN	4.384.500,00
32	Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Sumur BOR di Kelurahan Galung	CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN	2.941.500,00
33	Pembangunan Jalan Setapak Pekuburan (Biaya Perencanaan)	CV. TIEN SEJAHTERA	5.883.000,00
34	Pembangunan Sumur Bor Kec. Banggae (Biaya Perencanaan)	CV. TIEN SEJAHTERA	2.500.275,00
35	Pembangunan Sumur Bor Kec. Banggae (Biaya Pengawasan)	CV. ADI PERMATA KONSULTAN	2.468.000,00
36	Pembangunan Sumur Bor Kec. Banggae (Biaya Pengawasan)	CV. ADI PERMATA KONSULTAN	2.450.000,00
37	Pembangunan Jalan Setapak Pekuburan (Biaya Pengawasan)	CV. ADI PERMATA KONSULTAN	4.883.000,00
38	Rehabilitasi Jalan Setapak Lingkungan Tulu (Biaya Perencanaan)	CV. TIEN SEJAHTERA	2.541.900,00
39	Biaya Pembangunan Sumur Bor Kel. Galung	CV. YULI DEWI UTARI	4.485.318,00
40	Pembayaran MC.01 (95%) Pekerjaan Pembangunan/Pengecoran Jalan Setapak Lingkungan Lembang	CV. PILAR UTAMA	60.525.157,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
41	Pembayaran Biaya Retensi Pemeliharaan 5% Pekerjaan Pembangunan/Pengecoran Jalan Setapak Lingkungan Lembang	CV. PILAR UTAMA	6.725.017,00
V	**DINAS SOSIAL**		83.425.000,00
1	PEMBAYARAN MAKAN DAN MINUMAN RAPAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DENGAN SPD NOMOR : 800/6673/LP-SPD/BKAD/2024 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2024	HJ.ERWIYATI/RUMAH MAKAN PUTRI TUNGGAL	7.500.000,00
2	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DENGAN SK NO: 821/315.2/2024 DENGAN SPD NO: 800/6669/LP-SPD/BKAD/2024 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2024	REKENING. PENAMPUNGAN GAJI	23.400.000,00
3	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA LAYANAN RUJUKAN DENGAN SPD NO: 800/7123/LP-SPD/BKAD/2024 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2024	REKENING. PENAMPUNGAN GAJI	3.220.000,00
4	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN KEGIATAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) DENGAN SPD NOMOR : 800/6672/LP-SPD/BKAD/2024 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2024	SAHABAT ATK	400.000,00
5	PEMBAYARAN HONORARIUM OPERATOR DTKS SIKS-NG BULAN DESEMBER 2024 DENGAN SK NO: 100.3.3.2/539/VI/TAHUN 2024 DENGAN SPD NO: 800/7140/LP-SPD/BKAD/2024 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2024	REKENING. PENAMPUNGAN GAJI	9.600.000,00
6	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KEGIATAN BIMBINGAN FISIK,MENTAL,SPIRITUAL DAN SOSIAL BAGI PMKS SESUAI DENGAN SPD NO: 800/6671/LP-SPD/BKAD/2024 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2024	REKENING. PENAMPUNGAN GAJI	8.430.000,00
7	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (DALAM DAERAH) MELAKUKAN PENYALURAN BANTUAN DAN P2K2 DALAM PENCEGAHAN PENANGANAN STUNTING DENGAN SPD NO: 800/6675/LP-SPD/BKAD/2024 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2024	REKENING. PENAMPUNGAN GAJI	18.625.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
8	BELANJA TENAGA ADMINISTRASI (TENAGA OPERASIONAL) UNTUK BULAN DESEMBER 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	8.750.000,00
9	BELANJA JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER/TENAGA OPERATOR SIPD/SIMDA UNTUK BULAN DESEMBER	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.450.000,00
10	BELANJA JASA TENAGA KEAMANAN UNTUK BULAN DESEMBER 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	700.000,00
11	BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN UNTUK BULAN DESEMBER 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	350.000,00
W	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**		4.672.973,00
1	Sumber Dana (DBH Pusat). Pembayaran Belanja Pemeliharaan kendaraan DInas berupa nota pembelian Suku Cadang Kendaraan Dinas DC 1019 B ,No. SPD Persetujuan : 800/6507/LP-SPD/BKAD/2024.	WAHYU MOTOR/ACHMAD MAHMUD	4.672.973,00
X	**INSPEKTORAT**		428.628.900,00
1	LS Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda - Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (PAD) Sesuai SPD No : 800/7305/LP-SPD/BKAD/2024 Inspektorat Kab. Majene	RAHMADI_BENDAHARA PENGELUARAN	22.000.000,00
2	LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (PAD) Sesuai SPD No : 800/7306/LP-SPD/BKAD/2024 Inspektorat Kab. Majene 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	10.000.000,00
3	Bayar LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pendampingan dan Asistensi - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PAD) TA. 2024 Sesuai SPD No : 800/7260/LP-SPD/BKAD/2024 Inspektorat Kab. Majene	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.390.000,00
4	LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (PAD) Sesuai SPD No : 800/7259/LP-SPD/BKAD/2024 Inspektorat Kab. Majene 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.950.000,00
5	Bayar LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara TA. 2024 (PAD) Sesuai SPD No : 800/7256/LP-SPD/BKAD/2024 Inspektorat Kab. Majene	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.590.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
6	LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penyelengaraan Pengawasan Internal - Pengawasan Keuangan Pemda (PAD) Sesuai SPD No : 800/7261/LP-SPD/BKAD/2024 Inspektorat Kab. Majene 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.590.000,00
7	Bayar LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pendampingan dan Asistensi - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan PRB TA. 2024 (PAD) Sesuai SPD No : 800/7307/LP-SPD/BKAD/2024 Inspektorat Kab. Majene	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.670.000,00
8	Bayar LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penyelengaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (PAD) TA. 2024 Sesuai SPD No : 800/7258/LP-SPD/BKAD/2024 Inspektorat Kab. Majene	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.070.000,00
9	LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pendampingan dan Asistensi - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemda (PAD) Sesuai SPD No : 800/7257/LP-SPD/BKAD/2024 Inspektorat Kab. Majene 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.700.000,00
10	Bayar LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Reviu Laporan Kinerja TA. 2024 (PAD) Sesuai SPD No : 800/7262/LP-SPD/BKAD/2024 Inspektorat Kab. Majene	REK. PENAMPUNGAN GAJI	14.700.000,00
11	Melakukan Reviu RKPD Pokok pada Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene Mulai Tanggal 6 s/d 16 Mei 2024	Rekening Penampungan	6.870.000,00
12	Melakukan Reviu LPPD Tahun Anggaran 2023 Mulai tgl. 13 s/d 20 Maret 2024	Rekening Penampungan	6.870.000,00
13	Melakukan Rancangan Akhir RKPDpada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rekening Penampungan	6.870.000,00
14	Melakukan Pengawasan Seleksi CPNS Tahun 2024	Rekening Penampungan	4.630.000,00
15	Melakukan Reviu KUA-PPAS perubahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rekening Penampungan	6.870.000,00
16	Melakukan Reviu KUA-PPAS pokok pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rekening Penampungan	6.870.000,00
17	Melakukan Reviu Bantuan Pemerintahan Daerah (bantuan hibah dan bansos) Tahun 2024	Rekening Penampungan	6.870.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
18	Melakukan Audit Lanjutan pada Desa Peminggalan Kec. Sendana TA. 2023-2024 Tanggal 1 s/d 18 November 2024	Rekening Penampungan	8.385.000,00
19	Melakukan Reviu Rancangan Akhir RPJPD pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Rekening Penampungan	9.590.000,00
20	Melakukan Pemantauan Kerugian Negara Pada Semua OPD Kab. Majene tahun 2024	Rekening Penampungan	5.590.000,00
21	Melakukan Sosialisasi Anti Korupsi pada Semua OPD Kab. Majene thn 2024	Rekening Penampungan	4.310.000,00
22	Melakukan Monitoring MCP KPK Tahun 2024	Rekening Penampungan	2.455.000,00
23	Melakukan Probity Audit pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Rehabilitasi Ruang kelas beserta Perabotnya SMP N 1 Pamboang dan SDN 13 Kabiraan	Rekening Penampungan	6.390.000,00
24	Melakukan reviu atas Jumlah PNS Guru dan PPPK guru yang mendapatkan Tunjangan Kinerja berdasarkan Perhitungan Gaji 13	Rekening Penampungan	7.670.000,00
25	Melakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Bagian ortala Setda Majene	Rekening Penampungan	9.590.000,00
26	Melakukan Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan DAU yang ditentukan Penggunaanya	Rekening Penampungan	9.430.000,00
27	Melakukan Verifikasi APIP pada Aplokasi E-LPPD pada Tahun 2023	Rekening Penampungan	14.040.000,00
28	Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut atas LHP BPK-RI Semester II Tahun 2024	Rekening Penampungan	8.950.000,00
29	Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut 60 Hari atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2024	Rekening Penampungan	12.610.000,00
30	Melakukan Pemeriksaan Dana Desa pada Desa Totolisi Sendana dan Desa Seppong Kecamatan Pamboang tahun anggaran 2023	Rekening Penampungan	7.670.000,00
31	Melaks/d Triwulan i 2024ukan Pemeriksaan Dana Desa pada Desa Maliaya dan Desa Mekkatta Kecamatan Malunda	Rekening Penampungan	7.670.000,00
32	Melaks/d Triwulan i 2024ukan Pemeriksaan Dana Desa pada Desa Tubo Selatan dan Desa Lombong Kecamatan Malunda	Rekening Penampungan	7.670.000,00
33	Melaks/d Triwulan i 2024ukan Pemeriksaan Dana Desa pada Desa Tallangbalao dan Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana	Rekening Penampungan	7.670.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
34	Melaks/d Triwulan i 2024ukan Pemeriksaan Dana Desa pada Desa Adolang dan Desa Simbang	Rekening Penampungan	7.670.000,00
35	Melaks/d Triwulan i 2024ukan Pemeriksaan Dana Desa pada Desa Tammeroddo dan Desa Ulidang	Rekening Penampungan	7.670.000,00
36	Melaks/d Triwulan i 2024ukan Pemeriksaan Dana Desa pada Desa Sendana dan Desa Tallu Banua	Rekening Penampungan	7.670.000,00
37	Melaks/d Triwulan i 2024ukan Pemeriksaan Dana Desa pada Desa Onang Utara dan Desa Tubo	Rekening Penampungan	7.670.000,00
38	Pembayaran Honorarium penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Inspektorat Kab. Majene	rekening penampungan gaji	2.250.000,00
39	Pembayaran Honorarium penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Inspektorat Kab. Majene	rekening penampungan gaji	350.000,00
40	Pembayaran Honorarium penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Inspektorat Kab. Majene	rekening penampungan gaji	5.100.000,00
41	Pembayaran Kerja Lembur dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2024	rekening penampungan gaji	7.571.000,00
42	PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	Rekening Penampungan	11.000.000,00
43	Penyediaan Bahan cetakan dan Penggandaan	Toko Mekar	5.000.000,00
44	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Rekening Penampungan	65.977.900,00
45	Rehabilitasi Gedung Kantor	Rekening Penampungan	28.000.000,00
46	Belanja Bahan Makan dan Minuman Rapat kegiatan kantor Inspektorat Kab Majene	Toko Alvas	7.500.000,00
Y	**KECAMATAN BANGGAE DAN KELURAHAN**		85.998.200,00
Y.1	**Kecamatan Banggae**		**9.100.000,00**
1	- Jasa Bulanan Tenaga Administrasi	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.150.000,00
2	- Jasa Tenaga Operator Komputer	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.250.000,00
3	- Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	REK. PENAMPUNGAN GAJI	700.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
Y.2	**Kelurahan Banggae**		**11.624.200,00**
1	LS - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer untuk Bulan Januari s/d Mei pada Kantor Kel. Banggae, Nomor Persetujuan SPD : 800/6922/LP-SPD/BKAD/2024, Sumber Dana : PAD	Drs.H. ASRULLAH/PERCETAKAN USAHA DAMAI	271.000,00
2	LS- Bayar Belanja Makan Minum Rapat Kantor untuk Kegiatan Kantor Pada Bulan September s/d November 2024 Pada Kantor Kelurahan Banggae Dengan No SPD; 800/6812/LP-SPD/BKAD/2024 (Sumber Dana PAD)	HJ.MURTAFIAH,SE/CATERING ABYAN	387.000,00
3	LS - Dibayar Belanja SPPD Luar Daerah dengan Nomor Surat Tugas : 090/21/2024 dan 090/104/2024, Nomor Persetujuan SPD : 800/6811/LP-SPD/BKAD/2024, Sumber Dana : PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.331.200,00
4	Honor Pegawai Tidak tetap (TENAGA ADMINISTRASI)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.335.000,00
5	Honor babinkantibmas (TENAGA ADMINISTRASI)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	300.000,00
6	Honor Kepala RW , Sekretaris dan Bendahara (TENAGA ADMINISTRASI)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.000.000,00
Y.3	**Kelurahan Pangali-ali**		**14.350.000,00**
1	LS-Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis dan Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover pada Kantor Kel. Pangali-Ali dengan No.SPD:800/5806/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana: PAD	H. MASNUR/TOKO SINAR ILMU	400.000,00
2	LS-Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis dan Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover pada Kantor Kel. Pangali-Ali dengan No.SPD:800/5806/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana: PAD	H. MASNUR/TOKO SINAR ILMU	800.000,00
3	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	REK. PENAMPUNGAN GAJI	10.000.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.000.000,00
5	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	REK. PENAMPUNGAN GAJI	750.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga administrasi ('Kantibnas kelurahan Pangali-ali)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	400.000,00
Y.4	**Kelurahan Totoli**		**10.950.000,00**

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	LS- Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kelurahan Totoli Bulan Agustus Tahun 2024, No SPK. 004/SPK/KL-TL/XII/2024, dengan SPD No. 800/7118/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana DBH Pusat	SUGIANTO/ TIARA MOTOR	500.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Operator Kel.Totoli kegiatan penyediaan Administrasi pelaksana Tugas ASN bulan Desember Tahun 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.500.000,00
3	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	REK. PENAMPUNGAN GAJI	750.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Belanja Jasa Tenaga ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bulan Desember Tahun 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	200.000,00
5	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		6.000.000,00
Y.5	**Kelurahan Baru**		**22.400.000,00**
1	Pengajuan Pembayaran Honor Ketua,Sekretaris dan Bendahara RW Se-Kel. Baru Bulan Oktober S/D November 2024 No. SK 100.3.3.2/359/II/2024 Dan No. SPD 800/6825/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana DBH Prov	REK. PENAMPUNGAN GAJI	12.000.000,00
2	- Upah Ketua Rw,Sekretaris dan Bendahara Se RW	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.000.000,00
3	- Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.500.000,00
4	- Honorariu, Jasa Tenaga Administrasi	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.700.000,00
5	- Honor Babinsa dan babinkatimnas	REK. PENAMPUNGAN GAJI	200.000,00
Y.6	**Kelurahan Rangas**		**9.624.000,00**
1	Pembayaran SPPD Dalam Daerah An. RIDWAN, S.IP, Hj. NURALIAH, SE, RANTI JAMILAH pada Kantor Kel. Rangas dengan Surat Tugas Nomor : 090/05/2024 dan Nomor SPD :800/6832/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	450.000,00
2	LS- Bayar Biaya Makan Minum Tamu pada Kantor Kelurahan Rangas dengan Nomor SPD : 800/6831/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana PAD	RUSNAWATI, SE/KEDAI RUSNA	324.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
3	Bayar Honorarium Tenaga Operasional dan Linmas Bulan Oktober s/d November 2024 Pada Kantor Kelurahan rangas dengan Nomor SPD; 800/…../LP-SPD/bkad/2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.650.000,00
4	'Bayar Honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas Bulan Oktober s/d November 2024 Pada kantor Kelurahan Rangas dengan Nomor SPD:800/…../LP-SPD/BKAD/2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	200.000,00
5	'Bayar Honorarium Ketua LKK, Sekretaris dan Bendahara LKK Bulan Oktober s/d November 2024 Pada Kantor Kelurahan Rangas dengan Nomor SPD: 800/……/LP-SPD/BKAD/2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.000.000,00
Y.7	**Kelurahan Galung**		**7.950.000,00**
1	sinergitas dengan kepolisian negara indonesia, TNI dan intansi vertikal di wilayah kecamatan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Belnja jasa tenaga administrasi tahun 2024 . Sumbewr dana DBH Provinsi		400.000,00
2	program Penunjang Urusan Pemerintah kab/kota, sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN. Belanja jasa tenaga administrasi tahun 2024. Sumber dana DBH Prov		2.800.000,00
3	program Penunjang Urusan Pemerintah kab/kota, sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN. Belanja jasa tenaga operator komputer tahun 2024. sumber dana DBH Prov		750.000,00
4	Pemberdayaan masayarakat di kelurahan, program pemberdayaan masayarakat desa dan kelurahan. Belanja jasa tenaga pelayanan umum tahun 2024. sumber dana DBH Prov		4.000.000,00
Z	**KECAMATAN BANGGAE TIMUR DAN KELURAHAN**		21.242.000,00
Z.1	**Kelurahan Baruga**		8.572.000,00
1	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Kantor Kelurahan Baruga T.A 2024 Sesuai SPD No. 800/5801/LP-SPD/BKAD/2024 (Sumber Dana PAD)	M JUNAID	4.270.000,00
2	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Kantor Kelurahan Baruga T.A 2024 Sesuai SPD No. 800/3419/LP-SPD/BKAD/2024 (Sumber Dana PAD)	M JUNAID	1.230.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
3	Bayar Bel. Makanan dan Minuman Jamuan Tamu untuk Bulan Desember T.A 2024 pada Kantor Kel. Baruga Sesuai SPD No. 800/5800/LP-SPD/BKAD/2024 (Sumber Dana PAD)	ASMA (Kedai Comeback)	685.000,00
4	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Keg. Kantor- Bahan Cetak Pada Kantor Kelurahan Baruga Sesuai SPD No. 800/6153/LP-SPD/BKAD/2024 (Sumber Dana PAD)	BARQAH FOTOCOPY	2.387.000,00
Z.2	**Kelurahan Tande**		**1.770.000,00**
1	Pembayaran (LS) BelanjaBelanja Perjalanan Dinas Biasa pada KantorKelurahan Tande Tahun Anggaran 2024, sesuai SPD Nomor : 800/5953/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber dana PAD	ARMAN	1.770.000,00
Z.3	**Kelurahan Labuang**		**1.950.000,00**
1	Bayar Belanja Perjalanan Dinas ke Mamuju, Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir dengan Nomor SPD 800/6893/LP-SPD/BKAD/2024,pada Kantor Kelurahan Labuang T.A 2024 (Sumber Dana PAD)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.950.000,00
Z.4	**Kelurahan Lembang**		**7.670.000,00**
1	Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota, Kabupaten Majene T.A 2024 Sumber Dana PAD dengan Nomor : 800/7185/LP-SPD/BKAD/2024	IDHAM	720.000,00
2	Pembayaran Belanja Honor Kegiatan Jasa Tenaga Administrasi , jasa Tenaga Kebersihan,dan Jasa Operator Komputer	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.750.000,00
3	Pembayaran Belanja Honor Kegiatan Jasa Tenaga Pelayanan Umum , Honorarium Ketua, Sekretaris dan Bendahara LKK dengan sumber dana DBH PROV	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Jasa Ketenteraman, Ketertiiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dengan sumber dana PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	200.000,00
Z.5	**Baruga Dhua**		**1.280.000,00**
1	Pembayaran LS Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Kantor Kelurahan Baruga Dhua Tahun 2024 Sumber Dana PAD Rp. 1.280.000,- Sesuai No. SPD : 800/7180/LP-SPD/BKAD/2024	SUHAENI H	1.280.000,00
AA	**KECAMATAN MALUNDA DAN KELURAHAN**		21.420.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
AA.1	**Kecamatan Malunda**		19.500.000,00
1	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Kebersihan, Operator Komputer dan Keamanan Kantor Kecamatan Malunda Bulan Oktober-November 2024 sesuai SPD No: 800/7268/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana DBH Prov.	Rek.Penampungan Gaji	4.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Kebersihan, Operator Komputer dan Keamanan Kantor Kecamatan Malunda Bulan Oktober-November 2024 sesuai SPD No: 800/7268/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana DBH Prov.	Rek.Penampungan Gaji	4.500.000,00
3	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Kebersihan, Operator Komputer dan Keamanan Kantor Kecamatan Malunda Bulan Oktober-November 2024 sesuai SPD No: 800/7268/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana DBH Prov.	Rek.Penampungan Gaji	1.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Kebersihan, Operator Komputer dan Keamanan Kantor Kecamatan Malunda Bulan Oktober-November 2024 sesuai SPD No: 800/7268/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana DBH Prov.	Rek.Penampungan Gaji	4.500.000,00
5	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kantor Kecamatan Malunda Bulan Oktober-November 2024 sesuai SPD No: 800/7263/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana DBH Prov.	Rek.Penampungan Gaji	5.500.000,00
AA.2	**Kelurahan Malunda**		**1.440.000,00**
1	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah pada staf Kantor Lurah Malunda untuk Bulan Maret s/d Juli 2024. sesuai SPPD dan surat tugas dengan No. SPD : 800/4954/LP-SPD/BKAD/2024 dan sumber dana PAD.	Rek.Penampungan Gaji	1.440.000,00
AA.3	**Kelurahan Lamungan Batu**		**480.000,00**
1	Pembayaran SPPD Dalam kota sebanyak 3 (Tiga) Kegiatan dari bulan juli s/d oktober 2024 sesuai sppd terlampir.berdasarkan SPD. No.800/6436/LP-SPD/BKAD/2024.	Rek.Penampungan Gaji	480.000,00
BB	**KECAMATAN PAMBOANG DAN KELURAHAN**		2.508.000,00
BB.1	**Kecamatan Pamboang**		2.508.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Bayar belanja pembeliaan BBM Bensin untuk kendaraan Dinas Operasional Camat Pamboang Penggunaan bulan Oktober s.d Desember 2024 Sumber Dana DBH Pusat Nomor SPD : 800/6970/LP-SPD/BKAD/2024 Tanggal 17 Desember 2024	KIOS YUYUN	2.508.000,00
CC	**KECAMATAN SENDANA DAN KELURAHAN**		33.040.000,00
CC.1	**Kecamatan Sendana**		8.840.000,00
1	Pembelian Makanan dan Minuman HUT RI Tahun 2024 sesuai LP-SPD Nomor 800/5218/LP-SPD/BKAD/2024 (Sumber Dana PAD)	FADIL CATERING	2.350.000,00
2	Pembelian Pakian Paskibra Tahun 2024 sesuai LP-SPD Nomor 800/6814/LP-SPD/BKAD/2024 Tanggal 16 Desember 2024, Sumber Dana PAD	USAHA MALAQBI TAYLOR	1.000.000,00
3	Pembelian Pakaian Latihan Paskibra Tahun 2024 sesuai LP-SPD Nomor 800/6813/Lp-SPD/BKAD/2024 Tanggal 16 Desember 2024, Sumber Dana PAD	USAHA MALAQBI TAYLOR	1.740.000,00
4	Gaji/Upah Jasa Pegawai Non PNS yang Bekerja pada pemerintah Daerah tenaga Administrasi	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.200.000,00
5	Gaji/Upah Jasa Pegawai Non PNS yang Bekerja pada pemerintah Daerah tenaga pembantu (Tekhnis/Operasional)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	300.000,00
6	Gaji/Upah Jasa Pegawai Non PNS yang Bekerja pada pemerintah Daerah tenaga pembantu (Tekhnis/Operasional)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.250.000,00
CC.2	**Mosso**		**13.700.000,00**
1	Pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan Musrenbang tingkat Kel. Mosso TA 2024 sesuai SPD No. 800/6808/LP-SPD/BKAD/2024 tanggal 15 Desember 2024	CAFE INA	1.500.000,00
2	Pembayaran belanja makanan dan minuman jamuan tamu kegiatan peringatan HUT RI bulan Agustus pada kantor Kel. Mosso tahun 2024, sesuai SPD No. 800/7216/LP-SPD/BKAD/2024	CAFE INA	2.500.000,00
3	Gaji/Upah Jasa Pegawai Non PNS yang Bekerja pada pemerintah Daerah tenaga Administrasi	REK. PENAMPUNGAN GAJI	700.000,00
4	Gaji/Upah Jasa Pegawai Non PNS yang Bekerja pada pemerintah Daerah tenaga pembantu (Tekhnis/Operasional/Tenaga Linmas)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	200.000,00
5	Gaji/Upah Jasa Pegawai Non PNS yang Bekerja pada pemerintah Daerah tenaga pembantu (Tekhnis/Operasional)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.500.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
6	Gaji/Upah Jasa Pegawai Non PNS yang Bekerja pada pemerintah Daerah tenaga pembantu (Tekhnis/Operasional / Tenaga Pembersih)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	300.000,00
7	Belanja Honorarium Pengurus LKK Kelurahan Mosso	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.000.000,00
CC.3	**Mosso Dhua**		**10.500.000,00**
1	Belanja Jasa tenaga ketentraman , ketertiban Umum, dan Perlindungan msyarakata (HONORARIUM LINMAS)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	500.000,00
2	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor dan Rumah Jabatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	250.000,00
3	Honorarium Kepala lingkungan dan HonorariumSekretaris dan Bendahara LKK (Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	8.000.000,00
4	Honorarium Tenaga Administrasi	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.750.000,00
DD	**KECAMATAN TAMMERODDO**		8.150.000,00
1	LS - Pembayaran Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah Sesuai Surat Tugas, No. 090/148/2024 dan Dalam Kota Sesuai Surat Tugas, No. 090/127/2024 Pada Kantor Kecamatan Tammerodo Sendana TA.2024 SPD No. 800/4737/LP-SPD/BKAD/2024 (SD : PAD) Rekap Terlampir	1. Edi Bastian, SE	2.780.000,00
2	LS - Pembayaran Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah Sesuai Surat Tugas, No. 090/148/2024 dan Dalam Kota Sesuai Surat Tugas, No. 090/127/2024 Pada Kantor Kecamatan Tammerodo Sendana TA.2024 SPD No. 800/4737/LP-SPD/BKAD/2024 (SD : PAD) Rekap Terlampir	1. Edi Bastian, SE	3.130.000,00
3	LS - Pembayaran Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota Sesuai Surat Tugas, No. 094/123/2024 Pada Kantor Kecamatan Tammerodo Sendana TA.2024 SPD No. 800/7117/LP-SPD/BKAD/2024 (SD : PAD) Rekap Terlampir	1. Edi Bastian, SE	2.240.000,00
EE	**KECAMATAN ULUMANDA**		9.643.800,00
1	Belanja Langsung (LS) Pembayaran Perjalanan dinas biasa (luar daerah) dan Perjalanan dinas dalam kota (dalam daerah) pada Kantor Kecamatan Ulumanda Tahun Anggaran 2024, sumber dana PAD Nomor : 800/7222/LP-SPD/BKAD/2024 Tanggal 20 Desember 2024.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.843.800,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
2	Belanja Langsung (LS) Pembayaran Perjalanan dinas biasa (luar daerah) dan Perjalanan dinas dalam kota (dalam daerah) pada Kantor Kecamatan Ulumanda Tahun Anggaran 2024, sumber dana PAD Nomor : 800/7222/LP-SPD/BKAD/2024 Tanggal 20 Desember 2024.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.800.000,00
FF	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**		2.906.735.368,00
1	BAJU OK PERLAK BAJU PASIEN PT ZACA PRATAMA JAYA	PT ZACA PRATAMA JAYA	32.524.099,00
2	BAJU OK PT ZACA PRATAMA JAYA	PT ZACA PRATAMA JAYA	48.840.000,00
3	JAS OPERASI DUK PT ZACA PRATAMA JAYA	PT ZACA PRATAMA JAYA	49.280.000,00
4	PERALATAN RUMAH TANGGA kebersihan TRI AMART	TRI AMART	350.260,00
5	PERALATAN RUMAH TANGGA kebersihan TRI AMART	TRI AMART	228.282,00
6	PERALATAN RUMAH TANGGA kebersihan TRI AMART	TRI AMART	3.957.328,00
7	PERALATAN RUMAH TANGGA kebersihan TRI AMART	TRI AMART	2.731.426,00
8	PERALATAN RUMAH TANGGA plastik TRI AMART	TRI AMART	10.828.239,00
9	PERALATAN RUMAH TANGGA plastik TRI AMART	TRI AMART	9.191.621,00
10	PERALATAN RUMAH TANGGA plastik TRI AMART	TRI AMART	1.967.530,00
11	Makan Minum Tamu	NURLELA	676.540,00
12	SPPD LUAR DAERAH	PEGAWAI RSUD	29.963.580,00
13	SPPD DALAM DAERAH	PEGAWAI RSUD	2.080.000,00
14	BBM GENSET	HUSAIN	8.840.000,00
15	PEMELIHARAAN AC JULI	MITRA TEKNIK	33.799.500,00
16	PEMELIHARAAN AC SEPTEMBER	MITRA TEKNIK	25.108.200,00
17	PEMELIHARAAN SARANA LISTRIK JULI 2024	TOKO ALKAUTSAR	6.711.060,00
18	PEMELIHARAAN SARANA LISTRIK AGUSTUS 2024	TOKO ALKAUTSAR	2.376.510,00
19	PEMELIHARAAN SARANA LISTRIK SEPTEMBER 2024	TOKO ALKAUTSAR	1.900.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
20	PEMELIHARAAN SARANA LISTRIK OKTOBER 2024	TOKO ALKAUTSAR	2.624.040,00
21	PEMELIHARAAN SARANA LISTRIK NOVEMBER 2024	TOKO ALKAUTSAR	5.819.730,00
22	PEMELIHARAAN SARANA GEDUNG FEBRUARI 2024	TOKO ALKAUTSAR	12.253.290,00
23	PEMELIHARAAN SARANA GEDUNG JULI 2024	TOKO ALKAUTSAR	325.000,00
24	PEMELIHARAAN SARANA GEDUNG AGUSTUS 2024	TOKO ALKAUTSAR	1.115.000,00
25	PEMELIHARAAN SARANA GEDUNG SEPTEMBER 2024	TOKO ALKAUTSAR	1.315.000,00
26	PEMELIHARAAN SARANA GEDUNG OKTOBER 2024	TOKO ALKAUTSAR	160.000,00
27	PEMELIHARAAN SARANA GEDUNG NOVEMBER 2024	TOKO ALKAUTSAR	160.000,00
28	BELANJA OBAT OBATAN	PBF	1.332.726.622,00
29	BMHP	PBF	1.272.808.511,00
30	BELANJA OBAT OBATAN YANG TIDAK MASUK DALAM DAFTAR REVIUW UTANG INSPEKTORAT (TEMUAN BPK)	PT PARIT PADANG	6.074.000,00
GG	**SATUAN POLISI PAMONG PARAJA**		25.440.000,00
1	Bayar Perjalanan Dinas dlm Kota, Satpol PP bln Agustus s/d Oktober Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah An. Muhammad Hasanuddin,S.Sos.,MM. Sumber Dana DBH Provinsi 2024.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	25.440.000,00
HH	**SEKRETARIAT DAERAH**		702.689.000,00
1	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub. Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, sesuai BAP No. B.900.1.1/1992/X/2024 dan SPD No. 800/6716/LP-SPD/BKAD/2024. PAD.	KIOS ASMIRAH (JUHANI)	8.700.000,00
2	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub. Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, sesuai BAP No. B.900.1.1/2886/XII/2024 dan SPD No. 800/6718/LP-SPD/BKAD/2024. PAD.	KIOS ASMIRAH (JUHANI)	3.070.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
3	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Ruangan Staf Ahli) pada Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu, sesuai SPK No. B.000.4.7.2/47.a/I/2024 dan SPD No. 800/6906/LP-SPD/BKAD/2024. PAD.	TOKO QISHIL (NAHARIAH)	5.000.000,00
4	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Ruangan Staf Ahli) pada Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu, sesuai SPK No. B.000.4.7.2/197.a/II/2024 dan SPD No. 800/6907/LP-SPD/BKAD/2024. PAD.	CATERING KAISYA (MARWAH)	5.000.000,00
5	Belanja LS Biaya Pembelian Alat Tulis kantor pada Sub. Keg. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, sesuai BAPP No. 008/Orga-SETDA/XI/2024 tgl. 2 Desember 2024 dan SPD No. 800/6686/LP-SPD/BKAD/2024, PAD.	SAHABAT ATK (MASLIAH)	3.900.000,00
6	Belanja LS Biaya Pembelian Kertas dan Cover pada Sub. Keg. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, sesuai BAPP No. 009/Orga-SETDA/XI/2024 tgl. 2 Desember 2024 dan SPD No. 800/6687/LP-SPD/BKAD/2024, PAD.	SAHABAT ATK (MASLIAH)	2.800.000,00
7	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Rapat pada Sub. Keg. Fasilitasi Bantuan Hukum, sesuai BAP No. 018/BAP/HK/XII/2024 tanggal. 12 Desember 2024 dan SPD No. 800/6899/LP-SPD/BKAD/2024. PAD.	Catering ALIZA (NUR AMANAH)	1.350.000,00
8	Belanja LS Biaya Insentif Penceramah, Pembaca Doa, MC pada Kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam T.A 2024, sesuai BAPP No. 400/254/Kes/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dan SPD No. 800/5612/LP-SPD/BKAD/2024. DAU-Kesehatan.	PPTK Bag. KESRA Setda Kab. Majene (M.SYAHID, S.Ag)	1.200.000,00
9	Belanja LS Biaya Cetak Baliho pada Kegiatan Idhul Adha (PHBI) Tahun 2024 sesuai BAPP No. 400/214/Kes/VII/2024 da SPD No. 800/3634/LP-SPD/BKAD/2024. DAU Kesehatan	Percetakan SIOLA (SRI WAHYUNI)	700.000,00
10	Belanja LS Biaya Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam T.A 2024, sesuai BAPP No. 400/252/Kes/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dan SPD No. 800/5613/LP-SPD/BKAD/2024. DAU-Kesehatan.	TOKO BERKAH ANANDA (Muh. Alamsyah Asrul)	1.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
11	Belanja LS Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) pada Sub. Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, sesuai BAP No. 012/BAP/HK/XII/2024 tanggal. 12 Desember 2024 dan SPD No. 800/6898/LP-SPD/BKAD/2024. PAD.	TOKO PRIMA UTAMA (REZKY UTAMY RAMLI)	9.950.000,00
12	Belanja LS Biaya Perlengkapan Dapur Rumah Jabatan Wakil Bupati pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, sesuai SPK No. B.000.3.7/49.a/I/2024 dan SPD No. 800/4125/LP-SPD/BKAD/2024. PAD.	TOKO DIATTOITIATODZI (Hj. ASMUNI R)	10.000.000,00
13	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Rujab Wakil Bupati) pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, sesuai BAPP No. B.900.1.1/1028/VI/2024 dan SPD No. 800/7281/LP-SPD/BKAD/2024. DBH Pusat.	HALIMAH	4.770.000,00
14	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, sesuai BAPP No. B.900.1.7.2/3135/UMUM-SETDA/XII/2024 dan SPD No. 800/7287/LP-SPD/BKAD/2024. DBH Pusat.	Catering ALIZA (NUR AMANAH)	17.000.000,00
15	Belanja LS Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, sesuai BAPP No. 900/1.7.2/3134/UMUM-SETDA/XII/2024 dan SPD No. 800/7279/LP-SPD/BKAD/2024. DBH-Pusat.	BENGKEL MENARA TEHNIK (RUKMAN A.)	9.000.000,00
16	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, sesuai BAPP No. B.100.3.7/705.a/V/2024 dan SPD No. 800/7280/LP-SPD/BKAD/2024. DBH Pusat.	Catering ALIZA (NUR AMANAH)	14.550.000,00
17	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, sesuai BAPP No. B.000.4.7.2/44.a/I/2024 dan SPD No. 800/7275/LP-SPD/BKAD/2024. DBH Pusat.	CATERING KAISYA (MARWAH)	7.600.000,00
18	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Rujab Wakil Bupati) pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, sesuai BAP No. B.900.1.1/1029/VI/2024 dan SPD No. 800/7282/LP-SPD/BKAD/2024. DBH Pusat.	Saharah	7.560.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
19	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Ruang Kerja Wakil Bupati) pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, sesuai SPK No. B.000.4.7.2/45.a/I/2024 dan SPD No. 800/7288/LP-SPD/BKAD/2024. DBH Pusat.	KIOS UTAMI (LILIS AMBARWATI)	19.830.000,00
20	Belanja LS Biaya Pemeliharaan Mobil Jabatan Wakil Bupati Majene, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai SPD No.800/7283/LP-SPD/BKAD/2024. DBH-Pusat	BENGKEL MENARA TEHNIK (RUKMAN A.)	6.500.000,00
21	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, sesuai BAPP No. B.000.4.7.2/43.a/I/2024 dan SPD No. 800/7274/LP-SPD/BKAD/2024. DBH Pusat.	TOKO QISHIL (NAHARIAH)	9.400.000,00
22	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Ruang Kerja Wakil Bupati) pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, sesuai BAPP No. B.000.4.7.2/43.a/I/2024 dan SPD No. 800/7278/LP-SPD/BKAD/2024. DBH Pusat.	TOKO QISHIL (NAHARIAH)	19.970.000,00
23	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, sesuai BAPP No. B.000.4.7.2/45.a/I/2024 dan SPD No. 800/7290/LP-SPD/BKAD/2024. DBH Pusat.	KIOS UTAMI (LILIS AMBARWATI)	8.240.000,00
24	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Rujab Wakil Bupati) pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, sesuai SPK No. B.000.4.7.2/43.a/I/2024 dan SPD No. 800/7289/LP-SPD/BKAD/2024. DBH Pusat.	TOKO QISHIL (NAHARIAH)	15.750.000,00
25	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Rujab Wakil Bupati) pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, sesuai SPK No. B.000.4.7.2/44.a/I/2024 dan SPD No. 800/7273/LP-SPD/BKAD/2024. DBH Pusat.	CATERING KAISYA (MARWAH)	13.680.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
26	Belanja (Biaya BBM Mobil Jabatan Bupati) pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai SPD No. 800/7292/LP-SPD/BKAD/2024. DBH Pusat.	SPBU RANGAS MAJENE (EKA PRAYITNO JKS)	8.562.000,00
27	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Kegiatan Dzikir dan Do'a Bersama pada Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, sesuai SPD No. 800/7291/LP-SPD/BKAD/2024. DAU Kesehatan.	WARUNG AMANAH (RAIYA)	8.200.000,00
28	Belanja LS Biaya Bahan-Isi Tabung Gas pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, sesuai BAPP No. B.900.1.1/2890/XII/2024 dan SPD No. 800/7286/LP-SPD/BKAD/2024. PAD.	TOKO ADIBA (MASLIA DJAMAL)	2.316.000,00
29	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Keg. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, sesuai BAPP No. 022/Bag.ASDPEM/XII/2024 dan SPD No. 800/7162/LP-SPD/BKAD/2024. PAD	KANTIN ALFARIQ (ALFIRA RIDAYANTI.S.KEP)	5.600.000,00
30	Belanja LS Biaya Honorarium Tim Pendamping Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Kab. Majene 2024 sesuai SK Bupati Majene No. 100.3.3.2/862/XI/2024 dan SPD No. 800/7234/LP-SPD/BKAD/2024. PAD	ARFAN RINALDY TAMBILA BARRE, SH	20.000.000,00
31	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Rapat pada sub. Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, sesuai BAP No. 016/BAP/HK/XII/2024 dan SPD No. 800/7332/LP-SPD/BKAD/2024.PAD	Catering ALIZA (NUR AMANAH)	8.100.000,00
32	Belanja LS Biaya Bahan Cetak pada sub. Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, sesuai BAP No. 014/BAP/HK/XII/2024 dan SPD No. 800/7334/LP-SPD/BKAD/2024.PAD	TOKO PRIMA UTAMA (REZKY UTAMY RAMLI)	5.400.000,00
33	Belanja LS Biaya Bahan Komputer pada sub. Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, sesuai BAP No. 015/BAP/HK/XII/2024 dan SPD No. 800/7333/LP-SPD/BKAD/2024.PAD	TOKO PRIMA UTAMA (REZKY UTAMY RAMLI)	11.600.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
34	Belanja LS Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan pada Sub. Keg. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, sesuai BAPP No. B.900/023/Bag-ADPEM/XI/2024 dan SPD No. 800/7336/LP-SPD/BKAD/2024. PAD.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	12.000.000,00
35	Belanja LS Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada sub. Keg. Fasilitasi Bantuan Hukum, sesuai BAP No. 019/BAP/HK/XII/2024 dan SPD No. 800/7335/LP-SPD/BKAD/2024.PAD	Catering ALIZA (NUR AMANAH)	6.400.000,00
36	Belanja LS Biaya Kertas dan Cover pada sub. Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, sesuai BAP No. 013/BAP/HK/XII/2024 dan SPD No. 800/7331/LP-SPD/BKAD/2024.PAD	TOKO PRIMA UTAMA (REZKY UTAMY RAMLI)	4.950.000,00
37	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Biasa pada Sub. Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, sesuai BAPP No. 21/BAPP/BPBJ-SETDA/XII/2024 tanggal, 6 Desember 2024 dan SPD No. 800/7050/LP-SPD/BKAD/2024. PAD.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	8.139.600,00
38	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub. Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, sesuai BAPP No. B.900.1.7.2/3843/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 dan SPD No. 800/6760/LP-SPD/BKAD/2024. PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.790.000,00
39	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, sesuai BAPP No. 054/BAPP/HK/XII/2024 dan SPD No. 800/7269/LP-SPD/BKAD/2024. PAD.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	13.396.760,00
40	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sesuai BAPP No. B.900/3135.a/XII/2024 dan SPD No. 800/7276/LP-SPD/BKAD/2024. PAD.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	18.933.000,00
41	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, sesuai BAPP No. B.900.1.7.2/3133/XII/2024 dan SPD No. 800/7277/LP-SPD/BKAD/2024. PAD.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	48.496.800,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
42	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, sesuai BAPP No. B.900.1.7.2/3134/XII/2024 dan SPD No. 800/7284/LP-SPD/BKAD/2024. PAD.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	55.576.890,00
43	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub. Keg. Fasilitasi Bantuan Hukum, sesuai BAPP No. 052/BAPP/HK/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 dan SPD No. 800/6900/LP-SPD/BKAD/2024. PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.560.000,00
44	Biaya Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub. Kegiatan Fasilitas Keprotokolan sesuai BAPP No. 700/18/PROKOPIM/XII/2024 tangga 9 Desember dan SPD No. 800/7161/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana PAD.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	26.398.750,00
45	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Biasa pada Sub. Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, sesuai BAPP No. 19/BAPP/BPBJ-SETDA/X/2024 tanggal, 1 Oktober 2024 dan SPD No. 800/7163/LP-SPD/BKAD/2024. PAD.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	12.475.200,00
46	BELANJA JASA TENAGA JURU MASAK PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR DAN BELANJA JASA TENAGA JURU MASAK	REK. PENAMPUNGAN GAJI	15.750.000,00
47	BELANJA JASA OPERATOR SIAP DAN KINERJA PADA SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENGELOLAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.500.000,00
48	BELANJA JASA AJUDAN KEPALA DAERAH PADA SUB. KEGITAN PENYEDIAAN JASA PELYAN UMUM KANTOR DAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.000.000,00
49	BELANJA JASA MESS PEMDA JAKARTA PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR DAN BELANJA JASA TENAGA PELAYANAN UMUM		1.300.000,00
50	BELANJA JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR DAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI DAERAH	REK. PENAMPUNGAN GAJI	94.850.000,00
51	BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN PADA SUB KEGITAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR DAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
52	BELANJA JASA TENAGA KOMPUTER OPERATOR PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR DAN BELANJA JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.750.000,00
53	BELANJA MAKAN DAN MINUM JAMUN TAMU BUPATI PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH		8.694.000,00
54	BELANJA KERTAS DAN COVER PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHN RT WAKIL KDH		8.600.000,00
55	BELANJA ATK PADA KEGIATAN FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAAN KEBUTUHAN WAKIL KDH spk No. B.000.4.7.2/21.a/I/2024 tgl 8 Januari 2024		12.250.000,00
56	BELANJA BAHAN KOMPUTER PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RT WAKIL KDH		7.800.000,00
57	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG WAKIL BUPATI		14.000.000,00
58	BELANJA ATK PADA SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN		4.150.000,00
59	BELANJA ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR KERTAS DAN COVER		2.150.000,00
60	BELANJA ATK PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA SURAT MENYURAT		8.300.000,00
61	BELANJA KERTAS DAN COVER PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT		1.980.000,00
62	BELANJA ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN KOMPUTER		1.600.000,00
63	BELANJA ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ATK		900.000,00
64	BELANJA ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN CETAK		1.700.000,00
65	BELANJA ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN KOMPUTER		1.750.000,00
66	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN		1.000.000,00
67	Belanja LS Biaya Jasa Tenaga Operator RANHAM pada	REK. PENAMPUNGAN GAJI	750.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
	Sub. Keg. Fasilitasi Bantuan Hukum Bulan Desember 2024 sesuai BAPP No. 56/BAPP/HK/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024. Sumber Dana DBH. Prov		
68	Belanja LS Biaya Jasa Tenaga Operator Komputer pada Sub. Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, bulan Desember 2024, sesuai BAPP No. 54/BAPP/HK/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 Sumber Dana DBH Prov.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.250.000,00
69	Belanja LS Biaya Jasa Tenaga Administrasi pada Sub. Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, bulan Desember 2024, sesuai BAPP No. 55/BAPP/HK/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 Sumber Dana DBH Prov.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.200.000,00
70	Belanja LS Biaya Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bulan Desember 2024 sesuai, BAPP No. 58/BAPP/HK/XII/2024 Sumber Dana DBH-Prov.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	800.000,00
71	Belanja LS Biaya Jasa Tenaga Administrasi Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Bulan Desember 2024 sesuai BAPP No. 57/BAPP/HK/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024. Sumber Dana DBH-Prov	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.500.000,00
72	Belanja LS Biaya Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Tim Teknis Petugas Protokoler) bulan Desember 2024 sesuai SK No. 100.3.3.2/502/V/TAHUN 2024, BAPP No. 700/18/BAPP-PROKOPIM/XII/2024 Sumber Dana DBH-Prov.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.500.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
73	Belanja LS Biaya Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada Sub. Keg. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Bulan Desember 2024 sesuai SK No. 100.3.3.2/274/III/2024, BAPP No.700/19/BAPP PROKOPIM/XII/2024 dan DBH-Prov.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.250.000,00
74	Belanja LS Biaya Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Pendokumentasian Tugas Pimpinan), Bulan Desember 2024 sesuai SK No. 100.3.3.2/503/V/2024, BAPP No.700/20/BAPP-PROKOPIM/XII/2024 dan SPD DBH-Prov.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.000.000,00
II	**SEKRETARIAT DPRD**		461.506.128,00
1	Belanja Makan Minum Rapat DPRD pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran sub kegiatan Pembahasan APBD TA. 2024, Sesuai SPD No : 800/6797/LP-SPD/BKAD/2024, Sumber Dana PAD.	AULIA WIRA MUHNIF / CATERING APRILIA FOOD & CAKE	5.000.000,00
2	Belanja Makanan Minuman Rapat Pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran DPRD Sub Kegiatan Pembahasan KUA PPAS. Sesuai SPD No : 800/7138/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana PAD	AULIA WIRA MUHNIF / CATERING APRILIA FOOD & CAKE	5.000.000,00
3	Belanja makan minum rapat DPRD Pada Kegiatan Layanan Administrasi DPRD Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD sesuai SPD No 800/7221/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana PAD	NUR AMANAH / CATERING ALISA	5.000.000,00
4	Belanja ATK untuk Keperluan Kantor Sekretariat DPRD pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Tahun 2024 sub Kegiatan Pembahasan APBD. Sesuai SPD No : 800/7218/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana PAD	HAERUDDIN / TOKO SUN B093	92.500,00
5	Belanja ATK untuk Keperluan Kantor Sekretariat DPRD pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Tahun 2024 sub Kegiatan Pembahasan APBD. Sesuai SPD No : 800/7218/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana PAD	HAERUDDIN / TOKO SUN B093	907.500,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
6	Belanja ATK untuk Keperluan Kantor Sekretariat DPRD pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. Sesuai SPD No : 800/7217/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana PAD	HAERUDDIN / TOKO SUN B093	1.000.000,00
7	Belanja Makan dan minum Rapat DPRD pada Kegiatan Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD sesuai SPD No. 800/7247/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana PAD	AULIA WIRA MUHNIF / CATERING APRILIA FOOD & CAKE	15.000.000,00
8	Belanja Makan dan minum Rapat DPRD pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sesuai SPD No. 800/7245/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana PAD	AULIA WIRA MUHNIF / CATERING APRILIA FOOD & CAKE	15.000.000,00
9	Belanja Makan dan minum Rapat DPRD pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sesuai SPD No. 800/7246/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana PAD	AULIA WIRA MUHNIF / CATERING APRILIA FOOD & CAKE	15.000.000,00
10	Belanja Makan dan minum Rapat DPRD pada Kegiatan Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD sesuai SPD No. 800/7248/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana PAD	NUR AMANAH / CATERING ALISA	15.000.000,00
11	Belanja Uang Lembur PNS/Non PNS pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian TA. 2024 Sesuai SPD No : 800/7244/LP-SPD/BKAD/2024, Sumber Dana PAD.	Rek. Penampungan Gaji	5.000.000,00
12	Belanja Makan dan minum Harian Pimpinan DPRD pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD sesuai SPD No. 800/7241/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana PAD	ABD RAJAB / TOKO ADIBA	5.000.000,00
13	Belanja Perjalan Dinas Staf Sekretariat DPRD Kab Majene pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. sesuai SPD No 800/7242/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber dana PAD	Rek. Penampungan Gaji	119.827.318,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
14	Belanja Perjalan Dinas Staf Sekretariat DPRD Kab Majene pada Kegiatan Layanan Administrasi DPRD sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD. sesuai SPD No 800/7239/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber dana PAD	Rek. Penampungan Gaji	42.945.488,00
15	Belanja Perjalan Dinas Staf Sekretariat DPRD Kab Majene pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD. sesuai SPD No 800/7240/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber dana PAD	Rek. Penampungan Gaji	39.673.200,00
16	Belanja Biaya Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kab. Majene untuk mengikuti Musrenbang tingkat kecamatan pada sub kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah sesuai SPD No: 800/7243/LP-SPD/BKAD/2024, Sumber Dana PAD	Rek. Penampungan Gaji	5.225.000,00
17	Belanja ATK Untuk keperluan kantor Sekretariat DPRD pada sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 Sesuai SPD No. 800/7340/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana PAD		1.000.000,00
18	Belanja ATK Untuk keperluan kantor Sekrtariat DPRD pada kegiatan pembentukan peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sub Keeegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan Tahun Anggaran 2024 . Sesuai SPD No. 800/7340/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana PAD		1.000.000,00
19	Belanja Makan Minum Rapat DPTD pada kegiatan Layanan Admonistrasi DPRD Sub.Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPTD sesuai SPD Np. 800/7343/LP-SPD/BKAD/2024. Sumber Dana PAD		5.000.000,00
20	Belanja Makan Minum Tamu DPRD Kab. Majene Rahun 2024 (Termasuk Retribusi Daerah 10%) tanggal 17 Oktober 2024		2.722.500,00
21	Belanja Makan Minum Tamu DPRD Kab. Majene Rahun 2024 (Termasuk Retribusi Daerah 10%), Tanggal 26 November 2024		3.300.000,00
22	Belanja Honorarium Non PNS Pengelola Jasa Tenaga Administrasi Sekretariat DPRD Kab. Majene TA. 2024 untuk Bulan Desember 202, sesuai SK Bupati. Sumber Dana DBH Provinsi	REK. PENAMPUNGAN GAJI	33.900.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
23	Honorarium Non PNS Penatausahaan Keuangan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada sekretariat DPRD Kab. Majene Tahun Anggaran 2024 untuk Bulan : Desember 2024 sesuai Sk Bupati Majene Nomor : 100.3.3.2/237/II/Tahun 2024, Tanggal 29 Feebruari 2024		4.900.000,00
24	Honorarium Non PNS Operator SIPD pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub keegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada sekretariat DPRD Kab. Majne Tahun Anggaran 2024 untuk Bulan Desember 2024, sesuai SK Bupati Majene Nomor : 100.3.3.2/237/II/Tahun 2024		2.250.000,00
25	Belanja Honorarium Non PNS Tenaga Pembersih/Cleaning Service Sekretariat DPRD Kabupaten Majene TA. 2024 untuk Bulan : Desember 2024 sesuai SK Bupati Majene Nomor : 100.3.3.2/237/II/TAhun 2024,Sumber Dana DBH Provinsi	REK. PENAMPUNGAN GAJI	11.400.000,00
26	Belanja Honorarium Non PNS jasa Pengamanan Sekretariat DPRD Kab. Majene TA. 2024 untuk Bulan : Desember 2024 , sesuai SK Bupati Majene, Sumber Dana DBH Provinsi	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.750.000,00
27	Belanja Perjalanan Dinas Staf Sekr. DPRD Kab. Majene	REK. PENAMPUNGAN GAJI	98.612.622,00
II.4	**TAHUN 2025**		20.441.205.196,00
A	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		136.000.000,00
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.	PPTK DIKLAT BKPSDM KAB. MAJENE	136.000.000,00
B	**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**		8.000.000,00
2	Menghadiri Acara Seminar Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) di Mamuju	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.252.700,00
3	Mengikuti Program Pelatihan Digital Leadership Akademy (DLA) di Mamuju	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.437.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
4	Konsultasi terkait Konsep pengembangan riset dan penyusunan Dokumen Rencana Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RPJPID) di Makassar	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.310.300,00
C	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		59.008.209,00
1	Pembayaran langsung HonorariumPelaksana Kegiatan Paskibraka Untuk Kegiatan Pembentukan paskibraka T.A 2025 Dengan No : 800/LP-SPD/BKAD/2025 Sumber Dana PAD	RAHMAT AHMAD, S.Sos	50.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Listrik Untuk Bulan Desember 2025 Sumber Dana Dengan No : 800/801/LP-SPD/BKAD/2025 Sumber Dana PAD Pbjt LIstrik	Asrianti Alimuddin	1.273.409,00
3	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait Penganggaran operasional Forkopimda serta Satgas Terpadu operasi penanganan premanisme dan ormas bermasalah tanggal 30-31 juli 2025 pada kantor Kementrian Dalam Negeri di Jakarta di Jakarta		7.734.800,00
D	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**		5.889.960,00
1	Sumber Dana (DAU Pendidikan) Pembayaran Makanan Dan Minuman Unit Layanan Emergency Terpadu (ULET) Kantor BPBD Kab. Majene Untuk Bulan Desember 2025, No SPD Persetujuan : 800/7235/LP-SPD/BKAD/2025	HESTY (AZIZAH CATERING)	3.212.000,00
2	Sumber Dana (PAD PBJT LISTRIK) Pembayaran Atas Tagihan Listrik dan Air Kantor BPBD Kab. Majene dan Parkiran Pemadam Untuk Bulan Desember 2025, Nomor SPD Persetujuan: 800/7547/LP-SPD/BKAD/2025	ALAMSYAH (TOKO MEGA JAYA MAJENE)	2.677.960,00
E	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**		16.497.750,00
1	Pembayaran Biaya Cetak & Penggandaan Untuk Bidang Non PAD Sesuai SPK No.039/SPK-APPD/BAPENDA/X/2025 & BAP No.043.02/BAP/BAPENDA/X/2025 Pada Bapenda Kab.Majene Sesuai SPD No. 800/7519/LP-SPD/BKAD/2025 (Sumber Dana : PAD Opsen PKB)	MUH. AMRAN AMIN / PERCETAKAN KITA	1.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
2	Pembayaran Biaya Bahan Komputer Bid. Non PAD Sesuai SPK No.040/SPK-APPD/BAPENDA/X/2025 & BAP No. 044.02/BAP/BAPENDA/X/2025 Pada Bapenda Kab.Majene SPD No. 800/7521/LP-SPD/BKAD/2025 (Sumber Dana : PAD Opsen PKB)	MUH. AMRAN AMIN / PERCETAKAN KITA	1.000.000,00
3	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Bidang Pendapatan III Sesuai SPK No.026/SPK-P4D/BAPENDA/X/2025 & BAP No.030.02/BAP/BAPENDA/X/2025 Pada BapendaKab.Majene (Sumber Dana : PAD Opsen PKB) Sesuai SPD No. 800/7531/LP-SPD/BKAD/2025	MUH. AMRAN AMIN / PERCETAKAN KITA	900.000,00
4	Pembayaran Biaya Makanan & Minuman Tamu Kegiatan Bidang Pendapatan III Sesuai SPK No.042/SPK-PPPRD/BAPENDA/XI/2025 & BAP No.046.02/BAP/BAPENDA/XII/2025 Pada Bapenda Kab.Majene Sesuai SPD No. 800/7529/LP-SPD/BKAD/2025 (Sumber Dana : PAD Opsen PKB)	NAHIRAH, SE / CATERING CIBIQI	1.168.000,00
5	Pembayaran Biaya Makanan & Minuman Tamu Kegiatan Bidang Pendapatan III Sesuai SPK No.027/SPK-PPD/BAPENDA/VI/2025 & BAP No.031.02/BAP/BAPENDA/X/2025 Pada Bapenda Kab.Majene Sesuai SPD No. 800/7516/LP-SPD/BKAD/2025 (Sumber Dana : PAD Opsen PKB)	NAHIRAH, SE / CATERING CIBIQI	1.090.000,00
6	Pembayaran Biaya Makanan & Minuman Tamu Kegiatan Bidang Pendapatan III Sesuai SPK No.020.a/SPK-P3D/BAPENDA/VI/2025 & BAP No.024.a.02/BAP/BAPENDA/X/2025 Pada Bapenda Kab.Majene Sesuai SPD No. 800/7517/LP-SPD/BKAD/2025 (Sumber Dana : PAD Opsen PKB)	NAHIRAH, SE / CATERING CIBIQI	1.493.000,00
7	Pembayaran Biaya Makanan & Minuman Tamu Kegiatan Bidang Non PAD Sesuai SPK No.041/SPK-PPPD/BAPENDA/XI/2025 & BAP No.045.02/BAP/BAPENDA/XI/2025 Pada Bapenda Kab.Majene Sesuai SPD No. 800/7520/LP-SPD/BKAD/2025 (Sumber Dana : PAD Opsen PKB)	CATERING ALIZA / NUR AMANAH	1.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
8	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Bidang Pendapatan III Sesuai SPK No.044/SPK-PPOPD/BAPENDA/XI/2025 & BAP No.048.02/BAP/BAPENDA/XII/2025 Pada BapendaKab.Majene (Sumber Dana : PAD Opsen PKB) Sesuai SPD No. 800/7528/LP-SPD/BKAD/2025	MUH. AMRAN AMIN / PERCETAKAN KITA	983.750,00
9	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Bidang Pendapatan I Sesuai SPK No.033/SPK-PPPBDPD/BAPENDA/X/2025 & BAP No.037.02/BAP/BAPENDA/XI/2025 Pada Bapenda Kab.Majene Sesuai SPD No. 800/7526/LP-SPD/BKAD/2025 (Sumber Dana : PAD Opsen PKB)	MUH. AMRAN AMIN / PERCETAKAN KITA	980.000,00
10	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Bidang Pendapatan I Sesuai SPK No.030/SPK-PPKPD/BAPENDA/X/2025 & BAP No.034.02/BAP/BAPENDA/XI/2025 Pada BapendaKab.Majene Sesuai SPD No. 800/7530/LP-SPD/BKAD/2025 (Sumber Dana : PAD Opsen PKB)	MUH. AMRAN AMIN / PERCETAKAN KITA	982.000,00
11	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Bidang Pendapatan I Sesuai SPK No.036/SPK-PKPD/BAPENDA/X/2025 & BAP No.040.02/BAP/BAPENDA/XI/2025 Pada BapendaKab.Majene Sesuai SPD No. 800/7523/LP-SPD/BKAD/2025 (Sumber Dana : PAD Opsen PKB)	MUH. AMRAN AMIN / PERCETAKAN KITA	995.000,00
12	Pembayaran Biaya Bahan Komputer Bid. Pendapatan I Sesuai SPK No.035/SPK-PPPBDPD/BAPENDA/X/2025 & BAP No. 039.02/BAP/BAPENDA/XI/2025 Pada Bapenda Kab.Majene SPD No. 800/7525/LP-SPD/BKAD/2025 (Sumber Dana : PAD Opsen PKB)	MUH. AMRAN AMIN / PERCETAKAN KITA	500.000,00
13	Pembayaran Biaya Cetak & Penggandaan Untuk Bidang Pendapatan I Sesuai SPK No.046/SPK-PPPRD/BAPENDA/XI/2025 & BAP No.050.02/BAP/BAPENDA/XII/2025 Pada Bapenda Kab.Majene Sesuai SPD No. 800/7532/LP-SPD/BKAD/2025 (Sumber Dana : PAD Opsen PKB)	MUH. AMRAN AMIN / PERCETAKAN KITA	996.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
14	Pembayaran Biaya Cetak & Penggandaan Untuk Bidang Pendapatan I Sesuai SPK No.034/SPK-PPPBDPD/BAPENDA/X/2025 & BAP No.038.02/BAP/BAPENDA/XI/2025 Pada Bapenda Kab.Majene Sesuai SPD No. 800/7524/LP-SPD/BKAD/2025 (Sumber Dana : PAD Opsen PKB)	MUH. AMRAN AMIN / PERCETAKAN KITA	500.000,00
15	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Bidang Pendapatan I Sesuai SPK No.045/SPK-PPPRD/BAPENDA/XI/2025 & BAP No.049.02/BAP/BAPENDA/XII/2025 Pada Bapenda Kab.Majene Sesuai SPD No. 800/7522/LP-SPD/BKAD/2025 (Sumber Dana : PAD Opsen PKB)	MUH. AMRAN AMIN / PERCETAKAN KITA	1.950.000,00
16	Pembayaran Biaya Cetak & Penggandaan Untuk Bidang Pendapatan I Sesuai SPK No.037/SPK-PKPD/BAPENDA/X/2025 & BAP No.041.02/BAP/BAPENDA/XI/2025 Pada Bapenda Kab.Majene Sesuai SPD No. 800/7527/LP-SPD/BKAD/2025 (Sumber Dana : PAD Opsen PKB	MUH. AMRAN AMIN / PERCETAKAN KITA	960.000,00
F	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**		9.142.900,00
1	Pembayaran LS Pengawasan Rehabilitasi Tambak Perikanan Air Payau, SPK Nomor : 01/SPK/DKP-PGW/XI/2025 Tanggal 11 November 2025, BAST No : 905/156/BAST/XII/2025, Tgl 09 Desember 2025, SPD No: 800/7684/LP-SPD/BKAD/2025, SumberDanaDAU-PEND	CV. TAQY KONSULTAN	3.207.900,00
2	Pembayaran LS Belanja Biaya Makan dan Minum Tamu dan Pertemuan, Nota Pesanan Nomor : 06/NPP/XII/2025 Tanggal 02 Desember 2025, SPD No: 800/8248\/LP-SPD/BKAD/2025, SumberDana PAD	KIOS VERA	1.240.000,00
3	Pembayaran LS Biaya Pemeliharaan AC Gedung Kantor, Nota Pesanan Nomor : 02/NPB/DKP-MJN/XII/2025 Tanggal 19 Desember 2025, SPD No: 800/8244/LP-SPD/BKAD/2025, SumberDana PAD	MITRA TEHNIK	1.184.000,00
4	Pembayaran LS Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Kegiatan Kantor , Nota Pesanan Nomor : 03/NPD-SEKRET/XII/2025 Tanggal 02 Desember 2025, SPD No: 800/8245/LP-SPD/BKAD/2025, SumberDana PAD	MIRA SENTOSA	613.500,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
5	Pembayaran LS Belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak Untuk Kegiatan Kantor, Nota Pesanan Nomor : 08/NPD-SEKRET/XII/2025 Tanggal 02 Desember 2025, SPD No: 800/8243/LP-SPD/BKAD/2025, SumberDana PAD	MIRA SENTOSA	187.500,00
6	Pembayaran LS Belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak Untuk Kegiatan Kantor, Nota Pesanan Nomor : 08/NPD-SEKRET/XII/2025 Tanggal 02 Desember 2025, SPD No: 800/8243/LP-SPD/BKAD/2025, SumberDana PAD	MIRA SENTOSA	350.000,00
7	Pembayaran LS Belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak Untuk Kegiatan Kantor , Nota Pesanan Nomor : 05/NPD-SEKRET/XII/2025 Tanggal 02 Desember 2025, SPD No: 800/8246/LP-SPD/BKAD/2025, SumberDana PAD	PERCETAKAN KITA	236.000,00
8	Pembayaran LS Belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak Untuk Kegiatan Kantor , Nota Pesanan Nomor : 05/NPD-SEKRET/XII/2025 Tanggal 02 Desember 2025, SPD No: 800/8246/LP-SPD/BKAD/2025, SumberDana PAD	PERCETAKAN KITA	82.500,00
9	Pembayaran LS Belanja Alat/ Bahan Cetak Untuk Kegiatan Kantor , Nota Pesanan Nomor : 07/NPD-SEKRET/XII/2025 Tanggal 02 Desember 2025, SPD No: 800/8249/LP-SPD/BKAD/2025, SumberDana PAD	MIRA SENTOSA	926.500,00
10	Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Perorangan		1.115.000,00
G	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**		5.000.000,00
1	Permintaan pembayaran langsung(LS) Belanja pemeliharaan komputer-personal komputer keg pelayanan pendaftaran penduduk sesuai no SPD 800/7929/LP-SPD/BKAD/2025 Sumber dana PAD	MANAR RISTIAWAN	2.000.000,00
2	Permintaan pembayaran langsung(LS) Belanja pemeliharaan komputer-personal komputer keg pelayanan pendaftaran penduduk sesuai no SPD 800/7925/LP-SPD/BKAD/2025 Sumber dana PAD	MANAR RISTIAWAN	1.500.000,00
3	Permintaan pembayaran langsung(LS) Belanja pemeliharaan komputer-personal komputer keg pelayanan pendaftaran penduduk sesuai no SPD 800/7924/LP-SPD/BKAD/2025 Sumber dana PAD	MANAR RISTIAWAN	1.500.000,00
H	**DINAS KESEHATAN**		2.476.331.471,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Pembayaran LS Desember 2025, 100% Pengadaan Obat PKD, Pada PT. ADYA ARTHA ABADI, SP. No.002/SP-RSP/DK-DAU/XI/2025, Sesuai SPD No.800/7303/LP-SPD/BKAD/2025 dinkes Kab. Majene T.A 2025 Bersumber (DAU) Kesehatan	PT. ADYA ARTHA ABADI	13.072.816,00
2	Pembayaran LS Desember 2025, 100% Pengadaan Obat PKD, Pada PT. SAGARA MEDIKA INDONESIA, SP. No.001/SP-RSP/DK-DAU/XI/2025, Sesuai SPD No.800/7304/LP-SPD/BKAD/2025 dinkes Kab. Majene T.A 2025 Bersumber (DAU) Kesehatan	PT. SAGARA MEDIKA INDONESIA	13.908.880,00
3	Pembayaran LS Desember 2025, Belanja Kertas & Cover, kegiatan Bimtek Integrasi Layanan Primer Kepada Kader diwilayah Kerja PKM, SPD No.800/7319/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025, (DAU) Kesehatan	TOKO PERCETAKAN BPS SABLON	168.000,00
4	Pembayaran LS Desember 2025, Belanja Prabot Kantor RS. PRATAMA SALUTAMBUNG Bulan Nopember 2025, sesuai SPD No.800/7313/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025, Bersumber dana (DAU) Kesehatan	TOKO NURUL CAHAYA	48.417.000,00
5	Pembayaran LS Desember 2025, 100% Pengadaan Obat PKD, Pada PT. DUTA AFIAT, SP. No.003/SP-RSP/DK-DAU/XI/2025, Sesuai SPD No.800/7431/LP-SPD/BKAD/2025 dinkes Kab. Majene T.A 2025 Bersumber (DAU) Kesehatan	PT. DUTA AFIAT	30.665.615,00
6	Pembayaran LS Desember 2025, Insentif Kader Posyandu kelurahan di wilayah kerja Puskesmas Bulan Nopember 2025 bidang kesmas, SPD No.800/6996/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	27.000.000,00
7	Pembayaran LS Desember 2025, Belanja Konsumsi Kegiatan Bimtek Integrasi Layanan Primer pada Kader di Wilayah Kerja PKM Banggae I,II, Lembang & Totoli, SPD No.800/7315/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025, (DAU) Kesehatan	CATERING SIPAMALOLO	12.600.000,00
8	Pembayaran LS Desember 2025, Belanja Uangan Harian & BBM Kegiatan Sosialisasi Perawatan Jangka Panjang bagi Care giver Informasi tgl. 15-28 Mei 2025, SPD No.800/7238/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025, (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.400.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
9	Pembayaran LS Desember 2025, Belanja Cetak Foto copy, kegiatan Bimtek Integrasi Layanan Primer Kepada Kader diwilayah Kerja PKM, SPD No.800/7316/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025, (DAU) Kesehatan	TOKO PERCETAKAN BPS SABLON	246.000,00
10	Pembayaran LS Desember 2025, Perjadin, Konsultasi Operasional, Rapat di dinkes tentang Pemesanan Obat RS. PRATAMA, serta Pemberian Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat, SPD No.800/7656/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025 Bersumber (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	23.710.000,00
11	Pembayaran LS Desember 2025, 100%, Pengadaan Obat PKD Pada PT. SAGARA MEDIKA INDONESIA, SP. No.114/SP/DK-DAU/XI/2025, Sesuai SPD No.800/7816/LP-SPD/BKAD/2025 dinkes Kab. Majene T.A 2025 (DAU) Kesehatan	PT. SAGARA MEDIKA INDONESIA	28.213.360,00
12	Pembayaran LS Desember 2025, Biaya Sewa Instalasi & Pemasangan Instalasi Listrik Kegiatan PMI Kab. Majene, sesuai SPD No.800/7557/LP-SPD/BKAD/2025 dinkes Kab. Majene T.A 2025 Bersumber (DAU) Kesehatan	PALANG MERAH INDONESIA KAB. MAJENE	6.999.000,00
13	Pembayaran LS Desember 2025, Insentif Kader Posyandu kelurahan di wilayah kerja Puskesmas Bulan desember 2025 bidang kesmas, SPD No.800/7849/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	27.000.000,00
14	Pembayaran LS Desember 2025, Belanja Makan & Minum Kegiatan PMI Kab. Majene Bulan Oktober tahun 2025, sesuai SPD No.800/7558/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	t-Bink Cafe & Pustaka	3.000.000,00
15	Pembayaran LS Desember 2025, Honorarium Kegiatan Jumbara & Donor darah PMI Kab. Majene tahun 2025, sesuai SPD No.800/7966/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025 Bersumber dana (DAU) Kesehatan	REK. PENAMPUNGAN GAJI	11.000.000,00
16	Pembayaran LS Bulan Desember 2025, Jasa Tenaga Administrasi untuk Menunjang kegiatan administrasi dinkes, sesuai SPD No.800/7792/LP-SPD/BKAD/2025 dinkes Kab. Majene T.A 2025 bersumber dana (DAU) Kesehatan	PPTK BIDANG KESEHATAN MASYARKAT	19.019.000,00
17	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Tahun 2025 (JUKOR BPK)		2.041.585.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
18	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Tahun 2025 (JUKOR BPK)		163.326.800,00
I	**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN**		3.926.600,00
1	LS 100% Belanja Tagihan Pajak Kendaraan 2025, sesuai dgn DPPA No.DPPA/A.3/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2025 Tgl.21/10/2025 BAP No.900/693.c/BAP/2025 Tgl.18/12/2025 SPD No.800/7749/LP-SPD/BKAD/2025 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber Dana PAD	BEND. PENERIMAAN PEMB. SAMSAT MAJENE (SANRIANI. Y)	2.526.600,00
2	LS 100% Honor Tenaga Penjaga Malam Kantor Bulan Okt-Nov 2025, sesuai dgn SK Bupati No.100.3.3.2/889/XI/TAHUN 2025 Tgl.28/11/2025 BAP No.900/689.c/BAP/2025 Tgl.18/12/2025 SPD No.800/8027/LP-SPD/BKAD/2025Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber DBH Provinsi	MUH. ALDI	700.000,00
3	LS 100% Honor Tenaga Kebersihan Kantor Bulan Okt-Nov 2025, sesuai dgn SK Bupati No.100.3.3.2/889/XI/TAHUN 2025 Tgl.28/11/2025, BAP No.900/688.c/BAP/XII/2025 Tgl.18/12/2025 SPD No.800/8032/LP-SPD/BKAD/2025 Seb.Daf.Rek.Pen.Terlampir Sumber DBH Provinsi.	SAHIBUDDIN	700.000,00
J	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**		75.600.000,00
1	LS Honorarium dan Tunjangan Tenaga Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Bulan Desember Tahun 2025. Sesuai SK No.100.3.3.2/801/X/TAHUN 2025 No.SPD 800/8129/LP SPD/BKAD/2025 DAU PENDIDIKAN	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.400.000,00
2	LS Honorarium dan Tunjangan Tenaga Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Bulan Desember Tahun 2025. Sesuai SK No.100.3.3.2/801/X/TAHUN 2025 No.SPD 800/8129/LP SPD/BKAD/2025 DAU PENDIDIKAN	REK. PENAMPUNGAN GAJI	700.000,00
3	LS Honorarium dan Tunjangan Tenaga Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Bulan Desember Tahun 2025. Sesuai SK No.100.3.3.2/801/X/TAHUN 2025 No.SPD 800/8129/LP SPD/BKAD/2025 DAU PENDIDIKAN	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.950.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
4	LS Honorarium dan Tunjangan Tenaga Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Bulan Desember Tahun 2025. Sesuai SK No.100.3.3.2/801/X/TAHUN 2025 No.SPD 800/8129/LP SPD/BKAD/2025 DAU PENDIDIKAN	REK. PENAMPUNGAN GAJI	750.000,00
5	LS Honorarium dan Tunjangan Tenaga Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Bulan Desember Tahun 2025. Sesuai SK No.100.3.3.2/801/X/TAHUN 2025 No.SPD 800/8129/LP SPD/BKAD/2025 DAU PENDIDIKAN	REK. PENAMPUNGAN GAJI	19.600.000,00
6	LS Honorarium dan Tunjangan Tenaga Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Bulan Desember Tahun 2025. Sesuai SK No.100.3.3.2/801/X/TAHUN 2025 No.SPD 800/8129/LP SPD/BKAD/2025 DAU PENDIDIKAN	REK. PENAMPUNGAN GAJI	22.500.000,00
7	LS Honorarium dan Tunjangan Tenaga Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Bulan Desember Tahun 2025. Sesuai SK No.100.3.3.2/801/X/TAHUN 2025 No.SPD 800/8129/LP SPD/BKAD/2025 DAU PENDIDIKAN	REK. PENAMPUNGAN GAJI	700.000,00
8	LS Honor Operator SIPD (Pertanggung Jawaban dan Operator Keuangan) bulan Oktober s/d November 2025 Sesuai SK : 100.3.3.2/885/XI/Tahun 2025 SPD No.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.000.000,00
9	LS Honorarium dan Tunjangan Tenaga Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Bulan Desember Tahun 2025. Sesuai SK No.100.3.3.2/801/X/TAHUN 2025 No.SPD 800/8128/LP SPD/BKAD/2025 DAU UMUM	REK. PENAMPUNGAN GAJI	19.500.000,00
10	LS Honor Operator SIPD (Pertanggung Jawaban dan Operator Keuangan) bulan Desember 2025)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.500.000,00
K	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		752.407.878,00
1	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan Normalisasi Drainase Kel. Baruga berupa SPPD sesuai ST No. B.800.1.11.1/1025.a/X/2025 & SPPD No. 000.1.2.3/962/SPPD/X/2025 Tgl 08-10/10/2025 serta SPD No. 800/7018/LP-SPD/BKAD/2025 Tanggal 02/12/2025 (Dau Umum)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.214.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
2	Pembyr LS Belanja Jasa 100% DED Pembangunan Gerbang dan Penataan Lods Pedagang Pasar TPI Kontrak No.09.01/SPK-DAU-DED/CK-DPUPR/XI/2025 Tgl.05/11/2025 DPUPR Kab.Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/6982/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.2/12/2025	AKBAR CONSULTANT, CV	97.341.450,00
3	Pembayaran LS 100% Data Base Sanitasi Air Minum Kec. Tammerodo Sendana dan Kec. Tubo Sendana Kontrak No.07.01/SPK.DAU-BD/CK-DPUPR/XI/2025 Tgl.10/11/2025 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU KESEHATAN) SPD No.800/7397/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.8/12/2025.	PARADUTA PRATAMA KONSULTAN, PT	95.518.275,00
4	Pembayaran LS 100% Data Base Sanitasi Air Minum Kecamatan Ulumanda dan Kec. Malunda Kontrak No.08.01/SPK.DAU-BD/CK-DPUPR/XI/2025 Tgl.5/11/2025 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU KESEHATAN) SPD No.800/7400/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.8/12/2025.	ANGKASA GLOBAL CONSULTANT, PT	95.682.000,00
5	Pembayaran LS biaya pengelolaan Normalisasi Drainase Desa Sulai berupa ATK & Penggandaan sesuai SPD No. 800/7379/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 05/12/2025 (DAU UMUM)	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	10.452.703,00
6	Pembyr LS Biaya Pengelolaan Bahu Jalan Kec. Banggae Berupa Honor Sesuai SK. No. 100.3.3.2/626/VIII/2025, DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DBH ROKOK)' SPD No.800/7544/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.9/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.300.000,00
7	Pembyr LS Biaya Pengelolaan Bahu Jalan Kec. Banggae Timur Berupa Honor Sesuai SK. No. 100.3.3.2/626/VIII/2025, DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DBH ROKOK)' SPD No.800/7543/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.9/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.300.000,00
8	Pembyr LS Biaya Pengelolaan Permeliharaan Jalan Ruas Moloku-Passarang Berupa Honor Sesuai SK. No.100.3.3.2/626/VIII/2025, DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DBH ROKOK)' SPD No.800/7540/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.9/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.900.000,00
9	Pembyr LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan Lanjutan Pembangunan Jalan SPN Polda Sulbar Kec. Malunda Berupa Honor Sesuai SK. No. 100.3.3.2/626/VIII/2025, DPUPR Kab. Majene TA.2025.(Dau Pendidikan)' SPD No.800/7541/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.9/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.650.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
10	Pembayaran LS biaya pengawasan Kegiatan Pipanisasi dan Pemasangan Tandon Air berupa Honor sesuai SK No. 100.3.3.2/777/X/TAHUN 2025 Tgl. 24/10/2025 SPD No. 800/7379/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 05/12/2025 (DAU UMUM)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.000.000,00
11	Pembayaran LS biaya pengawasan Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Banggae Timur Honor sesuai SK No. 100.3.3.2/777/X/TAHUN 2025 Tgl. 24/10/2025 SPD No. 800/7452/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 09/12/2025 (DAU UMUM)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.000.000,00
12	Pembayaran LS biaya perencanaan Kegiatan Pipanisasi dan Pemasangan Tandon Air berupa Honor sesuai SK No. 100.3.3.2/777/X/TAHUN 2025 Tgl. 24/10/2025 SPD No. 800/7459/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 09/12/2025 (DAU UMUM)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.000.000,00
13	Pembayaran LS biaya perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Banggae Timur Honor sesuai SK No. 100.3.3.2/777/X/TAHUN 2025 Tgl. 24/10/2025 SPD No. 800/7461/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 09/12/2025 (DAU UMUM)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.000.000,00
14	Pemby. LS belanja Modal Biaya Pengelolaan Pek Operasional Pemeliharaan Irigasi Berupa Honor Sesuai SK Bupati No.100.3.3.2/502/VII/2025 DPUPR. (DAU UMUM) SPD No.800/7533/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.09/12/2025. Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	19.400.000,00
15	Pembayaran LS biaya Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Banggae Timur Honor sesuai SK No. 100.3.3.2/777/X/TAHUN 2025 Tgl. 24/10/2025 SPD No. 800/7458/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 09/12/2025 (DAU UMUM)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.000.000,00
16	Pembayaran LS Tahap III 100% Biaya Operasional Pemeliharaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kontrak No. 01.02/SPK.SWAKELOLA-AM/CK-DPUPR/VIII/2025 Tgl.14/8/2025 Dinas PUPR Kab.Majene TA.2025.(Dana PAD)' SPD No.800/7827/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.17/12/2025.	PPTK BIDANG CIPTA KARYA DINAS PUPR MAJENE	70.448.800,00
17	Pembyr. (100%) Pek. Jasa Konsultan Pengawas Bahu Jalan Kec. Banggae Kontrak No. 03.02/SPK-SUPERVISI/BM-DPUPR/IX/2025 Tgl. 30/09/2025 BAST 08.01.282/BAST-BM/DPUPR/XII/2025 SPD No. 800/7536/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 09/12/2025 (DBH ROKOK)	TAQY KONSULTAN, CV	5.183.739,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
18	Pembyr. (100%) Pek. Jasa Konsultan Lanjutan Pembangunan Jalan SPN Polda Sulbar Kec. Malunda Kontrak No. 02.02/SPK-SUPERVISI/BM-DPUPR/IX/2025 Tgl. 30/09/2025 BAST 08.01.81/BAST-BM/DPUPR/XII/2025 SPD No. 800/7401/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 08/12/2025 (DBH ROKOK)	RESOPA DEWATA KONSULTAN,CV	8.800.080,00
19	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Perencanaan Perintisan Jalan Kelurahan Sirindu Lingk Sirindu-Lingk Udzung Kontrak No.35.02/SPK-DED/BM-DPUPR/IX/2025 Tgl.25/9/2025 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM) SPD No.800/7307/LP-SPD/BKAD/2025.	TAQY KONSULTAN, CV	3.929.400,00
20	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan Normalisasi Drainase Desa Tammeroddo Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7821/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.17/17/2025	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	10.395.270,00
21	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan Kegiatan DED Pembangunan Prasarana Pemerintahan (PRASPEM) Kab. Majene Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU PENDIDIKAN) SPD No.800/7161/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.3/12/2025.TERLAMPIR	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.999.500,00
22	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (ATK,Bahan Cetak dan Penggandaan) Kegiatan DED Penataan Kawasan Kumuh Di Malunda Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU PENDIDIKAN) SPD No.800/7159/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.3/12/2025.	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.999.000,00
23	Pembayaran Biaya Pengelolaan (ATK & Penggandaan) Kegiatan Stock Design Long Segmen Jalan Kabupaten I Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DBH PUSAT) SPD No.800/7936/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025.Sesuai Nota TERLAMPIR	TOKO ALFA REZA (TASMAN, S.Pd)	1.700.000,00
24	Pembayaran Biaya Pengelolaan (ATK & Penggandaan) Kegiatan Bahu Jalan Kec. Banggae Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DBH ROKOK) SPD No.800/7935/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025.Sesuai Nota TERLAMPIR	TOKO ALFA REZA (TASMAN, S.Pd)	2.100.000,00
25	Pembayaran LS Berupa Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan Oktober-November 2025 Sesuai SK No.100.3.3.2/540/VII/2025 Tgl.18/7/2025 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DBH PROV) SPD No.800/8009/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.500.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
26	Pembayaran Biaya Pengelolaan (ATK & Penggandaan) Kegiatan Bahu Jalan Kec. Banggae Timur Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DBH ROKOK) SPD No.800/7938/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025.Sesuai Nota TERLAMPIR	TOKO ALFA REZA (TASMAN, S.Pd)	1.100.000,00
27	Pembayaran Biaya Pengelolaan (ATK & Penggandaan) Kegiatan Stock Design Long Segmen Jalan Kabupaten II Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DBH PUSAT) SPD No.800/7937/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025.Sesuai Nota TERLAMPIR	TOKO ALFA REZA (TASMAN, S.Pd)	1.700.000,00
28	Pembyr LS Biaya Pengelolaan Kegiatan DED Bangunan dan Pemukiman (BANGKIM) Kec. Ulumanda Berupa ATK (Kertas & Cover), Bahan Cetak, Bahan Komputer, DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU PENDIDIKAN)' SPD No.800/7166/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.3/12/2025.Terlampir	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.999.500,00
29	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan Kegiatan DED Peningkatan Kawasan Kumuh Perkoataan (PBL) Di Banggae Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU PENDIDIKAN) SPD No.800/7157/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.3/12/2025.TERLAMPIR	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.999.500,00
30	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan Kegiatan DED Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Di Pamboang Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU PENDIDIKAN) SPD No.800/7156/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.3/12/2025.TERLAMPIR	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.999.500,00
31	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (ATK,Kertas & Cover,Bahan Cetak dan Bahan Komputer) Keg. DED Optimalisasi Penyedian Air Minum (PAM) Dalam Kota Majene Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU PENDIDIKAN) SPD No.800/7162/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.3/12/2025.TERLAMPIR	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.999.800,00
32	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (ATK,Kertas & Cover,Bahan Cetak dan Bahan Komputer) Kegiatan DED Pengembangan Prasarana Pemukiman Kab. Majene Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU PENDIDIKAN) SPD No.800/7151/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.3/12/2025.TERLAMPIR	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.960.000,00
33	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan Kegiatan DED Peningkatan Kawasan Kumuh Perkoataan (PBL) Di Banggae Timur Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU PENDIDIKAN) SPD No.800/7158/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.3/12/2025.TERLAMPIR	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.999.500,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
34	Pembyr LS Biaya Pengelolaan Berupa ATK (Kertas & Cover), Bahan Cetak, Bahan Komputer Keg. Normalisasi Drainase Kel. Malunda Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7180/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.4/12/2025. Nota Pesanan Terlampir.	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	3.004.000,00
35	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (ATK, Kertas & Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer) Kegiatan DED Kawasan Pariwisata Desa Betteng Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU PENDIDIKAN) SPD No.800/7165/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.3/12/2025.TERLAMPIR	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.999.500,00
36	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan Berupa ATK, Bahan Cetak dan Bahan Komputer Keg. Normalisasi Drainase Kel. Mosso Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7150/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.3/12/2025. Nota2 Terlampir	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	4.004.000,00
37	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (ATK,Kertas & Cover,Bahan Cetak dan Bahan Komputer) Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU PENDIDIKAN) SPD No.800/7152/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.3/12/2025.TERLAMPIR	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	4.813.000,00
38	Pembyr LS Biaya Pengelolaan Berupa ATK (Kertas & Cover), Bahan Cetak, Bahan Komputer Keg. Normalisasi Drainase Kel. Tande DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU KESEHATAN)' SPD No.800/7153/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.3/12/2025. Nota Pesanan Terlampir	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	4.059.000,00
39	Pembyr LS Biaya Pengelolaan DED Kawasan Pariwisata Moloku Kec. Banggae Berupa ATK (Kertas & Cover), Bahan Cetak, Bahan Komputer, DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU PENDIDIKAN)' SPD No.800/7164/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.3/12/2025.Nota2 Terlampir	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.999.500,00
40	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan Berupa ATK, Bahan Cetak dan Bahan Komputer Keg. DED Kawasan Pariwisata Padzang Padzang Kec. Banggae Timur Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU PENDIDIKAN) SPD No.800/7163/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.3/12/2025. Nota2 Terlampir	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.999.500,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
41	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan Kegiatan DED RISPK (Rencana Induk Pemadam Kebakaran) Kec. Ulumanda Kab. Majene, Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU PENDIDIKAN)' SPD No.800/7155/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.3/12/2025.Terlampir	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.999.500,00
42	Pmbyrn LS Biaya Pengelolaan DED Penanganan Banjir Dalam Kota Majene berupa ATK & Penggandaan sesuai SPD No. 800/7822/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 17/12/2025 (DAU PEND)	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.999.000,00
43	Pembyrn LS Biaya Pengelolaan Normalisasi dan Rehabillitasi Drainase Pasar TPI berupa SPPD sesuaiSPPD No. 000.1.2.3/706/SPPD/VIII/2025 Tgl 26/08/2025 & SPD No. 800/7956/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl23/12/2025 (DAU KES)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.693.600,00
44	Pemby LS Biaya Pengelolaan Normalisasi Drainase Kel. Labuang Utara (SPPD) sesuai SPPDNo. 000.1.2.3/1194/SPPD/XI/2025 Tgl 14/11/2025 & SPD No. 800/7944/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl 23/12/2025(DAU KES)	MUHAMMAD MUFLI	3.450.000,00
45	Pembyrn LS Biaya Pengelolaan Normalisasi Drainase Kel. Lalampanua berupa SPPD sesuai SPPDNo. 000.1.2.3/1332/SPPD/XII/2025 Tgl 10/11/2025 & SPD No. 800/7955/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl23/12/2025 (DAU KES)	MUHAMMAD MUFLI	7.415.185,00
46	Pembyrn LS Biaya Pengelolaan Normalisasi Drainase Kel. Banggae berupa SPPD sesuai SPPDNo. 000.1.2.3/1377/SPPD/XII/2025 Tgl 14/11/2025 & SPD No. 800/7947/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl23/12/2025 (DAU KES)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.378.600,00
47	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (SPPD) Kegiatan SLBM Kecamatan Tubo Sendana Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU KESEHATAN) SPD No.800/7949/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025.Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	960.000,00
48	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (SPPD) Kegiatan SLBM Kecamatan Pamboang Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU KESEHATAN) SPD No.800/7954/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025.Sesuai Surat Tugas & SPPD Terlampir.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	640.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
49	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (SPPD) Kegiatan SLBM Kecamatan Banggae Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU KESEHATAN) SPD No.800/7951/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025.Sesuai Surat Tugas & SPPD Terlampir.	REK. PENAMPUNGAN GAJI	640.000,00
50	Pembyr LS Biaya Pengelolaan SLBM Kecamatan Malunda Berupa SPPD Sesuai ST No.000.1.2.3/1062/ST/X/2025, Tgl28/10/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU KES)' SPD No.800/7953/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	640.000,00
51	Pembyr LS Biaya Pengelolaan SLBM Kecamatan Ulumanda Berupa SPPD Sesuai ST No.000.1.2.3/951/ST/X/2025, Tgl.01/10/2025, DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU KES)' SPD No.800/7948/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	960.000,00
52	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan Normalisasi Drainase Kel. Baru Berupa SPPD Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU KES)' SPD No.800/7946/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025. ST & SPPD Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.309.900,00
53	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (SPPD) Kegiatan SLBM Kecamatan Banggae Timur Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU KESEHATAN) SPD No.800/7952/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025.Sesuai Surat Tugas & SPPD Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	640.000,00
54	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (SPPD) Kegiatan SLBM Kecamatan Tammeroddo Sendana Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU KESEHATAN) SPD No.800/7950/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025. Sesuai Surat Tugas dan SPPD Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	960.000,00
55	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan Normalisasi drainase Pertigaan Jln. Hertasning, Jln Kh. Muh Saleh Depan Kantor Kelurahan,Jln. Saleh Banjar (SPPD) DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU PENDIDIKAN)' SPD No.800/8230/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025.Terlampir	AMIRUDDIN	5.868.000,00
56	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (SPPD) Kegiatan Data Base Sanitasi dan Air Minum Banggae dan Banggae Timur Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU KESEHATAN) SPD No.800/7941/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025. Surat Tugas & SPPD Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.909.600,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
57	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (SPPD) Kegiatan Data Base Sanitasi Air Minum Kec. Tammerodo Sendana dan Kec. Tubo Sendana Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU KESEHATAN) SPD No.800/7943/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025. Surat Tugas & SPPD Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.909.600,00
58	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (SPPD) Kegiatan Data Base Sanitasi dan Air Minum Kec. Pamboang dan Kec. Sendana Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU KESEHATAN) SPD No.800/7940/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025.Surat Tugas dan SPPD Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.909.600,00
59	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NIRWANA MJSTAKIM, SE	3.750.000,00
60	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	H. MUH. MUFLI, ST., MT	7.911.000,00
61	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	A. ABUL AL'LA AL MAUDUDI, SE., MM	8.085.000,00
62	Bahu Jalan Ruas Lembang	ASMAWAN, ST	5.328.000,00
63	Bahu Jalan Ruas Leppe	ASMAWAN, ST	3.973.800,00
64	Bahu Jalan Ruas Pangale	ASMAWAN, ST	3.973.800,00
65	Bahu Jalan Ruas Pappota	ASMAWAN, ST	3.973.800,00
66	Bahu Jalan Kec. Banggae	MUHAMMAD MUSA	5.183.739,00
67	Bahu Jalan Kec. Banggae Timur	MUHAMMAD MUSA	4.480.000,00
68	[-] Biaya Pengawasan Bahu Jalan Ruas Barane	ASMAWAN, ST	5.328.000,00
69	Penyusunan Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) Kab. Majene	TASMAN, S.Pd	1.802.822,00
70	Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Rattepada Desa Awo	HASLIAH, S.IP	3.947.815,00
71	Normalisasi Drainase/ Saluran Pasar TPI	TASMAN, S.Pd	5.735.000,00
72	MC. 01 Pemb. Rumah Dinas Danramil Sesuai Kontrak 18,02/SPK-OPKB.BG/CK-DPUPR/XI/2-25 TGl. 28 November 2025 Biadang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Majene	MUH. JABIR	40.367.250,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
73	Retensi 5% Pemb. Rumah Dinas Danramil Sesuai Kontrak 18,02/SPK-OPKB.BG/CK-DPUPR/XI/2-25 TGl. 28 November 2025 Biadang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Majene	MUH. JABIR	4.485.250,00
74	Pemb. Rumah Dinas Danramil	ADILYAH EFFENDI. SE., M.Si	8.190.000,00
75	Pembangunan Gedung Klinik Polres	HASLIAH, S.IP	8.034.300,00
76	Operasional dan Pemeliharaan Pantai	H. SYAMSUL MAARIF. ST	23.025.000,00
77	Operasional dan Pemeliharaan Sungai	H. SYAMSUL MAARIF. ST	31.879.000,00
78	Operasional Pemeliharaan Irigasi	MUMAMMAH MUFLI. ST., MT	10.521.200,00
79	Master Plan Jaringan Irigasi Kec. Sendana	H. SYAMSUL MAARIF. ST	1.960.000,00
80	Master Plan Jaringan Irigasi Kec. Tubo	H. SYAMSUL MAARIF. ST	1.870.000,00
81	Master Plan Jaringan Irigasi Kec. Ulumanda	H. SYAMSUL MAARIF. ST	1.870.000,00
L	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK**		52.847.400,00
1	BIAYA PERJALANAN DINAS KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN KOTA, SPD 800/7673/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN TA 2025.	REK PENAMPUNGAN GAJI	3.200.000,00
2	BIAYA PERJALANAN DINAS KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN KOTA, SPD 800/7694/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN TA 2025.	REK PENAMPUNGAN GAJI	19.807.300,00
3	BIAYA PERJALANAN DINAS KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN KOTA, SPD 800/7672/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU UMUM TA 2025.	REK PENAMPUNGAN GAJI	29.840.100,00
M	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**		300.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Pembayaran Langsung Belanja Jasa Tenaga Operator SPBE Untuk Bulan Oktober dan November Sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor:100.3.3.2/865/XI/Tahun 2025 Sesuai SPD Nomor:800/8138/LP-SPD/BKAD/2025 Sumber Da	FIRMANSYAH	300.000,00
N	**DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA**		211.953.560,00
1	LS Pembayaran 100% Atas Kegiatan Pengawasan (Pembangunan Pagar TK Sekolah PAUD) Berdasarkan SPK No. 46/SPK-PENUN/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025, SPD 800/7120/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana :DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	2.475.300,00
2	LS Pembayaran 100% Atas Kegiatan Pengawasan (Rehabilitasi Ruang Belajar TK Kartini Lembang) Berdasarkan SPK No. 50/SPK-PENUN/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/XI/2025 Tanggal 11 November 2025, SPD 800/7117/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana :DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	1.222.143,00
3	LS Pembayaran 100% Keg. Pengawasan Rehab.Ruang Keterampilan SMPN Islam PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JIHAD TANDE Berdasarkan SPK No.01.169/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025Tgl 28 Oktober 2025, SPD 800/7136/LP-SPD/BKAD/2025.(SD:DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	2.941.000,00
4	LS Pembayaran 100% Keg. Pengawasan Rehab.Kantor Ruang Guru SMPN Islam PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JIHAD TANDE Berdasarkan SPK No.01.160/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025Tgl 28 Oktober 2025, SPD 800/7135/LP-SPD/BKAD/2025.(SD:DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	1.693.000,00
5	LS Pembayaran 100% Atas Kegiatan Pengawasan (Rehab Gedung TK Tammalarada Desa Tammerodo) Berdasarkan SPK No. 38/SPK-PENUN/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/IX/2025 Tanggal 23 September 2025, SPD 800/7115/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana :DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	3.674.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
6	LS Pembayaran 100% Atas Kegiatan Pengawasan (Pembangunan Pagar TK Limboro Ceria) Berdasarkan SPK No. 40/SPK-PENUN/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025, SPD 800/7124/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana :DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	1.237.650,00
7	LS Pembayaran 100% Atas Kegiatan Pengawasan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya TK Kartini Berdasarkan SPK No. 43/SPK-PENUN/PAUD-PNF/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025, SPD 800/7119/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana :DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	1.443.000,00
8	LS Pembayaran 100% Atas Kegiatan Pengawasan (Pembangunan Pagar TK Plamboyan Samalio) Berdasarkan SPK No. 41/SPK-PENUN/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025, SPD 800/7122/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana :DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	1.237.650,00
9	LS Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator & Panitia Keg. Gebyar Pentas Seni PAUD, Sesuai SK Bupati No.100.3.3.2/385/IX/TAHUN 2025 Tanggal 10 Juni 2025,SPD 800/7189/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana:DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.300.000,00
10	LS Pembayaran 100% Keg. Pengawasan Rehab.Perpustakaan SMPN Islam PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JIHAD TANDE Berdasarkan SPK No.01.184/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025Tgl 30 Oktober 2025, SPD 800/7336/LP-SPD/BKAD/2025.(SD:DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	2.497.000,00
11	LS Pembayaran 100% Atas Kegiatan Pengawasan (Pembangunan Ruang UKS TK IDHATA CAMBA) Berdasarkan SPK No. 54/SPK-PENUN/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/XI/2025 Tanggal 26 November2025, SPD 800/7845/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana :DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	2.442.000,00
12	LS Pembayaran 100% Atas Kegiatan Pengawasan (Rehabilitasi Ruang Kelas TK Kuncup Mekar Baurung) Berdasarkan SPK No. 52/SPK-PENUN/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/XI/2025 Tanggal 11 November2025, SPD 800/7847/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana :DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	1.222.110,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
13	LS Pembayaran Biaya Komsumsi Pada Kegiatan Apresiasi Bunda PAUD, SPD 800/7834/LP-SPD/BKAD/2025. Nota Pesanan Terlampr (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	FACHITA / KIOS VERA	9.179.000,00
14	LS Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan Kegiatan Apresiasi Bunda PAUD , SPD 800/7833/LP-SPD/BKAD/2025. Nota Pesanan Terlampir (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	NF COFFEE & RESTO (HUSNI)	3.000.000,00
15	LS Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Sekolah (ASESMEN) SD, Sesuai Surat Tugas No. T.800.1.11.1/96/IX/2025 Tanggal 19 September 2025 ,SPD 800/7559/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	8.700.000,00
16	LS Pembayaran Kegiatan Biaya Pengelolaan Rehabilitasi Gedung Keterampilan SMP(Biaya ATK) Berdasarkan SPMK No. 01.17/PENUN/SPMK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2025 Tanggal 17 November 2025, SPD 800/7610/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	TOKO SINAR ILMU	3.000.295,00
17	LS Pembayaran Kegiatan Biaya Pengelolaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP(Biaya ATK) Berdasarkan SPMK No. 01.16/PENUN/SPMK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2025 Tanggal 17 November 2025, SPD 800/7612/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	TOKO SINAR ILMU	2.499.790,00
18	LS Pembayaran Kegiatan Biaya Pengelolaan Rehabilitasi Kantor / Ruang Guru SMP(Biaya ATK) Berdasarkan SPMK No. 01.20/PENUN/SPMK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2025 Tanggal 17 November 2025, SPD 800/7611/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	TOKO SINAR ILMU	1.749.032,00
19	LS Pembayaran Honorarium Narasumber,Moderator & Panitia Keg. Penyelenggaraan Ujian Sekolah (ASESMEN) SD,SK Bupati No.100.3.3.2/296/IV/TAHUN 2025 Tanggal 29 April 2025,SPD 800/7561/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.000.000,00
20	LS Pembayaran 100% Atas Kegiatan Pengawasan (Pembangunan Toilet TK COKROAMINOTO TANGNGA-TANGNGA) Berdasarkan SPK No.53/SPK-PENUN/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/XI/2025 Tanggal 20 November2025, SPD 800/7848/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana :DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	1.498.500,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
21	LS Pembayaran 100% Atas Kegiatan Pengawasan (Rehab Ruang Kelas TK Nurul Ilmi Pamenggalan) Berdasarkan SPK No. 51/SPK-PENUN/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/XI/2025 Tanggal 11 November 2025, SPD 800/7116/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana :DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	2.442.000,00
22	LS Pembayaran Kegiatan Biaya Pengelolaan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMP (Biaya ATK) Berdasarkan SPMK No. 01.15/PENUN/SPMK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2025 Tanggal 17 November 2025, SPD 800/7609/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	TOKO SINAR ILMU	2.499.790,00
23	LS Pembayaran Honorarium Narasumber,Moderator & Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Sekolah (ASESMEN) SD,SK Bupati No.100.3.3.2/296/IV/TAHUN 2025 Tanggal 29 April 2025,SPD 800/7472/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	16.800.000,00
24	LS Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyusunan CP Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah Mandar Tingkat SMP, Sesuai Surat Tugas No. T.800.1.11.1/62/2025 Tanggal 21 Juli 2025 ,SPD 800/7481/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.040.000,00
25	LS Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator & Panitia Kegiatan Pembelajaran Sekolah Inklusi,SK Bupati No.100.3.3.2/372/VI/TAHUN 2025 Tanggal 2 Juni 2025,SPD 800/7474/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana:DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.600.000,00
26	LS Pembayaran Honorarium Narasumber,Moderator & Panitia Keg. Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kecamatan Malunda dan Ulumanda,SK Bupati No.100.3.3.2/374/VI/TAHUN 2025 Tanggal 2 Juni 2025,SPD 800/7469/LP-SPD/BKAD/2025.(SD : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.750.000,00
27	LS Pembayaran Biaya Alat Tulis Kantor, Bahan Cetak dan Bahan Komputer Pada Kegiatan Apresiasi Bunda PAUD T.A 2025, SPD 800/7777/LP-SPD/BKAD/2025. Nota Pesanan Terlampr (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PERCETAKAN KITA	2.795.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
28	LS Pembayaran Biaya Alat Tulis Kantor, Bahan Cetak dan Bahan Komputer Pada Kegiatan Apresiasi Bunda PAUD T.A 2025, SPD 800/7777/LP-SPD/BKAD/2025. Nota Pesanan Terlampr (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PERCETAKAN KITA	1.875.000,00
29	LS Pembayaran Biaya Alat Tulis Kantor, Bahan Cetak dan Bahan Komputer Pada Kegiatan Apresiasi Bunda PAUD T.A 2025, SPD 800/7777/LP-SPD/BKAD/2025. Nota Pesanan Terlampr (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PERCETAKAN KITA	560.000,00
30	LS Pembayaran 100% Atas Kegiatan Pengawasan (Rehabilitasi Ruang UKS TK Kuncup Mekar Baurung) Berdasarkan SPK No. 42/SPK-PENUN/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025, SPD 800/7846/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana :DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	2.475.300,00
31	LS Pembayaran Honorarium Narasumber,Moderator & Panitia Kegiatan Pengimbasan Kurikulum Merdeka Tingkat SD ,SK Bupati No.100.3.3.2/374/VI/TAHUN 2025 Tanggal 2 Juni 2025,SPD 800/7471/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.750.000,00
32	LS Pembayaran Honorarium Narasumber,Moderator & Panitia Kegiatan Pengimbasan Kurikulum Merdeka Tingkat SMP ,SK Bupati No.100.3.3.2/374/VI/TAHUN 2025 Tanggal 2 Juni 2025,SPD 800/7470/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.750.000,00
33	LS Pembayaran Honorarium Narasumber,Moderator & Panitia Keg. Penyusunan CP Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah Mandar Tingkat SMP,SK Bupati No.100.3.3.2/374/VI/TAHUN 2025 Tanggal 2 Juni 2025,SPD 800/7468/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.750.000,00
34	LS Pembayaran Honorarium Narasumber,Moderator & Panitia Keg. Penyelenggaraan Ujian Sekolah (ASESMEN) SMP,SK Bupati No.100.3.3.2/296/IV/TAHUN 2025 Tanggal 29 April 2025,SPD 800/7475/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.000.000,00
35	LS Pembayaran Honorarium Narasumber,Moderator & Panitia Keg. Penyelenggaraan Ujian Sekolah (ASESMEN) SMP,SK Bupati No.100.3.3.2/296/IV/TAHUN 2025 Tanggal 29 April 2025,SPD 800/7560/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.900.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
36	LS Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengimbasan Kurikulum Merdeka Tingkat SD, Sesuai Surat Tugas No. T.800.1.11.1/54/2025 Tanggal 15 Juli 2025 ,SPD 800/7478/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.880.000,00
37	LS Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengimbasan Kurikulum Merdeka Tingkat SMP, Sesuai Surat Tugas No. T.800.1.11.1/56/2025 Tanggal 15 Juli 2025 ,SPD 800/7479/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.360.000,00
38	LS Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembelajaran Sekolah Inklusi, Sesuai Surat Tugas No. T.800.1.11.1/67/2025 Tanggal 23 Juli 2025 ,SPD 800/7476/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.700.000,00
39	LS Pembayaran Honororium Narasumber,Moderator,Pembawa Acara &Panitia Keg.Pemanfaatan Aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM), SK Bupati No.100.3.3.2/905/XII/TAHUN 2025 Tgl 4 Desember 2025,SPD 800/8232/LP-SPD/BKAD/2025.(SD :DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.900.000,00
40	LS Pembayaran Honororium Narasumber,Moderator,Pembawa Acara & Panitia Keg.Pembayaran Keg. Pemanfaatan Aplikasi Dapodik Bagi Sekolah Dasar,SK Bupati No.100.3.3.2/905/XII/TAHUN 2025 Tgl 4 Desember 2025,SPD 800/8235/LP-SPD/BKAD/2025.(SD : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.300.000,00
41	LS Pembayaran Honororium Narasumber,Moderator,Pembawa Acara & Panitia Keg.Identifikasi Pemahaman Terkait Pembelajaran Siswa Disabilitas, SK Bupati No.100.3.3.2/945/XII/TAHUN 2025 Tgl 23 Desember 2025,SPD 800/8236/LP-SPD/BKAD/2025.(SD : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.400.000,00
42	LS PembayaranHonororium Narasumber,Moderator,Pembawa Acara &Panitia Keg.Peningkatan Literasi dan Numerasi Digital Bagi Tenaga Pendidik, SK Bupati No.100.3.3.2/916/XII/TAHUN 2025 Tgl 8 Desember 2025,SPD 800/8234/LP-SPD/BKAD/2025.(SD :DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.225.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
43	LS Pembayaran Honororium Narasumber,Moderator,Pembawa Acara &Panitia Keg Kegiatan Penggunaan Awan Penggerak, SK Bupati No.100.3.3.2/905/XII/TAHUN 2025 Tgl 4 Desember 2025,SPD 800/8231/LP-SPD/BKAD/2025.(SD :DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	9.450.000,00
44	LS Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota Keg. Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kecamatan Malunda & Ulumanda,Sesuai Surat Tugas No.T.800.1.11.1/60/2025 Tanggal 15 Juli 2025,SPD 800/7480/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana :DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.040.000,00
45	LS Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Analisis Capaian Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (SPM), Sesuai Surat Tugas No. 800.1.11.1/58/2025 Tanggal 18 Juli 2025, SPD 800.7477/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PPTK Bidang Dikdas	3.700.000,00
O	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		127.299.996,00
1	Belanja Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan KKK (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA BKB KIT Stunting Dengan No. SPD 800/7835/LP-SPD/BKAD/2025 Sumber Dana BOKB Dak Non Fisik Tahun 2025	PT. MAHKOTA AMELIA MANDIRI/ADE IRWANSYAH	127.299.996,00
P	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**		400.000,00
1	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Operator SIRUP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Untuk Bulan Oktober s/d November T.A 2025.Nomor SPD 800/8071/LP-SPD/BKAD/2025.Sumber Dana DBH PROV	NURNOPITASARI	400.000,00
Q	**DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**		294.774.240,00
1	Pembayaran Atas Pekerjaan Pengawasan Perintisan Jalan Tani Desa Ulumanda Kec. Ulumanda pd Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi, dan PemeliharaanJalan Usaha Tani. SPD No: 800/8164/LP-SPD/BKAD/2025. Sumber Dana DBH PROV	MUHAMMAD MUSA (CV.TAQY KONSULTAN)	2.956.700,00
2	Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga pd Sub Keg Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortkultura, dan Perkebunan. SPD No: 800/7967/LP-SPD/BKAD/2025, tanggal 23 Desember 2025, Sumber Dana PAD	YULI ANNISA (CV. HAJAR HASWAT)	58.650.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
3	Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bibit Alvokat pd Sub Keg Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. SPD No: 800/7968/LP-SPD/BKAD/2025, tgl 23 Desember 2025, Sumber Dana PAD	IR. MUH. ISKANDAR FATONY (CV. HERONUSA MANDARA)	57.989.800,00
4	Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bibit Durian Musang King pd Sub Keg Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. SPD No: 800/7969/LP-SPD/BKAD/2025, tgl 23 Desember 2025, Sumber Dana PAD	YULI ANNISA (CV. HAJAR HASWAT)	81.240.600,00
5	Pembayaran Retensi 95% atas Pekerjaan Perintisan Jalan Tani Desa Ulumanda Kec. Ulumanda pd Sub Keg Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani. SPD No: 800/8153/LP-SPD/BKAD/2025, tgl 23 Desember 2025, Sumber Dana DBH PROV	MUH. ASCHAR (CV. SUMBER CAHAYA RAHMAT)	85.215.000,00
6	Pembayaran Retensi 5% atas Pekerjaan Perintisan Jalan Tani Desa Ulumanda Kec. Ulumanda pd Sub Keg Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani. SPD No: 800/8154/LP-SPD/BKAD/2025, tgl 23 Desember 2025, Sumber Dana DBH PROV	MUH. ASCHAR (CV. SUMBER CAHAYA RAHMAT)	4.485.000,00
7	Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Keg Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Horikultura, dan Perkebunan. SPD No: 800/8163/LP-SPD/BKAD/2025. Sumber Dana PAD	HJ. MASLIAN, SP	4.237.140,00
R	**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**		4.445.000,00
1	Pembayaran Biaya Pengawasan Pengadaan PJU sesuai SPK No. B.600.2.10.2/1054.b/XI/2025 Tgl. 25/11/2025 & SPD No. 800/7746/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 16/12/2025 Dinas Perkimtan (Sumber Dana : DAU UMUM)	AFINRA KONSULINDO, CV	1.480.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: B.900.1.3.6/1106.k/X/2025. Kontrak No: B-600.2.10.2/923.a/X/2025. Tanggal 17 Oktober 2025. Inoice CV. Afinra Konsulindo tanggal 22 Januari 2026	AFINRA KONSULINDO, CV	1.485.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: B.900.1.3.6/1106.k/XII/2025. Kontrak No: B-600.2.10.2/995.a/XI/2025. Tanggal 6 November 2025. Inoice CV. Afinra Konsulindo tanggal 22 Januari 2026	AFINRA KONSULINDO, CV	1.480.000,00
S	**DINAS SOSIAL**		67.057.500,00
1	PEMBAYARAN JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL DENGAN SK NOMOR :100.3.3.2/786/X/TAHUN 2025 DENGAN SPD NOMOR : 800/7407/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	1.500.000,00
2	PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL DENGAN SK NOMOR : 100.3.3.2/787/X/TAHUN 2025 DENGAN SPD NOMOR : 800/7409/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN.	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	1.500.000,00
3	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA/DALAM DAERAH TAHUN 2025 DENGAN SPD NOMOR : 800/7231/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	2.400.000,00
4	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA/DALAM DAERAH TAHUN 2025 DENGAN SPD NOMOR : 800/7236/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	960.000,00
5	PEMBAYARAN KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DENGAN SPK NOMOR : 450/372.1/11/2025 ,BAP NOMOR: 450/415/12/2025 DAN SPD NOMOR : 800/6696/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2025	PERKUMPULAN PEMUDA ASSAMALEWUANG SULBAR	44.790.000,00
6	PEMBAYARAN BLANJA MAKAN MINUM RAPAT DENGAN NOTA PESANAN PEMBELIAN NOMOR: 800/348.1/2025 DAN SPD NOMOR: 800/6694/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2025	NURUL HUDA	470.000,00
7	PEMBAYARAN BELANJA ATK COVER DAN CETAK DENGAN NOTA PESANAN PEMBELIAN BARANG NOMOR : 800/368.1/11/2025 DAN SPD NOMOR 800/6707/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN	SAHABAT ATK	90.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
8	PEMBAYARAN BELANJA ATK COVER DAN CETAK DENGAN NOTA PESANAN PEMBELIAN BARANG NOMOR : 800/368.1/11/2025 DAN SPD NOMOR 800/6707/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN	SAHABAT ATK	230.000,00
9	PEMBAYARAN BELANJA ATK COVER DAN CETAK DENGAN NOTA PESANAN PEMBELIAN BARANG NOMOR : 800/368.1/11/2025 DAN SPD NOMOR 800/6707/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN	SAHABAT ATK	90.000,00
10	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS TETAP (LUAR DAERAH) MAKASSAR DENGAN SPD NOMOR : 800/7591/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU UMUM DINAS SOSIAL T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	9.200.000,00
11	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM KOATA/DALAM DAERAH DENGAN SPD NOMOR : 800/7854/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	960.000,00
12	PEMBAYARAN BEANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT DENGAN NOTA PESANAN NOMOR: 885.1/800/XII/2025 TANGGAL 4 DESEMBER 2025 DAN SPD NOMOR :800/7903/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2025	NURUL HUDA	470.000,00
13	PEMBAYARAN BELANJA ATK DAN CETAK DENGAN SPD NOMOR : 800/7904/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2025	SAHABAT ATK	90.000,00
14	PEMBAYARAN BELANJA ATK DAN CETAK DENGAN SPD NOMOR : 800/7904/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2025	SAHABAT ATK	57.500,00
15	PEMBAYARAN BELANJA ATK DAN CETAK DENGAN SPD NOMOR : 800/7904/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2025	SAHABAT ATK	250.000,00
16	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA/DALAM DAERAH DENGAN SPD NOMOR : 800/7855/LP-SPD/BKAD/2025 SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN DINAS SOSIAL T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	4.000.000,00
T	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**		75.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Beriorentasi Layanan Jasa Survei Bulan Desember 2025, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi,Sumber Dana DAU UMUM. No. SPD : 800/7916/LP-SPD/BKAD/2025	YAYASAN KARTINI MANAKARRA/DIAN DANIATI	75.000.000,00
U	**INSPEKTORAT**		356.010.850,00
1	Bayar Belanja Alat dan Bahan Kertas dan Cover untuk Bulan Desember 2025 (PAD) Sesuai SPD No : 800/8251/LP-SPD/BKAD/2025 Inspektorat Kab. Majene TA. 2025	NURLIANI	3.650.000,00
2	PENGAWASAN KINERJA PEMDA	Rekening Penampungan	26.000.000,00
3	PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA / DAERAH	Rekening Penampungan	12.050.000,00
4	PENDAMPINGAN ASISTENSI URUSAN PEMDA	Rekening Penampungan	38.650.000,00
5	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Rekening Penampungan	47.300.000,00
6	REVIU LAPORAN KEUANGAN	Rekening Penampungan	10.850.000,00
7	PENGAWASAN DESA	Rekening Penampungan	86.500.000,00
8	REVIU AUDIT KINERJA	Rekening Penampungan	70.550.000,00
9	Rapat rapat Koordinasi Konsultasi	Rekening Penampungan	60.460.850,00
V	**KECAMATAN BANGGAE DAN KELURAHAN**		2.900.000,00
V.1	**Kecamatan Banggae**		**1.400.000,00**
1	LS - Pembayaran Honor TRIPIKA Kantor Kec. Banggae Bulan Oktober s.d November 2025, Sesuai SK Bupati Majene No :100.3.3.2/159/III/TAHUN 2025 dan No SPD : 800/8159/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl 23/12/2025, DBH PUSAT	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.400.000,00
V.2	**Kelurahan Baru**		**1.500.000,00**
1	LS- Honor Jasa Administrasi Pelaksana Tugas ASN Kantor Yakni Operator Keuangan (1 Org X 2Bln) Bulan Okt s/d Nov SK No. 100.3.3.2/858/XI/2025 Tgl 27 Nov 2025 dan SPD 800/8151/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl 23 Des 2025 DBH PUSAT	AMINAH, A. Md. Kom	1.500.000,00
W	**KECAMATAN BANGGAE TIMUR DAN KELURAHAN**		72.081.920,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
W.1	**Kecamatan Banggae Timur**		**20.500.000,00**
1	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Non ASN pada Kantor Kecamatan Banggae Timur untuk Bulan Oktober s/d November TA. 2025 sesuai SK Bupati Nomor 100.3.3.2/884/XI/Tahun 2025 dan SPD No. 800/8082/LP-SPD/BKAD/2025 (DBH Pusat)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	700.000,00
2	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Non ASN pada Kantor Kecamatan Banggae Timur untuk Bulan Oktober s/d November TA. 2025 sesuai SK Bupati Nomor 100.3.3.2/884/XI/Tahun 2025 dan SPD No. 800/8082/LP-SPD/BKAD/2025 (DBH Pusat)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	13.700.000,00
3	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Non ASN pada Kantor Kecamatan Banggae Timur untuk Bulan Oktober s/d November TA. 2025 sesuai SK Bupati Nomor 100.3.3.2/884/XI/Tahun 2025 dan SPD No. 800/8082/LP-SPD/BKAD/2025 (DBH Pusat)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.000.000,00
4	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Non ASN pada Kantor Kecamatan Banggae Timur untuk Bulan Oktober s/d November TA. 2025 sesuai SK Bupati Nomor 100.3.3.2/884/XI/Tahun 2025 dan SPD No. 800/8082/LP-SPD/BKAD/2025 (DBH Pusat)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.400.000,00
5	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Non ASN pada Kantor Kecamatan Banggae Timur untuk Bulan Oktober s/d November TA. 2025 sesuai SK Bupati Nomor 100.3.3.2/884/XI/Tahun 2025 dan SPD No. 800/8082/LP-SPD/BKAD/2025 (DBH Pusat)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	700.000,00
6	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga TRIPIKA untuk Bulan Oktober s/d November pada Kantor Kecamatan Banggae Timur TA. 2025 sesuai SK Bupati No. 100.3.3.2/620/VIII/ Tahun 2025 dan SPD No. 800/8081/LP-SPD/BKAD/2025 (PAD-BJT Listrik)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.000.000,00
W.2	**Kelurahan Baruga**		**14.000.000,00**
1	Pembayaran Belanja Pengelolaan Rehab Jalan Setapak Lingkungan Baruga Kelurahan Baruga Berdasarkan SK No. 100.3.3.2/842/XI/TAHUN 2025 dan SPD No. 800/7440/LP-SPD/BKAD/2025 Pada kantor Kelurahan Baruga (Sumber Dana DAU Kelurahan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.500.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
2	Pembayaran Belanja Pengelolaan Rehab Jalan Setapak Lingkungan Tanete Kelurahan Baruga Berdasarkan SK No. 100.3.3.2/842/XI/TAHUN 2025 dan SPD No. 800/7437/LP-SPD/BKAD/2025 Pada kantor Kelurahan Baruga (Sumber Dana DAU Kelurahan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.500.000,00
3	Pembayaran Belanja Pengelolaan Rehab Jalan Setapak Lingkungan Baruga Barat Kelurahan Baruga Berdasarkan SK No. 100.3.3.2/842/XI/TAHUN 2025 dan SPD No. 800/7436/LP-SPD/BKAD/2025 Pada kantor Kelurahan Baruga (Sumber Dana DAU Kelurahan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Perencanaan Rehab Jalan Setapak Lingkungan Tanete Kelurahan Baruga Berdasarkan SK No. 100.3.3.2/796/X/TAHUN 2025 dan SPD No. 800/7915/LP-SPD/BKAD/2025 Pada kantor Kelurahan Baruga (Sumber Dana DAU Kelurahan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.000.000,00
5	Pembayaran Belanja Perencanaan Rehab Jalan Setapak Lingkungan Baruga Kelurahan Baruga Berdasarkan SK No. 100.3.3.2/796/X/TAHUN 2025 dan SPD No. 800/7914/LP-SPD/BKAD/2025 Pada kantor Kelurahan Baruga (Sumber Dana DAU Kelurahan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.000.000,00
6	Pembayaran Belanja Perencanaan Rehab Jalan Setapak Lingkungan Baruga Barat Kelurahan Baruga Berdasarkan SK No. 100.3.3.2/796/X/TAHUN 2025 dan SPD No. 800/7913/LP-SPD/BKAD/2025 Pada kantor Kelurahan Baruga (Sumber Dana DAU Kelurahan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.000.000,00
W.3	**Kelurahan Labuang**		**1.200.000,00**
1	Bayar Biaya Tagihan Listrik Kantor Kelurahan Labuang untuk Bulan Januari s/d Desember T.A 2025 dengan SPD No:800/7838/LP-SPD/BKAD/2025 Sumber Dana PAD PBJT LISTRIK	KELURAHAN LABUANG	1.200.000,00
W.4	**Kelurahan Tande**		**450.000,00**
1	Belanja (LS) Pembayaran Honorarium Babinkantibmas sesuai SK No. 100.3.3.2/162/III/ TAHUN 2025 dengan SPD No. 800/8054/LP-SPD/BKAD/2025 Bulan Oktober s/d Desember 2025 Kantor Kelurahan Tande Sumber dana DBH Pusat	AHMADI	450.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
W.5	**Kelurahan Tande Timur**		**18.731.920,00**
1	Pembayaran LS (BELANJA LANGSUNG) Rekap Token Listrik Tahun 2025 Berdasrkan SPD No 800/7695/LP-SPD/BKAD/2025 Sumber DanaPAD PBJT-Komsumsi Tenaga Listrik Dan Sumber Lainnya	FAHRUDDIN	431.920,00
2	Pengajuan Belanja Langsung LS Pembayaran Honorarium TIM Koordinasi kewilayaan dan sosial kemasyarakatan (Bhabinsa Dan Bhabinnkantibmas) Untuk Bulan oktober S/D November 2025 berdasarkan sk no 100.3.3.2/578 VIII/thn 2025 dan spd no 800/8090/BKAD/2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	600.000,00
3	Belanja Langsung LS Pembayaran Honorarium Ketua LKK sekertaris dan Bendahara untuk Bulan Oktober s/d November 2025 Berdasarkan sk no 100.3.3.2/2014 /III/thn 2025 dan spd no800/8088/LP-SPD/BKAD/2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	10.000.000,00
4	Pengajuan Belanja Langsung LS Pembayaran Honorarium TIM Koordinasi kewilayaan dan sosial kemasyarakatan (Bhabinsa Dan Bhabinnkantibmas) Untuk Bulan DESEMBER 2025 berdasarkan sk no 100.3.3.2/578 VIII/thn 2025 dan spd no 800/8089/BKAD/2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	300.000,00
5	Pengajuan belanja langsung LS Pembayaran honor Tenaga Administrasi dan tenaga Operator Computer untuk Bulan Oktober s/D November r 2025 No SK 100.3.3.2/7884/XI/Tahun 2025 Tanggal 28 November 2025 dan no spd 800/8087/LP-SPD/BKAD/2025 "	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.900.000,00
6	Pengajuan belanja langsung LS Pembayaran honor Tenaga Administrasi dan tenaga Operator Computer untuk Bulan Oktober s/D November r 2025 No SK 100.3.3.2/7884/XI/Tahun 2025 Tanggal 28 November 2025 dan no spd 800/8087/LP-SPD/BKAD/2025 "	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.500.000,00
W.6	**Kelurahan Lembang**		**17.200.000,00**
1	Pembayaran Biaya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik - Tagihan Listrik Dengan Nomor : 800/7823/LP-SPD/BKAD/2025	BURHAN (Loket Usaha Bersama)	500.000,00
2	Pembayaran LS Belanja Biaya Perencanaan Lampu Jalan Lingkungan Leppe, Kel.Lembang T.A 2025 dengan Nomor : 800/7911/LP-SPD/BKAD/2025 Sumber Dana DAU KELURAHAN	PT.BENUANTA INDO PLAN	2.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
3	Pembayaran (LS) tenaga Pelayanan Umum - Honorarium Ketua LKK dan Honorarium Sekretaris dan bendahara LKK dengan Nomor SK : 100.3.3.2/214/III/TAHUN 2025 dan Nomor : 800/8107/LP-SPD/BKAD/2025 Sumber Dana DBH Pusat	REK. PENAMPUNGAN GAJI	8.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana DBH Pusat dengan Nomor : 800/8106/LP-SPD/BKAD/2025 Kantor Kelurahan Lembang	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.200.000,00
5	Pembayaran (LS) Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Pelayanan Umum Kantor, Operator Komputer, Jasa Tenaga Keamanan Pada Bulan Okt dan Nov 2025, dengan Nomor : 800/8112/LP-SPD/BKAD/2025, Sumber Dana DBH Pusat	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.600.000,00
6	Pembayaran (LS) Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Pelayanan Umum Kantor, Operator Komputer, Jasa Tenaga Keamanan Pada Bulan Okt dan Nov 2025, dengan Nomor : 800/8112/LP-SPD/BKAD/2025, Sumber Dana DBH Pusat	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.500.000,00
7	Pembayaran (LS) Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Pelayanan Umum Kantor, Operator Komputer, Jasa Tenaga Keamanan Pada Bulan Okt dan Nov 2025, dengan Nomor : 800/8112/LP-SPD/BKAD/2025, Sumber Dana DBH Pusat	REK. PENAMPUNGAN GAJI	400.000,00
X	**KECAMATAN MALUNDA DAN KELURAHAN**		36.360.000,00
X.1	**Kelurahan Lamungan Batu**		36.360.000,00
1	Bayar biaya pengelolaan kegiatan rehab jalan setapak RW 11 Tabulang bulang kelurahan lamungan batu dengan No.SPD : 800/6192/LP-SPD/BKAD/2025 Dengan Sumber dana (DAU KELURAHAN).	Rek. Penampungan Gaji	1.740.000,00
2	Bayar kegiatan pengawasan rehab jalan setapak rw 04 Kalorang selatang kelurahan lamungan batu kecamatan malunda dengan No SPD :800/6195/LP-SPD/BKAD/2025 Dengan Suber Dana (DAU KELURAHAN) Tahu 2025.	Rek. Penampungan Gaji	1.740.000,00
3	Bayar biaya belanja pengawasan kegiatan pembangunan draenase rw 08 talallere kel.lamungan batu dengan no SPD.800/6191/LP-SPD/BKAD/2025 Dengan sumber dana (DAU KELURAHAN).	Rek. Penampungan Gaji	1.740.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
4	Bayar Biaya pengawasan kegiatan pembangunan rehab jalan setapak RW 11 tabulang-bulang,dengan No SPD : 800/6193/LP-SPD/BKAD/2025 dengan Sumber Dana (DAU KELURAHAN).	Rek. Penampungan Gaji	1.740.000,00
5	Bayar Honorarium Ketua,sekertaris dan bendahara RW Se kelurahan lamungan batu dari bulan oktober s/d nopember 2025.dengan SPD.800/7994/LP-SPD/BKAD/2025 Dan Sumber Danah (DBH PUSAT)	Rek. Penampungan Gaji	22.000.000,00
6	pembayaran honorarium penyedia jasa tenaga ADM/Teknis perkantoran,kebersihan,keamanan dan penyedia jasa tenaga pendukun ADM/teknis perkantoran kel lamungan batu dari bln 10 S/D 11 -2025 denhgan SPD.800/7993/LP-SPD/BKAD/2025 Dan Sumber Dana (DBH Pusat)	Rek. Penampungan Gaji	800.000,00
7	pembayaran honorarium penyedia jasa tenaga ADM/Teknis perkantoran,kebersihan,keamanan dan penyedia jasa tenaga pendukun ADM/teknis perkantoran kel lamungan batu dari bln 10 S/D 11 -2025 denhgan SPD.800/7993/LP-SPD/BKAD/2025 Dan Sumber Dana (DBH Pusat)	Rek. Penampungan Gaji	1.000.000,00
8	pembayaran honorarium penyedia jasa tenaga ADM/Teknis perkantoran,kebersihan,keamanan dan penyedia jasa tenaga pendukun ADM/teknis perkantoran kel lamungan batu dari bln 10 S/D 11 -2025 denhgan SPD.800/7993/LP-SPD/BKAD/2025 Dan Sumber Dana (DBH Pusat)	Rek. Penampungan Gaji	800.000,00
9	pembayaran honorarium penyedia jasa tenaga ADM/Teknis perkantoran,kebersihan,keamanan dan penyedia jasa tenaga pendukun ADM/teknis perkantoran kel lamungan batu dari bln 10 S/D 11 -2025 denhgan SPD.800/7993/LP-SPD/BKAD/2025 Dan Sumber Dana (DBH Pusat)	Rek. Penampungan Gaji	800.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
10	Bayar belanja honorarium penyedia jasa administrasi keuangan kel lamungan batu dari bulan oktober s/d nopember 2025 dengan No SPD.800/7992/LP-SPD/BKAD/2025 Dan Sumber Dana (DBH-Pusat).	Rek. Penampungan Gaji	4.000.000,00
Y	**KECAMATAN PAMBOANG DAN KELURAHAN**		6.898.800,00
Y.1	**Kecamatan Pamboang**		5.990.000,00
1	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kegiatan Pesta Rakyat HUT RI ke-80 Tahun 2025 Kecamatan. Pamboang Tahun Anggaran 2025, Tanggal 20 September 2025 Nomor SPD : 800/7570/LP-SPD/BKAD/2025 Sumber Dana PAD Tanggal 11 Desember 2025	IRA ULFIA DEWI	2.790.000,00
2	Bayar biaya perjalanan dinas Camat Pamboang dan Staf pada Kantor Kecamatan Pamboang sesuai Tugas dan Fungsi Camat Nomor SPD : 800/7571/LP-SPD/BKAD/2025 Sumber Dana PAD Tanggal 11 Desember 2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.200.000,00
Y.2	**Kelurahan Sirindu**		908.800,00
1	Biaya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Ke - Kecamatan Banggae Kab. Majene sesuai SPD No : 03/094/XI/2025 & Surat Tugas No : 090/03/2025 Tgl 21-11-2025 dan SPD No : 800/7564/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl 11-12-2025 (Sumber Dana PAD)	JALALUDDIN, SE.,MM	160.000,00
2	Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dinas Kantor Kel Sirindu DC 6844 BH sesuai BAP No : 025/BAP/SRD/XII/2025 Tgl 11-12-2025 & SPD No : 800/7563/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl 11-12-2025 T.A 2025 (Sumber Dana PAD)	BERKAH JAYA MOTOR/BASRI	748.800,00
Z	**KECAMATAN SENDANA DAN KELURAHAN**		54.806.000,00
Z.1	**Kecamatan Sendana**		15.006.000,00
1	Pembelian Token Listrik prabayar Kantor Camat Sendana bulan Desember 2025, sesuai LP-SPD Nomor 800/7907/LP-SPD/BKAD/2025 Tanggal 22 Desember 2025, sumber dana PAD-PBJT LISTRIK	TOKO AR	1.006.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
2	Pembayaran Jasa Tenaga kebersihan Kantor Camat Sendana bulan Oktober s/d Nopember 2025, LP-SPD Nomor 800/8116/LP-SPD/BKAD/2025 tanggal 23 Desember 2025, sumber dana DBH-PUSAT	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	1.000.000,00
3	Pembayaran Jasa Tenaga keamanan Kantor Camat Sendana bulan Oktober s/d Nopember 2025, LP-SPD Nomor 800/8117/LP-SPD/BKAD/2025 tanggal 23 Desember 2025, sumber dana DBH-PUSAT	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	1.000.000,00
4	Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi Kantor Camat Sendana bulan Oktober s/d Nopember 2025, LP-SPD Nomor 800/8118/LP-SPD/BKAD/2025 tanggal 23 Desember 2025, sumber dana DBH-PUSAT	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	12.000.000,00
Z.2	**Mosso**		**19.300.000,00**
1	Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Administrasi Pada Kantor Kel. Mosso Bulan Oktober S.d November 2025 SPD Nomor : 800/8095/LP-SPD/BKAD/2025 Tanggal 23 Desember 2025, Sumber Dana DBH PUSAT T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	2.200.000,00
2	Pembayaran Belanja Honorarium Operator Dtks, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan (Linmas) Pada Kantor Kel. Mosso Bulan Oktober S.d November 2025 SPD Nomor : 800/8096/LP-SPD/BKAD/2025 Tanggal 23 Desember 2025, Sumber Dana DBH PUSAT T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	1.500.000,00
3	Pembayaran Belanja Honorarium Operator Dtks, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan (Linmas) Pada Kantor Kel. Mosso Bulan Oktober S.d November 2025 SPD Nomor : 800/8096/LP-SPD/BKAD/2025 Tanggal 23 Desember 2025, Sumber Dana DBH PUSAT T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	600.000,00
4	Pembayaran Belanja Honorarium Operator Dtks, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan (Linmas) Pada Kantor Kel. Mosso Bulan Oktober S.d November 2025 SPD Nomor : 800/8096/LP-SPD/BKAD/2025 Tanggal 23 Desember 2025, Sumber Dana DBH PUSAT T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	1.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
5	Pembayaran Belanja Honorarium Ketua LKK, Sekretaris, Bendahara Pada Kantor Kel. Mosso Bulan Oktober S.d November 2025 SPD Nomor : 800/8094/LP-SPD/BKAD/2025 Tanggal 23 Desember 2025, Sumber Dana DBH PUSAT T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN GAJI	14.000.000,00
Z.3	**Mosso Dhua**		**20.500.000,00**
1	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan Kelurahan Mosso Dhua bulan Oktober s/d Nopember 2025, LP-SPD Nomor 800/8092/LP-SPD/BKAD/2025 tanggal 23 Desember 2025, sumber dana DBH-PUSAT	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.250.000,00
2	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan Kelurahan Mosso Dhua bulan Oktober s/d Nopember 2025, LP-SPD Nomor 800/8092/LP-SPD/BKAD/2025 tanggal 23 Desember 2025, sumber dana DBH-PUSAT	REK. PENAMPUNGAN GAJI	250.000,00
3	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Adminstrasi Kelurahan Mosso Dhua bulan Oktober s/d Nopember 2025, LP-SPD Nomor 800/8093/LP-SPD/BKAD/2025 tanggal 23 Desember 2025, sumber dana DBH-PUSAT	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.000.000,00
4	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Honorarium Ketua RW, Sekretaris dan Bendahara) Kelurahan Mosso Dhua bulan Oktober s/d Nopember 2025, LP-SPD Nomor 800/8091/LP-SPD/BKAD/2025 tanggal 23 Desember 2025, sumber dana DBH-PUSAT	REK. PENAMPUNGAN GAJI	16.000.000,00
AA	**KECAMATAN TAMMERODDO**		22.000.000,00
1	LS - Pembayaran belanja Jasa Honorarium Operator SIPD dan Tenaga Operator sesuai SK Bupati No.100.3.3.2/881/XI/TAHUN 2025 Untuk Bulan Oktober S/d November 2025 pada Kantor Camat Tammerodo (SD:DBH PUSAT) SPD No.800/8101/LP- SPD/BKAD/2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.200.000,00
2	LS-Pembayaran belanja Jasa Honorarium Tenaga Administrasi dan Linmas sesuai SK Bupati No.100.3.3.2/881/XI/TAHUN 2025 Untuk Bulan Oktober S/d November 2025 pada Kantor Camat Tammerodo (SD:DBH PUSAT) SPD No.800/8102/LP-SPD/BKAD/2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	14.800.000,00
BB	**KECAMATAN TUBO**		16.540.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Pembayaran Belanja jasa Honorarium Tenaga Adminitrasi sesuai SK Bupati No: 100.3.3.2/894/XI/ TAHUN 2025 untuk Bulan Oktober - November 2025 Pada Kantor Kecamatan Tubo Sendana (Sumber Dana : DBH PUsat) Nomor SPD: 800/8080/LP-SPD/BKAD/2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.820.000,00
2	Pembayaran Belanja jasa Honorarium Tenaga Adminitrasi sesuai SK Bupati No: 100.3.3.2/894/XI/ TAHUN 2025 untuk Bulan Oktober - November 2025 Pada Kantor Kecamatan Tubo Sendana (Sumber Dana : DBH PUsat) Nomor SPD: 800/8080/LP-SPD/BKAD/2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.500.000,00
3	Pembayaran Belanja jasa Honorarium Tenaga Adminitrasi sesuai SK Bupati No: 100.3.3.2/894/XI/ TAHUN 2025 untuk Bulan Oktober - November 2025 Pada Kantor Kecamatan Tubo Sendana (Sumber Dana : DBH PUsat) Nomor SPD: 800/8080/LP-SPD/BKAD/2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.880.000,00
4	Pembayaran Belanja jasa Honorarium Tenaga Adminitrasi sesuai SK Bupati No: 100.3.3.2/894/XI/ TAHUN 2025 untuk Bulan Oktober - November 2025 Pada Kantor Kecamatan Tubo Sendana (Sumber Dana : PAD) Nomor SPD: 800/8261/LP-SPD/BKAD/2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.340.000,00
CC	**KECAMATAN ULUMANDA**		14.100.000,00
1	Pembayaran LS Honorarium Tenaga Operasional dan Tenaga Operator SIPD Bulan Oktober s/d November 2025 pada Kantor Kecamatan Ulumanda Kab. Majene, sumber dana DBH Pusat SPD Nomor : 800/8049/LP-SPD/BKAD/2025 Tanggal 23 Desember 2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.800.000,00
2	Pembayaran LS Honorarium Tenaga Operasional dan Tenaga Operator SIPD Bulan Oktober s/d November 2025 pada Kantor Kecamatan Ulumanda Kab. Majene, sumber dana DBH Pusat SPD Nomor : 800/8049/LP-SPD/BKAD/2025 Tanggal 23 Desember 2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.500.000,00
3	Pembayaran LS Honorarium Tenaga Operasional dan Tenaga Operator SIPD Bulan Oktober s/d November 2025 pada Kantor Kecamatan Ulumanda Kab. Majene, sumber dana DBH Pusat SPD Nomor : 800/8049/LP-SPD/BKAD/2025 Tanggal 23 Desember 2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	600.000,00
4	Pembayaran LS Honorarium Tenaga Operasional dan Tenaga Operator SIPD Bulan Oktober s/d November 2025 pada	REK. PENAMPUNGAN GAJI	600.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
	Kantor Kecamatan Ulumanda Kab. Majene, sumber dana DBH Pusat SPD Nomor : 800/8049/LP-SPD/BKAD/2025 Tanggal 23 Desember 2025		
5	Pembayaran LS Honorarium Tenaga Operasional dan Tenaga Operator SIPD Bulan Oktober s/d November 2025 pada Kantor Kecamatan Ulumanda Kab. Majene, sumber dana DBH Pusat SPD Nomor : 800/8049/LP-SPD/BKAD/2025 Tanggal 23 Desember 2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	600.000,00
DD	**PUSKESMAS (BLUD)**		917.196.422,00
DD.1	**Puskesmas Banggae I**		42.268.268,00
1	Pembayaran Belanja Jasa Medik Nonkapitasi Bupel November 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	31.944.500,00
2	Pembayaran Belanja jasa Retribusi bulan Desember 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	6.106.225,00
3	Pembayaran Belanja Pegawai 4% atas Non Kapitasi Bulan November Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	883.543,00
4	Pembayaran Belanja Jasa Prolanis Bulan Oktober 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	3.334.000,00
DD.2	**Puskesmas Banggae II**		**16.085.550,00**
1	Belanja Jasa Medis Utang Non Kapitasi bulan November 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	8.431.500,00
2	Belanja Jasa Medis Retribusi Kesehatan Utang bulan Desember 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	2.334.050,00
3	Belanja Bahan Medis Habis Pakai Utang (Prolanis) bulan Oktober 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.170.000,00
4	Belanja Jasa Pemateri Utang Prolanis bulan Oktober 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	500.000,00
5	Belanja Jasa Pemateri Utang Prolanis bulan Oktober 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	500.000,00
6	Belanja Jasa Instruktur Senam Utang Prolanis bulan Oktober 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	200.000,00
7	Belanja Jasa Instruktur Senam Utang Prolanis bulan Oktober 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	200.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
8	Belanja Jasa Instruktur Senam Utang Prolanis bulan Oktober 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	200.000,00
9	Belanja Jasa Instruktur Senam Utang Prolanis bulan Oktober 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	200.000,00
10	Belanja Jasa Instruktur Senam Utang Prolanis bulan Oktober 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	200.000,00
11	Belanja Jasa Instruktur Senam Utang Prolanis bulan Oktober 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	200.000,00
12	Belanja Makan dan Minum Rapat Utang (Prolanis) bulan Oktober 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	195.000,00
13	Belanja Makan dan Minum Rapat Utang (Prolanis) bulan Oktober 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	325.000,00
14	Belanja Makan dan Minum Rapat Utang (Prolanis) bulan Oktober 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	390.000,00
15	Belanja Makan dan Minum Rapat Utang (Prolanis) bulan Oktober 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	325.000,00
16	Belanja Makan dan Minum Rapat Utang (Prolanis) bulan Oktober 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	325.000,00
17	Belanja Makan dan Minum Rapat Utang (Prolanis) bulan Oktober 2025 Puskesmas Banggae II T.A 2026	REKENING PENAMPUNGAN PKM	390.000,00
DD.3	**Puskesmas Totoli**		**10.716.537,00**
1	Pembayaran Jasa Retribusi Bulan Oktober	REKENING PENAMPUNGAN PKM	4.917.664,00
2	Pembayaran Jasa Retribusi Bulan November	REKENING PENAMPUNGAN PKM	3.833.549,00
3	Pembayaran Jasa Retribusi Bulan Desember	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.965.324,00
DD.4	**Puskesmas Lembang**		**63.290.701,00**
1	Pembayaran Belanja Jasa Medik Nonkapitasi Bupel November 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	35.689.500,00
2	Pembayaran Belanja Jasa Retribusi Bulan Oktober 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	6.096.807,00
3	Pembayaran Belanja Jasa Retribusi Bulan November 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	6.043.860,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
4	Pembayaran Belanja Jasa Retribusi Bulan Desember 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	6.074.534,00
5	Pembayaran Belanja Makan Minum Prolanis Bupel Oktober 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	3.796.000,00
6	Pembayaran Belanja Honor Pemateri & Intruktur Senam Prolanis Bupel Oktober 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	4.100.000,00
7	Pembayaran Belanja BMHP Prolanis Bupel Oktober 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.490.000,00
DD.5	**Puskesmas Sendana I**		**288.411.817,00**
1	Belanja Jasa Kapitasi ASN Bulan Desember 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	52.343.768,00
2	Belanja Jasa Kapitasi Non ASN Puskesmas Bulan Desember 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	16.600.349,00
3	Belanja Jasa Kapitasi Non ASN Pustu/Poskesdes Bulan Desember 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	3.705.111,00
4	Belanja Jasa Non Kapitasi ASN Bulan Oktober 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	49.143.796,00
5	Belanja Jasa Non Kapitasi Non ASN Puskesmas Bulan Oktober 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	19.145.119,00
6	Belanja Jasa Non Kapitasi Non ASN Pustu/Poskesdes Bulan Oktober 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	478.345,00
7	Belanja Jasa Non Kapitasi ASN Bulan November 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	49.814.323,00
8	Belanja Jasa Non Kapitasi Non ASN Puskesmas Bulan November 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	19.202.672,00
9	Belanja Jasa Non Kapitasi Non ASN Pustu/Poskesdes Bulan November 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	485.265,00
10	Belanja Jasa Pengangkutan dan Pemusnahan limbah B3	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.365.300,00
11	Belanja Jasa Retribusi ASN Januari sd Desember tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	24.154.512,00
12	Belanja Jasa Retribusi Non ASN Januari sd Desember Puskesmas tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	45.291.879,00
13	Belanja Jasa Retribusi Non ASN PustuJanuari sd Desember tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	629.302,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
14	Belanja Iuran BPJS 4% Jasa Kapitasi Bulan desember 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	2.093.751,00
15	Belanja Iuran BPJS 4% Jasa Non Kapitasi Bulan Oktober 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.965.752,00
16	Belanja Iuran BPJS 4% Jasa Non Kapitasi Bulan November 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.992.573,00
DD.6	**Puskesmas Tammeroddo**		**63.873.200,00**
1	Belanja Jasa Langsung Non Kapitasi Bulan Oktober Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	26.882.400,00
2	Belanja Jasa Tidak Langsung Non Kapitasi ASN Bulan Oktober Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	4.870.333,00
3	Belanja Jasa Pembantu Pengelola Barang Dana Taktis Non Kapitasi Bulan Oktober 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	671.770,00
4	Belanja Jasa Tidak Langsung Non Kapitasi Non ASN Bulan Oktober Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.175.597,00
5	Belanja Jasa Langsung Non Kapitasi Bulan November Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	24.220.800,00
6	Belanja Jasa Tidak Langsung Non Kapitasi ASN Bulan November Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	4.387.918,00
7	Belanja Jasa Pembantu Pengelola Barang Dana Taktis Non Kapitasi Bulan November 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	605.230,00
8	Belanja Jasa Tidak Langsung Non Kapitasi Non ASN Bulan November Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.059.152,00
DD.7	**Puskesmas Sendana II**		**137.203.542,00**
1	Pembayaran belanja pegawai Iuran 4% BPJS Non Kapitasi kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan September tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.230.473,00
2	Pembayaran belanja pegawai Iuran 4% BPJS Non Kapitasi kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan Oktober tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	882.833,00
3	Pembayaran belanja pegawai Iuran 4% BPJS Non Kapitasi kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan November tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.273.398,00
4	Pembayaran belanja pegawai Iuran 4% BPJS Remunerasi kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan November tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	44.892,00
5	Pembayaran belanja pegawai Iuran 4% BPJS Remunerasi kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan Desember tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	889.506,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
6	Pembayaran Jasa Pelayanan ASN Non Kapitasi Kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan September 2025 T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	40.788.130,00
7	Pembayaran Jasa Pelayanan Tenaga Sukarela Non Kapitasi Kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan September 2025 T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	19.783.742,00
8	Pembayaran Jasa Pelayanan Dana Taktis Non Kapitasi Kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan September 2025 T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	550.098,00
9	Pembayaran Jasa Pelayanan ASN Non Kapitasi Kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan November 2025 T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	41.771.717,00
10	Pembayaran Jasa Pelayanan Tenaga Sukarela Non Kapitasi Kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan November 2025 T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	14.859.939,00
11	Pembayaran Jasa Pelayanan Dana Taktis Non Kapitasi Kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan November 2025 T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	514.314,00
12	Pembayaran Jasa Pelayanan Retribusi untuk kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan Januari s/d Juni 2025 T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	2.185.708,00
13	Pembayaran Jasa Pelayanan Dana Taktis Retribusi untuk kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan Januari s/d Juni 2025 T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	102.992,00
14	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Sarana retribusi) untuk kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan Januari s/d Juni 2025 T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.500.000,00
15	Pembayaran Jasa Pelayanan Retribusi untuk kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan Juli s/d Desember 2025 T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	7.249.214,00
16	Pembayaran Jasa Pelayanan Dana Taktis Retribusi untuk kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan Januari s/d Juni 2025 T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	341.586,00
17	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer (Sarana retribusi) untuk kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan Juli s/d Desember 2025 T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	535.000,00
18	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suku Cadang Alat Angkutan (Sarana retribusi) untuk kegiatan JKN Puskesmas Sendana II Bulan Juli s/d Desember 2025 T.A 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	2.700.000,00
DD.8	**Puskesmas Salutambung**		**6.763.100,00**
1	Pembayaran Jasa Tim Pembina BLUD Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	4.800.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
2	Pembayaran Honorarium Kegiatan Senam Prolanis 10 Oktober Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	200.000,00
3	Pembayaran Makan Minum Kegiatan Senam Prolanis 10 Oktober Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	247.000,00
4	Pembayaran Honorarium Kegiatan Senam Prolanis 17 Oktober Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	200.000,00
5	Pembayaran Makan Minum Kegiatan Senam Prolanis 17 Oktober Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	221.000,00
6	Pembayaran Kegiatan Pemeriksaan GDP Prolanis 24 Oktober Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	190.000,00
7	Pembayaran Honorarium Kegiatan Senam Prolanis 31 Oktober Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	697.100,00
8	Pembayaran Makan Minum Kegiatan Senam Prolanis 31 Oktober Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	208.000,00
DD.9	**Puskesmas Malunda**		**124.111.200,00**
1	Pembayaran Jasa Medik Retribusi ASN Bulan Januari-November 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	38.992.824,00
2	Pembayaran Jasa Medik Retribusi Non ASN Bulan Januari-November 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	7.746.361,00
3	Pembayaran Dana Pos/Taktis Retribusi Bulan Januari-November 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	801.815,00
4	Pembayaran Jasa Medik Retribusi ASN Bulan Desember 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	5.678.086,00
5	Pembayaran Jasa Medik Retribusi Non ASN Bulan Desember 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	812.276,00
6	Pembayaran Dana Pos/Taktis Retribusi Bulan Desember 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	98.838,00
7	Pembayaran Jasa Medik Non Kapitasi ASN Bulan November 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	51.897.913,00
8	Pembayaran Jasa Medik Non Kapitasi Non ASN Bulan November 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	16.683.467,00
9	Pembayaran Dana Pos/Taktis Non Kapitasi Bulan November 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.399.620,00
DD.10	**Puskesmas Pamboang**		**164.472.507,00**

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Pembayaran Obat-Obatan Bulan Juni Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	5.943.240,00
2	Pembayaran Jasa Medik Nonkapitasi bulan November Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	90.342.000,00
3	Pembayaran Jasa Medik Retribusi bulan Juli Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	3.517.150,00
4	Pembayaran Jasa Medik Retribusi bulan Agustus Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	3.329.867,00
5	Pembayaran Jasa Medik Retribusi bulan September Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	21.038.965,00
6	Pembayaran Jasa Medik Retribusi bulan Oktober Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	8.383.693,00
7	Pembayaran Jasa Medik Retribusi bulan November Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.689.275,00
8	Pembayaran Jasa Medik Retribusi bulan Desember Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	8.401.307,00
9	Pembayaran Prolanis bulan Oktober Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	6.656.000,00
10	Pembayaran Iuran BPJS 4% (Kapitasi) bulan Desember Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	2.844.514,00
11	Pembayaran Iuran BPJS 4% (NonKapitasi) bulan Juni Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.533.872,00
12	Pembayaran Iuran BPJS 4% (NonKapitasi) bulan Juli Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.991.360,00
13	Pembayaran Iuran BPJS 4% (NonKapitasi) bulan Agustus Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	1.898.694,00
14	Pembayaran Iuran BPJS 4% (NonKapitasi) bulan September Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	2.327.178,00
15	Pembayaran Iuran BPJS 4% (NonKapitasi) bulan Oktober Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	2.340.809,00
16	Pembayaran Iuran BPJS 4% (NonKapitasi) bulan November Tahun 2025	REKENING PENAMPUNGAN PKM	2.234.583,00
EE	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**		13.766.194.508,00
1	Belanja Tabung Gas Bulan Desember Tahun 2025	GAZALI	5.720.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (peralatan kebersihan) pada PT KAWAN LAMA SOLUSI Oleh DR YUPIE	PT KAWAN LAMA SOLUSI	839.700,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (peralatan kebersihan) pada KIOS SERBA PLASTIK	KIOS SERBA PLASTIK	4.762.566,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (peralatan kebersihan) pada KIOS SERBA PLASTIK	KIOS SERBA PLASTIK	5.417.355,00
5	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak pada PERCETAKAN ISRA	PERCETAKAN ISRA	69.671.975,00
6	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Pada SIOLAPRINT	FITRI	100.000,00
7	Belanja cetak Baliho	FITRI	95.000,00
8	Belanja Cetak Baliho	FITRI	150.000,00
9	Belanja Stempel	TASRIF	435.000,00
10	Belanja Foto Copy	DEWI'	415.500,00
11	Belanja Foto Copy	DEWI'	676.200,00
12	Belanja Pembuatan Media Melalui Aplikasi Canva	NURWAHIDA	316.350,00
13	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Media Cetak, Media Luar Ruang)	RADAR SULBAR	480.000,00
14	Belanja Perjalanan Dinas Biasa /luar daerah	PEGAWAI RSUD	29.218.500,00
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	PEGAWAI RSUD	240.000,00
16	Belanja Makan Minum Rapat An. Dewi	DEWI'	4.211.213,00
17	Belanja Makan dan Minum Rapat pada CATERING BUNDA an. Yudi	CATERING BUNDA	1.765.050,00
18	Belanja Makan Minum Tamu An. Dewi	DEWI'	2.243.213,00
19	Biaya makan minum dokter residen	DR RESIDEN	4.800.000,00
20	Belanja ATK pada USAHA DAMAI	USAHA DAMAI	25.630.875,00
21	Belanja ATK an. Dewi	DEWI'	45.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
22	Belanja NOTE BOOK	ADE	40.000,00
23	Belanja MATERAI an. Dewi	DEWI'	100.000,00
24	Belanja alat/bahan untuk keg bahan komputer (charger tinta ,memori fd) pada USAHA DAMAI	USAHA DAMAI	12.758.750,00
25	Belanja Tinta Print pada Toko QK	QK KOMPUTER	300.000,00
26	MOUSE WARLES SIKAPAIYA	ADRIANI	80.000,00
27	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Pada PT MITRA HIJAU INVOICE 109/LPO/MHA-PLW/VII/2025	PT MITRA HIJAU	72.095.832,00
28	Belanja Jasa Pengolahan Sampah pada PT MITRA HIJAU INVOICE 110/LPO/MHA-PLW/VII/2025	PT MITRA HIJAU	66.600.000,00
29	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Pada PT MITRA HIJAU INVOICE 111/LPO/MHA-PLW/VII/2025	PT MITRA HIJAU	9.294.363,00
30	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Pada PT MITRA HIJAU INVOICE 112/LPO/MHA-PLW/VII/2025	PT MITRA HIJAU	66.600.000,00
31	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Pada PT MITRA HIJAU INVOICE 250 /I.PO/MHA-PLW/XII/2025	PT MITRA HIJAU	43.918.704,00
32	PT MITRA HIJAU INVOICE 251 /I.PO/MHA-PLW/XII/2025	PT MITRA HIJAU	79.328.759,00
33	PT MITRA HIJAU INVOICE 252 /I.PO/MHA-PLW/XII/2025	PT MITRA HIJAU	79.328.759,00
34	Belanja STNK DC 1101 B , Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	ANTO	1.800.000,00
35	WAHYU MOTOR SEPTEMBER 2025, Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	WAHYU MOTOR	625.000,00
36	WAHYU MOTOR OKTOBER 2025, Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	WAHYU MOTOR	8.971.875,00
37	BBM	DR YUPIE HANDAYANI	800.000,00
38	WAHYU MOTOR / ARIANSYAH	WAHYU MOTOR	350.000,00
39	istana car wash / terminal motor	ISTANA CAR WAS	420.000,00
40	Belanja suku cadang bbm dan pelumas jasa servis kendaraan operasional	WAHYU MOTOR	14.203.125,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
41	CV. Lolo Dadi Perkasa, Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set GENSET	CV LOLO DADI PERKASA	8.769.000,00
42	Solar Genzet	SYAMSUL ALAM	990.000,00
43	BBM GENZET, DEWI	DEWI'	476.000,00
44	batrai 'Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya CCTV, sound sistem	DEWI'	119.000,00
45	F4 TEKNIK, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin AC	F4 TEKNIK	25.974.000,00
46	QK COMPUTER ADAPTOR ASUS, Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer KOMPUTER LEPTOP	QK COMPUTER	200.000,00
47	LAMPU LED CV LOLO DADI PERKASA	CV LOLO DADI PERKASA	9.418.350,00
48	LAMPU LEDCV LOLO DADI PERKASA	CV LOLO DADI PERKASA	5.366.850,00
49	LAMPU LED CV LOLO DADI PERKASA	CV LOLO DADI PERKASA	3.671.880,00
50	CV. Galung Lombok Indah REHAB TOILET KAMAR MANDI VIB	CV GALUNG LOMBOK INDAH	62.519.328,00
51	CV.MEDICAL GENERAL SYSTEM, Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	CV MEDICAL GENERAL SYSTEM	11.100.000,00
52	TROLEY DOUBLE	CV LOLO DADI PERKASA	4.162.500,00
53	CV Delapan Jaya Medika	CV DELAPAN JAYA MEDIKA	7.730.000,00
54	CV. Kencana	CV KENCANA	9.977.900,00
55	Stand Kaset X-Ray, PT. Berlian Quantum Argado	PT BERLIAN	2.750.000,00
56	PT KENCANA ARJUNASAKTI	PT KENCANA ARJUNA	29.137.500,00
57	BMHP Gabungan	PBF	4.584.690.514,00
58	BMHP ALFRIDO 2024	PT ALPRIDO	10.166.057,00
59	BMHP ALFRIDO 2024	PT ALPRIDO	41.787.634,00
60	MULTI GAS MEDIKA JUNI	PT MULTI GAS MEDIKA	58.441.500,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
61	OKSIGEN MULTI GAS MEDIKA 1 JULI	PT MULTI GAS MEDIKA	65.759.175,00
62	OKSIGEN MULTI GAS MEDIKA 31 JULI	PT MULTI GAS MEDIKA	58.441.500,00
63	MULTI GAS MEDIKA AGUSTUS	PT MULTI GAS MEDIKA	58.441.500,00
64	MULTI GAS MEDIKA SEPTEMBER	PT MULTI GAS MEDIKA	56.343.600,00
65	MULTI GAS MEDIKA OKTOBER	PT MULTI GAS MEDIKA	58.441.500,00
66	MULTI GAS MEDIKA NOVEMBER	PT MULTI GAS MEDIKA	58.441.500,00
67	MULTI GAS MEDIKA DESEMBER	PT MULTI GAS MEDIKA	70.854.075,00
68	MULTI GAS MEDIKA DESEMBER	PT MULTI GAS MEDIKA	64.460.475,00
69	PT SAMATOR INDO GAS	PT SAMATOR INDO GAS	7.780.000,00
70	PT SAMATOR INDO GAS	PT SAMATOR INDO GAS	7.780.000,00
71	PT. SII	PT SII	8.325.000,00
72	Belanja BBM Rujukan	ANSAR	17.552.500,00
73	Belanja Obat-Obatan-Obat	PDF	4.622.105.833,00
74	Makan dan Minum Pasien 1-10 des 2025	GAZALI	49.648.000,00
75	Makan dan Minum Pasien 11-20 des 2025	GAZALI	46.686.000,00
76	Makanan dan snack pasien 21-31 Des 2025	GAZALI	50.216.000,00
77	Makanan Formula Bl. Desember	GAZALI	2.852.145,00
78	Belanja Beras Pasien Bl. Desember	GAZALI	16.750.000,00
79	Belanja Pergantian Biaya , 'Penggantian Kwitansi	PASIEN	56.386.190,00
80	Belanja Donor Darah Desember 2025	ERNA	1.650.000,00
81	Biaya insentif Dokter NON ASN (Spesialis dan Umum)	DOKTER	125.820.000,00
82	Jasa TB dan LB	YULBER	9.486.550,00
83	Belanja Jasa Pelayanan	PEG RSUD	2.755.476.288,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
84	Belanja Pendampingan Hukum	SYAMSUL ALAM	900.000,00
85	Belanja Kegiatan Protesa gigi	HERAWATI	3.300.000,00
FF	**SATUAN POLISI PAMONG PARAJA**		1.175.200,00
1	pembayaran biaya penyedia jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik - tagihan listrik. nomor SPD : 800/7887/LP-SPD/BKAD/2025 sumber dana PBJT LISTRIK	ADINDA RENITA PRADANA/TOKO ZEEZHAN	1.175.200,00
GG	**SEKRETARIAT DAERAH**		368.304.252,00
1	Belanja LS Biaya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rujab Bupati pada Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, sesuai BAP No. B.900.1.7.2/3109/XII/2025 dan SPD No. 800/7064/LP-SPD/BKAD/2025. DAU Umum	TOKO QISHIL (NAHARIAH)	4.250.000,00
2	Belanja LS Biaya Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Keg.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, sesuai SPD No. 800/8265/LP-SPD/BKAD/2025. PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.410.000,00
3	Belanja LS Biaya Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Tim Teknis Petugas Protokoler) pada Sub Keg. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, untuk Bulan Oktober s.d Nopember 2025. sesuai BAPP No. 700/17/BAPP-PROKOPIM/XII/2025 dan SPD No. 800/7988/LP-SPD/BKAD/2025. PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.500.000,00
4	Belanja LS Biaya Jasa Pendamping Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai BAPP No. 22/BAPP/HK/XI/2025 dan SPD No. 800/8183/LP-SPD/BKAD/2025. PAD	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.000.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Aalt angkutan-Alat Angkuta darat bermotor-Kendaraan bermotor Penumpang	BENGKEL MENARA TEKNIK/RUKMAN A	2.700.000,00
6	Biaya Belanja Alat/bahan Pemeliharaan gedung Kantor ruangan bupati Majene pada Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SINAR SURYA/HAMRI	35.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
7	Biaya Upah Tukang Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor ruang Bupati Majene pada Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan daerah Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya sesuai berita acara pembayaran		15.000.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	PERTAMINA SPBU LEMBANG MAJENE/ HASAN BASRI, ST	8.020.000,00
9	Biaya pemeliharaan Operasional BUS pada kegiatan pemeliharaan BMD	BENGKEL MENARA TEKNIK/RUKMAN A	33.300.000,00
10	Biaya Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	FOTO COPY ALFAHREZA/TASMAN, SP.d	5.020.000,00
11	Biaya Pengiriman Surat Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ARFAN DARMAN, SE	3.000.000,00
12	Biaya Pemeliharaan Mobil Jabatan Wakil Bupati Mejene Pada Kegiatan Pemeliharaan BMD	BENGKEL MENARA TEKNIK/RUKMAN A	5.680.000,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Perabot Kantor	TOKO ABYLA/ANDI ABY HURAYRAH	2.161.000,00
14	Biaya Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	TOKO ABYLA/ANDI ABY HURAYRAH	2.300.000,00
15	Biaya Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	TOKO ABYLA/ANDI ABY HURAYRAH	3.642.000,00
16	Biaya Pemeliharaan Mobil Operasional Rumah Jabatan Wakil Bupati Majene	BENGKEL MENARA TEKNIK/RUKMAN A	4.000.000,00
17	Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat angkutan Darat Bermotor-Kendaraabn Dinas Bermotor Perorangan	BENGKEL MENARA TEKNIK/RUKMAN A	10.500.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu-Electric Generating set pada kegiatan Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati	BENGKEL MENARA TEKNIK/RUKMAN A	5.200.000,00
19	Biaya Belanja Bahan Bakar Minyak pada Kegiatan Pemeliharaan BMD	PERTAMINA SPBU LEMBANG MAJENE/ HASAN BASRI, ST	11.424.000,00
20	Biaya Perjalanan Dinas wakil bupati pada kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat Daerah	REK. PENAMPUNGAN GAJI	16.897.252,00
21	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Pada OPD Sekretariat Daerah kabupaten Majene	Catering ALIZA (NUR AMANAH)	11.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
22	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Pada OPD Sekretariat Daerah kabupaten Majene	Catering ALIZA (NUR AMANAH)	20.200.000,00
23	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Pada OPD Sekretariat Daerah kabupaten Majene	Catering ALIZA (NUR AMANAH)	3.850.000,00
24	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Pada OPD Sekretariat Daerah kabupaten Majene	Catering ALIZA (NUR AMANAH)	4.500.000,00
25	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Pada OPD Sekretariat Daerah kabupaten Majene	Catering ALIZA (NUR AMANAH)	6.300.000,00
26	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Dan Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu-Electric Generating Set Pada OPD Sekretariat Daerah kabupaten Majene	BENGKEL MENARA TEKNIK/RUKMAN A	25.000.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	REK. PENAMPUNGAN GAJI	80.150.000,00
28	Biaya Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi Non ASN (Tenaga Operator SIAP) pada Sekretariat Daerah Kab. Majene	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.500.000,00
29	Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Operator Komputer	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.750.000,00
30	Belanja Jasa Tenaga juru Masak	REK. PENAMPUNGAN GAJI	14.250.000,00
31	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati dan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kab.Majene	REK. PENAMPUNGAN GAJI	7.000.000,00
32	Biaya Honorarium Pembayaran Jasa Ajudan Kepala Daerah	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.000.000,00
33	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	REK. PENAMPUNGAN GAJI	750.000,00
34	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.300.000,00
35	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.500.000,00
36	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.250.000,00
37	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.000.000,00
HH	**SEKRETARIAT DPRD**		414.611.900,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Belanja Pemeriksaan Medical Chek-UP Pimpinan & Anggota DPRD pada Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD TA. 2025 Sesuai SPD No : 800/7127/LP-SPD/BKAD/2025. Sumber Dana DAU KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJENE	100.000.000,00
2	Pelaksanaan Reses/Temu Konstituen		250.000.000,00
3	Belanja Lembur PNS dan Non PNS pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasai Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.850.000,00
4	Belanja Cetak Baliho pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi pada Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah Tahun Anggaran 2025		1.500.000,00
5	'Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Kantor		1.600.000,00
6	'Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		11.000.000,00
7	'Pembayaran Tagihan PDAM dan Wifi Bulan Desember pada Kantor Sekretariat DPRD Kab. Majene Tahun Anggaran 2025		3.656.900,00
8	Belanja Lembur PNS dan Non PNS pada Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Tahun Anggaran 2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.500.000,00
9	'Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen		35.000.000,00
10	'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.005.000,00
11	Uang Lembur PNS dan Non PNS pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD pada Sekretariat DPRD Kab. Majene Tahun Anggaran 2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.500.000,00
II	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		10.142.880,00
1	Koreksi Utang Perjalanan Dinas PMD Susulan Reviu Inspektorat	REK. PENAMPUNGAN GAJI	10.142.880,00
III	**BELANJA HIBAH**		17.227.900,00
III.1	**TAHUN 2024**		17.227.900,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
A	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		17.227.900,00
1	Pembayaran langsung Belanja Dana Hibah Untuk Tahap Ke 2 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dengan No : 800/7049/LP-SPD/BKAD/2024 Sumber Dana DAU UMUM	DPD PSI Kab Majene	17.227.900,00
IV	**BELANJA MODAL**		6.496.054.366,00
IV.1	**TAHUN 2020**		2.000.000,00
A	**KECAMATAN BANGGAE DAN KELURAHAN**		2.000.000,00
A.1	**Kecamatan Banggae**		**2.000.000,00**
1	Pengawasan Pembangunan Gedung Tempat Ibadah Kantor Kecamatan Banggae CV Creasy Consultant 3578/SPPD/LS/XII/2020 Tgl 28 Desember 2020	CV. Creasy Consultant	2.000.000,00
IV.2	**TAHUN 2022**		52.186.700,00
A	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		20.700.000,00
1	SPP-LS Biaya Pengadaan 2 Unit Laptop Sesuai SPK 800/BKPSDM/1115.a/XII/2022 Tgl 1 Desember 2022 dan BAP 002/BAP/BKPSDM/XII/2022 Pada BKPSDM Kab. Majene TA. 2022. Sumber Dana LPAD AN. CV. Mandala Putra	CV. Mandala Putra	20.700.000,00
B	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		8.950.000,00
1	Pembayaran Retensi 5% Pek. Pembangunan Drainase Lingk. Limboro Barat Kel. Tande Kec. Banggae Timur Kontrak No.10.02/SPK.DAU-SAN/CK-DPUPR/VIII/2022 Tgl.23/8/2022 & Jaminan No.SBD-0822343016-AP328 Tgl.8/12/2022 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2022.(DAU DTU)	LOGHA PUTRA, CV	4.475.000,00
2	Pembayaran Retensi Pemeliharaan 5% Pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Adolang Dhua Kec. Pamboang Sesuai Kontrak No.01.02/SPK.DAU-SAN/CK-DPUPR/IX/2022 Tgl.2/9/2022 & Jaminan No.SBD 2022 06.0 2 011058 Tgl.25/10/2022 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2022.(DAU DTU)	IBNATI, CV	4.475.000,00
C	**DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA**		1.185.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	LS Pembayaran 95% Atas Pelaksanaan Pengadaan Sumur Bor Sport Center Rangas, Berdasarkan SPK No. 012/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/X/2022 Tanggal 12 Oktober 2022. (Sumber Dana : DAU)	CV.PUTRA TUNGGAL ULMAN	1.185.000,00
D	**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**		5.956.700,00
1	Ls. Pemb. Biaya ATK Pengadaan Tanah Sport Center Pada Keg. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah, Sesuai NP No:17/Pesanan/PPTK/ATK/DBH/X/2022 Tgl 24/10 2022 dan BAP No:19/BAP/DPKPP/06/X/2022 Tgl 26/10/2022 (Sumber Dana DBH (PMK 07)	BARQAH FOTOCOPY	502.500,00
2	Ls. Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Keg Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah, Sesuai ST No:41.a/ST.LD/DPKPP/VI/2022 Tgl 7/6/2022 dan SPPD No:69.c/SPPD.LD/DPKPP/VI/2022 Tgl 7/6/2022 (Sumber Dana DBH (PMK 07)	BARQAH FOTOCOPY	2.859.200,00
3	Ls. Pemb. Biaya ATK Relokasi Warga Kec. Malunda Keg. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah, Sesuai NP No:47/Pesanan/PPTK/ATKDBH/X/2022 Tgl 24/10/2022 dan BAST No:48/BAST/PPTK/ATK/DBH/X/2022 Tgl 25/10/2022 (Sumber Dana DBH (PMK 07)	BARQAH FOTOCOPY	320.000,00
4	Ls. Pemb. Biaya Honorarium Pengadaan Tanah SPORT CENTRE pada Keg. Peny. Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah, Sesuai SK No:800/HK/KEP-BUP/VIII/2022 Tgl 1/8/2022 & BAP No:99/BAP/DPKPP/O6/XI/2022 Tgl 30/11/2022 (Sumber Dana DBH (PMK 07)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.275.000,00
E	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**		4.900.000,00
1	Sumber Dana (LLPAD). Pembayaran Pengadaan Air Condition (AC), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene Dengan PT SIKAPAIYA MANDAR MAJENE. SPK No : 800/623/2022 Tgl 7 Desember 2022. BAPP No : 800/627/2022 Tgl 8 Desember 2022, BAP No : 800/626/	PT SIKAPAIYYA MANDAR MAJENE	4.900.000,00
F	**KECAMATAN MALUNDA DAN KELURAHAN**		10.495.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
F.1	**Kelurahan Lamungan Batu**		**10.495.000,00**
1	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Mebel kursi putar sebanyak 1 unit dan meja biro Sebanyak 4 Unit Dengan SPK Nomor : 008/SPK/LMB/XII/2022 dan BAST 008/BAST/KEL-LMB/XII/2022		10.495.000,00
IV.3	**TAHUN 2023**		17.710.555,00
A	**DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA**		17.710.555,00
1	LS Pembayaran 100% Atas Kegiatan Pekerjaan Pengawasan (Pembangunan Pagar), Berdasarkan SPK No. 026/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/XII/2023 Tanggal 7 Desember 2023. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	MAKKULAU ENGINEERING, CV	5.900.000,00
2	LS Pembayaran 100% Atas Kegiatan Pengawasan (Halaman dan Pagar Sekolah) Berdasarkan SPK No.56/SPK-PENUN/DAU//DISDIKPORA/PAUD-PNF/X/2023 Tanggal 19 Ooktober 2023. (Sumber Dana :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	50.000,00
3	REHABILITASI PERPUSTAKAAN SDN 11 BAURUNG	MUBARAK, CV	1.250,00
4	REHABILITASI RUMAH DINAS GURU SDN 52 PALIPI	CV. LIGA OTONOMI	2.241.150,00
5	REHABILITASI PAGAR SDN 43 BUTTU SAMANG	CV. VHATAMBERO	1.117.500,00
6	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 17 GALUNG GALUNG	CV. BINA KARYA PERSADA	1.121.750,00
7	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 52 PARABAYA	CV. INDO RAYA MANDIRI	1.680.000,00
8	REHABILITASI PAGAR SDN 9 BANUA	CV. INDO RAYA MANDIRI	1.680.000,00
9	REHABILITASI PAGAR SDN 14 SIMBANG	CV. SUMBER CAHAYA RAHMAT	1.119.450,00
10	REHABILITASI PAGAR SDN 48 GALUNG UTARA	CV. SUMBER CAHAYA RAHMAT	1.119.450,00
11	REHABILITASI PAGAR SDN 14 SUMAKUYU	CV. ACO LOTONG PERKASA	1.680.005,00
IV.4	**TAHUN 2024**		4.340.578.639,00
A	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**		25.160.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Sumber Dana (DAU Pendidikan) Pembayaran Honor Kegiatan Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran kabupaten Majene T.A 2024, Sesuai SK No: 100.3.3.2/843/XI/TAHUN/2024 & No SPD Persetujuan: 800/7139/LP-SPD/BKAD/2024	Rekening Penampungan Gaji	25.160.000,00
B	**BADAN PERENCANAAN DAERAH**		130.000.000,00
1	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah SPD No.800/6943/LP-SPD/BKAD/2024 tgl 17 Desember 2024 (PAD)	Damas Dwi Anggoro (PT. IDE BANGSA MAHARDIKA)	130.000.000,00
C	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**		24.255.000,00
1	Pembayaran Honor Tim Pengelolaan, Perencanaan & Pengawasan Pembangunan Gerbang Objek Wisata Pantai Barane. Sesuai SK No. 100.3.3.2/708/VIII/Tahun 2024. Dasar SPD 800/6996/LP-SPD/BKD/2024. DAU Pendidikan	Rekening Penampungan Gaji	11.590.000,00
2	Pembayaran Honor Tim Pengelolaan, Perencanaan & Pengawasan Kegiatan Pembangunan Gerbang Objek Wisata Pantai Dato. Sesuai SK No. 100.3.3.2/708/VIII/2024. Dasar SPD. 800/5739/LP-SPD/BKAD/2024. (DAU Pendidikan)	Rekening Penampungan Gaji	12.665.000,00
D	**DINAS KESEHATAN**		310.355.281,00
1	Pembayaran LS Desember 2024, (100%) B.Modal Jasa Konsultan Pengawas Penambahan Ruang IGD PKM Totoli, Pada CV. TIEN SEJAHTERA, SPD No.800/7156/LP-SPD/BKAD/2024, Kont. No.130/SPK/DK-DAK/VII/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024, dana (DAU) Kesehatan	CV. TIEN SEJAHTERA	5.555.550,00
2	Pembayaran LS Desember 2024, (100%) B.Modal Jasa Konsultan Pengawas Sarana Pustu Ulumanda, pada CV. ADI PERMATA KONSULTAN, SPD No.800/7160/LP-SPD/BKAD/2024, Kont. No.135.1/SPK/DK-DAK/VIII/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAU) Kesehatan	CV. ADI PERMATA KONSULTAN	12.152.280,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
3	Pembayaran LS Desember 2024, 100% B. Modal, Jasa konsultan Pengawas Penambahan Persalinan IGD PKM Banggae I, CV. TIEN SEJAHTERA, Kont. No.133/SPK/DK-DAU/VIII/2024, SPD No.800/7155/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAU) Kesehatan	CV. TIEN SEJAHTERA	5.827.500,00
4	Pembayaran LS Desember 2024, (100%) B.Modal Jasa Konsultan Pengawas Penambahan Ruang IGD PKM Totoli, Pada CV. SUTIYA UTAMA KARYA, SPD No.800/7154/LP-SPD/BKAD/2024, Kont. No.135/SPK/DK-DAK/VIII/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024, (DAU) Kesehatan	CV. SUTIYA UTAMA KARYA	5.883.000,00
5	Pembayaran LS Desember 2024, 100% Belanja Modal, Jasa Konsultan Pengawas Penambahan Ruang IGD PKM Banggae I , CV. TIEN SEJAHTERA, Kont. No.133.1/SPK/DK-DAK/VIII/2024, SPD No.800/7157/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAU) Kesehatan	CV. TIEN SEJAHTERA	5.605.500,00
6	Pembayaran LS Desember 2024, Pemeliharaan 5% Pekerjaan Penambahan Ruang Persalinan PKM Banggae I, pada CV. BITTOENG GROUP PERKASA, SPD No.800/7128/LP-SPD/BKAD/2024, Kont. No.94/SPK/DK-DAK/VII/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAK) Fisik	CV. BITTOENG GROUP PERKASA	9.801.200,00
7	Pembayaran LS Desember 2024, MC II Pekerjaan Penambahan Ruang Persalinan PKM Banggae I, pada CV. BITTOENG GROUP PERKASA, SPD No.800/7129/LP-SPD/BKAD/2024, Kont. No.94/SPK/DK-DAK/VII/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAK) Fisik	CV. BITTOENG GROUP PERKASA	63.707.800,00
8	Pembayaran LS Desember 2024, (100%) B.Modal Jasa konsultan Pengawas Sarana Prasarana Pustu Popenga, pada CV. ADI PERMATA KONSULTAN, SPD No.800/7159/LP-SPD/BKAD/2024, Kont. No.126/SPK/DK-DAK/VII/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAU) kesehatan	CV. ADI PERMATA KONSULTAN	12.121.200,00
9	Pembayaran LS Desember 2024, 100%, B.Modal Jasa konsultan Pengawas sarana Pustu Tandeallo, Pada CV. ADI PERMATA KONSULTAN, SPD No.800/7158/LP-SPD/BKAD/2024, Kont. No.128/KONT/DK-DAK/VII/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber (DAU) Kesehatan	CV. ADI PERMATA KONSULTAN	12.099.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
10	Pembayaran LS Desember 2024, MC IV B.Modal Pekerjaan Sarana Prasarana Pustu Tandeallo, Pada CV. TEMPURAN KONTRUKSI, SPD No.800/7206/LP-SPD/BKAD/2024, Kont. No.100/KONT/DK-DAK/VII/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAK) Fisik	CV. TEMPURAN KONTRUKSI	25.062.500,00
11	Pembayaran LS Desember 2024, 5% (Pemeliharaan) B.Modal Pekerjaan Sarana Prasarana Pustu Tandeallo, Pada CV. TEMPURAN KONTRUKSI, SPD No.800/7207/LP-SPD/BKAD/2024, Kont. No.100/KONT/DK-DAK/VII/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAK) Fisik	CV. TEMPURAN KONTRUKSI	20.050.000,00
12	Pembayaran LS Desember 2024, MC IV B.Modal Pekerjaan Sarana Prasarana Pustu Popenga, pada CV. SWAPARAJA BALANIPA GROUP, SPD No.800/7203/LP-SPD/BKAD/2024, Kont. No.112/KONT/DK-DAK/VII/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAK) Fisik	CV. SWAPRAJA BALANIPA GROUP	40.701.501,00
13	Pembayaran LS Desember 2024, 5% (Pemeliharaan) B.Modal Pekerjaan Sarana Prasarana Pustu Popenga, CV. SWAPARAJA BALANIPA GROUP, SPD No.800/7208/LP-SPD/BKAD/2024, Kont. No.112/KONT/DK-DAK/VII/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAK) Fisik	CV. SWAPRAJA BALANIPA GROUP	20.350.750,00
14	Pembayaran LS Desember 2024, 5% (Pemeliharaan) Belanja Modal, Penambahan Ruang IGD PKM Banggae I, CV. ARSYATAMA JAYA KONSTRUKSI, SPK No.92/SPK/DK-DAK/VII/2024, SPD No.800/7202/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAK) Fisik	CV. ARSYATAMA JAYA KONTRUKSI	9.525.000,00
15	Pembayaran LS Desember 2024, MC II Belanja Modal, Penambahan Ruang IGD PKM Banggae I Pada CV. ARSYATAMA JAYA KONSTRUKSI, SPK No.92/SPK/DK-DAK/VII/2024, Sesuai SPD No.800/7201/LP-SPD/BKAD/2024, dinkes Kab. Majene T.A 2024 Bersumber dana (DAK) Fisik	CV. ARSYATAMA JAYA KONTRUKSI	61.912.500,00
E	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		1.554.364.367,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
1	Pembayaran 100% Belanja Modal Pekerjaan Biaya Perencanaan (Taman Kota rangas) Kontrak No.10.01/SPK.PAD.BG/CK-DPUPR/V/2024 Tgl.19/6/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana PAD) SPD No.800/5251/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.22/10/2024.	CV. AFINRA KONSULINDO	5.800.000,00
2	Pembayaran Retensi 5% (Belanja Modal) Pekerjaan Majene Terang (Lampu Hias Kota Majene) Kontrak No.01.02/KONT.EP.DAU-BG/CK-DPUPR/IX/2024 Tgl.10/9/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(DAU PU) SPD No.800/6249/LP-SPD/BKAD/2024 Jaminan No.29.93.01.4162.12.24.	CV. AFIQAH PUTRI PERMATA	67.259.750,00
3	Biaya Pengawasan [Majene Terang (Lampu Hias Kota Majene)]	CV. MAKKULAU ENGINEERING	44.788.500,00
4	Biaya Pengawasan (Pembangunan Ruang Terbuka Publik Di Bukit Ondongan Kec. Banggae)	CV. HANUHAZA MULTI ARTISTIK	5.888.550,00
5	Biaya Perencanaan (Pembangunan Ruang Terbuka Publik Di Bukit Ondongan Kec. Banggae)	CV. AFINRA KONSULINDO	5.950.155,00
6	Pembayaran MC 01 (95%) Pek. Pembangunan Ruang Terbuka Publik Di Bukit Ondongan Kec. Banggae	CV. KENDURI CINTA INDONESIA	80.415.000,00
7	Pembayaran Retensi Pemeliharaan (5%) Pek. Pembangunan Ruang Terbuka Publik Di Bukit Ondongan Kec. Banggae	CV. KENDURI CINTA INDONESIA	8.970.000,00
8	Biaya Pengawasan (Pembangunan Ruang Terbuka Publik Di Pelabuhan)	CV. HANUHAZA MULTI ARTISTIK	5.883.000,00
9	Biaya Pengawasan (Pembangunan Ruang Terbuka Publik Di Samping Stadion Prasamya)	CV. HANUHAZA MULTI ARTISTIK	5.883.000,00
10	Biaya Perencanaan (Pembangunan Ruang Terbuka Publik Di Samping Stadion Prasamya)	CV. AFINRA KONSULINDO	5.983.000,00
11	Pembayaran MC 01 (95%) Pek. Pembangunan Ruang Terbuka Publik Di Samping Stadion Prasamya	PT. UWANGGA SEJAHTERA ENGINEERING	80.415.000,00
12	Pembayaran Retensi Pemeliharaan (5%) Pek. Pembangunan Ruang Terbuka Publik Di Samping Stadion Prasamya	PT. UWANGGA SEJAHTERA ENGINEERING	8.935.000,00
13	Biaya Pengawasan (Taman Kota Lembang)	CV. HANUHAZA MULTI ARTISTIK	5.827.500,00
14	Biaya Perencanaan (Taman Kota Lembang)	AFINRA KONSULINDO, CV	5.905.200,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
15	Pembayaran Retensi Pemeliharaan (5%) Pek. Taman Kota Lembang	PT. UWANGGA SEJAHTERA ENGINEERING	8.955.815,00
16	Biaya Pengawasan (Taman Kota Rangas)	CV. HANUHAZA MULTI ARTISTIK	5.888.550,00
17	Pembayaran Retensi Pemeliharaan (5%) Pek. Taman Kota Rangas	PT. UWANGGA SEJAHTERA ENGINEERING	8.915.165,00
18	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan DAK Keg.(Pemeliharaan Berkala Jalan) Berupa SPPD Surat Tugas No.000.1.2.3/1038/ST/VIII/2024 Tgl.2/8/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(DAU PU) SPD No.800/5228/LP-SPD/BKAD/2024. Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	55.610.000,00
19	Pembayaran Retensi 5% Belanja Modal Pembangunan Jalan rabat beton Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kontrak No.07.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XII/2024 Tgl.2/12/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(DAU PU) SPD No.800/6435/LP-SPD/BKAD/2024.	MANDAR MEMBANGUN, CV	2.245.016,00
20	Pembayaran 100% Belanja Modal Pekerjaan Biaya Pengawasan Kegiatan Pembangunan Talud Lingk. Segeri Kel. Baruga Sesuai Kontrak No.05.09/SPK-AIR/DPUPR/IX/2024 TA.2024.(PAD) SPD No.800.6842/LP-SPD/BKAD/2024	SAHARA ENGINEERING, CV	5.894.100,00
21	Pembayaran 100% Belanja Modal Pekerjaan Biaya Perencanaan Keg. Pembangunan Talud Kec. Banggae Timur Sesuai Kontrak No.05.03/SPK/AIR-DPUPR/VII/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(PAD) SPD No.800/6845/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.17/12/2024	GEMA TEKNIK KONSULTAN, PT	5.857.470,00
22	Pembayaran 100% Belanja Modal Pekerjaan Biaya Pengawasan Kegiatan Pembangunan Talud Kec. Banggae Timur Kontrak No.05.07/SPK/AIR-DPUPR/IX/2024 Tgl.11/9/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana PAD) SPD No.800/6844/LP-SPD/BKAD/2024.	SULAPAAPPA MEDIA UTAMA, PT	5.900.000,00
23	Pembayaran LS Perjalanan dinas ke/ dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan pengendalian dan pengawasan (Penugasan) - Tematik Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAK) SPD No.800/7042/LP-SPD/BKAD/2024 Bidang Bina Marga. (Terlampir)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	80.300.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
24	Pembayaran 100% Belanja Modal Jasa Konsultan Pengawas kegiatan Kontraktual (Alokasi 2024) Kontrak No.02.02/KONT-SUPERVISI/BM-DPUPR/VII/2024 Tgl.17/7/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DBH PUSAT) SPD No.800/7107/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.	TATA INDOKARYA KONSULTAN, PT	99.678.000,00
25	Pembayaran 100% Belanja Modal Jasa Konsultan Pengawas kegiatan Kontraktual (Alokasi 2023) Kontrak No.03.02/KONT-SUPERVISI/BM-DPUPR/VII/2024 Tgl.17/7/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAU UMUM) SPD No.800/7111/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.	TATA INDOKARYA KONSULTAN, PT	99.678.000,00
26	Pembayaran Belanja Modal Biaya Pengelolaan (Program Nasional TMMD) Berupa Honor Sesuai SK No.100.3.3.2/450/IV/2024 Tgl.22/4/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana PAD) SPD No.800/5349/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.23/10/2024.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	16.950.000,00
27	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan (Perencanaan Jalan Kabupaten (Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan) DAK TA. 2025) Berupa ATK,Penggandaan & Honor Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(DAU PU) SPD No.800/7037/LP-SPD/BKAD/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	47.235.000,00
28	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan (Jalan Kabupaten (Non Tematik) DAK TA. 2025) Berupa Honor,ATK & Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAU PU) SPD No.800/7036/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	21.000.000,00
29	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan Kegiatan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Alokasi 2024) Berupa ATK & Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DBH Pusat) SPD No.800/7047/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	MUHAMMAD SYUKRI (TOKO AMANAH)	35.350.000,00
30	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Ruas Segeri-Puawang (Alokasi 2023) Berupa (SPPD,Honor,Penggandaan & ATK) Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAU PU) SPD No.800/7041/LP-SPD/BKAD/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	60.335.800,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
31	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan (Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jalan) Berupa ATK,Penggandaan,Honor & SPPD Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAU PU) SPD No.800/7033/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	26.060.000,00
32	Pembayaran LS (Belanja Modal) Biaya Pengelolaan DAK Keg. Pemeliharaan Berkala Jalan Berupa SPPD,ATK,Penggandaan & Honor Dinas PUPR Kab. Majene TA>2024.(Dana DAU PU) SPD No.800/7024/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	78.900.000,00
33	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Ruas Segeri-Puawang (Alokasi 2023) Kontrak No.03.02/KONT/BM-DPUPR/VII/2024 Tgl.17/7/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(DAU UMUM) SPD No.800/7108/LP-SPD/BKAD/2024.	MANDIRI LAND KONSTRUKSI, CV	53.743.849,00
34	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Pembangunan Jalan Tammerimbi) Berupa ATK & Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024. (Dana DAU PU) SPD No.800/7031/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	MUHAMMAD SYUKRI (TOKO AMANAH)	2.970.000,00
35	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Pembangunan Jalan Lingk. Lembang Kec. Banggae Timur) Berupa ATK & Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024. (Dana DAU PU) SPD No.800/7032/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	MUHAMMAD SYUKRI (TOKO AMANAH)	2.985.000,00
36	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Peningkatan Jalan Sulai Lombang) Berupa ATK & Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024. (Dana DAU PU) SPD No.800/7029/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	MUHAMMAD SYUKRI (TOKO AMANAH)	4.350.000,00
37	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan (Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung) Berupa ATK,Penggandaan & Honor Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAU PU) SPD No.800/7027/LP-SPD/BKAD/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.885.000,00
38	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Stok Desain Perencanaan Rekonstruksi Jalan Kabupaten) Berupa Honor, ATK & Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024. (Dana DAU PU) SPD No.800/7034/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.845.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
39	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Pembangunan Jalan rabat beton Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae) Berupa ATK Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024. (Dana DAU PU) SPD No.800/7030/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	MUHAMMAD SYUKRI (TOKO AMANAH)	1.500.000,00
40	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Biaya Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan) Berupa Honor, ATK & Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024. (Dana DAU PU) SPD No.800/7026/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.950.000,00
41	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Perencanaan Teknis (DED) Pelebaran Jalan) Berupa Honor, ATK & Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024. (Dana DAU PU) SPD No.800/7039/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.895.000,00
42	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Tematik Penguatan Destinasi Wisata) Berupa Honor, ATK & Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024. (Dana DAU PU) SPD No.800/7035/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.890.000,00
43	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Biaya Perencanaan Pembangunan Jembatan DAU) Berupa Honor, ATK & Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024. (Dana DAU PU) SPD No.800/7045/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.945.000,00
44	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Perencanaan Teknis Penanganan Jalan Long Segmen Paket 1) Berupa Honor, ATK & Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024. (Dana DAU PU) SPD No.800/7025/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.965.000,00
45	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan (Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan) Berupa ATK & Honor Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAU PU) SPD No.800/7040/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024. TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.935.000,00
46	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan (DED Penanganan Jalan Daerah (Inpres) TA. 2024) Berupa ATK,Penggandaan & Honor Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAU PU) SPD No.800/7038/LP-SPD/BKAD/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	8.500.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
47	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Stok Desain Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kabupaten) Berupa Honor, ATK & Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024. (Dana DAU PU) SPD No.800/7022/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.000.000,00
48	Pembayaran LS Biaya Pengelolaan (Rehabilitasi Jalan Ruas Lombang Takapak Kec. Malunda) Berupa ATK & Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024. (Dana DAU PU) SPD No.800/7028/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.TERLAMPIR	MUHAMMAD SYUKRI (TOKO AMANAH)	2.900.000,00
49	Pembayaran MC 01 95% Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kontrak No. 01.02/SPK-PL/BM-DPUPR/IX/2024 Tgl.16/9/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(DBH PROV) SPD No.800/7224/LP-SPD/BKAD/2024.	KARYA MUSYAWARAH, CV	80.127.171,00
50	Pembayaran Retensi 5% Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kontrak No. 01.02/SPK-PL/BM-DPUPR/IX/2024 Tgl.16/9/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(DBH PROV) SPD No.800/7225/LP-SPD/BKAD/2024.	KARYA MUSYAWARAH, CV	8.903.019,00
51	Pembayaran MC 01 95% Belanja Modal Pekerjaan Pembanggunan Jalan Tammerimbi Kontrak No.05.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XI/2024 Tgl.18/11/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAU PU) SPD No.800/7145/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.	P LANJA BARU, CV	40.322.083,00
52	Pembayaran Retensi Pemeliharaan 5% Belanja Modal Peningkatan Jalan Sulai Lombang Kontrak No.04.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XI/2024 Tgl.18/11/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAU PU) SPD No.800/7105/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.	P LANJA BARU, CV	6.735.000,00
53	Pembayaran Retensi Pemeliharaan 5% Belanja Modal Pekerjaan Pembanggunan Jalan Tammerimbi Kontrak No.05.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XI/2024 Tgl.18/11/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(Dana DAU PU) SPD No.800/7106/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024.	P LANJA BARU, CV	4.480.231,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
54	Pembayaran Retensi 5% Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingk. Kec. Banggae Timur Sesuai Kontrak No.03.02/SPK-PL/BMDPUPR/XI/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(DAU PU) SPD No.800/7199/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024	CAHAYA SURYA, CV	4.480.600,00
55	Pembayaran MC 01 95% Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingk. Lembang Kec. Banggae Timur Sesuai Kontrak No.03.02/SPK-PL/BMDPUPR/XI/2024 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2024.(DAU PU) SPD No.800/7198/LP-SPD/BKAD/2024 Tgl.20/12/2024	CAHAYA SURYA, CV	40.325.400,00
56	Biaya Pengelolaan (Pemb. Talud Kec. Banggae Timur)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	7.516.400,00
57	Pembayaran Retensi Pemeliharaan (5%) Pek. Pembangunan Talud Kec. Banggae Timur	CV. SURYA UTAMA	8.986.431,00
58	Biaya Pengeloaan (Pemb. Talud Lingk. Segeri)	Rek. Penampungan (Honor & ATK)	8.000.000,00
59	Biaya Pengawasan (Pembangunan Saluran Buang Dusun Tammalassu Desa Kayuangin)	CV. MAKKULAU ENGINEERING	4.400.000,00
60	Biaya Perencanaan (Pembangunan Saluran Buang Dusun Tammalassu Desa Kayuangin)	AFINRA KONSULINDO, CV	4.495.000,00
61	Biaya Pengawasan (Pembangunan Drainase dan Talud Lingk. Galung Utara)	Rek. Penampungan (Honor)	4.240.052,00
62	Biaya Pengelolaan (Pembangunan Drainase dan Talud Lingk. Galung Utara)	Rek. Penampungan (Honor)	4.240.052,00
63	Biaya Perencanaan (Pembangunan Drainase dan Talud Lingk. Galung Utara)	Rek. Penampungan (Honor)	5.653.402,00
64	Biaya Pengawasan (Pembangunan Saluran Air/Drainase dan Pagar Tanangan)	Rek. Penampungan (Honor)	9.350.000,00
65	Biaya Pengelolaan (Pembangunan Saluran Air/Drainase dan Pagar Tanangan)	Rek. Penampungan (Honor)	9.350.000,00
66	Pembayaran MC 01 (95%) Pek. Pekerjaan Jalan Kelurahan Tande (Pengaspalan)	CV.GRAHA BAKTI	158.961.695,00
67	Pembayaran Retensi Pemeliharaan (5%) Pek. Pekerjaan Jalan Kelurahan Tande (Pengaspalan)	CV.GRAHA BAKTI	17.662.411,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
68	Biaya Pengawasan (Pembangunan Jalan rabat beton Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae)	MANDAR MEMBANGUN, CV	1.470.000,00
69	Biaya Pengawasan (Pemb. Jalan Rabat Beton Ling. Buttu Samang Kel. Tande Timur)	CV. SUTIYA UTAMA KARYA	5.400.000,00
70	Biaya Pengawasan (Peningkatan Jalan Sulai Lombang)	CV. ADI PERMATA	4.350.000,00
F	**DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA**		1.490.538.480,00
1	LS Pemb. Honor,ATK,Makan Minum & Perjalanan Dinas Keg.Pengelolaan (Rehab. Lapangan Sepakbola Sport Center),SK Bupati No.100.3.3.2/576/VI/TAHUN 2024Tgl 25 Juni 2024 &Nota Pesanan Terlampir, SPD 800/6403/LP-SPD/BKAD/2024(SD :DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	19.390.000,00
2	LS Pemb. 5% BM Atas Keg. Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 3 Malunda, Berdasarkan SPK No.02.31/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 1 Oktober 2024,SPD 800/6554/LP-SPD/BKAD/2024. (SD : DAU Pendidikan)	CAHAYA SURYA, CV	3.699.870,00
3	LS Pembayaran 5% BM Atas Kegiatan Rehab. GOR Sport Center, Berdasarkan SP No. 008/SPK/PA-DISIDKPORA-PO/IX/2024 Tanggal 30 September 2024, SPD 800/6575/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	LIGA OTONOMI, CV	14.601.400,00
4	LS Pembayaran 65% BM Atas Kegiatan Rehab. GOR Sport Center, Berdasarkan SP No. 008/SPK/PA-DISIDKPORA-PO/IX/2024 Tanggal 30 September 2024, SPD 800/6576/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	LIGA OTONOMI, CV	189.818.200,00
5	LS Pembayaran 95% BM Atas Keg. Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 15 Ulumanda, Berdasarkan SPK No. 02.01/SPK/DAU/PA/DISIDKPORA-DIKDAS/IX/2024 Tanggal 30 September 2024,SPD 800/5963/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	AFIQAH PUTRI PERMATA, CV	21.708.182,00
6	LS Pemb. 5% BM Atas Keg. Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 3 Mosso, Berdasarkan SPK No. 02.26/SPK/DAU/PA-DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2024 Tanggal 30 September 2024, SPD 800/6840/LP-SPD/BKAD/2024.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	ASSAMALEWUANG, CV	4.633.475,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
7	LS Pembayaran 5% BM Atas Keg. Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 15 Ulumanda, Berdasarkan SPK No. 02.01/SPK/DAU/PA/DISIDKPORA-DIKDAS/IX/2024 Tanggal 30 September 2024,SPD 800/6398/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	AFIQAH PUTRI PERMATA, CV	3.863.850,00
8	LS Pemb.100% BM Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 56 Kampung Baru,SPK No. 01.70/SPK/PA/PEGWSN/DAU/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024,SPD No.800/6630/LP-SPD/BKAD/2024. (SD :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	4.896.000,00
9	LS Pemb.100% BM Pengawasan Keg.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 43 Buttu Samang,SPK No. 01.66/SPK/PA/PEGWSN/DAU/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024,SPD No.800/6627/LP-SPD/BKAD/2024. (SD :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	3.454.000,00
10	LS Pemb.100% BM Pengawasan Keg.Pembangunan Ruang Kelas SMPN 4 Majene,SPK No. 01.54/SPK/PA/PEGWSN/DAU/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024,SPD No.800/6639/LP-SPD/BKAD/2024. (SD :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	12.089.000,00
11	LS Pemb.100% BM Pengawasan Keg.Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 6 Kampung Baru,SPK No. 01.61/SPK/PA/PEGWSN/DAU/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024,SPD No.800/6635/LP-SPD/BKAD/2024. (SD :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	7.094.000,00
12	LS Pemb.100% BM Pengawasan Keg.Rehab. Pagar SDN 26 Pakkola,SPK No. 01.74/SPK/PA/PEGWSN/DAU/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024,SPD No.800/6629/LP-SPD/BKAD/2024. (SD :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	2.331.000,00
13	LS Pemb.100% BM Pengawasan Keg. Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas/Perpustakaan dan perabotnya SDN 51 Bussu,SPK No. 01.45/SPK/PA/PEGWSN/DAU/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024,SPD No.800/6638/LP-SPD/BKAD/2024. (SD :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	15.239.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
14	LS Pemb 95% BM Atas Keg. Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 6 Kampung Baru, Berdasarkan SPK No. 02.22/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2024 Tanggal 30 September 2024, SPD 800/6136/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	BUMI SULBAR PERKASA, CV	60.805.462,00
15	LS Pembayaran 45% BM Atas Keg. Pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan GOR dan Stadion Sport Center, Berdasarkan SP No. 013/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/X/2024 Tanggal 1 Oktober 2024, SPD No. 800/6742/LP-SPD/BKAD/2024. (SD : DAU Pendidikan)	SUMBER CAHAYA RAHMAT, CV	131.031.900,00
16	LS Pemb.100% BM Pengawasan Keg. Rehab. Pagar SDN 14 Bambangan,SPK No. 01.48/SPK/PA/PEGWSN/DAU/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024,SPD No.800/6636/LP-SPD/BKAD/2024. (SD :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	5.945.000,00
17	LS Pemb.100% BM Pengawasan Keg. Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas/perpustakaan dan Perabotnya Sekolah 49 Ratte tarring,SPK No. 01.56/SPK/PA/PEGWSN/DAU/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024,SPD No.800/6637/LP-SPD/BKAD/2024. (SD :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	15.239.000,00
18	LS Pemb.100% BM Pengawasan Keg. Pembangunan Pagar SMP Negeri 3 Malunda,SPK No. 01.72/SPK/PA/PEGWSN/DAU/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024,SPD No.800/6634/LP-SPD/BKAD/2024. (SD :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	2.200.000,00
19	LS Pemb.100% BM Pengawasan Keg. Pembangunan Dining Room (Rumah Makan) SMPN 4 Majene,SPK No. 01.40/SPK/PA/PEGWSN/DAU/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024,SPD No.800/6642/LP-SPD/BKAD/2024. (SD :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	4.806.000,00
20	LS Pemb.100% BM Pengawasan Keg. Rehab. Sedang/Berat Perpustakaan SDN 49 Passanggrahan,SPK No. 01.63/SPK/PA/PEGWSN/DAU/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024,SPD No.800/6628/LP-SPD/BKAD/2024. (SD :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	4.828.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
21	LS Pemb.100% BM Pengawasan Keg. Pembangunan Aula SMPN 4 Majene,SPK No. 01.53/SPK/PA/PEGWSN/DAU/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024,SPD No.800/6632/LP-SPD/BKAD/2024. (SD :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	4.900.000,00
22	LS Pemb.100% BM Pengawasan Keg. Pembangunan Sapo Kayyang SMPN 7 Satap Pamboang,SPK No. 01.71/SPK/PA/PEGWSN/DAU/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024,SPD No.800/6641/LP-SPD/BKAD/2024. (SD :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	2.680.000,00
23	LS Pemb.100% BM Pengawasan Keg. Rehab. Gedung SDN 49 Pasanggrahan,SPK No. 01.52/SPK/PA/PEGWSN/DAU/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024,SPD No.800/6631/LP-SPD/BKAD/2024. (SD :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	4.800.000,00
24	LS Pemb.100% BM Pengawasan Keg. Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 15 Ulumanda,SPK No. 01.73/SPK/PA/PEGWSN/DAU/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024,SPD No.800/6633/LP-SPD/BKAD/2024. (SD :DAU Pendidikan)	AKBAR CONSULTAN, CV	4.717.000,00
25	LS Pemb. 5% BM Atas Keg. Rehab. Lapangan Sepakbola Sport Center, Berdasarkan SP No. 011/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/IX/2024 Tanggal 30 September 2024, SPD 800/6962/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	SURYA UTAMA, CV	34.847.850,00
26	LS Pembayarab 5% BM Atas Keg. Rehab. Sedang/Berat Perpustakaan SDN 36 Somba, Berdasarkan SPK No. 02.16/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2024 Tanggal 7 Oktober 2024, SPD 800/6395/LP-SPD/BKAD/2024.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	MUBARAK, CV	3.360.775,00
27	LS Pemb. 95% Atas Keg. Pembangunan Ruang Kelas SDN 28 Aholeang Beserta Perabotnya Berdasarkan SPK No. 02.34/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 4 Oktober 2024, SPD 800/6578/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	ZULKARNAIN, CV	115.587.450,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
28	LS Pemb. 5% Atas Keg. Pembangunan Ruang Kelas SDN 28 Aholeang Beserta Perabotnya Berdasarkan SPK No. 02.34/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 4 Oktober 2024, SPD 800/6579/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	ZULKARNAIN, CV	6.083.550,00
29	LS Pemb. 95% BM Atas Keg. Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 3 Malunda, Berdasarkan SPK No.02.31/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 1 Oktober 2024,SPD 800/6553/LP-SPD/BKAD/2024. (SD : DAU Pendidikan)	CAHAYA SURYA, CV	70.297.530,00
30	LS Pemb. 5% BM Atas Keg. Pemb. Tribun Kolam Renang Sport Center, Berdasarkan SP No. 009/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/IX/2024 Tanggal 30 September 2024, SPD 800/6564/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	SURYA UTAMA, CV	17.756.900,00
31	LS Pemb. 20% BM Atas Keg. Pemb. Tribun Kolam Renang Sport Center, Berdasarkan SP No. 009/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/IX/2024 Tanggal 30 September 2024, SPD 800/6563/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	SURYA UTAMA, CV	71.027.600,00
32	LS Pembayaran 100% BM Atas kegiatan Pengawasan (Rehab. Lapangan Sepakbola Sport Center) Berdasarkan SPK No. 016/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024, SPD No. 800/6619/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	ARCIVIE 12, CV	19.203.000,00
33	LS Pembayaran 100% BM Atas kegiatan Pengawasan (Pengadaan Lampu Stadion Sport Center) Berdasarkan SPK No. 017/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024, SPD No. 800/6618/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	ARWI, CV	5.836.000,00
34	LS Pembayaran 100% BM Atas kegiatan Pengawasan (Pemb. Kamar Tribun Lapangan Sepakbola Sport Center) Berdasarkan SPK No. 018/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024, SPD No. 800/6617/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	ARCIVIE 12, CV	5.772.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
35	LS Pemb. 5% BM Atas Keg. Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas/Perpustakaan dan Perabotnya SDN 51 Bussu,SPK No.02.21/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2024 Tanggal 30 September 2024, SPD 800/6803/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	BUMI SULBAR PERKASA, CV	6.889.588,00
36	LS Pemb. 95% BM Atas Keg. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4 Majene, Berdasarkan SPK No. 02.37/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024, SPD 800/6801/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	RAHMAN, CV	104.839.862,00
37	LS Pemb. 5% BM Atas Keg. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4 Majene, Berdasarkan SPK No. 02.37/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024, SPD 800/6802/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	RAHMAN, CV	5.517.888,00
38	LS Pemb 5% BM Atas Keg. Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 6 Kampung Baru, Berdasarkan SPK No. 02.22/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2024 Tanggal 30 September 2024, SPD 800/6804/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	BUMI SULBAR PERKASA, CV	3.200.288,00
39	LS Pembayaran 100% BM Atas kegiatan Pengawasan (Pemb. Kantor UPTD Pengelolaan GOR dan Stadion Sport Center) Berdasarkan SPK No. 019/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024, SPD No. 800/6616/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	SUTIYA UTAMA KARYA, CV	7.944.270,00
40	LS Pemb. 5% BM Atas Keg. Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 5 Malunda,Berdasarkan SPK No. 02.36/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 5 Oktober 2024, SPD 800/6570/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	AFIQAH PUTRI PERMATA, CV	3.710.700,00
41	LS Pemb. 95% BM Atas Keg. Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 5 Malunda,Berdasarkan SPK No. 02.36/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 5 Oktober 2024, SPD 800/6569/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	AFIQAH PUTRI PERMATA, CV	70.503.300,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
42	LS Pembayaran 100% BM Atas kegiatan Pengawasan (Rehabilitasi GOR Sport Center) Berdasarkan SPK No. 020/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/X/2024 Tanggal 24 Oktober 2024, SPD No. 800/6620/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	ARCIVIE 12, CV	8.036.400,00
43	LS Pembayaran 100% BM Atas kegiatan Pengawasan (Pembangunan Tribun Kolam Renang Sport Center) Berdasarkan SPK No. 021/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/XI/2024 Tanggal 4 November 20242024, SPD No. 800/6621/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	ADI PERMATA KONSULTAN, CV	9.800.190,00
44	LS Pembayaran 45% BM Atas Keg. Pembangunan Kamar Tribun Lapangan Sepakbola Sport Center, Berdasarkan SP No. 010/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/IX/2024, Tanggal 30 September 2024, SPD 800/6959/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	SURYA UTAMA, CV	96.794.550,00
45	LS Pemb.65% BM Atas Pelaksanaan Pengadaan Lampu Stadion Sport Center,Berdasarkan SPK No.012/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/IX/2024 Tanggal 30 September 2024,SPD 800/6965/LP-SPD/BKAD/2024.(Sumber Dana :DAU Pendidikan)	AFIQAH PUTRI PERMATA, CV	138.511.100,00
46	LS Pemb.5% BM Atas Pelaksanaan Pengadaan Lampu Stadion Sport Center,Berdasarkan SPK No.012/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/IX/2024 Tanggal 30 September 2024,SPD 800/6966/LP-SPD/BKAD/2024.(Sumber Dana :DAU Pendidikan)	AFIQAH PUTRI PERMATA, CV	10.654.700,00
47	LS Pemb. 5% BM Atas Keg. Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 6 Satap Pamboang, Berdasarkan SPK No. 2Tanggal 4 Oktober 2024, SPD 800/6964/LP-SPD/BKAD/2024.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PANCA ANUGRAH, CV	5.620.775,00
48	LS Pemb. 95% BM Atas Keg. Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 6 Satap Pamboang, Berdasarkan SPK No. 02.33/SPK/DAU/PA-DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 4 Oktober 2024, SPD 800/6963/LP-SPD/BKAD/2024.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PANCA ANUGRAH, CV	106.794.725,00
49	LS Pembayaran 5% BM Atas Keg. Pembangunan Kamar Tribun Lapangan Sepakbola Sport Center, Berdasarkan SP No. 11, Tanggal 30 September 2024, SPD 800/6960/LP-SPD/BKAD/2024. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	SURYA UTAMA, CV	10.754.950,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
50	Pembayaran Angsuran 5 % Atas Atas Pelaksanaan Kegiatan RehabIlitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 43 Buttu Samang Berdasarkan SPK NO.02.13/SPK /DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2024 Tanggal 1 Oktober 2024, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene, Sumber Dana DAU TA. 2024		3.209.700,00
51	Pembayaran Angsuran 5 % Atas Atas Pelaksanaan Kegiatan RehabIlitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 28 Tamo Berdasarkan SPK NO.02.04/SPK /DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2024 Tanggal 30 September 2024, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene, Sumber Dana DAU TA. 2024		3.212.500,00
G	**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**		53.713.137,00
1	Pembangunan Drainase (Biaya Perencanaan)	CV. ADI PERMATA KONSULTAN	5.700.000,00
2	Pembangunan rehabilitasi dan peningkatan sistem saluran drainase lingkungan Lembang (Biaya Pengawasan)	CV. ADI PERMATA KONSULTAN	4.440.000,00
3	Pembangunan Drainase (Biaya Pengawasan)	CV. ARCHIVIE 12	5.883.000,00
4	Pembangunan rehabilitasi dan peningkatan sistem saluran drainase lingkungan Kelurahan Baruga Dhua (Biaya Pengawasan)	CV. ARCHIVIE 12	4.273.500,00
5	Pembangunan rehabilitasi dan peningkatan sistem saluran drainase lingkungan Leppe Barat RT. I (Biaya Pengawasan)	CV. ARCHIVIE 12	4.418.000,00
6	Pembangunan rehabilitasi dan peningkatan sistem saluran drainase lingkungan Lembang Kelurahan Lembang (Biaya Perrencanaan)	CV. ADI PERMATA KONSULTAN	4.450.212,00
7	Pembangunan rehabilitasi dan peningkatan sistem saluran drainase lingkungan Leppe Barat, RT I Kelurahan Lembang (Biaya Perrencanaan)	CV. ADI PERMATA KONSULTAN	4.450.000,00
8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sistem Saluran Drainase Lingkungan Kelurahan Baruga Dhua (Biaya Perencanaan)	CV. ADI PERMATA KONSULTAN	4.384.500,00
9	Pembangunan Drainase	CV. SULING MAS	8.975.025,00
10	Pembangunan rehabilitasi dan peningkatan sistem saluran drainase lingkungan lembang kelurahan lembang	CV. SULING MAS	6.738.900,00
H	**KECAMATAN BANGGAE DAN KELURAHAN**		**601.000,00**

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
H.1	**Kelurahan Banggae**		**601.000,00**
1	LS- Bayar Biaya Pengelolaan Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Gerobak Dorong dan Mesin Pemotong Rumput U/ diserahkan KeMasyarakat No.SPD:800/6923/LP-SPD/BKAD/2024 (Sumber Dana Dau Kelurahan T.A 2024	REK. PENAMPUNGAN GAJI	601.000,00
I	**KECAMATAN SENDANA DAN KELURAHAN**		2.913.904,00
I.1	**Mosso Dhua**		2.913.904,00
1	Belanja Modal Bangunan pembuang Pengaman Sungai - Pembangunan Drainase Lingkungan Malayu	CV. WIRATAMA CITRA PERKASA	2.913.904,00
J	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**		748.677.470,00
1	GUNTING OK BEDAH PT BOSWELL MAHAKARYA INDONESIA	PT BOSWELL MAHAKARYA INDONESIA	53.278.890,00
2	GUNTING OK BEDAH PT BOSWELL MAHAKARYA INDONESIA	PT BOSWELL MAHAKARYA INDONESIA	53.022.480,00
3	ALKES OK BEDAH PT BOSWELL MAHAKARYA INDONESIA	PT BOSWELL MAHAKARYA INDONESIA	45.783.060,00
4	ELEKTOSURGICAL PT DELAPAN GLOBALINDO PRATAMA MEDIKA	PT DELAPAN GLOBALINDO PRATAMA MEDIKA	405.400.000,00
5	ACECORIS PATIENT MONITOR PT GLOBAL MEDIK PERSADA	PT GLOBAL MEDIK PERSADA	65.411.550,00
6	PALLET PLASTIK CV MAXWELL SOLUSINDO	CV MAXWELL SOLUSINDO	22.500.000,00
7	TANGGA STENLESS CV DELAPAN JAYA MEDICA	CV DELAPASN JAYA MEDICA	3.300.000,00
8	USG 2DIMENSI 1 TRANDUSER CV DELAPAN JAYA MEDICA	CV DELAPAN JAYA MEDICA	73.800.000,00
9	OXIGEN REGULATOR CV DELAPAN JAYA MEDICA	CV DELAPAN JAYA MEDICA	3.935.000,00
10	PENGADAAN ALKES YANG TIDAK MASUK DALAM DAFTAR REVIU UTANG INSPEKTORAT KEPADA PT ALPRINDO ALKESINDO (TEMUAN BPK)	PT ALPRIDO ALKESINDO	17.886.410,00
11	PENGADAAN ALKES YANG TIDAK MASUK DALAM DAFTAR REVIU UTANG INSPEKTORAT KEPADA PT ALPRINDO ALKESINDO (TEMUAN BPK)	PT ALPRIDO ALKESINDO	4.360.080,00
IV.4	**TAHUN 2025**		2.083.578.472,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
A	**DINAS KESEHATAN**		179.423.615,00
1	Pembayaran LS Desember 2025, Belanja Modal Retensi 5% Pada CV. HAJAR HASWAT, Rehab Pustu Sirindu, Kont/SP. No.104/SPK/DK-DAU/IX/2025, SPD No.800/7861/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025, Bersumber (DAU) kesehatan, Jaminan No.TCK5931/12/25	CV. HAJAR HASWAT	4.488.550,00
2	Pembayaran LS Desember 2025, Belanja Modal Retensi 5% Pada CV. HAJAR HASWAT, Rehab Pustu Palipi, Kont/SP. No.106/SPK/DK-DAU/IX/2025, SPD No.800/7859/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025, Bersumber (DAU) kesehatan, Jaminan No.TCK5948/12/25	CV. HAJAR HASWAT	4.480.000,00
3	Pembayaran LS Desember 2025, Belanja Modal 100% Pada CV. HAJAR HASWAT, Pekerjaan Rehab Pustu Bonde, sesuai Kont/SP. No.102/SPK/DK-DAU/IX/2025, SPD No.800/7862/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025, Bersumber dana (DAU) kesehatan	CV. HAJAR HASWAT	40.365.000,00
4	Pembayaran LS Desember 2025, Belanja Modal Retensi 5% Pada CV. HAJAR HASWAT, Rehab Pustu Bonde, Kont/SP. No.102/SPK/DK-DAU/IX/2025, SPD No.800/7863/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025, Bersumber (DAU) kesehatan, Jaminan No.TCK5946/12/25	CV. HAJAR HASWAT	4.485.000,00
5	Pembayaran LS Desember 2025, Belanja Modal Retensi 5% Pada CV. KALOLI UTAMA, Rehab Pustu Mosso, sesuai Kont/SP. No.100/SPK/DK-DAU/IX/2025, SPD No.800/7857/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025, Bersumber (DAU) kesehatan, Jaminan No.TCK5926/12/25	CV. KALOLI UTAMA	4.488.811,00
6	Pembayaran LS Desember 2025, Belanja Modal 100% Pada CV. KALOLI UTAMA, Pekerjaan Rehab Pustu Mosso, sesuai Kont/SP. No.100/SPK/DK-DAU/IX/2025, SPD No.800/7857/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025, Bersumber dana (DAU) kesehatan	CV. KALOLI UTAMA	40.399.304,00
7	Pembayaran LS Desember 2025, Belanja Modal 100% Pada CV. HAJAR HASWAT, Rehab Pustu Sirindu, Kont/SP. No.104/SPK/DK-DAU/IX/2025, SPD No.800/7860/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025, Bersumber (DAU) kesehatan	CV. HAJAR HASWAT	40.396.950,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
8	Pembayaran LS Desember 2025, Belanja Modal 100% Pada CV. HAJAR HASWAT, Rehab Pustu Palipi, Kont/SP. No.106/SPK/DK-DAU/IX/2025, SPD No.800/7858/LP-SPD/BKAD/2025, dinkes Kab. Majene T.A 2025, Bersumber (DAU) kesehatan	CV. HAJAR HASWAT	40.320.000,00
B	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		844.515.522,00
1	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan (ATK & Penggandaan) Pembangunan Tanggul Pantai Dusun Tappagalung & Dusun Lalatedzong Desa Lalatedzong DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM) SPD No.800/7206/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.04/12/2025.TERLAMPIR	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.408.900,00
2	Pembayaran LS Belanja Modal 100% Biaya Pengelolaan berupa ATK & Penggandaan Pembangunan Pemecah Ombak / Breakwater Desa Bababulo Utara Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM) SPD No.800/7363/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 05/12/2025	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.318.500,00
3	Pemby. LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan Pek Rehabilitasi Tanggul Pantai Desa Palipi Soreang Berupa ATK & Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM) SPD No.800/7204/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.04/12/2025. Terlampir	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.224.900,00
4	Pembyr LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan Pemb Tanggul Kelurahan Rangas Berupa Honor (PA,PPTK,Pej Pengadaan,Pengw Teknis,Penl Kontrak,Tim Admi) SK. No.100.3.3.2/502/VII/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(Dau Umum)" SPD No.800/7364/LP-SPD/BKAD/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.985.000,00
5	Pemby. LS belanja Modal Biaya Pengelolaan Pek Pembangunan Tanggul Pantai Desa Bababulo Berupa Honor Sesuai SK Bupati No.100.3.3.2/502/VII/2025 DPUPR. (DAU UMUM) SPD No.800/7533/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.09/12/2025. Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.750.000,00
6	Pembyr LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan Perintisan Jalan Kel Sirindu Lingk. Sirindu – Lingk Udzung Berupa Honor Sesuai SK. No.100.3.3.2/626/VIII/2025, DPUPR Kab. Majene TA.2025.(Dau Umum)' SPD No.800/7537/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.9/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.850.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
7	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan Pembangunan Penahan Ombak Desa Tammeroddo Kec.Tammeroddo Sendana (Honor) Sesuai SK No.100.3.3.2/799/X/2025, Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7504/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.9/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.000.000,00
8	Pembyrn LS Belanja Modal biaya Pengelolaan (Honor) Pembangunan Drainase Dsn Seppong Desa Seppong Kec. Tammeroddo SK No. 100.3.3.2/777/X/TAHUN 2025 Tgl. 24/10/2025 DPUPR Kab. Majene TA. 2025 SPD No.800/7451/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.09/12/2025 (DAU UMUM)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.250.000,00
9	Pembayaran LS Belanja Modal biaya Pengelolaan berupa Honor Pekerjaan Renovasi Ruang Wakil sesuai SK No. 100.3.3.2/777/X/TAHUN 2025 Tgl. 24/10/2025 Dinas PUPR Kab. Majene TA. 2025 SPD No.800/7450/LP'SPD/BKAD/2025 Tgl. 09/12/2025 (DBH Rokok)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.540.000,00
10	Pembayaran LS Belanja Modal biaya Pengawasan Berupa Honor Pekerjaan Renovasi Ruang Wakil sesuai SK No. 100.3.3.2/777/X/TAHUN 2025 Tgl. 24/10/2025 Dinas PUPR Kab. Majene TA. 2025 SPD No.800/7449/LP'SPD/BKAD/2025 Tgl. 09/12/2025 (DBH Rokok)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.450.000,00
11	Pembyrn LS Belanja Modal biaya Pengelolaan (Honor) Pembangunan Drainase Depan Masjid Kel. Rangas sesuai SK No. 100.3.3.2/777/X/TAHUN 2025 Tgl. 24/10/2025 DPUPR Kab. Majene TA. 2025 SPD No.800/7456/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.09/12/2025 (DAU UMUM)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.100.000,00
12	Pembayaran LS Belanja Modal biaya Perencanaan (Honor) Pekerjaan Renovasi Ruang Wakil sesuai SK No. 100.3.3.2/777/X/TAHUN 2025 Tgl. 24/10/2025 Dinas PUPR Kab. Majene TA. 2025 SPD No.800/7542/LP'SPD/BKAD/2025 Tgl. 09/12/2025 (DBH Rokok)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.500.000,00
13	Pembayr LS Belanja Modal Pek. Biaya Perencanaan (Honor) Pemb Pembangunan Drainase Lingk. Ka'Loli, Kel. Tande Timur, Kec. Banggae Timur sesuai SK No. 100.3.3.2/577/VII/TAHUN 2025 Tgl. 30/7/2025 (DAU KES) SPD No. 7608/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.11/12/2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	5.964.230,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
14	Pembayaran LS Belanja Modal biaya Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Depan Masjid Kel. Rangas Honor sesuai SK No. 100.3.3.2/777/X/TAHUN 2025 Tgl. 24/10/2025 SPD No. 800/7457/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 09/12/2025 (DAU UMUM)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	6.450.000,00
15	Pembayaran LS Belanja Modal biaya Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun Seppong Desa Seppong Kec. Tammeroddo Honor sesuai SK No. 100.3.3.2/777/X/TAHUN 2025 Tgl. 24/10/2025 SPD No. 800/7460/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 09/12/2025 (DAU UMUM)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.000.000,00
16	Pemby. LS belanja Modal Biaya Pengelolaan Pek Pembangunan Pemecah Ombak / Breakwater Desa Bababulo UtaraBerupa Honor Sesuai SK Bupati No.100.3.3.2/502/VII/2025 DPUPR. (DAU UMUM) SPD No.800/7534/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.09/12/2025. Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.005.000,00
17	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Perencanaan Pembangunan Penahan Ombak Desa Tammeroddo Kec.Tammeroddo Sendana (Honor) Sesuai SK No.100.3.3.2/799/X/2025, Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7494/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.9/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.900.000,00
18	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengawasan Pembangunan Penahan Ombak Desa Tammeroddo Kec.Tammeroddo Sendana (Honor) Sesuai SK No.100.3.3.2/799/X/2025, Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7491/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.9/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.000.000,00
19	Pembyrn LS Belanja Modal Retensi (5%) Pek. Pembangunan Drainase Dusun Seppong Desa Seppong Kec. Tammeroddo Kontrak No. 17.02/SPK.DAU.BG/CK-DPUPR/XI/2025 Jaminan No. TCK3839/12/25 SPD No. 800/6986/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.02/12/2025 (DAU UMUM)	BANUA SALU MALOGA, CV	4.480.000,00
20	Pembyrn LS Belanja Modal MC 01 (100%) Pek. Pembangunan Drainase Dusun Seppong Desa Seppong Kec. Tammeroddo Kontrak No. 17.02/SPK.DAU.BG/CK-DPUPR/XI/2025 BAST 03.01.122/PHO-CK/DPUPR/XII/2025 SPD No. 800/6987/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.02/12/2025 (DAU UMUM)	BANUA SALU MALOGA, CV	85.120.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
21	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengawasan Pembangunan Talud Desa Seppong (Honor) Sesuai SK No.100.3.3.2/798/X/2025, Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7503/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.9/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.050.000,00
22	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Perencanaan Pembangunan Talud Desa Seppong (Honor) Sesuai SK No.100.3.3.2/798/X/2025, Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7498/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.9/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.900.000,00
23	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan Pembangunan Talud Desa Seppong (Honor) Sesuai SK No.100.3.3.2/798/X/2025, Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7495/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.9/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	3.000.000,00
24	Pembyr. (100%) Pek. Jasa Konsultan Pengawas Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Mekatta-Aholeang Kontrak No. 01.02/SPK-SUPERVISI/BM-DPUPR/X/2025 Tgl. 01/10/2025 BAST 07.01.183/BAST-BM/DPUPR/XII/2025 SPD No. 800/7306/LP-SPD/BKAD/2025 (DBH SAWIT)	CV. ADI PERMATA KONSULTAN	24.700.000,00
25	Pembyr LS Belanja Modal 100% Biaya Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai Desa Onang Kec.Tubo Sendana Kontrak No.03.31/SPK/AIR-DPUPR/IX/2025 Tgl.05/9/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7416/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.8/12/2025	TAQY KONSULTAN, CV	5.700.000,00
26	Pembyr LS Belanja Modal 100% Biaya Pengawasan Pembangunan Tanggul Dusun Waigamo Desa Ulidang Kec.Tammerodo Sendana Kontrak No.03.28/SPK/AIR-DPUPR/IX/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(Dau Umum)' SPD No.800/7421/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.8/12/2025	SAPO UTAMA KONSULTAN, CV	5.883.000,00
27	Pembyr LS Belanja Modal 100% Biaya Pengawasan Pembangunan Talud Sungai Dusun Leppangan Timur Desa Leppangan Kec. Sendana Kontrak No.05.04/SPK/AIR-DPUPR/IX/2025 Tgl.05/9/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7414/LP-SPD/BKAD/2025	SAPO UTAMA KONSULTAN, CV	5.700.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
28	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Perencanaan Pembangunan Talud Desa Seppong (SPPD) Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7592/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.11/17/2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.920.000,00
29	Pembayaran LS Belanja Modal Retensi 5% Pembangunan Jalan Rabat Beton Kontrak No.21.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XI/2025 Tgl.27/11/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7552/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.11/12/2025	ZULFIKAR, CV	7.175.000,00
30	Pemby. LS belanja Modal Biaya Pengelolaan Pek Pembangunan Tanggul Pantai Desa Bababulo Berupa ATK dan Penggandaan Dinas PUPR Kab. Majene TA. 2025 (DAU UMUM) SPD No.800/7876/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.22/12/2025. Terlampir	TOKO MATAPPA GROUP (MUHAMMAD SYUKRI)	1.112.500,00
31	Pembayaran LS Belanja Modal Retensi 5% Pembangunan Jalan Lingkungan Battayang Kontrak No.10.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XI/2025 Tgl.27/11/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7554/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.11/12/2025	AFIQAH PUTRI PERMATA, CV	4.485.000,00
32	Pmbyrn LS Belanja Modal biaya Pengelolaan Program Nasional TMMD berupa ATK & Penggandaan sesuai SPD No. 800/7748/LP/-SPD/BKAD/2025 Tgl. 16/12/2025 (DAU UMUM)	TOKO ALFA REZA (TASMAN, S.Pd)	3.893.874,00
33	Pembayaran LS Belanja Modal MC 01 100% Pembangunan Jalan Lingkungan Battayang Kontrak No.10.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XI/2025 Tgl.27/11/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7553/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.11/12/2025	AFIQAH PUTRI PERMATA, CV	40.365.000,00
34	Pmbyrn LS Belanja Modal biaya Pengelolaan Pembangunan Jalan Lingkungan Battayang berupa ATK & Penggandaan sesuai SPD No. 800/7752/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 16/12/2025 (DAU UMUM)	TOKO ALFA REZA (TASMAN, S.Pd)	2.732.009,00
35	Pembayaran LS Belanja Modal MC 01 100% Pembangunan Jalan Rabat Beton Kontrak No.21.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XI/2025 Tgl.27/11/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7551/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.11/12/2025	ZULFIKAR, CV	64.575.000,00
36	Pmbyrn LS Belanja Modal biaya Pengelolaan Peningkatan Jalan Dusun Manyamba Timur berupa ATK & Penggandaan sesuai SPD No. 800/7747/LP'SPD-BKAD-2025 Tgl. 16/12/2025 (DAU UMUM)	TOKO ALFA REZA (TASMAN, S.Pd)	2.510.631,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
37	Pembyr LS Belanja Modal 100% Biaya Pengawasan Pembangunan Tanggul Pantai Desa Bababulo Kec. Pamboang Kontrak No.03.30/SPK/AIR-DPUPR/IX/2025 Tgl.05/9/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7417/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.8/12/2025	TAQY KONSULTAN, CV	5.700.000,00
38	Pembayaran LS Belanja Modal Tahap II 100% Pembangunan Talud Desa Seppong Kontrak No.03/SPK-SWAKELOLA/AIR-DPUPR/X/2025 Tgl.29/10/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7256/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.04/12/2025	PPTK BIDANG PENGAIRAN DINAS PUPR MAJENE	45.000.000,00
39	Pemby LS 100% Belanja Modal Biaya Pengawasan Pemb Tanggul Pantai Dusun Tappagalung & Dusun Lalatedzong Desa Lalatedzong Kec. Sendana Kontrak No.03.27/SPK/AIR-DPUPR/IX/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(Dau Umum)' SPD No.800/7419/LP-SPD/BKAD/2025	SAPO UTAMA KONSULTAN, CV	5.883.000,00
40	Pembyr LS Belanja Modal 100% Biaya Pengawasan Pembangunan Pemecah Ombak / Breakwater Desa Tinambung Kec.Pamboang Kontrak No.03.26/SPK/AIR-DPUPR/IX/2025 Tgl.01/9/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7420/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.8/12/2025	SAPO UTAMA KONSULTAN, CV	5.883.000,00
41	Pembayaran LS 100% Belanja Modal Biaya Pengawasan Pembangunan Pemecah Ombak / Breakwater Desa Bababulo Utara Kontrak No.03.29/SPK/AIR-DPUPR/IX/2025 Tgl.03/09/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7418/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.08/12/2025	SAPO UTAMA KONSULTAN, CV	5.883.000,00
42	Pembyr LS Belanja Modal MC 01 100% Rekonstruksi Jalan Ruas Lembang Kec. Banggae Timur Kontrak No.16.02/SPK-PL/BM-DPUPR/X/2025 Tgl.23/10/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DANA PAD)' SPD No.800/8225/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025	ASSAMALEWUANG, CV	81.675.000,00
43	Pembyr LS Belanja Modal MC 01 100% Rekonstruksi Jalan Ruas Tunda - Buttu Kontrak No.11.02/SPK-PL/BM-DPUPR/X/2025 Tgl.01/10/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DANA PAD)' SPD No.800/8226/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025	ASSAMALEWUANG, CV	81.720.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
44	Pembyr LS Belanja Modal retensi 5% Rekonstruksi Jalan Ruas Tunda - Buttu Kontrak No.11.02/SPK-PL/BM-DPUPR/X/2025 Tgl.01/10/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DANA PAD)' SPD No.800/8223/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025	ASSAMALEWUANG, CV	9.080.000,00
45	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengawasan Pembangunan Talud Desa Seppong (SPPD) SuratTugas No.000.1.2.3/1289/ST/XI/2025 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025 (DAU UMUM) SPDNo.800/7900/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.22/12/2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	800.000,00
46	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan Pembangunan Tanggul Pantai Desa Bababulo (SPPD) Surat Tugas No. 000.1.2.3/932/ST/IX/2025 Dinas PUPR Kab. MajeneTA.2025 (DAU UMUM) SPPD No. 800/7865/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.22/12/2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	960.000,00
47	Pemby. LS Belanja Modal Biaya Perencanaan Pemb. Penahan Ombak Desa Tammeroddo, Kec.Tammeroddo Sendana (SPPD) Surat Tugas No.000.1.2.3/1185/ST/XI/2025 Dinas PUPR Kab. MajeneTA.2025 (DAU UMUM) SPD No.800/7899/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.22/12/2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	1.920.000,00
48	Pemby LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan Pembangunan Tanggul Pantai Dusun Tappagalung dan Dusun Lalattedzong Desa Lalattedzong (SPPD) Sesuai ST No.000.1.2.3/717/ST/VIII/2025, DPUPR Kab. Majene TA.2025.(Dau Umum)' SPD No.800/7874/LP-SPD/BKAD/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	640.000,00
49	Pembyr LS Belanja Modal Retensi 5% Rekonstruksi Jalan Ruas Lembang Kec. Banggae Timur Kontrak No.16.02/SPK-PL/BM-DPUPR/X/2025 Tgl.23/10/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DANA PAD)' SPD No.800/8224/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025	ASSAMALEWUANG, CV	9.075.000,00
50	Pmbyrn LS Belanja Modal biaya Pengelolaan Pembangunan Jalan Rabat Beton berupa ATK & Penggandaan sesuai SPD No. 800/7749/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 16/12/2025 (DAU UMUM)	TOKO ALFA REZA (TASMAN, S.Pd)	4.731.378,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
51	Pemby LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan Rehab Drainase Kelurahan Pangali-Ali (Honor). SK Bupati No.100.3.3.2/546/VII/2025 Tgl.21/07/2025 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(Dau Kesehatan)' SPD No.800/6117/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.17/11/2025. Daftar Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	4.450.000,00
52	Pembyrn LS Belanja Modal biaya Pengawasan (Honor) Pek.Pembangunan Drainase Dusun Seppong Desa Seppong Kec. Tammeroddo sesuai SK No. 100.3.3.2/777/X/TAHUN 2025 Tgl. 24/10/2025 DPUPR Kab. Majene TA. 2025 SPD No.800/7724/LP'SPD/BKAD/2025.(DAU UMUM)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	2.850.000,00
53	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Battayang Kontrak No.19.02/SPK-SUPERVISI/BM-DPUPR/XII/2025 Tgl.1/12/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7539/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.09/12/2025	SHARFINA CONSULTANT, CV	2.915.000,00
54	Pembayaran LS 100% Belanja Modal Biaya Pengawasan Pembangunan Jalan Rabat Beton Kontrak No.18.02/SPK-SUPERVISI/BM-DPUPR/XII/2025 Tgl.01/12/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7538/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.09/12/2025	SHARFINA CONSULTANT, CV	4.606.500,00
55	Pembyr LS Belanja Modal 100% Biaya Pengawasan Rehab Tanggul Pantai Desa Tubo Selatan Kec. Tubo Sendana Kontrak No.04.08/SPK/AIR-DPUPR/IX/2025 Tgl.03/9/2025 DPUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7415/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.8/12/2025	TAQY KONSULTAN, CV	5.894.100,00
56	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan Pembangunan Tanggul Sungai Desa Onang Berupa SPPD Sesuai ST No.000.1.2.3/755/ST/VIII/2025, Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7866/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.22/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	800.000,00
57	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan Pembangunan Pemecah Ombak / Breakwater Desa Tinambung Berupa SPPD Sesuai ST No.000.1.2.3/722/ST/VIII/2025, Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7868/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.22/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	640.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
58	Pembyr LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan Pembangunan Pemecah Ombak / Breakwater Desa Bababulo Utara Berupa SPPD Sesuai ST No.000.1.2.3/928/ST/IX/2025, Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7875/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.22/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	480.000,00
59	Pembyr LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan Pembangunan Tanggul Pantai Desa Bonde Utara Berupa SPPD Sesuai ST No.000.1.2.3/980/ST/X/2025, Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM)' SPD No.800/7867/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.22/12/2025.Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	800.000,00
60	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengawasan Pembangunan Penahan Ombak Desa Tammeroddo,Kec. Tammeroddo Sendana (SPPD) ST No.000.1.2.3/1310/ST/XI/2025 Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025(DAU UMUM) SPD No.800/7898/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.22/12/2025	REK. PENAMPUNGAN GAJI	800.000,00
61	Pembayaran LS Belanja Modal Biaya Pengelolaan (SPPD) Pembangunan Drainase Dusun Seppong Desa Seppong Kec. Tammeroddo Dinas PUPR Kab. Majene TA.2025.(DAU UMUM) SPD No.800/7939/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl.23/12/2025.Surat Tugas & SPPD Terlampir	REK. PENAMPUNGAN GAJI	640.000,00
62	Program Penyelenggaran Jalan	IRHAM, ST	11.000.000,00
63	MC 01 Pek. Rekonstruksi Jalan Ruas Salutambung - Rura	MUH. JABIR	81.693.495,00
64	Retensi 5% Pek. Rekonstruksi Jalan Ruas Salutambung - Rura	MUH. JABIR	9.332.355,00
65	[-] Biaya Pengawasan Pemb. Rabat Beton Kel. Lembang	MUHAMMAD MUSA	2.680.030,00
66	[-] Biaya Perencanaan Peningkatan Jalan Desa Pesa'i - Belia - Ratte	ILHAM YUNUS. ST., MT	7.164.773,00
67	[-] Biaya Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Pesa'i - Belia - Ratte	M. IKHSAN AMIR, SE	5.394.600,00
68	[-] Biaya Perencanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Lembang Kec. Banggae Timur	ILHAM YUNUS. ST., MT	7.164.773,00
69	[-] Biaya Pengawasan Rekonstruksi Jalan Ruas Lembang Kec. Banggae Timur	M. IKHSAN AMIR, SE	5.394.600,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
70	[-] Biaya Perencanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Tunda - Buttu	ILHAM YUNUS. ST., MT	7.165.050,00
71	[-] Biaya Pengawasan Rekonstruksi Jalan Ruas Tunda - Buttu	M. IKHSAN AMIR, SE	5.394.600,00
72	[-] Biaya Perencanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Salutambung - Rura	ILHAM YUNUS. ST., MT	7.165.050,00
73	[-] Biaya Pengawasan Rekonstruksi Jalan Ruas Salutambung - Rura	M. IKHSAN AMIR, SE	5.394.600,00
74	Rehabilitasi Jalan Ruas Lembang	H. SYAMSUL RIJAL, H	71.784.000,00
75	Pembangunan Drainase Di Desa Tandeallo	HASLIAH, S.IP	9.963.074,00
76	**DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA**		355.759.435,00
77	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Perpustakaan SDN 18 Bababulo Berdasarkan SPK No. 01.134/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2025 Tanggal 3 November 2025, SPD 800/7096/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	1.609.000,00
78	LS Pembayaran 100% BM Atas Kegiatan Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Perpustakaan SDN 21 Totolisi Berdasarkan SPK No.01.135/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 3 November 2025, SPD 800/7089/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana :DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	1.609.000,00
79	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab.Sedang/Berat Perpustakaan SD NEGERI 4 Galung-galung Berdasarkan SPK No.01.138/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 3 November 2025,SPD 800/7093/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana :DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	1.609.000,00
80	LS Pembayaran 100% BM Atas Kegiatan Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 6 Tubo Sendana Berdasarkan SPK No.01.166/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2025 Tanggal 5 November 2025, SPD 800/7105/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana :DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	2.331.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
81	LS Pembayaran BM Kegiatan Biaya Pengelolaan SD (ATK) Berdasarkan SPMK No. 01.22/PENUN/SPMK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2025 Tanggal 17 November 2025, SPD 800/6888/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	TOKO SINAR ILMU	3.624.925,00
82	LS Pembayaran BM Kegiatan Biaya Pengelolaan SD (ATK) Berdasarkan SPMK No. 01.23/PENUN/SPMK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2025 Tanggal 18 November 2025, SPD 800/6953/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	TOKO SINAR ILMU	1.999.497,00
83	LS Pembayaran 100% BM Atas Kegiatan Pengawasan Pemb. Toilet/Jamban SDN 55 Deteng-deteng Berdasarkan SPK No. 01.145/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2025 Tanggal 4 November 2025, SPD 800/7090/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	1.332.000,00
84	LS Pembayaran BM Kegiatan Biaya Pengelolaan SD (ATK) Berdasarkan SPMK No. 01.24/PENUN/SPMK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2025 Tanggal 17 November 2025, SPD 800/6887/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	TOKO SINAR ILMU	1.498.000,00
85	LS Pembayaran BM Kegiatan Biaya Pengelolaan SD (ATK) Berdasarkan SPMK No. 01.25/PENUN/SPMK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2025 Tanggal 18 November 2025, SPD 800/6889/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	TOKO SINAR ILMU	3.748.985,00
86	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 31 Ratte Padang Berdasarkan SPK No. 01.111/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 21 Oktober 2025, SPD 800/7147/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	1.970.000,00
87	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Ruang Kelas SDN 40 Pappota Berdasarkan SPK No. 01.114/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 22 Oktober 2025, SPD 800/7148/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	2.484.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
88	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Ruang Kelas SDN 23 Tammajannang Berdasarkan SPK No. 01.105/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 21 Oktober 2025, SPD 800/7142LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	1.942.000,00
89	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 52 Parabaya Berdasarkan SPK No. 01.112/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 21 Oktober 2025, SPD 800/7137/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	2.450.000,00
90	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Ruang Kelas SDN 15 Ulumanda Berdasarkan SPK No. 01.131/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, SPD 800/7143LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	1.864.000,00
91	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Kantor Ruang Guru SMPN 2 MAJENE Berdasarkan SPK No. 01.158/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, SPD 800/7131/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	1.693.000,00
92	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Pagar SMPN 2 Pamboang Berdasarkan SPK No. 01.180/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, SPD 800/7129/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	3.685.000,00
93	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Pagar SMPN 2 MAJENE Berdasarkan SPK No. 01.180/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, SPD 800/7130/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	3.685.000,00
94	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 45 Parrasangan Berdasarkan SPK No. 01.107/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 21 Oktober 2025, SPD 800/7145/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	2.442.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
95	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Ruang Kelas SDN 33 Rawang-rawang Berdasarkan SPK No. 01.106/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 21 Oktober 2025, SPD 800/7138/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	1.948.000,00
96	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Ruang Kelas SDN 24 Batu Taku Berdasarkan SPK No. 01.108/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 21 Oktober 2025, SPD 800/7141/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	1.970.000,00
97	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Pembangunan Pagar SMPN 3 Pamboang Berdasarkan SPK No. 01.178/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, SPD 800/7104/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	1.859.000,00
98	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Pembangunan Pagar SMPN 6 Tubo Berdasarkan SPK No. 01.152/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 22 Oktober 2025, SPD 800/7109/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	1.776.000,00
99	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 32 Udunglemo Berdasarkan SPK No. 01.109/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 21 Oktober 2025, SPD 800/7140/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	1.942.000,00
100	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 50 Konja Berdasarkan SPK No. 01.116/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 22 Oktober 2025, SPD 800/7144/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	2.484.000,00
101	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Kantor Ruang Guru SMPN 3 Pamboang Berdasarkan SPK No. 01.168/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, SPD 800/7132/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	1.691.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
102	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Ruang Guru SMPN 6 Majene Berdasarkan SPK No. 01.159/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, SPD 800/7133/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	1.693.000,00
103	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Pagar SMPN 1 MAJENE Berdasarkan SPK No. 01.181/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, SPD 800/7128/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	2.430.000,00
104	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Sedang Berat Ruang Guru SMPN 1 MAJENE Berdasarkan SPK No. 01.167/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, SPD 800/7134/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. SAHARA ENGINEERING	3.431.000,00
105	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Perpustakaan SD NEGERI NO 19 Rangas Berdasarkan SPK No. 01.127/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 29 Oktober 2025, SPD 800/7355/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.609.000,00
106	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Ruang Kelas SDN 48 Galung Berdasarkan SPK No. 01.151/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2025 Tanggal 10 November 2025, SPD 800/7359/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	2.473.000,00
107	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Rumah Guru SDN 4 Tanjung Batu Berdasarkan SPK No. 01.119/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, SPD 800/7342/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	2.941.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
108	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg.Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Laboratorium Komputer SMPN 3 Pamboang Berdasarkan SPK No. 01.166/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, SPD 800/7327/LP-SPD/BKAD/2025.(SD: DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.873.000,00
109	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Ruang Kelas SDN 15 Segeri Berdasarkan SPK No. 01.149/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2025 Tanggal 10 November 2025, SPD 800/7356/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.972.000,00
110	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab Kantor UPTD Pendidikan Kec. MalundaBerdasarkan SPK No. 01.130/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, SPD 800/7353/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.970.000,00
111	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Ruang Kelas SDN 51 Galung Paara Berdasarkan SPK No. 01.150/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2025 Tanggal 10 November 2025, SPD 800/7351/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	2.484.000,00
112	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehabilitasi Gedung SDN 44 Buttu Tande Berdasarkan SPK No. 01.142/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2025 Tanggal 4 November 2025, SPD 800/7348/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	4.868.000,00
113	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 7 Salabose Berdasarkan SPK No. 01.148/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2025 Tanggal 10 November 2025, SPD 800/7350/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.972.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
114	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 38 Inpres Kota Berdasarkan SPK No. 01.147/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2025 Tanggal 10 November 2025, SPD 800/7354/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	2.484.000,00
115	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SDN 50 Konja Berdasarkan SPK No. 01.125/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 29 Oktober 2025, SPD 800/7341/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.609.000,00
116	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Guru SDN 37 Peledoang Berdasarkan SPK No. 01.120/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, SPD 800/7346/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.942.000,00
117	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 2 Majene Berdasarkan SPK No. 01.183/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, SPD 800/7330/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	2.392.000,00
118	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg.Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Laboratorium Komputer SMPN 5 Majene Berdasarkan SPK No. 01.170/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, SPD 800/7333/LP-SPD/BKAD/2025.(SD: DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.842.000,00
119	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg.Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium IPA SMPN 4 Sendana Berdasarkan SPK No. 01.172/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, SPD 800/7338/LP-SPD/BKAD/2025.(SD: DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.830.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
120	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab Gedung SDN 11 Galung Berdasarkan SPK No. 01.140/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2025 Tanggal 4 November 2025, SPD 800/7349/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.943.000,00
121	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg.Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Laboratorium Biologi SMPN 8 Satap Sendana Berdasarkan SPK No. 01.175/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, SPD 800/7332/LP-SPD/BKAD/2025.(SD: DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.830.000,00
122	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehabilitasi Jamban/Toilet SDN 33 Rawang-Rawang Berdasarkan SPK No. 01.133/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, SPD 800/7358/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.520.000,00
123	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Perpustakaan SD NEGERI 18 DETENG-DETENGBerdasarkan SPK No.01.126/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 29 Oktober 2025, SPD 800/7344/LP-SPD/BKAD/2025. (SD : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.609.000,00
124	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Perpustakaan SDN 49 Passanggrahan Berdasarkan SPK No. 01.124/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 29 Oktober 2025, SPD 800/7340/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.487.000,00
125	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Perpustakaan SDN 6 Kampung Baru Berdasarkan SPK No. 01.128/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 29 Oktober 2025, SPD 800/7343/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.609.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
126	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Penataan Halaman Sekolah SDN 4 Tanjung Batu Berdasarkan SPK No. 01.144/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2025 Tanggal 4 November 2025, SPD 800/7347/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	2.442.000,00
127	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab SDN 34 Rawang-Rawang Berdasarkan SPK No. 01.146/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2025 Tanggal 4 November 2025, SPD 800/7345/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.944.000,00
128	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Perpustakaan SDN 34 Taraweki Berdasarkan SPK No. 01.123/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal29 Oktober 2025, SPD 800/7361/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.600.000,00
129	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Rumah Guru SDN 18 Deteng-Deteng Berdasarkan SPK No. 01.121/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, SPD 800/7360/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.942.000,00
130	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehab.Sedang/Berat Perpustakaan SD NEGERI 51 Galung Paara Berdasarkan SPK No. 01.129/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 29 Oktober 2025,SPD 800/7357/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.609.000,00
131	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg.Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Laboratorium Bahasa SMPN 6 Sendana Berdasarkan SPK No. 01.176/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, SPD 800/7328/LP-SPD/BKAD/2025.(SD: DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.830.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
132	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg.Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 6 Tubo Sendana Berdasarkan SPK No. 01.165/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, SPD 800/7326/LP-SPD/BKAD/2025.(SD: DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.874.000,00
133	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg.Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Laboratorium IPA SMPN 2 Sendana Berdasarkan SPK No. 01.171/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, SPD 800/7337/LP-SPD/BKAD/2025.(SD: DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.830.000,00
134	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg. Pengawasan Rehabilitasi Jamban/Toilet SDN 18 Deteng- Deteng Berdasarkan SPK No. 01.141/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2025 Tanggal 4 November 2025, SPD 800/7352/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.872.000,00
135	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg.Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 6 Majene Berdasarkan SPK No. 01.182/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, SPD 800/7335/LP-SPD/BKAD/2025.(SD: DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.870.000,00
136	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg.Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 2 Pamboang Berdasarkan SPK No. 01.163/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 10 Oktober 2025, SPD 800/7329/LP-SPD/BKAD/2025.(SD: DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	1.874.000,00
137	LS Pembayaran 100% BM Atas Keg.Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Laboratorium IPA SMPN 2 Majene Berdasarkan SPK No. 01.173/SPK/PENGWS/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, SPD 800/7334/LP-SPD/BKAD/2025.(SD: DAU Pendidikan)	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	4.314.000,00
138	LS Pembayaran 5% BM Atas Rehab. Sedang/Berat Laboratorium IPA SMPN 4 Sendana Berdasarkan SPK No. 01.32/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2025 Tanggal 29 September 2025, SPD 800/7464/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. IBNATI	3.362.500,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
139	LS Pembayaran 45% BM Atas Rehab. Sedang/Berat Laboratorium IPA SMPN 4 Sendana Berdasarkan SPK No. 01.32/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2025 Tanggal 29 September 2025, SPD 800/7465/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. IBNATI	30.262.500,00
140	LS Pembayaran 100% BM Atas Kegiatan Pengawasan (Rehab Pembangunan Lapangan Tennes Pelti) Berdasarkan SPK No. 033/SPK/DISDIKPORA-PO/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, SPD 800/7731/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana :DAU Pendidikan)	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	24.642.000,00
141	LS Pembayaran Biaya Pengelolaan SMP (Honorarium Tim Teknis Pekerjaan/PHO) Berdasarkan SK Bupati No. 100.3.3.2/559/VII/Tahun 2025 Tanggal 24 Juli 2025, SPD 800/7423/LP-SPD/BKAD/2025. (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	REK. PENAMPUNGAN GAJI	8.746.528,00
142	LS Pembayaran 45% BM Atas Rehab. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Bahasa SMPN 6 Sendana Berdasarkan SPK No. 01.33/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2025 Tanggal 30 September 2025, SPD 800/7462/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. IBNATI	30.226.500,00
143	LS Pembayaran 5% BM Atas Rehab. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Bahasa SMPN 6 Sendana Berdasarkan SPK No. 01.33/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2025 Tanggal 30 September 2025, SPD 800/7463/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana : DAU Pendidikan)	CV. IBNATI	3.358.500,00
144	LS Pembayaran 100% BM Atas Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 6 Malunda Berdasarkan SPK No.01.28/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/VI/2025 Tanggal 12 Juni 2025, SPD 800/7732/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana :DAU Pendidikan)	CV. ADNAN KREASI DESIGN	6.249.000,00
145	LS Pembayaran 100% BM Atas Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pintu Gerbang SDN 35 Joleng Mea Berdasarkan SPK No.01.95/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/VII/2025 Tanggal 21 Juli 2025, SPD 800/7733/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana :DAU Pendidikan)	CV. SUTIYA UTAMA KARYA	1.950.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
146	LS Pembayaran 100% BM Atas Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 9 Panggalo Berdasarkan SPK No.01.36/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/VI/2025 Tanggal 13 Juni 2025, SPD 800/7730/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana :DAU Pendidikan)	CV. ADNAN KREASI DESIGN	7.384.000,00
147	LS Pembayaran 100% BM Atas Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas SDN 35 Coci Berdasarkan SPK No.01.70/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/VII/2025 Tanggal 10 Juli 2025, SPD 800/7729/LP-SPD/BKAD/2025.(Sumber Dana :DAU Pendidikan)	CV. SUTIYA UTAMA KARYA	7.381.000,00
148	LS Pembayaran BM Atas Kegiatan Biaya Pengelolaan SD (Biaya ATK) Berdasarkan SPMK No. 01.11/PENUN/SPMK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2025,SPD 800/5079/LP-SPD/BKAD/2025 (Sumber Dana : DAU Pendidikan)	TOKO SINAR ILMU	3.711.500,00
149	Pembayaran 5% Atas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas SDN 35 Coci Berdasarkan SPK Nomor : 01.47/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX2025 Tanggal 8September 2025 Dinas Pendidikan Dan Pemuda Olahraga Kab. Majene Sumber Dana DAU TA 2025	PT. BUMI PERSADA ADIN	6.735.000,00
150	Pembayaran 45% Atas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas SDN 35 Coci Berdasarkan SPK Nomor : 01.47/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX2025 Tanggal 8September 2025 Dinas Pendidikan Dan Pemuda Olahraga Kab. Majene Sumber Dana DAU TA 2025	PT. BUMI PERSADA ADIN	60.615.000,00
151	Pembayaran 5% Atas Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SDN 50 KONJA Berdasarkan SPK Nomor : 01.49/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX2025 Tanggal 9 September 2025 Dinas Pendidikan Dan Pemuda Olahraga Kab. Majene Sumber Dana DAU TA 2025		2.907.500,00
152	Pembayaran 45% Atas Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SDN 50 KONJA Berdasarkan SPK Nomor : 01.49/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX2025 Tanggal 9 September 2025 Dinas Pendidikan Dan Pemuda Olahraga Kab. Majene Sumber Dana DAU TA 2025		26.167.500,00
C	**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN**		5.192.500,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
	DAN PERTANAHAN		
1	Pembayaran Belanja Modal Retensi Pemeliharaan 5% Pek. Pengadaan PJU Solar Cell/Tenaga Surya Kecamatan Sendana sesuai SPK No. B-600.2.10.2/995/XI/2025 Tgl. 6/11/2025 & SPD No. 800/7839/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 22/12/2025 Pada Dinas Perkimtan (PAD)	PT. HERFEAN MULA PRATAMA	2.242.500,00
2	Pembayaran Biaya Pengawasan Pengadaan Pemasangan & Pemeliharaan Lampu Jalan Kec. Banggae) sesuai SPK No. B-600.2.10.2/1043.a/XI/2025 Tgl. 18/11/2025 & SPD No. 800/7745/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl. 16/12/2025 Dinas Perkimtan (Sumber Dana : DAU UMUM)	AFINRA KONSULINDO, CV	2.950.000,00
D	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**		681.593.400,00
1	CV. LOLO DADI PERKASA, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (terurai) SIDIK JARI PASIEN WEBCAM	CV LOLO DADI PERKASA	5.261.400,00
2	CV LOLO DADI PERKASA, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (terurai) SIDIK JARI PASIEN WEBCAM	CV LOLO DADI PERKASA	38.850.000,00
3	PT. Labstool WASHER EXTRACTOR, Belanja Modal Alat Pendingin	PT LABSTOOL	624.930.000,00
4	CV.LOLO DADI PERKASA, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	CV LOLO DADI PERKASA	4.273.500,00
5	TROLY OKSIGEN	PT.KENCANA	3.441.000,00
6	AZKA CELL, hp online DEWI	AZKA CELL	4.837.500,00
E	**SEKRETARIAT DAERAH**		17.094.000,00
1	Biaya Belanja Pengadaan Laptop Bupati Pada Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	REK. PENAMPUNGAN GAJI	17.094.000,00
V	**UTANG BELANJA TAK TERDUGA**		**260.000.000,00**
V.1	**TAHUN 2022**		**260.000.000,00**
A	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**		260.000.000,00
1	Pembayara Langsung (LS) Biaya Tidak Terduga Pelaksanaan Pembangunan Drainase Warga Dusun RUI/AHOLEANG Desa Mekatta Kec. Malunda Kab. Majene SK BUPATI Nomor 1116/HK/KEP-BUP/XII/2002 Sumber Dan DAU		200.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR JENIS UTANG, TAHUN DAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	JENIS BELANJA	REKAN	NILAI (Rp)
2	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga berupa pembuatan Talud/Bronjong pada di Desa Mekatta Kec. Malunda Kab Majene sesuai SK Buapti Nomor 1120/HK/KEP-BUP/XII/2022 tgl 19 Desember 2022, Sumber Dana DAU		60.000.000,00
TOTAL			**50.171.321.681,00**

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
SALDO UTANG BELANJA PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2024		2025					SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2025	
				PEMBAYARAN UTANG		PENGHAPUSAN UTANG	PENGAKUAN UTANG BARU			
		APBD	BLUD	APBD	BLUD		APBD	BLUD	APBD	BLUD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA	14.121.922.740,00	-	2.459.051.494,00	-	-	567.712.995,00	-	12.230.584.241,00	-
2	DINAS KESEHATAN	8.567.735.657,00	-	7.670.120.086,00	-	-	2.655.755.086,00	-	3.553.370.657,00	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	17.178.767.256,00	-	13.523.354.418,00	-	-	14.752.705.896,00	-	18.408.118.734,00
4	BANGGAE I	-	4.620.568,00	-	4.620.568,00	-	-	42.268.268,00	-	42.268.268,00
5	BANGGAE II	-	6.863.500,00	-	6.863.500,00	-	-	16.085.550,00	-	16.085.550,00
6	TOTOLI	-	31.144.087,00	-	31.144.087,00	-	-	10.716.537,00	-	10.716.537,00
7	LEMBANG	-	7.040.793,00	-	7.040.793,00	-	-	63.290.701,00	-	63.290.701,00
8	SENDANA I	-	85.737.886,00	-	85.737.886,00	-	-	288.411.817,00	-	288.411.817,00
9	TAMMERODO	-	5.950.000,00	-	5.950.000,00	-	-	63.873.200,00	-	63.873.200,00
10	SENDANA II	-	30.591.860,00	-	30.591.860,00	-	-	137.203.542,00	-	137.203.542,00
11	SALUTAMBUNG	-	5.914.400,00	-	5.914.400,00	-	-	6.763.100,00	-	6.763.100,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
SALDO UTANG BELANJA PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2024		2025					SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2025	
				PEMBAYARAN UTANG		PENGHAPUSAN UTANG	PENGAKUAN UTANG BARU			
		APBD	BLUD	APBD	BLUD		APBD	BLUD	APBD	BLUD
12	ULUMANDA	-	2.984.094,00	-	2.984.094,00	-	-	-	-	-
13	MALUNDA	-	128.432.365,00	-	128.432.365,00	-	-	124.111.200,00	-	124.111.200,00
14	PAMBOANG	-	5.212.208,00	-	5.212.208,00	-	-	164.472.507,00	-	164.472.507,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	5.659.280.594,00	-	3.086.779.669,00	-	4.480.000,00.	1.596.923.400,00	-	4.164.944.325,00	-
16	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	926.359.245,00	-	659.140.091,00	-	-	9.637.500,00	-	276.856.654,00	-
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	38.418.400,00	-	-	-	-	1.175.200,00	-	39.593.600,00	-
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	106.982.620,00	-	57.395.820,00	-	-	5.889.960,00	-	55.476.760,00	-
19	DINAS SOSIAL	177.690.000,00	-	60.760.000,00	-	-	67.057.500,00	-	183.987.500,00	-
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	59.272.973,00	-	-	-	-	75.000.000,00	-	134.272.973,00	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	208.506.860,00	-	158.602.860,00	-	-	52.847.400,00	-	102.751.400,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
SALDO UTANG BELANJA PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2024		2025					SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2025	
				PEMBAYARAN UTANG		PENGHAPUSAN UTANG	PENGAKUAN UTANG BARU			
		APBD	BLUD	APBD	BLUD		APBD	BLUD	APBD	BLUD
	PERLINDUNGAN ANAK									
22	DINAS KETAHANAN PANGAN	98.032.660,00	-	55.561.860,00	-	-	-	-	42.470.800,00	-
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	450.826.900,00	-	242.963.700,00	-	-	75.600.000,00	-	283.463.200,00	-
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	591.835.600,00	-	290.847.800,00	-	-	5.000.000,00		305.987.800,00	-
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	86.548.900,00	-	46.240.000,00	-	-	10.142.880,00		50.451.780,00	-
26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35.886.900,00	-	3.450.000,00	-	-	127.299.996,00		159.736.896,00	-
27	DINAS PERHUBUNGAN	42.823.200,00	-	21.034.000,00	-	-	-		21.789.200,00	-
28	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	179.625.012,00	-	92.441.712,00	-	-	-		87.183.300,00	-
29	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN,	1.093.771.719,00	-	1.000.350.579,00	-	-	3.926.600,00		97.347.740,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
SALDO UTANG BELANJA PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2024		2025					SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2025	
				PEMBAYARAN UTANG		PENGHAPUSAN UTANG	PENGAKUAN UTANG BARU			
		APBD	BLUD	APBD	BLUD		APBD	BLUD	APBD	BLUD
	DAN PERDAGANGAN									
30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	134.211.700,00	-	90.787.100,00	-	-	300.000,00		43.724.600,00	-
31	DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	744.491.038,00	-	514.464.326,00	-	-	-		230.026.712,00	-
32	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	94.257.240,00	-	51.128.300,00	-	-	400.000,00		43.528.940,00	-
33	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	991.962.700,00	-	186.747.500,00	-	-	9.142.900,00		814.358.100,00	-
34	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, & PERKEBUNAN	1.484.022.548,00	-	910.851.278,00	-	-	294.774.240,00		867.945.510,00	-
35	SEKRETARIAT DAERAH	2.184.928.627,00	-	1.136.282.693,00	-	-	385.398.252,00		1.434.044.186,00	-
36	INSPEKTORAT DAERAH	754.958.430,00	-	221.907.790,00	-	-	356.010.850,00		889.061.490,00	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	848.209.732,00	-	341.892.812,00	-	-	-		506.316.920,00	-
38	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.897.249.790,00	-	6.967.285.185,00	-	1,00	-		1.929.964.604,00	-
39	BADAN PENDAPATAN DAERAH	482.483.800,00	-	87.139.800,00	-	-	16.497.750,00		411.841.750,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
SALDO UTANG BELANJA PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2024		2025					SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2025	
				PEMBAYARAN UTANG		PENGHAPUSAN UTANG	PENGAKUAN UTANG BARU			
		APBD	BLUD	APBD	BLUD		APBD	BLUD	APBD	BLUD
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.700.200,00	-	1.000.000,00	-	-	136.000.000,00		156.700.200,00	-
41	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	88.129.140,00	-	27.787.840,00	-	-	8.000.000,00		68.341.300,00	-
42	SEKRETARIAT DPRD	1.918.696.382,00	-	1.438.377.754,00	-	-	414.611.900,00		894.930.528,00	-
43	KECAMATAN BANGGAE & KELURAHAN	154.556.400,00	-	64.036.000,00	-	-	2.900.000,00		93.420.400,00	-
44	KECAMATAN BANGGAE TIMUR & KELURAHAN	43.312.351,00	-	8.107.530,00	-	501.821,00	72.081.920,00		106.784.920,00	-
45	KECAMATAN PAMBOANG	2.508.000,00	-	-	-	-	6.898.800,00		9.406.800,00	-
46	KECAMATAN SENDANA	106.610.404,00	-	40.830.000,00	-	-	54.806.000,00		120.586.404,00	-
47	KECAMATAN TAMMERODDO	28.337.500,00	-	-	-	-	22.000.000,00		50.337.500,00	-
48	KECAMATAN TUBO	24.261.000,00	-		-	-	16.540.000,00		40.801.000,00	-
49	KECAMATAN MALUNDA	74.590.832,00	-	29.661.500,00	-	-	36.360.000,00	-	81.289.332,00	-
50	KECAMATAN ULUMANDA	34.243.800,00	-	12.320.000,00	-	-	14.100.000,00	-	36.023.800,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
SALDO UTANG BELANJA PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2024		2025					SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2025	
				PEMBAYARAN UTANG		PENGHAPUSAN UTANG	PENGAKUAN UTANG BARU			
		APBD	BLUD	APBD	BLUD		APBD	BLUD	APBD	BLUD
51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	451.144.494,00	-	283.850.000,00	-	-	59.008.209,00	-	226.302.703,00	-
	JUMLAH	**52.010.386.088,00**	**17.493.259.017,00**	**28.319.197.079,00**	**13.837.846.179,00**	**4.981.822,00**	**7.159.799.338,00**	**15.669.902.318,00**	**30.846.006.525,00**	**19.325.315.156,00**



Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 45 Majene
Provinsi Sulawesi Barat